



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

TA. 2020 AUDITED



KEMENTERIAN
SOSIAL

BA.027

#KEMENSOS
Hadir

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Sosial adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Sosial. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2021

MENTERI SOSIAL RI,


MENTRI RISMAHARINI



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Nota Kesepakatan Tripartit	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	49
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	116
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	143
F. Pengungkapan-pengungkapan Penting Lainnya	154

VI. LAMPIRAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN ANGGARAN 2020 *Audited*

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI untuk Tahun Anggaran 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2021
Inspektur Jenderal,



Dadang Iskandar



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Sosial Bagian Anggaran 027 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2021

MENTERI SOSIAL RI,


TRI RISM HARINI 

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL (BA 027) TAHUN 2020
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (AUDITED)**

Nomor : NKF-027/70/PB.6/2021

Pada hari ini, **Rabu tanggal 28 April 2021**, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Kementerian Sosial (BA 027) Tahun 2020**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Kementerian Sosial (BA 027) Tahun 2020** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2020 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **Kementerian Sosial** menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara) **paling lambat tanggal 5 Mei 2021**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Sosial RI
Biro Keuangan
Selaku Tim Penyusun LKKL



A Mira Riyati Kurniasih
NIP 19680511 199303 2 001

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Bambang Sulistyono
NIP 19710809 199703 1 001

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Feltriano Singawiria
NIP 196305216 198603 1 001

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK



Denny Kurnia
NIP 19780415 200708 1 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 A. PENDAPATAN

Kode Bagian Anggaran : 027
 Uraian Bagian Anggaran : KEMENTERIAN SOSIAL

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2+6	10 = 3+8	11 = 9-10
41. Pendapatan Pemajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.483.209.951,084	281.500,000	2.482.928.451,084	18.964.250,000	-	-	-	2.464.245.701,084	281.500,000	2.463.964.201,084
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422. Pendapatan dari KND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425. Pendapatan PNBP Lainnya	2.483.209.951,084	281.500,000	2.482.928.451,084	18.964.250,000	-	-	-	2.464.245.701,084	281.500,000	2.463.964.201,084
424. Pendapatan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	2.483.209.951,084	281.500,000	2.482.928.451,084	18.964.250,000	-	-	-	2.464.245.701,084	281.500,000	2.463.964.201,084

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+6-7	11 = 4+8-9	12 = 10-11
51	Belanja Pegawai	445.668.072,727	101.762,842	445.566.309,885	-	-	-	-	445.668.072,727	101.762,842	445.566.309,885
52	Belanja Barang dan Jasa	5.225.610.598,491	10.186.509,445	5.215.424.089,046	-	-	-	-	5.225.610.598,491	10.186.509,445	5.215.424.089,046
53	Belanja Modal	247.360.454,838	19.524,501	247.360.930,337	-	-	-	-	247.360.454,838	19.524,501	247.360.930,337
54	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Belanja Bantuan Sosial	126.903.181.528,915	2.504.125.369,363	124.399.056.159,552	-	-	18.964.250,000	-	126.903.181.528,915	2.523.089.619,363	124.380.091.909,552
58	Belanja Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA	132.821.840.654,971	2.514.433.166,151	130.307.407.488,820	-	-	18.964.250,000	-	132.821.840.654,971	2.533.397.416,151	130.288.443.238,820

KEMENTERIAN/LEMBAGA
 KEMENTERIAN SOSIAL

Mira Riyati Kurniasih
 Mira Riyati Kurniasih
 NIP 19680511 199303 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN
 DIREKTORAT ANGGARAN DAN
 LAPORAN KEUANGAN

Fabriano Singawiria
 Fabriano Singawiria
 NIP 19650216 198603 1 001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Denny Kurnia

Denny Kurnia
 NIP 19780415 200708 1 001

LAMPIRAN BELANJA PENANGANAN COVID KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN YANG MEMADAI PADA LKRI

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL
 BAGIAN ANGGARAN : 027

PAGU KEMENTERIAN/LEMBAGA	BELANJA BARANG						BELANJA MODAL				BELANJA BANTUAN SOSIAL				KETERANGAN
	AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER				
	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH			
Rp 129.437.706.214.200	521131	Rp 24.361.876.917	521211	Rp 53.786.000	532119	Rp 987.600.000	571114	Rp 125.000.000	574111	Rp 28.416.478.396.110	571115	Rp 39.395.597.722.066	*biaya pulsa telepon/ data internet untuk mendukung ASN yang menjalani WFH (Work From Home) *biaya pelaksanaan test Covid-19 *biaya pengadaan masker/hand sanitizer *biaya penyemprotan desinfektan di area kantor *biaya pengadaan termogun yang nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin *pengadaan lisensi aplikasi video conference *pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh untuk para ASN *biaya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial Covid-19 (pengadaan goody bag & biaya pengiriman)		
	521241	Rp 2.077.659.053.163	521213	Rp 49.800.000	533119	Rp 1.011.448.264	571115	Rp -	575111	Rp -	575111	Rp -			
	521731	Rp -	521219	Rp 12.462.850.950	536118	Rp -	572114	Rp -	572115	Rp -	572115	Rp -			
	521841	Rp 7.429.130.080			537122	Rp -	572115	Rp -	573114	Rp -	573115	Rp -			
	522192	Rp 24.568.235.417			537123	Rp -	573114	Rp -	573115	Rp 4.505.850.000.000	574114	Rp 8.266.540.473.248			
	523114	Rp 138.268.500			537125	Rp -	574114	Rp -	574115	Rp -	574115	Rp -			
	524115	Rp 18.548.796.283					574115	Rp -	575114	Rp 36.174.411.280.000	575115	Rp -			
	525152	Rp -					575115	Rp -	576114	Rp -	576115	Rp -			
	525153	Rp -					576115	Rp 6.726.301.483.944	576116	Rp -					
	525154	Rp -													
	525155	Rp -													
	525156	Rp -													
	526131	Rp -													
	526132	Rp -													
	526321	Rp 9.238.750.000													
	526322	Rp 34.264.774.348													
	526323	Rp -													
SUB TOTAL	Rp	2.196.208.884.708	Rp	12.566.496.950	Rp	1.999.048.264	D		Rp	55.673.228.237.192	Rp	67.812.076.118.176			
TOTAL PER JENIS BELANJA	Rp		Rp	2.208.775.321.658	Rp		1.999.048.264	Rp			Rp	123.485.304.355.368			
TOTAL BELANJA												Rp	125.696.078.725.290		

KEMENTERIAN/LEMBAGA
 KEMENTERIAN SOSIAL

Mira Riyati Kumlasih
 NIP 19680511 199303 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN
 DIREKTORAT PERBENDAHARAAN

Denny Kumla
 NIP 19780415 200708 1 001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Denny Kumla
 NIP 19780415 200708 1 001

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2020
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
NOMOR: NKF-027/70/PB.6/2021
TANGGAL: 28 APRIL 2021

K/L : KEMENTERIAN SOSIAL
BA : 027

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED - REVAL		ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Selera kas	2.163.408.666.931	8.198.787.709	113.475.282.572	-	-	2.058.132.172.068
Kas pada BLU	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	71.528.400	-	-	-	-	71.528.400
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-	-	-	-
Piutang Perpajakan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-	-	-	-	-	-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	368.756.333.861	203.147.648	170.452.648	-	-	368.789.028.861
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	(1.843.781.670)	37.000	200.475	-	-	(1.843.945.145)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	366.912.552.191	203.184.648	170.653.123	-	-	366.945.083.716
Bagian Lancar TPA	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	2.033.634.771	-	-	-	-	2.033.634.771
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	(10.168.174)	-	-	-	-	(10.168.174)
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	2.023.466.597	-	-	-	-	2.023.466.597
Piutang dari Kegiatan BLU	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-	-	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	-	-	-
Persediaan	479.127.474.488	34.655.480.203	33.597.560.251	-	-	480.185.394.440
Jumlah Aset Lancar	3.011.544.788.607	43.057.452.560	147.243.495.946	-	-	2.907.358.745.221
ASET TETAP						
Tanah	18.566.599.868.044	-	1.053.484.452	-	-	18.565.546.383.592
Peralatan dan Mesin	2.033.618.245.700	14.021.853.050	10.004.717.525	-	-	2.037.635.381.225

Gedung dan Bangunan	2.134.245.630.214	4.260.301.212	3.841.379.856	7.921.778.000	6.557.813.000	2.136.028.516.570
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	104.746.815.058	-	-	212.789.000	131.541.000	104.828.063.058
Aset Tetap Lainnya	22.818.085.114	-	-	-	-	22.818.085.114
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.194.436.815	2.407.394.356	2.407.394.356	-	-	2.194.436.815
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.682.507.405.501)	63.536.000	557.799.624	-	-	(1.683.001.669.125)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(283.484.479.044)	6.581.245.220	6.816.676.699	1.296.830.460	1.426.774.924	(283.649.854.987)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(40.438.473.055)	-	-	675.219.980	726.584.123	(40.489.837.198)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.565.799.913)	-	-	-	-	(3.565.799.913)
Jumlah Aset Tetap	20.854.226.923.432	27.334.329.838	24.481.452.512	10.106.617.440	8.842.713.047	20.858.343.705.151
PIUTANG JANGKA PANJANG						
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-	-	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	446.658.693	-	-	-	-	446.658.693
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(2.233.293)	-	-	-	-	(2.233.293)
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	444.425.400	-	-	-	-	444.425.400
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka	-	-	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	444.425.400	-	-	-	-	444.425.400
ASET LAINNYA						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	109.489.949.686	-	71.180.450	-	-	109.418.769.236
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	66.888.973.054	-	-	-	-	66.888.973.054
Dana Penjaminan	-	-	-	-	-	-
Dana Keliaan BLU	-	-	-	-	-	-
Aset Lain-lain	32.144.606.305	71.180.450	71.180.450	-	-	32.144.606.305
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ke3	-	-	-	-	-	-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(28.484.150.200)	-	-	-	-	(28.484.150.200)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(92.960.853.259)	17.795.112	-	-	-	(92.943.058.147)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(158.272.552)	-	-	-	-	(158.272.552)
Jumlah Aset Lainnya	86.920.253.034	88.975.562	142.360.900	-	-	86.866.867.696
JUMLAH ASET	23.953.136.390.473	70.480.757.960	171.867.309.358	10.106.617.440	8.842.713.047	23.853.013.743.468
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang kepada Pihak Ketiga	10.929.896.272	8.152.069.320	7.327.644.946	-	-	10.105.471.898
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	21.131.781	-	-	-	-	21.131.781
Hibah Yang Belum Disahkan	7.175.000	-	163.853.400	-	-	171.028.400
Uang Muka dari KPPN	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
Pendapatan Diterima Dimuka	441.580.113	-	-	-	-	441.580.113
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.400.883.166	8.152.069.320	7.491.498.346	-	-	10.740.312.192
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	11.400.883.166	8.152.069.320	7.491.498.346	-	-	10.740.312.192
EKUITAS	23.941.735.507.307	62.328.688.640	164.375.811.012			23.842.273.431.276
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	23.953.136.390.473	70.480.757.960	171.867.309.358	-	-	23.853.013.743.468

Jakarta, April 2021
Kementerian/Lembaga

Badan Pemeriksa Keuangan




Mira Riyati Kurniasih
NIP 19680511 199303 2 001

Denny Kurnia
NIP 19780415 200708 1 001

Ditjen Kekayaan Negara



Bambang Sulistyono
NIP 19710209 199703 1 001

Ditjen Perbendaharaan



Denny Febriano Singawiria
NIP 19650216 198603 1 001

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

K/L : KEMENTERIAN SOSIAL RI
 BA : 027

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED		KOREKSI REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpejakan	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Penerimaan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	57.898.261.326	-	8.198.787.709	-	-	66.097.049.035
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	57.898.261.326	-	8.198.787.709	-	-	66.097.049.035
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	57.898.261.326	-	8.198.787.709	-	-	66.097.049.035
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	445.258.057.022	1.835.829	481.000	-	-	445.259.411.851
Beban Persediaan	37.528.095.819	10.852.397.935	404.450.500	-	-	47.976.043.254
Beban Barang dan Jasa	4.551.768.245.984	155.329.000	6.589.377.250	-	-	4.545.334.197.734
Beban Pemeliharaan	72.630.260.426	-	236.120.000	-	-	72.394.140.426
Beban Perjalanan Dinas	434.716.597.827	-	-	-	-	434.716.597.827
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	153.272.953.322	102.233.010	56.893.000	-	-	153.318.253.332
Beban Bunga	-	-	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	122.380.864.203.704	149.020.343.340	54.484.567.342	-	-	122.475.399.979.702
Beban Transfer	-	-	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	246.869.894.092	7.536.135.661	7.038.245.573	-	-	247.367.784.180
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	54.512.237	200.475	37.000	-	-	54.675.712
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	128.322.962.620.433	167.668.475.250	68.810.171.665	-	-	128.421.821.124.018

SURPLUS/(DEFSIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL					
KEGIATAN NON OPERASIONAL	(128.265.064.593.107)	167.668.475.250	77.008.959.374	-	(128.395.724.074.983)
SURPLUS/(DEFSIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.290.469.766	-	-	-	1.290.469.766
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	617.162.536	-	-	-	617.162.536
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	673.307.230	-	-	-	673.307.230
SURPLUS/(DEFSIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFSIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	341.643.614.772	18.974.984.100	14.730.350.000	-	337.388.980.672
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	137.604.793.368	-	681.159.275	-	136.923.634.093
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	204.038.821.404	18.974.984.100	15.411.509.275	-	200.475.346.579
SURPLUS/(DEFSIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	204.712.128.634	18.974.984.100	15.411.509.275	-	201.148.653.809
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFSIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFSIT) LO	(128.060.352.430.473)	186.643.459.350	92.420.468.649	-	(128.154.575.421.174)

Jakarta, April 2021
Kementerian/Lembaga


A Mira Riyati Kurniasih
NIP 19680511 199303 2 001

Badan Pemeriksa Keuangan


Denny Kurnia
NIP 19780415 200708 1 001



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 NOMOR: NKF-027/70/PB.6/2021
 TANGGAL: 28 APRIL 2021

LAMPIRAN BEBAN PENANGANAN COVID KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN YANG MEMADAI PADA LKKL
 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL
 BAGIAN ANGGARAN : 027

BEBAN BARANG				BEBAN BANTUAN SOSIAL				KETERANGAN
AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		
AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	
521131	Rp 24.397.212.017	521211	Rp 46.860.000	571114	Rp -			*biaya pulsa telepon/ data internet untuk mendukung ASN yang menjalani WFH (Work From Home) *biaya pelaksanaan test Covid-19 *biaya pengadaan masker/hand sanitizer *biaya penyemprotan desinfektan di area kantor *biaya pengadaan thermogun yang nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin *pengadaan lisensi aplikasi video conference *pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh untuk para ASN *biaya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial Covid-19 (pengadaan goody bag & biaya pengiriman)
521241	Rp 2.085.318.430.288			572114	Rp -			
521731	Rp -			573114	Rp -			
522192	Rp 24.563.060.417			574114	Rp 36.320.608.388.361			
523114	Rp 138.268.500			575114	Rp 73.767.150.417.671			
524115	Rp 18.548.796.283			576114	Rp -			
525152	Rp -			576116	Rp -			
525154	Rp -							
525155	Rp -							
525156	Rp -							
526321	Rp 9.238.750.000							
526131	Rp -							
526321	Rp -							
526323	Rp -							
SUB TOTAL	Rp 2.162.204.517.505		Rp 46.860.000		Rp 110.087.758.806.032		0	
TOTAL PER JENIS BELANJA	Rp	2.162.251.377.505	Rp	110.087.758.806.032				
TOTAL BELANJA				Rp	112.250.010.183.537			

KEMENTERIAN/LEMBAGA
 KEMENTERIAN SOSIAL



Mira Riyati Kurniasih
 NIP 19680511 199303 2 001



Denny Febrino Singawiria
 NIP 19630216 198603 1 001



Bambang Sulistyono
 NIP 19710809 199703 1 001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Denny Kurnia
 NIP 19780415 200708 1 001

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2020
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
NOMOR: NKF-027/70/PB.6/2021
TANGGAL: 28 APRIL 2021

K/L : KEMENTERIAN SOSIAL
BA : 027

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	23.969.492.796.843					23.969.492.796.843
SURPLUS/DEFISIT LD	(128.060.352.430.473)	186.643.459.350	92.420.468.649	-	-	(128.154.575.421.174)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS						
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset	273.057.973.980	-	-	139.362.280	4.750.581.400	277.669.193.080
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(451.065.165)	1.771.233.707	1.398.297.216	7.552.356.422	4.580.260.155	(3.786.097.923)
Koreksi Atas Reklasifikasi	(1.740.803.649)	-	-	234.638.400	208.346.528	(1.787.095.521)
Koreksi Lain-lain	37.306.738	6.495.429.820	6.450.000	-	-	(6.451.673.082)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	270.903.411.884	8.266.663.527	1.404.747.216	7.926.357.102	9.549.188.083	265.664.326.554
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	127.761.691.729.053	34.047.337.116	34.420.273.687	554.696.607	181.760.116	127.761.691.729.053
Ditunjukkan ke Entitas Lain	130.132.464.876.991	18.964.250.000	-	-	-	130.113.500.626.991
Diterima dari Entitas Lain	(2.482.928.451.084)	-	18.964.250.000	-	-	(2.463.964.201.084)
Transfer Keluar	(188.631.965.531)	14.901.327.000	-	-	-	(183.533.292.531)
Transfer Masuk	160.608.381.953	181.760.116	15.456.023.607	554.696.607	181.760.116	175.509.708.953
Penggesahan Hibah Langsung	120.357.912.113	-	-	-	-	120.357.912.113
Penggesahan Hibah Langsung TAYL	-	-	-	-	-	-
Penggesahan Pengembalian Hibah Langsung	(179.025.389)	-	-	-	-	(179.025.389)
Setoran Surplus BLU	-	-	-	-	-	-
KENABIKAN/PENURJUAN ENTITAS	(27.757.289.536)	228.957.459.993	128.245.089.472	8.481.053.709	9.730.948.199	(127.219.365.567)
EKUITAS AKHIR	23.941.735.507.307	228.957.459.993	128.245.089.472	8.481.053.709	9.730.948.199	23.842.273.431.276

Jakarta, April 2021
Kementerian/Lembaga


A Mira Riyati Kurniasih
NIP 19680511 199303 2 001 n.

Badan Kekayaan Negara



Badan Pemeriksa Keuangan


Denny Kurnia
NIP 19780415 200708 1 001

Badan Perbendaharaan



JURNAL USULAN KOREKSI LK KEMENSOS 2020 AUDITED

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
SATKER KONSOLIDASI						
1	Satker Konsolidasi	313221	Jurnal Manual	Transfer Masuk	181.636.234	
	Satker Konsolidasi	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		181.636.234
				<i>(Jurnal balik pada satker konsolidasian atas perbaikan data revaluasi aset tetap pada satker Sekretariat Jenderal)</i>		
2	Satker Konsolidasi	391116	Jurnal Manual	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	554.696.607	
	Satker Konsolidasi	313221		Transfer Masuk		554.696.607
				<i>(Jurnal balik pada satker konsolidasian atas perbaikan data revaluasi aset tetap pada satker Sekretariat Jenderal)</i>		
3	Satker Konsolidasi	313221	Jurnal Manual	Transfer Masuk	123.882	
	Satker Konsolidasi	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		123.882
				<i>(Jurnal balik pada satker konsolidasian atas perbaikan data revaluasi aset tetap pada satker Sekretariat Jenderal)</i>		
UKE I DITJEN DAYASOS						
				Koreksi atas belanja persediaan dan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp14.878.512.000 untuk Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian Sosial yang dalam penguasaan satker Sekretariat Jenderal		
4	Dit PSDBS	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	10.819.825.000	
	Dit PSDBS	117911		Persediaan yang Belum Diregister		10.819.825.000
				<i>(Jurnal aplikasi persediaan atas pengakuan persediaan dari hibah langsung dalam negeri melalui menu pembelian)</i>		
5	Dit PSDBS	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang Belum Diregister	10.819.825.000	
	Dit PSDBS	574111		Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang		10.819.825.000
				<i>(Pengakuan Persediaan dari Hibah Langsung dalam Bentuk Uang yang disalurkan kepada Satgas COVID-19 Kementerian Sosial)</i>		
6	Dit PSDBS	132111	Jurnal Aplikasi	Peralatan dan Mesin	4.081.502.000	
	Dit PSDBS	132211		Peralatan dan Mesin Belum Diregister		4.081.502.000
				<i>(Jurnal aplikasi SIMAK BMN atas pengakuan peralatan dan mesin dari hibah langsung dalam negeri melalui menu pembelian)</i>		
7	Dit PSDBS	132211	Jurnal Manual	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	4.081.502.000	
	Dit PSDBS	574111		Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang		4.081.502.000
				<i>(Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Hibah Langsung dalam Bentuk Uang yang disalurkan kepada Satgas COVID-19 Kementerian Sosial)</i>		
8	Dit PSDBS	313211	Jurnal Aplikasi	Transfer Keluar	10.819.825.000	
	Dit PSDBS	117111		Barang Konsumsi		10.819.825.000
				<i>(Jurnal transfer keluar Persediaan ke satker Sekretariat Jenderal)</i>		
9	Dit PSDBS	313211	Jurnal Aplikasi	Transfer Keluar	4.081.502.000	
	Dit PSDBS	132111		Peralatan dan Mesin		4.081.502.000
				<i>(Jurnal transfer keluar Aset Peralatan dan Mesin ke satker Sekretariat Jenderal)</i>		
10	Dit PSDBS	117911	Jurnal Manual	Persediaan Belum Diregister	163.853.400	
	Dit PSDBS	218211		Hibah Langsung yang Belum Disahkan		163.853.400
				<i>(Jurnal Koreksi BPK atas barang HTT yang belum dicatat karena belum diregister sebesar Rp163.853.400)</i>		
11	Dit PSDBS	117128	Jurnal Aplikasi	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	163.853.400	
	Dit PSDBS	117911		Persediaan yang Belum Diregister		163.853.400
				<i>(Jurnal aplikasi terhadap koreksi BPK atas barang HTT yang belum dicatat karena belum diregister sebesar Rp163.853.400)</i>		
UKE I SEKRETARIAT JENDERAL						
				Koreksi atas penerimaan hibah dalam bentuk persediaan dan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp14.878.512.000 yang berasal dari satker Dit PSDBS untuk Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian Sosial yang dalam penguasaan satker Sekretariat Jenderal		
12	Sekretariat Jenderal	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	10.819.825.000	
	Sekretariat Jenderal	313221		Transfer Masuk		10.819.825.000
				<i>(Penerimaan Persediaan dari Dit. PSDBS atas Persediaan Hibah yang akan diserahkan pada Satgas Penanganan COVID-19 Kementerian Sosial RI)</i>		
13	Sekretariat Jenderal	593111	Jurnal Aplikasi	Beban Persediaan konsumsi	10.819.825.000	
	Sekretariat Jenderal	117111		Barang Konsumsi		10.819.825.000
				<i>(Penyerahan Persediaan ke satgas Penanganan COVID-19 Kementerian Sosial RI)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
14	Sekretariat Jenderal	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	404.450.500	
	Sekretariat Jenderal	593111		Beban Persediaan konsumsi		404.450.500
				<i>(Opsik atas adanya Persediaan Konsumsi untuk Penanganan Pandemi Covid-19)</i>		
15	Sekretariat Jenderal	132111	Jurnal Aplikasi	Peralatan dan Mesin	4.081.502.000	
	Sekretariat Jenderal	313221		Transfer Masuk		4.081.502.000
				<i>(Penerimaan Peralatan dan Mesin dari Dit. PSDBS atas Aset PM untuk penanganan COVID-19 di lingkungan Kementerian Sosial RI)</i>		
16	Sekretariat Jenderal	591111	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	408.150.200	
	Sekretariat Jenderal	137111		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		408.150.200
				<i>(Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Dit. PSDBS atas Aset PM untuk penanganan COVID-19 di lingkungan Kementerian Sosial RI)</i>		
				Koreksi atas transaksi revaluasi aset tetap pada pos akumulasi penyusutan yang sebelumnya membentuk jurnal transfer masuk, seharusnya membentuk koreksi nilai aset tetap non revaluasi		
17	Sekretariat Jenderal	137211	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	181.636.234	
	Sekretariat Jenderal	313221		Transfer Masuk		181.636.234
				<i>(Jurnal Balik atas transaksi Koreksi Transfer Masuk akibat adanya kesalahan jurnal kirim revaluasi aset tetap)</i>		
18	Sekretariat Jenderal	313221	Jurnal Aplikasi	Transfer Masuk	554.696.607	
	Sekretariat Jenderal	137311		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		554.696.607
				<i>(Jurnal Balik atas transaksi Koreksi Transfer Masuk akibat adanya kesalahan jurnal kirim revaluasi aset tetap)</i>		
19	Sekretariat Jenderal	137312	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan irigasi	123.882	
	Sekretariat Jenderal	313221		Transfer Masuk		123.882
				<i>(Jurnal Balik atas transaksi Koreksi Transfer Masuk akibat adanya kesalahan jurnal kirim revaluasi aset tetap)</i>		
20	Sekretariat Jenderal	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.070.445	
	Sekretariat Jenderal	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		3.070.445
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		
21	Sekretariat Jenderal	137211	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.436.472	
	Sekretariat Jenderal	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1.436.472
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		
22	Sekretariat Jenderal	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	42.903.002	
	Sekretariat Jenderal	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		42.903.002
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		
23	Sekretariat Jenderal	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	786.340	
	Sekretariat Jenderal	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		786.340
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		
24	Sekretariat Jenderal	137311	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	518.684.876	
	Sekretariat Jenderal	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		518.684.876
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		
25	Sekretariat Jenderal	137311	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	36.011.731	
	Sekretariat Jenderal	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		36.011.731
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		
26	Sekretariat Jenderal	137312	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.204.173	
	Sekretariat Jenderal	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1.204.173
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		
27	Sekretariat Jenderal	137312	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.814.918	
	Sekretariat Jenderal	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1.814.918
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
28	Sekretariat Jenderal	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.142.973	
	Sekretariat Jenderal	137312		Akumulasi Penyusutan Irigasi		3.142.973
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi atas Transaksi Koreksi Transfer Masuk)</i>		
29	Sekretariat Jenderal	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	6.362.281.000	
	Sekretariat Jenderal	133111		Gedung dan Bangunan		6.362.281.000
				<i>(Jurnal Balik Reval)</i>		
30	Sekretariat Jenderal	137211	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	203.619.805	
	Sekretariat Jenderal	591211		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		203.619.805
				<i>(Jurnal Balik Reval)</i>		
31	Sekretariat Jenderal	137211	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	803.547.985	
	Sekretariat Jenderal	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		803.547.985
				<i>(Jurnal Balik Reval)</i>		
32	Sekretariat Jenderal	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	428.446.241	
	Sekretariat Jenderal	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		428.446.241
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi)</i>		
33	Sekretariat Jenderal	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.844.369	
	Sekretariat Jenderal	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		109.844.369
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi)</i>		
34	Sekretariat Jenderal	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	2.705.039.000	
	Sekretariat Jenderal	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		2.705.039.000
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi)</i>		
35	Sekretariat Jenderal	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	42.537.483	
	Sekretariat Jenderal	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		42.537.483
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi)</i>		
36	Sekretariat Jenderal	137211	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	93.775.436	
	Sekretariat Jenderal	591211		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		93.775.436
				<i>(Jurnal Koreksi Revaluasi)</i>		
				UKE I DITJEN DAYASOS		
				Kekurangan pembayaran gaji rapel kenaikan pangkat pengabdian bulan Oktober 2020 an Heri Budiyo yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri, Tunjangan Umum, Tunjangan PPh, dan Pembulatan		
37	Sekretariat Ditjen Dayasos	511111	Jurnal Manual	Beban Gaji Pokok PNS	196.700	
	Sekretariat Ditjen Dayasos	212111		Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		196.700
				<i>(Kekurangan Pembayaran Gaji Pokok dikarenakan Rapel Kenaikan Pangkat Pengabdian Oktober 2020 an Heri Budiyo)</i>		
38	Sekretariat Ditjen Dayasos	511121	Jurnal Manual	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	19.670	
	Sekretariat Ditjen Dayasos	212111		Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		19.670
				<i>(Kekurangan Pembayaran Tunjangan Istri dikarenakan Rapel Kenaikan Pangkat Pengabdian Oktober 2020 an Heri Budiyo)</i>		
39	Sekretariat Ditjen Dayasos	511151	Jurnal Manual	Beban Tunjangan Umum PNS	5.000	
	Sekretariat Ditjen Dayasos	212111		Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		5.000
				<i>(Kekurangan Pembayaran Tunjangan Umum Rapel Kenaikan Pangkat Pengabdian Oktober 2020 an Heri Budiyo)</i>		
40	Sekretariat Ditjen Dayasos	511125	Jurnal Manual	Beban Tunjangan PPh PNS	10.556	
	Sekretariat Ditjen Dayasos	212111		Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		10.556
				<i>(Kekurangan Pembayaran Tunjangan PPh an Heri Budiyo)</i>		
41	Sekretariat Ditjen Dayasos	511119	Jurnal Manual	Beban Pembulatan Gaji PNS	153	
	Sekretariat Ditjen Dayasos	212111		Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		153
				<i>(Pembulatan Gaji dikarenakan Rapel Kenaikan Pangkat Pengabdian Oktober 2020 an Heri Budiyo)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
				Pembayaran kekurangan gaji rapel inpassing jabatan fungsional bulan November-Desember 2020 an Ramsya Pardosi		
42	Sekretariat Ditjen Dayasos	511124	Jurnal Manual	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.580.000	
	Sekretariat Ditjen Dayasos	212111		Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar <i>(Kekurangan Pembayaran Tunjangan Fungsional dikarenakan Rapel Inpassing Jabatan Fungsional Nov sd Des 2020 an Ramsya Pardosi)</i>		1.580.000
43	Sekretariat Ditjen Dayasos	511125	Jurnal Manual	Beban Tunjangan PPh PNS	23.750	
	Sekretariat Ditjen Dayasos	212111		Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar <i>(Kekurangan Pembayaran Tunjangan PPh an Ramsya Pardosi)</i>		23.750
				Koreksi nilai Piutang pada Laporan Keuangan Unaudited TA 2020 sehingga dilakukan Jurnal balik		
44	Dit. PSPKKM	521219	Jurnal Manual	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.400.000	
	Dit. PSPKKM	115212		Piutang Lainnya <i>(Jurnal Balik atas Koreksi Piutang Lainnya Unaudited)</i>		7.400.000
45	Dit. PSPKKM	116212	Jurnal Manual	Penyisihan Piutang tidak Tertagih - Piutang Lainnya	37.000	
	Dit. PSPKKM	594212		Beban Penyisihan Piutang Lainnya <i>(Jurnal Balik atas koreksi penyisihan piutang Unaudited)</i>		37.000
				Terdapat pengembalian belanja barang non operasional lainnya atas pendamping PKH yang menerima tali asih SLRT tahun 2019		
46	Dit. PSPKKM	115212	Jurnal Manual	Piutang Lainnya	6.450.000	
	Dit. PSPKKM	391119		Koreksi Lainnya <i>(Pengembalian belanja barang non operasional lainnya (BOP) untuk pendamping PKH yang menerima tali asih SLRT tahun 2019)</i>		6.450.000
				Terdapat pengembalian belanja barang non operasional lainnya atas sisa saldo Dana BOP (tidak habis pakai) tahun 2020		
47	Dit. PSPKKM	115212	Jurnal Manual	Piutang Lainnya	33.645.000	
	Dit. PSPKKM	521219		Beban Barang Non Operasional Lainnya <i>(Pengembalian belanja barang non operasional lainnya (BOP) tidak habis pakai tahun 2020 di Kab. Madiun, Kab Kep Anambas, Kab. Cirebon, dan Kota Semarang)</i>		33.645.000
48	Dit. PSPKKM	594212	Jurnal Manual	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	200.475	
	Dit. PSPKKM	116212		Penyisihan Piutang tidak Tertagih - Piutang Lainnya <i>(Jurnal penyisihan piutang)</i>		200.475
				Koreksi atas belanja modal Tanah yang secara substansi mengandung aset tetap Gedung dan Bangunan		
49	Dit. K2KRS	136111	Jurnal Aplikasi	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.053.484.452	
	Dit. K2KRS	131111		Tanah <i>(Jurnal Balik atas pengembangan melalui KDP LK Unaudited)</i>		1.053.484.452
50	Dit. K2KRS	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.053.484.452	
	Dit. K2KRS	136111		Konstruksi Dalam Pengerjaan <i>(Jurnal kirim aplikasi BMN untuk mengkoreksi KDP)</i>		1.053.484.452
51	Dit. K2KRS	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	638.947.171	
	Dit. K2KRS	133211		Gedung dan Bangunan Belum Diregister <i>(Jurnal kirim aplikasi BMN atas pengakuan gedung dan bangunan)</i>		638.947.171
52	Dit. K2KRS	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	414.537.281	
	Dit. K2KRS	133211		Gedung dan Bangunan Belum Diregister <i>(Jurnal kirim aplikasi BMN atas pengakuan gedung dan bangunan)</i>		414.537.281
53	Dit. K2KRS	133211	Jurnal Manual	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	1.053.484.452	
	Dit. K2KRS	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi <i>(Jurnal manual SAIBA untuk mengkoreksi belanja modal tanah yang secara substansi merupakan gedung dan bangunan)</i>		1.053.484.452
54	Dit. K2KRS	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.127.407	
	Dit. K2KRS	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan <i>(Jurnal penyusutan atas pengakuan gedung dan bangunan)</i>		46.127.407

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
55	Dit. K2KRS	137211	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.561.674.589	
	Dit. K2KRS	591211		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		6.561.674.589
				<i>(Jurnal balik atas penyusutan gedung dan bangunan LK Unaudited)</i>		
56	Dit. K2KRS	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.559.382.491	
	Dit. K2KRS	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		6.559.382.491
				<i>(Jurnal penyusutan atas pengakuan gedung dan bangunan)</i>		
				UKE I DITJEN REHSOS		
				Koreksi atas kekurangan pembayaran permakanan dan transportasi pemulangan WNIM KPO dari Malaysia ke daerah asal tahun 2020		
57	Direktorat RSTS KPO	117141	Jurnal Aplikasi	Persediaan dalam rangka bantuan sosial	1.305.818	
	Direktorat RSTS KPO	117911		Persediaan yang Belum Diregister		1.305.818
				<i>(Jurnal aplikasi persediaan atas pembelian persediaan permakanan RPTC Tanjung Pinang melalui CV. Dian Kencana Juni 2020)</i>		
58	Direktorat RSTS KPO	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang Belum Diregister	1.305.818	
	Direktorat RSTS KPO	212115		Belanja Bantuan Sosial Yang Masih harus Dibayar		1.305.818
				<i>(Tagihan Permakanan RPTC Tanjung Pinang CV.Dian Kencana Juni 2020)</i>		
59	Direktorat RSTS KPO	573112	Jurnal Aplikasi	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	1.305.818	
	Direktorat RSTS KPO	117141		Persediaan dalam rangka bantuan sosial		1.305.818
				<i>(Jurnal aplikasi persediaan atas penyerahan persediaan permakanan RPTC Tanjung Pinang)</i>		
60	Direktorat RSTS KPO	117141	Jurnal Aplikasi	Persediaan dalam rangka bantuan sosial	41.130.000	
	Direktorat RSTS KPO	117911		Persediaan yang Belum Diregister		41.130.000
				<i>(Jurnal aplikasi persediaan atas pembelian persediaan permakanan RPTC Tanjung Pinang)</i>		
61	Direktorat RSTS KPO	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang Belum Diregister	41.130.000	
	Direktorat RSTS KPO	212115		Belanja Bantuan Sosial Yang Masih harus Dibayar		41.130.000
				<i>(Tagihan Permakanan RPTC Tanjung Pinang melalui CV.Dian Kencana 20 s/d 31 Desember 2020)</i>		
62	Direktorat RSTS KPO	573112	Jurnal Aplikasi	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	41.130.000	
	Direktorat RSTS KPO	117141		Persediaan dalam rangka bantuan sosial		41.130.000
				<i>(Jurnal aplikasi persediaan atas penyerahan persediaan permakanan RPTC Tanjung Pinang)</i>		
63	Direktorat RSTS KPO	117141	Jurnal Aplikasi	Persediaan dalam rangka bantuan sosial	2.901.000	
	Direktorat RSTS KPO	117911		Persediaan yang Belum Diregister		2.901.000
				<i>(Jurnal aplikasi persediaan atas pembelian persediaan permakanan kepada WNIM KPO di Pelabuhan Tanjung Priok)</i>		
64	Direktorat RSTS KPO	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang belum Diregister	2.901.000	
	Direktorat RSTS KPO	212115		Belanja Bantuan Sosial Yang Masih harus Dibayar		2.901.000
				<i>(Tagihan Permakanan WNIM KPO di Pelabuhan Tanjung Priok)</i>		
65	Direktorat RSTS KPO	573112	Jurnal Aplikasi	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	2.901.000	
	Direktorat RSTS KPO	117141		Persediaan dalam rangka bantuan sosial		2.901.000
				<i>(Jurnal aplikasi persediaan atas penyerahan persediaan permakanan kepada WNIM KPO di Pelabuhan Tanjung Priok)</i>		
66	Direktorat RSTS KPO	571112	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	45.336.818	
	Direktorat RSTS KPO	573112		Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang		45.336.818
				<i>(Jurnal koreksi antar beban atas beban bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk barang)</i>		
67	Direktorat RSTS KPO	521219	Jurnal Manual	Beban Barang Non Operasional Lainnya	760.000	
	Direktorat RSTS KPO	212112		Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		760.000
				<i>(Tagihan Transportasi Pemulangan WNIM KPO Darat melalui PO.Pacitan Indah Terhitung Desember TA 2020)</i>		
68	Direktorat RSTS KPO	521219	Jurnal Manual	Beban Barang Non Operasional Lainnya	326.000	
	Direktorat RSTS KPO	212112		Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		326.000
				<i>(Tagihan transportasi pemulangan WNIM KPO Melalui PELNI Bulan juni s/d desember 2020)</i>		
69	Direktorat RSTS KPO	521219	Jurnal Manual	Beban Barang Non Operasional Lainnya	28.227.000	
	Direktorat RSTS KPO	212112		Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		28.227.000
				<i>(Tagihan Transportasi Pemulangan WNIM KPO melalui PELNI Terhitung Oktober TA 2020)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
70	BLBI Abiyoso	117128	Jurnal Manual	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	56.893.000	
	BLBI Abiyoso	593128		Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		56.893.000
				<i>(Jurnal koreksi untuk mencatat sisa barang/buku yang berasal dari kegiatan Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebanyak 1.042 buku dengan nilai Rp56.893.000 belum dimasukkan dalam persediaan pada Neraca Satker BLBI Abiyoso)</i>		
71	BLBI Abiyoso	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	1.601.449.000	
	BLBI Abiyoso	391114		Revaluasi Aset Tetap		1.601.449.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Gedung dan Bangunan)</i>		
72	BLBI Abiyoso	134111	Jurnal Aplikasi	Jalan dan Jembatan	17.257.000	
	BLBI Abiyoso	391114		Revaluasi Aset Tetap		17.257.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Jalan dan Jembatan)</i>		
73	BLBI Abiyoso	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	315.837.801	
	BLBI Abiyoso	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		315.837.801
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Penyusutan Gedung dan Bangunan)</i>		
74	BLBI Abiyoso	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	78.971.000	
	BLBI Abiyoso	137311		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		78.971.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Penyusutan Jalan dan Jembatan)</i>		
75	BLBI Abiyoso	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.167.561	
	BLBI Abiyoso	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		63.167.561
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Penyusutan Gedung dan Bangunan)</i>		
76	BLBI Abiyoso	591311	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.560.000	
	BLBI Abiyoso	137311		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		16.560.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Penyusutan Gedung dan Bangunan)</i>		
77	BLBI Abiyoso	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	522.521.000	
	BLBI Abiyoso	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		522.521.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Penyusutan Gedung dan Bangunan)</i>		
78	BLBI Abiyoso	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.167.561	
	BLBI Abiyoso	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		63.167.561
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Penyusutan Gedung dan Bangunan)</i>		
79	BLBI Abiyoso	137311	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	78.274.000	
	BLBI Abiyoso	591311		Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		78.274.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi atas Penyusutan Jalan dan Jembatan)</i>		
80	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	212113	Jurnal Manual	Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar	635.360.000	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	132211		Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister		635.360.000
				<i>(Jurnal Balik atas belanja modal yang masih harus dibayar peralatan dan mesin LK Unaudited)</i>		
81	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	212113	Jurnal Manual	Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar	992.803.500	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	133211		Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister		992.803.500
				<i>(Jurnal Balik atas belanja modal yang masih harus dibayar gedung dan bangunan LK Unaudited)</i>		
82	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	212112	Jurnal Manual	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	27.995.000	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	117911		Persediaan yang belum Diregister		27.995.000
				<i>(Jurnal Balik atas belanja barang yang masih harus dibayar persediaan LK Unaudited)</i>		
83	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	137111	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	63.536.000	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	591111		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		63.536.000
				<i>(Jurnal Balik atas penyusutan peralatan dan mesin LK Unaudited)</i>		
84	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	137211	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.570.631	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	591211		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		19.570.631
				<i>(Jurnal Balik atas penyusutan gedung dan bangunan LK Unaudited)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
85	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	132211	Jurnal Aplikasi	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	635.360.000	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	132111		Peralatan dan Mesin		635.360.000
				<i>(Jurnal balik atas pengadaan peralatan dan mesin LK Unaudited)</i>		
86	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	136111	Jurnal Aplikasi	Konstruksi Dalam pengerjaan	992.803.500	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	133111		Gedung dan Bangunan		992.803.500
				<i>(Jurnal koreksi atas KDP Gedung dan Bangunan)</i>		
87	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	133211	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	992.803.500	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	136111		Konstruksi Dalam pengerjaan		992.803.500
				<i>(Jurnal koreksi atas KDP Gedung dan Bangunan)</i>		
88	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	117911	Jurnal Aplikasi	Persediaan yang belum Diregister	27.995.000	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	117111		Barang Konsumsi		27.995.000
				<i>(Jurnal balik atas pengadaan persediaan pada LK Unaudited)</i>		
89	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	132211	Jurnal Manual	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	379.443.075	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	212113		Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		379.443.075
				<i>(Jurnal koreksi belanja modal yang masih harus dibayar atas pengadaan peralatan dan mesin CV. Erlia Cemerlang Jaya sesuai dengan validasi APIP)</i>		
90	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	133211	Jurnal Manual	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	361.106.404	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	212113		Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		361.106.404
				<i>(Jurnal koreksi belanja modal yang masih harus dibayar atas Rehab gedung dan bangunan PT. Karunia Karya Teknik sesuai dengan validasi APIP)</i>		
91	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang belum Diregister	15.180.000	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	212112		Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		15.180.000
				<i>(Jurnal koreksi belanja barang yang masih harus dibayar atas pengadaan persediaan CV. Erlia Cemerlang Jaya sesuai dengan validasi APIP)</i>		
92	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	132111	Jurnal Aplikasi	Peralatan dan Mesin	379.443.075	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	132211		Peralatan dan Mesin Belum Diregister		379.443.075
				<i>(Jurnal kirim aplikasi SIMAK BMN atas Pembelian Peralatan dan Mesin)</i>		
93	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	361.106.404	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	136111		Konstruksi Dalam pengerjaan		361.106.404
				<i>(Jurnal kirim aplikasi SIMAK BMN atas Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan)</i>		
94	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	136111	Jurnal Aplikasi	Konstruksi Dalam pengerjaan	361.106.404	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	133211		Gedung dan Bangunan Belum Diregister		361.106.404
				<i>(Jurnal kirim aplikasi SIMAK BMN atas Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan)</i>		
95	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	15.180.000	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	117911		Persediaan yang Belum Diregister		15.180.000
				<i>(Jurnal kirim aplikasi SIMAK BMN atas Pembelian Persediaan)</i>		
96	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	591111	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	37.944.312	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	137111		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		37.944.312
				<i>(Jurnal kirim aplikasi SIMAK BMN atas penyusutan Peralatan dan Mesin)</i>		
97	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.034.183	
	BRS EKS WATUNAS Mulya Java Jakarta	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		11.034.183
				<i>(Jurnal kirim aplikasi SIMAK BMN atas penyusutan Gedung dan Bangunan)</i>		
				UKE I DITJEN LINJAMSOS		
				Terdapat kesalahan penggunaan akun senilai Rp45.266.760 diinput sebagai persediaan bansos, dan telah diserahkan kepada penerima sehingga menimbulkan beban bansos dalam bentuk barang 573112 yang seharusnya Beban Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (593128)		
98	Dit. PSKBA	593128	Jurnal Manual	Beban Persediaan Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	45.266.760	
	Dit. PSKBA	576112		Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang		45.266.760
				<i>(Jurnal koreksi antar Beban pada LK Unaudited)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
				Kurang catat persediaan atas barang persediaan yg ada di gudang Suku Dinsos yang oleh Dinsos Provinsi DKI tidak mencatatnya karena dianggap sudah disalurkan senilai Rp. 456.162.132.00,-		
99	Dit. PSKBA	117141	Jurnal Aplikasi	Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	456.162.132	
	Dit. PSKBA	573112		Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang		456.162.132
				<i>(Jurnal Koreksi untuk mencatat Persediaan pada gudang Dinsos di Kota Adm di wilayah Prov DKI Jakarta tidak tercatat pada persediaan Logistik Dit PSKBA/Dinsos Prov DKI Jakarta)</i>		
100	Dit. PSKBA	573112	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	456.162.132	
	Dit. PSKBA	576112		Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam bentuk Barang		456.162.132
				<i>(Jurnal Koreksi Beban untuk mencatat Persediaan pada gudang Dinsos di Kota Adm di wilayah Prov DKI Jakarta tidak tercatat pada persediaan Logistik Dit PSKBA/Dinsos Prov DKI Jakarta)</i>		
				<i>Satker Dit. PSKBS terdapat barang persediaan pada anak satker yang penyerahannya belum tercatat pada aplikasi persediaan</i>		
101	Dit. PSKBS	573112	Jurnal Aplikasi	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	651.812.500	
	Dit. PSKBS	117141		Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial		651.812.500
				<i>(Koreksi atas Persediaan Bantuan Sosial pada LK Unaudited)</i>		
102	Dit. PSKBS	491511	Jurnal Aplikasi	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	10.734.100	
	Dit. PSKBS	117141		Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial		10.734.100
				<i>(Koreksi atas Persediaan Bantuan Sosial pada LK Unaudited)</i>		
103	Dit. PSKBS	117141	Jurnal Aplikasi	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	681.159.275	
	Dit. PSKBS	593311		Beban Penyesuaian Persediaan		681.159.275
				<i>(Koreksi atas Persediaan Bantuan Sosial pada LK Unaudited)</i>		
104	Dit. PSKBS	576112	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang	651.812.500	
	Dit. PSKBS	573112		Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang		651.812.500
				<i>(Jurnal Penyesuaian untuk mengoreksi Beban Bantuan Sosial dalam bentuk barang)</i>		
105	Sekretariat Ditjen Linjamsos	212111	Jurnal Manual	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	481.000	
	Sekretariat Ditjen Linjamsos	511129		Beban Uang Makan PNS		481.000
				<i>(Koreksi atas Jurnal Penyesuaian pengakuan Beban Uang Makan pada LK Unaudited)</i>		
				<i>Pencatatan sisa Seragam PKH sejumlah 375 buah dengan harga satuan Rp 126.110 (termasuk PPN) yang belanjanya menggunakan akun belanja 521119</i>		
106	Dinsos Prov Jawa Timur (05)	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	47.291.250	
	Dinsos Prov Jawa Timur (05)	117911		Persediaan yang belum diregister		47.291.250
				<i>Jurnal untuk mencatat Persediaan sisa Seragam PKH sebanyak 375 buah dengan harga satuan 126.110 (termasuk PPN)</i>		
107	Dinsos Prov Jawa Timur (05)	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang belum diregister	47.291.250	
	Dinsos Prov Jawa Timur (05)	521119		Beban barang Operasional lainnya		47.291.250
				<i>Jurnal Penyesuaian atas Persediaan yang Belum Diregister atas pencatatan sisa Seragam PKH sebanyak 375 buah dengan harga satuan 126.110 (termasuk PPN)</i>		
				<i>Pencatatan sisa Seragam PKH pada Dinsos NTB sejumlah 4 buah dengan harga satuan Rp 134.970 (termasuk PPN) yang belanjanya menggunakan akun belanja 521119</i>		
108	Dinsos NTB (05)	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	539.880	
	Dinsos NTB (05)	117911		Persediaan yang Belum Diregister		539.880
				<i>Jurnal untuk mencatat Persediaan sisa Seragam PKH sebanyak 4 buah dengan harga satuan 134.970 (termasuk PPN)</i>		
109	Dinsos NTB (05)	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang Belum Diregister	539.880	
	Dinsos NTB (05)	521119		Beban Barang Operasional Lainnya		539.880
				<i>Jurnal Penyesuaian atas Persediaan yang Belum Diregister atas pencatatan sisa Seragam PKH sebanyak 4 buah dengan harga satuan 134.970 (termasuk PPN)</i>		
				<i>Pencatatan sisa Seragam PKH pada Dinsos Bengkulu sejumlah 19 buah dengan harga satuan Rp 199.500 (termasuk PPN) yang belanjanya menggunakan akun belanja 521119</i>		
110	Dinsos Bengkulu (05)	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	3.790.500	
	Dinsos Bengkulu (05)	117911		Persediaan yang Belum Diregister		3.790.500
				<i>Jurnal untuk mencatat Persediaan sisa Seragam PKH sebanyak 19 buah dengan harga satuan Rp 199.500 (termasuk PPN)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
111	Dinsos Bengkulu (05)	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang Belum Diregister	3.790.500	
	Dinsos Bengkulu (05)	521119		Beban Barang Operasional Lainnya		3.790.500
				<i>Jurnal Penyesuaian atas Persediaan yang Belum Diregister atas pencatatan sisa Seragam PKH sebanyak 19 buah dengan harga satuan Rp 199.500 (termasuk PPN)</i>		
				<i>Pencatatan sisa Seragam PKH pada Dinsos Bali sejumlah 12 buah dengan harga satuan Rp 199.000 (termasuk PPN) yang belanjanya menggunakan akun belanja 521119</i>		
112	Dinsos Bali (05)	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	2.388.000	
	Dinsos Bali (05)	117911		Persediaan yang Belum Diregister		2.388.000
				<i>Jurnal untuk mencatat Persediaan sisa Seragam PKH sebanyak 12 buah dengan harga satuan Rp 199.000 (termasuk PPN)</i>		
113	Dinsos Bali (05)	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang Belum Diregister	2.388.000	
	Dinsos Bali (05)	521119		Beban Barang Operasional Lainnya		2.388.000
				<i>Jurnal Penyesuaian atas Persediaan yang Belum Diregister atas pencatatan sisa Seragam PKH sebanyak 12 buah dengan harga satuan Rp 199.000 (termasuk PPN)</i>		
				<i>Pencatatan sisa Seragam PKH pada Dinsos Kaltim sejumlah 18 buah dengan harga satuan Rp 349.600 (termasuk PPN) yang belanjanya menggunakan akun belanja 521219</i>		
114	Dinsos Kaltim (05)	117111	Jurnal Aplikasi	Barang Konsumsi	6.292.800	
	Dinsos Kaltim (05)	117911		Persediaan yang Belum Diregister		6.292.800
				<i>Jurnal untuk mencatat Persediaan sisa Seragam PKH sebanyak 18 buah dengan harga satuan Rp 349.600 (termasuk PPN)</i>		
115	Dinsos Kaltim (05)	117911	Jurnal Manual	Persediaan yang Belum Diregister	6.292.800	
	Dinsos Kaltim (05)	521219		Beban Barang Non Operasional Lainnya		6.292.800
				<i>Jurnal Penyesuaian atas Persediaan yang Belum Diregister atas pencatatan sisa Seragam PKH sebanyak 18 buah dengan harga satuan Rp 349.600 (termasuk PPN)</i>		
				UKE I DITJEN PFM		
116	Dit PFM Wilayah I	111821	Jurnal Manual	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.493.537.702	
	Dit PFM Wilayah I	425764		Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		2.493.537.702
				<i>(Jasa Giro per 31 Desember 2020 Belum Masuk dalam Kas Lainnya di BP berupa: Jasa Giro RPL BSP Rp2.416.577.774 & Jasa Giro RPL BST Rp76.959.928, Total : Rp2.493.537.702)</i>		
117	Dit PFM Wilayah I	575111	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	45.260.494.295	
	Dit PFM Wilayah I	111821		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		45.260.494.295
				<i>(Jurnal koreksi pencatatan penyaluran belanja bantuan sosial tahun 2019 pada tahun 2020 yang sebelumnya dicatat sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019)</i>		
				<i>Terdapat kelebihan penyeteroran ke kas negara atas pengembalian belanja bantuan sosial dana BPNT tahun 2019 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020 pada Bank BTN</i>		
118	Dit PFM Wilayah I	425917	Jurnal Aplikasi	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	510.400.000	
	Dit PFM Wilayah I	219711		Utang dari KUN		510.400.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Seteror BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
119	Dit PFM Wilayah I	115612	Jurnal Aplikasi	Piutang dari KPPN	510.400.000	
	Dit PFM Wilayah I	575111		Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang		510.400.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Seteror BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
120	Dit PFM Wilayah I	425917	Jurnal Aplikasi	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	510.400.000	
	Dit PFM Wilayah I	313121		Diterima dari Entitas Lain		510.400.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Seteror BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
121	Dit PFM Wilayah I	313111	Jurnal Aplikasi	Ditagihkan ke Entitas Lain	510.400.000	
	Dit PFM Wilayah I	575111		Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang		510.400.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Seteror BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
122	Dit PFM Wilayah I	575111	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	510.400.000	
	Dit PFM Wilayah I	575114		Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19		510.400.000
				<i>(Koreksi Antar Beban Bantuan Sosial Reguler menjadi Bantuan Sosial PCPEN)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
123	Dit PFM Wilayah II	111821	Jurnal Manual	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	987.016.619	
	Dit PFM Wilayah II	425764		Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		987.016.619
				<i>(Jasa Giro per 31 Desember 2020 Belum Masuk dalam Kas Lainnya di BP berupa: Jasa Giro RPL BSP Rp918.018.535, Jasa Giro RPL BST Rp59.468.634, dan jasa giro dari RPL 2019 Rp9.529.450 ; Total : Rp987.016.619)</i>		
124	Dit PFM Wilayah II	575111	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	33.076.261.970	
	Dit PFM Wilayah II	111821		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		33.076.261.970
				<i>(Jurnal koreksi pencatatan penyaluran belanja bantuan sosial tahun 2019 pada tahun 2020 yang sebelumnya dicatat sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019)</i>		
				Terdapat kelebihan penyeteroran ke kas negara atas pengembalian belanja bantuan sosial dana BPNT tahun 2019 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020 pada Bank BTN		
125	Dit PFM Wilayah II	425917	Jurnal Aplikasi	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	3.569.170.000	
	Dit PFM Wilayah II	219711		Utang kepada KUN		3.569.170.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
126	Dit PFM Wilayah II	115612	Jurnal Aplikasi	Piutang dari KPPN	3.569.170.000	
	Dit PFM Wilayah II	575111		Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang		3.569.170.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
127	Dit PFM Wilayah II	425917	Jurnal Aplikasi	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	3.569.170.000	
	Dit PFM Wilayah II	313121		Diterima dari Entitas Lain		3.569.170.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
128	Dit PFM Wilayah II	313111	Jurnal Aplikasi	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.569.170.000	
	Dit PFM Wilayah II	575111		Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang		3.569.170.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
129	Dit PFM Wilayah II	575111	Jurnal manual	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	3.569.170.000	
	Dit PFM Wilayah II	575114		Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19		3.569.170.000
				<i>(Koreksi Antar Beban Bantuan Sosial Reguler menjadi Bantuan Sosial PCPEN)</i>		
130	Dit PFM Wilayah II	575114	Jurnal manual	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	14.730.350.000	
	Dit PFM Wilayah II	425917		Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		14.730.350.000
				<i>(Jurnal Balik Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
131	Dit PFM Wilayah II	425917	Jurnal Aplikasi	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	14.730.350.000	
	Dit PFM Wilayah II	219711		Utang kepada KUN		14.730.350.000
				<i>(Kesalahan Akun Setor Belanja Bantuan Sosial TA 2020 yang berasal dari KKS Redistribusi)</i>		
132	Dit PFM Wilayah II	115612	Jurnal Aplikasi	Piutang dari KPPN	14.730.350.000	
	Dit PFM Wilayah II	575111		Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang		14.730.350.000
				<i>(Kesalahan Akun Setor Belanja Bantuan Sosial TA 2020 yang berasal dari KKS Redistribusi)</i>		
133	Dit PFM Wilayah II	425917	Jurnal Aplikasi	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	14.730.350.000	
	Dit PFM Wilayah II	313121		Diterima dari Entitas Lain		14.730.350.000
				<i>(Kesalahan Akun Setor Belanja Bantuan Sosial TA 2020 yang berasal dari KKS Redistribusi)</i>		
134	Dit PFM Wilayah II	313111	Jurnal Aplikasi	Ditagihkan ke Entitas Lain	14.730.350.000	
	Dit PFM Wilayah II	575111		Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang		14.730.350.000
				<i>(Kesalahan Akun Setor Belanja Bantuan Sosial TA 2020 yang berasal dari KKS Redistribusi)</i>		
135	Dit PFM Wilayah II	575111	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	14.730.350.000	
	Dit PFM Wilayah II	575114		Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19		14.730.350.000
				<i>(Koreksi Antar Beban Bantuan Sosial Reguler menjadi Bantuan Sosial PCPEN)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
136	Dit PFM Wilayah III	111821	Jurnal Manual	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4.718.233.388	
	Dit PFM Wilayah III	425764		Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		4.718.233.388
				<i>(Jasa Giro per 31 Desember 2020 Belum Masuk dalam Kas Lainnya di BP berupa: Jasa Giro RPL BSP Rp1.479.435.288; Jasa Giro RPL BST Rp3.231.006.228; Jasa Giro RPL BST Non PKH Rp5.142.649 ; Jasa Giro dari RPL 2019 senilai Rp7.649.223, Total : Rp4.718.233.388)</i>		
137	Dit PFM Wilayah III	575111	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	35.138.526.307	
	Dit PFM Wilayah III	111821		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		35.138.526.307
				<i>(Jurnal koreksi pencatatan penyaluran belanja bantuan sosial tahun 2019 pada tahun 2020 yang sebelumnya dicatat sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019)</i>		
				Terdapat kelebihan penyetoran ke kas negara atas pengembalian belanja bantuan sosial dana BPNT tahun 2019 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020 pada Bank BTN		
138	Dit PFM Wilayah III	425917	Jurnal Aplikasi	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	154.330.000	
	Dit PFM Wilayah III	219711		Utang kepada KUN		154.330.000
				<i>(Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
139	Dit PFM Wilayah III	115612	Jurnal Aplikasi	Piutang dari KPPN	154.330.000	
	Dit PFM Wilayah III	575111		Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang		154.330.000
				<i>(Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
140	Dit PFM Wilayah III	425917	Jurnal Aplikasi	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	154.330.000	
	Dit PFM Wilayah III	313121		Diterima dari Entitas Lain		154.330.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
141	Dit PFM Wilayah III	313111	Jurnal Aplikasi	Ditagihkan ke Entitas Lain	154.330.000	
	Dit PFM Wilayah III	575111		Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang		154.330.000
				<i>(Jurnal Koreksi Ralat Akun Kelebihan Setor BTN atas Saldo BPNT Tahun 2019 di Tahun 2020 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020)</i>		
142	Dit PFM Wilayah III	575111	Jurnal Manual	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	154.330.000	
	Dit PFM Wilayah III	575114		Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19		154.330.000
				<i>(Koreksi Antar Beban Bantuan Sosial Reguler menjadi Bantuan Sosial PCPEN)</i>		
				URE I BADIKLIT DAN PENSO		
				Terdapat kesalahan jurnal atas Temuan BPK tahun 2019 terhadap renovasi Gedung Pusdiklat Kesos yang menggunakan akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi, seharusnya menggunakan akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		
143	Sekretariat Badiklit Pensos	391118	Jurnal Manual	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	163.052.648	
	Sekretariat Badiklit Pensos	115212		Piutang Lainnya		163.052.648
				<i>(Jurnal Balik atas kesalahan jurnal Unaudited)</i>		
144	Sekretariat Badiklit Pensos	115212	Jurnal Manual	Piutang Lainnya	163.052.648	
	Sekretariat Badiklit Pensos	391116		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		163.052.648
				<i>(Koreksi atas Temuan BPK Tahun 2019 Terhadap Renovasi Gedung Pusdiklat)</i>		
145	Poltekkessos	593111	Jurnal Aplikasi	Beban Persediaan Konsumsi	31.291.000	
	Poltekkessos	117111		Barang Konsumsi		31.291.000
				<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan untuk mengkoreksi Nilai Persediaan)</i>		
146	Poltekkessos	593128	Jurnal Aplikasi	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat/ Pemda	56.966.250	
	Poltekkessos	117128		Barang Persediaan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat		56.966.250
				<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan untuk mengkoreksi Nilai Persediaan)</i>		
147	Poltekkessos	593149	Jurnal Aplikasi	Beban Persediaan Lainnya	1.281.935	
	Poltekkessos	117199		Persediaan Lainnya		1.281.935
				<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan untuk mengkoreksi Nilai Persediaan)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
148	Poltekkeskos	132111	Jurnal Aplikasi	Peralatan dan Mesin	90.970.000	
	Poltekkeskos	132211		Peralatan dan Mesin Belum Diregister		90.970.000
				<i>(Jurnal Penginputan Pengembangan Peralatan dan Mesin)</i>		
149	Poltekkeskos	132211	Jurnal Manual	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	90.970.000	
	Poltekkeskos	523121		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		90.970.000
				<i>(Jurnal Untuk Menyesuaikan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)</i>		
150	Poltekkeskos	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	145.150.000	
	Poltekkeskos	133211		Gedung dan Bangunan yang belum diregister		145.150.000
				<i>(Jurnal Penginputan Pembelian GB)</i>		
151	Poltekkeskos	133211	Jurnal Manual	Gedung dan Bangunan yang belum diregister	145.150.000	
	Poltekkeskos	523111		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		145.150.000
				<i>(Jurnal untuk koreksi Beban Pemeliharaan GB menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan)</i>		
152	Poltekkeskos	133211	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan Belum diregister	148.016.000	
	Poltekkeskos	133111		Gedung dan Bangunan		148.016.000
				<i>(Jurnal untuk koreksi Belanja Modal GB menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kursi kuliah)</i>		
153	Poltekkeskos	132111	Jurnal Aplikasi	Peralatan dan Mesin	29.400.000	
	Poltekkeskos	132211		Peralatan dan Mesin Belum Diregister		29.400.000
				<i>(Jurnal input transaksi pembelian Peralatan dan Mesin)</i>		
154	Poltekkeskos	595112	Jurnal Manual	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	118.616.000	
	Poltekkeskos	133211		Gedung dan Bangunan Belum Diregister		118.616.000
				<i>(Jurnal manual untuk koreksi belanja modal GB menjadi Beban Keperluan Perkantoran)</i>		
155	Poltekkeskos	132211	Jurnal Manual	Peralatan dan Mesin yang belum diregister	29.400.000	
	Poltekkeskos	133211		Gedung dan Bangunan Belum diregister		29.400.000
				<i>(Jurnal Penyesuaian pada Aplikasi SAIBA untuk mengoreksi kesalahan penginputan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan Peralatan dan mesin)</i>		
156	Poltekkeskos	166411	Jurnal Aplikasi	Aset Lainnya yang Belum Diregister	71.180.450	
	Poltekkeskos	162151		Software		71.180.450
				<i>(Koreksi Belanja Modal Lainnya yang digunakan untuk pembelian PM Hardware Komputer)</i>		
157	Poltekkeskos	132111	Jurnal Aplikasi	Peralatan dan Mesin	71.180.450	
	Poltekkeskos	132211		Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister		71.180.450
				<i>(Koreksi Belanja Modal Lainnya yang digunakan untuk pembelian PM Hardware Komputer)</i>		
158	Poltekkeskos	132211	Jurnal Manual	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	71.180.450	
	Poltekkeskos	166411		Aset Lainnya yang Belum Diregister		71.180.450
				<i>(Jurnal Manual untuk koreksi belanja modal lainnya yang digunakan untuk pembelian PM)</i>		
159	Poltekkeskos	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	132.618	
	Poltekkeskos	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		132.618
				<i>(Penyusutan atas Koreksi yang menghasilkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan)</i>		
160	Poltekkeskos	591111	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111.705.112	
	Poltekkeskos	137111		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		111.705.112
				<i>(Jurnal Otomatis atas Penyusutan Peralatan dan Mesin)</i>		
161	Poltekkeskos	169315	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Amortisasi Software	17.795.112	
	Poltekkeskos	592115		Beban Amortisasi Software		17.795.112
				<i>(Penyusutan atas Hardware Komputer yang sebelumnya dicatat sebagai Software)</i>		
162	Poltekkeskos	134112	Jurnal Aplikasi	Irigasi	195.532.000	
	Poltekkeskos	391151		Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya		195.532.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi irigasi)</i>		
163	Poltekkeskos	391151	Jurnal Aplikasi	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	39.106.400	
	Poltekkeskos	137312		Akumulasi Penyusutan Irigasi		39.106.400
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
164	Poltekkessos	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan bangunan	7.821.280	
	Poltekkessos	391114		Revaluasi Aset Tetap		7.821.280
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
165	Poltekkessos	391114	Jurnal Aplikasi	Revaluasi Aset Tetap	70.467.600	
	Poltekkessos	134112		Irigasi		70.467.600
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
166	Poltekkessos	137312	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Irigasi	39.106.400	
	Poltekkessos	391114		Revaluasi Aset Tetap		39.106.400
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
167	Poltekkessos	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	2.977.129.000	
	Poltekkessos	391114		Revaluasi Aset Tetap		2.977.129.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
168	Poltekkessos	391114	Jurnal Aplikasi	Revaluasi Aset Tetap	21.967.000	
	Poltekkessos	134112		Irigasi		21.967.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
169	Poltekkessos	391114	Jurnal Aplikasi	Revaluasi Aset Tetap	39.106.400	
	Poltekkessos	134112		Irigasi		39.106.400
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
170	Poltekkessos	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	24.362.245	
	Poltekkessos	137312		Akumulasi Penyusutan Irigasi		24.362.245
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
171	Poltekkessos	391116	Jurnal Aplikasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	250.017.892	
	Poltekkessos	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan		250.017.892
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
172	Poltekkessos	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	50.003.578	
	Poltekkessos	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan		50.003.578
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
173	Poltekkessos	591312	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Irigasi	4.872.449	
	Poltekkessos	137312		Akumulasi Penyusutan Irigasi		4.872.449
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
174	Poltekkessos	133111	Jurnal Aplikasi	Gedung dan Bangunan	107.818.720	
	Poltekkessos	391114		Revaluasi Aset Tetap		107.818.720
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
175	Poltekkessos	391114	Jurnal Aplikasi	Revaluasi Aset Tetap	7.821.280	
	Poltekkessos	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		7.821.280
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
176	Poltekkessos	137211	Jurnal Aplikasi	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.814.528	
	Poltekkessos	391151		Koreksi atas reklasifikasi persediaan/ Aset Tetap/ Aset lainnya		12.814.528
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
177	Poltekkessos	391151	Jurnal Aplikasi	Koreksi atas reklasifikasi persediaan/ Aset Tetap/ Aset lainnya	195.532.000	
	Poltekkessos	133111		Gedung dan Bangunan		195.532.000
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
178	Poltekkessos	591211	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.171.371	
	Poltekkessos	137211		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		49.171.371
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		
179	Poltekkessos	591312	Jurnal Aplikasi	Beban Penyusutan Irigasi	4.872.449	
	Poltekkessos	137312		Akumulasi Penyusutan Irigasi		4.872.449
				<i>(Jurnal koreksi revaluasi)</i>		

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Ket Jurnal	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
				Belanja barang yang masih harus dibayar atas sewa jaringan PT. Telkom untuk diklat e-learning pada tahun 2019		
180	Pusdiklat Kesos	212112	Jurnal Manual	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	6.495.429.820	
	Pusdiklat Kesos	522141		Beban Sewa		6.495.429.820
				<i>(Jurnal balik atas belanja barang yang masih harus dibayar LK Unaudited)</i>		
181	Pusdiklat Kesos	391119	Jurnal Manual	Koreksi Lainnya	6.495.429.820	
	Pusdiklat Kesos	212112		Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		6.495.429.820
				<i>(Jurnal koreksi beban sewa tahun 2019 yang dilaku sebagai koreksi lainnya)</i>		
TOTAL					364.106.458.422	364.106.458.422



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.463.964.201.084 atau mencapai 422% dari estimasi pendapatan sebesar Rp584.168.047.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp130.288.443.238.820 atau mencapai 98% dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp134.171.889.274.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.853.013.743.468 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.907.358.745.221; Aset Tetap (Netto) sebesar Rp20.858.343.705.151; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp444.425.400 dan Aset Lainnya (Netto) sebesar Rp86.866.867.696.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.740.312.192 dan Rp23.842.273.431.276.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp66.097.049.035 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah Rp128.421.821.124.018 sehingga defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp128.355.724.074.983), Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp201.148.653.809 dan sebesar Rp0 sehingga Kementerian Sosial RI mengalami Defisit-LO sebesar (Rp128.154.575.421.174).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp23.969.492.796.843 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp128.154.575.421.174) ditambah/(dikurangi) dengan koreksi-koreksi yang mempengaruhi Ekuitas senilai Rp265.664.326.554, Lain-lain senilai (Rp6.451.673.082) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp127.761.691.729.053 sehingga ekuitas Kementerian Sosial RI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp23.842.273.431.276.



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KEMENTERIAN SOSIAL****LAPORAN REALISASI ANGGARAN****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020		% thd Anggaran	31 Desember 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		584.168.047.000	2.463.964.201.084	421,79	516.740.242.519
JUMLAH PENDAPATAN		584.168.047.000	2.463.964.201.084	421,79	516.740.242.519
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	503.160.462.000	445.566.309.885	88,55	480.617.558.411
Belanja Barang	B.4	5.318.371.962.520	5.215.424.089.046	98,06	3.665.853.868.269
Belanja Modal	B.5	248.572.575.000	247.360.930.337	99,51	319.344.518.246
Belanja Bantuan Sosial	B.6	128.101.784.274.480	124.380.091.909.552	97,09	53.280.829.507.155
JUMLAH BELANJA		134.171.889.274.000	130.288.443.238.820	97,11	57.726.645.462.081

Jakarta, Mei 2021

Penanggung Jawab UAPA

Menteri Sosial RI,



Tri Rismaharini

KEMENTERIAN SOSIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	GAT	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1,100,000	67,666,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	2,058,132,172,068	2,011,950,360,632
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.3	71,526,400	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	368,789,028,861	360,334,178,898
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.6	(1,843,945,145)	(1,801,670,900)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.6	366,945,083,716	358,532,507,998
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	2,033,634,771	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.8	(10,168,174)	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)	C.9	2,023,466,597	-
Persediaan	C.10	480,185,394,440	455,884,848,039
JUMLAH ASET LANCAR		2,907,368,746,221	2,826,436,382,869
ASET TETAP			
Tanah	C.11	18,565,546,383,592	18,532,038,706,705
Peralatan dan Mesin	C.12	2,037,635,381,225	1,904,924,241,185
Gedung dan Bangunan	C.13	2,136,026,516,570	1,798,628,848,267
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.14	104,828,063,058	102,663,682,834
Aset Tetap Lainnya	C.15	22,818,085,114	21,990,010,062
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.16	2,194,436,815	281,836,313
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	(2,010,707,161,223)	(1,775,435,334,121)
JUMLAH ASET TETAP		20,868,343,705,161	20,585,091,991,225
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.18	446,658,693	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.19	(2,233,293)	-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.20	444,425,400	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		444,425,400	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	109,418,769,236	98,538,927,706
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	C.22	66,868,973,054	549,179,306,689
Aset Lain-Lain	C.23	32,144,606,305	26,297,974,644
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(121,585,480,899)	(108,775,697,744)
JUMLAH ASET LAINNYA		86,866,867,696	665,240,411,195
JUMLAH ASET		23,853,013,743,468	23,976,767,785,089
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	10,105,471,898	4,702,361,654
Hibah yang Belum Disahkan	C.26	171,028,400	527,339,126
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	441,580,113	1,967,279,848
Uang Muka Dari KPPN	C.28	1,100,000	67,666,000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	21,131,781	10,341,818
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		10,740,312,192	7,274,988,246
JUMLAH KEWAJIBAN		10,740,312,192	7,274,988,246
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	23,842,273,431,276	23,969,492,796,843
JUMLAH EKUITAS		23,842,273,431,276	23,969,492,796,843
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		23,853,013,743,468	23,976,767,785,089

Jakarta, Mei 2021

Penanggung Jawab UAPA
Menteri Sosial RI



Tri Rismaharini

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN SOSIAL LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	66.097.049.035	25.193.017.948
JUMLAH PENDAPATAN		66.097.049.035	25.193.017.948
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	445.259.411.851	480.563.464.039
Beban Persediaan	D.3	47.976.043.254	39.196.176.503
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.545.334.197.734	2.546.867.936.840
Beban Pemeliharaan	D.5	72.394.140.426	78.468.609.329
Beban Perjalanan Dinas	D.6	434.716.597.827	963.471.108.195
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	153.318.293.332	29.550.568.283
Beban Bantuan Sosial	D.8	122.475.399.979.702	51.221.474.250.664
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	247.367.784.180	252.849.834.076
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	54.675.712	1.799.954.514
JUMLAH BEBAN		128.421.821.124.018	55.614.241.904.443
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(128.355.724.074.983)	(55.589.048.886.495)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	673.307.230	1.447.303.661
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	200.475.346.579	451.787.461.118
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		201.148.653.809	453.234.764.779
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(128.154.575.421.174)	(55.135.814.121.716)
POS LUAR BIASA	D.13	-	-
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.14	(128.154.575.421.174)	(55.135.814.121.716)

Jakarta, Mei 2021

Penanggung Jawab UAPA
Menteri Sosial RI,



Tri Rismaharini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN SOSIAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
Ekuitas Awal	E1	23.969.492.796.843	5.978.367.271.420
Surplus/Defisit Lo	E2	(128.154.575.421.174)	(55.135.814.121.716)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E3	265.664.326.554	15.860.408.652.182
Koreksi Nilai Persediaan	E3.1	-	1.858.337.865
Koreksi Atas Reklasifikasi	E3.2	(1.767.095.521)	(936.795.743)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E3.3	277.669.193.080	15.421.011.225.108
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E3.4	(3.786.097.923)	(12.754.363.462)
Koreksi Lain-Lain	E4	(6.451.673.082)	451.230.248.414
Transaksi Antar Entitas	E5	127.761.691.729.053	57.266.530.994.957
Ditagihkan ke Entitas Lain	E5.1	130.113.500.626.991	57.636.484.135.381
Diterima dari Entitas Lain	E5.1	(2.463.964.201.084)	(516.740.242.519)
Transfer Keluar	E5.2	(183.533.292.531)	(718.750.608.475)
Transfer Masuk	E5.2	175.509.708.953	714.040.295.270
Pengesahan Hibah Langsung	E5.3	120.357.912.113	152.047.168.600
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E5.3	(179.025.389)	(549.753.300)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E6	(127.219.365.567)	17.991.125.525.423
Ekuitas Akhir	E7	23.842.273.431.276	23.969.492.796.843

Jakarta, Mei 2021

Penanggung Jawab UAPA

Menteri Sosial RI,


Tri Rismaharini



A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas dan Rencana

Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Sosial RI

Kebijakan tentang perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI 1945. Salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup sejahtera. Pembukaan UUD RI 1945 menyebutkan "... membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." Selanjutnya Pasal 34 UUD RI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dan mensejahterakan rakyat.

Hak konstitusional warga negara sesuai dengan UUD RI 1945, mengamanatkan kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penduduk dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial", dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana Pasal 3 UU No 11/2009 memiliki 6 (enam) tujuan. Tiga diantaranya ditujukan bagi PMKS, dua lainnya pada PSKS, dan satu tujuan ditujukan pada manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, maupun penduduk). Tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial penduduk dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian penduduk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Melalui pencapaian enam tujuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif, berkeadilan dan bermartabat.



Pendekatan

Penyusunan

Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Sosial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Sosial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:



Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Berdasarkan Surat KSAP Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018, belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara sebesar pembayaran belanja bantuans osial yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar nilai realisasi belanja.
- e. Belanja bantuan sosial yang telah terealisasi namun sampai tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak, belum dapat diakui



sebagai beban bantuan sosial di Laporan Operasional. Dengan demikian, dalam laporan keuangan terdapat kemungkinan nilai belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran tidak sama dengan nilai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional, yaitu sebesar belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang.

Beban

4. Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018, dalam hal rekening yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial merupakan rekening milik lembaga penyalur atau rekening pemerintah pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat dan bantuan sosial tersebut disalurkan kepada penerima bantuan sosial. Penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui pengambilan langsung tunai pada lembaga penyalur, transfer dana ke rekening milik penerima bantuan sosial, maupun penambahan saldo pada alat bayar elektronik atau uang elektronik yang dipersamakan yang dikuasai oleh penerima bantuan sosial.
- d. Terhadap sisa dana bantuan sosial yang belum tersalurkan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan yang berada di rekening milik lembaga penyalur atau rekening milik pemerintah pada lembaga penyalur serta entitas akuntansi/pelaporan yang mempunyai hak pengendalian atas dana tersebut, sisa dana bantuan sosial tersebut tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial, namun disajikan sebagai:
 - 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya, apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima;
 - 2) Kas Lainnya, apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara.
 - 3) Catatan atas Beban Bantuan Sosial Beras.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Kas Lainnya dan Setara Kas terkait dana Bantuan Sosial berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-



35/K.1/KSAP/III/2018 diakui apabila terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan atas sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara.

- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 4) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 6) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 7) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 8) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.



Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
- 5) Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- 6) Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.



- 7) Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 8) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 9) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Dana Lainnya terkait Bantuan Sosial berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018 diakui apabila terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan atas sisa dana bantuan sosial tersebut akan tetap disetorkan ke penerima manfaat.
- 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Revaluasi Barang
Milik Negara*

8. Revaluasi Barang Milik Negara

- a. Koreksi pencatatan hasil revaluasi BMN (koreksi pencatatan) dilakukan pada laporan keuangan level K/L, sedangkan untuk laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian seluruh K/L (Laporan Barang Milik Negara/LBMN) tidak perlu dilakukan koreksi.
- b. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, objek revaluasi terdiri dari BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) Aset tetap berupa: tanah; gedung dan bangunan; serta jalan, irigasi, dan jaringan (jalan, jembatan, dan bangunan air) pada K/L.
 - 2) Aset lainnya berupa aset tetap pada K/L yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
- c. Koreksi pencatatan dilakukan terhadap:
 - 1) Akun-akun yang timbul dari perekaman transaksi revaluasi (Koreksi Penilaian Kembali dan Koreksi Kesalahan Input IP dengan kode transaksi 205, 224, dan 225), misalnya akun Aset Tetap/Aset Kemitraan yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan di Laporan Operasional (LO), Revaluasi Aset Tetap di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta akun-akun lain yang terdampak sesuai dengan transaksi BMN yang terjadi setelah transaksi revaluasi.
 - 2) Akun-akun yang timbul dari perekaman transaksi barang berlebih (kode transaksi 120 dan 130), misalnya akun Aset Tetap yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap di Laporan Operasional (LO), Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta akun-akun lain yang terdampak sesuai dengan transaksi BMN yang terjadi setelah transaksi barang berlebih.
- d. Dalam penyusunan LKKL dan LKPP tahun 2018, telah dilakukan koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b. Mengingat bahwa hingga saat ini hasil penilaian kembali BMN belum dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP semester I tahun 2019, koreksi dimaksud tidak perlu dilakukan jurnal balik.
- e. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian seluruh K/L (Laporan Barang Milik Negara/LBMN) masih mengandung saldo terkait revaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu untuk melakukan koreksi pencatatan atas



- transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, di mana transaksi-transaksi lanjutan tersebut terjadi selama semester I tahun 2019.
- f. Terdapat tambahan jurnal lanjutan terkait koreksi pencatatan atas transaksi transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi. Jurnal-jurnal tersebut dilakukan pada periode semester II tahun 2019 sampai dengan triwulan III.
 - g. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No: S-189/PB/2020 tanggal 5 Maret 2020 Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Unaudited serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1, Kementerian Sosial melakukan koreksi atas revaluasi aset tetap tersebut pada Laporan Keuangan Audited TA 2019.
 - h. Pada Laporan Keuangan Unaudited TA 2020, Kementerian Sosial kembali melakukan pencatatan atas Koreksi Revaluasi Aset Tetap sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan No:S-26/PB/PB.6/2020 Hal: Rilis Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.1.0 Dalam Rangka Pencatatan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018 serta Penyusunan LKKL Tahun 2020.
 - i. Selanjutnya dalam rangka menyelesaikan tindak lanjut perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN secara tuntas, sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan No:S-5/PB/PB.6/2021 Hal: Rilis Update Aplikasi dan Referensi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA Versi 20.2.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2020, Kementerian Sosial kembali melakukan pencatatan atas transaksi perbaikan/koreksi hasil revaluasi dengan kondisi:
 - 1) Revaluasi BMN dan/atau koreksi hasil revaluasi BMN dengan LHIP yang diterbitkan sebelum tahun 2020 namun belum dilakukan perekaman sampai dengan semester II tahun 2020.
 - 2) Satker telah merekam transaksi IP awal pada tahun 2017-2018 dan dilanjutkan dengan perekaman transaksi perbaikan/koreksi hasil IP pada tahun 2019 berdasarkan LHIP revisi, namun masih diperlukan perbaikan/koreksi hasil IP berdasarkan temuan pemeriksaan oleh BPK (koreksi atas koreksi hasil IP).
 - 3) Perbaikan hasil revaluasi BMN dengan transaksi lanjutan berupa transfer keluar – transfer masuk dan/atau reklasifikasi keluar – reklasifikasi masuk yang memerlukan perekaman secara manual.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Laporan Keuangan

A.6. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Laporan Keuangan

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia mulai mengumumkan adanya masyarakat yang terdeteksi Covid-19. Sejak saat itu, Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan Penanganan Covid-19 dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pada tanggal 14 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menyatakan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional yang sebelumnya PBB juga telah mengumumkan Covid-19 sebagai *Pandemic Global*.



Upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden ialah dengan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH), baik untuk Kementerian Negara/Lembaga maupun perusahaan-perusahaan swasta. Membatasi aktivitas-aktivitas bertatap muka, melakukan rapat/pertemuan menggunakan video conference, dan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kementerian Sosial dalam hal ini merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bekerja di Kantor dan Bekerja dari Rumah (*Work From Home*) bagi ASN Kementerian Sosial dalam rangkaantisipasi pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19 juga berdampak pada penghematan anggaran sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189.1/KMK/02/2020 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 yang disahkan dengan Surat Kementerian Keuangan NoS-714/AG/2020 Hal: Pengesahan Revisi Penghematan Anggaran pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020.

Akibat penghematan pada belanja tersebut, maka terdapat potensi terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun anggaran 2020, hal ini disebabkan karena Pekerjaan Perencanaan telah dilaksanakan sedangkan pekerjaan fisik, dan pengawasannya masuk dalam anggaran yang terkena dampak penghematan. Dampak penanganan Covid-19 juga berdampak terhadap penghematan belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional lainnya serta belanja barang lainnya yang terhambat dapat ditunda di tahun anggaran berikutnya, hal ini berpengaruh secara simultan dengan pembatasan dan penundaan pencairan anggaran yang mengakibatkan kewajiban kepada pihak ke 3 berpotensi belum dapat diselesaikan dan kegiatan lain yang sudah dilaksanakan tidak dapat direalisasikan secara keuangan.

Pembatasan aktivitas-aktivitas bertatap muka, melakukan rapat/pertemuan menggunakan *video conference*, dan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 akan berpotensi terhadap mengakibatkan turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang signifikasinya bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan Perizinan Lainnya. Penerimaan Hibah Langsung juga berpotensi terdampak karena pembatasan aktivitas sosial yang proses operasionalnya melibatkan pihak ketiga baik dari donor pemberi hibah maupun Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang menangani proses Pengesahan Hibah Langsung dalam Negeri.



*Program
Penanganan
Pandemi COVID-
19 dan/atau
Pemulihan
Ekonomi Nasional*

A.7. Capaian Output Terkait Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC – PEN)

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC – PEN) pada sektor perlindungan sosial, output yang telah dicapai oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:



No	Program	Kode Satker	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)					Persentase Penyerapan	Realisasi Volume Keluaran
				Akun Khusus	Rupiah	Akun Reguler	Rupiah	Total (Rp)		
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	027.05.440310	36.713.986.000.000	574114	8.281.736.500.000	574111	28.432.249.479.000	36.713.985.979.000	100,00%	10.000.000
2	Paket Sembako Jabodetabek	027.05.440281	6.732.786.600.000	576115	6.727.296.068.000	-	-	6.727.296.068.000	99,92%	2.189.860
	Biaya Kirim Paket Sembako Jabodetabek mulai Juli 2020	027.05.440281	368.087.400.000	521241	368.071.120.973	-	-	368.071.120.973	100,00%	-
3	Kartu Sembako	027.06.418942	15.574.932.648.120	-	-	575111	15.241.505.000.000	15.241.505.000.000	97,86%	7.078.538
		027.06.418943	14.990.034.406.760	-	-	575111	14.518.630.500.000	14.518.630.500.000	96,86%	6.537.241
		027.06.418944	12.025.794.634.600	-	-	575111	11.963.350.600.000	11.963.350.600.000	99,48%	5.535.637
	Biaya Kirim Kartu Sembako Secara Tunai di Provinsi Papua dan Papua Barat	027.06.418942	-	-	-	-	-	-	-	-
		027.06.418943	-	-	-	-	-	-	-	-
		027.06.418944	18.250.000.000	-	-	521219	12.462.850.950	12.462.850.950	68,29%	341.682
4	Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek	027.06.418942	12.578.648.400.000	575114	12.742.341.000.000	575111	231.460.800.000	12.973.801.800.000	103,14%	3.448.957
		027.06.418943	10.836.963.000.000	575114	11.006.280.300.000	-	-	11.006.280.300.000	101,56%	3.068.132
		027.06.418944	8.723.514.600.000	575114	8.836.087.725.077	-	-	8.836.087.725.077	101,29%	2.537.880
5	Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Sembako Non PKH	027.06.418942	371.347.396.630	521241	371.347.235.751	-	-	371.347.235.751	100,00%	-
		027.06.418943	325.752.309.990	521241	313.149.333.895	-	-	313.149.333.895	96,13%	-
		027.06.418944	262.442.378.100	521241	246.194.428.162	-	-	246.194.428.162	93,81%	-
6	Bansos Beras bagi KPM PKH	027.06.418942	1.658.659.000.000	575114	1.658.659.000.000	-	-	1.658.659.000.000	100,00%	3.317.318
		027.06.418943	1.675.424.000.000	575114	1.675.424.000.000	-	-	1.675.424.000.000	100,00%	3.350.848
		027.06.418944	1.165.917.000.000	575114	1.165.917.000.000	-	-	1.165.917.000.000	100,00%	2.331.834
6	Bansos Beras bagi KPM PKH	027.03.682033	4.505.850.000.000	573115	4.505.850.000.000	-	-	4.505.850.000.000	100,00%	10.000.000
		027.03.682033	753.750.000.000	521241	751.500.000.000	-	-	751.500.000.000	99,70%	-
Total			129.282.139.774.200		58.649.853.711.858		70.399.659.229.950	129.049.512.941.808	99,82%	



A.8. Penjelasan *Refocusing* Kegiatan/Realokasi Anggaran

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Kementerian Sosial melakukan *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan BA BUN Tahap I pada tanggal 15 April 2020 sebesar Rp43.754.136.500.000 dengan rincian:
 - a. Penambahan anggaran program PKH sebesar Rp8.281.736.500.000 untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran akibat perubahan mekanisme penyaluran yang sebelumnya dilakukan setiap tiga bulan menjadi setiap bulan bagi 10 juta KPM.
 - b. Penambahan anggaran Program Kartu Sembako sebesar Rp15.520.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan akibat peningkatan indeks dari Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan, dan perluasan target penerima manfaat dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM.
 - c. Penambahan anggaran Bantuan sosial khusus DKI sebesar Rp2.340.000.000.000 yang akan diberikan kepada 1.300.000 KK sebesar Rp600.000/keluarga/bulan selama 3 bulan.
 - d. Penambahan anggaran Bantuan sosial khusus Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) sebesar Rp1.080.000.000.000 yang akan diberikan kepada 600.000 KK sebesar Rp600.000/keluarga/bulan selama 3 bulan.
 - e. Penambahan anggaran Bantuan sosial untuk keluarga DTKS Non Penerima Bantuan Sosial sebesar Rp16.200.000.000.000 yang akan disalurkan kepada 9 juta KK sebesar Rp600.00/keluarga/bulan selama 3 bulan, dengan tambahan biaya distribusi pengiriman sebesar Rp332.400.000.000.
2. Terdapat penghematan anggaran tahun 2020 berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020 pada tanggal 30 April 2020. Adapun nilai penghematan tersebut sebesar Rp2.080.876.364.000
3. Terdapat penambahan BA BUN Tahap II pada tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp20.312.069.426.000 dengan rincian:
 - a. Penambahan anggaran Bansos sembako pasca tanggap darurat dampak Covid-19 yang akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1,3 Juta KK dan Bodetabek sebanyak 600.000 KK selama 6 (enam) bulan (Juli s.d. Desember).
 - b. Penambahan anggaran Bansos tunai pasca tanggap darurat dampak Covid-19 yang akan disalurkan kepada masyarakat (di luar wilayah Jabodetabek penerima bantuan Program Bansos Sembako serta bukan penerima Bansos PKH dan Kartu Sembako) sebanyak 9 Juta KK selama 6 (enam) bulan (Juli s.d. Desember).



4. Terdapat penambahan BA BUN Tahap III pada tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp9.243.000.000.000 dengan rincian:
 - a. Penambahan anggaran bantuan sosial beras untuk 10 juta KPM sebesar Rp4.618.350.000.000.
 - b. Penambahan anggaran bantuan sosial tunai sebesar Rp4.624.650.000.000.
5. Terdapat *refocusing* anggaran pada tanggal 9 September 2020 sebesar Rp14.999.430.000 berupa realokasi kegiatan kehumasan (Sekretariat Jenderal) dalam rangka publikasi program nasional termasuk publikasi Bansos Covid-19 yang diambil dari anggaran Ditjen Linjamsos dan BP3S.
6. Terdapat *refocusing* anggaran pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp692.848.292.000 dari Ditjen Penanganan Fakir Miskin untuk program bantuan sosial beras pada Ditjen Pemberdayaan Sosial (Direktorat PSPKKM) dan untuk kebutuhan biaya asuransi gedung, renovasi bangunan, perencanaan pembangunan Politeknik, RUU Bencana dan honor tim RUU Bencana pada Sekretariat Jenderal.
7. Terdapat *refocusing* anggaran pada tanggal 8 Oktober 2020 sebesar Rp260.874.000.000 dari Ditjen Penanganan Fakir Miskin ke Ditjen Linjamsos untuk program bansos komunitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Sosial telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 terdapat adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat penanganan Pandemi COVID-19.

Perubahan atas anggaran Pendapatan dan Belanja dirinci sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020		Naik/Turun	%
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI		
Pendapatan				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.415.252.064	584.168.047.000	573.752.794.936	5.508,77
Jumlah Pendapatan	10.415.252.064	584.168.047.000	573.752.794.936	
Belanja				
Belanja Pegawai	510.117.258.000	503.160.462.000	(6.956.796.000)	(1,36)
Belanja Barang	3.794.637.277.000	5.318.371.962.520	1.523.734.685.520	40,15
Belanja Modal	273.819.683.000	248.572.575.000	(25.247.108.000)	(9,22)
Belanja Bantuan Sosial	58.189.069.376.000	128.101.784.274.480	69.912.714.898.480	120,15
Jumlah Belanja	62.767.643.594.000	134.171.889.274.000	71.404.245.680.000	113,76

Estimasi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp573.752.794.936 atau sebesar 5.508,77 persen dengan rincian ditiap Eselon I dirinci sebagai berikut:

Uraian	Estimasi Pendapatan Semula	Estimasi Pendapatan Setelah Revisi	Naik/Turun	%
Sekretariat Jenderal	3.550.750.764	3.550.751.000	236	0,00
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	750.000.000	750.000.000	-	-
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	1.425.548.900	1.406.911.000	(18.637.900)	(1,31)
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	95.000.000.000	95.000.000.000	-
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	477.625.483.000	477.625.483.000	-
Badiklit Pensos	4.688.952.400	5.834.902.000	1.145.949.600	24,44
Total	10.415.252.064	584.168.047.000	573.752.794.936	5.508,77

Perubahan Estimasi Pendapatan dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-511/AG/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020.



Selanjutnya Anggaran Belanja Kementerian Sosial mengalami kenaikan Rp71.404.245.680.000 atau sebesar 113,76 persen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total
Anggaran Belanja Semula	62.767.643.594.000
Mutasi	
Penambahan Anggaran Belanja dari BA BUN Tahap I (15 April 2020)	43.754.136.500.000
Penghematan Anggaran Belanja Tahun 2020 Perpres 54 Tahun 2020 (30 April 2020)	(2.080.876.364.000)
Penambahan Anggaran Belanja dari Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri Periode Jan-Mar 2020	12.945.950.000
Penambahan Anggaran dari BA BUN Tahap II (15 Juli 2020)	20.312.069.426.000
Penambahan dari BA BUN Tahap 3	9.243.000.000.000
Penambahan Anggaran yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri	2.028.301.000
Penambahan Anggaran yang bersumber dari PNBP	794.482.000
Penambahan Anggaran Belanja dari Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri periode Apr-Sept 2020	107.640.165.000
Penambahan Anggaran Belanja dari Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri periode Okt-Des 2020	52.507.220.000
Total Mutasi	71.404.245.680.000
Anggaran Belanja Setelah Revisi	134.171.889.274.000

Perubahan Anggaran Belanja sebesar Rp71.404.245.680 atau naik sebesar 113,76 persen di tiap Eselon I dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Naik/Turun	%
Sekretariat Jenderal	468.225.655.000	405.637.271.000	(62.588.384.000)	(13,37)
Inspektorat Jenderal	46.550.770.000	32.550.770.000	(14.000.000.000)	(30,07)
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	391.757.849.000	5.695.998.226.000	5.304.240.377.000	1.353,96
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	973.764.729.000	895.793.030.000	(77.971.699.000)	(8,01)
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	31.380.074.415.000	46.216.528.775.000	14.836.454.360.000	47,28
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	28.975.250.028.000	80.552.566.002.000	51.577.315.974.000	178,00
Badiklit Pensos	532.020.148.000	372.815.200.000	(159.204.948.000)	(29,92)
Total	62.767.643.594.000	134.171.889.274.000	71.404.245.680.000	113,76

Anggaran Belanja mengalami kenaikan secara signifikan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagai dampak dialokasikannya Program Bantuan Sosial guna Pemulihan Ekonomi Nasional atas dampak Pandemi COVID-19 pada kluster Perlindungan Sosial berupa Bantuan Sosial Beras, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Paket Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Program Kartu Sembako, Program Bantuan Sosial Tunai Non Jabodetabek, dan Program Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Non PKH.

Penjelasan atas Program Bantuan Sosial untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan dijelaskan pada Penjelasan atas Pos Realisasi Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Pendapatan

Rp2.463.964.201.084

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp2.463.964.201.084** atau mencapai 421,79 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp584.168.047.000**. Pendapatan di setiap UKE I adalah sebagai berikut:



Uraian	Periode yang Berakhir 31 Desember 2020		
	Estimasi	Realisasi	%
Sekretariat Jenderal	3.550.751.000	2.481.522.067	69,89
Inspektorat Jenderal	-	22.757.823	0
Ditjen Pemberdayaan Sosial	750.000.000	7.869.568.746	1049,28
Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.406.911.000	12.555.033.865	892,38
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	95.000.000.000	531.020.003.706	558,97
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	477.625.483.000	1.901.567.121.298	398,13
Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	5.834.902.000	8.448.193.579	144,79
Jumlah	584.168.047.000	2.463.964.201.084	421,79

Berdasarkan tabel diatas, rincian Realisasi Pendapatan menurut Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagaiberikut:

1. Sekretariat Jenderal Rp2.481.522.067

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	310.654.000
2	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	2.005.821.152
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	2.000
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	83.641.315
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	68.643.893
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	278.259.707
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	16.000.000
Realisasi Pendapatan (Bruto)		2.763.022.067
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan		(281.500.000)
Realisasi Pendapatan (Netto)		2.481.522.067

2. Inspektorat Jenderal Rp22.757.823

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	10.050.193
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12.707.630
Jumlah		22.757.823

3. Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp7.869.568.746

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	195.900
2	Pendapatan Perizinan Lainnya	711.619.938
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.923.728.878
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	190.077.550
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	89.676.285
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	399.175.315
7	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	555.094.880
Jumlah		7.869.568.746



4. Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp12.555.033.865

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	44.328.000
2	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	15.500.000
3	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	265.674.222
4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	131.169.275
5	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	315.421.359
6	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000
7	Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi	290.669.500
8	Pendapatan Jasa Lainnya	757.000
9	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	82.235.992
10	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.410.149
11	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	65.802.051
12	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	50.584.238
13	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.238.438.522
14	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	10.040.763.179
15	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	200.000
16	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	8.080.378
Jumlah		12.555.033.865

5. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp531.020.003.706

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	261.925.076
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.102.490
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	23.738.586
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	27.579.960
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.305.639.639
6	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	528.396.017.955
Jumlah		531.020.003.706

6. Ditjen Penanganan Fakir Miskin Rp1.901.567.121.298

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	192.094.000
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	41.457.076.865
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	20.332.580
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	601.678.825
5	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	1.859.295.939.028
Jumlah		1.901.567.121.298



7. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Rp8.448.193.579

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.900.000
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	97.503.000
3	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	166.649.549
4	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	751.650.000
5	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.634.750.000
6	Pendapatan Pendidikan Lainnya	240.650.000
7	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	274
8	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	80.450.532
9	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	54.509.301
10	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.407.742.294
11	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	8.388.576
12	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	53
Jumlah		8.448.193.579

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan pada Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:

Uraian	Periode yang Berakhir 31 Desember 2020		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	4.204.936.000	3.826.885.726	91,01
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	750.000.000	711.619.938	94,88
Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	5.568.200.000	5.627.050.000	101,06
Pendapatan Jasa Lainnya	1.019.428.000	291.426.500	28,59
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	-	47.551.787.814	-
Pendapatan Denda	-	295.676.817	-
Pendapatan Lain-Lain	572.625.483.000	2.405.941.254.289	420,16
Total Pendapatan	584.168.047.000	2.464.245.701.084	421,84
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	(281.500.000)	-
Jumlah	584.168.047.000	2.463.964.201.084	421,79

Berdasarkan tabel di atas rincian realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan (Bruto) dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha sebesar Rp3.826.885.726 dan dikurangi Pengembalian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha sebesar Rp281.500.000 dengan rincian:



No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	44.328.000
2	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	15.500.000
3	Pendapatan dari Pejualan Peralatan dan Mesin	271.574.222
4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.003.395.544
5	Pendapatan Sew a Tanah Gedung dan Bangunan	2.488.087.960
6	Pendapatan Sew a Peralatan dan Mesin	4.000.000
Realisasi (Bruto)		3.826.885.726
	Pengembalian Pendapatan Sew a Tanah Gedung dan Bangunan	(281.500.000)
Realisasi (Netto)		3.545.385.726

2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Rp711.619.938 berupa Pendapatan Perizinan Lainnya.

3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp5.627.050.000 berupa:

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	751.650.000
2	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.634.750.000
3	Pendapatan Pendidikan Lainnya	240.650.000
Jumlah		5.627.050.000

4. Pendapatan Jasa Lainnya Rp291.426.500:

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi	290.669.500
2	Pendapatan Jasa Lainnya	757.000
Jumlah		291.426.500

5. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan Rp47.551.787.814 berupa:

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	47.468.146.499
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai	83.641.315
Jumlah		47.551.787.814

6. Pendapatan Denda sebesar Rp295.676.817 berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

7. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp2.405.941.254.289 berupa:

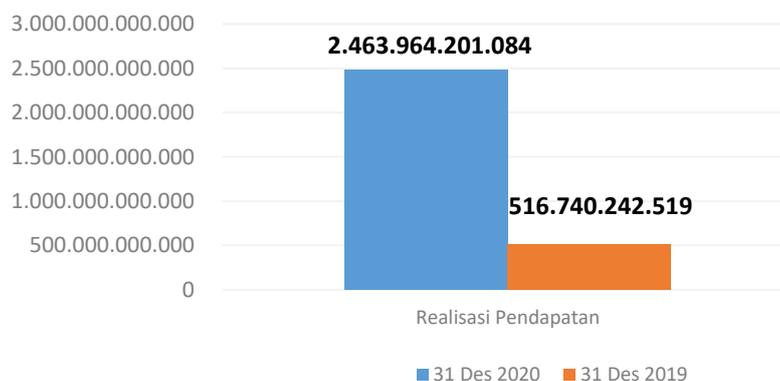
No	Uraian Akun	Nominal
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	339.251.700
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6.043.080.018
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.262.827.098
4	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	2.398.287.815.042
5	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	200.000
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	8.080.431
Jumlah		2.405.941.254.289

Selanjutnya, realisasi pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan Rp1.947.223.958.565 atau sebesar 376,83% dengan rincian:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan usaha	3.545.385.726	9.482.528.954	(5.937.143.228)	(62,61)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	711.619.938	1.245.189.272	(533.569.334)	(42,85)
Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	5.627.050.000	6.554.733.000	(927.683.000)	(14,15)
Pendapatan Jasa Lainnya	291.426.500	649.908.500	(358.482.000)	(55,16)
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	47.551.787.814	7.441.992.593	40.109.795.221	538,97
Pendapatan Denda	295.676.817	3.579.283.831	(3.283.607.014)	(91,74)
Pendapatan Lain-lain	2.405.941.254.289	487.786.606.369	1.918.154.647.920	393,24
Jumlah	2.463.964.201.084	516.740.242.519	1.947.223.958.565	376,83

Realisasi Pendapatan naik secara signifikan pada pos Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan sebesar 538,97 persen berupa Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) serta Penerimaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Kenaikan signifikan juga terdapat pada pos Pendapatan Lain-lain sebesar 393,24 persen berupa Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu yang tidak tersalur dan disetorkan ke kas Negara pada Tahun Anggaran 2020.

Kenaikan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat diilustrasikan pada grafik sebagai berikut:





Realisasi Belanja

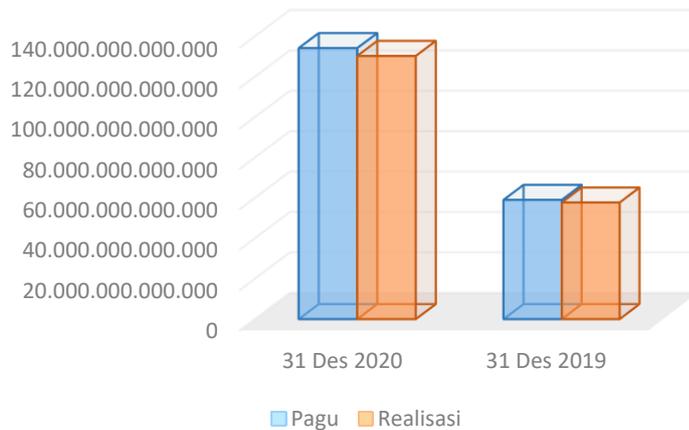
B.2. BELANJA

Rp130.288.443.238.820

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp130.288.443.238.820** dan **Rp57.726.645.452.081**. Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp72.561.797.786.739** atau sebesar 125,70% dari realisasi belanja pada periode 31 Desember 2019.

Selanjutnya realisasi Belanja Kementerian Sosial RI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 97,11 persen dari anggaran belanja sebesar **Rp134.171.889.274.000**.

Perbandingan antara pagu dan realisasi belanja Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:



Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan (%)
Pagu	134.171.889.274.000	59.039.206.791.000	75.132.682.483.000	127,26
Realisasi Belanja	130.288.443.238.820	57.726.645.452.081	72.561.797.786.739	125,70
Persentase Realisasi (%)	97,11	97,78		

B.2.1. Realisasi Belanja

B.2.1.1. Belanja Kementerian Sosial menurut Unit Eselon I

Realisasi Belanja Kementerian Sosial sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dirinci menurut Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

No	UKE I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	392.155.995.237	442.404.491.923	(50.248.496.686)	(11,36)
2	Inspektorat Jenderal	31.824.447.870	47.596.689.248	(15.772.241.378)	(33,14)
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	5.685.852.047.219	505.989.236.755	5.179.862.810.464	1.023,71
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	850.643.474.141	1.158.631.960.107	(307.988.485.966)	(26,58)
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	46.161.541.297.254	34.763.181.659.013	11.398.359.638.241	32,79
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	76.808.991.707.799	20.113.590.633.266	56.695.401.074.533	281,88
7	Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	357.434.269.300	695.250.781.769	(337.816.512.469)	(48,59)
	Total	130.288.443.238.820	57.726.645.452.081	72.561.797.786.739	125,70



Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar **Rp76.808.991.707.799** dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar **Rp46.161.541.297.254**.

Adapun Penyerapan Anggaran Kementerian Sosial disetiap Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	UKEI	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	% Pagu/Realisasi (Netto)
1	Sekretariat Jenderal	405.637.271.000	392.470.286.210	314.290.973	392.155.995.237	96,68
2	Inspektorat Jenderal	32.550.770.000	31.847.309.193	22.861.323	31.824.447.870	97,77
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	5.695.998.226.000	5.686.365.776.727	513.729.508	5.685.852.047.219	99,82
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	895.793.030.000	852.164.237.252	1.520.763.111	850.643.474.141	94,96
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	46.216.528.775.000	46.194.628.695.873	33.087.398.619	46.161.541.297.254	99,88
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	80.552.566.002.000	79.306.418.481.462	2.497.426.773.663	76.808.991.707.799	95,35
7	Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	372.815.200.000	357.945.868.254	511.598.954	357.434.269.300	95,87
Total		134.171.889.274.000	132.821.840.654.971	2.533.397.416.151	130.288.443.238.820	97,11

B.2.1.2. Belanja Kementerian Sosial menurut Program

Rincian Anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

PPROGRAM	Periode yang Berakhir 31 Desember 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI (NETTO)	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	405.637.271.000	392.155.995.237	96,68
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	32.550.770.000	31.824.447.870	97,77
Program Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan dan penyuluhan Sosial	372.815.200.000	357.434.269.300	95,87
Program Rehabilitasi Sosial	895.793.030.000	850.643.474.141	94,96
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	46.216.528.775.000	46.161.541.297.254	99,88
Program Pemberdayaan Sosial	5.695.998.226.000	5.685.852.047.219	99,82
Program Penangan Fakir Miskin	80.552.566.002.000	76.808.991.707.799	95,35
Total	134.171.889.274.000	130.288.443.238.820	97,11

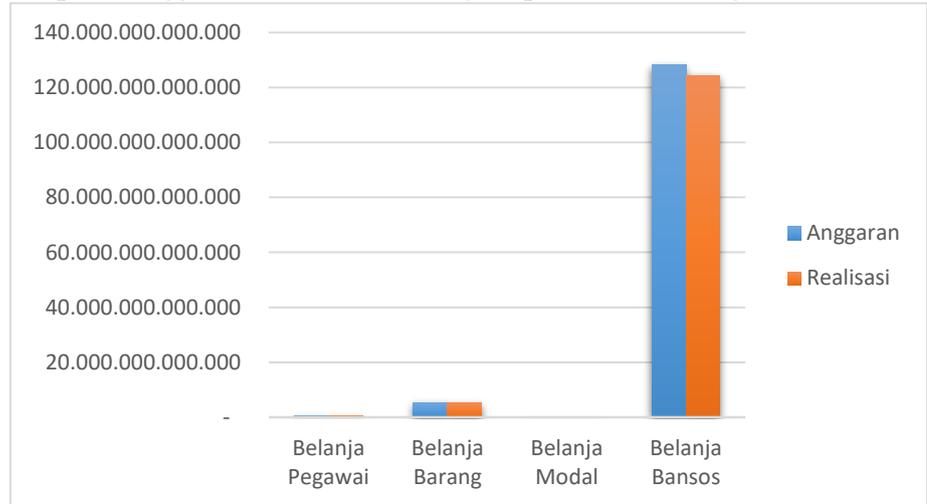
B.2.1.3. Belanja Kementerian Sosial menurut Jenis Belanja

Belanja Kementerian Sosial menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut:



Uraian	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020					
	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	% Real Angg.	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	503.160.462.000	445.668.072.727	101.762.842	445.566.309.885	88,55	57.594.152.115
Belanja Barang	5.318.371.962.520	5.225.610.598.491	10.186.509.445	5.215.424.089.046	98,06	102.947.873.474
Belanja Modal	248.572.575.000	247.380.454.838	19.524.501	247.360.930.337	99,51	1.211.644.663
Belanja Bantuan Sosial	128.101.784.274.480	126.903.181.528.915	2.523.089.619.363	124.380.091.909.552	97,09	3.721.692.364.928
Total	134.171.889.274.000	132.821.840.654.971	2.533.397.416.151	130.288.443.238.820	97,11	3.883.446.035.180

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Adapun Rincian perbandingan alokasi anggaran untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	503.160.462.000	489.387.325.000	13.773.137.000	2,81
Belanja Barang	5.318.371.962.520	3.814.831.867.000	1.503.540.095.520	39,41
Belanja Modal	248.572.575.000	322.514.274.000	(73.941.699.000)	(22,93)
Belanja Bantuan Sosial	128.101.784.274.480	54.412.473.325.000	73.689.310.949.480	135,43
Jumlah	134.171.889.274.000	59.039.206.791.000	75.132.682.483.000	127,26

Selanjutnya perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	445.566.309.885	480.617.558.411	(35.051.248.526)	(7,29)
Belanja Barang	5.215.424.089.046	3.665.853.868.269	1.549.570.220.777	42,27
Belanja Modal	247.360.930.337	319.344.518.246	(71.983.587.909)	(22,54)
Belanja Bantuan Sosial	124.380.091.909.552	53.260.829.507.155	71.119.262.402.397	133,53
Jumlah	130.288.443.238.820	57.726.645.452.081	72.561.797.786.739	125,70



Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 Realisasi Belanja Kementerian Sosial secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 125,70 persen dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut didukung dengan kenaikan anggaran sebesar 127,26 persen guna Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berdampak pada kenaikan secara signifikan pada Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang. Adapun rincian untuk Belanja Barang dan Bantuan Sosial untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

No.	No Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi Neto	%
Menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19					
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25.174.066.000	24.361.876.917	96,77
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.112.570.710.720	2.077.659.053.163	98,35
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	7.717.249.000	7.429.130.080	96,27
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	25.661.859.000	24.568.235.417	95,74
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	141.710.000	138.268.500	97,57
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	19.537.331.000	18.548.796.283	94,94
7	526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi COVID-19	9.252.250.000	9.238.750.000	99,85
8	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Bentuk Barang- Penanganan Pandemi COVID-19	34.601.247.000	34.264.774.348	99,03
9	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	988.950.000	987.600.000	99,86
10	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.014.000.000	1.011.448.264	99,75
11	571114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	125.000.000	125.000.000	100,00
12	573115	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang- Penanganan Pandemi COVID-19	4.505.850.000.000	4.505.850.000.000	100,00
13	574114	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi COVID-19	8.281.736.500.000	8.266.540.473.248	99,82
14	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi COVID-19	36.639.126.000.000	36.174.411.280.000	98,73
15	576115	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang- Penanganan Pandemi COVID-19	6.732.836.600.000	6.726.301.483.944	99,90
Subtotal			58.396.333.472.720	57.871.436.170.164	99,10
Menggunakan Akun Reguler					
1	521211	Belanja Bahan	9.192.000	53.786.000	585,14
2	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	55.500.000	49.800.000	89,73
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18.250.000.000	12.462.850.950	68,29
4	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	28.432.249.500.000	28.416.478.396.110	99,94
5	575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	42.590.761.689.480	39.376.633.472.066	92,45
Subtotal			71.041.325.881.480	67.805.678.305.126	95,45
Total			129.437.659.354.200	125.677.114.475.290	97,09

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Pos-Pos Realisasi Belanja secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:



Belanja Pegawai

Rp445.566.309.885

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp445.566.309.885** dan **Rp480.617.558.411** mengalami penurunan sebesar (Rp35.051.248.526) sebesar (7,29) persen.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai menurut Unit Kerja Eselon I untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	UKEI	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	55.529.307.756	61.118.266.548	(5.588.958.792)	(9,14)
2	Inspektorat Jenderal	15.705.181.490	16.934.767.804	(1.229.586.314)	(7,26)
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	23.618.248.652	24.989.787.992	(1.371.539.340)	(5,49)
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	209.720.258.465	227.627.788.114	(17.907.529.649)	(7,87)
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	19.503.851.731	20.938.751.915	(1.434.900.184)	(6,85)
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	17.662.878.513	18.577.968.048	(915.089.535)	(4,93)
7	Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	103.826.583.278	110.430.227.990	(6.603.644.712)	(5,98)
Total		445.566.309.885	480.617.558.411	(35.051.248.526,00)	(7,29)

Terdapat Penurunan Realisasi Belanja Pegawai diantaranya dipengaruhi oleh Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS pada bulan Mei 2020 dan Gaji Ketiga Belas yang tidak meliputi Komponen Tunjangan Kinerja Pegawai yang mengakibatkan turunnya Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) sebesar (15,10) persen.

Selanjutnya Alokasi anggaran Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp503.160.462.000 dan Rp489.387.325.000 yang mengalami kenaikan sebesar Rp13.773.137.000 atau 2,81 persen.

Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Pegawai	503.160.462.000	489.387.325.000	13.773.137.000	2,81

Adapun Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai menurut Jenis Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	189.156.731.611	194.803.540.170	(5.646.808.559)	(2,90)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.708.324	3.024.313	(315.989)	(10,45)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	13.163.233.134	13.574.173.932	(410.940.798)	(3,03)
Belanja Tunjangan Anak PNS	3.551.516.604	3.735.699.870	(184.183.266)	(4,93)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	9.317.770.000	9.405.890.000	(88.120.000)	(0,94)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.673.655.000	9.921.610.000	(247.955.000)	(2,50)
Belanja Tunjangan PPh PNS	1.073.934.890	1.164.600.094	(90.665.204)	(7,79)
Belanja Tunjangan Beras PNS	8.690.930.160	9.083.735.480	(392.805.320)	(4,32)
Belanja Uang Makan PNS	27.035.521.451	24.255.552.300	2.779.969.151	11,46
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	189.400.000	195.155.000	(5.755.000)	(2,95)
Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	5.230.255.000	5.619.955.000	(389.700.000)	(6,93)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3.935.746.895	3.885.576.100	50.170.795	1,29
Belanja Uang Lembur	1.606.735.000	1.391.764.550	214.970.450	15,45
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	173.039.934.658	203.818.410.001	(30.778.475.343)	(15,10)
Jumlah Belanja Kotor	445.668.072.727	480.858.686.810	(35.190.614.083)	(7,32)
Pengembalian Belanja Pegawai	(101.762.842)	(241.128.399)	139.365.557	(57,80)
Jumlah Belanja Bersih	445.566.309.885	480.617.558.411	(35.051.248.526)	(7,29)

Belanja Barang

Rp5.215.424.089.046

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp5.215.424.089.046** dan **Rp3.665.853.868.269** mengalami kenaikan sebesar Rp1.549.570.220.777 atau sebesar 42,27 persen yang didukung dengan kenaikan alokasi belanja barang sebesar Rp1.503.540.095.520 atau sebesar 39,41 persen.

Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Barang untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN)	%
Belanja Barang	5.318.371.962.520	3.814.831.867.000	1.503.540.095.520	39,41

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Belanja Barang menurut Unit Kerja Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	UKEI	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	248.387.792.487	279.501.950.039	(31.114.157.552)	(11,13)
2	Inspektorat Jenderal	16.119.266.380	28.658.810.944	(12.539.544.564)	(43,75)
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	924.467.326.421	295.787.352.665	628.679.973.756	212,54
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	353.865.444.466	477.927.233.475	(124.061.789.009)	(25,96)
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.302.904.621.099	1.801.181.002.145	501.723.618.954	27,86
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	1.174.841.285.721	325.361.345.823	849.479.939.898	261,09
7	Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	194.838.352.472	457.436.173.178	(262.597.820.706)	(57,41)
Total		5.215.424.089.046	3.665.853.868.269	1.549.570.220.777	42,27



Adapun Perbandingan Realisasi Belanja Barang menurut Jenis Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	146.393.256.771	112.350.764.715	34.042.492.056	30,30
Belanja Barang Non Operasional	4.191.115.362.844	2.166.831.772.561	2.024.283.590.283	93,42
Belanja Barang Persediaan	37.291.080.278	39.718.004.607	(2.426.924.329)	(6,11)
Belanja Jasa	217.788.679.932	267.795.043.034	(50.006.363.102)	(18,67)
Belanja Pemeliharaan	72.538.402.889	77.817.021.240	(5.278.618.351)	(6,78)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	443.054.662.446	987.680.060.061	(544.625.397.615)	(55,14)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	632.643.463	5.397.323.522	(4.764.680.059)	(88,28)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	118.200.000	18.665.940.906	(18.547.740.906)	(99,37)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masy.	116.678.309.868	20.211.508.500	96.466.801.368	477,29
Jumlah Belanja Kotor	5.225.610.598.491	3.696.467.439.146	1.529.143.159.345	41,37
Pengembalian Belanja	(10.186.509.445)	(30.613.570.877)	20.427.061.432	
Jumlah Belanja	5.215.424.089.046	3.665.853.868.269	1.549.570.220.777	42,27

Realisasi Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 477,29 persen yang disebabkan oleh tindak lanjut atas Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam rangka penanganan COVID-19 dimana kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas dan belanja barang yang tidak mendesak dialihkan untuk kegiatan yang berdampak kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan realokasi anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat.

Kementerian Sosial RI mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp2.253.017.974.720 dan terserap sebesar Rp2.208.775.321.658 atau 98,04 persen dengan rincian sebagai berikut:



No.	No Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi Neto	%
Menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19					
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25.174.066.000	24.361.876.917	96,77
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.112.570.710.720	2.077.659.053.163	98,35
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	7.717.249.000	7.429.130.080	96,27
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	25.661.859.000	24.568.235.417	95,74
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	141.710.000	138.268.500	97,57
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	19.537.331.000	18.548.796.283	94,94
7	526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi COVID-19	9.252.250.000	9.238.750.000	99,85
8	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Bentuk Barang- Penanganan Pandemi COVID-19	34.601.247.000	34.264.774.348	99,03
Subtotal			2.234.656.422.720	2.196.208.884.708	98,28
Menggunakan Akun Reguler					
1	521211	Belanja Bahan	56.052.000	53.786.000	95,96
2	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	55.500.000	49.800.000	89,73
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18.250.000.000	12.462.850.950	68,29
Subtotal			18.361.552.000	12.566.436.950	68,44
Total			2.253.017.974.720	2.208.775.321.658	98,04

Belanja Modal

Rp247.360.930.337

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp247.360.930.337** dan **Rp319.344.518.246**.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Alokasi Anggaran Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Anggaran	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	248.572.575.000	322.514.274.000	(22,93)

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Belanja Modal menurut Unit Kerja Eselon I untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:



No	UKEI	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	88.238.894.994	101.784.275.336	(13.545.380.342)	(13,31)
2	Inspektorat Jenderal	-	2.003.110.500	(2.003.110.500)	-
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	8.830.089.000	10.383.341.625	(1.553.252.625)	(14,96)
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	65.917.080.074	62.984.122.134	2.932.957.940	4,66
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	24.535.741.220	11.299.074.250	13.236.666.970	117,15
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	1.069.791.499	3.506.213.800	(2.436.422.301)	(69,49)
7	Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	58.769.333.550	127.384.380.601	(68.615.047.051)	(53,86)
Total		247.360.930.337	319.344.518.246	(71.983.587.909)	(22,54)

Adapun Perbandingan Realisasi Belanja Modal menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	29.722.837.910	90.527.836.808	(60.804.998.898)	(67,17)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.160.474.788	126.465.585.186	16.694.889.602	13,20
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.210.429.046	85.199.054.457	(25.988.625.411)	(30,50)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	722.800.000	2.085.705.450	(1.362.905.450)	(65,35)
Belanja Modal Lainnya	14.563.913.094	15.317.362.022	(753.448.928)	(4,92)
Jumlah Belanja Kotor	247.380.454.838	319.595.543.923	(72.215.089.085)	(22,60)
Pengembalian	(19.524.501)	(251.025.677)	231.501.176	-
Jumlah Belanja	247.360.930.337	319.344.518.246	(71.983.587.909)	(22,54)

Penurunan Realisasi Belanja Modal sebesar (22,54) persen dipengaruhi oleh penghematan anggaran serta *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Sosial dalam rangka penanganan COVID-19 dimana Anggaran Belanja Modal dialihkan dalam rangka penanganan COVID-19 yang didukung dengan penurunan Alokasi Anggaran Belanja Modal sebesar (22,93) persen.

Penjelasan atas Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah secara netto masing-masing sebesar **Rp29.715.743.910** dan **Rp90.527.836.808**. Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 Kementerian Sosial merealisasikan Belanja Modal tanah secara Bruto sebesar Rp29.722.837.910 dengan Pengembalian Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.094.000

Realisasi Belanja Modal Tanah Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat pada:

No	SATUAN KERJA	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto
1	Ditjen Pemberdayaan Sosial	7.501.114.000,		7.501.114.000,
3	Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	22.221.723.910,	(7.094.000,)	22.214.629.910,
Jumlah		29.722.837.910	(7.094.000)	29.715.743.910

Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Modal Tanah	29.722.837.910	90.527.836.808	(60.804.998.898)	(67,17)
Jumlah Belanja Kotor	29.722.837.910	90.527.836.808	(60.804.998.898)	(67,17)
Pengembalian Belanja Modal	(7.094.000)	-	-	-
Jumlah Belanja	29.715.743.910	90.527.836.808	(60.812.092.898)	(67,18)

Rincian perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode Akun	URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
531111	Belanja Modal Tanah	29.802.418.000	91.069.248.000	(61.266.830.000)	(67,27)
Total Anggaran Belanja Modal Tanah		29.802.418.000	91.069.248.000	(61.266.830.000)	(67,27)

Terdapat Penurunan Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar (Rp60.812.092.898) atau (67,18) persen yang didukung dengan turunnya Alokasi Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar (Rp61.266.830.000) atau sebesar (67,27) persen.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 secara Netto adalah masing-masing sebesar **Rp143.160.474.788** dan **Rp126.447.641.640**. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 terdapat Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar (Rp17.943.546) dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara Bruto sebesar Rp126.465.585.186.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Eselon I Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama UKE I	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto
1	Sekretariat Jenderal	66.914.535.314	-	66.914.535.314
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	563.380.000	-	563.380.000
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	38.098.322.803	-	38.098.322.803
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	19.562.276.220	-	19.562.276.220
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	771.076.499	-	771.076.499
7	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	17.250.883.952	-	17.250.883.952
Jumlah Belanja		143.160.474.788	-	143.160.474.788

Selanjutnya rincian belanja Peralatan dan Mesin menurut jenis belanja per Unit Kerja Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:



1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp141.954.607.788

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	66.014.983.314
2	Inspektorat Jenderal	-
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	563.380.000
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	37.822.007.803
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	19.557.276.220
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	746.076.499
7	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	17.250.883.952
Jumlah Belanja		141.954.607.788

2. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.000.000

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	25.000.000
Jumlah Belanja		25.000.000

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp987.600.000

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	716.600.000
2	Ditjen Rehabilitasi Sosial	266.000.000
3	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.000.000
Jumlah Belanja		987.600.000

4. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp193.267.000

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	182.952.000
2	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	10.315.000
Jumlah Belanja		193.267.000



Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per jenis belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.954.607.788	126.386.005.186	15.568.602.602	12,32
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis		2.280.000	(2.280.000)	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	25.000.000		25.000.000	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan Pandemi Covid-19	987.600.000	-	987.600.000	100,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	193.267.000	77.300.000	115.967.000	150,02
Jumlah Belanja Kotor	143.160.474.788	126.465.585.186	16.694.889.602	13,20
Pengembalian	-	(17.943.546)	17.943.546	(100)
Jumlah Belanja	143.160.474.788	126.447.641.640	16.712.833.148	13,22

Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.829.958.000	127.432.235.000	15.397.723.000	12,08
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis		2.280.000	(2.280.000)	
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	25.000.000	-	25.000.000	100,00
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan Pandemi COVID-19	988.950.000	-	988.950.000	100,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	193.267.000	78.070.000	115.197.000	147,56
Total Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin		144.037.175.000	127.512.585.000	16.524.590.000	12,96

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp16.712.833.148 atau 13,22 persen yang didukung oleh kenaikan Alokasi Anggaran sebesar Rp16.524.590.000 atau 12,96 persen. Kenaikan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin juga dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan Peralatan dan Mesin untuk menunjang operasional kinerja Kementerian Sosial serta terdapat Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk Penanganan Pandemi COVID-19 untuk menunjang dan meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Sosial RI dengan rincian:

No.	No Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi Neto	%
Menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19					
9	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	988.950.000	987.600.000	99,86
Total			988.950.000	987.600.000	99,86

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp59.197.998.545** dan **Rp84.977.335.749**.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tiap UKE I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



No	Nama UKE I	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto
1	Sekretariat Jenderal	18.672.327.000		18.672.327.000
2	Inspektorat Jenderal	-		-
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	375.595.000		375.595.000
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	23.118.350.015	(3.100.000)	23.115.250.015
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	-		-
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	-		-
7	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	17.044.157.031	(9.330.501)	17.034.826.530
Jumlah		59.210.429.046	(12.430.501)	59.197.998.545

Selanjutnya rincian belanja Gedung dan Bangunan menurut jenis belanja per UKE I dapat dilihat sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.592.743.099

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	385.967.000
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	375.595.000
3	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	818.069.000
4	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	8.017.592.600
Jumlah Belanja Kotor		9.597.223.600
	Pengembalian	(4.480.501)
Jumlah		9.592.743.099

2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis sebesar Rp99.211.060

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	99.211.060
Jumlah		99.211.060

3. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan sebesar Rp180.476.000

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	180.476.000
Jumlah		180.476.000

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.011.448.264

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.011.448.264
Jumlah		1.011.448.264

5. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.314.120.122

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	18.286.360.000,
2	Ditjen Rehabilitasi Sosial	21.288.832.751,
3	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	8.746.877.371,
Jumlah Belanja Kotor		48.322.070.122
	Pengembalian Belanja	(7.950.000,)
Jumlah		48.314.120.122



Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.597.223.600	48.064.488.879	(38.467.265.279)	(80,03)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	99.211.060	91.853.300	7.357.760	8,01
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	180.476.000	1.611.431.804	(1.430.955.804)	(88,80)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	618.817.699	(618.817.699)	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.011.448.264	-	1.011.448.264	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	48.322.070.122	34.812.462.775	13.509.607.347	38,81
Jumlah Belanja Kotor	59.210.429.046	85.199.054.457	(25.988.625.411)	(30,50)
Pengembalian Belanja Modal	(12.430.501)	(221.718.708)	209.288.207	-
Jumlah Belanja	59.197.998.545	84.977.335.749	(25.779.337.204)	(30,34)

Selanjutnya Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Kode Akun	Anggaran	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.598.442.000	48.593.372.000	(38.994.930.000)	(80,25)
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	99.274.000	125.943.000	(26.669.000)	(21,18)
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	183.000.000	1.647.147.000	(1.464.147.000)	(88,89)
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	619.080.000	(619.080.000)	(100,00)
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.014.000.000	-	1.014.000.000	100,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	48.368.113.000	35.016.321.000	13.351.792.000	38,13
Total Anggaran Belanja Modal GB		59.262.829.000	86.001.863.000	(26.739.034.000)	(31,09)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar (Rp25.779.337.204) atau (30,34) persen yang didukung oleh penurunan Alokasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar (Rp26.739.034.000) atau (31,09) persen. Penurunan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan dampak dari Penghematan Anggaran dan *Refocusing* dan Realokasi untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.011.448.264 termasuk Belanja Modal Gedung dan



Bangunan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dengan rincian:

No.	No Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi Neto	%
Menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19					
1	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.014.000.000	1.011.448.264	99,75
Total			1.014.000.000	1.011.448.264	99,75

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp722.800.000** dan **Rp2.085.705.450**.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tiap UKE I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama UKE I	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto
1	Sekretariat Jenderal	340.650.000	-	340.650.000
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	197.500.000	-	197.500.000
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	184.650.000	-	184.650.000
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	-	-	-
7	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	-	-	-
Jumlah		722.800.000	-	722.800.000

Adapun Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp722.800.000 menurut jenis belanja di tiap UKE I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Irigasi

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Ditjen Pemberdayaan Sosial	197.500.000
	Jumlah	197.500.000

2. Belanja Penambahan Nilai Irigasi

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	184.650.000
	Jumlah	184.650.000

3. Belanja Penambahan Nilai Jaringan

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	340.650.000
	Jumlah	340.650.000

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Modal Irigasi	197.500.000	338.000.000	(140.500.000)	(41,57)
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	184.650.000	-	184.650.000	100,00
Belanja Modal Jaringan	-	1.426.888.800	(1.426.888.800)	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	340.650.000	320.816.650	19.833.350	6,18
Jumlah Belanja	722.800.000	2.085.705.450	(1.362.905.450)	(65,35)

Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Kode Akun	Anggaran	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
534121	Belanja Modal Irigasi	197.600.000	338.000.000	(140.400.000)	(41,54)
534131	Belanja Modal Jaringan	-	1.432.590.000	(1.432.590.000)	(100,00)
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	184.650.000	-	184.650.000	100,00
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	340.650.000	325.000.000	15.650.000	4,82
Total Anggaran Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan		722.900.000	2.095.590.000	(1.372.690.000)	(65,50)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar (Rp1.362.905.450) atau (65,35) persen yang didukung oleh penurunan Alokasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp1.372.690.000) atau (65,50) persen. Penurunan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan dampak dari Penghematan Anggaran dan *Refocusing* dan Realokasi untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp14.563.913.094** dan **Rp15.305.998.599**.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per Unit kerja Eselon I sebagai berikut:

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	2.311.382.680
2	Inspektorat Jenderal	-
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	192.500.000
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	4.518.857.256
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.973.465.000
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	298.715.000
7	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyusulahan Sosial	2.268.993.158
Jumlah		14.563.913.094

Selanjutnya rincian Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menurut jenis belanja per UKE I dapat dilihat sebagai berikut:

1. Belanja Modal Lainnya

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	1.563.711.680
2	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	192.500.000
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	4.518.857.256
4	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.577.850.000
5	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	148.775.000
6	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	1.231.938.930
Jumlah		12.233.632.866

2. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan atau Aset Lainnya

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	747.671.000,
2	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	395.615.000,
3	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	149.940.000,
4	Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	1.037.054.228,
Jumlah		2.330.280.228

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	12.233.632.866	6.484.052.550	5.749.580.316	88,67
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	2.330.280.228	8.833.309.472	(6.503.029.244)	(73,62)
Jumlah Belanja Kotor	14.563.913.094	15.317.362.022	(753.448.928)	(4,92)
Pengembalian Belanja Modal	-	(11.363.423)	11.363.423	-
Jumlah Belanja	14.563.913.094	15.305.998.599	(742.085.505)	(4,85)

Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Anggaran	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Modal Lainnya	12.412.267.000	6.540.114.000	5.872.153.000	89,79
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset lainnya	2.334.986.000	9.294.874.000	(6.959.888.000)	(74,88)
Total Anggaran Belanja Modal Lainnya	14.747.253.000	15.834.988.000	(1.087.735.000)	(6,87)

Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp742.085.505) atau (4,85) persen yang didukung oleh penurunan Alokasi Anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar (Rp1.087.735.000) atau (6,87) persen.

Belanja Bantuan Sosial

Rp124.380.091.909.552

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, masing-masing sebesar **Rp124.380.091.909.552** dan

Rp53.260.829.507.155.

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama UKE I	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto
1	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	4.729.076.390.146	140.007.000	4.728.936.383.146
2	Ditjen Rehabilitasi Sosial	222.002.536.790	861.845.654	221.140.691.136
3	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	43.846.608.776.902	32.011.693.698	43.814.597.083.204
4	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	78.105.493.825.077	2.490.076.073.011	75.615.417.752.066
Jumlah		126.903.181.528.915	2.523.089.619.363	124.380.091.909.552

Adapun rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial per jenis belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	232.455.048.790	398.142.933.004	(165.687.884.214)	(41,62)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	4.639.451.295.186	120.942.777.473	4.518.508.517.713	3.736,07
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	36.856.828.561.960	32.828.279.903.000	4.028.548.658.960	12,27
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	78.109.273.825.077	20.076.779.320.160	58.032.494.504.917	289,05
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	7.065.172.797.902	136.212.393.958	6.928.960.403.944	5.086,88
Jumlah Belanja Kotor	126.903.181.528.915	53.560.357.327.595	73.342.824.201.320	136,93
Pengembalian	(2.523.089.619.363)	(299.527.820.440)	(2.223.561.798.923)	742,36
Jumlah Belanja	124.380.091.909.552	53.260.829.507.155	71.119.262.402.397	133,53

Selanjutnya rincian perbandingan alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/ (Turun)	%
Belanja Bantuan Sosial	128.101.784.274.480	54.412.473.325.000	73.689.310.949.480	135,43

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kementerian Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp71.119.262.402.397 atau 133,53 persen yang didukung oleh Kenaikan Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp73.689.310.949.480 atau 135,43 persen. Kenaikan Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial merupakan dampak dari kebijakan dan strategi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan/ atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam hal ini Kementerian Sosial melaksanakan Program PEN pada sektor Perlindungan Sosial pada program sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan menggunakan akun 574111 dan 574114
2. Program Sembako menggunakan akun 575111
3. Program Paket Sembako Jabodetabek menggunakan akun 576115
4. Program BST Non Jabodetabek menggunakan akun 575114
5. Program BST bagi KPM Sembako Non PKH menggunakan akun 575114
6. Program Bantuan Sosial Beras menggunakan akun 573115.

Adapun Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/ atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada sektor Perlindungan Sosial adalah



sebagai berikut:

No.	No Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi Neto	%
Menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19					
1	571114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	125.000.000	125.000.000	100,00
2	573115	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang-Penanganan Pandemi COVID-19	4.505.850.000.000	4.505.850.000.000	100,00
3	574114	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Pandemi COVID-19	8.281.736.500.000	8.266.540.473.248	99,82
4	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang-Penanganan Pandemi COVID-19	36.639.126.000.000	36.174.411.280.000	98,73
5	576115	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang-Penanganan Pandemi COVID-19	6.732.836.600.000	6.726.301.483.944	99,90
Subtotal			56.159.674.100.000	55.673.228.237.192	99,13
Menggunakan Akun Reguler					
1	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	28.432.249.500.000	28.416.478.396.110	99,94
2	575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	42.590.761.689.480	39.376.633.472.066	92,45
Subtotal			71.023.011.189.480	67.793.111.868.176	95,45
Total			127.182.685.289.480	123.466.340.105.368	97,08

Atas Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Bantuan Sosial untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional tidak dilakukan Ralat Akun Belanja karena akan menimbulkan Pagu Minus untuk akun 574111 dan 575111. Selanjutnya terdapat kesalahan Penggunaan Akun Belanja Bantuan Sosial di luar PC PEN yang menggunakan akun khusus Penanganan Pandemi COVID-19 yang tidak dilakukan ralat sebagai berikut:

UKE I	Akun yang Digunakan	Akun Seharusnya	Jumlah	Keterangan
Ditjen Rehabilitasi Sosial	576115	526322	50.000.000	Telah dilakukan Jurnal Penyesuaian secara Manual
Ditjen Rehabilitasi Sosial	571114	571111	125.000.000	Telah dilakukan Jurnal Penyesuaian secara Manual
Total			175.000.000	



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
 Pengeluaran*

Rp1.100.000

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 **Rp1.100.000** dan **Rp67.666.000** dimana terdapat penurunan sebesar (**Rp66.566.000**) atau sebesar (**98,37%**)

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran dirinci sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal	-	8.728.000	(8.728.000)	(100,00)
2	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	-	58.938.000	(58.938.000)	(100,00)
3	Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	1.100.000	-	1.100.000	100,00
	Jumlah	1.100.000	67.666.000	(66.566.000)	(98,37)

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.100.000 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi Banten. Dana tersebut telah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 803FE61QU7KCFRPO pada tanggal 8 Januari 2021.

*Kas Lainnya dan
 Setara Kas*

Rp2.058.132.172.068

C.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp2.058.132.172.068** dan **Rp2.011.950.360.632** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp46.181.811.436 atau sebesar 2,30%.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.728.681.926.195	1.618.418.390.121	110.263.536.074	6,81
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	329.450.245.873	393.531.970.511	(64.081.724.638)	(16,28)
Jumlah	2.058.132.172.068	2.011.950.360.632	46.181.811.436	2,30



Rincian Kas Lainnya dan Setara Kassebesar Rp2.058.132.172.068 pada setiap Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	-	2.568.000	(2.568.000)	(100,00)
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	329.940.151.527	394.234.674.179	(64.294.522.652)	(16,31)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	122.133.745	1.253.683.373	(1.131.549.628)	(90,26)
5	Ditjen Linjamsos	259.745.746	2.991.826.780	(2.732.081.034)	(91,32)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	1.727.810.141.050	1.613.467.608.300	114.342.532.750	7,09
7	Badiklit Pensos	-	-	-	-
Jumlah		2.058.132.172.068	2.011.950.360.632	46.181.811.436	2,30

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial per 31 Desember 2020 sebesar Rp329.940.151.527. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Akun	Uraian Akun	Satker	Nilai
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Dinas Sosial Aceh	600
		Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	60.497.000
		Dinas Sosial Provinsi Banten	1.000.000
		Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	427.442.868
		Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan	965.186
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			489.905.654
111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	329.450.245.873
		Jumlah Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	
Total Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			329.940.151.527

Terdapat saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 senilai Rp489.905.654 pada satuan kerja berikut:

- a. Dinas Sosial Aceh senilai Rp600 merupakan pendapatan jasa giro bulan bulan September 2020
- b. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp60.497.000 merupakan Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya TAYL atas Tali Asih TKSK Tahun Anggaran 2020
- c. Dinas Sosial Provinsi Banten senilai Rp1.000.000 merupakan Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya TAYL atas nama Tali Asih TKSK
- d. Direktorat PSDBS senilai Rp427.442.868 merupakan pendapatan jasa giro bulan Desember 2020
- e. Direktorat PSPKKM senilai Rp965.186 merupakan pendapatan jasa giro bulan Desember 2020



Mutasi Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah senilai Rp329.450.245.873 terdapat pada satuan kerja Direktorat PSDBS dengan rincian sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2019	Rp	394.234.674.179
Mutasi tambah:	Rp	109.011.610.322
Pendapatan Hibah	Rp	109.011.610.322
Mutasi kurang:	Rp	(173.796.038.628)
Belanja Bantuan Sosial u/ Rehabilitasi Sosial	Rp	(10.502.512.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Pemberdayaan Sosial	Rp	(83.468.240.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Perlindungan Sosial	Rp	(75.342.582.960)
Belanja Bantuan Sosial u/ Penanggulangan Kemiskinan	Rp	(3.780.000.000)
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dari TAYL	Rp	(702.703.668)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	329.450.245.873

Penjelasan atas Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah merupakan Pendapatan Hibah berasal dari Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dari penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang disetorkan oleh penyelenggaraan untuk periode Januari s.d Desember 2020 sebesar Rp109.011.610.322
 - b. Mutasi Kurang sebesar (Rp173.796.038.628) berasal dari 2 sumber yaitu pertama dari Belanja bantuan sosial yang merupakan akumulasi penyaluran bantuan sosial bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial selama periode Januari s.d Desember 2020 yang telah disahkan penggunaannya melalui mekanisme yang telah ditentukan sebesar Rp.173.093.334.960 dan sumber yang kedua adalah adanya kas lainnya dari bendahara pengeluaran TAYL yang dicatat di Jurnal Umum pada saiba 2020 sebesar Rp 702.703.668
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp122.133.745 merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdapat pada satuan kerja berikut:
- a. BBRVPD Cibinong senilai Rp100.989.118 berdasarkan hasil rekonsiliasi data penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) diperoleh kesimpulan dan data dimana masih terdapat sisa dana ASDP Tahun 2020 pada Bank BRI yang tidak tersalurkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 yang disebabkan terdapat 36 orang tidak masuk SK,4 orang rekening *close*, dan Pendapatan Jasa Giro Tahun 2020 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 masih berada di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL).Tindak lanjut dari hasil rekonsiliasi tersebut, Bank BRI melakukan pengembalian dana tersebut ke kas negara sesuai dengan e-billing yang diterbitkan sebesar Rp.100.989.118
 - b. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Budi Perkasa" Palembang senilai Rp21.131.781 yang merupakan Pajak atas transaksi tahun 2020 yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 26 Januari 2021.



c. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Wyata Guna” Bandung senilai Rp12.846 merupakan jasa giro atas bantuan sosial yang terdapat di RPL BRSPDSN “Wyata Guna” Bandung di Bank BNI. Jasa Giro tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 26 Januari 2021 dengan No. NTPN DFD7C6U8E27A8RDD.

3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp259.745.746 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nilai
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	204.714.746
Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	13.500.000
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	27.000.000
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	14.531.000
Jumlah	259.745.746

a. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga senilai Rp204.714.746 berasal dari :

- Kas lainnya dari sisa dana di RPL Bansos senilai Rp80.146 merupakan bunga rekening pada Bank BTN yang sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 5 Februari 2021 dengan No NTPN C2D0A2G4UTDK8A5M.
- Kas Lainnya atas sisa pengembalian belanja barang sebesar Rp204.634.600 dengan rincian :

NO	TANGGAL SETOR	NTPN	KODE AKUN	NOMINAL	KETERANGAN
1	06-01-2021	387237QLTSP42PK8	425912	202,175,490	Pengembalian Belanja Keg. Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020, No. SP2D 201821302023903
2	22-01-2021	DDB737QLTSPJI81G	425912	1,846,935	Pengembalian Belanja Keg. Koordinasi Lintas Sektor Tahun 2020 No. SP2D 201821302025384
3	22-01-2021	D65BA48VUIG1U8G2	425912	612,175	Pengembalian Belanja Keg. Pendampingan TLHP Tahun 2020, No SP2D 201821302025383
Total				204,634,600	

b. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam senilai Rp13.500.000 merupakan Insentif TAGANA yang masih ada pada rekening RPL 182 PS Bank Mandiri per 31 Desember 2020 dengan rincian:

NO REK	NAMA	NOMINAL	BERITA	TANGGAL
1750001503795	I MADE MURYADI	1.500.000	TALI ASIH TAGANA TAHAP 2	5 JANUARI 2021
1430015607664	MOCH REYNALDI DWI SULISTYA	3.000.000	TALI ASIH TAGANA TAHAP 1 & 2	5 JANUARI 2021
1600003849276	RONAL IROUN INYOMUSI	3.000.000	TALI ASIH TAGANA TAHAP 1 & 2	14 JANUARI 2021
1590005133789	PUSPA KRISTINA	3.000.000	TALI ASIH TAGANA TAHAP 1 & 2	25 JANUARI 2021
1700006315463	DZUL FADHLI	3.000.000	TALI ASIH TAGANA TAHAP 1 & 2	20 JANUARI 2021
Nominal		13.500.000		

c. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp27.000.000 berasal dari Pengembalian atas Temuan tali asih tagana tahun 2019 pada Kegiatan PSKBA 2019 yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian:



Tanggal Bayar	No. NTPN	Nominal (Rp)	Keterangan
11/01/2021	202402G4UTAPMCV6	3,000,000	Pengembalaian Temuan Tali Asih Tagana Th 2019 An.Andi Anggriawan Tri Pura dari Kab Bone pada Keg PSKBA th 2019
12/01/2021	144083CIENT63BBV	3,000,000	Pengembalian dana Tali Asih Th 2019 An.Umar,AMK dari Kab Bone pada Keg PSKBA
12/01/2021	5016F8N3DNBGHE2D	3,000,000	Pengembalian Temuan Tali Asih Tagana Th 2019 An Marlinawati Marsa dari Kab Bone pada Kegiatan PSKBA TH 2019
12/01/2021	DFAED2G4UTAPMG52	3,000,000	Pengembalian Temuan Tali Asih Tagana Th 2019 An.Suciati,S.Pd pada Kegiatan PSKBA Th 2019
12/01/2021	8903A2G4UTAPMEPA	3,000,000	Pengembalian Temuan Tali Asih Tagana Th 2019 An.Sumardi dari Kab Bone pada Kegiatan PSKBA Th 2019
12/01/2021	482662G4UTAPMF3A	3,000,000	Pengembalian dana Tali Asih Tagana Th 2019 An.Sudasman dari Kab Bone pada Kegiatan PSKBA Th 2019
13/01/2021	2954A1JNF20D9J8N	3,000,000	Pengembalian Temuan Tali Asih Tagana Th 2019 An.Nur Sidratul Muntaha dari Kota Makassar pada Kegiatan PSKBA Th 2019
13/01/2021	EB2782G4UTAPMKO8	3,000,000	Pengembalian Temuan Tali Asih Tagana Th 2019 An.Fachri Aditya dari Kota Makassar Pada Kegiatan PSKBA Th 2019
13/01/2021	52B700N9V860SL5U	3,000,000	Pengembalian Temuan Tali Asih Tagana Th 2019 An.Munawarah Malhadi dari Kota Makassar pada Kegiatan PSKBA Th 2019
TOTAL		27,000,000	

d. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur senilai Rp14.531.000 merupakan Pengembalian Perjalanan Dinas Asistensi Koordinator Wilayah PKH tahun 2020 dengan Nomor NTB 000013938951 dan Nomor NTPN 3BBA06U8E26RQJJ7 dan Pengembalian Belanja Non Operasional Lainnya Kegiatan Pemulangan Orang Terlantar tahun 2020 dengan Nomor NTB 000013939091 dan Nomor NTPN C22732G4UTATPAHD keduanya baru disetorkan pada bulan Januari 2021

4. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.727.810.141.050 dan Rp1.613.467.608.300 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	8.597.500
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	1.137.238.944.145	794.873.886.540
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	279.799.058.274	415.487.344.981
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	309.920.046.631	403.078.479.279
Dinas Sosial Provinsi Lampung	-	19.300.000
Dinas Sosial Provinsi Papua Barat	852.092.000	-
Jumlah	1.727.810.141.050	1.613.467.608.300

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.727.810.141.050 pada setiap satuan kerja disajikan pada tabel berikut:

Satker	Rek Bendahara Pengeluaran	BNI	BRI	Mandiri	BTN	Pos	Jumlah
Direktorat PFM Wil I	-	508.211.937.881	509.368.731.467	69.235.256.070	50.346.058.799	76.959.928	1.137.238.944.145
Direktorat PFM Wil II	-	116.866.244.968	94.621.631.412	35.204.567.147	33.047.146.113	59.468.634	279.799.058.274
Direktorat PFM Wil III	-	128.356.047.530	46.813.693.561	25.299.000.547	23.878.167.978	85.573.137.015	309.920.046.631
Dinsos Prov. Papua Barat	852.092.000	-	-	-	-	-	852.092.000
Jumlah	852.092.000	753.434.230.379	650.804.056.440	129.738.823.764	107.271.372.890	85.709.565.577	1.727.810.141.050



Berdasarkan tabel diatas Kas Lainnya dan Setara Kas pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin dapat dirinci sebagai berikut:

- Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp1.137.238.944.145 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	BNI	BRI	Mandiri	BTN	Pos	Jumlah
Saldo TA 2018 (BPNT)						
Saldo TA 2019 (BPNT)						
Saldo TA 2020						
Program Sembako						
Sisa saldo transaksi sebagian Jan - Sep 2020	82.563.609.298	-		-		82.563.609.298
Sisa saldo transaksi sebagian	101.381.165.956	135.866.315.004	69.235.256.070	37.276.191.652		343.758.928.682
Tidak Terdistribusi	54.196.800.000	17.452.706		8.988.400.000		63.202.652.706
Tidak Transaksi	267.702.202.000	373.221.750.000		2.636.000.000		643.559.952.000
Gagal Top Up Wallet Belum Setor	1.200.000	346.200.000		1.831.300.000		2.178.700.000
Koreksi	-	(82.986.243)		-		(82.986.243)
Time out transaction (overdebit)	-	-		(41.150.000)		(41.150.000)
Pengembalian BPNT 2019 (KPM Tidak Dist & Trx)	-	-		(510.400.000)		(510.400.000)
Jasa Giro	2.258.060.627			158.517.147	-	2.416.577.774
BST Non Jabodetabek						
Gagal pemindahbukuan	108.900.000			7.200.000		116.100.000
Jasa Giro					76.959.928	76.959.928
Total	508.211.937.881	509.368.731.467	69.235.256.070	50.346.058.799	76.959.928	1.137.238.944.145

- Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp279.799.058.274 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	BNI	BRI	Mandiri	BTN	Pos	Jumlah
Saldo TA 2018 (BPNT)						
Saldo TA 2019 (BPNT)						
Jasa Giro RPL 2019				9.529.450		9.529.450
Saldo TA 2020						
Program Sembako						
KKS/bantuan tidak terdistribusi	2.661.000.000	8.975.400.000		19.200.000		11.655.600.000
Sisa KPM Bertransaksi sebagian	27.732.600.001	41.120.900.000		18.515.150.000		87.368.650.001
KPM tidak bertransaksi	86.000.329.012	44.658.503.212	35.204.567.147	17.883.664.053		183.747.063.424
Gagal Setting Des		6.800.000				6.800.000
Kelebihan dana trx anomali /Timeout Trx		(139.971.800)		(256.929.970)		(396.901.770)
Pengembalian BPNT 2019				(3.569.170.000)		(3.569.170.000)
Jasa Giro	472.315.955			445.702.580	-	918.018.535
BST Non Jabodetabek						
Jasa Giro					59.468.634	59.468.634
Total	116.866.244.968	94.621.631.412	35.204.567.147	33.047.146.113	59.468.634	279.799.058.274



- Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp309.920.046.631 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	BNI	BRI	Mandiri	BTN	Pos	Jumlah
Saldo TA 2018 (BPNT)						
Saldo TA 2019 (BPNT)						
Jasa Giro RPL 2019				2.649.223		2.649.223
Saldo TA 2020						
Program Sembako						
Gagal Setting Wallet				76.050.000		76.050.000
KKS/Bantuan Tidak terdistribusi	27.084.800.000	4.850.000		15.100.800.000	64.022.200.000	106.212.650.000
KPM tidak bertransaksi	12.220.800.000	18.716.600.000		4.082.600.000		35.020.000.000
Sisa dana KPM Bertransaksi Sebagian Jan-Sept	1.442.061.892					1.442.061.892
Kelebihan dana trx anomali/over debet/time out		(66.134.490)		(207.822.000)		(273.956.490)
Sisa Bertransaksi Sebagian 2020	86.757.616.308	28.158.378.051	25.298.995.366	4.482.248.116		144.697.237.841
Pendebelan BPNT 2019 tidak transaksi fiat				(154.330.000)		(154.330.000)
Jasa Giro	850.769.330		-	490.475.347	138.190.611	1.479.435.288
BST Non Jabodetabek						
Bantuan Tidak terdistribusi					18.182.100.000	18.182.100.000
Jasa Giro				359.824	3.230.646.404	3.231.006.228
BST Sembako Non PKH						
Jasa Giro			5.181	5.137.468		5.142.649
Total	128.356.047.530	46.813.693.561	25.299.000.547	23.878.167.978	85.573.137.015	309.920.046.631

- Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran pada satker Dinas Sosial Provinsi Papua Barat senilai Rp852.092.000 merupakan honor Pendamping Sosial yang belum dibayarkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pengajuan SPM yang melewati batas pengajuan ke KPPN, sehingga dimintakan dispensasi pengajuan SPM yang prosesnya hingga mendekati akhir bulan dengan kondisi suasana libur. Sampai dengan 30 Maret 2021 terdapat penyetoran ke Kas Negara senilai Rp302.910.000 dengan No NTPN 95CF161QU7QVD336 pada tanggal 31 Maret 2021 hal ini disebabkan pendamping yang tidak membuat laporan pendampingan sehingga honor tidak dapat dibayarkan.

Progres pengembalian ke kas negara atas Kas Lainnya dan Setara Kas tahun 2020 sebagai berikut:

	Kas Lainnya Per 31 Desember 2020	PENGEMBALIAN	SISA
Dit. PFM Wil I	1,137,238,944,145	1,137,238,944,145	0
BNI	508,211,937,881	508,211,937,881	0
BRI	509,368,731,467	509,368,731,467	0
BTN	50,346,058,799	50,346,058,799	0
BANK MANDIRI	69,235,256,070	69,235,256,070	0
PT POS	76,959,928	76,959,928	0
Dit. PFM Wil II	279,799,058,274	279,789,528,824	9,529,450
BNI	116,866,244,968	116,866,244,968	0
BRI	94,621,631,412	94,621,631,412	0
BTN	33,047,146,113	33,037,616,663	9,529,450
BANK MANDIRI	35,204,567,147	35,204,567,147	0
PT POS	59,468,634	59,468,634	0
Dit. PFM Wil III	309,920,046,631	309,917,397,408	2,649,223
BNI	128,356,047,530	128,356,047,530	0
BRI	46,813,693,561	46,813,693,561	0
BTN	23,878,167,978	23,875,518,755	2,649,223
BANK MANDIRI	25,299,000,547	25,299,000,547	0
PT POS	85,573,137,015	85,573,137,015	0
DS Papua Barat	852,092,000	302,910,000	549,182,000
Jumlah	1,727,810,141,050	1,727,248,780,377	561,360,673



Rekap pengembalian kas lainnya dan setara kas tahun 2020 dirinci sebagai berikut:

SATKER	No. NTPN	Tgl. Setor	Nominal	
DIT PFM WIL I	B47B92G4UL28HRUS	6-Jan-21	82,563,609,298	
	4F0F348VUA71BRUK	6-Jan-21	54,196,800,000	
	F44332G4UL28HRA8	6-Jan-21	267,702,202,000	
	7A67E0N9V8C18MOK	9-Mar-21	101,381,165,956	
	D635A7QLTSV4GMMPG	9-Mar-21	1,200,000	
	3F3262G4UTB2107Q	15-Jan-21	108,900,000	
	940DD61QU7N82KFG	5-Feb-21	243,000,000	
	716B87QLTSSOSKE0	5-Feb-21	103,200,000	
	75B4F61QU7N82KDO	5-Feb-21	17,452,706	
	F898C48VUIIF8KB2	5-Feb-21	137,874,528,761	
	O77DD6U8E29KFJCR	5-Feb-21	371,130,550,000	
	F996A2G4UTDK8RBC	8-Feb-21	69,235,256,070	
	DED4F61QU7QDQ6NI	15-Mar-21	1,661,700,000	
	ED1A62G4UTGS66KA	15-Mar-21	5,159,000,000	
	3C1610N9V8C3C5V0	15-Mar-21	36,012,259,957	
	C934A48VUILL05LO	15-Mar-21	194,200,000	
	2904B48VUILL058U	15-Mar-21	195,400,000	
	B6AEC2G4UTGS6562	15-Mar-21	193,400,000	
	7FDC555DED81D51P	15-Mar-21	193,400,000	
	OE94855DED81D4T3	15-Mar-21	471,800,000	
	6FC8055DED81D4PL	15-Mar-21	106,200,000	
	9C9F13CIEO38J4H5	15-Mar-21	375,200,000	
	5C1148N3DNHJ149R	15-Mar-21	101,700,000	
	69CC68N3DNHJ18OV	15-Mar-21	933,600,000	
	66F940N9V8C3C8LI	15-Mar-21	3,829,400,000	
	7997F3CIEO38J861	15-Mar-21	753,081,695	
	DF3EC1JNF2UENEQH	12-Mar-21	7,200,000	
	6C8E448VUIID0MKC	3-Feb-21	76,959,928	
	F218D8N3DNHGTM31	9-Mar-21	1,195,358,082	
	279D17QLTSV4GM3K	9-Mar-21	1,062,702,545	
	7DE6A1JNF2UFP473	15-Mar-21	79,744,632	
	O6BCF3CIEO38J44L	15-Mar-21	78,772,515	
	DIT PFM WIL II	O22627QLTSP1VSCI	6-Jan-21	30,393,600,001
		OAA163CIENT3VOQJ	8-Jan-21	37,975,100,000
		A72C82G4UTANI3BG	8-Jan-21	8,975,400,000
		D0DC12G4UTANI3FS	8-Jan-21	6,800,000
		BA1161JNF2OFD33D	11-Jan-21	5,611,600,000
		6C3BA61QU7KDE1VK	13-Jan-21	11,060,550,000
		O18806U8E27985UN	26-Jan-21	19,400,000
		FFB312G4UTDMABKA	4-Feb-21	47,664,331,412
D916148VUIIF8UM0		8-Feb-21	86,000,329,012	
C176A2G4UTDM9G5I		9-Feb-21	35,204,567,147	
E9B1155DED4VKB7B		9-Feb-21	7,035,289,445	
599498N3DNEOFU13		17-Feb-21	8,865,074,638	
E4AC248VUIIFGCDU0		11-Jan-21	59,468,634	
68BCF2G4UTARQ3A0		11-Jan-21	136,291,439	
EF7A43CIENT873L9		13-Jan-21	129,067,824	
1B1063CIENT879OJ		13-Jan-21	59,448,681	
A92907QLTSP89UQG		12-Jan-21	472,315,955	
8E8286U8E29OECK3		9-Feb-21	81,918,616	
20FB048VUIIQETBC		17-Feb-21	38,976,020	
DIT PFM WIL III		A8D463CIENT63AUH	8-Jan-21	18,182,100,000
	CFA493CIENTC98AV	15-Jan-21	64,022,200,000	
	AF42E1JNF2OLI1SP	18-Jan-21	27,084,800,000	
	8930E6U8E27002H	18-Jan-21	12,220,800,000	
	E3AF47QLTSPCD4F6	18-Jan-21	1,442,061,892	
	EACCE1JNF2R7PF57	2-Feb-21	46,813,693,561	
	301231JNF2R7RNHF	3-Feb-21	9,748,576,137	
	454673CIEO00JEV1	5-Feb-21	86,757,616,308	
	7E51F48VUIID2NIG	5-Feb-21	13,630,969,979	
	798508N3DNEB2DA5	8-Feb-21	25,298,995,366	
	501517QLTSPAA97	19-Jan-21	138,190,611	
	3947C1JNF2ODALSR	8-Jan-21	3,230,646,404	
	1A1406U8E27005DP	18-Jan-21	850,769,330	
	AB69761QU7N6UMJ8	5-Feb-21	5,181	
	6B43F48VUIIK9UNU	10-Feb-21	359,824	
	301231JNF2R7RNHF	3-Feb-21	41,996,872	
	7E51F48VUIID2NIG	5-Feb-21	448,478,475	
	06B737QLTSSLEDGO	1-Mar-21	5,137,468	
DSP Papua Barat	95CF161QU7QVD336	30-Mar-22	302,910,000	
JUMLAH			1,727,248,780,377	



*Belanja Dibayar
 Dimuka (Prepaid)
 Rp71.528.400*

C.3 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp71.528.400 dan Rp0 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp71.528.400.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat daribarang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barangatau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Kementerian Sosial sebagai berikut:

No	UKE I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	71.528.400	-	71.528.400	-
	Jumlah	71.528.400	-	71.528.400	-

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2020 terdapat pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III senilai Rp71.528.400 merupakan voucher tiket pesawat yang berasal dari *refund* tiket pesawat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kebijakan *lockdown* kondisi Pandemi COVID-19. Voucher tidak digunakan hingga 31 Desember 2020, namun dapat digunakan sampai dengan bulan Juni 2021.

*Piutang Bukan Pajak
 Rp368.789.028.861*

C.4 PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp368.789.028.861** dan **Rp360.334.178.898** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp8.454.849.963 atau sebesar 2,35%

Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang timbul selain dari Piutang Pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

No	UKE I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	481.047.496	284.903.600	196.143.896	68,85
2	Inspektorat Jenderal	-	12.707.630	(12.707.630)	(100,00)
3	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	62.523.000	477.255.901	(414.732.901)	(86,90)
4	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	641.830.380	8.892.291.018	(8.250.460.638)	(92,78)
5	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	362.503.289.842	350.128.646.458	12.374.643.384	3,53
6	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	4.883.459.845	26.061.805	4.857.398.040	18.638,00
7	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	216.878.298	512.312.486	(295.434.188)	(57,67)
	Jumlah	368.789.028.861	360.334.178.898	8.454.849.963	2,35

Tindak lanjut atas Piutang Bukan Pajak Kementerian Sosial per 31 Desember 2019 sebesar Rp360.334.178.898 disajikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar 284.903.600 merupakan kelebihan pembayaran belanja yang masih berada di pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pusat Data dan Informasi senilai Rp202.712.738 telah disetorkan ke kas negara dengan rincian:

No	Uraian	Nominal	KodeBilling	Tgl Bayar
1	Setoran kelebihan pembayaran Paket Meeting Fullboard Rakornas I Tahun 2019	24.725.000	820200107221420	8 Januari 2020
2	Setoran atas kelebihan pembayaran Paket Meeting Fullboard Rakornas II Tahun 2019	24.225.000	820200107221822	8 Januari 2020
3	Setoran atas kelebihan pembayaran Sewa Jaringan Komunikasi Data	153.762.738	820200218290969	24 Februari 2020
Jumlah		202.712.738		

- b. Sekretariat Jenderal senilai Rp82.190.862 telah disetorkan ke kas negara dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah Piutang s/d 31 Desember 2019
1	Piutang Pengembalian Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai	62.397.910
2	Piutang Pengembalian Belanja Uang Makan Pegawai	5.208.800
3	Piutang Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.546.969
4	Piutang Pembulatan Gaji PNS	2.183
5	Piutang Tunjangan Fungsional PNS	480.000
6	Piutang Tunjangan Umum PNS	555.000
Total Piutang		82.190.862

2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp12.707.630 telah dilakukan pelunasan Piutang Lainnya melalui pemotongan tunjangan kinerja pegawai untuk bulan Januari 2020 senilai Rp12.223.730 dan pengembalian kelebihan rapel kenaikan gaji bulan Januari-April 2019 senilai Rp483.900 yang telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 18 Februari 2020 dengan NTPN: A7C3D8N3DE4Q3RM3.
3. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp477.255.901 dengan perincian:
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial senilai Rp89.491.055 yang merupakan kelebihan pembayaran Tunjangan Khusus/Kegiatan PNS dan kelebihan pembayaran uang makan.
 - Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat sebesar Rp83.547.755 yang merupakan kelebihan pembayaran atas Belanja sisa dana BOP (tidak habis pakai) SLRT TA 2019.
 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp4.601.606 yang merupakan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
 - Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Asmat sebesar Rp237.709.540 merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pengembalian atas pekerjaan rumah KAT.
 - Dinas Sosial Kabupaten Nunukan sebesar Rp61.905.945 merupakan garansi bank pembangunan rumah KAT .
4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp8.892.291.018 merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai, dana bantuan sosial yang masih berada di IPWL, dan piutang lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp45.177.839 yang merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai pada 31 Desember 2019 terdapat pada satuan kerja:

Satuan Kerja	NILAI
Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus "Kahuripan" Di Sukabumi	3.812.790
Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya "Satria" Di Baturraden	2.865.535
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental "Phala Martha" Di Sukabumi	327.990
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Prof. Dr. Soeharso" Di Surakarta	1.925.355
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Budi Perkasa" Di Palembang	2.874.075
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Nipotow e" Di Palu	1.486.980
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental "Dharma Guna" Di Bengkulu	1.288.810
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara "Melati"	250.055
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Toddopuli" Di Makassar	200.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	23.424.534
Loka Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6.721.715
Total	45.177.839

- b. Piutang Lainnya dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bantuan sosial berada di Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sebesar Rp7.321.271 pada satuan kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- c. Piutang Lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bantuan sosial berada di Rekening penerima bantuan sosial sebesar Rp8.839.791.908 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Tgl Setor	NTPN	Jumlah Setor	Keterangan
1	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	7 Februari 2020	976A52G4UK3OSH30	109.000.000	Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 6 Februari 2020; Berita Acara Hasil Penelitian terhadap Penyaluran Dana Bansos Rehsos Anak tanggal 4 Februari 2020 dan disetor ke kas Negara
2	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	11 Februari 2020	779B148VU981PRQ8	458.400.000	Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening penerima bansos Bantu LU Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020; Berita Acara Penelitian tanggal 10 Februari 2020
		11 Februari 2020	A97D155DE3R26U17	372.000.000	Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening Penerima Bansos Dukungan Keluarga Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020 Berita Acara Penelitian tanggal 10 Februari 2020
3	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	27 Maret 2020	B59443CIEPMMNO0T	7.291.101.462	Berita acara hasil penelitian terhadap penyaluran dana bansos asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) tahun 2019 tanggal 1 April 2020
		14 April 2020	7025D55DE412HA4L	355.418.335	Surat perintah penyetoran ke kas negara Nomor B.334/Kemensos/4.3/BS.01.02/4/2020 tanggal 2 April 2020.
		08 April 2020	56CF28N3DEAE2MRL	3.600.000	Surat perintah penyetoran ke kas negara Nomor 336/Kemensos/4.3/BS.01.02/4/2020 tanggal 3 April 2020
		27 Maret 2020	C74281JNEPKTTOR3	250.272.111	Penyetoran tanggal 27 Maret 2020
Total				8.839.791.908	

5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp350.128.646.458 merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang, sisa dana bantuan sosial atas KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi, dan kelebihan

pembayaran Hasil Temuan Inspektorat Jenderal tentang Penyalahgunaan Dana Bansos KPM PKH oleh Pendamping Sosial.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang sebesar Rp78.679.960 yang telah disetorkan ke kas negara pada tahun 2021 dengan rincian:

No	Tgl Setor	No SPM/NTPN	Jumlah Setor	Keterangan
1	09/03/2020	B6F7E7QLTJL54H36 00085 00050	27.579.960	Piutang atas Potongan Tunjangan Kinerja pegawai bulan Desember 2019 yang disetorkan melalui mekanisme potongan tagihan Tunjangan Kinerja Januari 2020
2	26/02/2020	ECADA61QTUDS5ULQ	3.300.000	Pengembalian Honor SDM PKH Bln Desember 2019 Pdp PKH Akses Kab Pulau Taliabu Kec Lede An. Suhartini
3	28/02/2020	80CF661QTUDS61A6	10.400.000	Pengembalian Honor SDM PKH Bln September-Desember 2019 Pdp PKH Kota Banjarmasin A.n Muliari
4	03/01/2020	12CF21JNEPE9OL51	200.000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan November Th 2019 a.n Arief Rahman Pendamping PKH Kab Sumenep
5	08/01/2020	FD4908N3DE1D0IFV	8.400.000	Pengembalian Honor SDM PKH Bulan Januari-Maret Th 2019 a.n Srijuliate Pendamping PKH Kab Katingan
6	03/02/2020	521F86U8DOTCJ74H	8.000.000	Pengembalian belanja barang Honor bulan Mei s/d Agustus 2019 SDM PKH Kec. Besuki Kab. Situbondo prov. Jatim a.n Cucuk faisal, S.Pd
7	07/02/2020	A8FE66U8DOVJMQ7F	20.800.000	Pengembalian Honor SDM PKH Kab. Pasaman a.n Harna Dewi bulan Mei - Desember 2019
			78.679.960	

- b. Kelebihan pembayaran Hasil Temuan Inspektorat Jenderal tentang Penyalahgunaan Dana Bansos KPM PKH oleh PDP Sosial PKH Kec. Musik kab. Boyolali telah disetor ke kas negara tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN 0B6807QLTJF74C0C sebesar Rp9.575.000

- c. Sisa dana Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 masih berada di rekening penerima bantuan sosial dikarenakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak terdistribusi dan Keluarga Penerima Manfaat yang tidak bertransaksi sebesar Rp350.040.391.498 dengan rincian:

No	Tgl Setor	No SPM/NTPN	Jumlah Setor	Keterangan
1	20/04/2020	26EF61JNEPNK0DP1	47.796.967.559	Piutang Lainnya di BNI atas saldo KKS tidak Terdistribusi sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara melalui surat Nomor 81/3.4/BS.02.01/4/2020 tanggal 16 April 2020 senilai Rp47.796.967.559
2	21/04/2020	5B23661QTUJ1B44	15.553.472.340	Piutang Lainnya di BNI atas saldo KKS tidak Terdistribusi
3	29/04/2020	A8AAE8N3DEB3PKNR	64.707.145.840	Piutang Lainnya di BNI atas saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi sampai dengan 31 Desember 2019
4	06/05/2020	758610N9UV5JQKRU	25.266.961.963	Piutang Lainnya di BNI atas saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi sampai dengan 31 Desember 2019 (Beban Bantuan Sosial Tahun 2016-2018) yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat .639/3/BS.01.01/4/2020 tanggal 29 April 2020
5	06/05/2020	7D52F1JNEPO07IIR	102.864.201.018	Piutang Lainnya di BRI atas saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat 640/3.4/BS .02.04/4/2020 tanggal 29 April 2020
6	06/05/2020	20C591JNEPQA1AQR	89.969.265.993	Pengembalian dana bansos atas KKS Tidak Bertransaksi Tahun 2016-2018 di Bank BRI
7	11/05/2020	22F1061QTUMDOLPG	3.882.376.785	Pengembalian Dana Bansos atas KKS Tidak Bertransaksi Tahun 2016-2018 di Bank BRI
			350.040.391.498	



6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp26.061.805 merupakan Tunjangan Kinerja ASN, Uang Makan, dan Honor Tenaga Ahli bulan Desember 2019 dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah
1	Piutang pembayaran uang makan	11.291.450
2	Piutang pembayaran tunjangan Khusus	9.041.130
3	Piutang pembayaran honor tenaga ahli	4.043.910
4	Piutang pembayaran honor pramubakti	1.685.315
		26.061.805

7. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp512.312.486 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, belanja perjalanan dinas, kelebihan pembayaran honor profesi, dan kelebihan pembayaran belanja bahan terdapat pada satker berikut:

Satuan Kerja	Jumlah Piutang
Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh Sosial	20.919.125
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	19.111.407
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung	10.104.345
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang	3.506.295
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin	10.062.605
Pusat Penyuluhan Sosial	2.419.360
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	324.497.877
Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	121.691.472
Total	512.312.486

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp368.789.028.861 pada Unit Kerja Eselon I dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp481.047.496 merupakan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2020 yang sampai 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Negara dengan rincian:
 - a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial terdapat Piutang Lainnya senilai Rp133.972.646 merupakan kelebihan pembayaran sewa jaringan komunikasi data layanan internet yang masih berada pada PT. Comtronica Systems per 31 Desember 2020.



b. Sekretariat Jenderal senilai Rp347.074.850 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Nominal
Belanja Pegawai		
1	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Biro Umum Sekretariat Jenderal	1.228.600
2	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	37.000
3	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	1.822.850
4	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Pusdatin, Sekretariat Jenderal	2.067.708
5	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	1.230.250
6	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja TA 2020 pada Biro Umum	13.756.390
7	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja TA 2020 pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	742.775
8	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja TA 2020 pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	253.350
9	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum bulan Desember 2020 untuk 1 pegawai/3 jiwa	185.000
10	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum bulan Desember 2020 untuk 1 pegawai/3 jiwa	50
11	Kelebihan Pembayaran KGB bulan Oktober 2020 sd. Desember 2020 untuk 30 pegawai/78 jiwa	198
12	Kelebihan Pembayaran KGB bulan Februari 2020 sd. Desember 2020 untuk 2 pegawai/6 jiwa	263
Belanja Barang		
1	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00518	10.602.500
2	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00518	290.416.100
3	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 sesuai SPM No. 00497	178.745
4	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00460	2.426.110
5	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00431	1.286.708
6	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00448	696.837
7	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00448	490.702
8	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00461	33.107
9	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00451	7.619.007
10	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00460	5.137.700
11	Kelebihan Pembayaran Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00517	6.862.900
Total		347.074.850

Piutang bukan pajak pada Satker Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2020 sebesar Rp347.074.850 sampai dengan 1 Maret 2021 telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp332.593.664 dengan rincian:

No	Tanggal Setor	NTPN	Nominal	Akun	Keterangan
Belanja Pegawai					
1	21/01/2021	0B0281JNF2ORLUQN	1.228.600	425911	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Biro Umum Sekretariat Jenderal
2	21/01/2021	79EE06U8E27640LV	37.000	425911	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
3	25/01/2021	1E5DF6U8E27642LN	1.822.850	425911	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
4	21/01/2021	05BA71JNF2ORLVOD	2.067.708	425911	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Pegawai Pusdatin, Sekretariat Jenderal
5	04/02/2021	66B198N3DNED6B3D	1.230.250	425911	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2020 Para Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
6	17/02/2021	09FB255DED58TN5B	398.280	425911	Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2020 Pegawai Biro Umum An Rusdimal
7	01/03/2021	51EB70N9V8BQTHU2	58.560	425911	Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2020 Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian A.n Puti Idrasari



No	Tanggal Setor	NTPN	Nominal	Akun	Keterangan
Belanja Barang					
1	22/01/2021	F033C2G4UTB94S8G	10.602.500	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00518
2	22/01/2021	7E2B92G4UTB84MDG	290.416.100	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00518
3	22/01/2021	2363A0N9V86D7HF6	178.745	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 sesuai SPM No. 00497
4	22/01/2021	686A02G4UTB61HSC	2.426.110	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00460
5	22/01/2021	51B8548VUIFURJ9E	1.286.708	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00431
6	22/01/2021	1D3D38N3DNBSSLNN	696.837	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00448
7	22/01/2021	0BAA72G4UTB61LSQ	490.702	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00448
8	22/01/2021	FF84D1JNF2OPKIRJ	33.107	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00461
9	22/01/2021	190D948VUIFURL20	7.619.007	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00451
10	22/01/2021	05E3555DED2B8LI9	5.137.700	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020 Sesuai SPM No. 00460
11	02/02/2021	3119F0N9V88SEL4M	6.862.900	425912	Pengembalian Sisa Perjadin Tahun 2020, Sesuai SPM No. 00517
Total			332.593.664		

2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp62.523.000 terdapat pada satuan kerja berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial senilai Rp22.428.000 merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai bulan Desember 2020, berupa Pembayaran Uang Makan. Piutang tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Jumlah Pengembalian	No NTPN	Tanggal Setor
Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	22.428.000	34DFA1JNF2OECIV	13/01/2021
Total Piutang	22.428.000		

- b. Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan senilai Rp40.095.000 merupakan Sisa Dana BOP (tidak habis pakai) SLRT TA 2020 dan 2019 yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai tanggal pelaporan 31 Desember 2020. Atas Piutang tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pengembalian Belanja atas Sisa Dana BOP
 Sistem Layanan Rujukan Terpadu TAYL TA 2020*

No NTPN	Tanggal Setor	Pengembalian	Keterangan
8CFDE61QU7NJ6K9K	22/02/2021	3.500.000	Pengembalian Belanja atas Sisa Dana BOP (Tidak Habis Pakai) di Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2020
8E4642G4UTE7S8VV	23/02/2021	10.000	Pengembalian Belanja atas Sisa Dana BOP (Tidak Habis Pakai) di Sekretariat Puskesmas Mundu Pesisir Amanah, Desa Mundu Pesisir, Kabupaten Cirebon Tahun 2020
2B71F6U8E2A2TK9N	25/02/2021	30.000.000	Pengembalian Belanja atas Sisa Dana BOP (Tidak Habis Pakai) di Kabupaten Madiun Tahun 2020
F57C43CIEO0MCJOT	25/02/2021	135.000	Pengembalian Belanja atas Sisa Dana BOP (Tidak Habis Pakai) di Kayuh Serentak Langkah Sepijak, Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020
		33.645.000	

Rincian Pengembalian Belanja Dana BOP atas Pendamping PKH yang menerima tali asih SLRT pada tahun 2019 yang disetorkan pada tahun 2021

No NTPN	Tanggal Setor	Pengembalian	Keterangan
7D6EA61QU7KA6CL8	08/01/2021	1.000.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT atas nama Abdul Jalil V. Gobel di Kabupaten Gorontalo Utara
D717148VUIFHCCS2	06/01/2021	1.000.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT atas nama Isman Lahmudin di Kabupaten Gorontalo Utara
61E161JNF2OC5F7T	11/01/2021	500.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT atas nama Rohmat Hidayat, S.IP di Kota Mojokerto
7D8380N9V85VOFJ7	08/01/2021	600.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT atas nama Umar Al Faroq di Kota Mojokerto
5DD3C3CIEO07UIL7	09/02/2021	300.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT atas nama Noval, ST di Kabupaten Pidie
6DF3555DED4VL149	15/02/2021	500.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT atas nama Rohmat Hidayat, S.IP di Kota Mojokerto
A0D6A55DED56Q2K1	18/02/2021	300.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT atas nama An Umar Al Faroq di Kota Mojokerto
6CBA91JNF2U7AMK3	04/03/2021	200.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT Eka Evtriana di Kota Madiun
A23B661QU7Q5BJUK	05/03/2021	400.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT An Risma Hasna Yunita di Kota Madiun
CA48855DED7OUB21	05/03/2021	300.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT Umar Al-Faroq di Kota Mojokerto
9EBEF55DED7OUN1L	05/03/2021	200.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT Juaf Tika di Kota Madiun
42C9D48VUILCHH2M	05/03/2021	200.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT Agus Supriyanto di Kota Madiun
9AA3948VUILCHFGM	06/03/2021	250.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT An Tri Yuniwati di Kota Madiun
9253E7QLTSUU56JQ	06/03/2021	500.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT An Rohmat Hidayat, S.IP di Kota Mojokerto
2832448VUILCHI4	06/03/2021	200.000	Pengembalian Belanja Sisa Dana BOP SLRT Fepi Aryani di Kota Madiun
Total		6.450.000	

3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp641.830.380 yang berasal dari pengembalian belanja bantuan sosial dan pengembalian belanja pegawai atas tunjangan kinerja dan uang makan tahun 2020 yang disetorkan ke kas negara pada tahun 2021. Rincian Piutang Bukan Pajak untuk setiap satuan kerja dapat dirinci sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN	Tgl Setor	No NTPN/SPM
1	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	1.747.845	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	12/01/2021	6662C1JNF20HDKSD
2	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	4.003.715	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan	13/01/2021	D1C473CIENTCA311 2B53B3C1ENTCA30F
3	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	2.000.000	Pengembalian belanja bantuan sosial TA2020	28/01/2021	5A0888N3DNC32RK
4	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	994.005	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	07/01/2021	173071JNF20EAHG1
5	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	37.000	Kelebihan pembayaran uang makan	21/01/2021	4470161QU7KONCQ8



NO	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN	Tgl Setor	No NTPNSPM
6	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	2.763.780	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	10/02/2021	00013
7	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	2.423.440	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	27/01/2021	6F1E248VJIG52BLA
8	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTASENA" DI MAGELANG	2.970.230	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kota	12/01/2021	F26457QLTSP99SFU DB74F61QU7KGG93K
9	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	2.000.000	Pengembalian belanja bantuan sosial TA2020	09/02/2021	D55428N3DNEIADBH
10	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	808.940	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	10/02/2021 28/04/2021	FDF18N3DNEICORF E9F3C55DEDBI5EMD
11	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	2.330.685	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	08/02/2021	00009
12	BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	564.000.000	Pengembalian belanja bantuan sosial TA2020 berupa bantuan Asistensi Penyandang Disabilitas Sosial (ASPD) yang akan disetorkan pada TA2021	02/02/2021	863E58N3DNC44USB
13	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	1.131.120	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	05/02/2021	00023
14	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	47.697.805	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan	13/01/2021 19/01/2021 09/02/2021	0AC9E6U8E26TT469 0B14C3CIENTIDPQ3 53F373CIENTIDP63 530C48N3DNCB51H 9F7ED2G4UTAVS4U6 A7AC42G4UTAVS4FG 2C51B0N9V86D6PLU 7E6AB1JNF2OPKEV7 3C6686U8E29PIE3B
15	LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	1.097.910	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, uang makan dan uang lembur	08/01/2021	DCAF255DED1VUKQN 58AC93CIENT74MB3 3158748VJIFJHML4
16	LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHAI" DI KENDARI	1.362.290	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	02/02/2021	00016
17	LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "MINAULA" DI KENDARI	4.461.615	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja	08/02/2021	00017
TOTAL PIUTANG BUKAN PAJAK DITJEN REHSOS		641.830.380			

4. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp362.503.289.842 terdapat pada satuan kerja:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial senilai Rp6.608.245 merupakan Piutang atas Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2020 yang akan disetorkan pada bulan Februari 2021 melalui mekanisme potongan tagihan Tunjangan Kinerja Januari 2021
 - b. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam senilai Rp600 merupakan kelebihan pembayaran pembelian persediaan yang disetorkan pada tahun 2021
 - c. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga senilai Rp362.496.680.997 merupakan piutang dari kelebihan Honor SDM PKH Tahun 2020 yang disetor di Tahun 2021, KKS

tidak terdistribusi maupun KKS tidak bertransaksi di Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Lainnya dari KKS Tidak Terdistribusi dan KPM tidak Bertransaksi ≥ 3 kali periode penyaluran per 31 Desember 2020 sebesar Rp362.382.299.121 dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

No	BANK PENYALUR	KKS Tidak Terdistribusi		KPM Tidak Bertransaksi ≥ 3 kali Periode Penyaluran		Jumlah	
		KKS	Nominal	KPM	Nominal	KPM	Nominal
1	BNI	38,263	52,152,088,000	36,635	66,741,891,851	74,898	118,893,979,851
2	BRI	28,529	18,783,841,960	83,810	152,272,155,392	112,339	171,055,997,352
3	MANDIRI	17,409	24,902,282,000	30,385	44,662,363,500	47,794	69,564,645,500
4	BTN	794	796,925,418	1,301	2,070,751,000	2,095	2,867,676,418
TOTAL		84,995	96,635,137,378	152,131	265,747,161,743	237,126	362,382,299,121

- Piutang lainnya dari setoran ke Kas Negara atas 1.346 KPM Non Eligible penyaluran bulan Juli-September 2020 senilai Rp 28,181,876 pada Bank BRI yang disetor pada tanggal 22 Januari 2021 dengan kode NTPN 21F673CIENTJEL2D.
- Kelebihan Honor SDM PKH Tahun 2020 yang disetor di Tahun 2021 sebesar Rp86.200.000 dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL SETOR	NTPN	KODE AKUN	NOMINAL	KETERANGAN
1	04-01-2021	2EAD81JNEQFR1J8D	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH a.n Simon Pando bulan Desember 2020 Pdp Kec. Wewaria Kab. Ende
2	05-01-2021	573CA48VUA708JUC	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH a.n Fransiska Ule Tena bulan Desember 2020 Pdp Kab. Ende
3	05-01-2021	4218C55DE4PCM2M9	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH a.n Yosef Georgi Pipa bulan Desember 2020 Pdp Kab. Ende
4	05-01-2021	204747QLTKGIVHJ6	425912	300,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Mei-Juli 2020 a.n Ach. Zaini Pendamping Kab. Sampang
5	13-01-2021	8EEC961QU7KBBF0C	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH a.n Wilibaldus Renda bulan Desember 2020 Pdp Kab. Ende
6	11-01-2021	45C5C3CIENT74K2J	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Zulian Ujianto Pdp Kec. Sukorejo, Kab. Kendal
7	11-01-2021	267ED3CIENT74GQR	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Teguh Setiyadi Pdp Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
8	07-01-2021	6352261QU7KCBGG0	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Ika Mustika Rani Pdp Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten
9	11-01-2021	E832F3CIENT7541H	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Nur Azizah Pdp Kec. Wungu Kab. Madiun
10	07-01-2021	C7F7B0N9V861TCQK	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Linggan Rizka Wigantari Pdp Kec. Kemalang, Kab. Klaten
11	18-01-2021	6ABB955DED2A67PN	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Duwi Rohmah Pdp Kab. Temanggung
12	27-01-2021	0CA3761QU7KPP3VM	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Dadan Kusnandar Pdp Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta
13	25-01-2021	F70F21JNF2ORO4LN	425912	3,100,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Amin Saefudin Pdp Kec. Petanahan Kab. Kebumen
14	02-02-2021	86B330N9V88RE0BI	425912	9,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Yunita Purwandari, Nur Kuni Faizah, Aditya Bayu Ariyantara Pdp Kab. Kulon Progo
15	02-02-2021	3ECE60N9V88RE1PQ	425912	21,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Ely Nawang Purwanti, Nugroho Prasetyotomo, Rika Wahyuni, Dani Muhammad Darmawan, Desi Puspitasari, Ratih Ernawati, D Bobby Carter Pdp Kab Gunung Kidul
16	02-02-2021	3468E48VUID2TKN	425912	3,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH Bulan Desember 2020 a.n Latifah Utiya Ni'amar Rahmani Pdp Kota Yogyakarta
17	05-02-2021	6E2982G4UTDNDPE6	425912	1,600,000	Pengembalian Kelebihan Honor SDM PKH bulan Februari-September 2020 a.n Ahmadi Pdp Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
18	09-02-2021	EDF036U8E29LEV0F	425912	12,000,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Desember 2020 a.n Nurhidayah, Rahliansyah, Ihya Yusriati, Rahmawati Pdp Kab. Hulu Sungai Tengah
19	07-02-2021	19A2F1JNF2RB27DD	425912	3,200,000	Pengembalian Honor SDM PKH bulan Februari 2020 a.n Wisnu Nugraha Pdp Sosial Khusus Kab. Sleman
Total				86,200,000	

5. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp4.883.459.845 terdapat pada satuan kerja berikut:

Satker	Nilai	Keterangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	23.260.020	Piutang atas potongan pembayaran tunjangan kinerja, uang makan, honor Non-ASN yang belum diperhitungkan pada bulan Desember 2020 serta kelebihan pembayaran gaji bulan Oktober, November, dan Desember 2020
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	1.037.343.583	Piutang atas biaya riil distribusi yang belum diperhitungkan dengan PT. Pos Indonesia
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	3.822.856.242	Piutang atas biaya riil distribusi yang belum diperhitungkan dengan PT. Pos Indonesia
Total Piutang	4.883.459.845	

Keseluruhan Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dikembalikan ke Kas Negara pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	No SP2D/NTPN	Tgl Pengembalian	Nilai
Sekretariat Ditjen PFM	211821301000535	15/02/2021	1.002.930
Sekretariat Ditjen PFM	211821301000515	11/02/2021	1.709.965
Sekretariat Ditjen PFM	211821301000416	08/02/2021	742.070
Sekretariat Ditjen PFM	E4F952G4UTB20FHE	18/01/2021	18.905
Sekretariat Ditjen PFM	4A8B348VUIFQQ53E	15/01/2021	9.266.000
Sekretariat Ditjen PFM	18D526U8E2G5QMN	27/04/2021	9.248.500
Sekretariat Ditjen PFM	084B97QLTSP99V74	12/01/2021	20.305
Sekretariat Ditjen PFM	B87B52G4UTAURT76	12/01/2021	121.830
Sekretariat Ditjen PFM	431707QLTSP99UGU	12/01/2021	385.795
Sekretariat Ditjen PFM	04F712G4UTAURVE4	12/01/2021	81.220
Sekretariat Ditjen PFM	5A62948VUIFTOUNC	18/01/2021	662.500
Direktorat PFM Wilayah II	E7F882G4UTB4VVB2	21/01/2021	1.037.343.583
Direktorat PFM Wilayah III	B583948VUIFIHL8A	08/01/2021	540.361.567
Direktorat PFM Wilayah III	D745261QU7KHIBHM	18/01/2021	3.282.494.675
Total Piutang			4.883.459.845

6. Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluh Sosial sebesar Rp216.878.298 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode	Satker	Nilai	Keterangan
027.11.369059	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh Sosial	166.471.278	Piutang atas belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) dan temuan BPK atas renovasi Gedung Pusdiklat Kesos. Atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2021
027.11.369084	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang - Bandung	8.270.085	Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2020
027.11.369202	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta	10.484.560	Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2020
027.11.369283	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang	856.410	Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2020
027.11.440326	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	25.262.770	Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja bulan Desember 2020. Selain itu terdapat piutang atas belanja barang perjalanan dinas, belanja barang non operasional lainnya, dan belanja jasa penanganan pandemi covid-19
027.11.440332	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	5.533.195	Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2020
		216.878.298	



Piutang Bukan Pajak yang sudah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp53.825.650 dengan rincian sebagai berikut:

No	NTPN / SP2D	Tanggal Setor	Nominal	Keterangan
1	211821301000365	05-02-2021	3.418.630	Setor Kelebihan Pembayaran Tukin Bulan Desember 2020 di Sekretariat
2	43FD55DED2EB0N1	22-01-2021	5.546.300	Pengembalian Tunjangan Suami Tahun 2020 di B2P3KS Yogyakarta
3	210301303004864	13-04-2021	4.938.260	Pengembalian Tukin Desember Tahun 2020 di B2P3KS Yogyakarta
4	210101301000980	08-02-2021	856.410	Pengembalian Gaji dan Tukin Bulan Desember 2020 di BBPPKS Padang
5	51EDB3CIENT85U7F	08-01-2021	8.270.085	Pengembalian Tukin Desember Tahun 2020 di BBPPKS Bandung
6	211821301000411	08-02-2021	4.818.330	Pengembalian Gaji dan Tukin Desember Tahun 2020 di Pusdiklat
7	95FD11JNF2OJGO73	13-01-2021	4.730.000	Pengembalian Belanja Bahan Tahun 2020 di Pusdiklat
8	1E38D8N3DNBMOMPD	13-01-2021	2.450.000	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Tahun 2020 di Pusdiklat
9	5B19455DED254NC1	13-01-2021	1.097.500	Pengembalian Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2020 di Pusdiklat
10	E096D1JNF2OJGNUB	13-01-2021	5.175.000	Pengembalian Belanja Jasa Covid-19 Tahun 2020 di Pusdiklat
11	23A6761QU7KHHPKS	15-01-2021	1.764.165	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 di Pusdiklat
12	214F90N9V86855SE	15-01-2021	840.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 di Pusdiklat
13	35BB23CIENJOJK35	26-01-2021	3.652.025	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 di Pusdiklat
14	D35F248VUILFRMUI	09-03-2021	735.750	Pengembalian Uang Makan Tahun 2020 di Pusdiklat
15	378372G4UTE2LPD8	17-02-2021	5.533.195	Pengembalian Gaji dan Tukin Tahun 2020 di Puslitbang
Jumlah			53.825.650	

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak (Rp1.843.945.145)

C.5 PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH – PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak Neto per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **(Rp1.843.945.145)** dan **(Rp1.801.670.900)** dimana mengalami kenaikan sebesar (Rp42.274.245) atau sebesar 2,35%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak menggunakan perhitungan 0,5 per mil atau 0,005 persen dari total Piutang Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang per Eselon I adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(2.405.237)	(1.424.518)	(980.719)	68,85
Inspektorat Jenderal	-	(63.539)	63.539	(100,00)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	(312.615)	(2.386.282)	2.073.667	(86,90)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	(3.209.152)	(44.461.456)	41.252.304	(92,78)
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(1.812.516.449)	(1.750.643.232)	(61.873.217)	3,53
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	(24.417.300)	(130.310)	(24.286.990)	18.637,86
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	(1.084.392)	(2.561.563)	1.477.171	(57,67)
Jumlah	(1.843.945.145)	(1.801.670.900)	(42.274.245)	2,35



Piutang Bukan Pajak
(Netto)
Rp366.945.083.716

C.6 PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)

Saldo Piutang Bukan Pajak Netto Kementerian Sosial Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp366.945.083.716** dan **Rp358.532.507.998** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp8.412.575.718 atau sebesar 2,35%

Piutang Bukan Pajak Netto merupakan hasil pengurangan antara saldo Piutang Bukan Pajak dengan Penyisihan Piutang tak Tertagih.

Rincian Piutang Bukan Pajak Netto per Eselon I adalah sebagai berikut:

No	UKE I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	478.642.259	283.479.082	195.163.177	68,85
2	Inspektorat Jenderal	-	12.644.091	(12.644.091)	(100,00)
3	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	62.210.385	474.869.619	(412.659.234)	(86,90)
4	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	638.621.228	8.847.829.562	(8.209.208.334)	(92,78)
5	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	360.690.773.393	348.378.003.226	12.312.770.167	3,53
6	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	4.859.042.545	25.931.495	4.833.111.050	18.638,00
7	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	215.793.906	509.750.923	(293.957.017)	(57,67)
	Jumlah	366.945.083.716	358.532.507.998	8.412.575.718	2,35

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp2.033.634.771

C.7 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp2.033.634.771** dan **Rp0** mengalami kenaikan sebesar Rp2.033.634.771.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi merupakan bagian dari Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti per Eselon I adalah sebagai berikut:

No	UKE I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	247.000.000	-	247.000.000	-
2	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	1.786.634.771	-	1.786.634.771	-
	Jumlah	2.033.634.771	-	2.033.634.771	-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 senilai Rp2.033.634.771 terdapat pada unit kerja Eselon I berikut:

1. Sekretariat Jenderal satker Sekretariat Jenderal yang merupakan temuan TLHP BPK RI Tahun 2018 Nomor: 90C/LHP/XVI/05/2018 pada tanggal 14 Mei 2018 terdapat Belanja Barang untuk Operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang tidak mempedomani mekanisme pertanggungjawaban Uang Persediaan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp529.641.315 yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp282.641.315



sehingga nilai tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang tercatat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp247.000.000.

2. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial satker BBPPKS Lembang-Bandung atas temuan BPK dan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal terkait realisasi belanja barang pada kegiatan Diklat P2K2 FDS di BBPPKS Bandung yang tidak sesuai ketentuan, meliputi:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.681.807.268; dan
 - b. Pengeluaran tidak wajar berupa konsumsi PBL tumpang tindih sebesar Rp405.290.000

Atas temuan sebesar Rp3.087.097.268 telah dilakukan penyeteroran ke Kas Negara sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp853.803.804, sehingga sisa yang belum disetorkan sebesar Rp2.233.293.464. Kerugian negara tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 24 bulan sampai bulan Maret 2022. Sehingga Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.786.634.771.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Rp10.168.174)

C.8 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **(Rp10.168.174)** dan **Rp0**.

Penyisihan Piutang tak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang yang ditetapkan paling sedikit sebesar 5% (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I adalah sebagai berikut:

No	UKE I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	(1.235.000)	-	(1.235.000)	-
2	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	(8.933.174)	-	(8.933.174)	-
	Jumlah	(10.168.174)	-	(10.168.174)	-

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp10.168.174) merupakan 5% (lima permil) dari total Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp2.033.634.771.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp2.023.466.597

C.9 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp2.023.466.597** dan **Rp0**.



Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) merupakan hasil pengurangan antara saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dengan Penyisihan Piutang tak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per Eselon I sebagai berikut:

No	UKE I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	245.765.000	-	245.765.000	-
2	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	1.777.701.597	-	1.777.701.597	-
	Jumlah	2.023.466.597	-	2.023.466.597	-

Persediaan

Rp480.185.394.440

C.10 PERSEDIAAN

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp480.185.394.440** dan **Rp455.884.848.039** mengalami kenaikan sebesar Rp24.300.546.401 atau sebesar 5,33%.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan pada Kementerian Sosial dapat dilihat sebagai berikut :

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	1.196.999.292	2.102.251.813	(905.252.521)	(43,06)
2	Inspektorat Jenderal	121.537.500	8.174.500	113.363.000	1.386,79
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	24.971.633.775	27.302.439.302	(2.330.805.527)	(8,54)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	103.316.392.454	125.559.826.719	(22.243.434.265)	(17,72)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	343.605.030.309	284.418.061.781	59.186.968.528	20,81
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	187.399.605	192.892.455	(5.492.850)	(2,85)
7	Badiklit Pensos	6.786.401.505	16.301.201.469	(9.514.799.964)	(58,37)
	Jumlah	480.185.394.440	455.884.848.039	24.300.546.401	5,33

Berdasarkan data diatas terdapat kenaikan Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.300.546.401 atau 5,33%. Adapun kenaikan signifikan secara nilai terdapat pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp59.186.968.528 atau 20,81% dikarenakan adanya pengadaan *Bufferstock* dan perlengkapan dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan sosial yang dikelola Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, antara lain berupa logistik (beras, mie instan, lauk pauk, sandang, alat dapur, *family kit*, *kid ware*, *food ware* dan makanan tambahan) dan perlengkapan evakuasi.

Sedangkan kenaikan signifikan secara persentase terdapat pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp113.363.000 atau 1.386,79% yang disebabkan adanya persediaan berupa masker, *hand soap*, *hand sanitizer*, vitamin, dan madu murni yang didistribusikan untuk seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Penjelasan nilai Persediaan masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal terdapat Persediaan sebesar Rp1.196.999.292 merupakan Barang Konsumsi senilai Rp652.533.676 dan Persediaan Lainnya senilai Rp544.465.616.
2. Inspektorat Jenderal terdapat Persediaan sebesar Rp121.537.500 berupa Barang Konsumsi berupa masker, *hand soap*, *hand sanitizer*, vitamin, dan madu murni yang didistribusikan untuk seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.
3. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp24.971.633.775 berupa:

No	Akun	Uraian	Nilai
1	117111	Barang Konsumsi	475.314.200
2	117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	118.200.000
3	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.380.403.437
4	117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat- Dalam Proses	997.716.138
Jumlah			24.971.633.775

- a. Barang Konsumsi senilai Rp475.314.200 merupakan barang habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran.
- b. Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp118.200.000 terdapat pada satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial berupa Papan nama atas nama Moh. Hatta di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp23.380.403.437 terdapat pada:

No	Satker	Nilai
1	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	23.181.206.937
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	199.196.500
Jumlah		23.380.403.437

Barang persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial senilai Rp23.181.206.937 merupakan barang HTT (Hadiah Tidak Tertebak) yang sebagian besar berupa barang elektronik, peralatan rumah tangga, mobil, motor, voucher belanja, dan logam mulia. Sedangkan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial senilai Rp199.196.500 berupa buku-buku juknis, informasi program, himpunan perundang-undangan, dan profil lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial.

- d. Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat- Dalam Proses senilai Rp997.716.138 terdapat pada:

No	Satker	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	174.146.536
2	Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua	204.494.002
3	Dinas Sosial Kabupaten Nunukan	619.075.600
Jumlah		997.716.138



- **Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur** senilai Rp174.146.536 merupakan pekerjaan pemberian bantuan stimulant pemukiman sosial bagi warga Komunitas Adat Terpencil yang tidak dapat direalisasikan karena wanprestasi sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat Nomor Dinsos.460/411/BPS.1/NTT/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 yang telah diawali dengan pemberian Surat peringatan I sd III terhadap Perusahaan CV. Bina Karya selaku kontraktor Pelaksana Pekerjaan pemberian Bantuan stimulant Pemukiman Sosial Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Letkole Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Akibat dari PHK tersebut dilakukan klaim terhadap pemberian jaminan (Bank NTT) untuk mengembalikan sisa uang muka tersebut dengan rincian nilai Kontrak Rp1.366.820.000 uang muka (30%) sebesar Rp410.046.000 Realisasi uang muka (12,74%) sebesar Rp174.146.536 Sisa Uang Muka yang dikembalikan sebesar Rp235.899.464 NTPN DC56D2U58QEA73D2 tanggal 16 Oktober 2018 jaminan pelaksanaan (5%) sebesar Rp68.341.000 dan sisa kontrak yang tidak tereliasasi sebesar Rp1.192.673.646.

Berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Lintas Sektor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persediaan Dalam Proses tersebut merupakan bangunan pondasi sebanyak 5 buah, bahan bangunan lain berupa kayu dan seng yang disimpan di rumah warga. Bahan bangunan tersebut telah diserahkan kepada warga Komunitas Adat Terpencil Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Desember 2020.

- **Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua (TP)** senilai Rp204.494.002 merupakan Pekerjaan pembangunan Rumah komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kampung Papane Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya tahun 2017 senilai 404.700.094 (dengan SPM LS No. 00012 tanggal 16 Oktober 2017 dengan rincian : nilai yang dibayarkan Rp.396.606.092,- dengan pajak PPh dengan nilai Rp.8.094.002) yang tidak terealisasikan karena adanya kesalahpahaman dari Masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan dan telah dilakukan musyawarah tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Di Tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan telah disetor ke kas negara senilai Rp.200.206.092 NTPN : EE6001OL96005IO Tanggal 5 April 2018) sehingga per 31 Desember 2020 masih tersisa Rp204.494.002.

Berdasarkan surat pernyataan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Dokumen Berita Acara Serah Terima bahan bangunan Rumah Layak Sederhana (KAT) Kabupaten Lanny Jaya Distrik Gamelia Kampung Papane dari CV. Libers ke PPK, dan Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan Rumah Layak Sederhana (KAT) yang berupa kayu balok dan kayu papan dari PPK ke warga KAT tersimpan di Kantor Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.

- Dinas Sosial Kabupaten Nunukan masih memiliki Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp619.075.600. Telah dilakukan pemutusan kontrak Penerima Pekerjaan Pembangunan Rumah Bantuan



Stimulan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan CV. Netlajasa Perkasa dengan Nomor SPK (Surat Perjanjian Kontrak) 03/PKAT/027/IV/2019 tanggal 24 juni 2019 nilai kontrak sebesar Rp1.238.118.900. Pemutusan kontrak tersebut dikarenakan pihak penyedia tidak ada kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan

4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp103.316.392.454 dengan rincian:

No	Akun	Uraian	Nilai
1	117111	Barang Konsumsi	5.156.075.871
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	42.268.768
3	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	78.323.805.481
4	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	13.634.177.126
5	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.700.516.000
6	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.386.026.850
7	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	650.172.602
8	117131	Bahan Baku	5.025.000
9	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	2.123.962.500
10	117199	Persediaan Lainnya	294.362.256
Jumlah			103.316.392.454

Berdasarkan tabel diatas persediaan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang konsumsi merupakan barang habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran.
- b. Bahan untuk pemeliharaan merupakan persediaan berupa alat kebersihan, pengharum ruangan, dan perabot kantor lainnya.
- c. Pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA terdapat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp87.262.558.140 berupa:
 - Pembangunan Gedung Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 7 lokasi pada Tahun 2015 beserta pengadaan sarana prasarana pendukungnya dimana pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami pengembangan supaya bisa berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan. Dasar SK Menteri Sosial No. 37/HUK/2015 Tgl. 23 April 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Institusi Penerima Wajib Lapor di 7 lokasi yaitu Prov. Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Kota Malang.
 - Pembangunan Gedung Pusat Informasi dan Edukasi NAPZA pada tahun 2015 beserta pengadaan sarana prasarana pendukungnya dimana pada Tahun 2016 mengalami pengembangan supaya bisa berfungsi optimal dalam memberikan Informasi pada masyarakat. Dasar; SK Menteri Sosial No. 65/HUK/2015 Tanggal 25 Juni 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat Informasi dan Edukasi NAPZA di 4 Lokasi yaitu Provinsi DIY, Kalimantan Tengah, NTB dan Jawa Timur.



Sampai pada periode pelaporan 31 Desember 2020 gedung tersebut belum diserahkan kepada masyarakat/Pemda karena Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana didalam lampiran F Poin 3 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Sub. Bidang Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa terkait dengan penanganan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat, sehingga status keberadaan Gedung IPWL adalah sebagai berikut:

- 6 Gedung IPWL tidak jadi diserahkan pada Pemerintah Daerah dan sekarang kondisinya masih dalam tahap untuk proses Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan (IPWL Prov. Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara)
 - 1 Gedung IPWL akan di hibahkan karena terkait dengan masyarakat langsung (Yayasan milik masyarakat) yaitu IPWL di Kota Malang
- d. Pada Satuan Kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak masih terdapat barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp7.782.952.817 berupa Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Bantuan Dengan Hukum (LPKS ABH) / barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Uraian Akun	Nilai
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	Tanah Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	1.696.415.000
	Peralatan dan Mesin Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	2.999.009.467
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Di Serahkan Kepada Masyarakat	1.700.516.000
	Aset Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.386.026.850
	Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	985.500
JUMLAH		7.782.952.817

Barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak akan dilakukan proses pembuatan Naskah Perjanjian Hibah kepada setiap Provinsi penerima untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Hibah BMN dari Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI.

- e. Persediaan Bahan Baku berupa bahan bangunan dan konstruksi lainnya, dan bahan baku lainnya.
 - f. Persediaan dalam rangka bantuan sosial berupa barang persediaan untuk bantuan sosial dan obat-obatan.
5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp343.605.030.309 dengan rincian:

No	Akun	Uraian	Nilai
1	117111	Barang Konsumsi	331.635.650
2	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	661.602.069
3	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	342.611.792.590
Jumlah			343.605.030.309

Persediaan konsumsi senilai Rp331.635.650 berupa alat tulis kantor, buku-buku yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor.



Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp661.602.069 berupa seragam, rompi TAGANA dan APD (masker, hazmat, sarung tangan, *hand sanitizer*, cairan disinfektan).

Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial senilai Rp342.611.792.590 terdapat pada setker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Persediaan tersebut merupakan *Bufferstock* dan perlengkapan dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan sosial antara lain berupa logistik (beras, makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, sandang, alat dapur, *family kit*, *kid ware*, *food ware*) dan perlengkapan evakuasi (tenda, velbed, dumlap, matras, kasur, selimut wol)

6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat Persediaan sebesar Rp187.399.605 merupakan persediaan konsumsi berupabarang habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran.
7. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial terdapat Persediaan sebesar Rp6.786.401.505 dengan rincian:

No	Akun	Uraian	Nilai
1	117111	Barang Konsumsi	712.468.165
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4.704.500
3	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5.816.009.190
4	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	222.800.250
5	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Jaga-jaga	30.419.400
6	117199	Persediaan Lainnya	-
Jumlah			6.786.401.505

Persediaan konsumsi berupa alat tulis kantor, buku-buku yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor. Persediaan Bahan untuk pemeliharaan alat kebersihan, pengharum ruangan, dan perabot kantor lainnya.

Terdapat Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp5.816.009.190 pada Pusdiklat Kesos berupa Toolkit untuk peserta Diklat P2K2/FDS tahun 2019.

Rincian Persediaan senilai Rp6.786.401.505 pada masing-masing satker sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat Badiklitpensos	556.000
2	Puspensos	264.418.000
3	Puslitbang Kesos	191.223.965
4	Pusbangprof Peksos dan Pensos	46.500
5	Pusdiklat Kesos	5.998.145.190
6	BBPPKS Bandung	66.247.200
7	BBPPKS Yogyakarta	2.288.000
8	B2P3KS Yogyakarta	241.901.650
9	BBPPKS Padang	975.000
10	BBPPKS Jayapura	20.600.000
Jumlah		6.786.401.505



Rincian Persediaan Kementerian Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No	Akun	Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	117111	Barang Konsumsi	7.636.964.667	7.990.376.411	(353.411.744)
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	46.973.268	27.944.000	19.029.268
3	117114	Suku Cadang	-	-	-
4	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	78.323.805.481	98.591.193.481	(20.267.388.000)
5	117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	19.568.386.316	31.558.594.906	(11.990.208.590)
6	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.700.516.000	1.700.516.000	-
7	117127	Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.386.026.850	1.386.026.850	-
8	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	24.914.978.358	22.228.558.086	2.686.420.272
9	117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam Proses	997.716.138	5.130.176.957	(4.132.460.819)
10	117131	Bahan Baku	5.025.000	-	5.025.000
11	117141	Persediaan dalam rangka bantuan sosial	344.735.755.090	286.839.684.347	57.896.070.743
12	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	30.419.400	13.759.717	16.659.683
13	117199	Persediaan Lainnya	838.827.872	418.017.284	420.810.588
		Total	480.185.394.440	455.884.848.039	24.300.546.401



Analisa Mutasi Persediaan Kementerian Sosial per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

SALDO PERSEDIAAN 1 JANUARI 2020		455.884.848.039
BELANJA PERSEDIAAN (LRA)		
BELANJA PERSEDIAAN	Persediaan	37.400.891.036
	Pemeliharaan	658.509.036
	Diserahkan kpd masyarakat	107.557.759.868
	Bansos dalam bentuk barang	11.461.822.705.822
TOTAL BELANJA PERSEDIAAN (LRA)		11.607.439.865.762
(1)	TOTAL SALDO AWAL + BELANJA PERSEDIAAN (LRA)	12.063.324.713.801
BEBAN PERSEDIAAN (LO)		
BEBAN PERSEDIAAN	Persediaan	47.976.043.254
	Pemeliharaan	574.671.573
	Diserahkan kpd masyarakat	144.079.543.332
	Bansos dalam bentuk barang	11.401.213.802.451
(2)	TOTAL BEBAN PERSEDIAAN	11.593.844.060.610
Kode Akun	Transaksi lain yang menambah nilai Persediaan	
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	137.817.873.892
313221	Transfer Masuk (Persediaan)	86.305.072.519
218221	Hibah Masuk (Persediaan)	6.298.153.196
391113	Koreksi Nilai Persediaan	0
	Reklasifikasi Masuk (Persediaan)	31.042.526.199
	Belanja Bansos yang Masih Harus Dibayar	832.025.601
	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	15.180.000
	Jurnal kesalahan penggunaan akun belanja yang menambah persediaan	10.880.127.430
(3)	Total Transaksi yang menambah persediaan	273.190.958.837
Kode Akun	Transaksi lain yang mengurangi nilai Persediaan	
593311	Beban penyesuaian nilai persediaan	136.816.301.181
313211	Transfer Keluar (Persediaan)	94.328.656.097
391113	Koreksi Nilai Persediaan	0
596121	Persediaan Rusak/ Usang	107.332.912
	Reklasifikasi Keluar (Persediaan)	31.198.591.698
	Jurnal kesalahan penggunaan akun belanja yang mengurangi persediaan	35.335.100
	Kelebihan Pembayaran Persediaan PSKBA	600
(4)	Total Transaksi yang mengurangi persediaan	262.486.217.588
Mutasi Persediaan		24.300.546.401
Saldo Persediaan Menurut Perhitungan (1)-(2)+(3)-(4)		480.185.394.440
Saldo Persediaan Menurut Neraca		480.185.394.440
Selisih		-



ASET TETAP

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah

Rp18.565.546.383.592

C.11 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp18.565.546.383.592** dan **Rp18.532.038.706.705** mengalami kenaikan sebesar Rp33.507.676.887 atau sebesar 0,18%.

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Rincian Aset Tanah 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 di setiap Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.545.666.944.000	3.545.666.944.000	-	-
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	6.875.059.267.548	6.868.611.638.000	6.447.629.548	0,09
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	6.471.804.980.650	6.471.449.766.650	355.214.000	0,01
4	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	38.669.400.000	38.669.400.000	-	-
5	Badiklit Pensos	1.634.345.791.394	1.607.640.958.055	26.704.833.339	1,66
	Jumlah	18.565.546.383.592	18.532.038.706.705	33.507.676.887	0,18

Berdasarkan tabel diatas terdapat kenaikan nilai Tanah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Adanya pengembangan atas penggunaan tanah seluas 5.576m² yang semula berupa tanah kosong menjadi area blok makam pada satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) yang terletak di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata
2. Penambahan 4 bidang tanah yang dilakukan melalui proses konsinyasi oleh satker Poltekesos Bandung
3. Terdapat sebidang tanah pada satker BRSPDSN “Wyata Guna” Bandung yang belokasi di Ujung Berung seluas 5.796m² yang bersertifikat a.n. Pemerintah Kota Bandung
4. Adanya penambahan nilai tanah dari hibah yang telah disahkan di satker BBPPKS Banjarmasin
5. Penambahan nilai aset Tanah dikarenakan adanya penilaian kembali (revaluasi aset) atas tanah pada beberapa satker di lingkungan Kementerian Sosial.



Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.715.743.910 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Belanja Modal Tanah

Belanja Tanah	29.715.743.910
Mutasi Tambah :	29.722.837.910
Pengembangan KDP	28.160.212.910
Perolehan/Penambahan KDP	1.339.155.000
Pengembangan Nilai Aset	223.470.000
Mutasi Kurang :	(7.094.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(7.094.000)
Total	29.715.743.910

Mutasi aset Tanah berdasarkan Laporan Barang Milik Negara selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Mutasi atas aset Tanah

Saldo per 31 Desember 2019	18.532.038.706.705
Mutasi Tambah :	34.054.910.719
(102) Transfer Masuk	540.139.650
(103) Hibah (Masuk)	2.031.337.611
(105) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	22.221.723.910
(202) Pengembangan Nilai Aset	223.470.000
(208) Pengembangan Melalui KDP	6.224.159.548
(225) Koreksi Kesalahan input IP	2.814.080.000
Mutasi Kurang :	(547.233.832)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(7.094.182)
(302) Transfer Keluar	(540.139.650)
Saldo per 31 Desember 2020	18.565.546.383.592

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Tanah dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

Peralatan dan Mesin
Rp2.037.635.381.225

C.12 PERALATAN DAN MESIN

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp2.037.635.381.225** dan **Rp1.904.924.241.165** dimana mengalami kenaikan sebesar Rp132.711.140.060 atau 6,97%.

Peralatan dan Mesin adalah Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	515.491.901.241	446.216.179.047	69.275.722.194	15,53
2	Inspektorat Jenderal	8.263.607.426	8.265.107.738	(1.500.312)	(0,02)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	78.531.890.785	77.974.010.785	557.880.000	0,72
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	355.867.579.520	327.108.842.025	28.758.737.495	8,79
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	863.740.348.882	849.049.293.862	14.691.055.020	1,73
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	20.994.025.548	20.248.499.049	745.526.499	3,68
7	Badiklit Pensos	194.746.027.823	176.062.308.659	18.683.719.164	10,61
	Jumlah	2.037.635.381.225	1.904.924.241.165	132.711.140.060	6,97



Kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin senilai Rp132.711.140.060 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang merupakan penambahan anggaran dari Realokasi Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas DC dan DRC dan Ujicoba Lapangan Pemutakhiran DTKS Tahun 2021 sebagai persiapan Program prioritas Nasional 2021 sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor:453/1/PR.01.01/08/2020 Hal: Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran Kementerian Sosial TA 2020.
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial kenaikan nilai Peralatan dan Mesin disebabkan adanya pembelian meubelair, AC, televisi, printer, scanner, kamera digital, dan alat kedokteran poliklinik
3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat pengadaan alat-alat meubelair, alat-alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi covid-19, alat-alat rumah tangga, alat-alat peraga pada beberapa Balai di lingkungan Ditjen Rehsos turut menambah kenaikan nilai peralatan dan mesin.
4. Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat pembelian mobil sedan, truk, ran jeep kommb, perahu motor, laptop, meubelair, dan peralatan kerja perkantoran.
5. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat pembelian laptop, alat penghancur kertas, kamera digital, AC split, dan meubelair lainnya.
6. Badiklit Pensos terdapat pembelian mini bus, alat rumah tangga, alat kerja perkantoran, dan meubelair.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp143.160.474.788 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin	143.160.474.788
Mutasi Tambah :	148.335.258.883
Pembelian	141.356.942.699
Pengembangan KDP	3.746.857.658
Perolehan/Penambahan KDP	2.829.914.074
Pengembangan Nilai Aset	401.544.452
Penjelasan Atas Selisih	(5.174.784.095)
Belanja GB untuk PM	(550.200.000)
Mutasi Tambah PM yang belum terbit SP2D	(1.014.803.075)
Belanja Aset Lainnya untuk PM	(289.625.930)
Belanja Bantuan Sosial untuk PM	(4.081.502.000)
Belanja Pemeliharaan untuk PM	(90.970.000)
Belanja PM untuk Aset Lainnya	67.900.000
Belanja PM untuk PM Ekstrakomtabel	149.056.910
Koreksi pengadaan Peralatan dan Mesin	635.360.000
Total	143.160.474.788



Mutasi aset Peralatan dan Mesin berdasarkan Laporan Barang Milik Negara selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020

Saldo per 31 Desember 2019	1.904.924.241.165
Mutasi Tambah :	186.446.800.702
(100) Koreksi Saldo Awal	2.557.136.831
(101) Pembelian	141.356.942.699
(102) Transfer Masuk	28.838.038.522
(103) Hibah (Masuk)	12.130.000
(105) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.576.771.732
(107) Reklasifikasi Masuk	6.324.648.715
(177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	378.365.000
(202) Pengembangan Nilai Aset	401.544.452
(209) Transaksi Normalisasi BMN	1.222.751
Mutasi Kurang :	(53.735.660.642)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(1.269.500)
(301) Penghapusan	(1.991.027.962)
(302) Transfer Keluar	(28.838.038.522)
(304) Reklasifikasi Keluar	(6.168.583.215)
(354) Hibah Keluar (semester II dokumen semester I)	(5.500.000)
(401) Penghentian Aset dari Penggunaan	(16.731.241.443)
Saldo per 31 Desember 2020	2.037.635.381.225

Pengadaan Peralatan dan Mesindalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp987.600.000 dengan rincian:

1. Sekretariat Jenderal senilai Rp716.600.000 berupa:

Nama Satker	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total
Sekretariat Jenderal	Kipas Angin	5	5.000.000	25.000.000
	Kipas Angin	4	1.500.000	6.000.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	10.600.000	63.600.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	24.500.000	49.000.000
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2	160.000.000	320.000.000
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	200.000.000	200.000.000
	Infrared Thermometer	20	2.650.000	53.000.000
Total		40		716.600.000



2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial senilai Rp266.000.000 berupa:

No.	Nama Satker	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total
1	BRSAMPK Handyani Jakarta	Infrared Thermometer	1	2.600.000	2.600.000
2	BRSLU "Budhi Dharma" Bekasi	P.C Unit	2	13.627.000	27.254.000
		Printer	2	6.798.000	13.596.000
		AC Split 1PK	5	7.350.000	36.750.000
		AC Split 1,5 PK	4	8.950.000	35.800.000
		Lemari Besi/Metal	2	3.397.500	6.795.000
		Dispenser	5	3.422.000	17.110.000
		Meubelair Lainnya	1	9.228.000	9.228.000
		Televisi 60 Inci	1	20.195.000	20.195.000
		Televisi 32 Inci	5	3.910.000	19.550.000
		Tabung Oksigen	2	1.410.000	2.820.000
		Meja Resepsionis	1	10.773.000	10.773.000
		Emergency Trolley	1	5.257.000	5.257.000
		Bangku Panjang Kayu	1	12.690.000	12.690.000
		Bangku Panjang Kayu	2	11.666.000	23.332.000
3	BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi	Infrared Thermometer	3	1.500.000	4.500.000
4	BRSAMPK "Paramita" Mataram	Alat Kesehatan Umum Lainnya (Pengukur suhu tubuh)	1	1.350.000	1.350.000
5	BRSPDI "Nipotowe" Palu	Infrared Thermometer	2	3.200.000	6.400.000
6	Sekretariat Ditjen Rehsos	Thermograph	5	2.000.000	10.000.000
TOTAL			46		266.000.000

3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial senilai Rp5.000.000 berupa:

Nama Satker	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	Thermometer Digital Portable	4	1.250.000	5.000.000
Total		4		5.000.000

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

Gedung dan
 Bangunan
 Rp2.136.028.516.570

C.13 GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp2.136.028.516.570 dan Rp1.798.628.848.267 mengalami kenaikan sebesar Rp337.399.668.303 atau sebesar 18,76%.

Gedung dan Bangunan adalah Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.



Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal	466.293.173.744	439.620.104.238	26.673.069.506	6,07
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	305.964.560.281	66.991.071.957	238.973.488.324	356,72
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	965.436.299.441	910.261.213.091	55.175.086.350	6,06
4	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.936.906.080	6.936.906.080	-	-
5	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	391.397.577.024	374.819.552.901	16.578.024.123	4,42
	Jumlah	2.136.028.516.570	1.798.628.848.267	337.399.668.303	18,76

Gedung dan Bangunan Kementerian Sosial per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp337.399.668.303 atau 18,76% diantaranya disebabkan oleh Pengembangan Nilai Aset pada Gedung Kantor Pusat Gedung A dan Gedung Cawang Kencana dan beberapa satker di lingkungan Kementerian Sosial. Selain itu adanya Penilaian Kembali Aset (Revaluasi Aset) pada beberapa satker di lingkungan Kementerian Sosial turut menambah nilai aset pada Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.197.998.545 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan	59.197.998.545
Mutasi Tambah :	61.859.000.958
Pembelian	1.094.143.961
Penyelesaian Pembangunan langsung	46.077.000
Perolehan/Penambahan KDP	3.942.309.025
Pengembangan KDP	31.345.702.691
Pengembangan Nilai Aset	23.518.553.781
Belanja GB untuk Aset Lainnya	74.900.000
Belanja GB untuk GB Ekstrakomtabel	175.695.000
Belanja GB untuk PM Ekstrakomtabel	118.616.000
Jurnal koreksi atas Utang yang mempengaruhi Belanja	992.803.500
Belanja GB untuk PM	550.200.000
Mutasi Kurang :	(2.661.002.413)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Karena Pengembalian Belanja Modal TAB	(1.161.942.509)
Mutasi Tambah GB yang belum terbit SP2D	(1.353.909.904)
Belanja Pemeliharaan untuk GB	(145.150.000)
Total	59.197.998.545



Mutasi aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Laporan Barang Milik Negara selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2019	1.798.628.848.267
Mutasi Tambah :	430.984.517.212
(101) Pembelian	1.094.143.961
(102) Transfer Masuk	58.942.408.426
(105) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.249.578.431
(107) Reklasifikasi Masuk	9.461.294.000
(113) Penyelesaian Pembangunan Langsung	46.077.000
(130) Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	8.002.889.000
(177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.811.619.689
(202) Pengembangan Nilai Aset	23.518.553.781
(206) Penerimaan Aset Tetap Renovasi	2.525.339.506
(208) Pengembangan Melalui KDP	28.880.755.783
(223) Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	5.491.652.996
(224) Koreksi Penilaian Kembali BMN	365.984.500
(225) Koreksi Kesalahan input IP	278.202.357.419
(238) Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil	107.818.720
(245) Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	354.586.000
(247) Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	7.767.225.000
(333) Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	158.869.000
(335) Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	3.364.000
Mutasi Kurang :	(93.584.848.909)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(4.421.712.768)
(226) Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(146.464.316)
(229) Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(5.649.412.534)
(237) Koreksi BMN ditemukan Kembali	(1.192.940.855)
(302) Transfer Keluar	(58.942.408.426)
(303) Hibah Keluar	(143.437.000)
(304) Reklasifikasi Keluar	(9.461.294.000)
(305) Koreksi Pencatatan	(3.352.783.050)
(321) Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(195.532.000)
(334) Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	(6.863.329.960)
(401) Penghentian Aset dari Penggunaan	(3.215.534.000)
Saldo per 31 Desember 2020	2.136.028.516.570

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada laporan keuangan ini (terlampir)

Pengadaan Gedung dan Bangunan dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.011.448.264 dengan rincian:

No	Nama Satker	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total
1	BRSLU "Budi Dharma" Bekasi	Bangunan Gedung Perkantoran Permanen	1	213.497.000	213.497.000
2	BRSEWTS "Mulya Jaya" Jakarta	Asrama Permanen	1	797.951.264	797.951.264
Total			2		1.011.448.264



Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Rp104.828.063.058

C.14 JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp104.828.063.058** dan **Rp102.663.682.834** dan terdapat kenaikan sebesar Rp2.164.380.224 atau sebesar 2,11%

Rincian atas Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I dapat dilihat sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	15.082.222.444	19.115.158.444	(4.032.936.000)	(21,10)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	10.933.734.946	13.130.093.446	(2.196.358.500)	(16,73)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	63.096.147.312	59.286.282.952	3.809.864.360	6,43
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.389.553.000	1.389.553.000	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	14.326.405.356	9.742.594.992	4.583.810.364	47,05
TOTAL	104.828.063.058	102.663.682.834	2.164.380.224	2,11

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	38.577.401.375	46.551.709.875	(7.974.308.500)	(17,13)
Irigasi	48.180.245.628	38.341.743.268	9.838.502.360	25,66
Jaringan	18.070.416.055	17.770.229.691	300.186.364	1,69
TOTAL	104.828.063.058	102.663.682.834	2.164.380.224	2,11

C.14.1 Jalan Dan Jembatan

Nilai Aset Tetap Jalan dan Jembatan pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp38.577.401.375** dan **Rp46.551.709.875** dimana terdapat penurunan sebesar (Rp7.974.308.500) atau (17,13%).

Jalan dan Jembatan adalah Jalan dan Jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian Aset Jalan dan Jembatan per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.746.190.000,	8.849.041.000,	(5.102.851.000)	(57,67)
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	2.409.763.000,	5.868.799.500,	(3.459.036.500)	(58,94)
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	25.148.320.375	25.332.549.375	(184.229.000)	(0,73)
4	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.201.453.000,	1.201.453.000,	-	-
5	Badiklit Pensos	6.071.675.000	5.299.867.000	771.808.000	14,56
	Jumlah	38.577.401.375	46.551.709.875	(7.974.308.500)	(17,13)

Kenaikan nilai aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp 771.808.000 disebabkan adanya penilaian kembali aset (revaluasi aset tetap) pada satker BBPPKS Yogyakarta dan BBPPKS Padang.

Adapun Mutasi nilai Aset Tetap Jalan dan Jembatan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	46.551.709.875
Mutasi Tambah	Rp	8.440.820.150
(102) Transfer Masuk	Rp	3.179.622.150
(130) Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	Rp	72.464.000
(223) Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	93.906.000
(334) Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp	5.094.828.000
Mutasi Kurang :	Rp	(16.415.128.650)
(225) Koreksi Kesalahan input IP	Rp	(6.424.753.000)
(226) Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	Rp	(24.310.097)
(229) Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp	(44.612.000)
(237) Koreksi BMN ditemukan Kembali	Rp	(354.056.403)
(247) Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp	(5.102.851.000)
(302) Transfer Keluar	Rp	(3.179.622.150)
(305) Koreksi Pencatatan	Rp	(1.284.924.000)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	38.577.401.375

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

C.14.2 Irigasi

Nilai Aset Tetap Irigasi pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2020 sebesar **Rp48.180.245.628** dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp38.341.743.268** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp9.838.502.360 atau 25,66%.

Irigasi adalah Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian Aset Tetap Irigasi di tiap Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	2.945.257.400	2.215.992.400	729.265.000	32,91
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	7.628.707.453	6.366.029.453	1.262.678.000	19,83
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	31.886.617.775	27.892.524.415	3.994.093.360	14,32
4	Badiklit Pensos	5.719.663.000	1.867.197.000	3.852.466.000	206,32
	Jumlah	48.180.245.628	38.341.743.268	9.838.502.360	25,66

Irigasi per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.838.502.360 atau 25,66% disebabkan adanya Penilaian Kembali Aset (Revaluasi Aset) pada beberapa satker di lingkungan Kementerian Sosial.

Realisasi Belanja Modal Irigasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp382.150.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Belanja Modal Irigasi

Belanja Modal Irigasi	382.150.000
Pembelian	197.500.000
Belanja Irigasi untuk Jalan dan Jembatan	184.650.000
Total	382.150.000

Rincian Mutasi Aset Irigasi adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	38.341.743.268
Mutasi Tambah :	Rp	11.512.271.862
(101) Pembelian	Rp	197.500.000
(121) Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp	195.532.000
(177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	412.000
(208) Pengembangan Melalui KDP	Rp	380.150.000
(223) Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	46.068.862
(225) Koreksi Kesalahan input IP	Rp	9.963.344.000
(247) Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp	729.265.000
Mutasi Kurang :	Rp	(1.673.769.502)
(224) Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp	(70.467.600)
(226) Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	Rp	(85.811.060)
(229) Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp	(44.556.944)
(237) Koreksi BMN ditemukan Kembali	Rp	(74.594.340)
(245) Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp	(227.622.000)
(305) Koreksi Pencatatan	Rp	(318.913.000)

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Irigasi dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

C.14.3 Jaringan

Nilai Aset Tetap Jaringan pada Kementerian Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp18.070.416.055** dan **Rp17.770.229.691** terdapat kenaikan sebesar Rp300.186.364 atau sebesar 1,69%.

Jaringan adalah Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian Aset Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	8.390.775.044	8.050.125.044	340.650.000	4,23
Ditjen Pemberdayaan Sosial	895.264.493	895.264.493	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	6.061.209.162	6.061.209.162	-	-
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	188.100.000	188.100.000	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	2.535.067.356	2.575.530.992	(40.463.636)	(1,57)
Total	18.070.416.055	17.770.229.691	300.186.364	1,69

Kenaikan aset Jaringan sebesar Rp340.650.000 atau 4,23% pada Sekretariat Jenderal dikarenakan adanya pengembangan jaringan distribusi tegangan 1 s/d 20 KVA dan pengembangan jaringan telepon diatas tanah kapasitas sedang.

Realisasi Belanja Modal Jaringan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp340.650.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan	340.650.000
Pengembangan Nilai Aset	340.650.000
Total	340.650.000



Rincian atas Mutasi Aset Tetap Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	17.770.229.691
Mutasi Tambah :	340.650.000
(202) Pengembangan Nilai Aset	340.650.000
Mutasi Kurang :	(40.463.636)
(401) Penghentian Aset dari Penggunaannya	(40.463.636)
Saldo per 31 Desember 2020	18.070.416.055

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Jaringan dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

Aset Tetap Lainnya
Rp22.818.085.114

C.15 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp22.818.085.114** dan sebesar **Rp21.990.010.062** dimana mengalami kenaikan sebesar Rp828.075.052 atau sebesar 3,77%.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Berikut rincian Aset Tetap Lainnya Kementerian Sosial di setiap UKE I per 31 Desember 2020:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	1.766.429.930	1.766.429.930	-	-
Inspektorat Jenderal	-	60.995.750	(60.995.750)	(100,00)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	1.867.182.755	1.867.182.755	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	6.741.465.089	6.783.414.139	(41.949.050)	(0,62)
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	249.805.500	249.805.500	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	12.193.201.840	11.262.181.988	931.019.852	8,27
TOTAL	22.818.085.114	21.990.010.062	828.075.052	3,77

Aset Tetap Lainnya di Kementerian sosial RI terdiri dari Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya. Perincian Aset Tetap Lainnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Renovasi	7.700.598.492	7.153.651.140	546.947.352	7,65
2	Aset Tetap Lainnya	15.117.486.622	14.836.358.922	281.127.700	1,89
	Jumlah	22.818.085.114	21.990.010.062	828.075.052	3,77

C.15.1 Aset Tetap Renovasi

Nilai Aset Tetap Renovasi (ATR) pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing masing adalah sebesar Rp7.700.598.492 dan Rp7.153.651.140 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp546.947.352 atau 7,65%.



Aset Tetap dalam Renovasi adalah Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Perincian Aset Tetap Renovasi di setiap Unit Kerja Eselon I ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	UKE I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	-	382.808.440	(382.808.440)	-
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	382.808.440	-	382.808.440	100,00
4	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	7.317.790.052	6.770.842.700	546.947.352	7,47
	Jumlah	7.700.598.492	7.153.651.140	546.947.352	7,65

Aset Tetap Renovasi Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.700.598.492 terdapat pada Unit Kerja Eselon I:

- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial terdapat Aset Tetap Renovasi senilai Rp382.808.440 dengan rincian sebagai berikut :
 - Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakwanan, dan Restorasi Sosial (K2KRS) sebesar Rp350.000.000 berupa renovasi di Taman Makam Pahlawan Seroja, Dili Timor Leste yang merupakan hibah ATR lintas negara.
 - Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat DK sebesar Rp32.808.440 pada Aset Tetap Dalam Renovasi yang terletak di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra Bandung berupa gudang penyimpanan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
- Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp7.317.790.052. Terdapat Aset Tetap Renovasi sebesar Rp6.770.842.700 atas renovasi Gedung Kantor Pusdiklat Kesos yang dibebankan pada DIPA Sekretariat Badiklitpensos yang asetnya masih berada di Sekretariat Badiklitpensos dan belum diserahterimakan disebabkan adanya temuan BPK terkait renovasi tersebut senilai Rp163.052.648. Selain itu masih terdapat renovasi Gedung Cawang Kencana milik Biro Umum yang digunakan sebagai Gedung kantor Sekretariat Badiklit senilai Rp710.000.000.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	7.153.651.140
Mutasi Tambah :	3.235.339.506
(101) Pembelian	3.235.339.506
Mutasi Kurang :	(2.688.392.154)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(163.052.648)
(302) Transfer Keluar	(2.525.339.506)
Saldo per 31 Desember 2020	7.700.598.492

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Aset Tetap Renovasi dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

C.15.2 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp15.117.486.622** dan **Rp14.836.358.922**



dimana terdapat kenaikan sebesar Rp281.127.700 atau 1,89%.

Aset Tetap Lainnya adalah Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian Aset Tetap Lainnya di tiap Unit Kerja Eselon I disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	1.766.429.930	1.766.429.930	-	-
2	Inspektorat Jenderal	0,	60.995.750	(60.995.750)	(100,00)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	1.484.374.315	1.484.374.315	-	-
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	6.741.465.089	6.783.414.139	(41.949.050)	(0,62)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	249.805.500	249.805.500	-	-
6	Badiklit Pensos	4.875.411.788	4.491.339.288	384.072.500	8,55
Jumlah		15.117.486.622	14.836.358.922	281.127.700	1,89

Berdasarkan tabel diatas kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya disebabkan karena pembelian buku, ukiran, lukisan, dan alat peraga kesenian di lingkungan Badiklit Pensos.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	14.836.358.922
Mutasi Tambah :	Rp	536.876.400
(100) Koreksi Saldo Awal	Rp	345.000.000
(101) Pembelian	Rp	191.876.400
Mutasi Kurang :	Rp	(255.748.700)
(301) Penghapusan	Rp	(60.995.750)
(401) Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(194.752.950)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	15.117.486.622

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

Konstruksi Dalam Pengerjaan
 Rp2.194.436.815

C.16 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp2.194.436.815** dan **Rp281.836.313** dimana terdapat kenaikan Rp1.912.600.502 atau sebesar 678,62%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ditjen Rehabilitasi Sosial	2.160.424.715	206.197.213	1.954.227.502	947,75
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	34.012.100	75.639.100	(41.627.000)	(55,03)
Total	2.194.436.815	281.836.313	1.912.600.502	678,62

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 terdapat pada satker berikut:

No	Kode	Nama Satker	Nilai
1	027.04.352594	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	97.190.000
2	027.04.369110	BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAHI	69.396.800
3	027.04.369148	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	1.111.886.500
4	027.04.369173	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	236.130.000
5	027.04.426650	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMIYA" DI TABANAN	63.666.700
6	027.04.426669	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	86.475.000
7	027.04.426690	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	69.000.000
8	027.04.426701	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	41.172.502
9	027.04.426710	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	98.710.000
10	027.04.426814	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	31.000.000
11	027.04.526092	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	49.600.000
12	027.04.630842	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	206.197.213
13	027.11.369070	POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL (POLTEKESOS) BANDUNG	34.012.100
Total			2.194.436.815

Pada satker Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial terdapat KDP sebesar Rp206.197.213 berupa biaya perencanaan untuk pembangunan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) pada Pusat Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait hal ini, Sekretaris Ditjen Rehsos selaku KPA telah menerbitkan Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa pembangunan RPTC tidak akan dilanjutkan karena keterbatasan alokasi belanja modal untuk pembangunan fisik dan akan memprioritaskan pada optimalisasi UPT dalam rangka peningkatan status dari Panti menjadi Balai. Saldo KDP ini belum dapat dihapus buku karena belum ada keputusan penghapusan/penghentian KDP dari Pengguna Barang.

KDP di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial disebabkan oleh *refocusing* anggaran akibat percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020.

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung masih terdapat saldo Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp34.012.100 berupa KDP Gedung dan Bangunan yang berasal dari Perencanaan Renovasi Asrama Putra Tahun 2016 yang tidak dilanjutkan pembangunannya. KDP tersebut sudah diajukan penghapusan dan masih menunggu persetujuan dari KPKNL.

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	281.836.313
Mutasi Tambah :	71.548.801.358
(502) Perolehan/Penambahan KDP	8.166.773.099
(503) Pengembangan KDP	63.382.028.259
Mutasi Kurang :	(69.636.200.856)
(504) Koreksi Nilai KDP	(1.061.434.452)
(505) Penghapusan/ Penghentian KDP	(41.627.000)
(599) Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(68.533.139.404)
Saldo per 31 Desember 2020	2.194.436.815

Penjelasan terkait mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada lampiran CaLBMN (terlampir).



Akumulasi Penyusutan
 Aset Tetap
 (Rp2.010.707.161.223)

C.17 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing **(Rp2.010.707.161.223)** dan **(Rp1.775.435.334.121)**. Terdapat kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp235.271.827.102) atau 13,25%

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di tiap Unit Kerja Eselon I disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	(451.253.763.870)	(387.173.187.483)	(64.080.576.387)	16,55
2	Inspektorat Jenderal	(4.958.662.703)	(5.231.961.555)	273.298.852	(5,22)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	(116.707.949.929)	(78.235.277.656)	(38.472.672.273)	49,18
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	(454.029.801.672)	(397.150.270.423)	(56.879.531.249)	14,32
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(767.914.299.229)	(721.828.867.610)	(46.085.431.619)	6,38
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	(16.605.392.983)	(14.389.749.554)	(2.215.643.429)	15,40
7	Badiklit Pensos	(199.237.290.837)	(171.426.019.840)	(27.811.270.997)	16,22
	Jumlah	(2.010.707.161.223)	(1.775.435.334.121)	(235.271.827.102)	13,25

Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Aset Tetap di Neraca	Akum.Penyusutan Aset Tetap	Nilai Buku
1	Tanah	18.565.546.383.592	-	18.565.546.383.592
2	Peralatan dan Mesin	2.037.635.381.225	(1.683.001.669.125)	354.633.712.100
3	Gedung dan Bangunan	2.136.028.516.570	(283.649.854.987)	1.852.378.661.583
4	Jalan dan Jembatan	38.577.401.375	(20.624.769.791)	17.952.631.584
5	Irigasi	48.180.245.628	(11.735.735.770)	36.444.509.858
6	Jaringan	18.070.416.055	(8.129.331.637)	9.941.084.418
7	Aset Tetap Renovasi	7.700.598.492	-	7.700.598.492
8	Aset Tetap Lainnya	15.117.486.622	(3.565.799.913)	11.551.686.709
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.194.436.815	-	2.194.436.815
	Total	22.869.050.866.374	(2.010.707.161.223)	20.858.343.705.151

Piutang Tagihan
 Tuntutan
 Perbendaharaan/
 Tuntutan Ganti Rugi
 Rp446.658.693

C.18 PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp446.658.693** dan **Rp0** dimana terdapat kenaikan Rp446.658.693.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.



Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdapat pada Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badiklit Pensos	446.658.693		446.658.693	-
	Jumlah	446.658.693	-	446.658.693	-

Piutang TP/TGR per 31 Desember 2020 terdapat pada satuan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang-Bandung senilai Rp446.658.693 atas temuan BPK dan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal terkait realisasi belanja barang pada kegiatan Diklat P2K2 FDS di BBPPKS Bandung yang tidak sesuai ketentuan, meliputi:

- Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.681.807.268
- Pengeluaran tidak wajar berupa konsumsi PBL tumpang tindih sebesar Rp405.290.000

Atas temuan sebesar Rp3.087.097.268 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp853.803.804, sehingga sisa yang belum disetorkan sebesar Rp2.233.293.464. Kerugian negara tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 24 bulan sampai bulan Maret 2022. Sehingga Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp446.658.693.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Rp2.233.293)

C.19 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **(Rp2.233.293)** dan **Rp0**.

Penyisihan piutang tidak tertagih – TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang yang ditetapkan paling sedikit sebesar 5% (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdapat pada Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badiklit Pensos	(2.233.293)	-	(2.233.293)	-
	Jumlah	(2.233.293)	-	(2.233.293)	-

Saldo Penyisihan Piutang tak tertagih-TP/TGR per 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.233.293) merupakan 5% (lima permil) dari total piutang jangka panjang satuan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang-Bandung senilai Rp446.658.693.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Rp444.425.400

C.20 TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Kementerian Sosial Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp444.425.400** dan **Rp0**

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) merupakan hasil pengurangan antara saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) terdapat pada Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badiklit Pensos	444.425.400		444.425.400	-
	Jumlah	444.425.400	-	444.425.400	-

Aset Tak Berwujud
Rp109.418.769.236

C.21 ASET TAK BERWUJUD

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp109.418.769.236** dan **Rp98.538.827.706** dimana terdapat kenaikan Rp10.879.941.530 atau sebesar 11,04%.

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Perincian Aset Tak Berwujud di tiap UKE I adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	33.571.557.508	32.012.845.828	1.558.711.680	4,87
Inspektorat Jenderal	230.000.000	386.475.000	(156.475.000)	(40,49)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	18.151.918.000	17.959.418.000	192.500.000	1,07
Ditjen Rehabilitasi Sosial	5.679.346.400	1.570.600.550	4.108.745.850	261,60
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	47.534.866.328	43.377.016.328	4.157.850.000	9,59
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	886.995.000	738.220.000	148.775.000	20,15
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	3.364.086.000	2.494.252.000	869.834.000	34,87
Total	109.418.769.236	98.538.827.706	10.879.941.530	11,04

Aset Tak Berwujud di lingkungan Kementerian Sosial RI terdiri dari :

Aset Tak berwujud	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	105.124.509.186	98.151.352.706	6.973.156.480	7,10
Lisensi	397.250.000	190.850.000	206.400.000	108,15
Aset Tak berwujud Lainnya	3.897.010.050	196.625.000	3.700.385.050	1.881,95
Total	109.418.769.236	98.538.827.706	10.879.941.530	11,04

Penjelasan dan perincian atas Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

C.21.1 Software

Nilai Aset Tak Berwujud Software pada Kementerian Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp105.124.509.186** dan **Rp98.151.352.706** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp6.973.156.480 atau sebesar 7,10%.

Rincian Aset Tak Berwujud Software di tiap UKE I dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	33.413.667.508	32.012.845.828	1.400.821.680	4,38
Inspektorat Jenderal	230.000.000	386.475.000	(156.475.000)	(40,49)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	17.571.943.000	17.571.943.000	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	2.221.236.350	1.570.600.550	650.635.800	41,43
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	47.486.356.328	43.377.016.328	4.109.340.000	9,47
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	837.220.000	738.220.000	99.000.000	13,41
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	3.364.086.000	2.494.252.000	869.834.000	34,87
Total	105.124.509.186	98.151.352.706	6.973.156.480	7,10

Adapun Mutasi Aset Tak Berwujud Software adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	98.151.352.706
Mutasi Tambah :	7.371.149.980
(101) Pembelian	1.882.264.980
(103) Hibah Masuk	615.118.000
(202) Pengembangan Nilai Aset	967.667.000
(208) Pengembangan Melalui KDP	3.906.100.000
Mutasi Kurang :	(397.993.500)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(5.000.000)
(301) Penghapusan	(156.475.000)
(401) Penghentian Aset dari Penggunaannya	(236.518.500)
Saldo per 31 Desember 2020	105.124.509.186

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Software dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

C.21.2 Lisensi

Nilai Aset Tak Berwujud Lisensi pada Kementerian Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp397.250.000** dan **Rp190.850.000** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp206.400.000 atau 108,15%.

Rincian Aset Tak Berwujud Lisensi di tiap UKE I dapat dilihat pada tabel berikut;

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	157.890.000	-	157.890.000	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	190.850.000	190.850.000	-	-
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	48.510.000	-	48.510.000	-
Total	397.250.000	190.850.000	206.400.000	108,15

Kenaikan nilai Lisensi per 31 Desember 2020 disebabkan adanya pembelian Lisensi Pengintegrasian Sertifikat Elektronik dengan SIKS NG Modul TTE.

Mutasi atas aset tidak berwujud Lisensi adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	190.850.000
Mutasi Tambah :	
(101) Pembelian	206.400.000
Saldo per 31 Desember 2020	397.250.000

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Lisensi dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

C.21.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp3.897.010.050** dan **Rp196.625.000** mengalami kenaikan sebesar Rp3.700.385.050 atau 1.881,95%

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya di tiap UKE I dapat dilihat pada tabel berikut;

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ditjen Pemberdayaan Sosial	389.125.000	196.625.000	192.500.000	97,90
Ditjen Rehabilitasi Sosial	3.458.110.050	-	3.458.110.050	-
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	49.775.000	-	49.775.000	-
Total	3.897.010.050	196.625.000	3.700.385.050	1.881,95

Kenaikan nilai Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp3.700.385.050 atau 1.881,95% disebabkan oleh pengembangan Aplikasi e-Warong, pengembangan Aplikasi Persuratan Elektronik, dan pembelian aset tak berwujud lainnya untuk kebutuhan operasional pemerintahan di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Mutasi Aset Tak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp. 196.625.000
Mutasi Tambah :	Rp. 3.700.385.050
(101) Pembelian	Rp. 3.432.285.050
(113) Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp. 75.600.000
(202) Pengembangan Nilai Aset	Rp. 192.500.000
Mutasi Kurang :	Rp. -
Saldo per 31 Desember 2020	Rp. 3.897.010.050

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Aset Tak Berwujud Lainnya dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).



*Dana yang Dibatasi
 Penggunaannya
 Rp66.888.973.054*

C.22 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing **Rp66.888.973.054** dan **Rp549.179.306.589** mengalami penurunan sebesar (Rp482.290.333.535) atau (87,82%).

Adapun rincian Dana Lainnya terdapat pada Unit Kerja Eselon I berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Ditjen Pemberdayaan Sosial	7.000.000	125.000.000	(118.000.000,00)	(94,40)
2	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.746.900.000	-	1.746.900.000,00	-
3	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	65.135.073.054	549.054.306.589	(483.919.233.535,00)	(88,14)
	Jumlah	66.888.973.054	549.179.306.589	(482.290.333.535)	(87,82)

Dana lainnya Kementerian Sosial per 31 Desember 2020 sebesar Rp66.888.973.054 terdapat pada Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial pada satuan kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan senilai Rp7.000.000 merupakan dana bantuan sosial Program Kewirausahaan Sosial Tahun Anggaran 2020 yang gagal tersalurkan sampai dengan akhir pelaporan 31 Desember 2020.
2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam terdapat Dana Lainnya senilai Rp1.746.900.000 yang akan disalurkan kembali pada tahun 2021 dengan rincian berikut:

No	Rekening	Bank	Nilai	Keterangan
1	RPL 182 DB pada Bank Mandiri Untuk Bansos MDRI	Mandiri	1.278.300.000	Penyaluran Bantuan Sosial Pemulihan Sosial (BSPS) diantaranya: Santunan Ahli Waris, Jaminan Hidup (Jadup), BBR dan Isi Hunian Tetap
2	RPL 182 Direktorat PSKBA untuk Bansos	BNI	468.600.000	Jadup Korban Gempa Bumi di Lombok Provinsi NTB, dan Isi Hunian Tetap korban Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
	Jumlah		1.746.900.000	

3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat Dana Lainnya sebesar Rp65.135.073.054 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	18.456.589.839	218.933.563.267	(200.476.973.428)	(91,57)
2	Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	26.622.215.700	160.572.852.879	(133.950.637.179)	(83,42)
3	Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	20.056.267.515	169.547.890.443	(149.491.622.928)	(88,17)
	Jumlah	65.135.073.054	549.054.306.589	(483.919.233.535)	(88,14)

Dana Lainnya pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin berasal dari dana bantuan sosial Program Sembako Tahun Anggaran 2020 yang dimanfaatkan pada tahun 2021 oleh Keluarga Penerima Manfaat.

PPK Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, II, dan III secara serentak mengeluarkan surat perintah blokir rekening per 25 Januari 2021 kepada Himbara dan

menghitung dana yang dimanfaatkan/ditransaksikan oleh penerima bansos sejak 1 s.d 25/26 Januari 2021 untuk dicatat dan dilaporkan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020. Selebihnya menghitung sisanya untuk disetor ke Kas Negara pada tahun 2021.

Rincian Dana Lainnya pada masing-masing satker dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Satuan Kerja	BNI	BRI	Mandiri	BTN	Jumlah	Keterangan
1	Direktorat PFM Wilayah I	4.947.923.038	7.130.294.341	4.829.602.460	1.548.770.000	18.456.589.839	Sudah tersalur 1-26 Januari 2021
2	Direktorat PFM Wilayah II	6.144.589.354	9.311.754.476	8.799.023.435	2.366.848.435	26.622.215.700	Sudah tersalur 1-26 Januari 2021
3	Direktorat PFM Wilayah III	12.306.885.358	4.810.051.235	2.643.460.942	295.869.980	20.056.267.515	Sudah tersalur 1-25/26 Januari 2021
	Jumlah	23.399.397.750	21.252.100.052	16.272.086.837	4.211.488.415	65.135.073.054	

Aset Lain-Lain
Rp32.144.606.305

C.23 ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp32.144.606.305** dan **Rp26.297.974.644** terdapat kenaikan senilai Rp5.846.631.661 atau sebesar 22,23%.

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasi Kementerian Sosial RI serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	4.079.514.303	4.893.314.303	(813.800.000)	(16,63)
Inspektorat Jenderal	321.052.239	843.928.903	(522.876.664)	(61,96)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	451.679.802	451.679.802	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	18.658.931.364	13.134.727.497	5.524.203.867	42,06
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	769.219.000	344.153.488	425.065.512	123,51
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	171.192.231	171.192.231	-	-
Badiklit dan Pensos	7.693.017.366	6.458.978.420	1.234.038.946	19,11
Total	32.144.606.305	26.297.974.644	5.846.631.661	22,23

Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	31.908.779.753	26.060.951.592	5.847.828.161	22,44
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	235.826.552	237.023.052	(1.196.500)	(0,50)
	Jumlah	32.144.606.305	26.297.974.644	5.846.631.661	22,23



C.23.1 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp31.908.779.753** dan **Rp26.060.951.592** mengalami kenaikan sebesar Rp5.847.828.161 atau 22,44%

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah di setiap UKE I adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	4.043.214.303	4.857.014.303	(813.800.000)	(16,76)
Inspektorat Jenderal	282.298.239	805.174.903	(522.876.664)	(64,94)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	451.679.802	451.679.802	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	18.513.158.812	12.987.758.445	5.525.400.367	42,54
Ditjen Linjamsos	769.219.000	344.153.488	425.065.512	123,51
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	171.192.231	171.192.231	-	-
Badiklit dan Pensos	7.678.017.366	6.443.978.420	1.234.038.946	19,15
Total	31.908.779.753	26.060.951.592	5.847.828.161	22,44

Mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 26.060.951.592
Mutasi Tambah :	Rp 20.181.992.029
(188) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 20.181.992.029
Mutasi Kurang :	Rp (14.334.163.868)
(299) Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	Rp (3.982.000)
(373) Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	Rp (813.800.000)
(391) Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp (7.696.740.179)
(395) Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	Rp (61.021.000)
(396) Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Rp (3.568.224.000)
(402) Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	Rp (2.190.396.689)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 31.908.779.753

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

C.23.2 ATB YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN

ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp235.826.552** dan **Rp237.023.052** dimana mengalami penurunan senilai (Rp1.196.500) atau sebesar 0,50%.



Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan di setiap UKE I adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	36.300.000	36.300.000	-	-
Inspektorat Jenderal	38.754.000	38.754.000	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	145.772.552	146.969.052	(1.196.500)	(0,81)
Badiklit dan Pensos	15.000.000	15.000.000	-	-
Total	235.826.552	237.023.052	(1.196.500)	(0,50)

Adapun mutasi untuk ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 237.023.052
Mutasi Tambah :	Rp 236.518.500
(188) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 236.518.500
Mutasi Kurang :	Rp (237.715.000)
(391) Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp (237.715.000)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 235.826.552

Penjelasan lebih detail terkait mutasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dapat dilihat pada CaLBMN yang merupakan bagian tidak terpisah pada laporan keuangan ini (terlampir).

Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Rp121.585.480.899)

C.24 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **(Rp121.585.480.899)** dan **(Rp108.775.697.744)** mengalami kenaikan sebesar (Rp12.809.783.155) atau 11,78%

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya di setiap Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(34.379.831.103)	(33.733.770.475)	(646.060.628)	1,92
Inspektorat Jenderal	(399.798.239)	(1.021.649.903)	621.851.664	(60,87)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	(17.974.919.427)	(15.851.696.177)	(2.123.223.250)	13,39
Ditjen Rehabilitasi Sosial	(17.937.483.559)	(13.274.473.965)	(4.663.009.594)	35,13
Ditjen Linjamsos	(41.243.240.203)	(37.297.431.274)	(3.945.808.929)	10,58
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	(613.189.731)	(424.959.731)	(188.230.000)	44,29
Badiklit dan Pensos	(9.037.018.637)	(7.171.716.219)	(1.865.302.418)	26,01
Total	(121.585.480.899)	(108.775.697.744)	(12.809.783.155)	11,78



Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Lainnya	Nilai Aset Lainnya di Neraca	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	Nilai Buku Aset Lainnya
Dana Lainnya	66.888.973.054	-	66.888.973.054
Aset Tak Berwujud	109.418.769.236	(92.943.058.147)	16.475.711.089
Software	105.124.509.186	(92.904.110.647)	12.220.398.539
Lisensi	397.250.000	(38.947.500)	358.302.500
Aset Tak Berwujud Lainnya	3.897.010.050	-	3.897.010.050
Aset Lain-lain	32.144.606.305	(28.642.422.752)	3.502.183.553
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	31.908.779.753	(28.484.150.200)	3.424.629.553
ATB yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	235.826.552	(158.272.552)	77.554.000
Grand Total	208.452.348.595	(121.585.480.899)	86.866.867.696

Utang Kepada Pihak
 Ketiga
 Rp10.105.471.898

C.25 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp10.105.471.898** dan **Rp4.702.361.654** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp5.403.110.244 atau sebesar 114,90%.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang pada Pihak Ketiga di tiap Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut :

AKUN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	14.466.556	126.605.133	(112.138.577)	(88,57)
Inspektorat Jenderal	-	1.261.400	(1.261.400)	(100,00)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	451.813.236	11.995.044	439.818.192	3.666,67
Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.982.625.530	427.762.100	1.554.863.430	363,49
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	40.439.141	164.548.535	(124.109.394)	(75,42)
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	852.292.500	2.808.930.000	(1.956.637.500)	(69,66)
Badiklit dan Pensos	6.763.834.935	1.161.259.442	5.602.575.493	482,46
Total	10.105.471.898	4.702.361.654	5.403.110.244	114,90

Rincian Utang pada Pihak Ketiga Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

AKUN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	177.053.511	304.536.894	(127.483.383)	(41,86)
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	7.490.251.307	4.061.272.532	3.428.978.775	84,43
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	740.549.479	327.054.228	413.495.251	126,43
Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	832.025.601	-	832.025.601	100,00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	865.592.000	9.498.000	856.094.000	9.013,41
Total	10.105.471.898	4.702.361.654	5.403.110.244	114,90



Dari tabel di atas dapat dijelaskan Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2019 yang telah dilakukan pelunasan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal telah melakukan pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp126.605.133 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar seluruhnya telah dibayarkan pada tahun 2020 sebesar Rp124.037.133 dengan rincian :

No	Uraian Akun	Nominal
1	Belanja Gaji Pokok PNS TA 2019	14.930.700
2	Belanja Tunjangan Kinerja TA 2019	98.502.222
3	Belanja Tunjangan Anak PNS TA 2019	244.478
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS TA 2019	360.000
5	Belanja Tunjangan PPh PNS TA 2019	337.164
6	Belanja Tunjangan Struktural PNS TA 2019	4.870.000
7	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TA 2019	973.550
8	Belanja Tunjangan Umum PNS TA 2019	1.130.000
9	Belanja Uang Makan PNS TA 2019	629.000
10	Belanja Pembulatan Gaji PNS TA 2019	2.691
11	Koreksi Lainnya (Belanja Gaji Pokok PNS TA 2018, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TA 2018, dan Belanja Tunjangan Anak PNS TA 2018)	2.057.328
Total		124.037.133

- b. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp2.568.000 dikarenakan adanya saldo di Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran akibat retur transfer pada unit kerja Biro Perencanaan atas pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama Oktavia Dewi dan honor narasumber atas nama Ni Masjitoh pada kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial tanggal 13 Desember 2019 di Oasis Amir Hotel Jakarta dan telah dilakukan transfer pada tahun anggaran 2020
2. Inspektorat Jenderal terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar akibat kekurangan pembayaran gaji pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1.261.400 yang terdiri dari :
 - a. Golongan IV, yaitu Dadang Iskandar sebesar Rp655.200 dan Undang Saepuddin sebesar Rp199.800
 - b. Golongan III, yaitu Ady Kurnia Munggaran sebesar Rp108.000, Widiyanto Nugroho sebesar Rp103.800, Diyan Kusumarina sebesar Rp90.900, dan Widi Yudha Santika sebesar Rp103.700
3. Pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp11.995.044 dikarenakan:
 - a. Tunjangan khusus/ kegiatan pada satuan kerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil atas nama Asriady pegawai sebesar Rp2.398.032 dan atas nama Deasy Rengkehati pegawai pada satker Direktorat K2KRS sebesar Rp678.000 per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya penolakan SPM pada bulan Desember 2019 karena PAGU tidak mencukupi. Atas Utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada tanggal 13 Februari 2020 dan 12 Maret 2020.



- b. Rapel kenaikan gaji berkala bulan November dan Desember 2019, kenaikan pangkat dan kenaikan tunjangan bulan Oktober dan November 2019 sejumlah Rp8.919.012 karena PAGU tidak mencukupi dengan rincian sebagai berikut :

No Akun	Uraian Akun	Kenaikan Gaji Berkala	Kenaikan Tunjangan	Kenaikan Pngkat	Jumlah
511111	Gaji Pokok	3.831.800	232.000	2.321.000	6.384.800
511119	Pembulatan	2.008	42	464	2.514
511121	Tunjangan Istri/Suami	340.100	23.200	168.940	532.240
511122	Tunjangan Anak	86.698	4.640	58.296	149.634
511123	Tunjangan Jabatan Struktural	-	1.440.000	-	1.440.000
511124	Tunjangan Jabatan Fungsional	-	300.000	-	300.000
511125	Tunjangan Pajak Penghasilan	21.160	68.406	20.258	109.824
Total					8.919.012

Rapel kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan kenaikan tunjangan sebesar Rp.8.919.012 telah dibayarkan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Keterangan	Tgl SPM	No SPM	Jumlah
1	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala Bulan November & Desember 2019 (18 orang)	26/02/2020	00039/DYS-Sekt/2020	3.266.999
2	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala Bulan Desember 2019 (2 orang)	26/02/2020	00038/DYS-Sekt/2020	212.730
3	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala Bulan Oktober s.d Desember 2019 (2 orang)	09/03/2020	00058/DYS-Sekt/2020	802.037
4	Pembayaran Rapel Kenaikan Pangkat Bulan Oktober & November 2019 (8 orang)	27/02/2020	00040/DYS-Sekt/2020	2.568.958
5	Pembayaran Rapel Kenaikan Tunjangan Bulan Oktober & November 2019 (3 orang)	27/02/2020	00041/DYS-Sekt/2020	2.068.288
Total				8.919.012

4. Pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat pembayaran utang pihak ketiga sebesar Rp427.762.100 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	3.059.000	Pembayaran Tagihan PDAM Bulan Desember 2019, yang dibayar pada bulan Januari 2020
2	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	48.000	Pembayaran Tagihan PDAM Bulan Desember 2019, yang dibayar pada bulan Januari 2020
3	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	4.702.000	Pembayaran Tagihan PDAM Bulan Desember 2019, yang dibayar pada bulan Januari 2020
4	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	33.231.000	Pembayaran denda ke PT.PELNI bulan Oktober 2019 Kegiatan Pemulangan TKI
5	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	382.850.000	Pada periode 31 Desember 2019 Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp382.850.000 berasal dari honor SDM Peksos/Konselor Adiksi bulan November – Desember 2019 yang belum terbayarkan karena belum terselesaikannya Laporan Bulanan SDM Peksos/Konselor Adiksi, sehingga mengakibatkan keterlambatan pengajuan SPM
6	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	3.872.100	Pembayaran Tagihan PDAM Bulan Desember 2019, yang dibayar pada bulan Januari 2020
Total		427.762.100	



5. Pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp164.548.535 dengan perincian:
 - a. Tagihan Listrik Bulan Desember 2019 senilai Rp1.539.088 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Tagihan Telepon Bulan Desember 2019 senilai Rp 360.360 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - c. Tagihan TV Kabel Bulan Desember 2019 senilai Rp2.488.307 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - d. Paket Fullboard Meeting Luar Kota yang belum dibayarkan senilai Rp134.000.000 pada Direktorat PSKBA
 - e. Belanja barang bantuan paket sembako kepada PT Manggora Jaya Sakti pada Direktorat PSKBS senilai Rp17.812.500
 - f. Kekurangan pembayaran gaji tunjangan jabatan fungsional bulan November dan Desember 2019 sebanyak 5 orang senilai Rp5.940.000
 - g. Kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja dikarenakan adanya kenaikan grade jabatan dr calon perencana ke perencana an. Dina Elina Saragih selama 3 bulan dr Oktober sd. Desember 2019 dan kekurangan tunjangan kinerja an. Risky Banu Saputra dikarenakan Tugas Belajar seharusnya 80% pada bulan September 2019 senilai Rp2.408.580
6. Pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga pada tahun 2020 sebesar Rp2.808.930.000 dengan perincian :
 - a. Pembayaran belanja honor tenaga ahli yang tidak berhasil masuk rekening disebabkan tidak ditemukannya nomor rekening sebesar Rp6.930.000
 - b. Insentif Pendamping yang belum dibayarkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.724.600.000
 - c. Pembayaran Fullboard Seleksi Pendamping yang belum dibayarkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp77.400.000
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan terdapat pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.161.259.442 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp327.054.228 berupa kekurangan pembayaran Belanja modal Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan pembayaran Termin III Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Pusdiklat Kesos dan akan dilakukan pembayaran pada tahun 2020.
 - b. BBPPKS Makassar senilai Rp6.508.129 berupa kekurangan pembayaran uang Tunjangan Kinerja bulan Desember sebesar Rp5.405.000 dan kekurangan pembayaran gaji pokok untuk 3 orang pegawai sebesar Rp1.103.129
 - c. BBPPKS Padang senilai Rp25.290.800 berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 yang sudah dibayarkan pada tahun 2020
 - d. BBPPKS Yogyakarta senilai Rp98.875.400 berupa kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember 2019 senilai Rp89.640.400 dan kekurangan pembayaran Uang Makan bulan Desember 2019 senilai Rp9.235.000
 - e. Pusdiklat Kesejahteraan Sosial senilai Rp677.081.298 berupa:
 - Kekurangan Pembayaran Perlengkapan peserta dalam wordshop Wawasan Kebangsaan bagi ASN sebesar Rp79.520.000



- Kekurangan Tukin Bulan Desember 2019 sebesar Rp15.649.298
 - Kekurangan Pembayaran Paket Full Board Hotel Aston banua Graha Sejahtera sebesar Rp148.500.000
 - Kekurangan Pembayaran Pengadaan Snack Diklat Bela Negara sebesar Rp152.720.000
 - Kekurangan Pembayaran Pengadaan Paket Full Board Diklat Arsiparis Angkatan II kerjasama dengan Biro Umum sebesar Rp183.600.000
 - Kekurangan Pembayaran Pengadaan konsumsi diklat PIM 4 PNB se besar Rp97.092.000
- f. Pusbangprof Peksos dan Pensos senilai Rp1.352.448 berupa kekurangan pembayarangaji pegawai kenaikan pangkat untuk 3 (tiga) orang yang dibayarkan di tahun anggaran 2020
- g. BBPPKS Lembang Bandung senilai Rp13.161.439 berupa :
- Kekurangan Pembayaran Langgan daya dan jasa (listrik dan telepon) bulan Desember 2019 sebesar Rp12.658.677
 - Kekurangan Pembayaran gaji 2 orang pegawai yang telah menyelesaikan purna tugasnya sebesar Rp502.762 yang diibayarkan di bulan Januari 2020.
- h. B2P3KS Yogyakarta senilai Rp11.935.700 berupa Kekurangan Tukin bulan Agustus sd September 2019 sebesar Rp10.715.900 dan PDAM bulan Desember sebesar Rp1.219.800

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal terdapat Utang Pihak Ketiga sebesar Rp14.466.556 merupakan kekurangan Belanja Pegawai pada satuan kerja Sekretariat Jenderal dengan rincian:

NO	Uraian Akun	Nilai
Belanja Pegawai TA 2019		
1	Beban Gaji Pokok PNS	392.100
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	66
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	39.210
4	Beban Tunj. Anak PNS	15.684
5	Beban Tunj. PPh PNS	246.202
Belanja Pegawai TA 2020		
1	Beban Tunj. PPh PNS	3.219.376
2	Beban Tunj. Struktural PNS	540.000
3	Beban Tunj. Anak PNS	156.048
4	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	745.730
5	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.440
6	Beban Gaji Pokok PNS	9.109.700
Total		14.466.556

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal senilai Rp14.466.556 telah dibayarkan pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D	Tanggal SP2D	Nominal	Keterangan
1	211821303000174	19 Januari 2021	2.427.846	Pembayaran belanja pegawai kekurangan kenaikan pangkat bulan Oktober 2020 sd. Desember 2020 untuk 5 pegawai / 11 jiwa Sesuai SPP Nomor 00003 Tanggal 15 Januari 2021
2	211821303000173	19 Januari 2021	205.046	Pembayaran belanja pegawai kekurangan kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2020 untuk 1 pegawai / 3 jiwa Sesuai SPP Nomor 00002 Tanggal 15 Januari 2021
3	211821303000320	25 Januari 2021	694.568	Pembayaran belanja pegawai kekurangan kenaikan pangkat bulan Oktober 2020 sd. Desember 2020 untuk 1 pegawai/2 jiwa sesuai SPP Nomor 00009 Tanggal 21 Januari 2021
4	211821303000319	25 Januari 2021	2.450.931	Pembayaran belanja pegawai kekurangan KGB bulan Januari 2020 sd. Desember 2020 untuk 1 pegawai/4 jiwa sesuai SPP Nomor 00012 tanggal 21 Januari 2021
5	211821303000538	2 Februari 2021	3.593.301	Pembayaran belanja pegawai kekurangan KGB bulan Oktober 2020 sd. Desember 2020 untuk 30 pegawai/78 jiwa sesuai SPP Nomor 00013 tanggal 21 Januari 2021
6	211821303000533	2 Februari 2021	3.861.602	Pembayaran belanja pegawai kekurangan KGB bulan Februari 2020 sd. Desember 2020 untuk 2 pegawai/6 jiwa sesuai SPP Nomor 00017 tanggal 1 Februari 2021
7	211821303000313	22 Januari 2021	540.000	Pembayaran belanja pegawai kekurangan Tunjangan Struktural bulan Desember 2020 untuk 1 pegawai/3 jiwa sesuai SPP Nomor 00010 tanggal 21 Januari 2021
8	211821303000318	25 Januari 2021	693.262	Pembayaran belanja pegawai kekurangan KGB bulan Oktober 2019 sd. Desember 2019 untuk 1 pegawai/4 jiwa sesuai SPP Nomor 00011 tanggal 21 Januari 2021
Total			14.466.556	

2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp451.813.236 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar terdapat pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial senilai Rp16.022.453 yang terdiri dari :

- Tunjangan khusus/ kegiatan senilai Rp11.936.000 kepada Nurul Hayatun Nufus (Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial), Lelyana (Direktorat PSDBS), dan CPNS Angkatan 2019 yang dibayarkan pada tahun 2021 dengan rincian:

NO	KETERANGAN	NO SPM	JUMLAH	TANGGAL SPM
1	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Maret 2020 sebanyak 18 Orang CPNS Angkatan 2019	00043/DYS-Sekt/2021	Rp 10.179.200	10 Maret 2021
2	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2020 an Nurul Hayatun Nufus	00044/DYS-Sekt/2021	Rp 585.600	10 Maret 2021
3	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan November sd. Desember 2020 an Lelyana	00045/DYS-Sekt/2021	Rp 1.171.200	10 Maret 2021
JUMLAH			Rp 11.936.000	

- Rapel kenaikan gaji berkala bulan Maret 2020 dan rapel kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2020 senilai Rp2.250.624 dengan rincian sebagai berikut :



No. Akun	Nama Akun	Kenaikan Gaji Berkala	Kenaikan Pangkat	Jumlah
511111	Gaji Pokok	Rp 644.800	Rp 1.334.000	Rp 1.978.800
511119	Pembulatan	Rp 56	Rp 660	Rp 716
511121	Tunjangan Istri/Suami	Rp 64.480	Rp 133.400	Rp 197.880
511122	Tunjangan Anak	Rp 3.510	Rp -	Rp 3.510
511123	Tunjangan Jabatan Struktural	Rp -	Rp -	Rp -
511124	Tunjangan Jabatan Fungsional	Rp -	Rp -	Rp -
511125	Tunjangan Pajak Penghasilan	Rp -	Rp 69.718	Rp 69.718
JUMLAH		Rp 712.846	Rp 1.537.778	Rp 2.250.624

Rapel kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat tersebut telah dibayarkan kepada pegawai dengan rincian berikut :

NO	KETERANGAN	NO SPM	JUMLAH	TANGGAL SPM
1	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala Bulan Maret 2020 an Muktiningsih	00011/DYS-Sekt/2021	Rp 1.537.778	20 Januari 2021
2	Pembayaran Rapel Kenaikan Pangkat Pengabdian bulan Desember 2020 an Bambang Sugeng, dkk (2 orang)	00008/DYS-Sekt/2021, 00009/DYS-Sekt/2021, 00010/DYS-Sekt/2021	Rp 712.846	20 Januari 2021
JUMLAH			Rp 2.250.624	

- Kekurangan pembayaran gaji rapel kenaikan pangkat pengabdian bulan Oktober 2020 an Heri Budiyanto senilai Rp232.079 yang telah dibayarkan pada tahun 2021 dengan rincian:

No	No SPM	Tanggal SPM	Nominal	Keterangan
1	00048/DYS-Sekt/2021	10 Maret 2021	232.079	Pembayaran gaji rapel kenaikan pangkat pengabdian bulan Oktober 2020 an Heri Budiyanto
Total			232.079	

- Kekurangan gaji rapel inpassing jabatan fungsional bulan November-Desember 2020 an Ramsya Pardosi senilai Rp1.603.750 dengan rincian:

No	No SPM	Tanggal SPM	Nominal	Keterangan
1	00040/DYS-Sekt/2021	10 Maret 2021	1.603.750	Pembayaran gaji rapel inpassing jabatan fungsional bulan November-Desember 2020 an Ramsya Pardosi
Total			1.603.750	

- Belanja Barang yang Masih harus Dibayar senilai Rp42.241.000 pada satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan senilai Rp27.731.000 dan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan rumah KAT di Dusun Maonai, Desa Pasakiat Tailele, Kec Siberut Barat Daya, Kab. Mentawai senilai Rp14.510.000 yang gagal bayar karena terlambat mengajukan SPM
- Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus di Bayar pada satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pekerjaan Pemberian Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial KAT di Dusun Maonai, Desa Pasakiat Tailele, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Mentawai sebesar Rp393.549.783 yang gagal bayar karena terlambat mengajukan SPM



3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.982.625.530 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Akun	Nama Satker	Nilai	Keterangan	No SPM/SP2D	Tgl Pembayaran
1	212111	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental "Margo Laras" Di Pati	5.518.628	Pembayaran Gaji Terusan ke-4 Bulan Desember 2020 An. Listiyowati	00003/BRSPDM/2021	07/01/2021
2	212111	Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif "Satria" di Baturaden	5.781.637	Kekurangan Pembayaran Tukin Pegawai Bulan Desember	00005/TUKIN_Susunan/031558/1/2021	21/01/2021
3	212111	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Mahatmiya" Di Tabanan Bali	12.579.000	Kekurangan Belanja Uang Makan Pegawai 33 orang Bulan Desember 2020	211361303000205	
4	212111	Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan Dan Pengemis "Pangudi Luhur" Di Bekasi	15.425.000	Pembayaran uang makan PNS Bulan Desember 2020	00002/426669/UM/01/2021	07/01/2021
5	212111	Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Rumbai" di Pekanbaru	3.759.193	Kekurangan atas kenaikan pangkat An. Ahmad Subarkah dan Kenaikan Gaji Berkala An. Tri Cahyani Ahmad	00007/BRSSAMPK RUMBAI/02/2021 00008/BRSSAMPK RUMBAI/02/2021 00009/BRSSAMPK RUMBAI/02/2021 00010/BRSSAMPK RUMBAI/02/2021 00011/BRSSAMPK RUMBAI/02/2021 00015/BRSSAMPK RUMBAI/02/2021	10/02/2021
6	212111	Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila "Mulya Jaya" Di Jakarta	2.037.801	Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai	211821302000314	
7	212111	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara "Melati" di Jakarta	12.304.000	Kekurangan Belanja Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2020	00003/SPM-UANG MAKAN/BRSPDSRW/2021	18/01/2021
8	212111	Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara "Meohai" di Kendari	9.037.000	Kekurangan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2020	0004LRSPDSRW "Meohai" Kendari	15/01/2021
9	212112	Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif "Satria" di Baturaden	243.000	Biaya langganan air ke PDAM	00016/GUP/031558/2/2021	10/02/2021
10	212112	Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus "Wasana Bahagia" di Temate	2.903.000	Biaya langganan air ke PDAM	210621301002782	18/02/2021
11	212112	Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "Pangurangi" Di Takalar	4.751.124	Pembayaran Listrik Bulan Desember 2020	211361303000205	27/01/2021
12	212112	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Wyata Guna" Di Bandung	48.000	Biaya langganan air ke PDAM	00017/WG/GU-05/02/2021	17/02/2021
13	212112	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Prof. Dr. Soeharso" Di Surakarta	13.740.350	Biaya langganan air ke PDAM	00008/KEU.00.02/1/2021	29/01/2021
14	212112	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	700.235.000	Tagihan transportasi pemulangan WNIM KPO	-	-
15	212112	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental "Dharma Guna" Di Bengkulu	57.500	Biaya langganan air ke PDAM	210161301001582	17/02/2021
16	212112	Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila "Mulya Jaya" Di Jakarta	15.180.000	Belanja barang yang masih harus dibayar berupa bed cover dan selimut atas pengadaan perlengkapan sarana prasarana di gedung Graha Atensi dalam rangka penanganan pasien Covid-19	-	-
17	212113	Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila "Mulya Jaya" Di Jakarta	379.443.075	belanja modal yang masih harus dibayar berupa peralatan dan mesin atas pengadaan perlengkapan sarana prasarana di gedung Graha Atensi dalam rangka penanganan pasien Covid-19	-	-
18	212113	Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila "Mulya Jaya" Di Jakarta	361.106.404	belanja modal yang masih harus dibayar berupa rehabilitasi gedung Graha Atensi dalam rangka penanganan pasien Covid-19	-	-
19	212115	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	438.475.818	Utang kepada pihak ketiga atas tagihan permakanan tahun anggaran 2020	-	-
Total			1.982.625.530		-	

4. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp40.439.141 dengan rincian sebagai berikut:
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam senilai Rp13.500.000 merupakan penyaluran Tali Asih Tagana TA 2020 yang baru selesai disalurkan pada bulan Januari 2020
 - Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial senilai Rp26.939.141 berupa Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar senilai Rp22.324.788 dan Belanja Barang yang Masih Harus dibayar senilai Rp4.614.353 dengan rincian sebagai berikut:

No	No SPM/SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai
1	00003	11/01/2021	Belanja pegawai kekurangan gaji bulan Oktober-Desember 2020 sebanyak 4 pegawai an Suradi, Sunarti, Diding Irianto, dan Rosehan Ansyari	12.193.700
2	00005	12/01/2021	Belanja pegawai kekurangan tunjangan kinerja bulan Desember 2020 an Indra Bismantara	410.550
3	00006	12/01/2021	Belanja pegawai kekurangan tunjangan kinerja pegawai bulan November 2020 an Indra Bismantara	472.038
4	00007	12/02/2021	Belanja pegawai kekurangan tunjangan kinerja bulan Oktober 2020 an Nicki Hermanto	1.132.950
10	00041	24/03/2021	Belanja pegawai susulan tunjangan kinerja bulan November 2020 an Matheus Joko Santoso	8.115.550
11	00013	01/02/2021	Tagihan listrik, telepon, dan TV kabel bulan Desember 2020	4.614.353
Jumlah				26.939.141

5. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp852.292.500 dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar senilai Rp200.500 merupakan kekurangan pembayaran gaji akibat kenaikan pangkat 1 orang pegawai yang pensiun. Utang tersebut telah dibayarkan dengan No SP2D 211821303000133 pada tanggal 18 Januari 2021.
 - Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp852.092.000 terdapat pada satker Dinas Sosial Provinsi Papua Barat merupakan honor Pendamping Sosial yang belum dibayarkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pengajuan SPM yang melewati batas pengajuan ke KPPN, sehingga dimintakan dispensasi pengajuan SPM yang prosesnya hingga mendekati akhir bulan dengan kondisi suasana libur. Dana tersebut sampai 31 Desember 2020 masih berada di rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Papua Barat. Atas utang kepada pihak ketiga tersebut telah dilakukan pengembalian ke kas negara senilai Rp302.910.000 pada tanggal 30 Maret 2021 dengan No NTPN 95CF161QU7QVD336.
6. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp6.763.834.935 dengan rincian sebagai berikut
- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar senilai Rp57.596.955 terdapat pada satuan kerja BBPPKS Bandung senilai Rp8.550.771, BBPPKS Yogyakarta senilai Rp36.061.000, dan B2P3KS Yogyakarta senilai Rp12.985.184. Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebagai berikut:



NO	Uraian Akun	Nilai
BBPPKS Bandung		
1	Beban Tunj. Anak PNS	10.320
2	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	51.600
3	Beban Pembulatan Gaji PNS	69
4	Beban Gaji Pokok PNS	516.000
5	Beban Uang Makan PNS	407.000
6	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.565.782
Jumlah		8.550.771
BBPPKS Yogyakarta		
1	Beban Uang Makan PNS	36.061.000
B2P3KS Yogyakarta		
1	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.523.245
2	Beban Uang Makan PNS	666.000
3	Beban Tunj. Fungsional PNS	4.795.939
Jumlah		12.985.184
Total		57.596.955

- b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp6.705.868.180 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Uraian Akun	Nilai
BBPPKS Lembang - Bandung	Beban Langganan Telepon	227.097
	Beban Langganan Listrik	12.211.263
Pusdiklat Kesos	Beban Sewa	6.495.429.820
B2P3KS Yogyakarta	Beban Langganan Air	369.800
Sekretariat Badiklit Pensos	Beban Barang Non Operasional Lainnya	198.000.000
Jumlah Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		6.706.237.980

Pada satker Pusdiklat Kesos terdapat Utang Pihak Ketiga senilai Rp6.495.429.820 yang merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang harus diselesaikan berupasewa jaringan dalam rangka pelaksanaan kegiatan *e-learning* Diklat *Family Development Session* (FDS) di 6 (enam) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.

Atas jasa yang diterima oleh Kementerian Sosial, PT. Telkom mengajukan tagihan namun belum dapat dibayarkan dikarenakan tidak ada perikatan/kontrak. Selanjutnya PT. Telkom bersurat kepada LKPP dan Pusdiklat Kesos mendapat surat dari LKPP untuk mediasi atas permasalahan tersebut. LKPP merekomendasikan untuk dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal dan direviu oleh BPKP.



Utang kepada pihak ketiga pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Tahun 2020 yang sudah dibayarkan sebesar Rp70.405.115 dengan rincian sebagai berikut:

No	No SPM/SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai
1	210221301000080	11-01-2021	Kekurangan Bayar Tukin Bulan November Tahun 2020 di BBPPKS Bandung	3.612.746
2	210221301000081	11-01-2021	Kekurangan Bayar Tukin Bulan Desember Tahun 2020 di BBPPKS Bandung	3.953.036
3	210221301000075	08-01-2021	Kekurangan Bayar Uang Makan Bulan November 2020 di BBPPKS Bandung	407.000
4	210221301000676	05-02-2021	Kekurangan Bayar Gaji Bulan Okt-Des Tahun 2020 di BBPPKS Bandung	577.989
5	210301303000031	07-01-2021	Kekurangan Bayar Uang Makan Bulan Desember Tahun 2020 Pegawai BBPPKS Yogyakarta	36.061.000
6	40391-04/2021/800617	07-01-2021	Kekurangan Bayar Tagihan Telkom Bulan Desember 2020 di BBPPKS Bandung	227.097
7	40391-04/2021/800615	07-01-2021	Kekurangan Bayar Tagihan PLN Bulan Desember 2020 di BBPPKS Bandung	12.211.263
8	18434-PDAMBANTUL	18-01-2021	Kekurangan Bayar Tagihan PDAM Bulan Desember 2020 di B2P3KS Yogyakarta	369.800
9	213001303001069	15-02-2021	Kekurangan Bayar Uang Makan Bulan Desember Tahun 2020 di B2P3KS Yogyakarta	666.000
10	210301303001070	15-02-2021	Kekurangan Bayar Tunjangan Kinerja Bulan Nov-Des Tahun 2020 di B2P3KS Yogyakarta	7.523.245
11	210301303001134	16-02-2021	Kekurangan Bayar Tunjangan Gaji Bulan Nov-Des Tahun 2020 di B2P3KS Yogyakarta	4.795.939
Jumlah				70.405.115

Hibah yang Belum Disahkan
 Rp171.028.400

C.26 HIBAH YANG BELUM DISAHKAN

Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp171.028.400** dan **Rp527.339.126** mengalami penurunan sebesar (Rp356.310.726) atau (67,57%)

Hibah yang Belum Disahkan terdapat pada Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Ditjen Pemberdayaan Sosial	171.028.400	527.339.126	(356.310.726)	(67,57)
Jumlah	171.028.400	527.339.126	(356.310.726)	(67,57)

Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp171.028.400 terdapat pada satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat hibah langsung yang belum disahkan atas barang Hadiah Tidak Tertebak/Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTT/HTDP) yang belum dicatatkan karena belum diregister senilai Rp527.339.126. Berdasarkan BAST penerimaan HTT/HTDP dari 13 propinsi selain Pusat (Dit. PSDBS) yang telah diterima dan teliti berdasarkan dokumen pendukung berupa SK Izin Undian Gratis Berhadiah, nilai keseluruhan yang Dit. PSDBS terima untuk diregister sebanyak Rp. 520.164.126. Nilai tersebut berbeda dengan nilai yang Dit. PSDBS terima atas rekomendasi BPK RI sebesar Rp. 527.339.126 atas jumlah HTT/HTDP yang belum diregister pada tahun anggaran 2019. Sehingga terdapat selisih nilai atas Penerimaan Barang Persediaan yang bersumber dari HTT/HTDP tersebut sejumlah Rp. 7.175.000.



- Koreksi BPK atas barang Hadiah Tidak Tertebak/Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTT/HTDP) yang belum dicatat karena belum diregister pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur senilai Rp163.853.400.

Pendapatan Diterima di Muka
 Rp441.580.113

C.27 PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp441.580.113** dan **Rp1.967.279.648** mengalami penurunan sebesar (Rp1.525.699.535) atau (77,55%).

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	441.580.113	1.967.279.648	(1.525.699.535)	(77,55)
Jumlah	441.580.113	1.967.279.648	(1.525.699.535)	(77,55)

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 terdapat pada satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.967.279.648 telah dilakukan jurnal balik dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan jasa sewa gedung kantor Koperasi Pegawai Kementerian Sosial, sewa gedung kantor Bank BNI dan Bank BRI, ATM Bank Mandiri, Kantor Yayasan Anak Mandiri, dan sewa ruangan untuk penguat sinyal PT. Teknindo Bangun Sarana sebesar Rp759.279.648

No.	Nama Rekanan	Nilai SSBP	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		Pendapatan Diterima Dimuka
						s.d 31-Dec-18	Tahun Berjalan	
1	Koperasi Pegawai Kemensos	161.403.000	36 bulan	01/01/18	31/12/20	53.801.000	53.801.000	53.801.000
2	PT. Teknindo Bangun Sarana	156.560.000	60 bulan	01/04/15	31/03/20	117.420.000	31.312.000	7.828.000
3	Bank Rakyat Indonesia, Tbk	391.500.000	60 bulan	01/01/19	31/12/23	-	78.300.000	313.200.000
4	Bank Negara Indonesia, Tbk	505.296.000	36 bulan	01/01/19	31/12/21	-	168.432.000	336.864.000
5	Bank Mandiri, Tbk	52.128.000	36 bulan	01/09/19	31/08/22	-	5.792.000	46.336.000
6	Yayasan Anak Mandiri	1.250.648	36 bulan	01/01/20	31/12/22	-	-	1.250.648
TOTAL								759.279.648

- Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan uang muka sewa gedung Tahun 2019 untuk event/penggunaan sewa di Tahun 2020 sebesar Rp1.208.000.000

Keterangan	Nominal
Gedung Aneka Bhakti (GAB) I Salemba	864.000.000
Gedung Aneka Bhakti (GAB) II Bekasi	74.000.000
Gedung Aneka Bhakti (GAB) III Cawang	270.000.000
Jumlah	1.208.000.000



Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp441.580.113 dirinci sebagai berikut:

No	Nama Rekanan	Nilai PNBP	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa s.d 31-Des-2020	Pendapatan Diterima Dimuka
1	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.128.000	36 bulan	1 September 2019	31 Agustus 2022	23.168.000	28.960.000
2	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	391.500.000	60 bulan	1 Januari 2019	31 Desember 2023	156.600.000	234.900.000
3	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	505.296.000	36 bulan	1 Januari 2019	31 Desember 2021	336.864.000	168.432.000
4	Yayasan Anak Mandiri	1.250.648	36 bulan	1 Januari 2020	31 Desember 2023	416.883	833.765
5	Lembaga Perlindungan Anak Indonesia	14.090.580	60 bulan	1 Januari 2019	31 Desember 2023	5.636.232	8.454.348
Total							441.580.113

Uang Muka dari KPPN
 Rp1.100.000

C.28 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp1.100.000** dan **Rp67.666.000** dimana terdapat penurunan sebesar (Rp66.566.000) atau sebesar (98,37%)

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN terdapat pada Unit Kerja Eselon I sebagai berikut :

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal		8.728.000	(8.728.000)	(100,00)
2	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial		58.938.000	(58.938.000)	(100,00)
3	Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	1.100.000	-	1.100.000	100,00
Jumlah		1.100.000	67.666.000	(66.566.000)	(98,37)

Utang Jangka Pendek Lainnya
 Rp21.131.781

C.29 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp21.131.781** dan **Rp10.341.818** mengalami kenaikan sebesar Rp10.789.963 atau 104,33%

Utang Jangka Pendek Lainnya di setiap Unit Kerja Eselon I disajikan pada tabel berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Ditjen Rehabilitasi Sosial	21.131.781	-	21.131.781	-
2	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	10.341.818	(10.341.818)	100,00
Jumlah		21.131.781	10.341.818	10.789.963	104,33



Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp21.131.781 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Budi Perkasa" Palembang merupakan utang Pajak Bendahara Pengeluaranyang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai tanggal pelaporan. Pajak tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 26 Januari 2021.

Ekuitas

Rp23.842.273.431.276

C.30 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp23.842.273.431.276** dan **Rp23.969.492.796.843** terdapat penurunan sebesar (Rp127.219.365.567) atau (0,53%).

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
 Bukan Pajak Lainnya
 Rp66.097.049.035*

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Sosial RI untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp66.097.049.035** dan **Rp25.193.017.948**

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Sosial RI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya di Tiap Unit Kerja Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	3.250.022.687	6.661.992.001	(3.411.969.314)	(51,22)
2	Inspektorat Jenderal	-	130.600	(130.600)	-
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	6.608.873.549	8.018.026.394	(1.409.152.845)	(17,57)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	686.820.969	1.359.628.333	(672.807.364)	(49,48)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	28.921.222	831.338.170	(802.416.948)	(96,52)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	49.648.260.200	1.059.561.891	48.588.698.309	4.585,73
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	5.874.150.408	7.262.340.559	(1.388.190.151)	(19,11)
Jumlah		66.097.049.035	25.193.017.948	40.904.031.087	162,36

Rincian Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut;

*Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	31 DES 2020	31 DES 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	44.328.000	95.668.000	(51.340.000)	(53,66)
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.732.287.495	4.916.070.220	(1.183.782.725)	(24,08)
3	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000	1.000.000	3.000.000	300,00
4	Pendapatan Perizinan Lainnya	711.619.938	1.245.189.272	(533.569.334)	(42,85)
5	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	751.650.000	571.900.000	179.750.000	31,43
6	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.634.750.000	4.897.000.000	(262.250.000)	(5,36)
7	Pendapatan Pendidikan Lainnya	240.650.000	580.950.000	(340.300.000)	(58,58)
8	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	504.883.000	(504.883.000)	(100,00)
9	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	290.669.500	572.642.500	(281.973.000)	(49,24)
10	Pendapatan Jasa Lainnya	757.000	77.266.000	(76.509.000)	(99,02)
11	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	55.501.711.747	8.031.601.444	47.470.110.303	591,04
12	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	176.344.924	3.698.615.724	(3.522.270.800)	(95,23)
13	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	200.000	100.000	100.000	100,00
14	Pendapatan Anggaran Lain-lain	8.080.431	131.788	7.948.643	6.031,39
Jumlah		66.097.049.035	25.193.017.948	40.904.031.087	162,36

Berdasarkan pada tabel diatas, secara absolut total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp40.904.031.087 atau sebesar 162,36% dengan kenaikan paling signifikan terdapat pada pos Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Pendapatan



Anggaran Lain-lain. Namun apabila dilihat dari rincian tiap pos pendapatan, terdapat kenaikan/penurunan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp51.340.000 atau sebesar 53,66% disebabkan oleh menurunnya penjualan hasil kegiatan ekonomi produktif yang berasal dari penjualan hasil keterampilan Penerima Manfaat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp1.183.782.725 atau 24,08%. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan yang diperoleh dari hasil sewa objek Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Sosial RI.
3. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000 atau 300% yang diperoleh dari hasil sewa peralatan dan mesin pada satker LRSPDSRW “Meohai” di Kendari.
4. Pendapatan Perizinan Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp533.569.334 atau 42,85% disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari perizinan di Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
5. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan mengalami kenaikan sebesar Rp179.750.000 atau 31,43% berasal dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
6. Pendapatan Biaya Pendidikan turun sebesar Rp262.250.000 atau 5,36% disebabkan turunnya penerimaan biaya pendidikan di satker Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
7. Pendapatan Pendidikan Lainnya turun sebesar Rp340.300.000 atau 58,58% yang berasal dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
8. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan mengalami penurunan 100% dikarenakan tahun 2020 tidak diperoleh pendapatan pendidikan lainnya.
9. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi turun sebesar Rp281.973.000 atau 49,24% berasal dari pendapatan dari satuan kerja di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
10. Pendapatan Jasa Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp76.509.000 atau 99,02% disebabkan oleh menurunnya penjualan hasil kegiatan ekonomi produktif yang berasal dari penjualan jasa keterampilan Penerima Manfaat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
11. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) mengalami kenaikan sebesar Rp47.470.110.303 atau 591,04% dengan realisasi terbesar terdapat pada satuan kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I sebesar Rp17.375.964.924, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Rp16.275.583.776, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Rp15.996.631.121, dan Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Rp5.825.217.417. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan seiring dengan besarnya anggaran bantuan sosial yang berada di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL).
12. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan mengalami penurunan sebesar Rp3.522.270.800 atau 95,23%.
13. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji mengalami kenaikan sebesar Rp100.000 atau 100% yang berasal dari satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar.
14. Pendapatan Anggaran Lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp7.948.643 atau 6.031,39% dengan realisasi terbesar terdapat pada satker Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Ditjen Rehabilitasi Sosial.



Selanjutnya, terdapat perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan
	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	44.328.000	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	44.328.000	-
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.206.587.960	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.732.287.495	(1.525.699.535)
3	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000	-
4	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	711.619.938	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	711.619.938	-
5	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	751.650.000	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	751.650.000	-
6	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.634.750.000	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.634.750.000	-
7	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	240.650.000	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	240.650.000	-
8	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	290.669.500	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	290.669.500	-
9	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	757.000	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	757.000	-
10	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	47.468.146.499	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	55.501.711.747	(8.033.565.248)
11	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	295.676.817	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	176.344.924	119.331.893
12	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	200.000	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	200.000	-
13	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	8.080.431	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	8.080.431	-
Jumlah			56.657.116.145	66.097.049.035			(9.439.932.890)

Penjelasan atas perbedaan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya terdapat pada akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.525.699.535 yang disebabkan oleh:
 - a. Jurnal balik atas pencatatan Pendapatan Diterima Di Muka pada akhir tahun anggaran 2019. Jurnal balik ini merupakan pengakuan atas pendapatan LO atas akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.967.279.648 dengan perincian:
 - Pendapatan jasa sewa gedung kantor Koperasi Pegawai Kementerian Sosial, sewa gedung kantor Bank BNI dan Bank BRI, ATM Bank Mandiri, Kantor Yayasan Anak Mandiri, dan sewa ruangan untuk penguat sinyal PT. Teknindo Bangun Sarana sebesar Rp759.279.648
 - Penerimaan uang muka sewa gedung Tahun 2019 untuk event/penggunaan sewa di Tahun 2020 sebesar Rp1.208.000.000
 - b. Jurnal Penyesuaian atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka yang berdampak mengurangi Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar (Rp441.580.113) dengan rincian:



No	Nama Rekanan	Nilai PNPB	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa s.d 31-Des-2020	Pendapatan Diterima Dimuka
1	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.128.000	36 bulan	1 Sept 2019	31 Ags 2022	23.168.000	28.960.000
2	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	391.500.000	60 bulan	1 Jan 2019	31 Des 2023	156.600.000	234.900.000
3	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	505.296.000	36 bulan	1 Jan 2019	31 Des 2021	336.864.000	168.432.000
4	Yayasan Anak Mandiri	1.250.648	36 bulan	1 Jan 2020	31 Des 2023	416.883	833.765
5	Lembaga Perlindungan Anak Indonesia	14.090.580	60 bulan	1 Jan 2019	31 Des 2023	5.636.232	8.454.348
Total							441.580.113

- Perbedaan pada akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp8.033.565.248 disebabkan oleh adanya jurnal balik atas saldo pada rekening bendahara pengeluaran tahun 2019 yang merupakan bunga atau jasa giro yang baru disetorkan ke kas negara pada tahun 2020 sebesar (Rp614.713.225) dan adanya jurnal penyesuaian atas pengakuan pendapatan bunga/jasa giro tahun 2020 sebesar Rp8.648.278.473 yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2020 (masih berada di Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran) pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebesar Rp427.442.868, Direktorat PFM Wilayah I sebesar Rp2.493.537.702, Direktorat PFM Wilayah II sebesar Rp987.016.619, Direktorat PFM Wilayah III sebesar Rp4.718.233.388, BBRVPD Cibinong sebesar Rp20.989.118, Direktorat PSPKKM sebesar Rp965.186, BRSPDSN Wyata Guna sebesar Rp12.846, Direktorat Jamsoskel sebesar Rp80.146, dan Dinas Sosial Aceh (03) sebesar Rp600.
- Perbedaan pada akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp119.331.893 disebabkan jurnal balik Piutang PNPB tahun 2019 atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah TA 2019 dengan rincian Rp61.905.945 pada Dinas Sosial Kabupaten Nunukan (027.03.359904), sebesar Rp52.824.342 pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Asmat (027.03.251422), dan sebesar Rp4.601.606 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (027.03.199135).

Beban Pegawai
Rp445.259.411.851

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp445.259.411.851** dan **Rp480.563.464.039** atau mengalami penurunan sebesar (7,35%).

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Perbandingan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat dengan rincian pada tabel berikut:



*Perbandingan Beban Begawai Per Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	Nama Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	55.397.719.483	61.171.602.460	(5.773.882.977)	(9,44)
2	Inspektorat Jenderal	15.703.920.090	16.922.150.574	(1.218.230.484)	(7,20)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	23.599.848.061	24.905.221.867	(1.305.373.806)	(5,24)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	209.714.445.344	227.582.303.265	(17.867.857.921)	(7,85)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	19.511.219.694	20.919.520.535	(1.408.300.841)	(6,73)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	17.641.090.643	18.557.635.468	(916.544.825)	(4,94)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	103.691.168.536	110.505.029.870	(6.813.861.334)	(6,17)
Jumlah		445.259.411.851	480.563.464.039	(35.304.052.188)	(7,35)

Perbandingan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

No	Uraian Beban	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	189.125.450.711	194.743.883.410	(5.618.432.699)	(2,89)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.681.610	2.743.467	(61.857)	(2,25)
3	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	13.154.336.574	13.572.736.162	(418.399.588)	(3,08)
4	Beban Tunjangan Anak PNS	3.550.078.586	3.734.791.972	(184.713.386)	(4,95)
5	Beban Tunjangan Struktural PNS	9.313.389.900	9.408.515.000	(95.125.100)	(1,01)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	9.672.410.839	9.904.725.001	(232.314.162)	(2,35)
7	Beban Tunjangan PPh PNS	1.077.242.584	1.165.099.200	(87.856.616)	(7,54)
8	Beban Tunjangan Beras PNS	8.689.047.240	9.081.707.720	(392.660.480)	(4,32)
9	Beban Uang Makan PNS	27.036.031.143	24.128.089.182	2.907.941.961	12,05
10	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	189.400.000	195.155.000	(5.755.000)	(2,95)
11	Beban Tunjangan Umum PNS	5.203.153.562	5.597.473.433	(394.319.871)	(7,04)
12	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3.935.746.895	3.885.576.100	50.170.795	1,29
13	Beban Uang Lembur	1.606.135.550	1.389.553.800	216.581.750	15,59
14	Beban Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan)	172.704.306.657	203.753.414.592	(31.049.107.935)	(15,24)
Jumlah		445.259.411.851	480.563.464.039	(35.304.052.188)	(7,35)

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 7,35% dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Penyebab turunnya nilai beban pegawai ini disebabkan berkurangnya jumlah pegawai dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi yang mengurangi beban gaji pokok dan beban tunjangan khusus/ kegiatan/ kinerja), serta adanya penurunan nilai Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Gaji ke-13 bagi pegawai mulai dari staff sampai lingkup Pejabat Eselon III hanya sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan umum.



Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan	
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai		
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	189.139.743.611	511111	Beban Gaji Pokok PNS	189.125.450.711	14.292.900	
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.682.493	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.681.610	883	
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13.154.369.844	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.154.336.574	33.270	
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3.550.073.622	511122	Beban Tunj. Anak PNS	3.550.078.586	(4.964)	
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9.307.249.900	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9.313.389.900	(6.140.000)	
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9.671.914.900	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9.672.410.839	(495.939)	
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.073.934.890	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1.077.242.584	(3.307.694)	
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	8.688.757.560	511126	Beban Tunj. Beras PNS	8.689.047.240	(289.680)	
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	27.030.354.151	511129	Beban Uang Makan PNS	27.036.031.143	(5.676.992)	
10	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	189.400.000	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	189.400.000	-	
11	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5.204.278.562	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5.203.153.562	1.125.000	
12	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3.935.746.895	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3.935.746.895	-	
13	512211	Belanja Uang Lembur	1.606.735.000	512211	Beban Uang Lembur	1.606.135.550	599.450	
14	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	173.011.068.457	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	172.704.306.657	306.761.800	
Jumlah			445.566.309.885				445.259.411.851	306.898.034

Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat jurnal balik awal tahun atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar TA 2019, yang telah diakui sebagai beban pada tahun 2019 dan telah dibayarkan/diselesaikan pada tahun anggaran 2020, sehingga akan mengurangi nilai beban pegawai TA 2020 secara akrual sebesar (Rp305.017.894).
2. Terdapat jurnal penyesuaian akhir tahun atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai TA 2020 yang belum dikembalikan ke kas negara pada TA 2020 yang akan mengurangi nilai beban pegawai secara akrual sebesar (Rp178.721.389).
3. Terdapat jurnal penyesuaian akhir tahun atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar TA 2020 yang akan menambah nilai beban pegawai secara akrual sebesar Rp176.841.249.

Beban Persediaan

Rp47.976.043.254

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp47.976.043.254** dan **Rp39.196.178.503** atau mengalami kenaikan sebesar 22,4%.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Perbandingan Beban Persediaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dimasing-masing Eselon I dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:



*Rincian Beban Persediaan Per Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	Nama Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	17.431.369.110	7.116.157.023	10.315.212.087	144,95
2	Inspektorat Jenderal	753.297.000	637.451.500	115.845.500	18,17
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	38.400.000	33.098.000	5.302.000	16,02
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	20.804.073.383	26.603.128.172	(5.799.054.789)	(21,80)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.393.845.598	2.134.164.036	1.259.681.562	59,02
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	2.870.172.948	909.921.045	1.960.251.903	215,43
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	2.684.885.215	1.762.258.727	922.626.488	52,35
Jumlah		47.976.043.254	39.196.178.503	8.779.864.751	22,40

Perbandingan rincian Beban Persediaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian Beban	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	45.670.898.520	36.557.043.646	9.113.854.874	24,93
Beban Persediaan Bahan Baku	145.723.710	245.422.207	(99.698.497)	(40,62)
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga	123.623.317	3.802.669	119.820.648	3.150,96
Beban Persediaan Lainnya	2.035.797.707	2.389.909.981	(354.112.274)	(14,82)
Jumlah Beban Persediaan	47.976.043.254	39.196.178.503	8.779.864.751	22,40

Penurunan Beban Persediaan sebesar (4,26%) disebabkan adanya *refocusing* anggaran dan realokasi kegiatan dalam rangka pandemi Covid-19.

Beban Barang dan Jasa

Rp4.545.334.197.734

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp4.545.334.197.734** dan **Rp2.546.867.936.840** atau mengalami kenaikan sebesar 78,47%.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat sebagai berikut:



NO	Nama Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	181.523.793.056	172.880.247.510	8.643.545.546	5,00
2	Inspektorat Jenderal	4.539.786.080	4.870.293.950	(330.507.870)	(6,79)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	881.314.095.955	169.862.436.450	711.451.659.505	418,84
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	187.007.770.643	229.780.674.465	(42.772.903.822)	(18,61)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.123.068.317.384	1.636.916.909.620	486.151.407.764	29,70
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	1.075.413.243.351	166.465.384.630	908.947.858.721	546,03
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	92.467.191.265	166.091.990.215	(73.624.798.950)	(44,33)
Jumlah		4.545.334.197.734	2.546.867.936.840	1.998.466.260.894	78,47

Rincian perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	73.888.941.217	61.117.657.227	12.771.283.990	20,90
Beban Pengadaan Bahan Makanan	4.938.295.260	9.865.661.915	(4.927.366.655)	(49,94)
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	1.602.269.980	1.177.740.100	424.529.880	36,05
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	805.130.880	1.190.077.487	(384.946.607)	(32,35)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24.766.280.400	27.809.364.000	(3.043.083.600)	(10,94)
Beban Barang Operasional Lainnya	15.972.394.232	10.772.617.641	5.199.776.591	48,27
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	24.397.212.017		24.397.212.017	100,00
Beban Bahan	66.784.990.136	186.273.743.625	(119.488.753.489)	(64,15)
Beban Honor Output Kegiatan	1.609.759.913.255	1.509.699.049.586	100.060.863.669	6,63
Beban Barang Non Operasional Lainnya	410.222.090.961	462.150.707.439	(51.928.616.478)	(11,24)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	5.960.752.000	6.602.824.000	(642.072.000)	(9,72)
Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	1.031.150.000	2.054.850.000	(1.023.700.000)	(49,82)
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	2.073.498.650	1.185.381.078	888.117.572	74,92
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.085.318.430.288		2.085.318.430.288	100,00
Beban Langganan Listrik	18.683.844.538	16.699.924.335	1.983.920.203	11,88
Beban Langganan Telepon	1.397.593.531	1.468.159.144	(70.565.613)	(4,81)
Beban Langganan Air	1.313.291.014	1.200.613.425	112.677.589	9,39
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	224.571.370	404.150.205	(179.578.835)	(44,43)
Beban Jasa Pos dan Giro	1.515.975.787	74.923.850	1.441.051.937	1.923,36
Beban Jasa Konsultan	31.390.203.846	44.687.523.917	(13.297.320.071)	(29,76)
Beban Sewa	77.903.563.237	99.390.935.282	(21.487.372.045)	(21,62)
Beban Jasa Profesi	30.446.101.500	64.042.471.918	(33.596.370.418)	(52,46)
Beban Jasa Lainnya	30.102.020.308	38.794.960.966	(8.692.940.658)	(22,41)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	24.563.060.417	-	24.563.060.417	100,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan & Mesin	272.622.910	204.599.700	68.023.210	100,00
Jumlah	4.545.334.197.734	2.546.867.936.840	1.998.466.260.894	78,47

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 78,47% dibanding periode yang berakhir 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa akun yang mengalami kenaikan signifikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Keperluan Perkantoran (akun 521111) mengalami kenaikan sebesar Rp12.771.283.990 atau 20,90 persen dengan nilai paling signifikan terdapat pada UKE I



- Ditjen Rehabilitasi Sosial dan Sekretariat Jenderal.
2. Beban Honor Output Kegiatan (akun 521213) mengalami kenaikan sebesar Rp100.060.863.669 atau 6,63 persen dengan nilai paling signifikan terdapat pada UKE I Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Hal ini terkait dengan pembayaran honor pendamping PKH yang mengalami penambahan jumlah pendamping seiring dengan naiknya anggaran program bantuan sosial PKH.
 3. Beban Barang Operasional Lainnya (akun 521119) mengalami kenaikan sebesar Rp5.199.776.591 atau 48,27 persen dengan nilai paling signifikan terdapat pada UKE I Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Hal ini terkait dengan adanya pembelian bahan kontak pendampingan sosial pada Direktorat PSKBA dan biaya operasional posko Tagana di Papua.
 4. Beban Jasa Pos Giro (akun 522121) mengalami kenaikan sebesar Rp1.441.051.937 atau 1.923,36 persen dengan nilai paling signifikan terdapat pada UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Selain dikarenakan adanya kenaikan signifikan pada beberapa akun reguler, kenaikan Beban Barang dan Jasa pun dipengaruhi adanya penggunaan akun khusus terkait darurat bencana penanganan pandemi Covid-19, seperti Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 521131) untuk biaya pulsa telepon/ data internet untuk mendukung ASN yang menjalani WFH (*Work From Home*), biaya pengadaan masker/hand sanitizer, biaya penyemprotan desinfektan di area kantor, biaya pengadaan thermogun yang nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin, pengadaan lisensi aplikasi *video conference*, serta pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh untuk para ASN.

Kemudian penggunaan akun Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 521241) yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial seperti: biaya pengemasan dan transportasi program sembako bagi peserta PKH pada Ditjen Pemberdayaan Sosial serta pengadaan *goody bag* dan biaya pengiriman bantuan sosial sembako wilayah Jabodetabek untuk periode penyaluran bulan Juli s/d Desember 2020 pada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, biaya pengiriman bantuan sosial tunai non Jabodetabek dan biaya pengiriman bantuan sosial kartu sembako secara tunai di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin.

Selain itu, terdapat juga penggunaan akun Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 522192) untuk pembayaran biaya pelaksanaan Rapid/Swab Test Covid-19 yang menggunakan jasa pihak ketiga dan untuk pembayaran biaya honorarium narasumber/moderator kegiatan melalui sarana *video conference*.



Adapun rincian penggunaan beberapa akun khusus yang digunakan untuk melaksanakan program penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 521131) sebesar Rp24.397.212.017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode UKE I	Uraian UKE I	Nilai
1	027.01	Sekretariat Jenderal	6,588,630,680
2	027.02	Inspektorat Jenderal	105,430,800
3	027.03	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	237,749,150
4	027.04	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	2,271,446,107
5	027.05	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	3,148,346,732
6	027.06	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	4,622,411,864
7	027.11	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	7,423,196,684
Jumlah			24,397,212,017

2. Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 521241) sebesar Rp2.085.318.430.288 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode UKE I	Uraian UKE I	Nilai
1	027.01	Sekretariat Jenderal	1,349,338,390
2	027.02	Inspektorat Jenderal	617,103,700
3	027.03	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	758,389,724,800
4	027.04	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	6,324,016,405
5	027.05	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	371,076,882,639
6	027.06	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	937,651,320,080
7	027.11	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	9,910,044,274
Jumlah			2,085,318,430,288

3. Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 522192) sebesar Rp24.563.060.417 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode UKE I	Uraian UKE I	Nilai
1	027.01	Sekretariat Jenderal	13,661,560,500
2	027.02	Inspektorat Jenderal	750,030,000
3	027.03	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	165,938,000
4	027.04	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	2,820,486,342
5	027.05	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	3,865,104,980
6	027.06	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	445,740,000
7	027.11	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	2,854,200,595
Jumlah			24,563,060,417



Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	73.889.606.174	521111	Beban Keperluan Perkantoran	73.888.941.217	664.957
2	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	4.938.295.260	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	4.938.295.260	-
3	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.602.269.980	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.602.269.980	-
4	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	805.130.880	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	805.130.880	-
5	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	24.766.280.400	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24.766.280.400	-
6	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16.026.403.862	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	15.972.394.232	54.009.630
7	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	24.361.876.917	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	24.397.212.017	(35.335.100)
8	521211	Belanja Bahan	67.125.978.136	521211	Beban Bahan	66.784.990.136	340.988.000
9	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.610.278.763.255	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1.609.759.913.255	518.850.000
10	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	424.623.494.211	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	410.222.090.961	14.401.403.250
11	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	5.960.752.000	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	5.960.752.000	-
12	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	1.031.150.000	521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	1.031.150.000	-
13	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	2.073.498.650	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	2.073.498.650	-
14	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.077.659.053.163	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.085.318.430.288	(7.659.377.125)
15	522111	Belanja Langganan Listrik	18.679.577.726	522111	Beban Langganan Listrik	18.683.844.538	(4.266.812)
16	522112	Belanja Langganan Telepon	1.397.046.831	522112	Beban Langganan Telepon	1.397.593.531	(546.700)
17	522113	Belanja Langganan Air	1.308.830.264	522113	Beban Langganan Air	1.313.291.014	(4.460.750)
18	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	224.571.370	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	224.571.370	-
19	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1.515.975.787	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	1.515.975.787	-
20	522131	Belanja Jasa Konsultan	31.390.866.346	522131	Beban Jasa Konsultan	31.390.203.846	662.500
21	522141	Belanja Sewa	78.037.535.883	522141	Beban Sewa	77.903.563.237	133.972.646
22	522151	Belanja Jasa Profesi	30.446.101.500	522151	Beban Jasa Profesi	30.446.101.500	-
23	522191	Belanja Jasa Lainnya	30.102.020.308	522191	Beban Jasa Lainnya	30.102.020.308	-
24	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	24.568.235.417	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	24.563.060.417	5.175.000
25	-	-	-	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	272.622.910	(272.622.910)
Jumlah			4.552.813.314.320			4.545.334.197.734	7.479.116.586

Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Barang/Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat jurnal balik awal tahun atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar TA 2019, yang telah diakui sebagai beban pada tahun 2019 dan telah dibayarkan/diselesaikan pada tahun anggaran 2020 sehingga mengurangi nilai beban barang/jasa TA 2020 secara akrual sebesar (Rp10.002.202.352).
2. Terdapat jurnal penyesuaian akhir tahun atas kelebihan pembayaran Belanja Barang TA 2020 yang belum dikembalikan ke kas negara yang akan mengurangi nilai beban



- barang/jasa secara akrual sebesar (Rp5.207.041.121).
3. Terdapat jurnal penyesuaian akhir tahun atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar TA 2020 yang akan menambah nilai beban barang/jasa secara akrual sebesar Rp7.475.071.307.
 4. Terdapat jurnal koreksi atas Piutang Lainnya yang menambah Beban Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp7.400.000.
 5. Terdapat jurnal koreksi atas Persediaan Belum Diregister yang diperoleh dari adanya Belanja Barang Persediaan menjadi Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 sebesar Rp35.335.100.
 6. Terdapat jurnal koreksi atas kesalahan penggunaan akun beban barang/jasa yang seharusnya menjadi persediaan sebesar (Rp60.302.430).
 7. Terdapat pengakuan Beban Aset Ekstrakomptabel yang akan menambah nilai beban barang/jasa sebesar Rp272.622.910.

Pada tahun 2020, terdapat jurnal koreksi antar beban atas adanya belanja barang dan jasa yang menggunakan akun reguler namun output dari kegiatannya berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, yaitu:

1. Terdapat jurnal koreksi Beban Bahan (akun 521211) menjadi Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 521241) sebesar Rp6.926.000 pada Direktorat PSPKKM (Ditjen Pemberdayaan Sosial) terkait adanya belanja untuk menunjang program Bantuan Sosial Beras dalam rangka Jaring Pengaman Sosial dampak Covid-19.
2. Terdapat jurnal koreksi Beban Honor Output Kegiatan (akun 521213) menjadi Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 521241) sebesar Rp49.800.000 pada Direktorat PSPKKM (Ditjen Pemberdayaan Sosial) terkait adanya belanja untuk menunjang program Bantuan Sosial Beras dalam rangka Jaring Pengaman Sosial dampak Covid-19.
3. Terdapat jurnal koreksi Beban Barang Non Operasional Lainnya (akun 521219) menjadi Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 521241) sebesar Rp12.462.850.950 pada Direktorat PFM Wilayah III (Ditjen Penanganan Fakir Miskin) terkait biaya kirim bantuan sosial kartu sembako secara tunai di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Beban Pemeliharaan

Rp72.394.140.426

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp72.394.140.426** dan **Rp78.468.609.329** atau mengalami penurunan sebesar (7,74%).

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Perbandingan Beban Pemeliharaan di tiap Unit Kerja Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	18.875.788.307	20.692.751.254	(1.816.962.947)	(8,78)
2	Inspektorat Jenderal	516.098.000	426.319.700	89.778.300	21,06
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	8.033.692.403	10.677.152.069	(2.643.459.666)	(24,76)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	26.095.362.151	27.289.279.985	(1.193.917.834)	(4,38)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.450.770.386	6.464.848.298	(14.077.912)	(0,22)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	1.071.678.741	1.115.096.180	(43.417.439)	(3,89)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	11.350.750.438	11.803.161.843	(452.411.405)	(3,83)
Jumlah		72.394.140.426	78.468.609.329	(6.074.468.903)	(7,74)

Adapun rincian perbandingan Beban Pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.712.486.253	33.846.594.852	(3.134.108.599)	(9,26)
2	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	246.302.525	-	246.302.525	-
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	138.268.500	-	138.268.500	-
4	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.533.052.733	1.223.844.529	309.208.204	25,27
5	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.139.337.736	34.510.995.738	(1.371.658.002)	(3,97)
6	Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	3.896.417.632	3.365.884.398	530.533.234	15,76
7	Beban Pemeliharaan Jaringan	357.296.374	1.022.298.399	(665.002.025)	(65,05)
8	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.620.612.100	3.557.650.263	(1.937.038.163)	(54,45)
9	Beban Persediaan bahan Untuk Pemeliharaan	574.671.573	612.941.150	(38.269.577)	(6,24)
10	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	175.695.000	328.400.000	(152.705.000)	(46,50)
Jumlah		72.394.140.426	78.468.609.329	(6.074.468.903)	(7,74)

Berdasarkan pada tabel di atas, secara absolut total terdapat penurunan Beban Pemeliharaan sebesar 7,74% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019. Penurunan signifikan terjadi pada pos akun **Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, serta Beban Pemeliharaan Lainnya**. Penurunan pada Beban Pemeliharaan dipengaruhi oleh turunnya alokasi anggaran pada Belanja Pemeliharaan atas dampak *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

Selanjutnya pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat transaksi dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19 yaitu pada pos akun Beban Pemeliharaan



Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 523114) sebesar Rp138.268.500, dengan rincian sebagai berikut:

Kode UKE I	Uraian UKE I	Nominal
027.04	Ditjen Rehabilitasi Sosial	102.427.500
027.11	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	35.841.000
Jumlah		138.268.500

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 523114) pada Ditjen Rehabilitasi Sosial dan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial merupakan beban atas adanya belanja penyediaan tempat cuci tangan dan bilik semprom dilingkungan kantor dalam rangka pencegahan virus Covid-19.

*Beban Perjalanan
 Dinas*

Rp434.716.597.827

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp434.716.597.827** dan **Rp963.471.108.195** atau mengalami penurunan sebesar (54,88%).

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Kementerian Sosial di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	Nama Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	41.743.745.684	78.727.481.704	(36.983.736.020)	(46,98)
2	Inspektorat Jenderal	10.194.489.800	22.756.861.044	(12.562.371.244)	(55,20)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	35.085.732.063	110.986.219.903	(75.900.487.840)	(68,39)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	92.381.021.159	192.543.304.310	(100.162.283.151)	(52,02)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	88.742.100.437	140.498.292.919	(51.756.192.482)	(36,84)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	87.768.185.074	159.328.316.688	(71.560.131.614)	(44,91)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	78.801.323.610	258.630.631.627	(179.829.308.017)	(69,53)
Jumlah		434.716.597.827	963.471.108.195	(528.754.510.368)	(54,88)

Adapun rincian perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
1	Beban Perjalanan Biasa	196,116,292,097	372,242,763,430	(176,126,471,333)	(47.31)
2	Beban Perjalanan Tetap	55,968,601	149,215,356	(93,246,755)	(62.49)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,707,939,444	42,338,020,644	(24,630,081,200)	(58.17)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75,585,150,793	193,227,230,047	(117,642,079,254)	(60.88)
5	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	18,548,796,283	-	18,548,796,283	-
6	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	126,075,520,266	350,353,407,410	(224,277,887,144)	(64.01)
7	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	311,742,480	3,251,784,531	(2,940,042,051)	(90.41)
8	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	315,187,863	1,908,686,777	(1,593,498,914)	(83.49)
	Jumlah	434,716,597,827	963,471,108,195	(528,754,510,368)	(54.88)

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp528.754.510.368) atau 54,88% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran dan realokasi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa kebijakan terkait pandemi Covid-19 seperti, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), turut menjadi faktor yang mempengaruhi berkurangnya mobilitas perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	196.532.188.813	524111	Beban Perjalanan Biasa	196.116.292.097	415.896.716
2	524112	Belanja Perjalanan Tetap	55.968.601	524112	Beban Perjalanan Tetap	55.968.601	-
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.707.939.444	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.707.939.444	-
4	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.771.423.293	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.585.150.793	186.272.500
5	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	18.548.796.283	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	18.548.796.283	-
6	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	126.631.724.156	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	126.075.520.266	556.203.890
7	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	311.742.480	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	311.742.480	-
8	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	315.187.863	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	315.187.863	-
	Jumlah		435.874.970.933			434.716.597.827	1.158.373.106

Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Perjalanan Dinas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat jurnal balik awal tahun atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar TA 2019, yang telah diakui sebagai beban pada tahun 2019 dan telah dibayarkan/diselesaikan pada tahun anggaran 2020, sehingga akan mengurangi nilai beban perjalanan dinas TA 2020 secara akrual sebesar (Rp543.500.000).
2. Terdapat jurnal penyesuaian akhir tahun atas kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TA 2020 yang belum dikembalikan ke kas negara pada TA 2020 yang akan mengurangi nilai beban perjalanan dinas secara akrual sebesar (Rp543.344.706).
3. Terdapat jurnal penyesuaian akhir tahun atas Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) yang mengurangi nilai beban perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar (Rp71.528.400). Hal ini terkait refund tiket pesawat atas pembatalan perjalanan dinas Tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 dalam bentuk *voucher* pada satker Direktorat



Penanganan Fakir Miskin Wilayah III (kode satker 418944) Ditjen Penanganan Fakir Miskin.

Selanjutnya pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat transaksi dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19 yaitu pada pos akun Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 524115) sebesar Rp18.548.796.283 dengan rincian sebagai berikut:

Kode UKE I	Uraian UKE I	Nominal
027.01	Sekretariat Jenderal	3.298.276.726
027.02	Inspektorat Jenderal	2.267.484.200
027.03	Ditjen Pemberdayaan Sosial	1.016.554.038
027.04	Ditjen Rehabilitasi Sosial	5.974.713.950
027.05	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.797.263.369
027.06	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	188.400.000
027.11	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	2.006.104.000
Jumlah		18.548.796.283

*Beban Barang untuk
 Diserahkan kepada
 Masyarakat*
 Rp153.318.293.332

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp153.318.293.332** dan **Rp29.550.568.283** atau mengalami kenaikan sebesar 418,83%. Kenaikan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada periode pelaporan sampai dengan 31 Desember 2020 disebabkan adanya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), sarung tangan medis, cairan disinfektan, dan sebagainya dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Kementerian Sosial di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

NO	Nama Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	91.800.000	-	91.800.000	100,00
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	2.911.974.166	4.235.752.300	(1.323.778.134)	(31,25)
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	52.448.371.844	7.601.435.428	44.846.936.416	589,98
4	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	79.413.931.257	13.728.085.810	65.685.845.447	478,48
5	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	-	-	-	-
6	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	18.452.216.065	3.985.294.745	14.466.921.320	363,01
Jumlah		153.318.293.332	29.550.568.283	123.767.725.049	418,83

Adapun rincian perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut:



Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
1	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	9.238.750.000	-	9.238.750.000	-
2	Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.943.516.906	4.091.043.000	17.852.473.906	-
3	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.800.000	-	2.800.000	-
4	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12.111.018.090	7.796.043.220	4.314.974.870	55,35
5	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	421.522.000	-	421.522.000	-
6	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	109.600.686.336	17.663.482.063	91.937.204.273	520,49
Jumlah		153.318.293.332	29.550.568.283	123.767.725.049	418,83

Terdapat penggunaan akun untuk penanganan pandemi Covid-19 yaitu pada pos akun Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp9.238.750.000 (akun 526321) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode UKE I	Uraian UKE I	Nilai
1	027.04	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	74.550.000
2	027.11	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	9.164.200.000
Jumlah			9.238.750.000

Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan beban atas biaya transportasi penyaluran bantuan sembako ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan biaya transportasi operasional pendamping atas penyaluran bantuan sosial Covid-19 ke Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan pada Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial merupakan beban atas adanya pembayaran uang harian para peserta kediklatan, salah satunya yaitu diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/ *Family Development Session* (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) E-Learning Pembelajaran Sinkronous Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan *skill* para pendamping PKH yang diadakan di semua Balai Besar dibawah Unit Kerja Eselon I di seluruh Indonesia.

Beban Bantuan Sosial
 Rp122.475.399.979.702

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp122.475.399.979.702** dan **Rp51.221.474.250.664** atau mengalami kenaikan sebesar 139,11%.



Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Sesuai dengan surat KSAP Nomor: S-35/K.1/KSAP/III/2018 Beban Bantuan Sosial diakui pada saat Bantuan Sosial berupa Uang/Barang/ Jasa telah diserahkan pada pihak yang berhak menerima bantuan sosial.

Beban bantuan sosial merupakan saldo realisasi belanja bantuan sosial berbasis kas setelah dikurangi dengan jurnal manual atas sisa dana bantuan sosial yang akan disetorkan ke kas negara pada periode berikutnya (diakui sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Piutang Lainnya pada Neraca) dan jurnal manual atas sisa dana bantuan sosial yang akan disalurkan kembali pada periode berikutnya (diakui sebagai Dana Lainnya pada Neraca). Selain itu beban bantuan sosial juga termasuk hasil akumulasi dari penggunaan bantuan sosial dalam bentuk barang.

Beban Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI di tiap Unit Kerja Eselon I per untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial Per Eselon I
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	Nama Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Pemberdayaan Sosial	4.717.002.937.843	171.266.583.572	4.545.736.354.271	2.654,19
2	Ditjen Rehabilitasi Sosial	221.970.509.904	381.545.513.605	(159.575.003.701)	(41,82)
3	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	43.385.503.098.371	32.742.269.516.133	10.643.233.582.238	32,51
4	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	74.150.923.433.584	17.926.392.637.354	56.224.530.796.230	313,64
Jumlah		122.475.399.979.702	51.221.474.250.664	71.253.925.729.038	139,11

Rincian Perbandingan Beban Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	227.864.016.346,	374.182.945.121	(146.318.928.775)	(39,10)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk barang/jasa	4.609.005.558,	-	4.609.005.558	-
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk uang	88.321.233.000	29.742.839.000	58.578.394.000	196,95
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Bentuk barang/jasa	4.553.832.936.883	3.865.055.584.003	688.777.352.880	17,82
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk uang	128.066.255.960	32.629.517.606.981	(32.501.451.351.021)	(99,61)
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	36.320.608.388.361	-	36.320.608.388.361	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk uang	387.553.015.913	14.263.597.074.714	(13.876.044.058.801)	(97,28)
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	73.767.150.417.671	-	73.767.150.417.671	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk uang	154.622.850.000	59.378.200.845	95.244.649.155	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk barang/jasa	6.842.771.860.010	-	6.842.771.860.010	-
Jumlah	122.475.399.979.702	51.221.474.250.664	71.253.925.729.038	139,11

Beban Bantuan Sosial untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 139,11% jika dibanding dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan ini beban bantuan sosial ini dipengaruhi oleh:

1. Adanya peningkatan target penerima bantuan sosial Program Sembako menjadi 15.200.000 KPM pada awal tahun 2020, serta adanya peningkatan kembali target Program Sembako akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi 20.000.000 KPM. Selain itu disebabkan juga kenaikan indeks Program Sembako dari Rp150.000/bulan menjadi Rp200.000/bulan.
2. Adanya kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai respon atas adanya pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk 9.000.000 KPM dengan nilai Rp600.000/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu dari bulan April sampai bulan Juni 2020 dan Rp300.000/bulan yang diberikan selama 6 bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020.
3. Adanya kenaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebesar 25% yang disalurkan pada bulan April, Mei, dan September 2020.

Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:



No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	228.387.016.346	571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	227.864.016.346,	523.000.000
2	571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	3.081.186.790	571112	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	4.609.005.558,	
3	571114	Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	125.000.000	571114	Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	-	125.000.000
4	573111	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Bentuk uang	88.328.233.000	573111	Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Bentuk uang	88.321.233.000	7.000.000
5	573112	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Bentuk barang/jasa	45.133.055.186	573112	Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Bentuk barang/jasa	4.553.832.936.883	
6	573115	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Barang - Penanganan Pandemi Covid-19	4.505.850.000.000				
7	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	28.559.320.979.070	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	128.066.255.960	28.431.254.723.110
8	574114	Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	8.266.540.473.248	574114	Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	36.320.608.388.361	(28.054.067.915.113)
9	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	39.444.786.472.066	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	387.553.015.913	39.057.233.456.153
10	575114	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	36.174.411.280.000	575114	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	73.767.150.417.671	(37.592.739.137.671)
11	576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	156.369.750.000	576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	154.622.850.000	1.746.900.000
12	576112	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/jasa	181.456.979.902	576112	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/jasa	6.842.771.860.010	
13	576115	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi Covid-19	6.726.301.483.944				
Jumlah			124.380.091.909.552			122.475.399.979.702	1.844.083.026.479

Perbedaan nilai Belanja/Beban Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) disebabkan perbedaan basis akuntansi, di mana belanja bantuan sosial digunakan untuk mencatat adanya pembelian persediaan dalam rangka bantuan sosial TA 2020, sedangkan beban bantuan sosial digunakan untuk mencatat penggunaan persediaan dalam rangka bansos.

Sedangkan untuk penjelasan atas perbedaan nilai Belanja/Beban Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO):

1. Terdapat jurnal penyesuaian yang mengurangi Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang (akun 571111) sebesar Rp648.000.000 atas sisa belanja bantuan sosial TA 2020 yang akan dikembalikan ke kas negara pada TA 2021.
2. Terdapat jurnal koreksi antar beban sebesar Rp125.000.000 terkait penggunaan Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi



- Covid-19 (akun 571114) yang seharusnya menggunakan akun reguler (akun 571111) karena bantuan tersebut merupakan bantuan reguler berupa bantuan sosial kemandirian pada satker LRSPDSRW “Meohai” di Kendari.
3. Terdapat jurnal penyesuaian yang mengurangi Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang (akun 573111) sebesar Rp7.000.000 atas dana bantuan sosial kewirausahaan pada Direktorat PSPKKM yang per 31 Desember 2020 belum tersalurkan dan sudah disalurkan kembali pada bulan Januari 2021.
 4. Terdapat jurnal koreksi antar beban untuk program PKH pada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial atas penggunaan akun bantuan sosial reguler Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial (akun 574111) menjadi akun khusus covid Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial (akun 574114) sebesar Rp28.416.478.396.110 sesuai dengan surat S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 5. Terdapat jurnal koreksi yang mengurangi Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang (574111) sebesar Rp14.901.327.000 yang merupakan belanja barang persediaan dan belanja modal peralatan dan mesin untuk Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.
 6. Terdapat jurnal penyesuaian yang menjadi koreksi tambah Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial (akun 574111) sebesar Rp125.000.000 atas dana bantuan sosial Direktorat PSKBS (Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial) yang berasal dari hibah Direktorat PSDBS (Ditjen Pemberdayaan Sosial) yang per 31 Desember 2020 masih berada di RPL dan belum disalurkan kepada Penerima Manfaat.
 7. Terdapat jurnal penyesuaian yang mengurangi Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 574114) sebesar Rp362.410.480.997 yang merupakan sisa dana bansos PKH yang terdapat pada rekening KPM yang masuk dalam perhitungan KKS tidak terdistribusi, KPM tidak bertransaksi selama minimal 3 (tiga) kali periode penyaluran serta penyetoran atas saldo bantuan sosial KPM *Non Eligible* periode penyaluran bulan Juli s/d September 2020 pada Bank BRI.
 8. Terdapat jurnal koreksi antar beban untuk program Bantuan Sosial Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Sembako Non PKH pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin atas penggunaan akun bantuan sosial reguler Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan (akun 575111) menjadi akun khusus covid Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan - Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 575114) sebesar Rp39.395.597.722.066 sesuai dengan surat S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 9. Terdapat jurnal penyesuaian yang menjadi koreksi tambah Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan (akun 575111) pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin atas sisa dana bansos bulan Oktober s/d Desember TA 2019 yang disalurkan kembali di TA 2020 sebesar Rp205.924.733.341.
 10. Terdapat jurnal koreksi antar akun pengembalian beban sebesar Rp18.964.250.000, dengan rincian masing-masing pada satker Direktorat PFM Wilayah I sebesar Rp510.400.000, Direktorat PFM Wilayah II sebesar Rp18.299.520.000, dan Direktorat PFM Wilayah III sebesar Rp154.330.000. Koreksi tersebut dikarenakan adanya ralat akun penyetoran pengembalian belanja bantuan sosial dana BPNT tahun 2019 yang menggunakan dana dari RPL tahun 2020 pada Bank BTN. Semula pengembalian belanja menggunakan akun pengembalian belanja bantuan sosial TAYL (akun 425917) kemudian diralat menjadi akun pengembalian belanja bantuan sosial reguler – Tahun Anggaran



- Berjalan (akun 575111). Kemudian dikarenakan bansos tersebut termasuk kategori PC-PEN, maka secara akrual dilakukan jurnal koreksi antar beban dari Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan (akun 575111) menjadi akun Pengembalian Beban Bantuan Sosial - Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 575114).
11. Terdapat jurnal koreksi sebesar Rp113.475.282.572 yang menambah Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang (akun 575111). Jurnal tersebut merupakan koreksi pencatatan atas penyaluran belanja bantuan sosial tahun 2019 pada tahun 2020 yang sebelumnya dicatat sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dengan rincian pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wil I sebesar Rp45.260.494.295, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wil II sebesar Rp33.076.261.970, dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wil III sebesar Rp35.138.526.307.
 12. Terdapat jurnal penyesuaian yang mengurangi Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan - Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 575114) pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin atas sisa saldo RPL bank penyalur atas dana bantuan sosial program sembako per 31 Desember 2020 yang sudah disalurkan kembali di TA 2021 sebesar Rp65.135.073.054.
 13. Terdapat jurnal penyesuaian yang mengurangi Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan - Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 575114) pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin atas sisa dana bantuan sosial yang per 31 Desember 2020 masih berada di RPL bank penyalur dan akan dikembalikan ke kas negara pada TA 2021 sebesar Rp1.718.759.261.341.
 14. Terdapat jurnal penyesuaian yang mengurangi Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang (akun 576111) pada satker Direktorat PSKBA atas sisa dana bantuan sosial di RPL Bank Mandiri dan BNI per 31 Desember 2020 yang sudah disalurkan kembali di TA 2021 sebesar Rp1.746.900.000.

Selanjutnya pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat penggunaan akun untuk penanganan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 574114) sebesar Rp36.320.608.388.361 merupakan program PKH pada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
2. Beban Bantuan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin Dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 575114) sebesar Rp73.767.150.417.671 merupakan Bantuan Sosial program Sembako, Bantuan Sosial Non Jabodetabek, dan Bantuan Sosial Penerima Program Sembako non PKH pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp247.367.784.180

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp247.367.784.180** dan **Rp252.849.834.076** dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:



*Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	Nama Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	67.812.377.178	69.910.245.653	(2.097.868.475)	(3,00)
2	Inspektorat Jenderal	1.155.851.464	892.428.755	263.422.709	29,52
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	22.713.139.158	16.220.508.485	6.492.630.673	40,03
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	66.977.904.882	70.517.686.074	(3.539.781.192)	(5,02)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	54.511.931.236	60.064.133.087	(5.552.201.851)	(9,24)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	2.403.873.429	2.547.907.545	(144.034.116)	(5,65)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	31.792.706.833	32.696.924.477	(904.217.644)	(2,77)
Jumlah		247.367.784.180	252.849.834.076	(5.482.049.896)	(2,17)

Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2020	31 Des 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.505.294.837	162.678.633.333	(8,71)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.376.366.044	67.606.129.167	18,89
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.773.249.625	7.694.501.065	(24,97)
Beban Penyusutan Irigasi	3.607.226.106	2.053.880.963	75,63
Beban Penyusutan Jaringan	796.306.361	1.014.384.630	(21,50)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	126.844.126	141.281.086	(10,22)
Beban Amortisasi <i>Software</i>	8.033.197.189	11.511.020.309	(30,21)
Beban Amortisasi Lisensi	29.405.000	9.542.500	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi Pemerintah	119.894.892	140.461.023	(14,64)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	247.367.784.180	252.849.834.076	(2,17)

*Beban Penyisihan
 Piutang Tak Tertagih*

Rp54.675.712

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada akhir periode pelaporan. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang yang ditetapkan paling sedikit sebesar 5% (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp54.675.712** dan **Rp1.799.954.514**.



Beban Penyisihan Piutang di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut :

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut UKE I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

NO	Nama Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	2.215.719	1.137.773	1.077.946	94,74
2	Inspektorat Jenderal	(63.539)	20.646	(84.185)	(407,75)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	(2.073.667)	1.886.375	(3.960.042)	(209,93)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	(41.252.304)	44.065.611	(85.317.915)	(193,62)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	61.873.217	1.750.541.040	(1.688.667.823)	(96,47)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	24.286.990	(5.071)	24.292.061	(479.038,87)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	9.689.296	2.308.140	7.381.156	319,79
Jumlah		54.675.712	1.799.954.514	(1.745.278.802)	(96,96)

Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2020	31 Des 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	(596.660)	596.660	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	42.870.905	1.799.357.854	(97,62)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	10.168.174	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	2.233.293	-	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	54.675.712	1.799.954.514	(96,96)

Adanya penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar (96,96%) disebabkan karena atas piutang lainnya tahun 2019 telah diselesaikan dan disetorkan ke kas negara.

Surplus/Defisit

*Pelepasan Aset Non
Lancar*

Rp673.307.230

D.11. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar.

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Kementerian Sosial untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp673.307.230** dan **Rp1.447.303.661**. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan (53,48%).

Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Sebesar **Rp1.290.469.766** dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar **Rp617.162.536** dengan rincian berikut:



*Perbandingan Rincian Pelepasan Aset Non Lancar
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Pelepasan Aset Non Lancar	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.500.000	16.200.000	(700.000)	(4,32)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	271.574.222	152.683.386	118.890.836	77,87
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.003.395.544	1.488.003.700	(484.608.156)	(32,57)
Total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.290.469.766	1.656.887.086	(366.417.320)	(22,11)
Beban Kerugian Pelepasan Aset non Lancar	(617.162.536)	(209.583.425)	(407.579.111)	194,47
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	673.307.230	1.447.303.661	(773.996.431)	(53,479)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

*Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per UKE I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Sekretariat Jenderal	310.654.000	483.210.000	(172.556.000)	(35,71)
Inspektorat Jenderal	10.050.193	80.455.900	(70.405.707)	(87,51)
Ditjen Pemberdayaan Sosial		250.108.000	(250.108.000)	(100,00)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	412.343.497	501.910.986	(89.567.489)	(17,85)
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	261.925.076	82.855.200	179.069.876	216,12
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	192.094.000	390.000	191.704.000	-
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	103.403.000	257.957.000	(154.554.000)	(59,91)
Total	1.290.469.766	1.656.887.086	(366.417.320)	(22,115)

Sedangkan rincian Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Sekretariat Jenderal	-	-	-	-
Inspektorat Jenderal	63.936.420	-	63.936.420	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	203.321.330	-	203.321.330	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	161.371.619	143.566.070	17.805.549	12,40
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	145.965.000	7.492.500	138.472.500	1.848,15
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	-	11.053.285	(11.053.285)	(100,00)
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	42.568.167	47.471.570	(4.903.403)	-
Total	617.162.536	209.583.425	407.579.111	194,471



Surplus dari Kegiatan
 Non Operasional
 Lainnya

Rp200.475.346.579

D.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya.

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Kementerian Sosial RI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing **Rp200.475.346.579** dan **Rp451.787.461.118**. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan (55.63%).

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar **Rp337.398.980.672** dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya **Rp136.923.634.093** dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Perbandingan Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikann (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.563.934.779	17.500.000	2.546.434.779	14.551,06
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21.334.196	185.434.790	(164.100.594)	(88,50)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.834.271.480	2.478.917.791	1.355.353.689	54,68
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	193.161.566.325	429.155.299.440	(235.993.733.115)	(54,99)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	137.817.873.892	69.835.768.170	67.982.105.722	97,35
Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	337.398.980.672	501.672.920.191	(164.273.939.519)	(32,75)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	136.816.301.181	49.702.862.943	87.113.438.238	175,27
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	107.332.912	182.596.130	(75.263.218)	(41,22)
Total Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	136.923.634.093	49.885.459.073	87.038.175.020	174,48
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200.475.346.579	451.787.461.118	(251.312.114.539)	(55,626)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Sekretariat Jenderal	399.576.776	419.620.812	(20.044.036)	(4,78)
Inspektorat Jenderal	4.282.650	38.862.290	(34.579.640)	(88,98)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	509.144.282	792.990.606	(283.846.324)	(35,79)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	158.651.722	447.955.458	(289.303.736)	(64,58)
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	315.294.725.884	113.166.930.933	202.127.794.951	178,61
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	16.787.129.346	386.625.901.020	(369.838.771.674)	(95,66)
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	4.245.470.012	180.659.072	4.064.810.940	2.249,99
Total	337.398.980.672	501.672.920.191	(164.273.939.519)	(32,75)



Adapun perincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut:

Eselon I	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Sekretariat Jenderal	3.218.010	76.752.690	(73.534.680)	(95,81)
Inspektorat Jenderal	6.515.150	5.953.200	561.950	9,44
Ditjen Pemberdayaan Sosial	-	100.168.000	(100.168.000)	(100,00)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	73.563.041	69.482.560	4.080.481	5,87
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	136.780.375.715	49.600.527.643	87.179.848.072	175,76
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	2.653.902	11.559.000	(8.905.098)	(77,04)
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	57.308.275	21.015.980	36.292.295	172,69
Total	136.923.634.093	49.885.459.073	87.038.175.020	174,48

Pos Luar Biasa

D.13 POS LUAR BIASA

Rp0.

Kementerian Sosial Tidak ada kejadian atau transaksi Pos-pos Luar Biasa.

Defisit LO

D.14 Defisit LO

(Rp128.154.575.421.174)

Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar ***(Rp128.154.575.421.174)*** dan ***(Rp55.135.814.121.716)***



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp23.969.492.796.843

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp23.969.492.796.843** dan **Rp5.978.367.271.420** mengalami kenaikan sebesar Rp17.991.125.525.423 atau 300,94%. Perincian Ekuitas Awal di tiap Unit Kerja Eselon I ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

URAIAN	1 Januari 2020	1 Januari 2019	Kenaikan / Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	4.068.678.431.946	3.965.906.903.863	102.771.528.083	2,59
Inspektorat Jenderal	3.322.453.124	1.734.568.009	1.587.885.115	91,54
Ditjen Pemberdayaan Sosial	7.374.495.769.842	7.118.117.233.843	256.378.535.999	3,60
Ditjen Rehabilitasi Sosial	7.514.609.877.283	7.635.820.018.090	(121.210.140.807)	-1,59
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	816.502.830.808	559.820.489.944	256.682.340.864	45,85
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	2.166.275.010.834	34.711.094.179	2.131.563.916.655	6.140,87
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	2.025.608.423.006	1.892.830.659.677	132.777.763.329	7,01
Satker Konsolidasi Kementerian Sosial RI	-	(15.230.573.696.185)	15.230.573.696.185	-100,00
Jumlah	23.969.492.796.843	5.978.367.271.420	17.991.125.525.423	300,94

Surplus/ (Defisit) LO

(Rp128.154.575.421.174)

E.2 Surplus/ (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **(Rp128.154.575.421.174)** dan **(Rp55.135.814.121.716)**.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Perincian dan penjelasan atas Surplus (Defisit) LO di tiap Unit Kerja Eselon I ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	(378.921.773.084)	(403.011.553.254)	24.089.780.170	-5,98
Inspektorat Jenderal	(32.919.497.622)	(46.392.030.579)	13.472.532.957	-29,04
Ditjen Pemberdayaan Sosial	(5.683.783.049.481)	(499.227.902.021)	(5.184.555.147.460)	1.038,51
Ditjen Rehabilitasi Sosial	(876.335.325.478)	(1.161.410.944.768)	285.075.619.290	-24,55
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(45.581.997.856.113)	(34.560.272.907.318)	(11.021.724.948.795)	31,89
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	(75.271.491.135.116)	(17.887.653.653.213)	(57.383.837.481.903)	320,80
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	(329.126.784.280)	(577.845.130.563)	248.718.346.283	-43,04
Jumlah	(128.154.575.421.174)	(55.135.814.121.716)	(73.018.761.299.458)	132,43

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Rp265.664.326.554

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp265.664.326.554** dan **Rp15.860.408.652.182**. Penjelasan atas pos-pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi atas nilai persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp1.858.337.865**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi
(Rp1.767.095.521)

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas nilai reklasifikasi sampai dengan periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **(Rp1.767.095.521)** dan **(Rp936.795.743)**

Koreksi atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi yang timbul atas nilai transaksi reklasifikasi aset tetap/persediaan/aset lainnya.

Nilai Koreksi atas Reklasifikasi sebesar (Rp1.767.095.521) di tiap Eselon I adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / Penurunan	%
Ditjen Pemberdayaan Sosial	1	-	1	0,00
Ditjen Rehabilitasi Sosial	(1.740.803.650)	(5.382.000)	(1.735.421.650)	32.244,92
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	-	(936.063.743)	936.063.743	-100,00
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	(26.291.872)	4.650.000	(30.941.872)	-665,42
Total	(1.767.095.521)	(936.795.743)	(830.299.778)	88,63

Rincian nilai Koreksi atas Reklasifikasi adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp1 pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dikarenakan adanya perbedaan nilai termin pecahan 2 digit antara nilai kontrak sebesar Rp1.280.198.787 dengan realisasi senilai Rp1.280.198.786
2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp1.740.803.650) dengan rincian:

Satker	Nilai
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Kartini" Di Temanggung	42.502.943
Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "Budhi Dharma" Di Bekasi	87.322.081
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Handayani" di Jakarta	(826.873.459)
Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila "Mulya Jaya" di Jakarta	(711.627.295)
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Paramita" Di Mataram	(332.127.920)
Total	(1.740.803.650)

3. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp26.291.872) yang merupakan koreksi atas Revaluasi Aset Tetap yang merupakan transaksi Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi.



Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp277.669.193.080

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing **Rp277.669.193.080** dan **Rp15.421.011.225.108**

Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap di setiap Unit Kerja Eselon I dapat dirinci sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	2.753.396.591	72.907.753.000	(70.154.356.409)	(96,22)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	234.892.961.451	198.672.942.528	36.220.018.923	18,23
Ditjen Rehabilitasi Sosial	29.130.601.918	(128.188.029.452)	157.318.631.370	(122,72)
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	(4.744.659.000)	4.744.659.000	(100,00)
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	10.892.233.120	21.835.367.000	(10.943.133.880)	(50,12)
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	15.260.527.851.032	(15.260.527.851.032)	(100,00)
Total	277.669.193.080	15.421.011.225.108	(15.143.342.032.028)	(98,20)

Revaluasi Aset Tetap pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2020 terdapat pada satker berikut:

KODE	NMSATKER	Total
027.01.440140	BIRO UMUM SEKJEN KEMENTERIAN SOSIAL	(2.753.396.591)
027.03.029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	19.358.000
027.03.039161	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	(71.002.117)
027.03.049014	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	(7.219.500)
027.03.069143	DINAS SOSIAL ACEH	(830.864.972)
027.03.089141	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	148.671.000
027.03.189141	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	(28.096.776)
027.03.209115	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(8.621.000)
027.03.219096	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	145.889.560
027.03.440213	DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	(234.261.075.646)
027.04.030952	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	2.373.831.000
027.04.031558	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	(388.137.000)



027.04.070161	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "BAHAGIA" DI MEDAN	(9.941.885.000)
027.04.285138	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	4.049.914.158
027.04.369110	BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAH	(1.618.706.000)
027.04.369131	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	(2.384.163.000)
027.04.369148	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	(1.728.442.000)
027.04.369169	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	(2.182.294.000)
027.04.369173	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	57.081.000
027.04.369600	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	2.381.026.000
027.04.426644	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	186.211.094
027.04.426650	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMIYA" DI TABANAN	(472.213.000)
027.04.426675	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBAI" DI PEKANBARU	177.486.840
027.04.426690	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	1.160.966.571
027.04.426710	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	(57.247.000)
027.04.426741	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	(14.309.071)
027.04.426763	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	(5.084.986.000)
027.04.426772	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTASENA" DI MAGELANG	979.335.000
027.04.426808	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	(52.039.654)
027.04.440250	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	(4.598.530.000)
027.04.526085	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "PARAMITA" DI MATARAM	(1.133.988.000)
027.04.560504	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "CIUNG WANARA" DI BOGOR	2.937.668.000
027.04.560511	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	(3.000.164.000)
027.04.560525	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	(3.187.407.000)
027.04.560550	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "EFFATA" DI KUPANG	(8.414.315.000)
027.04.627343	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI"	4.890.804.000
027.04.630842	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	96.866.000



027.04.690243	LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	(6.079.898.000)
027.04.690250	LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHAI" DI KENDARI	2.947.617.144
027.04.690264	LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "MINAULA" DI KENDARI	(1.030.685.000)
027.11.369070	POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL (POLTEKESOS) BANDUNG	(2.992.513.120)
027.11.369180	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	(2.328.045.000)
027.11.369202	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS)	455.506.000
027.11.369283	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) PADANG	(3.010.639.000)
027.11.369965	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR	344.473.000
027.11.578995	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) JAYAPURA	(3.361.015.000)
Total		(277.669.193.080)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
 (Rp3.786.097.923)

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **(Rp3.786.097.923)** dan **(Rp12.754.363.462)**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi sebesar (Rp3.786.097.923) di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	1.208.293.386	(91.529.911)	1.299.823.297	-1.420,11
Inspektorat Jenderal	-	-	-	0,00
Ditjen Pemberdayaan Sosial	(17.969.347.114)	(474.090.557)	(17.495.256.557)	3.690,28
Ditjen Rehabilitasi Sosial	12.558.222.389	15.979.772.407	(3.421.550.018)	-21,41
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	172.458.619	(172.458.619)	-100,00
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	-	-	0,00
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	416.733.416	1.613.180.827	(1.196.447.411)	-74,17
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	(29.954.154.847)	29.954.154.847	-100,00
Total	(3.786.097.923)	(12.754.363.462)	8.968.265.539	-70,32

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Kementerian Sosial disebabkan karena adanya Koreksi Nilai Aset yang bukan karena revaluasi nilai serta Koreksi Ekuitas akibat Koreksi Revaluasi.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Kementerian Sosial terdiri dari:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(3.791.097.923)	(12.537.671.405)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	5.000.000	(216.692.057)
Jumlah	(3.786.097.923)	(12.754.363.462)



Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp3.791.097.923) per Eselon I adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sekretariat Jenderal	1.203.293.386	8.052.127
Inspektorat Jenderal	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	(17.969.347.114)	(474.090.557)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	12.558.222.389	16.105.715.289
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	163.504.073
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	416.733.416	1.612.330.827
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	(29.953.183.164)
Total	(3.791.097.923)	(12.537.671.405)

Rincian Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp5.000.000 sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sekretariat Jenderal	5.000.000	(99.582.038)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	-	(125.942.882)
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	-	8.954.546
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	-	850.000
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	(971.683)
Total	5.000.000	(216.692.057)

Koreksi Lain-lain

(Rp6.451.673.082)

E.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp6.451.673.082) dan Rp451.230.248.414

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Koreksi Lainnya senilai (Rp6.451.673.082) sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	(693.262)	(2.057.328)	1.364.066	-66,30
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	6.450.000	-	6.450.000	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	27.000.000	152.019.669.074	(151.992.669.074)	-99,98
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	11.000.000	299.212.636.668	(299.201.636.668)	-100,00
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	(6.495.429.820)	-	(6.495.429.820)	-
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	-	-	-
Total	(6.451.673.082)	451.230.248.414	(457.681.921.496)	-101,43



Rincian atas Koreksi Lain-Lain sebesar (Rp6.451.673.082) pada masing-masing Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal pada satuan kerja Sekretariat Jenderal senilai (Rp693.262) yang merupakan pengakuan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran Belanja Pegawai TA 2019 yang dibayarkan pada TA 2021
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp6.450.000 yang merupakan Kelebihan Pembayaran belanja barang non operasional lainnya (BOP) untuk pendamping PKH yang menerima tali asih SLRT tahun 2019 pada satuan kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada satuan kerja Dinas Sosial Sulawesi Selatan senilai Rp27.000.000 merupakan pengembalian atas temuan tali asih Tagana tahun 2019 terhadap 9 orang an. Andi A, Umar, Marlinawati, Suciati, Sumardi, Sudasman, Nur S M, Fachri Aditya, Munawarah M pada kegiatan PSKBA yang disetor bulan Januari 2021 sebesar @ Rp3.000.000 per orang.
4. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada satuan kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I senilai Rp11.000.000 yang merupakan Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga dikarenakan terdapat kewajiban atas insentif pendamping tahun anggaran 2019 yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan 11 pendamping tidak mengirim laporan.
5. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial pada satuan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebesar (Rp6.495.429.820) yang merupakan Belanja Sewa kepada PT. Telekomunikasi Indonesia yang masih harus dibayar yang pengerjaannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Transaksi Antar Entitas

Rp127.761.691.729.053

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp127.761.691.729.053** dan **Rp57.266.530.994.957** mengalami kenaikan sebesar Rp70.495.160.734.096 atau 123,10%

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, antar Bendahara Umum Negara, maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara.

Rincian Transaksi Antar Entitas di tiap Eselon I sebagai berikut:



Unit Kerja Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	404.065.852.502	432.968.915.576	(28.903.063.074)	(6,68)
Inspektorat Jenderal	33.174.780.721	47.979.915.694	(14.805.134.973)	(30,86)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	5.602.992.734.113	557.407.586.049	5.045.585.148.064	905,19
Ditjen Rehabilitasi Sosial	841.328.706.914	1.152.414.443.006	(311.085.736.092)	(26,99)
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	45.621.862.594.970	34.668.585.505.367	10.953.277.089.603	31,59
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	74.907.249.646.501	19.720.004.933.200	55.187.244.713.301	279,85
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.	351.017.413.332	687.169.696.065	(336.152.282.733)	(48,92)
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	-	-	-
Total	127.761.691.729.053	57.266.530.994.957	70.495.160.734.096	123,10

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	130.113.500.626.991	57.636.484.135.381
Diterima dari Entitas Lain	(2.463.964.201.084)	(516.740.242.519)
Transfer Keluar	(183.533.292.531)	(718.750.608.475)
Transfer Masuk	175.509.708.953	714.040.295.270
Pengesahan Hibah Langsung	120.357.912.113	152.047.168.600
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(179.025.389)	(549.753.300)
Total	127.761.691.729.053	57.266.530.994.957

E.5.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2020, nilai DKEL sebesar **Rp130.113.500.626.991** sedangkan untuk nilai DDEL sebesar **(Rp2.463.964.201.084)**.

Realisasi Belanja (Netto) Kementerian Sosial RI adalah sebesar **Rp130.288.443.238.820** sehingga terdapat selisih dengan DKEL sebesar **Rp174.942.611.829**. Penjelasan atas Selisih Realisasi Belanja (Netto) dan DKEL dikarenakan terdapat Belanja Bantuan Sosial yang berasal dari Hibah Langsung Dalam Negeri senilai Rp173.093.334.960 dan Belanja Barang yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri senilai Rp1.849.276.869 dengan rincian sebagai berikut:



Akun	Uraian Akun	Realisasi Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja (Netto)
Hibah Langsung Dalam Negeri				
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	10.502.512.000	-	10.502.512.000
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	83.468.240.000	140.007.000	83.328.233.000
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	75.342.582.960	-	75.342.582.960
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	3.780.000.000	-	3.780.000.000
Jumlah Belanja Bantuan Sosial yang berasal dari Hibah Dalam Negeri		173.093.334.960	140.007.000	172.953.327.960
Hibah Langsung Luar Negeri				
521211	Belanja Bahan	55.274.500	-	55.274.500
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	90.562.000	-	90.562.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	257.388.111	-	257.388.111
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.546.000	-	6.546.000
522151	Belanja Jasa Profesi	25.900.000	-	25.900.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	213.750.000	-	213.750.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	214.434.000	-	214.434.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	402.237.000	-	402.237.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	420.581.258	-	420.581.258
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	157.518.000	-	157.518.000
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.086.000	-	5.086.000
Jumlah Belanja Barang yang berasal dari Hibah Luar Negeri		1.849.276.869	-	1.849.276.869
Total		174.942.611.829	140.007.000	174.802.604.829

Realisasi Pendapatan (Netto) Kementerian Sosial RI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp2.463.964.201.084** sehingga tidak terdapat selisih dengan DDEL.

E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer Keluar dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **(183.533.292.531)** dan **Rp175.509.708.953**

Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Terdapat selisih antara Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk periode sampai 31 Desember 2020 sebesar (Rp8.023.583.578) yang terdapat pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam senilai dikarenakan terdapat Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial terkait pengiriman barang berupa paket *Family Kit* sebanyak 20.000 yang dikirimkan ke Gudang Regional Palembang sebanyak 10.000 paket dan Gudang Regional Makassar sebanyak 10.000 paket. Barang tersebut dikirim pada akhir Desember 2020 dan baru diterima di Palembang dan Makassar pada bulan Januari 2021.



E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung,

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp120.357.912.113**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung Kementerian/Lembaga dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

a. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp120.357.912.113 terdapat pada:

Nama Satker	Nilai
Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	112.443.287.100
Balai Literasi Braille Indonesia "Abiyoso" di Cimahi	615.118.000
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Wyata Guna" di Bandung	69.405.000
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	5.177.034.402
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Ciung Wanara" di Bogor	21.730.000
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin	2.031.337.611
Total	120.357.912.113

b. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar (Rp179.025.389) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satker Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

*Kenaikan/Penurunan
Ekuitas*

(Rp127.219.365.567)

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **(Rp127.219.365.567)** dan **Rp17.991.125.525.423**

Kenaikan/ Penurunan Ekuitas di setiap Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

UKEI	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	29.105.076.133	102.771.528.083	(73.666.451.950)	-71,68
Inspektorat Jenderal	255.283.099	1.587.885.115	(1.332.602.016)	-83,92
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	136.139.748.970	256.378.535.999	(120.238.787.029)	-46,90
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	4.941.402.093	(121.210.140.807)	126.151.542.900	-104,08
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	39.891.738.857	256.682.340.864	(216.790.602.007)	-84,46
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	(364.230.488.615)	2.131.563.916.655	(2.495.794.405.270)	-117,09
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	26.677.873.896	132.777.763.329	(106.099.889.433)	-79,91
Satker Konsolidasi Kementerian Sosial	-	15.230.573.696.185	(15.230.573.696.185)	-100,00
Total	(127.219.365.567)	17.991.125.525.423	(18.118.344.890.990)	-100,71



Ekuitas Akhir

Rp23.842.273.431.276

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp23.842.273.431.276** dan **Rp23.969.492.796.843** mengalami penurunan sebesar (Rp127.219.365.567) atau (0,53%)

Ekuitas Akhir di setiap Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

UKEI	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	4.097.783.508.079	4.068.678.431.946	29.105.076.133	0,72
Inspektorat Jenderal	3.577.736.223	3.322.453.124	255.283.099	7,68
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	7.510.635.518.812	7.374.495.769.842	136.139.748.970	1,85
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	7.519.551.279.376	7.514.609.877.283	4.941.402.093	0,07
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	856.394.569.665	816.502.830.808	39.891.738.857	4,89
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	1.802.044.522.219	2.166.275.010.834	(364.230.488.615)	(16,81)
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	2.052.286.296.902	2.025.608.423.006	26.677.873.896	1,32
Total	23.842.273.431.276	23.969.492.796.843	(127.219.365.567)	(0,53)



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Perubahan Menteri Sosial

Pada tanggal 7 Desember 2020 terjadi penunjukan Menteri Sosial *Ad Interim* atas nama Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-928/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020 tentang Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Menteri Sosial *Ad Interim*.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 terjadi pergantian jabatan Menteri Sosial dari Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P selaku Menteri Sosial *Ad Interim* kepada Dr. Ir. Tri Rismaharini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

F.2 Perubahan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial

1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

Landasan Yuridis UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah khususnya bagian lampiran huruf F, Pembagian urusan pemerintahan bidang sosial: Pemberdayaan sosial KAT dilakukan oleh Kabupaten. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial pada tahun anggaran 2020 mempunyai 16 Satker Tugas Pembantuan pada program Direktorat PKAT (Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil) di Kabupaten yaitu antara lain;

No	Kode Satker	Nama Satker
1	091327	091327 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
2	190637	190637 DINAS SOSIAL KABUPATEN TANA TORAJA
3	205402	205402 DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON SELATAN
4	210446	210446 DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU
5	230459	230459 DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA
6	230574	230574 Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa
7	250163	250163 DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA
8	251422	251422 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ASMAT
9	251739	251739 DINAS SOSIAL KABUPATEN KEEROM
10	253008	253008 DINAS SOSIAL KABUPATEN DOGIYAI
11	280907	280907 DINAS SOSIAL KABUPATEN PULAU TALIABU
12	330834	330834 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA
13	340458	340458 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
14	427895	427895 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU
15	681555	681555 DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA
16	681562	681562 DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Pembentukan Satuan Kerja di Kabupaten adalah karena Pemerintah Kabupaten menguasai wilayah kerja, mengerti kompleksitas masalah, kebutuhan dan intervensinya di lokasi KAT. Selain itu, kinerja Pokja juga lebih efektif di Kabupaten serta dukungan sharing APBD II.

Pada tahun 2020, terdapat penonaktifan satuan kerja Tugas Pembantuan sebagai berikut:

Kode Satker	Uraian Satker
159117	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
359904	Dinas Sosial Kabupaten Nunukan
200365	Dinas Sosial Kabupaten Muna
160256	Dinas Sosial Kabupaten Paser

Terdapat Penambahan Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kode Satuan Kerja 209115

2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

a. Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya “Pangurangi” Takalar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdapat penambahan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 392/M.KT.01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Usulan Pembentukan UPT Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang selanjutnya disebut LRSKP NAPZA mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya yaitu Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Pangurangi” di Takalar.

b. Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV “Pangurangi” Takalar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, diubah sebagai berikut : Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV “Pangurangi” di Takalar selanjutnya disebut LRSODH “Pangurangi” di Takalar, adalah UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya

F.3 Satuan Kerja Tidak Aktif Bersaldo

Perlu dilakukan penyerahan Aset / Hibah dan likuidasi terhadap Satker-Satker yang sudah tidak aktif atau sudah tidak mendapatkan Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan, sehingga dalam pelaporan pada tingkat Eselon I dan Kementerian hanya akan memunculkan Satker-Satker yang masih mendapatkan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan saja. Pada data Erekon masih terdapat Satker Inactive Bersaldo antara lain:



No	BAES1	KDSATKER	NMSATKER	KODE	AKUN	RPHREAL
1	02703	359904	DINAS SOSIAL KABUPATEN NUNUKAN	TP	117129	619.075.600
2	02703	039161	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	TP	133111	-
	02703	039161	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	TP	137211	-
3	02703	029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	TP	133111	122.462.000
	02703	029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	TP	137211	9.704.226
4	02703	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	TP	132111	205.719.000
	02703	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	TP	137111	195.433.050

F.4 Pemulihan PAGU Anggaran

Pemulihan PAGU Anggaran merupakan suatu mekanisme untuk menyesuaikan sisa PAGU DIPA dari nilai pengembalian belanja berdasarkan SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) untuk dapat digunakan kembali dalam pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja. Atas adanya pemulihan PAGU tersebut, tidak menambah anggaran pada satuan kerja, melainkan hanya menambah sisa PAGU anggaran pada periode berjalan. Pada periode tahun anggaran 2020, terdapat beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang melakukan pemulihan PAGU dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Sesuai dengan surat persetujuan dari KPPN Jakarta VII Nomor S-2858/WPB.12/KP.07/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa PAGU DIPA 440121, satuan kerja Sekretariat Jenderal melakukan pemulihan PAGU dari SSPB dengan rincian sebagai berikut:

Kode Billing : 820200316656691
 NTPN : A0D231JNEPKKMN1J
 Tanggal : 17 Maret 2020
 Akun : 524119
 Nominal : Rp28.548.100

2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat beberapa satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang melakukan pemulihan PAGU dengan rincian sebagai berikut:

a. BRSAMPK “Antasena” Magelang

Satuan kerja BRSAMPK “Antasena” Magelang melakukan pemulihan PAGU untuk akun Belanja Perjalanan Biasa (524111) dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal SSPB	NTPN	Akun	Nominal
1	17 April 2020	46BF561QTUJ1M68	524111	11.400.000
2	17 April 2020	2E1D53CIEESCQN9F	524119	65.360.000
Total				76.760.000

b. BRSPDM “Phala Martha” Sukabumi

Satuan kerja BRSPDM “Phala Martha” melakukan pemulihan PAGU untuk akun Belanja Perjalanan Biasa (524111) atas SSPB dengan nilai total Rp11.800.000 dengan rincian sebagai berikut:



No	Tanggal SSPB	NTPN	Akun	Nominal
1	31 Maret 2020	A53A80N9UV2MHLO2	524111	11.550.000
2	18 Desember 2020	2EAA71JNEQFFT1MP	524111	250.000
Total				11.800.000

3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan surat dari KPPN Jakarta VII Nomor S-3490/WPB.12/KP.07/2020 tanggal 19 Oktober 2020, terdapat pemulihan PAGU pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga untuk akun belanja barang (524111) dengan total sebesar Rp133.726.000.

4. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat pemulihan PAGU pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I

Pada periode tahun anggaran 2020, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I melakukan pemulihan pagu atas pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang (575111) sebesar Rp345.282.000.000 serta atas pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang – Penanggulangan Pandemi COVID-19 (575114) sebesar Rp167.788.500.000.

b. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II

Pada periode tahun anggaran 2020, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II melaksanakan pemulihan pagu atas pengembalian belanja bantuan sosial untuk akun Bantuan Sosial Tunai COVID (575114) gelombang 1 periode April s.d Juni 2020 sebesar Rp269.005.200.000.

c. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III

Pada periode tahun anggaran 2020 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III melaksanakan pemulihan PAGU atas pengembalian belanja Bantuan Sosial Tunai (575114) Gelombang I periode Bulan Apri-Juni senilai Rp192.852.000.000 serta atas pengembalian belanja Bantuan Sosial Program Sembako (575111) senilai Rp23.607.000.

5. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

a. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

Pada tahun anggaran 2020, terdapat beberapa transaksi pemulihan PAGU anggaran pada satuan kerja Pusbangprof Peksos dan Pensos dengan rincian sebagai berikut:

1) 2259.002.001.111.B.524111 sebesar Rp502.472.000 yang telah disahkan oleh kementerian keuangan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor S-3338/WPB.12/KP.07/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Kode Billing : 820200326352973

NTPN : DDA163CIEEPMOK2D

Tanggal : 30 Maret 2020

Akun : 524111

Nominal : Rp502.472.000



- 2) 2259.002.001.111.B.524111 sebesar Rp184.074.000 yang telah disahkan oleh kementerian keuangan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor S-3339/WPB.12/KP.07/2020 tanggal 9 Oktober 2020.
Kode Billing : 820200326353101
NTPN : AB20D1JNEPKTUK6D
Tanggal : 30 Maret 2020
Akun : 524111
Nominal : Rp184.074.000

- 3) 2259.002.001.111.B.524111 sebesar Rp106.200.000 yang telah disahkan oleh kementerian keuangan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor S-3340/WPB.12/KP.07/2020 tanggal 9 Oktober 2020.
Kode Billing : 820200326354037
NTPN : F66316U8DP38CL3L
Tanggal : 30 Maret 2020
Akun : 524111
Nominal : Rp106.200.000

b. BBPPKS Makassar

Pada tahun anggaran 2020, terdapat beberapa transaksi pemulihan PAGU anggaran pada satuan kerja BBPPKS Makassar dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja barang sebesar Rp136.530.000 atas pengembalian belanja perjalanan dinas Training Need Assessment (TNA) sesuai dengan surat pemberitahuan atas pelaksanaan penyesuaian sisa PAGU DIPA dari Kepala KPPN Makassar II No. S-609/WPB.25/KP.02/2010 tanggal 5 Mei 2020.
- 2) Belanja modal sebesar Rp96.027.556 atas pengembalian belanja modal sesuai dengan surat pemberitahuan atas pelaksanaan penyesuaian sisa PAGU DIPA dari Kepala KPPN Makassar II No. S-2348/WPB.25/KP.02/2020 tanggal 19 November 2020.

F.5 Informasi Bantuan Sosial Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pada tahun 2020 terjadi penyebaran wabah COVID-19 secara luas menyebabkan krisis kesehatan secara nasional. Pemerintah kemudian melakukan berbagai langkah untuk *flattening the curve* atas penyebaran virus COVID-19 yang memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor-sektor informal. Tentunya hal ini akan berakibat pada kinerja ekonomi yang menurun. Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan *extraordinary*. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan pada perbaikan sisi demand, khususnya pada kluster perlindungan sosial melalui Kementerian Sosial. Adapun beberapa program yang dilakukan Kementerian Sosial dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

Program Bantuan Sosial Beras (BSB)

Bantuan Sosial Beras (BSB) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama pandemi COVID-19. Sasaran atau target dari program Bantuan Sosial Beras ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan keluarga miskin dan rentan serta terdaftar dalam DTKS yang sangat terdampak oleh akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan alokasi bantuan Setiap Keluarga Penerima Manfaat PKH memperoleh bantuan sebanyak 15kg/KPM/Bulan atau dengan total sebanyak 45.000 ton beras dengan perhitungan 3 bulan x 15kg x 10.000.000 KPM. Adapun beberapa mitra kerja dalam penyediaan beras maupun penyaluran bantuan adalah sebagai berikut:

a. Penyedia Beras

Berdasarkan Perpres No. 48 Tahun 2016 yang berbunyi penugasan Perum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Dalam hal ini, Perum BULOG dipercaya untuk menyediakan beras untuk Program Bantuan Sosial Beras ini dengan standar kualitas Medium. Penunjukan Perum BULOG juga bertujuan untuk menyerap stok beras medium yang terdapat di gudang sehingga Perum BULOG dapat menyerap produk petani pada masa panen raya tahun 2020. Selain itu, Perum BULOG dipercaya karena memiliki gudang dengan stok beras medium yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia.

b. Penyalur atau *Transporter*

Untuk mempermudah dan mempercepat proses pendistribusian, maka proses penyaluran dibagi menjadi dua wilayah sebagai berikut:

- 1) Wilayah I dengan total KPM PKH sebanyak 4.934.894 orang serta jumlah beras yang disalurkan sebanyak 222.070.230 kg didistribusikan oleh Transporter PT. Bhandha Ghara Reksa (PT. BGR), dengan rincian:

No	Provinsi	KPM PKH	Beras (Kg)
1	ACEH	272.898	12.280.410
2	SUMATERA UTARA	455.289	20.488.005
3	SUMATERA BARAT	182.902	8.230.590
4	RIAU	163.356	7.351.020
5	KEPULAUAN RIAU	39.300	1.768.500
6	JAMBI	104.239	4.690.755
7	LAMPUNG	464.120	20.885.400
8	JAWA BARAT	1.737.884	78.204.780
9	DKI JAKARTA	108.422	4.878.990
10	BANTEN	317.239	14.275.755
11	DIY	204.334	9.195.030
12	KALIMANTAN BARAT	159.635	7.183.575
13	KALIMANTAN SELATAN	95.421	4.293.945
14	KALIMANTAN TENGAH	49.203	2.214.135
15	KALIMANTAN TIMUR	65.952	2.967.840
16	KALIMANTAN UTARA	14.665	659.925
17	NTT	363.140	16.341.300
18	MALUKU	101.868	4.584.060
19	MALUKU UTARA	35.027	1.576.215
TOTAL		4.934.894	222.070.230

- 2) Wilayah II dengan total KPM PKH 5.065.106 orang serta jumlah beras yang disalurkan sebanyak 227.929.770 kg didistribusikan oleh PT. Dos Ni Roha (PT. DNR), dengan rincian:



No	Provinsi	KPM PKH	Beras (Kg)
1	KEP. BANGKA BELITUNG	22.814	1.026.630
2	SUMATERA SELATAN	323.918	14.576.310
3	BENGKULU	85.484	3.846.780
4	JAWA TENGAH	1.560.744	70.233.480
5	JAWA TIMUR	1.729.485	77.826.825
6	BALI	86.566	3.895.470
7	NTB	339.588	15.281.460
8	SULAWESI SELATAN	323.247	14.546.115
9	SULAWESI BARAT	61.160	2.752.200
10	SULAWESI TENGAH	155.174	6.982.830
11	SULAWESI TENGGARA	118.932	5.351.940
12	SULAWESI UTARA	95.517	4.298.265
13	GORONTALO	61.091	2.749.095
14	PAPUA	62.569	2.815.605
15	PAPUA BARAT	38.817	1.746.765
TOTAL		5.065.106	227.929.770

2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Program Keluarga Harapan

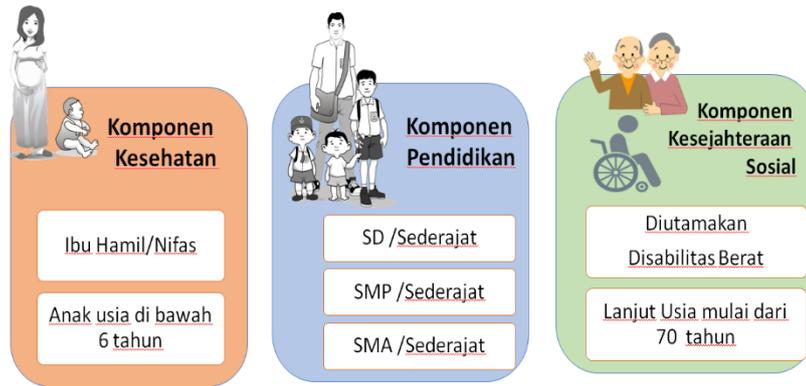
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program *conditional cash transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat, dimana penerima bantuan yang memenuhi syarat akan mendapat bantuan dana transfer dengan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain rutin menggunakan fasilitas kesehatan dan pendidikan. PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial yang akan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan dan Wilayahnya Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kriteria komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria komponen kesehatan:
 - a) Ibu hamil/menyusui; dan
 - b) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
- 2) Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a) Lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
 - b) Penyandang disabilitas berat.

Syarat Kepesertaan PKH



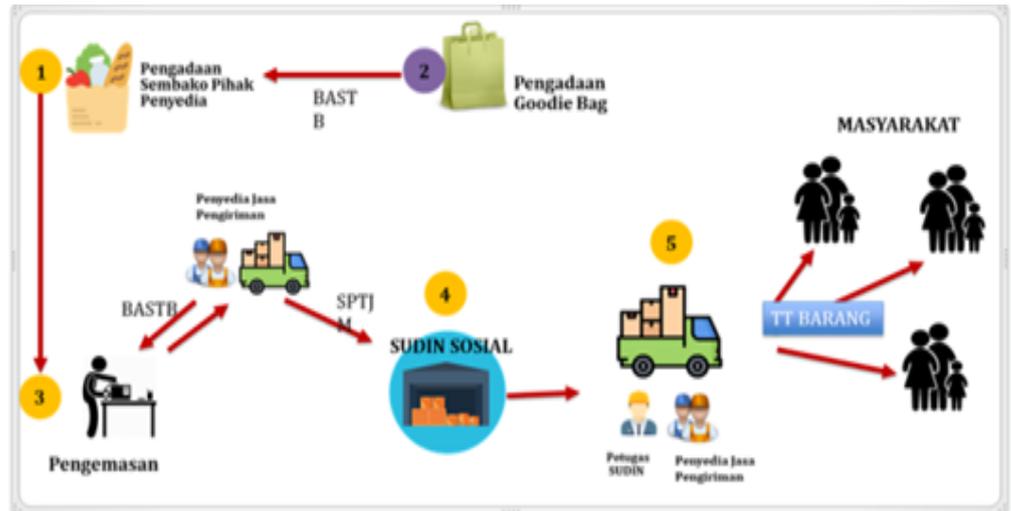
Pasal 3, 4, dan 5
 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan sosial PKH mulai tahun 2019 oleh Bank Penyalur: BNI 46, BRI, Mandiri dan BTN sudah terintegrasi dengan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) Kementerian Keuangan RI, yaitu aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitor transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang hak aksesnya diberikan kepada Kementerian Sosial dan Himbara melalui jaringan berbasis web. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening KPM	2. Sosialisasi dan Edukasi	3. Distribusi KKS	4. Penyaluran Bantuan	5. Penarikan Dana Bansos PKH	6. Rekonsiliasi Hasil Bansos PKH	7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bansos
1. Pembukaan rekening secara kolektif (<i>Bulk Account Opening</i>) 2. Cetak (perso) Kartu 3. Produksi PIN Mailer 4. Laporan hasil proses <i>Bulk Account Opening</i>	1. Sosialisasi Bansos non tunai kepada pendamping PKH 2. Sosialisasi Bansos Non Tunai PKH kepada Agen dan KPM oleh bank penyalur dan Kemensos. (<i>KPM barq</i>)	1. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN Mailer dari KP ke KC 2. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN Mailer dari KC kepada KPM 3. Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening dan surat pernyataan persetujuan atau kuasa untuk memberikan informasi nomor rekening dan data pribadi. 4. <i>Full</i> aktivasi 5. Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening	1. Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya 2. Pengajuan dana Ke KPPN 3. Pembuatan Surat Perintah pemindahbukuhan/ <i>Standing Instruction</i> (SI) ke Bank Penyalur Pusat 4. Pelaksanaan pemindahbukuhan/ <i>Standing Instruction</i> (SI) 5. Laporan hasil pemindahbukuhan sebagaimana dimaksud poin no.2	1. Dinas Sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan penarikan dana bansos PKH 2. Penarikan Dana oleh KPM	1. Rekonsiliasi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, ke tingkat pusat 2. Rekonsiliasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Provinsi, dan tingkat pusat berkoordinasi dengan Bank Penyalur	1. Laporan periodik setiap tahap penyaluran 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH 3. Analisa kecenderungan penyaluran bansos dari <i>e-PKH dashboard</i> 4. Analisa kecenderungan pengaduan terkait penyaluran bansos berdasarkan laporan <i>contact centre</i> PKH

b. Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek

Presiden melalui Kementerian Sosial memberikan Bantuan Sosial Sembako dalam rangka penanganan Corona virus disease (COVID-19). Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan melakukan penyediaan barang bantuan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Bantuan sosial sembako pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial diberikan kepada keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 di Jabodetabek dengan indeks nilai bantuan sebesar Rp300.000/keluarga/bulan.



MEKANISME PENYALURAN BANSOS SEMBAKO



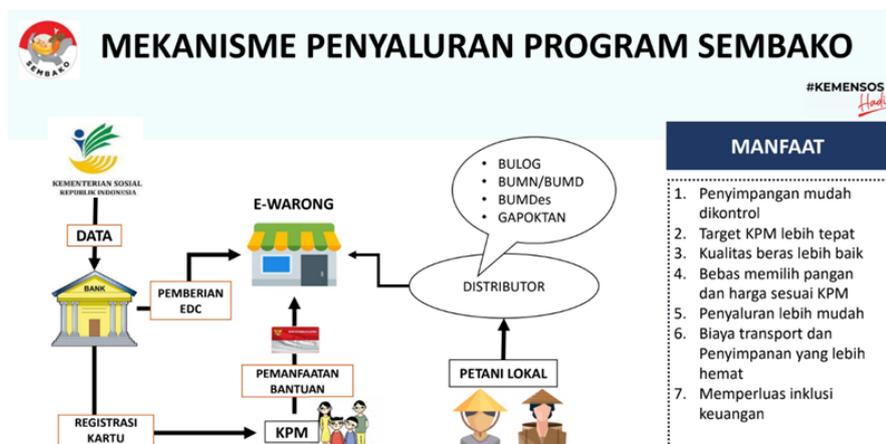
3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin

a. Program Kartu Sembako

Program Kartu Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Seperti halnya program BPNT, program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan.

Untuk program Sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lain. Bantuan program Sembako disalurkan melalui sistem perbankan. Bank penyalur adalah

Bank Himbara yang dilaksanakan oleh BNI, BRI, Mandiri dan BTN. Mekanisme Penyaluran Program Sembako dijelaskan dalam grafik berikut ini:



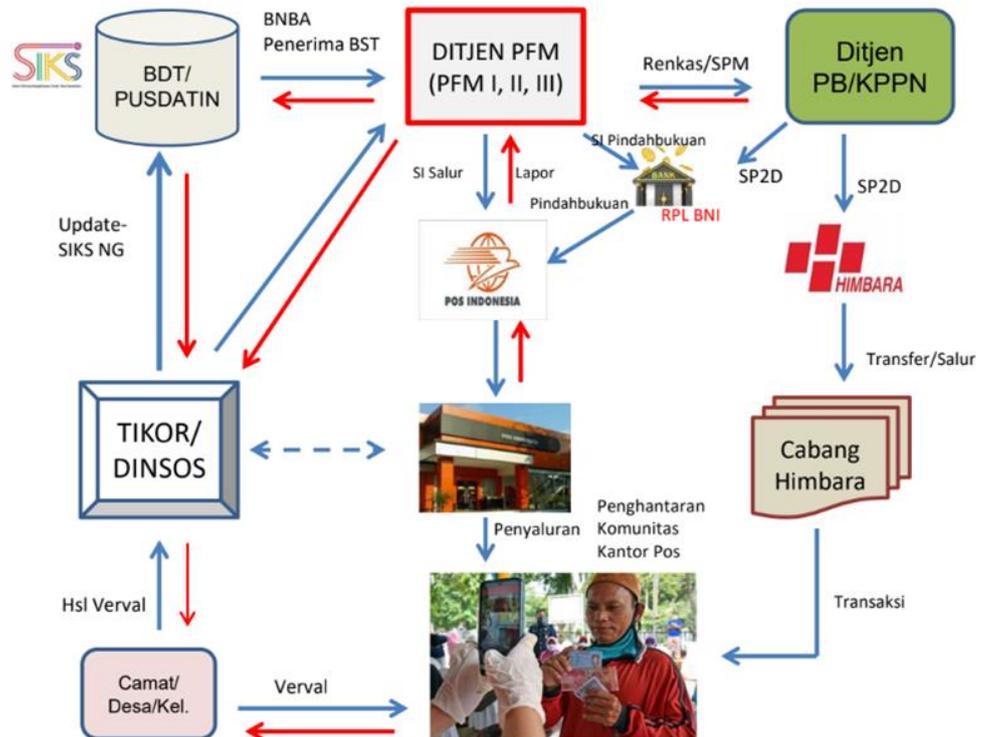
Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan/penambahan indeks Bansos Pangan Sembako untuk Bulan Maret dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/Huk/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besar Nilai, Dan Bahan Pangan Lokal Dalam penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020.

PRODUK KEBIJAKAN PROGRAM SEMBAKO		
PERMENSOS 20 Tahun 19 (Pasal 6 dan Pasal 23 Ayat 1)		Arahan Presiden RI Perlindungan Sosial dalam Penanganan COVID-19
KEPMENSOS 175/HUK/2019	»	KEPMENSOS 29/HUK/2020
Ditetapkan : 31 Desember 2019 Jumlah KPM : 15.200.000 Besaran Nilai : Rp150.000 {Nomenklatur : BPNT}		Ditetapkan : 24 Februari 2020 Jumlah KPM : 15.200.000 Besaran Nilai : Rp200.000 (+50RB) {Nomenklatur : P. SEMBAKO}
		KEPMENSOS 45/HUK/2020
		Ditetapkan : 7 April 2020 Jumlah KPM : 20.000.000 (+4,8JT) Besaran Nilai : Rp200.000 Dapat digunakan untuk Beli Sabun Cuci Tangan sejak Apr s.d Jul 2020 {Nomenklatur : P.SEMBAKO - Covid-19}
KEPDIRJEN 8/6/SK/HK.02.02/3/2020 Jumlah KPM : 15.200.000 > Wil I (181 KabKot) : 5.662.424 > Wil II (151 KabKot) : 5.232.555 > Wil III (182 KabKot) : 4.305.021		KEPDIRJEN 14/6/SK/HK.02.02/4/2020 Jumlah KPM : 20.000.000 > Wil I (181 KabKot) : 7.233.391 > Wil II (151 KabKot) : 7.096.337 > Wil III (182 KabKot) : 5.670.272

b. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah COVID-19. Bantuan ini diberikan kepada 9 juta KK dengan nilai bantuan sebesar Rp600.000/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020 dan Rp300.000/bulan yang diberikan selama 6 bulan yaitu mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020. Sasaran Bansos Tunai yaitu 9 Juta KK di 33 Provinsi Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor (Kec. Cibinong, Gn.Putri, Kelapa Nunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citeurup) karena wilayah tersebut menerima Bansos Sembako dari Direktorat Jenderal Lindungan dan Jaminan Sosial. Kriteria penerima Bansos Tunai adalah KK yang telah tercatat dalam Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui 2 cara yaitu pertama; Penyaluran dilakukan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (keluarga Penerima Manfaat). Kedua; Penyaluran Bansos Tunai dilakukan oleh PT POS Indonesia melalui Salur BST (Bansos Tunai) di Kantor Pos, Salur BST di tingkat Komunitas, dan Salur Bansos Tunai langsung ke tempat tinggal. Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah sebagai berikut:



c. Bantuan Sosial Tunai (BST) Non PKH

Bantuan Sosial Tunai (BST) Non PKH adalah bantuan berupa uang tunai senilai Rp500.000 yang diberikan kepada KPM Program Sembako non PKH dalam rangka penanganan Dampak COVID-19 (hanya sekali penyaluran) dan disalurkan melalui Bank Himbara yakni Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Bank Mandiri.

PRODUK KEBIJAKAN BANSOS TUNAI		
PERPPU 1 Tahun 2020 (BS Sembako/Tunai) KEPMENSOS 54/HUK/2020 Ditetapkan : 16 April 2020 Lokasi diluar DKI Jakarta, Bogor (Kec: Cibinong, Gunung Putri, Klapanunggal, Bojong Gede, Jonggol, Cileungsi, Citeurep), Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi (Nomenklatur : BST)	KEPDIRJEN 16 or 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 Jumlah KPM : 9.000.000 Besaran Nilai : 600.000 (I s.d III) Lokasi : Seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta dst Penyaluran : April s.d Juni	KEPDIRJEN 30/6/SK/HK.02.02/8/2020 Jumlah KPM : 9.000.000 B. Gelombang 2 1) Besaran Nilai : 300.000 (IV s.d IX) Lokasi : Seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta dst Sumber Data : Non-Program SEMBAKO Non-PKH Penyaluran : Juli s.d Desember
	KEPDIRJEN 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 Jumlah KPM : 9.000.000 A. Gelombang 1 Besaran Nilai : 600.000 (I s.d III) B. Gelombang 2 Besaran Nilai : 300.000 (IV s.d IX) Lokasi : Seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta dst Penyaluran : April s.d Desember	2) Besaran Nilai : 500.000 (1x) Lokasi : SELURUH INDONESIA Sumber Data : KPM Program SEMBAKO Non-PKH Penyaluran : Agustus s.d September

F.6 Identifikasi Alokasi Anggaran dan Realisasi PC-PEN

Identifikasi atas alokasi anggaran dan realisasi PC-PEN dimaksudkan untuk menghimpun seluruh informasi alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi merupakan belanja dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC – PEN. Jurnal penyesuaian dilakukan terhadap alokasi dan realisasi yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19 untuk menyajikan informasi beban penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC-PEN terkait secara wajar dalam laporan keuangan. Hasil identifikasi baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan akun khusus COVID-19 pada Kementerian Sosial sebagaimana disajikan dalam tabel berikut secara bruto:

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi Bruto (Kas)	Keterangan
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	521131	25.174.066.000	24.361.876.917	-
2	521241	2.112.570.710.720	2.079.512.451.298	-
3	521841	7.717.249.000	7.429.130.080	-
4	522192	25.661.859.000	24.590.525.417	-
5	523114	141.710.000	138.268.500	-
6	524115	19.537.331.000	18.600.575.283	-
7	526321	9.252.250.000	9.238.750.000	-
8	526322	34.601.247.000	34.264.774.348	-
9	532119	988.950.000	987.600.000	-
10	533119	1.014.000.000	1.011.448.264	-
11	571114	125.000.000	125.000.000	Secara substansi merupakan bantuan sosial reguler kemandirian
12	573115	4.505.850.000.000	4.505.850.000.000	-
13	574114	8.281.736.500.000	8.281.736.500.000	-
14	575114	36.639.126.000.000	36.528.892.725.077	-
15	576115	6.732.836.600.000	6.727.346.068.000	-
B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	521211	56.052.000	53.786.000	Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
2	521213	55.500.000	49.800.000	Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
3	521219	18.250.000.000	12.462.850.950	Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
4	574111	28.432.249.500.000	28.432.249.479.000	Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
5	575111	42.590.761.689.480	41.954.946.900.000	Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
TOTAL		129.437.706.214.200	128.643.848.509.134	

Selanjutnya penjelasan atas realisasi **Belanja Bantuan Sosial** dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Beras (BSB)

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Beras pada satuan kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat telah terealisasi sebesar Rp4.505.850.000.000 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi (Bruto)		
				Akun Khusus COVID-19	Akun Reguler	Total Realisasi
1	573115	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi Covid-19	4.505.850.000.000	4.505.850.000.000	-	4.505.850.000.000
TOTAL			4.505.850.000.000	4.505.850.000.000	-	4.505.850.000.000

2. Paket Sembako Jabodetabek

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Paket Sembako Jabodetabek pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial terealisasi sebesar Rp6.727.296.068.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi (Bruto)		
				Akun Khusus COVID-19	Akun Reguler	Total Realisasi
1	576115	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi Covid-19	6.732.786.600.000	6.727.296.068.000	-	6.727.296.068.000
TOTAL			6.732.786.600.000	6.727.296.068.000	-	6.727.296.068.000

Dalam proses penyaluran Paket Sembako Jabodetabek ini terdapat kendala pada dokumen pendukung seperti rekapitulasi BAST dari vendor penyedia, hal tersebut terjadi karena penelusuran atas rekap BAST (Berita Acara Serah Terima) pada tahap 1 s.d. 6 yang belum rampung sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Catatan Barang Milik Negara sehingga persediaan yang sebenarnya barang tersebut telah disalurkan kepada masyarakat dan dibuktikan serta dikeluarkan sementara menggunakan data dukung dokumen BASTAP (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) melalui surat pernyataan. Adapun rincian perbandingan kelengkapan BAST dengan BASTAP:

No	Wilayah	Rekapitulasi BASTAP		Rekapitulasi BAST		Selisih	
		Paket	Nominal	Paket	Nominal	Paket	Nominal
1	DKI Tahap I	985.725	294.667.603.000	669.233	200.043.408.300	316.492	94.624.194.700
2	DKI Tahap II	946.905	279.336.975.000	946.905	279.336.975.000	-	-
3	DKI Tahap III	1.149.897	346.469.100.000	771.206	231.361.800.000	378.691	115.107.300.000
4	DKI Tahap IV	1.299.849	383.455.455.000	1.299.849	383.455.455.000	-	-
5	DKI Tahap V	1.300.132	390.039.600.000	623.832	187.149.600.000	676.300	202.890.000.000
6	DKI Tahap VI	1.296.510	388.953.000.000	569.462	170.838.600.000	727.048	218.114.400.000
7	Bodetabek Tahap I	685.543	204.117.225.000	119.333	35.799.900.000	566.210	168.317.325.000
8	Bodetabek Tahap II	510.311	150.541.745.000	510.311	150.541.745.000	-	-
9	Bodetabek Tahap III	550.000	165.000.000.000	162.017	48.605.100.000	387.983	116.394.900.000
10	Bodetabek Tahap IV	562.007	165.792.065.000	562.007	165.792.065.000	-	-
11	Bodetabek Tahap V	605.849	181.754.700.000	504.921	151.476.300.000	100.928	30.278.400.000
12	Bodetabek Tahap VI	600.000	180.000.000.000	266.732	80.019.600.000	333.268	99.980.400.000
13	Komunitas	935.940	280.782.000.000	309.774	92.932.200.000	626.166	187.849.800.000
Jumlah		11.428.668	3.410.909.468.000	7.315.582	2.177.352.748.300	4.113.086	1.233.556.719.700

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah rekapitulasi dokumen BAST dikurangi dengan jumlah rekapitulasi BASTAP pada tahap 1 s.d. 6 Bantuan Sembako Presiden terdapat selisih 4.113.086 paket senilai Rp1.233.556.719.700 yang sudah dibebankan tetapi baru dapat dibuktikan hanya melalui BASTAP (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) bahwa barang tersebut telah disalurkan sampai ke masyarakat oleh pihak vendor atau penyedia sembako dan surat pernyataan bahwa masih dalam proses melengkapi rekap BAST.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited 2020, Tim PSKBS dan Pejabat Pembuat Komitmen Dit. PSKBS telah mengumpulkan kekurangan Berita Acara Serah Terima dari Vendor Penyedia dan Vendor Pengiriman sejumlah 4.113.086 paket dengan nilai Rp1.233.556.719.700, namun belum dilakukan verifikasi terhadap dokumen BAST tersebut.

3. Program Keluarga Harapan

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada satuan kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga terealisasi sebesar Rp36.713.985.979.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi (Bruto)		
				Akun Khusus COVID-19	Akun Reguler	Total Realisasi
1	574114	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Covid-19	8.281.736.500.000	8.281.736.500.000	-	8.281.736.500.000
2	574111	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	28.432.249.500.000	-	28.432.249.479.000	28.432.249.479.000
TOTAL			36.713.986.000.000	8.281.736.500.000	28.432.249.479.000	36.713.985.979.000

Berdasarkan PMK No. 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan merupakan bagian dalam Program PEN, hal ini menyebabkan ketidaktepatan penggunaan akun sehingga akun Belanja Bantuan Sosial Reguler (574111) harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan / atau meralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) ke akun Belanja Bantuan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 (574114), namun demikian karena keterbatasan waktu sehingga revisi anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D tidak dapat dilakukan.

Mengacu pada surat edaran Kementerian Keuangan No. S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negera/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun pada lampiran IV, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga memutuskan untuk melakukan jurnal penyesuaian dari Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang (Reguler) menjadi Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp28.416.478.396.110 (jurnal dilakukan dengan nilai netto).

4. Program Kartu Sembako

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Program Kartu Sembako telah terealisasi sebesar Rp41.723.486.100.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi (Bruto)		
				Akun Khusus COVID-19	Akun Reguler	Total Realisasi
Direktorat PFM Wilayah I						
1	575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	15.574.932.648.120	-	15.241.505.000.000	15.241.505.000.000
Direktorat PFM Wilayah II						
2	575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	14.990.034.406.760	-	14.518.630.500.000	14.518.630.500.000
Direktorat PFM Wilayah III						
3	575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	12.025.794.634.600	-	11.963.350.600.000	11.963.350.600.000
TOTAL			42.590.761.689.480	-	41.723.486.100.000	41.723.486.100.000

PPK sepakat memasukkan Program Kartu Sembako sebagai bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan merujuk pada surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020. Namun demikian, sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan belum seluruh satker yang telah merealisasikan belanja PC PEN dengan tidak menggunakan akun-akun khusus PC PEN melakukan revisi anggaran

(DIPA/POK) dan/atau meralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D). Pada praktiknya di lapangan, terdapat kondisi tertentu sehingga revisi anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D tidak dapat dilakukan. Kondisi dimaksud meliputi:

- Satker tidak memiliki sisa PAGU anggaran yang cukup untuk direalokasi menjadi akun-akun PC PEN
- Ralat akun pada SPM/SP2D memerlukan pemisahan jenis belanja yang berbeda (2 digit akun yang berbeda).

Dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua ketidaktepatan penggunaan akun terkait PC PEN dapat dilakukan revisi anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D, dalam rangka penyajian pos-pos dalam laporan keuangan secara wajar serta penyajian informasi atas dampak PC PEN dalam laporan keuangan tahun 2020 secara memadai, satker dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat melakukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi akun yang tidak sesuai (akun non PC PEN) dan mencatat akun yang seharusnya (akun PC PEN).

Atas hal tersebut, Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III melakukan penyesuaian dengan koreksi antara beban dari akun Beban Bantuan Sosial untuk Penanganan Kemiskinan dalam Bentuk Uang (575111) menjadi akun Beban Bantuan Sosial untuk Penanganan Kemiskinan dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi COVID-19 (575114) dengan nilai total Rp39.395.597.722.066 (jurnal dilakukan dengan nilai netto).

5. Bantuan Sosial Tunai

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial Tunai telah terealisasi sebesar Rp37.316.169.825.077 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek sebesar Rp32.816.169.825.077

No	Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi (Bruto)		
				Akun Khusus COVID-19	Akun Reguler	Total Realisasi
Direktorat PFM Wilayah I						
1	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi Covid-19	12.578.648.400.000	12.742.341.000.000	231.460.800.000	12.973.801.800.000
Direktorat PFM Wilayah II						
2	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi Covid-19	10.836.963.000.000	11.006.280.300.000	-	11.006.280.300.000
Direktorat PFM Wilayah III						
3	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi Covid-19	8.723.514.600.000	8.836.087.725.077	-	8.836.087.725.077
TOTAL			32.139.126.000.000	32.584.709.025.077	231.460.800.000	32.816.169.825.077

2. Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Sembako Non PKH Rp4.500.000.000.000

No	Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi (Bruto)		
				Akun Khusus COVID-19	Akun Reguler	Total Realisasi
Direktorat PFM Wilayah I						
1	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi Covid-19	1.658.659.000.000	1.658.659.000.000	-	1.658.659.000.000
Direktorat PFM Wilayah II						
2	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi Covid-19	1.675.424.000.000	1.675.424.000.000	-	1.675.424.000.000
Direktorat PFM Wilayah III						
3	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi Covid-19	1.165.917.000.000	1.165.917.000.000	-	1.165.917.000.000
TOTAL			4.500.000.000.000	4.500.000.000.000	-	4.500.000.000.000

F.7 Pengungkapan atas Program Percepatan Penurunan Stunting

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun, Kementerian Sosial diharapkan untuk mengungkapkan PAGU dan realisasi atas kegiatan yang berkaitan dengan Program Percepatan Penurunan Stunting. Program percepatan penurunan stunting di Kementerian Sosial meliputi program pemberian bantuan tunai bersyarat pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan program bantuan sosial pangan pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Rincian PAGU dan realisasi dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Anggaran	Realisasi (Bruto)	%
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)
A	Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Sensitif)	51.706.225.689.480	50.838.950.100.000	98,32%
027 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
07	Jaminan Sosial Keluarga			
	001 Bantuan ibu hamil	182.724.000.000	182.724.000.000	100,00%
	Bantuan anak usia dini	8.932.740.000.000	8.932.740.000.000	100,00%
5873	Penanganan Fakir Miskin Wilayah I			
	003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial	15.574.932.648.120	15.241.505.000.000	97,86%
5874	Penanganan Fakir Miskin Wilayah II			
	002 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial	14.990.034.406.760	14.518.630.500.000	96,86%
5875	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III			
	003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial	12.025.794.634.600	11.963.350.600.000	99,48%
	TOTAL	51.706.225.689.480	50.838.950.100.000	98,32%

F.8 Informasi atas Penyesuaian Beban Bantuan Sosial Akhir Tahun

1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat PSPKKM

Pada satuan kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat terdapat dana dari bantuan sosial Program Kewirausahaan Sosial Tahun Anggaran 2020 yang gagal tersalurkan sampai dengan akhir periode anggaran 2020 sebesar Rp7.000.000 dan sudah tersalur di bulan Januari 2021. Atas sisa dana bantuan sosial tersebut telah dilakukan jurnal penyesuaian ke akun Dana Lainnya (163119)

b. Direktorat PSDBS

Pada satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial terdapat penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial dikarenakan terdapat ketidaktepatan penggunaan akun belanja yang membentuk peralatan mesin sebesar Rp4.081.502.000 serta persediaan sebesar Rp10.819.825.000 yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

a. BBRVPD Cibinong

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) diperoleh kesimpulan dan data dimana masih terdapat sisa dana ASPD Tahun 2020 pada Bank BRI yang tidak tersalurkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp100.989.118 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 masih berada di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Adapun nilai Rp100.989.118 tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu saldo atas Bantuan Sosial sebesar Rp80.000.000 dan Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp20.989.118. Tindak lanjut dari hasil

rekonsiliasi tersebut, Bank BRI melakukan pengembalian dana tersebut ke kas negara sesuai dengan e-billing yang diterbitkan sebesar Rp.100.989.118.

Selain itu terdapat juga pengembalian belanja bantuan sosial TA 2020 yang disetorkan pada tahun 2021 sebesar Rp564.000.000. Atas pengembalian tersebut telah diakui sebagai Piutang Lainnya pada Neraca tahun 2020.

b. BRSAMPK “Naibonat” Kupang

Pada satuan kerja BRSAMPK “Naibonat” Kupang terdapat pengembalian belanja bantuan sosial TA 2020 yang disetorkan pada tahun 2021 sebesar Rp2.000.000. Atas pengembalian tersebut telah diakui sebagai Piutang Lainnya pada Neraca tahun 2020.

c. BRSPDSN “Wyata Guna” Bandung

Pada satuan kerja BRSPDSN “Wyata Guna” Kupang terdapat pengembalian belanja bantuan sosial TA 2020 yang disetorkan pada tahun 2021 sebesar Rp2.000.000. Atas pengembalian tersebut telah diakui sebagai Piutang Lainnya pada Neraca tahun 2020.

3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat PSKBA

Pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam masih terdapat sisa saldo di RPL sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saldo RPL 182 DB pada Bank Mandiri Untuk Bansos MDRI per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp1.278.300.000 yang akan disalurkan pada tahun 2021;
- 2) Saldo RPL 182 Direktorat PSKBA untuk Bansos per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp468.600.000 pada Bank Negara Indonesia yang akan disalurkan tahun 2021

Atas saldo RPL tersebut telah dilakukan jurnal penyesuaian dengan mengakui Dana Lainnya pada Neraca tahun 2020.

b. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga terdapat penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial dengan mengakui Piutang Lainnya, adapun penjelasan atas penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setoran ke Kas Negara atas 1.346 KPM Non Eligible penyaluran bulan Juli-September 2020 senilai Rp28.181.876 pada Bank BRI yang disetor pada tanggal 22 Januari 2021 dengan kode NTPN 21F673CIENTJEL2D;
- 2) KKS Tidak Terdistribusi dan KPM tidak Bertransaksi ≥ 3 kali periode penyaluran per 31 Desember 2020 sebesar Rp362.382.299.121 dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

No	BANK PENYALUR	KKS Tidak Terdistribusi		KPM Tidak Bertransaksi ≥ 3 kali Periode Penyaluran		Jumlah	
		KKS	Nominal	KPM	Nominal	KPM	Nominal
1	BNI	38,263	52,152,088,000	36,635	66,741,891,851	74,898	118,893,979,851
2	BRI	28,529	18,783,841,960	83,810	152,272,155,392	112,339	171,055,997,352
3	MANDIRI	17,409	24,902,282,000	30,385	44,662,363,500	47,794	69,564,645,500
4	BTN	794	796,925,418	1,301	2,070,751,000	2,095	2,867,676,418
TOTAL		84,995	96,635,137,378	152,131	265,747,161,743	237,126	362,382,299,121

4. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin

Pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat dana bantuan sosial TA 2020 yang tidak dimanfaatkan oleh KPM senilai Rp1.718.759.261.341 dengan rincian sebagai berikut:



Kode Satker	Satuan Kerja	Keterangan	Nilai
418942	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I	Dana Bansos yang Tidak Dimanfaatkan Penerima Manfaat TA 2020	1.134.745.406.443
418943	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II	Dana Bansos yang Tidak Dimanfaatkan Penerima Manfaat TA 2020	278.812.041.655
418944	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH III	Dana Bansos yang Tidak Dimanfaatkan Penerima Manfaat TA 2020	305.201.813.243
Jumlah			1.718.759.261.341

Atas nilai tersebut telah dilakukan jurnal penyesuaian dengan mengakui Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Tahun 2020.

Selain itu, pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat dana bantuan sosial Program Kartu Sembako TA 2020 yang dimanfaatkan pada tahun 2021 oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat. Kronologi atas pengakuan tersebut berawal dari tanggal 25 Januari 2021, Program Sembako dicatat dan dilaporkan menggunakan akun 575114 (Belanja Bantuan Sosial-Penanganan Pandemi COVID-19). Atas hal tersebut, petunjuk pelaksanaannya mengacu pada PMK 43 Tahun 2020. Secara serentak PPK Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III mengeluarkan surat perintah Blokir Rekening per 25 Januari 2021 kepada Bank/Pos Penyalur.

Perihal tindakan tersebut, maka PPK Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III mulai menghitung dana yang dimanfaatkan/ ditransaksikan oleh penerima bansos sejak 1 s.d 25/26 Januari 2021 untuk dicatat dan dilaporkan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Satker	Satuan Kerja	Keterangan	Nilai
418942	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I	Dana Bansos TA 2020 yang Dimanfaatkan Penerima Manfaat pada tahun 2021	18.456.589.839
418943	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II	Dana Bansos TA 2020 yang Dimanfaatkan Penerima Manfaat pada tahun 2021	26.622.215.700
418944	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH III	Dana Bansos TA 2020 yang Dimanfaatkan Penerima Manfaat pada tahun 2021	20.056.267.515
Jumlah			65.135.073.054

F.9 Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Terdapat Hibah Langsung yang Belum Disahkan sebesar Rp7.175.000. Berdasarkan BAST penerimaan HTT/HTDP dari 13 propinsi selain Pusat (Dit. PSDBS) yang telah diterima dan teliti berdasarkan dokumen pendukung berupa SK Izin Undian Gratis Berhadiah, nilai keseluruhan yang Dit. PSDBS terima untuk diregister sebanyak Rp520.164.126. Nilai tersebut berbeda dengan nilai yang Dit. PSDBS terima atas rekomendasi BPK RI sebesar Rp527.339.126 atas jumlah HTT/HTDP yang belum diregister pada tahun anggaran 2019. Sehingga terdapat selisih nilai Audited atas Penerimaan Barang Persediaan yang bersumber dari HTT/HTDP tersebut sejumlah Rp7.175.000 dengan rincian sebagai berikut:

NO	AUDITED VERSI BPK			TL AUDITED VERSI PSDBS			SELISIH
	INSTANSI	UNIT	NILAI	INSTANSI	UNIT	NILAI	
1	RIAU	17	35.299.000	RIAU	17	33.139.000	(2.160.000)
2	YOGYAKARTA	88	48.515.000	YOGYAKARTA	88	43.115.000	(5.400.000)
3	BANGKA BELITUNG	1	13.500.000	BANGKA BELITUNG	1	13.850.000	350.000
4	SULAWESI SELATAN	68	126.414.367	SULAWESI SELATAN	68	126.449.367	35.000
		174	223.728.367		174	216.553.367	(7.175.000)

Perubahan nilai penerimaan HTT/HTDP dimaksud berasal dari 4 (empat) propinsi yaitu:

1) Propinsi Riau

Nilai keseluruhan atas barang unregister versi BPK Rp35.299.000 setelah ditelusuri berdasarkan Dokumen Penerimaan HTT/HTDP dari Dinas Sosial Propinsi Riau berjumlah Rp33.139.000 sehingga terdapat selisih nilai barang audited sejumlah Rp2.160.000.

Berdasarkan BAST Penerimaan HTT/HTDP dari Dinas Sosial Propinsi Riau Nomor : 466.2/BAST/DINSOS-PS/2020/6, tanggal 8 Mei 2020 (terlampir). Nilai tersebut berasal dari HTT/HTDP berupa Petite Blossom Tupperware dari penyelenggaraan UGB yang diselenggarakan oleh PT. Pancaseraya Permai (Mal Ciputra Seraya) di Pekanbaru dengan No. SK Izin Undian Gratis Berhadiah : 1220/HUK-UND/2016, tanggal 24 November 2016, dimana dalam SK tersebut tercantum nilai 1 unit barang Petite Blossom Tupperware 3 unit x @ 360.000, = 1.080.000 bukan 3 unit x @ 1.080.000, = 3.240.000.

2) Propinsi Yogyakarta

Nilai keseluruhan atas barang unregister versi BPK Rp48.515.000 setelah ditelusuri berdasarkan dokumen Penerimaan HTT/HTDP dari Dinas Sosial Propinsi Yogyakarta berjumlah Rp43.115.000 sehingga terdapat selisih nilai barang audited sejumlah Rp5.400.000.

Berdasarkan BAST Penerimaan HTT/HTDP dari Dinas Sosial Propinsi Yogyakarta Nomor 466/01775/V.1, tanggal 10 Februari 2020 (terlampir). Nilai tersebut berasal dari HTT/HTDP berupa Voucher Belanja dari penyelenggaraan UGB yang diselenggarakan oleh PT. Ramai Putrasejahtera di Yogyakarta dengan No. SK Izin Undian Gratis Berhadiah : 768/HUK-UND/2018 tanggal 13 Juli 2018, dimana dalam SK tersebut tercantum Voucher belanja Ramai dengan harga @ Rp150.000 sehingga 4 lembar x @ Rp150.000 = Rp600.000 bukan 4 lembar x @ Rp1.500.000 = Rp6.000.000.

3) Propinsi Bangka Belitung

Nilai keseluruhan atas barang unregister versi BPK Rp13.500.000 setelah ditelusuri berdasarkan BAST Penerimaan HTT/HTDP dari Dinas Sosial Propinsi Bangka Belitung Nomor : 001/BAST/PSDBS-DINSOS/2020, tanggal 10 Februari 2020 berjumlah Rp13.850.000 sehingga terdapat selisih lebih nilai barang audited sejumlah Rp350.000.

Nilai tersebut berasal dari HTT/HTDP berupa Sepeda Motor Honda Scoopy ESP Stylish (off the road) Tahun 2016 dari penyelenggaraan UGB yang diselenggarakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, dengan No. SK Izin Undian Gratis Berhadiah : 1030/HUK-UND/2016, tanggal 12 Oktober 2016.

4) Propinsi Sulawesi Selatan

Nilai keseluruhan atas barang unregister versi BPK Rp126.414.367 setelah ditelusuri berdasarkan BAST Penerimaan HTT/HTDP dari Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan berjumlah Rp126.449.367 sehingga terdapat selisih lebih nilai barang audited sejumlah Rp35.000.

F.10 Aset Tetap Renovasi dalam Proses Penghapusan

Aset Tetap Renovasi (ATR) pada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakwanan, dan Restorasi Sosial (KKKRS) yang berupa Renovasi di TMP Seroja, Dili Timor Leste, karena berupa Hibah ATR lintas negara sebesar Rp350.000.000, berupa renovasi di Taman Makam Pahlawan Seroja, Dili Timor Leste yang merupakan hibah ATR lintas negara. ATR tersebut harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang Dihilangkan oleh pihak Kementerian Sosial dengan pihak



Kementerian Provinsi c.q Dinas/ Instansi Sosial Provinsi. Adapun Kronologisnya sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2008 TMP Seroja Dilli di Timor Leste mendapat Alokasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp350.000.000.
2. Pada Bulan September Tahun 2009 Kedutaan Besar Republik Indonesia Dili di Timor Leste a.n Kepala Perwakilan RI, Kepala Kanselar/HOC u.b BPKRT (Yuli Rianto) berkirim surat kepada Menteri Sosial RI u.p Dirjen Pemberdayaan Sosial mengajukan Hibah Barang Milik Negara (BMN) agar dapat dikelola langsung oleh Kedutaan Besar Dilli di Timor Leste, dan perbaikan dan pemeliharaan TMP Seroja Dilli tersebut, meliputi:
 - a. Perbaikan Plaza Upacara
 - b. Kijing/ petak makam
 - c. Tembok keliling/ pagar Taman Makam Pahlawan Seroja Dili.
3. Tanggal 29 Juni 2009 dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Renovasi Nomor: 460/K2KS/VI/2009 antara pihak pertama ditandatangani oleh Drs. Muchsis Malik (Direktur K2KRS) dan pihak kedua ditandatangani oleh Nelson Simorangki (Sekretaris I/Pensosbud)
4. Diterimanya surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-263/MK/6/2014 Hal: Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi Kementerian Sosial, pada prinsipnya Menteri Keuangan menyetujui untuk dilakukan proses hibah dan harus berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), PMK Nomor: 98/PMK/06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan.
5. Tanggal 4 Desember Tahun 2014 Kepala Biro Umum mengirimkan Nota Dinas Kepada Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial yang isinya:
 - a. Persetujuan hibah yang harus ditindaklanjuti melalui proses hibah
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan hibah kepada sekjen c.q Biro Umum
 - c. Melakukan penghapusan Barang Milik Negara oleh Menteri Sosial.
6. Tanggal 16 Desember Tahun 2014 Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial mengirimkan surat kepada Kepala KBRI Dilli di Timor Leste Nomor: 1549/DYS-PK/KKKS/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 Hal: Permohonan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan BAST BMN yang ditandatangani oleh Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial (Andi Hanindito).
7. Sampai dengan saat ini Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial telah mengajukan Permohonan Penghapusan ATR TMP Seroja Dili di Timor Leste ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial pada tanggal 1 Oktober 2019.

F.11 Penghapusan Barang Kadaluarsa pada Gudang Regional

Terdapat barang yang sudah kadaluarsa pada Gudang regional Bekasi, Sumatera Selatan dan Makassar pada tahun 2019 yang dimusnahkan pada Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Nama Barang					
		Mie Instan		Sambal Pedas		Makanan Anak	
1	Gudang Bekasi	32.520	Bks	34.673	Botol		
2	Gudang Regional Palembang	12.600	Bks	600	Botol	200	Paket
3	Gudang Regional Makasar	31.000	Bks	5.000	Botol		
	Jumlah	76.120	Bks	40.273	Botol	200	Paket

Adapun rincian penghapusan/pemusnahan barang persediaan kadaluarsa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sesuai Berita Acara Penghapusan/ Pemusnahan Barang Persediaan Nomor: 262/3.3/PL.05.03/02/2020 Tanggal 06 Februari 2020, Sesuai Berita Acara Penghapusan/ Pemusnahan Barang Persediaan Nomor: 267/3.3/PL.05.03/02/2020 Tanggal 07 Februari 2020, Bertempat di Gudang Pusat Penanggulangan Bencana Kementerian Sosial, telah melaksanakan penghapusan dan pemusnahan barang persediaan Dit. PSKBA, yaitu:

No	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Harga Satuan	Kondisi	Cara Pemusnahan
1	Mie Instan	000073	32.520 Bungkus	2.006	Kadaluarsa (19 Okt 2019)	Dihancurkan dengan alat berat
2	Saos (dalam paket lauk pauk)	000083	34.673 Botol	4.355	Kadaluarsa (17 Okt 2019)	Dihancurkan dan ditimbun

2. Sesuai Berita Acara Penghapusan/ Pemusnahan Barang Persediaan Nomor: 269/3.3/PL.05.03/03/2020 Tanggal 15 Maret 2020, Bertempat di Gudang Logistik Regional Timur Kementerian Sosial RI (Makassar) telah melaksanakan penghapusan dan pemusnahan barang persediaan Dit. PSKBA, yaitu:

No	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Harga Satuan	Kondisi	Cara Pemusnahan
1	Mie Instan	000073	31000 Bungkus	1.826	Kadaluarsa (24 Okt 2019)	Dihancurkan, dibakar dan ditimbun
2	Saos(dalam paket lauk pauk)	000083	5000 Botol	4.355	Kadaluarsa (04 Okt 2019)	Dihancurkan, dibakar dan ditimbun

3. Sesuai Berita Acara Penghapusan/ Pemusnahan Barang Persediaan Nomor: 268/3.3/PL.05.03/02/2020 Tanggal 21 Februari 2020, Bertempat di Gudang Logistik Regional Barat Kementerian Sosial RI (Sumatera Selatan) telah melaksanakan penghapusan dan pemusnahan barang persediaan Dit. PSKBA, yaitu:

No	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Harga Satuan	Kondisi	Cara Pemusnahan
1	Mie Instan	73	12600 Bungkus	1.826	Kadaluarsa (19 Okt 2019)	Dihancurkan, dan ditimbun
2	Saos(dalam paket lauk pauk)	83	600 Botol	4.355	Kadaluarsa (17 Okt 2019)	Dihancurkan, dan ditimbun
3	Makanan Anak	227	200 Paket	59.532	1. Biskuit Gandum dan Biskuit Susu Kadaluarsa (Juni 2019) 2. Biskuit Roma Marie Susu Kadaluarsa (Juli 2019)	Dihancurkan, dan ditimbun

F.12 Persediaan Sisa Seragam PKH Tahun 2020

Terdapat sisa pengadaan seragam PKH Tahun 2020 didelapan Dinas Sosial Provinsi sebagai berikut yang menggunakan akun belanja Barang Operasional Lainnya/ Belanja Barang Non Operasional Lainnya:

Satker	Akun Belanja	Sisa Seragam	Harga Satuan	Nilai Persediaan	Keterangan
Dinsos Kaltim	521219	18	349.600	6.292.800	Sudah dilakukan input
Dinsos Jatim	521119	375	126.110	47.291.250	Sudah dilakukan input
Dinsos NTB	521119	4	134.970	539.880	Sudah dilakukan input
Dinsos Bali	521119	12	199.000	2.388.000	Sudah dilakukan input
Dinsos Bengkulu	521119	19	199.500	3.790.500	Sudah dilakukan input
Dinsos Sulsel	521219	37	150.000	5.550.000	Belum dilakukan input
Dinsos Gorontalo	521119	7	200.000	1.400.000	Belum dilakukan input
Dinsos Aceh	521119	14	165.000	2.310.000	Belum dilakukan input

**Untuk Satker Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Provinsi Aceh sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020, masih dalam proses pengumpulan dan konfirmasi data dukung sehingga belum dilakukan penginputan pada aplikasi persediaan dan SIMAK-BMN.*

F.13 Persediaan Toolkit Pusdiklat Kesos

Toolkit kepada peserta pendamping PKH yang telah mengikuti Diklat FDS PKH Tahun 2019 di 6 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dikarenakan dokumen Tanda Terima Toolkit mencatat kurang saji sebagai Persediaan di Neraca. Dokumen Tanda Terima Toolkit mencatat kurang saji sebagai Persediaan di Neraca tersebut akan diselesaikan pada Semester II Tahun Anggaran 2020. Setelah diadakan tindaklanjut oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dan berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI melalui surat Nomor : 2038/7.2/PL.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Hal : Permohonan bantuan distribusi Toolkit, dokumen Tanda Terima Toolkit tersebut masih mencatat kurang saji sebagai Persediaan di Neraca sebesar Rp5.816.009.190.

F.14 Utang kepada Pihak Ketiga Pusdiklat Kesos ke PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Pusdiklat Kesejahteraan Sosial per 31 Desember 2020 terdapat Utang kepada Pihak Ketiga yaitu kewajiban terhadap pihak ketiga PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang harus diselesaikan senilai Rp6.495.429.820 Utang kepada Pihak Ketiga tersebut yaitu sewa jaringan dalam rangka pelaksanaan kegiatan e-learning Diklat Family Development Session (FDS) di 6 (enam) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021 melalui DIPA Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tahun 2021.

F.15 Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses

Pada laporan keuangan per 31 Desember 2020, terdapat saldo Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam Proses sebesar Rp997.716.138 pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Sosial Provinsi Papua (TP)

Masih terdapat saldo Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam Proses senilai Rp204.494.002 yang merupakan pekerjaan pembangunan rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kampung Papane Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya tahun 2017 senilai Rp404.700.094 yang tidak terealisasi disebabkan beberapa faktor berikut:

- 1) Adanya perselisihan antara warga Kampung Papane dan masyarakat Distrik Gamelia.
- 2) Adanya ancaman yang membahayakan tenaga kerja (tukang)
- 3) Lambannya pemberian uang muka oleh pihak pertama
- 4) Waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 120 hari hangus terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2017.

Atas nilai tersebut telah dilakukan pengembalian belanja ke kas negara senilai Rp200.206.092 dengan nomor NTPN: EE6001OL96005IO tanggal 5 April 2018, sehingga menyisakan saldo Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam Proses sebesar Rp204.494.002.

Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Dokumen Berita Acara Serah Terima bahan bangunan Rumah Layak Sederhana (KAT) Kabupaten Lanny Jaya Distrik Gamelia Kampung Papane dari CV. Libers ke PPK, dan Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan Rumah Layak Sederhana (KAT) yang berupa kayu balok dan kayu papan dari PPK ke warga KAT tersimpan di Kantor Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.

b. Dinas Sosial Provinsi NTT (TP)

Pada Satker Dinas Sosial Provinsi NTT Tugas Pembantuan terdapat Persediaan dalam proses (117129) sebesar Rp174.146.536 merupakan pekerjaan pemberian bantuan stimulant pemukiman social bagi warga Komunitas Adat Terpencil tidak dapat direalisasikan karena wanprestasi sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat Nomor Dinsos.460/411/BPS.1/NTT/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang telah diawali dengan pemberian Surat peringatan I sd III terhadap Perusahaan CV. Binna Karyda selaku kontraktor Pelaksana Pekerjaan pemberian Bantuan stimulant Pemukiman Sosial Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lokasi di Letkole Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Akibat dari PHK tersebut dilakukan klaim terhadap pemberian jaminan (Bank NTT) untuk mengembalikan sisa uang muka tersebut dengan rincian nilai Kontrak Rp1.366.820.000 uang muka (30%) sebesar Rp410.046.000 Realisasi uang muka (12,74%) sebesar Rp174.146.536 Sisa Uang Muka yang dikembalikan sebesar Rp235.899.464 NTPN DC56D2U58QEA73D2 tanggal 16 Oktober 2018 jaminan pelaksanaan (5%) sebesar Rp68.341.000 dan sisa kontrak yang tidak terealisasi sebesar Rp1.192.673.646.

Berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Lintas Sektor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persediaan Dalam Proses tersebut merupakan bangunan pondasi sebanyak 5 buah, bahan bangunan lain berupa kayu dan seng yang disimpan di rumah warga. Bahan bangunan tersebut telah diserahkan kepada warga Komunitas Adat Terpencil Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Desember 2020.

c. Dinas Sosial Kabupaten Nunukan (TP)

Persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat – dalam proses pada satuan kerja Dinas Sosial Kabupaten Nunukan sebesar Rp619.075.600 berasal dari realisasi atas kontrak pekerjaan dengan nilai total Rp1.238.118.900 yang tidak dapat terselesaikan. Adapun nilai realisasi sebesar Rp619.075.600 terdiri dari Uang Muka sebesar Rp371.435.670 dan pembayaran termin I sebesar Rp247.639.930. Berkaitan hal tersebut, disampaikan kronologis pemutusan kontrak & sanksi administrasi Dinas Sosial Kab Nunukan sebagai berikut:

- 1) Telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik) dan foto dokumentasi di lapangan:

- a) Surat teguran I Nomor : 01/PKAT/027/X/2019 tanggal 21 oktober 2019 dengan realisasi fisik sebesar 51,08% (lima puluh satu koma nol delapan persen);
 - b) Surat teguran II Nomor : 02/PKAT/027/X/2019 tanggal 14 Nopember 2019 dengan realisasi fisik sebesar 54,58% (lima puluh empat koma lima puluh delapan persen) terjadi deviasi sebesar : 41,93% (empat puluh satu koma Sembilan puluh tiga persen);
 - c) Surat teguran III Nomor : 03/PKAT/027/X/2019 tanggal 02 Desember 2019 dengan realisasi fisik sebesar 54,58% (lima puluh empat koma lima puluh delapan persen) terjadi deviasi sebesar : 41, 93% (empat puluh satu koma Sembilan puluh tiga persen);
- 2) Dilakukan Rapat Bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penguji tagihan/ penandatanganan SPM, Aplikator Saiba, Bendahara, Tim Teknis dan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, terkait dokumentasi pekerjaan dilapangan sebagai lampiran Pemutusan Kontrak & Sanksi Administrasi.
 - 3) Pembuktian dilapangan bersama Wakil Bupati Nunukan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Kabag Pembangunan, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim PPHP, Tim Teknisi dan lain-lain pada tanggal 9 Desember 2019;
 - 4) Lokasi Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pekerjaan Pembangunan Rumah Bantuan Stimulan Permukiman Sosial, Desa Paluan Kec. Lumbis Ogong, pada jalur anak sungai dengan debit air kecil menunggu banjir untuk mobilisasi material ke lokasi pekerjaan dengan jarak \pm 2 KM.
 - 5) Melihat laporan pekerjaan kemajuan pertanggal 21 Oktober 2019 sebesar 51,08 % (lima puluh satu koma nol delapan persen) dengan deviasi sebesar : 9,79% (Sembilan koma tujuh puluh Sembilan persen) sampai dengan tanggal 06 Desember 2019 sebesar 54, 05% (lima puluh empat koma nol lima persen) dengan deviasi sebesar 45, 95% (empat puluh lima koma Sembilan puluh lima persen), pihak penyedia tidak ada kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan.

F.16 Hibah

1. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak menerima bantuan dana hibah luar negeri dalam dari UNICEF yang berbentuk hibah langsung berupa uang tunai. Selama 31 Desember 2020 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak juga masih menerima bantuan dana hibah luar negeri dalam dari UNICEF yang berbentuk hibah langsung berupa uang tunai. Adapun dana kerjasama Kementerian Sosial RI dan Unicef untuk 31 Desember 2020 sesuai SP2HL sebesar Rp5.177.034.402.

2. BRSPDI Ciungwanara

Pada tahun anggaran 2020 ini, BRSPDI Ciungwanara Bogor mendapatkan hibah barang langsung dari Axa Mandiri. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 002/CR-AXA/II/2020 tanggal 13 Februari 2020. Nilai hibah berupa barang ini adalah sebesar Rp21.730.000. Terdiri dari alat komputer senilai Rp. 10.000.000 dan alat kedokteran Rp2.130.000 (Peralatan dan mesin Intra); Alat kedokteran Rp3.090.000 dan alat kedokteran umum Rp1.860.000 (Peralatan dan Mesin Ekstra); serta persediaan Rp4.650.000. Hibah tersebut telah mendapatkan persetujuan memo pencatatan hibah langsung bentuk barang dari KPPN Bogor tanggal 21 Oktober 2020 dengan nomor 1003790101.

Daftar Hibah Langsung Barang
AXA Mandiri
Sesuai dengan BAST No. 002/CR-AXA/II/2020

No	Uraian	Nilai
1	Alat Komputer	10,000,000
2	Alat Kedokteran (Peralatan dan mesin Intra)	2,130,000
3	Alat kedokteran	3,090,000
4	Alat Kedokteran Umum (Peralatan dan Mesin Ekstra)	1,860,000
5	Persediaan	4,650,000
	Jumlah	21,730,000

3. BLBI Abiyoso di Cimahi

BLBI Abiyoso menerima hibah luar negeri dari Siloam Centre for The Blind Korea pada Januari 2019 berupa software aplikasi Audio Mobile Library (AML). Pada saat proses pencatatan nomor register hibah, Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sudah ditandatangani oleh Siloam dan BLBI Abiyoso ditolak oleh Bagian Umum Ditjen Rehabilitasi Sosial dikarenakan ada dua item dalam BAST tersebut yang tidak bisa diakui apabila akan dicatat dalam BMN, yaitu berupa koneksi internet dan layanan server dimana keduanya berada di Korea. sudah disahkan dengan nomor register hibah 2XK82K4A dan memo persetujuan hibah Nomor: 997152933 tanggal 15 September 2020 senilai Rp615.118.000.

4. BRSPDSN Wyata Guna di Bandung

Pada tahun 2019 BRSPDSN Wyata Guna Bandung mendapat hibah dari Siloam Centre For The Blind (Korea) untuk kegiatan Barista, kronologis penerimaan hibah:

- a. Tanggal 13 Maret 2019 telah dilakukan penandatanganan MOM antara Siloam Centre For The Blind (Korea) dg Kementerian Sosial (BRSPDSN Wyata Guna) tentang pemberian Hibah Kegiatan Barista di BRSPDSN Wyata Guna.
- b. Pada tanggal 12 April 2019 telah diregister hibah sebesar 356.000 USD untuk kegiatan barista selama 3 tahun,
- c. Tanggal 25 April 2019 diterbitkan Persetujuan Pembukaan Rekening dr KPPN KPH,
- d. Pembukaan rekening dilakukan pada tgl 29 April 2019 di KEB Hana Bank Kantor Cabang Bandung Dago dengan Nama rekening RPL 140 PDHL BRSPDSN Wyata Guna 2LTNU7PA
- e. Pada saat pembukaan rekening, sesuai dengan syarat yang diberikan pihak KEB Hana Bank, pihak Siloam harus memasukkan uang sebesar Rp1.100.000, Rp100.000 untuk biaya administrasi pembukaan rekening dan pembelian buku cek, sedangkan yang Rp1.000.000 adalah uang yang harus mengendap di tabungan.
- f. Tanggal 10 Mei 2019 Siloam mentransfer uang sebesar Rp17.864.000,
- g. Tanggal 15 Mei 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp17.164.000 yang digunakan untuk kegiatan Barista,
- h. Tanggal 30 Agustus 2019 Siloam mentrasfer kembali uang sebesar Rp43.395.200,
- i. Tanggal 7 Oktober 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,
- j. Tanggal 21 November 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp23.900.000,
- k. Tanggal 17 Desember 2019 dilakukan penarikan terakhir sebesar Rp150.200,
- l. Tanggal 17 Desember 2019, posisi uang di KEB Hana Bank Rp1.000.000, meruapakan dana yang harus mengendap di tabungan,
- m. Ada rehabilitasi gedung dan pembelian peralatan untuk barista sebesar Rp284.562.000, dengan rincian Gedung dan Bangunan Rp128.700.000 (Rehabilitasi Gedung untuk

- Ruang Barista) Peralatan dan Mesin Rp150.780.000, Persediaan Rp5.082.000 (Bahan pelatihan barista)
- n. Pengesahan hibah dalam barang dilakukan melalui KPPN Mitra (KPPN Bandung I) dengan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/Surat Berharga No. 00268/WG/MPHL-BJS/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan disahkan oleh KPPN dengan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga No. 2019022369148001 tanggal 30 Desember 2019.
 - o. Pengesahan hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui KPPN KPH dengan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung No.00277/WG/SP2HL/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, disahkan dengan Surat Pengesahan Hibah Langsung No. 191400000000059 tanggal 31 Desember 2019.
 - p. Sisa hibah sebesar Rp200 sudah disetor ke Negara dengan SSPB.
 - q. Pihak Siloam pada bulan Oktober – November 2019 merenovasi gedung untuk dijadikan Café More, sampai tanggal pelaporan belum ada Berita Serah Terima Barang.
 - r. Tanggal 12 Februari 2020 Siloam mentransfer Rp13.336.000.
 - s. Tanggal 10 Maret 2020 dilakukan penarikan sebesar Rp13.324.000 yang digunakan untuk kegiatan Barista
 - t. Tanggal 24 Maret 2020 Siloam mentransfer Rp56.069.000
 - u. Pengesahan hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui KPPN KPH dengan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung No.00260/WG/SP2HL/12/2019 tanggal 30 Desember 2020, disahkan dengan Surat Pengesahan Hibah Langsung No. 201400501270001 tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 69.405.000

5. BBPPKS Banjarmasin

Pada tahun anggaran 2020 dengan surat No.617/6.1.2/KU.03.03/03/2020 tanggal 27 Maret 2020. Ditahun 2020 BBPPKS Banjarmasin menerima hibah dari masyarakat berupa tanah senilai Rp2.031.337.611. Proses pencatatan pada simak BMN tercatat masih teregister, sehingga untuk pelaporan BBPPKS Banjarmasin menjurnal penyesuaian terhadap register tersebut. Hal ini menyebabkan jurnal tidak lazim pada neraca erekon. Sampai saat ini BBPPKS Banjarmasin tanah tersebut telah menjadi aset definitif karena terbitnya Memo Pengesahan Hibah Langsung dari KPKNL.

F.17 Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

1. Sekretariat Jenderal

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim BPK terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Pembuatan Partisi Ruang Pantry, Ruang Rapat, Ruang Center File, dan Mushola Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal senilai Rp21.573.650. Atas temuan tersebut PT. Afar Cerdas Nusantara selaku kontraktor membuat Surat Pernyataan Nomor : 126/ACN/SP/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang menyatakan bahwa PT. Afar Cerdas Nusantara bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke Kas Negara sebesar Rp21.573.650. Pembayaran tersebut dengan cara angsuran sebanyak enam kali pembayaran. Atas temuan tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2020 telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp11.000.000 sehingga nilai temuan tersisa Rp10.573.650 dengan rincian:

No	Tanggal	NTPN	Nominal	Keterangan
1	11 Agustus 2020	660FD6U8DPHM01RH	11.000.000	Pengembalian sebagian TLHP BPK RI Th 2019 Kekurangan volume Pekerjaan No. SPK : 3383/1.5/PPK/PL.02/12/2019 An. PT Afar Cerdas Nusantara 2228/962/002/053/D/533121

- b. Berdasarkan Temuan TLHP BPK RI Tahun 2018 Nomor: 90C/LHP/XVI/05/2018 pada tanggal 14 Mei 2018 terdapat Belanja Barang untuk Operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang tidak mempedomani mekanisme pertanggungjawaban Uang Persediaan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp529.641.315. Temuan tersebut dibebankan kepada Kepala Biro Umum sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1468/1.5/PPK.01/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang akan dilakukan pengembalian ke Kas Negara selama 24 kali setoran terhitung sejak bulan Juni 2019 s.d. Juni 2021. Sampai dengan bulan Desember 2020 telah dilakukan penyetoran sebanyak 19 kali senilai Rp282.641.315 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Mutasi		Sisa Saldo	Tgl Penyetoran	No NTPN
		Tambah	Kurang			
	Saldo awal	-	-	529.641.315	-	-
1	Cicilan ke 1	-	50.000.000	479.641.315	6/17/2019	694684DD01LBH74P
2	Cicilan ke 2	-	10.000.000	469.641.315	7/29/2019	E687748VU0E2OTV8
3	Cicilan ke 3	-	10.000.000	459.641.315	8/16/2019	FDE9F0N9UM741J2M
4	Cicilan ke 4	-	10.000.000	449.641.315	17/09/2019	977963CIE619E6UR
5	Cicilan ke 5	-	10.000.000	439.641.315	10/7/2019	DC5B36U8DGDH0CVU
6	Cicilan ke 6	-	21.000.000	418.641.315	10/23/2019	73ADC6U8DGE0U1VD
7	Cicilan ke 7	-	10.000.000	408.641.315	11/8/2019	9C5C00N9UMFQNMV
8	Cicilan ke 8	-	10.000.000	398.641.315	12/3/2019	BDA372G4UBNEBAGV
9	Cicilan ke 9	-	28.000.000	370.641.315	12/10/2019	718E12G4UBNKN3PM
10	Cicilan ke 10	-	10.000.000	360.641.315	1/6/2020	7F2957QLTJF2P4SU
11	Cicilan ke 11	-	10.000.000	350.641.315	2/6/2020	C7D450N9UUUVDF0
12	Cicilan ke 12	-	10.000.000	340.641.315	3/6/2020	DEB643CIEEP44QKL
13	Cicilan ke 13	-	5.000.000	335.641.315	4/22/2020	D734B1JNEPNP1V9N
14	Cicilan ke 14	-	5.000.000	330.641.315	6/30/2020	8A30548VU9L5BEEG
15	Cicilan ke 15	-	10.000.000	320.641.315	8/24/2020	4BA7748VU9QTTTH96
16	Cicilan ke 16	-	6.000.000	314.641.315	10/19/2020	86DFF2G4UKRVA4K2
17	Cicilan ke 17	-	7.641.315	307.000.000	11/11/2020	4D10F55DE4LSFRT3
18	Cicilan ke 18	-	10.000.000	297.000.000	12/11/2020	F46A03CIEFK2G4EN
19	Cicilan ke 19	-	50.000.000	247.000.000	12/14/2020	0F9F12G4UL1P45G8
	Total Setoran		282.641.315			

Setelah dilakukan 9 (sembilan) kali penyetoran senilai Rp159.000.000 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 dilakukan 10 kali penyetoran senilai Rp123.641.315, sehingga masih terdapat sisa saldo temuan sebesar Rp247.000.000 yang harus dilunasi hingga maksimal bulan Juni 2021.

2. Ditjen Pemberdayaan Sosial

Pekerjaan Pengadaan Personalisasi dari pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Tahun 2013 yang berasal dari anggaran Safeguarding yang ada di Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh PT. POS Indonesia senilai Rp. 1.452.128.870 belum sesuai dengan ketentuan dan masih dalam proses tindak lanjut.

3. Ditjen Penanganan Fakir Miskin

- a. Progress Penyelesaian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020, disajikan sebagai berikut:

Kas Lainnya dan Setara Kas	SDJPFM	DPFM WIL I	DPFM WIL II	DPFM WIL III	LAMPUNG	Jumlah	Keterangan
Saldo Awal	8.597.500	794.873.886.540	415.487.344.981	403.078.479.279	19.300.000	1.613.467.608.300	1 Januari 2020
PNBP 52 TAYL	1.667.500				19.300.000	20.967.500	
PNBP 57 TAYL		749.605.787.871	382.411.083.011	367.939.952.972		1.499.956.823.854	
SP2D RETUR	6.930.000					6.930.000	
KOREKSI LAINNYA		7.604.374				7.604.374	JASA GIRO
BEBAN 575111		45.260.494.295	33.076.261.970	35.138.526.307	-	113.475.282.572	Penyaluran 2020
SISA	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2020

- b. Progress Penyelesaian Piutang PNBP per 31 Desember 2020 telah selesai ditindaklanjuti, disajikan sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak	SDJPFM	DPFM WIL I	DPFM WIL II	DPFM WIL III	LAMPUNG	Jumlah	Keterangan
Saldo Awal	26.061.805					26.061.805	1 Januari 2020
PNBP 51 TAYL	20.332.580					20.332.580	
PNBP 52 TAYL	5.729.225					5.729.225	
SISA	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2020

- c. Progress Penyelesaian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 ditindaklanjuti, disajikan sebagai berikut:

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	SDJPFM	DPFM WIL I	DPFM WIL II	DPFM WIL III	LAMPUNG	Jumlah	Keterangan
Saldo Awal		218.933.563.267	160.572.852.879	169.547.890.443		549.054.306.589	1 Januari 2020
PNBP 57 TAYL		139.994.798.601	115.361.649.200	87.773.125.447		343.129.573.248	
BEBAN 575111		78.938.764.666	45.211.203.679	81.774.764.996		205.924.733.341	
SISA	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2020

- d. Progress Penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 telah selesai ditindaklanjuti, disajikan sebagai berikut:

Utang kepada Pihak Ketiga	SDJPFM	DPFM WIL I	DPFM WIL II	DPFM WIL III	LAMPUNG	Jumlah	Keterangan
Saldo Awal	6.930.000	2.802.000.000				2.808.930.000	1 Januari 2020
SP2D RETUR	6.930.000					6.930.000	
KOREKSI LAINNYA		11.000.000				11.000.000	TIDAK DAPAT DIBAYAR
BEBAN 521219		2.713.600.000				2.713.600.000	
BEBAN 524111		77.400.000				77.400.000	
SISA	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2020

4. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

- a. Sekretariat Badiklit Pensos

Pada Laporan Keuangan Tahunan Sekretariat Badiklitpensos terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap LK Sekretariat Badiklitpensos Tahun 2019 terhadap Honor Jasa Profesi sebesar Rp1.094.760.000. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2020 dengan nilai total Rp306.710.000.

- b. BBPPKS Yogyakarta

Hasil Pemeriksaan PDTI BPK atas Kementerian Sosial RI dengan Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) : 280 I LHP I XVI I 12 I 20 19 Tanggal 30 Desember 2019 merekomendasikan kepada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta untuk:

- 1) Dalam melakukan perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan pengendalian dan pengawasan anggaran secara komprehensif di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp.506.220.000 yang terdiri dari PT. SMS sebesar Rp284.790.000 dan PT. RI sebesar Rp221.430.000 untuk segera disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Memungut denda keterlambatan dari CF CG sebesar Rp8.306.760 untuk segera disetor ke Kas Negara.
- 5) Menyetorkan ke Kas Negara atas penggunaan anggaran Belanja Pengadaan Konsumsi di RM BU dan Obat sebesar Rp50.690.500 di Apotik SF.

Temuan Pemeriksaan PDTI BPK sudah ditindaklanjuti oleh BBPPKS Yogyakarta dengan menarik kelebihan pembayaran dari PT. SMS dan PT. RI lalu menyetor ke Kas Negara sebesar Rp506.220.000; Telah memungut denda keterlambatan dari CF CG lalu menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp8.306.760. Serta telah Menyetor ke Kas Negara Sebesar Rp50.690.500 atas belanja di Apotik SF dan RMBU

c. BBPPKS Bandung

Terdapat Temuan BPK atas Realisasi Belanja Barang pada kegiatan Diklat P2K2 FDS di BBPPKS Bandung yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp8.119.221.860. Atas temuan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebesar Rp3.087.097.268 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dari Rp3.087.097.268 telah disetorkan ke kas negara dirinci sebagai berikut:

Nomor Temuan	Judul Temuan	Jumlah (Rp)	Telah Setor	Sisa yang belum disetor
3.1.9	Realisasi Belanja Barang pada kegiatan Diklat P2K2 FDS di BBPPKS Bandung tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp8.119.221.860	3.087.097.268	853.803.804	2.233.293.464

F.18 Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Revaluasi aset Kementerian Sosial dilakukan sesuai dengan *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara*. Aset yang dilakukan Penilaian Kembali tersebut adalah, **Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan** serta **Irigasi**. Terkoreksinya nilai aset diikuti juga dengan nilai penyusutannya pada masing-masing aset tersebut.

Pada tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan Nota Kesepakatan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2019 Pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Nomor :NK-027/46/TO-REVALBMN/2019 maka Kementerian Sosial melakukan jurnal koreksi pada satker konsolidasi terhadap aset-aset yang telah dilakukan penilaian kembali. Rincian jurnal koreksi hasil penilaian kembali BMN dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan undangan dari Kementerian Keuangan No : UND-48/KN/2019, dilaksanakan pembahasan tiga pihak (tripartit) antara Kementerian Keuangan, BPK, dan Kementerian Sosial untuk memperoleh kesepakatan untuk melakukan jurnal koreksi atas take out revaluasi BMN tahap II dimana Kementerian Keuangan melakukan pengujian kembali atas nilai BMN pada Tripartit Tahap I dan dilakukan dikoreksi pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI TA 2018 (*Audited*).

Pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan Lampiran III surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Nomor: S-625/PB/2019 tentang Pedoman Penyusunan, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2019 huruf B No 3 untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2019 tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal koreksi hasil penilaian kembali BMN (jurnal takeout revaluasi BMN) yang telah dilakukan pada Satker Konsolidasi dalam LKKL Tahun 2018.

Pada Tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Surat dari Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor :S-892/PB/2019, Kementerian Sosial melakukan jurnal koreksi (*take out*) atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi terhadap BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, yang terjadi selama semester I tahun 2019.

Terdapat tambahan jurnal lanjutan terkait koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi. Jurnal-jurnal tersebut dilakukan pada periode triwulan III Tahun Anggaran 2019.



Per 31 Desember 2019 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-58/PB/2020 Hal: Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, Kementerian Sosial melakukan Jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) Hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari Laporan Keuangan tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan aplikasi SAIBA melalui Satker Konsolidasi, serta melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017 dan 2018 dalam Laporan Keuangan tahun 2019 *Unaudited* menggunakan aplikasi SIMAK BMN.

Pada tanggal 05 Maret 2020 diterbitkan kembali surat Nomor: S-189/PB/2020 oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 *Unaudited* serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1. Bahwa berdasarkan hasil hasil telaah dan verifikasi LKKL Tahun 2019 *Unaudited*, masih terdapat indikasi bahwa belum seluruh perbaikan/koreksi hasil IP BMN dicatat dan disajikan dalam LKKL tahun 2019 *Unaudited*. Seluruh satker yang terkena revaluasi di Kementerian Sosial diwajibkan melakukan perbaikan data yang kemudian akan menjadi bagian koreksi audit dan disajikan dalam LKKL Tahun 2019 *Audited*.

Pada Laporan Keuangan Audited TA 2020, Kementerian Sosial kembali melakukan pencatatan atas Koreksi Revaluasi Aset Tetap sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan No:S-26/PB.6/2020 Hal: Rilis Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.1.0 Dalam Rangka Pencatatan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018 serta Penyusunan LKKL Tahun 2020.

Jakarta, Mei 2021

Penanggung Jawab UAPA

Menteri Sosial RI,



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 03/05/21 10:08 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	584,168,047,000	2,463,964,201,084	(1,879,796,154,084)	422	12,026,705,400	516,740,242,519	(504,713,537,119)	4297
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	584,168,047,000	2,463,964,201,084	(1,879,796,154,084)	422	12,026,705,400	516,740,242,519	(504,713,537,119)	4297
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	503,160,462,000	445,566,309,885	57,594,152,115	89	489,387,325,000	480,617,558,411	8,769,766,589	98
	BELANJA BARANG	5,318,371,962,520	5,215,424,089,046	102,947,873,474	98	3,814,831,867,000	3,665,853,868,269	148,977,998,731	96
	BELANJA MODAL	248,572,575,000	247,360,930,337	1,211,644,663	100	322,514,274,000	319,344,518,246	3,169,755,754	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	128,101,784,274,480	124,380,091,909,552	3,721,692,364,928	97	54,412,473,325,000	53,260,829,507,155	1,151,643,817,845	98
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	134,171,889,274,000	130,288,443,238,820	3,883,446,035,180	97	59,039,206,791,000	57,726,645,452,081	1,312,561,338,919	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 04/05/2021 9:21 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,100,000	67,666,000	(66,566,000)	(98.37)
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,058,132,172,068	2,011,950,360,632	46,181,811,436	2.30
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	71,528,400	0	71,528,400	0.00
Piutang Bukan Pajak	368,789,028,861	360,334,178,898	8,454,849,963	2.35
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,843,945,145)	(1,801,670,900)	(42,274,245)	2.35
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	366,945,083,716	358,532,507,998	8,412,575,718	2.35
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2,033,634,771	0	2,033,634,771	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(10,168,174)	0	(10,168,174)	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	2,023,466,597	0	2,023,466,597	0.00
Persediaan	480,185,394,440	455,884,848,039	24,300,546,401	5.33
JUMLAH ASET LANCAR	2,907,358,745,221	2,826,435,382,669	80,923,362,552	2.86
ASET TETAP				
Tanah	18,565,546,383,592	18,532,038,706,705	33,507,676,887	0.18
Peralatan dan Mesin	2,037,635,381,225	1,904,924,241,165	132,711,140,060	6.97
Gedung dan Bangunan	2,136,028,516,570	1,798,628,848,267	337,399,668,303	18.76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	104,828,063,058	102,663,682,834	2,164,380,224	2.11
Aset Tetap Lainnya	22,818,085,114	21,990,010,062	828,075,052	3.77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,194,436,815	281,836,313	1,912,600,502	678.62
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,010,707,161,223)	(1,775,435,334,121)	(235,271,827,102)	13.25
JUMLAH ASET TETAP	20,858,343,705,151	20,585,091,991,225	273,251,713,926	1.33
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	446,658,693	0	446,658,693	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2,233,293)	0	(2,233,293)	0.00
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	444,425,400	0	444,425,400	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	444,425,400	0	444,425,400	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	109,418,769,236	98,538,827,706	10,879,941,530	11.04
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	66,888,973,054	549,179,306,589	(482,290,333,535)	(87.82)
Aset Lain-lain	32,144,606,305	26,297,974,644	5,846,631,661	22.23
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(121,585,480,899)	(108,775,697,744)	(12,809,783,155)	11.78
JUMLAH ASET LAINNYA	86,866,867,696	565,240,411,195	(478,373,543,499)	(84.63)
JUMLAH ASET	23,853,013,743,468	23,976,767,785,089	(123,754,041,621)	(0.52)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,105,471,898	4,702,361,654	5,403,110,244	114.90
Hibah Yang Belum Disahkan	171,028,400	527,339,126	(356,310,726)	(67.57)
Pendapatan Diterima Dimuka	441,580,113	1,967,279,648	(1,525,699,535)	(77.55)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 04/05/2021 9:21 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Uang Muka dari KPPN	1,100,000	67,666,000	(66,566,000)	(98.37)
Utang Jangka Pendek Lainnya	21,131,781	10,341,818	10,789,963	104.33
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,740,312,192	7,274,988,246	3,465,323,946	47.63
JUMLAH KEWAJIBAN	10,740,312,192	7,274,988,246	3,465,323,946	47.63
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	23,842,273,431,276	23,969,492,796,843	(127,219,365,567)	(0.53)
JUMLAH EKUITAS	23,842,273,431,276	23,969,492,796,843	(127,219,365,567)	(0.53)
JUMLAH EKUITAS	23,842,273,431,276	23,969,492,796,843	(127,219,365,567)	(0.53)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23,853,013,743,468	23,976,767,785,089	(123,754,041,621)	(0.52)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 03/05/21 10:08
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	66,097,049,035	25,193,017,948	40,904,031,087	162.363
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	66,097,049,035	25,193,017,948	40,904,031,087	162.363
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	66,097,049,035	25,193,017,948	40,904,031,087	162.363
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	445,259,411,851	480,563,464,039	(35,304,052,188)	(7.346)
Beban Persediaan	47,976,043,254	39,196,178,503	8,779,864,751	22.4
Beban Barang dan Jasa	4,545,334,197,734	2,546,867,936,840	1,998,466,260,894	78.468
Beban Pemeliharaan	72,394,140,426	78,468,609,329	(6,074,468,903)	(7.741)
Beban Perjalanan Dinas	434,716,597,827	963,471,108,195	(528,754,510,368)	(54.88)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	153,318,293,332	29,550,568,283	123,767,725,049	418.834
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 03/05/21 10:08
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	122,475,399,979,702	51,221,474,250,664	71,253,925,729,038	139.109
Beban Penyusutan dan Amortisasi	247,367,784,180	252,849,834,076	(5,482,049,896)	(2.168)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	54,675,712	1,799,954,514	(1,745,278,802)	(96.962)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	128,421,821,124,018	55,614,241,904,443	72,807,579,219,575	130.915
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(128,355,724,074,983)	(55,589,048,886,495)	(72,766,675,188,488)	130.901
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	673,307,230	1,447,303,661	(773,996,431)	(53.479)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,290,469,766	1,656,887,086	(366,417,320)	(22.115)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	617,162,536	209,583,425	407,579,111	194.471
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200,475,346,579	451,787,461,118	(251,312,114,539)	(55.626)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	337,398,980,672	501,672,920,191	(164,273,939,519)	(32.745)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	136,923,634,093	49,885,459,073	87,038,175,020	174.476
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	201,148,653,809	453,234,764,779	(252,086,110,970)	(55.619)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(128,154,575,421,174)	(55,135,814,121,716)	(73,018,761,299,458)	132.434
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(128,154,575,421,174)	(55,135,814,121,716)	(73,018,761,299,458)	132.434

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 04/05/21 9:21 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	23,969,492,796,843	5,978,367,271,420	17,991,125,525,423	300.937
SURPLUS/DEFISIT-LO	(128,154,575,421,174)	(55,135,814,121,716)	(73,018,761,299,458)	132.434
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	265,664,326,554	15,860,408,652,182	(15,594,744,325,628)	(98.325)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	1,858,337,865	(1,858,337,865)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(1,767,095,521)	(936,795,743)	(830,299,778)	88.632
SELISIH REVALUASI ASET	277,669,193,080	15,421,011,225,108	(15,143,342,032,028)	(98.199)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(3,786,097,923)	(12,754,363,462)	8,968,265,539	(70.315)
LAIN-LAIN	(6,451,673,082)	451,230,248,414	(457,681,921,496)	(101.43)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	127,761,691,729,053	57,266,530,994,957	70,495,160,734,096	123.1
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(127,219,365,567)	17,991,125,525,423	(18,118,344,890,990)	(100.707)
EKUITAS AKHIR	23,842,273,431,276	23,969,492,796,843	(127,219,365,567)	(0.531)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	39,200,000	44,328,000	0	44,328,000	113.08
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,500,000	0	15,500,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	271,574,222	0	271,574,222	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,003,395,544	0	1,003,395,544	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,165,736,000	2,488,087,960	281,500,000	2,206,587,960	52.97
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	4,204,936,000	3,826,885,726	281,500,000	3,545,385,726	84.31
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	750,000,000	711,619,938	0	711,619,938	94.88
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	750,000,000	711,619,938	0	711,619,938	94.88
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	751,650,000	751,650,000	0	751,650,000	100
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	4,618,600,000	4,634,750,000	0	4,634,750,000	100.35
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	197,950,000	240,650,000	0	240,650,000	121.57
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	5,568,200,000	5,627,050,000	0	5,627,050,000	101.06
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	907,428,000	290,669,500	0	290,669,500	32.03
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	112,000,000	757,000	0	757,000	0.68
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	1,019,428,000	291,426,500	0	291,426,500	28.59
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	47,468,146,499	0	47,468,146,499	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	83,641,315	0	83,641,315	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	47,551,787,814	0	47,551,787,814	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	295,676,817	0	295,676,817	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	295,676,817	0	295,676,817	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	339,251,700	0	339,251,700	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,043,080,018	0	6,043,080,018	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,262,827,098	0	1,262,827,098	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran	572,625,483,000	2,398,287,815,042	0	2,398,287,815,042	418.82
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	200,000	0	200,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	8,080,431	0	8,080,431	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	572,625,483,000	2,405,941,254,289	0	2,405,941,254,289	420.16
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	584,168,047,000	2,464,245,701,084	281,500,000	2,463,964,201,084	421.79
	JUMLAH PENDAPATAN	584,168,047,000	2,464,245,701,084	281,500,000	2,463,964,201,084	421.79

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 04/05/21 9:24 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	310,654,000	0	310,654,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,550,751,000	2,005,821,152	281,500,000	1,724,321,152	48.56
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	2,000	0	2,000	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	83,641,315	0	83,641,315	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68,643,893	0	68,643,893	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	278,259,707	0	278,259,707	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	16,000,000	0	16,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	3,550,751,000	2,763,022,067	281,500,000	2,481,522,067	77.82
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	10,050,193	0	10,050,193	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,707,630	0	12,707,630	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	22,757,823	0	22,757,823	
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	195,900	0	195,900	0
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	750,000,000	711,619,938	0	711,619,938	94.88
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,923,728,878	0	5,923,728,878	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	190,077,550	0	190,077,550	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	89,676,285	0	89,676,285	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	399,175,315	0	399,175,315	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang	0	555,094,880	0	555,094,880	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	750,000,000	7,869,568,746	0	7,869,568,746	1,049.28
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	39,200,000	44,328,000	0	44,328,000	113.08

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 04/05/21 9:24 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,500,000	0	15,500,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	265,674,222	0	265,674,222	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	131,169,275	0	131,169,275	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	348,283,000	315,421,359	0	315,421,359	90.56
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	4,000,000	0	4,000,000	0
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	907,428,000	290,669,500	0	290,669,500	32.03
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	112,000,000	757,000	0	757,000	0.68
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	82,235,992	0	82,235,992	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,410,149	0	1,410,149	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65,802,051	0	65,802,051	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	50,584,238	0	50,584,238	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,238,438,522	0	1,238,438,522	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang	0	10,040,763,179	0	10,040,763,179	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	200,000	0	200,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	8,080,378	0	8,080,378	0
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1,406,911,000	12,555,033,865	0	12,555,033,865	892.38
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	261,925,076	0	261,925,076	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,102,490	0	5,102,490	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	23,738,586	0	23,738,586	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,579,960	0	27,579,960	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,305,639,639	0	2,305,639,639	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang	95,000,000,000	528,396,017,955	0	528,396,017,955	556.21
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	95,000,000,000	531,020,003,706	0	531,020,003,706	558.97

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 04/05/21 9:24 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	192,094,000	0	192,094,000	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	41,457,076,865	0	41,457,076,865	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,332,580	0	20,332,580	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	601,678,825	0	601,678,825	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang	477,625,483,000	1,859,295,939,028	0	1,859,295,939,028	389.28
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN	477,625,483,000	1,901,567,121,298	0	1,901,567,121,298	398.13
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,900,000	0	5,900,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	97,503,000	0	97,503,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	266,702,000	166,649,549	0	166,649,549	62.49
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	751,650,000	751,650,000	0	751,650,000	100
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	4,618,600,000	4,634,750,000	0	4,634,750,000	100.35
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	197,950,000	240,650,000	0	240,650,000	121.57
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	274	0	274	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	80,450,532	0	80,450,532	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,509,301	0	54,509,301	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,407,742,294	0	2,407,742,294	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,388,576	0	8,388,576	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	53	0	53	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN	5,834,902,000	8,448,193,579	0	8,448,193,579	144.79
	JUMLAH PENDAPATAN	584,168,047,000	2,464,245,701,084	281,500,000	2,463,964,201,084	421.84

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
027010100K	BA(027) ES1(01) DKI JAKARTA					
418939	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	207,712,738	0	207,712,738	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027010100KP BA(027) ES1(01) DKI JAKARTA	0	207,712,738	0	207,712,738	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
440121	SEKRETARIAT JENDERAL	3,550,751,000	2,555,307,329	281,500,000	2,273,807,329	64.04
180014	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	0	2,000	0	2,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	3,550,751,000	2,555,309,329	281,500,000	2,273,809,329	71.97
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	3,550,751,000	2,763,022,067	281,500,000	2,481,522,067	77.82
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
027020100K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
426638	INSPEKTORAT JENDERAL	0	22,757,823	0	22,757,823	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027020100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	0	22,757,823	0	22,757,823	
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	22,757,823	0	22,757,823	
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL					
027030100K	BA(027) ES1(03) DKI JAKARTA					
418940	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL	750,000,000	7,004,429,647	0	7,004,429,647	933.92
440213	DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	0	31,723,000	0	31,723,000	0
630859	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	0	148,985,457	0	148,985,457	0
682033	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	0	236,766,755	0	236,766,755	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027030100KP BA(027) ES1(03) DKI JAKARTA	750,000,000	7,421,904,859	0	7,421,904,859	989.59
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	0	52,500,000	0	52,500,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
059014	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	19,078,476	0	19,078,476	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	71,578,476	0	71,578,476	
027030800T	BA(027) ES1(03) SUMATERA BARAT					
089141	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1,992,060	0	1,992,060	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027030800TP BA(027) ES1(03) SUMATERA BARAT	0	1,992,060	0	1,992,060	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
189013	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	1,000,000	0	1,000,000	
027031900	BA(027) ES1(03) SULAWESI SELATAN					
199135	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	4,601,606	0	4,601,606	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027031900 BA(027) ES1(03) SULAWESI SELATAN	0	4,601,606	0	4,601,606	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
230574	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	0	2,845,457	0	2,845,457	0
251422	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ASMAT	0	303,739,968	0	303,739,968	0
280907	DINAS SOSIAL KABUPATEN PULAU TALIABU	0	375	0	375	0
359904	DINAS SOSIAL KABUPATEN NUNUKAN	0	61,905,945	0	61,905,945	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	368,491,745	0	368,491,745	
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	750,000,000	7,869,568,746	0	7,869,568,746	1,049.28
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL					
027040100K	BA(027) ES1(04) DKI JAKARTA					
352594	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	0	9,816,000	0	9,816,000	0
426701	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	0	6,264,453	0	6,264,453	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
426710	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	3,569,000	8,333,400	0	8,333,400	233.49
560532	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	3,503,000	4,439,843	0	4,439,843	126.74
	JUMLAH PENDAPATAN 027040100KD BA(027) ES1(04) DKI JAKARTA	7,072,000	28,853,696	0	28,853,696	408
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
440222	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK	285,000,000	239,810,485	0	239,810,485	84.14
440238	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA	0	849,650,000	0	849,650,000	0
440244	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	0	9,072,791,908	0	9,072,791,908	0
440269	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	0	7,321,271	0	7,321,271	0
630842	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	5,670,000	277,988,429	0	277,988,429	4902.79
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	290,670,000	10,447,562,093	0	10,447,562,093	3,594.3
027040200K	BA(027) ES1(04) JAWA BARAT					
020650	LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	1,500,000	4,919,790	0	4,919,790	327.99
	JUMLAH PENDAPATAN 027040200KD BA(027) ES1(04) JAWA BARAT	1,500,000	4,919,790	0	4,919,790	327.99
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
029005	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	0	417,500	0	417,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	417,500	0	417,500	
027040200K	BA(027) ES1(04) JAWA BARAT					
369110	BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAHI	64,087,000	42,106,282	0	42,106,282	65.7
369131	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	2,158,000	5,571,447	0	5,571,447	258.18
369148	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	404,315,000	196,741,843	0	196,741,843	48.66
426669	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	15,340,000	57,814,016	0	57,814,016	376.88
426732	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	6,220,000	6,315,615	0	6,315,615	101.54

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
426814	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	150,000,000	37,923,317	0	37,923,317	25.28
526071	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	0	4,153,254	0	4,153,254	0
560504	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "CIUNG WANARA" DI BOGOR	31,366,000	41,138,717	0	41,138,717	131.16
613057	BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	21,600,000	34,377,745	0	34,377,745	159.16
	JUMLAH PENDAPATAN 027040200KD BA(027) ES1(04) JAWA BARAT	695,086,000	426,142,236	0	426,142,236	61.31
027040300K	BA(027) ES1(04) JAWA TENGAH					
030952	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	2,970,000	3,362,058	0	3,362,058	113.2
031558	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	5,127,000	11,970,312	0	11,970,312	233.48
369169	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	25,600,000	83,837,228	0	83,837,228	327.49
369173	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	29,640,000	18,574,176	0	18,574,176	62.67
426772	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTASENA" DI MAGELANG	71,513,000	30,770,007	0	30,770,007	43.03
	JUMLAH PENDAPATAN 027040300KD BA(027) ES1(04) JAWA TENGAH	134,850,000	148,513,781	0	148,513,781	110.13
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
059015	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	5,199,000	0	5,199,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	5,199,000	0	5,199,000	
027040600K	BA(027) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
690243	LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	1,236,000	10,128,431	0	10,128,431	819.45
	JUMLAH PENDAPATAN 027040600KD BA(027) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1,236,000	10,128,431	0	10,128,431	819.45
027040700K	Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara					
070161	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "BAHAGIA" DI MEDAN	6,455,000	3,510,560	0	3,510,560	54.39
426763	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN	3,072,000	6,077,020	0	6,077,020	197.82

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN					
	JUMLAH PENDAPATAN 027040700KD Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara	9,527,000	9,587,580	0	9,587,580	100.64
027040900K	BA(027) ES1(04) RIAU					
426675	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBAI" DI PEKANBARU	22,800,000	12,892,000	0	12,892,000	56.54
	JUMLAH PENDAPATAN 027040900KD BA(027) ES1(04) RIAU	22,800,000	12,892,000	0	12,892,000	56.54
027041000K	BA(027) ES1(04) JAMBI					
426794	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	1,100,000	5,282,940	0	5,282,940	480.27
	JUMLAH PENDAPATAN 027041000KD BA(027) ES1(04) JAMBI	1,100,000	5,282,940	0	5,282,940	480.27
027041100K	BA(027) ES1(04) SUMATERA SELATAN					
369600	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	8,565,000	11,867,262	0	11,867,262	138.56
	JUMLAH PENDAPATAN 027041100KD BA(027) ES1(04) SUMATERA SELATAN	8,565,000	11,867,262	0	11,867,262	138.56
027041500K	BA(027) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN					
526092	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	3,900,000	3,231,360	0	3,231,360	82.86
	JUMLAH PENDAPATAN 027041500KD BA(027) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN	3,900,000	3,231,360	0	3,231,360	82.86
027041700K	BA(027) ES1(04) SULAWESI UTARA					
426741	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	3,600,000	8,341,150	0	8,341,150	231.7
	JUMLAH PENDAPATAN 027041700KD BA(027) ES1(04) SULAWESI UTARA	3,600,000	8,341,150	0	8,341,150	231.7
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
560511	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	5,600,000	7,095,680	0	7,095,680	126.71
199008	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	11,500,000	0	11,500,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	5,600,000	18,595,680	0	18,595,680	332.07
027041900K	BA(027) ES1(04) SULAWESI SELATAN					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 6

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
352633	LOKA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA "PANGURANGI" DI TAKALAR	0	124,575	0	124,575	0
352634	LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "PANGURANGI" DI TAKALAR	0	1,230,051,834	0	1,230,051,834	0
426644	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	50,000,000	14,612,399	0	14,612,399	29.22
426690	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	3,336,000	11,302,188	0	11,302,188	338.79
627343	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	22,000,000	7,624,489	0	7,624,489	34.66
	JUMLAH PENDAPATAN 027041900KD BA(027) ES1(04) SULAWESI SELATAN	75,336,000	1,263,715,485	0	1,263,715,485	1,677.44
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
209014	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0	7,710,000	0	7,710,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	7,710,000	0	7,710,000	
027042000K	BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGGARA					
690250	LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHAI" DI KENDARI	12,000,000	4,740,000	0	4,740,000	39.5
690264	LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "MINAULA" DI KENDARI	2,400,000	8,064,000	0	8,064,000	336
	JUMLAH PENDAPATAN 027042000KD BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	14,400,000	12,804,000	0	12,804,000	88.92
027042200K	BA(027) ES1(04) BALI					
426650	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMIYA" DI TABANAN	102,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027042200KD BA(027) ES1(04) BALI	102,000,000	0	0	0	0
027042300K	BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT					
526085	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "PARAMITA" DI MATARAM	12,152,000	8,875,000	0	8,875,000	73.03
	JUMLAH PENDAPATAN 027042300KD BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT	12,152,000	8,875,000	0	8,875,000	73.03
027042400K	BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR					
426808	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	0	17,117,750	0	17,117,750	0
560550	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "EFFATA" DI KUPANG	9,862,000	69,345,856	0	69,345,856	703.16

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 7

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 027042400KD BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	9,862,000	86,463,606	0	86,463,606	876.74
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
560525	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	4,444,000	17,127,612	0	17,127,612	385.41
285138	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	3,211,000	16,803,663	0	16,803,663	523.32
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	7,655,000	33,931,275	0	33,931,275	443.26
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1,406,911,000	12,555,033,865	0	12,555,033,865	892.38
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
027050100K	BA(027) ES1(05) DKI JAKARTA					
426820	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	291,447,536	0	291,447,536	0
440275	DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	0	443,605,679	0	443,605,679	0
440281	DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	0	1,055,334	0	1,055,334	0
440310	DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	95,000,000,000	529,635,932,597	0	529,635,932,597	557.51
	JUMLAH PENDAPATAN 027050100KP BA(027) ES1(05) DKI JAKARTA	95,000,000,000	530,372,041,146	0	530,372,041,146	558.29
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
029006	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	0	15,350,000	0	15,350,000	0
059016	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	117,768,536	0	117,768,536	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	133,118,536	0	133,118,536	
027050800	BA(027) ES1(05) SUMATERA BARAT					
089031	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	0	162,088,727	0	162,088,727	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027050800 BA(027) ES1(05) SUMATERA BARAT	0	162,088,727	0	162,088,727	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
099020	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	0	6,296,000	0	6,296,000	0
139013	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	83,000,000	0	83,000,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 8

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	89,296,000	0	89,296,000	
027051900	BA(027) ES1(05) SULAWESI SELATAN					
199009	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	6,459,297	0	6,459,297	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027051900 BA(027) ES1(05) SULAWESI SELATAN	0	6,459,297	0	6,459,297	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
259025	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	0	257,000,000	0	257,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	257,000,000	0	257,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	95,000,000,000	531,020,003,706	0	531,020,003,706	558.97
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN					
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
418945	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	0	12,000,000	0	12,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	12,000,000	0	12,000,000	
027060100K	BA(027) ES1(06) DKI JAKARTA					
418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	0	27,729,305	0	27,729,305	0
418942	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I	227,625,483,000	907,728,037,968	0	907,728,037,968	398.78
418943	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II	150,000,000,000	516,935,631,523	0	516,935,631,523	344.62
418944	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH III	100,000,000,000	476,647,510,023	0	476,647,510,023	476.65
	JUMLAH PENDAPATAN 027060100KP BA(027) ES1(06) DKI JAKARTA	477,625,483,000	1,901,338,908,819	0	1,901,338,908,819	398.08
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
418947	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	0	30,600,000	0	30,600,000	0
418949	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0	21,000,000	0	21,000,000	0
418950	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	13,061,879	0	13,061,879	0
418959	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	0	50,500,000	0	50,500,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 9

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
418963	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	0	42,530,000	0	42,530,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	157,691,879	0	157,691,879	
027061900	BA(027) ES1(06) SULAWESI SELATAN					
418970	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	57,000,000	0	57,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027061900 BA(027) ES1(06) SULAWESI SELATAN	0	57,000,000	0	57,000,000	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
418984	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0	1,520,600	0	1,520,600	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	1,520,600	0	1,520,600	
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	477,625,483,000	1,901,567,121,298	0	1,901,567,121,298	398.13
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN					
027110100K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
369059	SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	0	288,359,125	0	288,359,125	0
418991	PUSAT PENYULUHAN SOSIAL	0	2,419,413	0	2,419,413	0
440326	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	3,180,000	358,231,317	0	358,231,317	11265.14
682040	PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL	0	219,194,608	0	219,194,608	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027110100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	3,180,000	868,204,463	0	868,204,463	27,302.03
027110200K	BA(027) ES1(11) JAWA BARAT					
369070	POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL (POLTEKESOS) BANDUNG	5,573,700,000	5,795,492,965	0	5,795,492,965	103.98
369084	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	5,000,000	1,023,326,225	0	1,023,326,225	20466.52
	JUMLAH PENDAPATAN 027110200KD BA(027) ES1(11) JAWA BARAT	5,578,700,000	6,818,819,190	0	6,818,819,190	122.23
027110400K	BA(027) ES1(11) DI YOGYAKARTA					
369180	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	40,834,400	594,962,660	0	594,962,660	1457.01
369202	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN	36,260,000	12,050,000	0	12,050,000	33.23

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 10

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA					
	JUMLAH PENDAPATAN 027110400KD BA(027) ES1(11) DI YOGYAKARTA	77,094,400	607,012,660	0	607,012,660	787.36
027110800K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
369283	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) PADANG	56,724,000	8,484,312	0	8,484,312	14.96
	JUMLAH PENDAPATAN 027110800KD Kode UAPPAW Tidak Ada	56,724,000	8,484,312	0	8,484,312	14.96
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
418836	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	274	0	274	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	274	0	274	
027111500K	BA(027) ES1(11) KALIMANTAN SELATAN					
369752	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	18,170,000	90,402,837	0	90,402,837	497.54
	JUMLAH PENDAPATAN 027111500KD BA(027) ES1(11) KALIMANTAN SELATAN	18,170,000	90,402,837	0	90,402,837	497.54
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
418840	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI UTARA	0	48,073	0	48,073	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	48,073	0	48,073	
027111900K	BA(027) ES1(11) SULAWESI SELATAN					
369965	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR	40,783,600	17,821,770	0	17,821,770	43.7
	JUMLAH PENDAPATAN 027111900KD BA(027) ES1(11) SULAWESI SELATAN	40,783,600	17,821,770	0	17,821,770	43.7
027112500K	BA(027) ES1(11) PAPUA					
578995	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) JAYAPURA	60,250,000	37,400,000	0	37,400,000	62.07
	JUMLAH PENDAPATAN 027112500KD BA(027) ES1(11) PAPUA	60,250,000	37,400,000	0	37,400,000	62.07
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL	5,834,902,000	8,448,193,579	0	8,448,193,579	144.79
	JUMLAH PENDAPATAN	584,168,047,000	2,464,245,701,084	281,500,000	2,463,964,201,084	421.84

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	191,394,999,000	198,566,177,000	189,156,731,611	16,988,000	189,139,743,611	95.26	9,426,433,389
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,174,000	4,305,000	2,708,324	25,831	2,682,493	62.91	1,622,507
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,376,081,000	14,033,032,000	13,163,233,134	8,863,290	13,154,369,844	93.8	878,662,156
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,800,165,000	3,935,699,000	3,551,516,604	1,442,982	3,550,073,622	90.24	385,625,378
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,675,938,000	9,867,133,000	9,317,770,000	10,520,100	9,307,249,900	94.43	559,883,100
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,299,882,000	10,261,971,000	9,673,655,000	1,740,100	9,671,914,900	94.27	590,056,100
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,327,361,000	2,168,782,000	1,073,934,890	0	1,073,934,890	49.52	1,094,847,110
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	9,881,953,000	9,960,183,000	8,690,930,160	2,172,600	8,688,757,560	87.26	1,271,425,440
511129	Belanja Uang Makan PNS	34,263,602,000	32,817,689,000	27,035,521,451	5,167,300	27,030,354,151	82.38	5,787,334,849
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	212,700,000	212,700,000	189,400,000	0	189,400,000	89.05	23,300,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	71,098,000	56,509,000	0	0	0	0	56,509,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,068,576,000	6,927,669,000	5,230,255,000	25,976,438	5,204,278,562	75.5	1,723,390,438
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3,731,390,000	3,938,079,000	3,935,746,895	0	3,935,746,895	99.94	2,332,105
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	5,003,000	5,003,000	0	0	0	0	5,003,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	285,112,922,000	292,754,931,000	271,021,403,069	72,896,641	270,948,506,428	92.58	21,806,424,572
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,928,504,000	2,008,634,000	1,606,735,000	0	1,606,735,000	79.99	401,899,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,928,504,000	2,008,634,000	1,606,735,000	0	1,606,735,000	79.99	401,899,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	223,075,832,000	208,396,897,000	173,039,934,658	28,866,201	173,011,068,457	83.03	35,385,828,543
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	223,075,832,000	208,396,897,000	173,039,934,658	28,866,201	173,011,068,457	83.03	35,385,828,543
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	510,117,258,000	503,160,462,000	445,668,072,727	101,762,842	445,566,309,885	88.57	57,594,152,115
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	68,279,448,000	74,627,873,000	73,890,656,174	1,050,000	73,889,606,174	99.01	738,266,826
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	9,069,283,000	5,119,276,000	4,944,025,058	5,729,798	4,938,295,260	96.58	180,980,740
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,058,670,000	1,652,986,000	1,602,269,980	0	1,602,269,980	96.93	50,716,020
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,142,362,000	1,131,141,000	805,130,880	0	805,130,880	71.18	326,010,120
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,597,886,000	25,471,023,000	24,768,343,900	2,063,500	24,766,280,400	97.24	704,742,600
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	24,714,215,000	17,004,990,000	16,026,403,862	0	16,026,403,862	94.25	978,586,138
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	197,173,000	25,174,066,000	24,361,876,917	0	24,361,876,917	96.77	812,189,083
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	131,059,037,000	150,181,355,000	146,398,706,771	8,843,298	146,389,863,473	97.48	3,791,491,527
5212	Belanja Barang Non Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	144,080,524,000	70,305,986,769	67,157,830,936	31,852,800	67,125,978,136	95.52	3,180,008,633
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,714,403,178,000	1,613,828,896,231	1,610,466,622,255	187,859,000	1,610,278,763,255	99.79	3,550,132,976
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	497,270,617,000	440,108,383,000	424,791,448,386	167,954,175	424,623,494,211	96.52	15,484,888,789
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	6,723,056,000	5,968,752,000	5,960,752,000	0	5,960,752,000	99.87	8,000,000
521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	2,823,800,000	1,031,150,000	1,031,150,000	0	1,031,150,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	3,610,500,000	2,130,956,000	2,074,098,650	600,000	2,073,498,650	97.33	57,457,350
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	206,200,000	117,600,000	115,560,000	0	115,560,000	98.27	2,040,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,467,112,000	2,112,570,710,720	2,079,512,451,298	1,853,398,135	2,077,659,053,163	98.44	34,911,657,557
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,370,584,987,000	4,246,062,434,720	4,191,109,913,525	2,241,664,110	4,188,868,249,415	98.71	57,194,185,305
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,794,733,000	28,092,976,000	27,280,645,267	5,749,242	27,274,896,025	97.11	818,079,975
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	100	0
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	106,741,000	31,296,000	31,294,350	0	31,294,350	99.99	1,650
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	142,500,000	140,391,000	140,283,000	0	140,283,000	99.92	108,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	2,200,203,000	2,432,534,000	2,407,627,581	0	2,407,627,581	98.98	24,906,419
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	138,150,000	7,717,249,000	7,429,130,080	0	7,429,130,080	96.27	288,118,920
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	36,382,327,000	38,416,546,000	37,291,080,278	5,749,242	37,285,331,036	97.07	1,131,214,964
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	18,512,988,000	19,131,413,000	18,679,577,726	0	18,679,577,726	97.64	451,835,274
522112	Belanja Langganan Telepon	2,355,814,000	1,667,368,000	1,397,046,814	0	1,397,046,831	83.79	270,321,169
522113	Belanja Langganan Air	1,441,413,000	1,356,389,000	1,308,830,264	0	1,308,830,264	96.49	47,558,736
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	269,060,000	245,380,000	224,571,370	0	224,571,370	91.52	20,808,630
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	70,017,000	1,562,071,000	1,515,975,787	0	1,515,975,787	97.05	46,095,213
522131	Belanja Jasa Konsultan	32,007,238,000	31,742,081,000	31,422,531,346	31,665,000	31,390,866,346	98.99	351,214,654
522141	Belanja Sewa	94,732,251,000	79,687,989,000	78,040,535,883	3,000,000	78,037,535,883	97.93	1,650,453,117
522151	Belanja Jasa Profesi	57,379,096,000	33,859,444,000	30,507,065,000	60,963,500	30,446,101,500	90.1	3,413,342,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	34,953,324,000	30,544,944,000	30,102,020,308	0	30,102,020,308	98.55	442,923,692
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	549,130,000	25,661,859,000	24,590,525,417	22,290,000	24,568,235,417	95.83	1,093,623,583
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	242,270,331,000	225,458,938,000	217,788,679,932	117,918,500	217,670,761,432	96.6	7,788,176,568
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29,363,471,000	30,911,930,000	30,857,636,253	0	30,857,636,253	99.82	54,293,747
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	569,977,000	590,501,000	587,327,791	0	587,327,791	99.46	3,173,209
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	0	246,303,000	246,302,525	0	246,302,525	100	475
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	141,710,000	138,268,500	0	138,268,500	97.57	3,441,500
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,431,665,000	1,551,909,000	1,533,052,733	0	1,533,052,733	98.78	18,856,267
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,438,336,000	34,055,666,000	33,230,307,736	0	33,230,307,736	97.58	825,358,264

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,597,000	17,597,000	17,526,595	0	17,526,595	99.6	70,405
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,466,569,000	3,920,862,000	3,896,417,632	0	3,896,417,632	99.38	24,444,368
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	277,209,000	364,252,000	357,296,374	0	357,296,374	98.09	6,955,626
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	72,000,000	54,000,000	53,654,650	0	53,654,650	99.36	345,350
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,744,338,000	1,641,161,000	1,620,612,100	0	1,620,612,100	98.75	20,548,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	72,381,162,000	73,495,891,000	72,538,402,889	0	72,538,402,889	98.7	957,488,111
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	392,711,988,000	209,300,513,800	199,167,096,365	2,634,907,552	196,532,188,813	95.16	12,768,324,987
524112	Belanja Perjalanan Tetap	122,250,000	55,989,000	55,968,601	0	55,968,601	99.96	20,399
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,109,454,000	19,499,618,000	17,865,769,444	157,830,000	17,707,939,444	91.62	1,791,678,556
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	171,716,848,000	82,012,499,000	77,855,334,519	2,083,911,226	75,771,423,293	94.93	6,241,075,707
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	169,550,000	19,537,331,000	18,600,575,283	51,779,000	18,548,796,283	95.21	988,534,717
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	274,638,113,000	136,343,049,000	129,509,917,553	2,878,193,397	126,631,724,156	94.99	9,711,324,844
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	880,468,203,000	466,748,999,800	443,054,661,765	7,806,621,175	435,248,040,590	94.92	31,500,959,210
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2,988,304,000	317,806,000	317,455,600	5,713,120	311,742,480	99.89	6,063,520
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2,317,923,000	332,386,000	315,187,863	0	315,187,863	94.83	17,198,137
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	5,306,227,000	650,192,000	632,643,463	5,713,120	626,930,343	97.3	23,261,657
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	52,748,000,000	0	0	0	0		0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	118,272,000	118,272,000	118,200,000	0	118,200,000	99.94	72,000
526123	Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	810,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	53,676,272,000	118,272,000	118,200,000	0	118,200,000	99.94	72,000
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	2,508,731,000	73,385,837,000	73,174,785,520	0	73,174,785,520	99.71	211,051,480
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada	0	9,252,250,000	9,238,750,000	0	9,238,750,000	99.85	13,500,000
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada	0	34,601,247,000	34,264,774,348	0	34,264,774,348	99.03	336,472,652
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	2,508,731,000	117,239,334,000	116,678,309,868	0	116,678,309,868	99.52	561,024,132
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,794,637,277,000	5,318,371,962,520	5,225,610,598,491	10,186,509,445	5,215,424,089,046	98.26	102,947,873,474
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	8,189,121,000	29,802,418,000	29,722,837,910	7,094,000	29,715,743,910	99.73	86,674,090
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	8,189,121,000	29,802,418,000	29,722,837,910	7,094,000	29,715,743,910	99.73	86,674,090
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105,318,844,000	142,829,958,000	141,954,607,788	0	141,954,607,788	99.39	875,350,212
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	100	0
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-	0	988,950,000	987,600,000	0	987,600,000	99.86	1,350,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	193,267,000	193,267,000	0	193,267,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	105,318,844,000	144,037,175,000	143,160,474,788	0	143,160,474,788	99.39	876,700,212
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67,747,197,000	9,598,442,000	9,597,223,600	4,480,501	9,592,743,099	99.99	5,698,901
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	99,274,000	99,274,000	99,211,060	0	99,211,060	99.94	62,940
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	183,000,000	183,000,000	180,476,000	0	180,476,000	98.62	2,524,000
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	0	1,014,000,000	1,011,448,264	0	1,011,448,264	99.75	2,551,736
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	84,543,845,000	48,368,113,000	48,322,070,122	7,950,000	48,314,120,122	99.9	53,992,878
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	152,573,316,000	59,262,829,000	59,210,429,046	12,430,501	59,197,998,545	99.91	64,830,455
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534121	Belanja Modal Irigasi	0	197,600,000	197,500,000	0	197,500,000	99.95	100,000
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	185,000,000	184,650,000	184,650,000	0	184,650,000	100	0
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	340,650,000	340,650,000	0	340,650,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	185,000,000	722,900,000	722,800,000	0	722,800,000	99.99	100,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	7,055,402,000	12,412,267,000	12,233,632,866	0	12,233,632,866	98.56	178,634,134
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	498,000,000	2,334,986,000	2,330,280,228	0	2,330,280,228	99.8	4,705,772
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	7,553,402,000	14,747,253,000	14,563,913,094	0	14,563,913,094	98.76	183,339,906
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	273,819,683,000	248,572,575,000	247,380,454,838	19,524,501	247,360,930,337	99.52	1,211,644,663
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial							
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk	171,271,750,000	231,294,262,000	229,248,862,000	861,845,654	228,387,016,346	99.12	2,907,245,654
571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk	4,332,000,000	3,328,225,000	3,081,186,790	0	3,081,186,790	92.58	247,038,210
571114	Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk	0	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5711	175,603,750,000	234,747,487,000	232,455,048,790	861,845,654	231,593,203,136	99.02	3,154,283,864
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial							
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk	54,620,000,000	88,468,240,000	88,468,240,000	140,007,000	88,328,233,000	100	140,007,000
573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk	51,524,000,000	46,720,000,000	45,133,055,186	0	45,133,055,186	96.6	1,586,944,814
573115	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk	0	4,505,850,000,000	4,505,850,000,000	0	4,505,850,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5731	106,144,000,000	4,641,038,240,000	4,639,451,295,186	140,007,000	4,639,311,288,186	99.97	1,726,951,814
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk	29,178,579,326,000	28,575,092,083,000	28,575,092,061,960	15,771,082,890	28,559,320,979,070	100	15,771,103,930
574114	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk	0	8,281,736,500,000	8,281,736,500,000	15,196,026,752	8,266,540,473,248	100	15,196,026,752
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	29,178,579,326,000	36,856,828,583,000	36,856,828,561,960	30,967,109,642	36,825,861,452,318	100	30,967,130,682
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan							
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam	28,623,750,000,000	42,658,914,689,480	41,580,381,100,000	2,135,594,627,934	39,444,786,472,066	97.47	3,214,128,217,414
575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam	0	36,639,126,000,000	36,528,892,725,077	354,481,445,077	36,174,411,280,000	99.7	464,714,720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5751	28,623,750,000,000	79,298,040,689,480	78,109,273,825,077	2,490,076,073,011	75,619,197,752,066	98.5	3,678,842,937,414
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana							
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam	72,300,000,000	156,386,700,000	156,369,750,000	0	156,369,750,000	99.99	16,950,000
576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam	32,692,300,000	181,905,975,000	181,456,979,902	0	181,456,979,902	99.75	448,995,098
576115	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam	0	6,732,836,600,000	6,727,346,068,000	1,044,584,056	6,726,301,483,944	99.92	6,535,116,056
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5761	104,992,300,000	7,071,129,275,000	7,065,172,797,902	1,044,584,056	7,064,128,213,846	99.92	7,001,061,154
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	58,189,069,376,000	128,101,784,274,480	126,903,181,528,915	2,523,089,619,363	124,380,091,909,552	99.06	3,721,692,364,928
	JUMLAH BELANJA	62,767,643,594,000	134,171,889,274,000	132,821,840,654,971	2,533,397,416,151	130,288,443,238,820	98.99	3,883,446,035,180

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:09

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	64,293,159,000	64,293,159,000	55,540,955,643	11,647,887	55,529,307,756	86.37	8,763,851,244
52	BELANJA BARANG	280,450,814,000	252,784,276,000	248,690,435,573	302,643,086	248,387,792,487	98.26	4,396,483,513
53	BELANJA MODAL	123,481,682,000	88,559,836,000	88,238,894,994	0	88,238,894,994	99.64	320,941,006
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	468,225,655,000	405,637,271,000	392,470,286,210	314,290,973	392,155,995,237	96.75	13,481,275,763
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	17,179,299,000	16,376,083,000	15,705,553,313	371,823	15,705,181,490	95.9	670,901,510
52	BELANJA BARANG	29,053,403,000	16,174,687,000	16,141,755,880	22,489,500	16,119,266,380	99.66	55,420,620
53	BELANJA MODAL	318,068,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	46,550,770,000	32,550,770,000	31,847,309,193	22,861,323	31,824,447,870	97.84	726,322,130
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL							
51	BELANJA PEGAWAI	26,104,509,000	25,278,659,000	23,621,281,333	3,032,681	23,618,248,652	93.43	1,660,410,348
52	BELANJA BARANG	297,344,857,000	931,219,105,000	924,838,016,248	370,689,827	924,467,326,421	99.27	6,751,778,579
53	BELANJA MODAL	9,564,483,000	8,837,127,000	8,830,089,000	0	8,830,089,000	99.92	7,038,000
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	58,744,000,000	4,730,663,335,000	4,729,076,390,146	140,007,000	4,728,936,383,146	99.96	1,726,951,854
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	391,757,849,000	5,695,998,226,000	5,686,365,776,727	513,729,508	5,685,852,047,219	99.83	10,146,178,781
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL							
51	BELANJA PEGAWAI	240,744,037,000	240,189,377,000	209,789,080,705	68,822,240	209,720,258,465	87.31	30,469,118,535
52	BELANJA BARANG	424,763,442,000	365,291,718,000	354,452,439,683	586,995,217	353,865,444,466	96.87	11,426,273,534
53	BELANJA MODAL	85,253,500,000	66,016,960,000	65,920,180,074	3,100,000	65,917,080,074	99.85	99,879,926
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	223,003,750,000	224,294,975,000	222,002,536,790	861,845,654	221,140,691,136	98.59	3,154,283,864
	JUMLAH BELANJA (04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL	973,764,729,000	895,793,030,000	852,164,237,252	1,520,763,111	850,643,474,141	95.13	45,149,555,859
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
51	BELANJA PEGAWAI	21,468,603,000	21,468,603,000	19,511,859,601	8,007,870	19,503,851,731	90.85	1,964,751,269
52	BELANJA BARANG	2,052,946,062,000	2,317,374,301,000	2,303,972,318,150	1,067,697,051	2,302,904,621,099	99.38	14,469,679,901
53	BELANJA MODAL	22,088,124,000	25,120,596,000	24,535,741,220	0	24,535,741,220	97.67	584,854,780
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	29,283,571,626,000	43,852,565,275,000	43,846,608,776,902	32,011,693,698	43,814,597,083,204	99.91	37,968,191,796
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	31,380,074,415,000	46,216,528,775,000	46,194,628,695,873	33,087,398,619	46,161,541,297,254	99.95	54,987,477,746
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN							
51	BELANJA PEGAWAI	20,892,531,000	20,892,531,000	17,664,178,872	1,300,359	17,662,878,513	84.54	3,229,652,487
52	BELANJA BARANG	329,535,486,000	1,236,340,770,520	1,182,190,686,014	7,349,400,293	1,174,841,285,721	95.03	61,499,484,799
53	BELANJA MODAL	1,072,011,000	1,072,011,000	1,069,791,499	0	1,069,791,499	99.79	2,219,501
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	28,623,750,000,000	79,294,260,689,480	78,105,493,825,077	2,490,076,073,011	75,615,417,752,066	95.36	3,678,842,937,414
	JUMLAH BELANJA (06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN	28,975,250,028,000	80,552,566,002,000	79,306,418,481,462	2,497,426,773,663	76,808,991,707,799	98.45	3,743,574,294,201

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 03/05/21 10:09
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL							
51	BELANJA PEGAWAI	119,435,120,000	114,662,050,000	103,835,163,260	8,579,982	103,826,583,278	90.55	10,835,466,722
52	BELANJA BARANG	380,543,213,000	199,187,105,000	195,324,946,943	486,594,471	194,838,352,472	97.82	4,348,752,528
53	BELANJA MODAL	32,041,815,000	58,966,045,000	58,785,758,051	16,424,501	58,769,333,550	99.67	196,711,450
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN	532,020,148,000	372,815,200,000	357,945,868,254	511,598,954	357,434,269,300	96.01	15,380,930,700
	JUMLAH BELANJA	62,767,643,594,000	134,171,889,274,000	132,821,840,654,971	2,533,397,416,151	130,288,443,238,820	98.99	3,883,446,035,180

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 1

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial							
2224	Hubungan Masyarakat	16,696,806,000	25,496,236,000	25,518,529,406	31,983,358	25,486,546,048	99.96	9,689,952
2225	Tata Kelola Keuangan	83,875,875,000	77,033,220,000	67,794,489,427	16,073,109	67,778,416,318	87.99	9,254,803,682
2226	Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian	14,297,468,000	8,497,468,000	8,448,833,890	64,062,650	8,384,771,240	98.67	112,696,760
2227	Perencanaan dan Penganggaran	24,028,924,000	12,078,924,000	11,307,078,494	10,786,477	11,296,292,017	93.52	782,631,983
2228	Peningkatan Sarana dan Prasarana	169,332,342,000	126,585,933,000	125,118,793,924	32,262,105	125,086,531,819	98.82	1,499,401,181
2230	Penyusunan, Kajian Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	9,494,222,000	5,394,222,000	5,264,667,481	14,591,123	5,250,076,358	97.33	144,145,642
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	317,725,637,000	255,086,003,000	243,452,392,622	169,758,822	243,282,633,800	95.439	11,803,369,200
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial							
2231	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	4,345,000,000	2,010,231,000	2,005,393,700	6,430,000	1,998,963,700	99.44	11,267,300
2232	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial	3,455,500,000	1,528,464,000	1,526,457,200	0	1,526,457,200	99.87	2,006,800
2233	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,088,805,000	1,828,753,000	1,824,730,500	5,439,500	1,819,291,000	99.48	9,462,000
2234	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang	3,671,801,000	1,580,026,000	1,573,000,200	0	1,573,000,200	99.56	7,025,800
2235	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial	30,989,664,000	25,603,296,000	24,917,727,593	10,991,823	24,906,735,770	97.28	696,560,230
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03	46,550,770,000	32,550,770,000	31,847,309,193	22,861,323	31,824,447,870	97.839	726,322,130
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2254	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)	240,499,008,000	136,787,009,000	131,994,770,662	188,220,011	131,806,550,651	96.36	4,980,458,349
2257	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat	31,020,728,000	22,088,890,000	20,751,889,362	3,397,810	20,748,491,552	93.93	1,340,398,448
2261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Badiklit Kesos	64,244,386,000	43,372,073,000	42,552,557,458	115,196,594	42,437,360,864	97.84	934,712,136

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 2

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	335,764,122,000	202,247,972,000	195,299,217,482	306,814,415	194,992,403,067	96.564	7,255,568,933
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2247	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial	77,937,335,000	101,558,183,000	90,881,558,703	31,826,595	90,849,732,108	89.46	10,708,450,892
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	77,937,335,000	101,558,183,000	90,881,558,703	31,826,595	90,849,732,108	89.487	10,708,450,892
07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
2253	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	55,718,515,000	54,807,551,000	51,646,029,449	144,845,389	51,501,184,060	93.97	3,306,366,940
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	55,718,515,000	54,807,551,000	51,646,029,449	144,845,389	51,501,184,060	94.232	3,306,366,940
08	Program Pemberdayaan Sosial							
2241	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial dan	50,852,807,000	51,660,912,000	49,310,663,628	43,850,245	49,266,813,383	95.37	2,394,098,617
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	50,852,807,000	51,660,912,000	49,310,663,628	43,850,245	49,266,813,383	95.451	2,394,098,617
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2260	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	58,011,997,000	67,068,817,000	65,789,498,748	20,407,643	65,769,091,105	98.06	1,299,725,895
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	58,011,997,000	67,068,817,000	65,789,498,748	20,407,643	65,769,091,105	98.093	1,299,725,895
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial							
5870	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	150,500,018,000	150,551,268,000	149,017,893,588	144,532,151	148,873,361,437	98.89	1,677,906,563
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	150,500,018,000	150,551,268,000	149,017,893,588	144,532,151	148,873,361,437	98.981	1,677,906,563
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2255	Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	27,674,601,000	21,574,601,000	17,797,585,103	50,799,204	17,746,785,899	82.26	3,827,815,101
2258	Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	24,718,551,000	17,956,495,000	17,079,991,413	25,966,107	17,054,025,306	94.97	902,469,694
2259	Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	57,667,101,000	39,791,601,000	38,319,852,455	67,118,461	38,252,733,994	96.13	1,538,867,006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 3

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5871	Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial	24,395,068,000	19,592,524,000	19,174,232,418	40,493,124	19,133,739,294	97.66	458,784,706
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	134,455,321,000	98,915,221,000	92,371,661,389	184,376,896	92,187,284,493	93.385	6,727,936,507
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2242	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	183,096,229,000	171,175,643,000	165,191,529,623	427,204,306	164,764,325,317	96.25	6,411,317,683
2243	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	383,998,567,000	319,874,814,000	304,281,890,303	869,571,817	303,412,318,486	94.85	16,462,495,514
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	64,281,345,000	60,040,112,000	56,893,487,991	66,551,622	56,826,936,369	94.65	3,213,175,631
2245	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	123,897,873,000	114,082,111,000	108,704,022,511	83,533,892	108,620,488,619	95.21	5,461,622,381
2246	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	139,744,507,000	126,224,993,000	123,938,045,252	42,074,879	123,895,970,373	98.15	2,329,022,627
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	895,018,521,000	791,397,673,000	759,008,975,680	1,488,936,516	757,520,039,164	95.907	33,877,633,836
07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
2248	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	272,931,724,000	523,618,031,000	519,532,815,705	96,726,737	519,436,088,968	99.2	4,181,942,032
2249	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	105,149,657,000	7,281,695,955,000	7,275,234,965,072	1,092,864,556	7,274,142,100,516	99.9	7,553,854,484
2251	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	30,946,274,519,000	38,356,407,238,000	38,348,214,885,647	31,752,961,937	38,316,461,923,710	99.9	39,945,314,290
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	31,324,355,900,000	46,161,721,224,000	46,142,982,666,424	32,942,553,230	46,110,040,113,194	99.959	51,681,110,806
08	Program Pemberdayaan Sosial							
2236	Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	48,861,908,000	33,400,716,000	32,983,311,170	107,043,400	32,876,267,770	98.43	524,448,230
2239	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	162,736,400,000	5,357,533,739,000	5,353,710,767,527	96,392,814	5,353,614,374,713	99.93	3,919,364,287
2240	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)	108,136,400,000	68,769,270,000	66,158,192,816	93,738,498	66,064,454,318	96.07	2,704,815,682
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	20,671,359,000	11,041,279,000	10,742,246,626	32,697,551	10,709,549,075	97	331,729,925
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	340,406,067,000	5,470,745,004,000	5,463,594,518,139	329,872,263	5,463,264,645,876	99.869	7,480,358,124

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 03/05/21 10:10
Halaman : 4
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
09	Program Penanganan Fakir Miskin							
5873	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	10,198,838,089,000	30,258,849,023,750	29,801,956,486,407	584,234,414,615	29,217,722,071,792	96.56	1,041,126,951,958
5874	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	9,694,880,289,000	27,929,782,966,750	27,336,414,669,243	924,310,298,088	26,412,104,371,155	94.57	1,517,678,595,595
5875	Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	9,003,991,110,000	22,298,773,400,700	22,107,428,770,953	988,672,298,281	21,118,756,472,672	94.71	1,180,016,928,028
5876	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Kemiskinan	77,540,540,000	65,160,610,800	60,618,554,859	209,762,679	60,408,792,180	92.71	4,751,818,620
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	28,975,250,028,000	80,552,566,002,000	79,306,418,481,462	2,497,426,773,663	76,808,991,707,799	98.453	3,743,574,294,201
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	62,762,547,038,000	133,990,876,600,000	132,641,620,866,507	2,533,257,409,151	130,108,363,457,356	98.993	3,882,513,142,644
04	PNBP							
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2260	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	3,788,708,000	4,583,190,000	4,485,490,635	0	4,485,490,635	97.87	97,699,365
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	3,788,708,000	4,583,190,000	4,485,490,635	0	4,485,490,635	97.868	97,699,365
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2243	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	468,144,000	468,144,000	194,200,000	0	194,200,000	41.48	273,944,000
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	3,566,000	3,566,000	3,566,000	0	3,566,000	100	0
2245	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	337,163,000	337,163,000	226,660,000	0	226,660,000	67.23	110,503,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	808,873,000	808,873,000	424,426,000	0	424,426,000	52.471	384,447,000
08	Program Pemberdayaan Sosial							
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	498,975,000	498,975,000	367,260,000	0	367,260,000	73.6	131,715,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	498,975,000	498,975,000	367,260,000	0	367,260,000	73.603	131,715,000
	JUMLAH BELANJA PNBP	5,096,556,000	5,891,038,000	5,277,176,635	0	5,277,176,635	89.58	613,861,365

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 5

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
08	Program Pemberdayaan Sosial							
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	0	173,093,335,000	173,093,334,960	140,007,000	172,953,327,960	99.92	140,007,040
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	0	173,093,335,000	173,093,334,960	140,007,000	172,953,327,960	100	140,007,040
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	173,093,335,000	173,093,334,960	140,007,000	172,953,327,960	100	140,007,040
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2243	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	0	69,405,000	69,405,000	0	69,405,000	100	0
2245	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	0	1,958,896,000	1,779,871,869	0	1,779,871,869	90.86	179,024,131
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	0	2,028,301,000	1,849,276,869	0	1,849,276,869	91.174	179,024,131
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	2,028,301,000	1,849,276,869	0	1,849,276,869	91.174	179,024,131
	JUMLAH	62,767,643,594,000	134,171,889,274,000	132,821,840,654,971	2,533,397,416,151	130,288,443,238,820	98.99	3,883,446,035,180

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
310014	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	190,986,000	101,964,000	99,992,984	0	99,992,984	98.07	1,971,016
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	190,986,000	101,964,000	99,992,984	0	99,992,984	98.07	1,971,016
027010100KP	BA(027) ES1(01) DKI JAKARTA							
418939	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	150,500,018,000	150,551,268,000	149,017,893,588	144,532,151	148,873,361,437	98.89	1,677,906,563
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) DKI JAKARTA	150,500,018,000	150,551,268,000	149,017,893,588	144,532,151	148,873,361,437	98.98	1,677,906,563
027010700	BA(027) ES1(01) SUMATERA UTARA							
070007	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	306,278,000	107,840,000	107,840,000	0	107,840,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) SUMATERA UTARA	306,278,000	107,840,000	107,840,000	0	107,840,000	100	0
027010800	BA(027) ES1(01) SUMATERA BARAT							
080038	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	237,619,000	102,842,000	83,778,000	2,450,000	81,328,000	79.08	21,514,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) SUMATERA BARAT	237,619,000	102,842,000	83,778,000	2,450,000	81,328,000	81.46	21,514,000
027011400DK	BA(027) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH							
140029	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	218,616,000	90,300,000	88,940,000	0	88,940,000	98.49	1,360,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH	218,616,000	90,300,000	88,940,000	0	88,940,000	98.49	1,360,000
027011600DK	027011600DK							
160013	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	219,740,000	92,726,000	91,920,000	0	91,920,000	99.13	806,000
	JUMLAH BELANJA 027011600DK	219,740,000	92,726,000	91,920,000	0	91,920,000	99.13	806,000
027011900	BA(027) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
190005	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	297,541,000	135,105,000	129,550,100	0	129,550,100	95.89	5,554,900
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) SULAWESI SELATAN	297,541,000	135,105,000	129,550,100	0	129,550,100	95.89	5,554,900
027012600	BA(027) ES1(01) BENGKULU							
260013	DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	215,348,000	113,160,000	111,000,000	0	111,000,000	98.09	2,160,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) BENGKULU	215,348,000	113,160,000	111,000,000	0	111,000,000	98.09	2,160,000
027012900	BA(027) ES1(01) BANTEN							
290013	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	188,630,000	92,665,000	92,665,000	0	92,665,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) BANTEN	188,630,000	92,665,000	92,665,000	0	92,665,000	100	0
027013400	BA(027) ES1(01) SULAWESI BARAT							
340007	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	200,056,000	99,500,000	97,038,000	0	97,038,000	97.53	2,462,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) SULAWESI BARAT	200,056,000	99,500,000	97,038,000	0	97,038,000	97.53	2,462,000
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
010087	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	164,703,000	80,680,000	61,900,000	0	61,900,000	76.72	18,780,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl--

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
020005	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	256,124,000	99,550,000	99,550,000	0	99,550,000	100	0
030003	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	300,908,000	129,620,000	128,055,000	0	128,055,000	98.79	1,565,000
040025	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	179,722,000	81,560,000	81,560,000	0	81,560,000	100	0
050029	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	367,008,000	153,287,000	73,613,600	0	73,613,600	48.02	79,673,400
060008	DINAS SOSIAL ACEH	253,227,000	82,240,000	78,860,000	0	78,860,000	95.89	3,380,000
090030	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	215,958,000	94,192,000	94,192,000	0	94,192,000	100	0
100011	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	185,643,000	101,040,000	99,424,680	0	99,424,680	98.4	1,615,320
110008	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	238,609,000	96,455,000	96,455,000	0	96,455,000	100	0
120015	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	195,503,000	99,963,000	99,963,000	0	99,963,000	100	0
130027	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	198,082,000	182,910,000	178,820,000	0	178,820,000	97.76	4,090,000
150012	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	213,496,000	86,360,000	85,940,000	0	85,940,000	99.51	420,000
170014	DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	212,083,000	108,858,000	108,858,000	0	108,858,000	100	0
180014	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	227,968,000	210,504,000	210,504,000	0	210,504,000	100	0
200015	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	204,702,000	124,040,000	122,750,000	0	122,750,000	98.96	1,290,000
210012	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	250,805,000	110,830,000	109,380,000	0	109,380,000	98.69	1,450,000
220032	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	203,892,000	90,709,000	89,708,000	0	89,708,000	98.9	1,001,000
230017	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	237,428,000	121,660,000	103,690,000	0	103,690,000	85.23	17,970,000
240036	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	279,097,000	279,097,000	78,398,000	0	78,398,000	28.09	200,699,000
250044	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	414,992,000	182,253,000	170,384,000	0	170,384,000	93.49	11,869,000
280015	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	225,197,000	204,025,000	204,025,000	0	204,025,000	100	0
300022	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	202,300,000	119,870,000	115,212,200	0	115,212,200	96.11	4,657,800
320003	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	181,182,000	167,294,000	166,679,100	0	166,679,100	99.63	614,900
330005	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	361,840,000	163,200,000	162,000,000	0	162,000,000	99.26	1,200,000
417729	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	164,497,000	91,180,000	91,155,000	1,770,000	89,385,000	98.03	1,795,000
440121	SEKRETARIAT JENDERAL	309,715,857,000	250,888,524,000	239,638,591,958	165,538,822	239,473,053,136	95.45	11,415,470,864
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	315,650,823,000	254,149,901,000	242,549,668,538	167,308,822	242,382,359,716	95.44	11,767,541,284
	JUMLAH BELANJA 01	468,225,655,000	405,637,271,000	392,470,286,210	314,290,973	392,155,995,237	96.75	13481275763
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
027020100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
426638	INSPEKTORAT JENDERAL	46,550,770,000	32,550,770,000	31,847,309,193	22,861,323	31,824,447,870	97.77	726,322,130
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	46,550,770,000	32,550,770,000	31,847,309,193	22,861,323	31,824,447,870	97.84	726,322,130
	JUMLAH BELANJA 02	46,550,770,000	32,550,770,000	31,847,309,193	22,861,323	31,824,447,870	97.84	726322130
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
0003100DK 319011	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	1,620,023,000	1,203,861,000	1,198,046,000	0	1,198,046,000	99.52	5,815,000
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	1,620,023,000	1,203,861,000	1,198,046,000	0	1,198,046,000	99.52	5,815,000
0003100TP 319096	Koordinator UAPPA-W Satker TP Provinsi Gorontalo DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	3,448,052,000	3,448,052,000	3,218,008,326	0	3,218,008,326	93.33	230,043,674
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker TP Provinsi Gorontalo	3,448,052,000	3,448,052,000	3,218,008,326	0	3,218,008,326	93.33	230,043,674
027030100KP 418940	BA(027) ES1(03) DKI JAKARTA DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL	11,795,334,000	179,960,319,000	179,815,070,560	140,254,551	179,674,816,009	99.84	285,502,991
440193	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	37,050,403,000	9,830,512,000	9,543,317,600	52,700,498	9,490,617,102	96.54	339,894,898
440213	DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	39,940,506,000	27,791,210,000	27,594,082,470	47,808,400	27,546,274,070	99.12	244,935,930
630859	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	50,852,807,000	51,660,912,000	49,310,663,628	43,850,245	49,266,813,383	95.37	2,394,098,617
682033	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	108,770,820,000	5,309,580,159,000	5,306,560,403,627	61,392,814	5,306,499,010,813	99.94	3,081,148,187
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) DKI JAKARTA	248,409,870,000	5,578,823,112,000	5,572,823,537,885	346,006,508	5,572,477,531,377	99.89	6,345,580,623
027030700 079003	BA(027) ES1(03) SUMATERA UTARA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	3,655,070,000	3,147,890,000	3,055,170,000	18,000,000	3,037,170,000	96.48	110,720,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SUMATERA UTARA	3,655,070,000	3,147,890,000	3,055,170,000	18,000,000	3,037,170,000	97.05	110,720,000
027030700TP 079134	BA(027) ES1(03) TP DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	481,870,000	49,920,000	35,240,000	0	35,240,000	70.59	14,680,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) TP	481,870,000	49,920,000	35,240,000	0	35,240,000	70.59	14,680,000
027030800DK 089029	Kode UAPPAW Tidak Ada DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	2,112,771,000	1,547,425,000	1,536,314,000	0	1,536,314,000	99.28	11,111,000
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	2,112,771,000	1,547,425,000	1,536,314,000	0	1,536,314,000	99.28	11,111,000
027030800TP 089141	BA(027) ES1(03) SUMATERA BARAT DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	3,562,000,000	3,562,000,000	2,804,498,597	0	2,804,498,597	78.73	757,501,403
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SUMATERA BARAT	3,562,000,000	3,562,000,000	2,804,498,597	0	2,804,498,597	78.73	757,501,403
027030900TP 091327	BA(027) ES1(03) RIAU TP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	471,834,000	471,834,000	437,389,000	0	437,389,000	92.7	34,445,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) RIAU TP	471,834,000	471,834,000	437,389,000	0	437,389,000	92.7	34,445,000
027031400XX 149017	BA(027) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1,880,234,000	1,303,228,000	1,286,318,000	0	1,286,318,000	98.7	16,910,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
149122	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	951,716,000	951,716,000	928,817,500	0	928,817,500	97.59	22,898,500
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH	2,831,950,000	2,254,944,000	2,215,135,500	0	2,215,135,500	98.23	39,808,500
027031600DK 169007	027031600DK DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1,651,436,000	1,055,987,000	1,012,557,000	0	1,012,557,000	95.89	43,430,000
	JUMLAH BELANJA 027031600DK	1,651,436,000	1,055,987,000	1,012,557,000	0	1,012,557,000	95.89	43,430,000
027031600TP 169123	027031600TP DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3,859,836,000	3,859,836,000	3,787,064,000	0	3,787,064,000	98.11	72,772,000
	JUMLAH BELANJA 027031600TP	3,859,836,000	3,859,836,000	3,787,064,000	0	3,787,064,000	98.11	72,772,000
027031700 179009 179111	BA(027) ES1(03) SULAWESI UTARA DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	2,165,148,000 1,338,162,000	1,446,856,000 1,338,162,000	1,443,153,000 1,331,439,500	0 0	1,443,153,000 1,331,439,500	99.74 99.5	3,703,000 6,722,500
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SULAWESI UTARA	3,503,310,000	2,785,018,000	2,774,592,500	0	2,774,592,500	99.63	10,425,500
027031900 190637 199135	BA(027) ES1(03) SULAWESI SELATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANA TORAJA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	504,410,000 465,110,000	504,410,000 465,110,000	502,840,000 460,764,000	0 0	502,840,000 460,764,000	99.69 99.07	1,570,000 4,346,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SULAWESI SELATAN	969,520,000	969,520,000	963,604,000	0	963,604,000	99.39	5,916,000
027032100 219018	BA(027) ES1(03) MALUKU DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	2,073,716,000	985,880,000	940,880,000	8,000,000	932,880,000	94.62	53,000,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) MALUKU	2,073,716,000	985,880,000	940,880,000	8,000,000	932,880,000	95.44	53,000,000
027032600 269019	BA(027) ES1(03) BENGKULU DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	1,581,396,000	1,120,240,000	1,108,710,000	0	1,108,710,000	98.97	11,530,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) BENGKULU	1,581,396,000	1,120,240,000	1,108,710,000	0	1,108,710,000	98.97	11,530,000
027032900 299012	BA(027) ES1(03) BANTEN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	1,867,169,000	1,431,546,000	1,409,046,000	47,335,000	1,361,711,000	95.12	69,835,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) BANTEN	1,867,169,000	1,431,546,000	1,409,046,000	47,335,000	1,361,711,000	98.43	69,835,000
027033400 340011	BA(027) ES1(03) SULAWESI BARAT DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	1,385,052,000	951,238,000	944,517,000	0	944,517,000	99.29	6,721,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SULAWESI BARAT	1,385,052,000	951,238,000	944,517,000	0	944,517,000	99.29	6,721,000
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019028	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	1,126,519,000	737,764,000	702,069,000	0	702,069,000	95.16	35,695,000
029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	4,840,270,000	4,652,270,000	4,619,828,000	0	4,619,828,000	99.3	32,442,000
039000	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	4,506,277,000	4,045,775,000	4,021,938,150	0	4,021,938,150	99.41	23,836,850
049014	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	1,880,109,000	1,563,749,000	1,554,635,872	0	1,554,635,872	99.42	9,113,128
059014	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	5,343,877,000	4,726,365,000	4,597,056,900	53,350,000	4,543,706,900	96.14	182,658,100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
069006	DINAS SOSIAL ACEH	2,772,763,000	2,212,395,000	2,192,743,000	0	2,192,743,000	99.11	19,652,000
069143	DINAS SOSIAL ACEH	3,458,004,000	71,420,000	71,420,000	0	71,420,000	100	0
099018	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	2,048,178,000	1,437,926,000	1,394,130,000	0	1,394,130,000	96.95	43,796,000
109009	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	1,958,593,000	1,329,224,000	1,296,884,000	0	1,296,884,000	97.57	32,340,000
109129	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	2,109,930,000	2,109,930,000	2,087,988,000	0	2,087,988,000	98.96	21,942,000
119009	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	2,435,664,000	1,872,466,000	1,848,041,000	0	1,848,041,000	98.7	24,425,000
119140	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,700,824,000	1,700,824,000	1,586,216,161	0	1,586,216,161	93.26	114,607,839
129016	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	2,303,760,000	1,857,290,000	1,845,290,000	0	1,845,290,000	99.35	12,000,000
139011	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1,973,082,000	1,427,421,000	1,415,737,903	0	1,415,737,903	99.18	11,683,097
139136	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3,248,952,000	3,248,952,000	3,225,063,500	0	3,225,063,500	99.26	23,888,500
159008	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1,970,417,000	1,412,027,000	1,403,159,600	0	1,403,159,600	99.37	8,867,400
189013	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	2,095,085,000	1,429,657,000	1,422,238,750	0	1,422,238,750	99.48	7,418,250
189141	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	960,664,000	960,664,000	958,014,000	0	958,014,000	99.72	2,650,000
199007	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	3,309,626,000	2,637,116,000	2,549,596,050	0	2,549,596,050	96.68	87,519,950
205402	DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON SELATAN	454,012,000	454,012,000	445,606,950	0	445,606,950	98.15	8,405,050
209013	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2,245,941,000	1,676,692,000	1,670,036,000	0	1,670,036,000	99.6	6,656,000
209115	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2,717,212,000	2,717,212,000	2,705,151,000	0	2,705,151,000	99.56	12,061,000
210446	DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU	5,229,028,000	5,229,028,000	5,130,607,500	0	5,130,607,500	98.12	98,420,500
219096	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	481,284,000	481,284,000	471,482,160	0	471,482,160	97.96	9,801,840
229011	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	1,207,582,000	810,887,000	685,234,000	0	685,234,000	84.5	125,653,000
230459	DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA	882,440,000	882,440,000	913,070,700	31,665,000	881,405,700	99.88	1,034,300
230574	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	1,071,440,000	1,071,440,000	1,042,879,900	0	1,042,879,900	97.33	28,560,100
239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,914,122,000	1,323,074,000	1,321,084,600	8,625,000	1,312,459,600	99.2	10,614,400
249017	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2,878,420,000	2,186,643,000	2,135,752,000	0	2,135,752,000	97.67	50,891,000
249167	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2,363,760,000	2,363,760,000	2,185,549,586	0	2,185,549,586	92.46	178,210,414
250163	DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	841,776,000	89,760,000	83,940,000	0	83,940,000	93.52	5,820,000
251422	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ASMAT	4,439,844,000	4,439,844,000	4,263,666,758	748,000	4,262,918,758	96.02	176,925,242
251739	DINAS SOSIAL KABUPATEN KEEROM	3,596,760,000	3,596,760,000	3,570,768,000	0	3,570,768,000	99.28	25,992,000
253008	DINAS SOSIAL KABUPATEN DOGIYAI	4,467,036,000	4,467,036,000	4,376,605,000	0	4,376,605,000	97.98	90,431,000
259023	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	6,081,657,000	3,727,496,000	3,355,970,000	0	3,355,970,000	90.03	371,526,000
259105	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	433,428,000	49,920,000	33,720,000	0	33,720,000	67.55	16,200,000
280907	DINAS SOSIAL KABUPATEN PULAU TALIABU	2,710,660,000	2,710,660,000	2,690,912,390	0	2,690,912,390	99.27	19,747,610

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
289016	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	1,880,440,000	1,223,888,000	1,223,888,000	0	1,223,888,000	100	0
289110	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	450,090,000	450,090,000	449,640,000	0	449,640,000	99.9	450,000
309016	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,045,840,000	627,175,000	622,439,500	0	622,439,500	99.24	4,735,500
329001	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,386,562,000	926,062,000	923,638,001	0	923,638,001	99.74	2,423,999
330834	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA	466,080,000	74,220,000	50,000,000	0	50,000,000	67.37	24,220,000
339000	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	2,538,942,000	1,818,660,000	1,766,216,000	0	1,766,216,000	97.12	52,444,000
339094	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	417,780,000	417,780,000	410,180,000	0	410,180,000	98.18	7,600,000
340148	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	2,574,138,000	2,574,138,000	2,449,198,014	0	2,449,198,014	95.15	124,939,986
340458	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR	471,538,000	471,538,000	458,274,000	0	458,274,000	97.19	13,264,000
417730	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,087,422,000	552,903,000	499,747,000	0	499,747,000	90.39	53,156,000
427895	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU	921,676,000	921,676,000	819,729,483	0	819,729,483	88.94	101,946,517
681555	DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA	487,080,000	74,220,000	74,220,000	0	74,220,000	100	0
681562	DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA	486,390,000	486,390,000	480,210,491	0	480,210,491	98.73	6,179,509
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	108,272,974,000	88,329,923,000	86,101,466,919	94,388,000	86,007,078,919	97.48	2,322,844,081
	JUMLAH BELANJA 03	391,757,849,000	5,695,998,226,000	5,686,365,776,727	513,729,508	5,685,852,047,219	99.83	10146178781
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
319012	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	197,550,000	197,550,000	197,458,300	0	197,458,300	99.95	91,700
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	197,550,000	197,550,000	197,458,300	0	197,458,300	99.95	91,700
027040100KD	BA(027) ES1(04) DKI JAKARTA							
352594	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	16,032,603,000	14,617,137,000	14,017,093,390	70	14,017,093,320	95.89	600,043,680
426701	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	14,653,240,000	13,663,440,000	13,174,127,331	437,790	13,173,689,541	96.42	489,750,459
426710	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	11,894,413,000	10,692,449,000	10,208,736,385	1,078	10,208,735,307	95.48	483,713,693
560532	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	9,530,450,000	8,892,273,000	8,276,357,893	2,731,436	8,273,626,457	93.04	618,646,543
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) DKI JAKARTA	52,110,706,000	47,865,299,000	45,676,314,999	3,170,374	45,673,144,625	95.43	2,192,154,375
027040200KD	BA(027) ES1(04) JAWA BARAT							
020650	LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	5,547,042,000	5,432,802,000	5,272,743,761	2,074,000	5,270,669,761	97.02	162,132,239
369110	BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAH	14,704,972,000	11,901,042,000	11,157,254,664	0	11,157,254,664	93.75	743,787,336
369131	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	8,662,283,000	8,635,327,000	8,169,433,936	44,535,500	8,124,898,436	94.09	510,428,564

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
369148	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	36,870,190,000	21,306,918,000	19,248,875,932	0	19,248,875,932	90.34	2,058,042,068
426669	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	12,261,148,000	10,679,255,000	10,221,374,757	1,511,490	10,219,863,267	95.7	459,391,733
426732	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	46,644,547,000	45,040,212,000	44,678,125,838	3,001,353	44,675,124,485	99.19	365,087,515
426814	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	14,257,016,000	12,661,972,000	12,397,973,289	685,764	12,397,287,525	97.91	264,684,475
526071	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	15,041,666,000	13,115,331,000	12,330,099,940	71,606,078	12,258,493,862	93.47	856,837,138
560504	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "CIUNG WANARA" DI BOGOR	9,633,855,000	9,246,866,000	8,621,067,044	4,452,840	8,616,614,204	93.18	630,251,796
613057	BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	74,592,675,000	70,607,275,000	69,742,535,604	682,236,760	69,060,298,844	97.81	1,546,976,156
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) JAWA BARAT	238,215,394,000	208,627,000,000	201,839,484,765	810,103,785	201,029,380,980	96.75	7,597,619,020
027040300KD	BA(027) ES1(04) JAWA TENGAH							
030952	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	8,293,788,000	7,796,129,000	7,707,851,385	383	7,707,851,002	98.87	88,277,998
031558	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	8,585,329,000	8,379,156,000	8,113,825,737	120	8,113,825,617	96.83	265,330,383
369169	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	34,047,319,000	30,113,405,000	28,728,918,070	25,093,515	28,703,824,555	95.32	1,409,580,445
369173	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	27,269,870,000	22,807,687,000	21,717,962,107	6,086,434	21,711,875,673	95.2	1,095,811,327
426772	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTASENA" DI MAGELANG	11,089,300,000	10,774,353,000	10,039,999,483	31,855,427	10,008,144,056	92.89	766,208,944
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) JAWA TENGAH	89,285,606,000	79,870,730,000	76,308,556,782	63,035,879	76,245,520,903	95.54	3,625,209,097
027040600KD	BA(027) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
690243	LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	7,077,513,000	6,802,571,000	6,358,065,337	317	6,358,065,020	93.47	444,505,980
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) NANGGROE ACEH	7,077,513,000	6,802,571,000	6,358,065,337	317	6,358,065,020	93.47	444,505,980
027040700DK	DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA							
079004	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	282,780,000	282,780,000	282,622,000	0	282,622,000	99.94	158,000
	JUMLAH BELANJA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	282,780,000	282,780,000	282,622,000	0	282,622,000	99.94	158,000
027040700KD	Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara							
070161	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "BAHAGIA" DI MEDAN	8,140,636,000	7,936,909,000	7,056,471,362	1,100,567	7,055,370,795	88.89	881,538,205
426763	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	11,118,306,000	10,613,062,000	10,169,185,863	2,192,090	10,166,993,773	95.8	446,068,227
	JUMLAH BELANJA Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera	19,258,942,000	18,549,971,000	17,225,657,225	3,292,657	17,222,364,568	92.86	1,327,606,432

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	Utara							
027040800 089030	BA(027) ES1(04) SUMATERA BARAT DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	205,800,000	205,800,000	205,052,200	4,341,000	200,711,200	97.53	5,088,800
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SUMATERA BARAT	205,800,000	205,800,000	205,052,200	4,341,000	200,711,200	99.64	5,088,800
027040900KD 426675	BA(027) ES1(04) RIAU BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBAI" DI PEKANBARU	8,827,205,000	8,437,403,000	7,772,733,999	370,542	7,772,363,457	92.12	665,039,543
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) RIAU	8,827,205,000	8,437,403,000	7,772,733,999	370,542	7,772,363,457	92.12	665,039,543
027041000KD 426794	BA(027) ES1(04) JAMBI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	9,572,807,000	7,334,719,000	7,136,187,595	1,204,786	7,134,982,809	97.28	199,736,191
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) JAMBI	9,572,807,000	7,334,719,000	7,136,187,595	1,204,786	7,134,982,809	97.29	199,736,191
027041100KD 369600	BA(027) ES1(04) SUMATERA SELATAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	10,670,182,000	10,065,525,000	9,558,433,281	13,213,457	9,545,219,824	94.83	520,305,176
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SUMATERA SELATAN	10,670,182,000	10,065,525,000	9,558,433,281	13,213,457	9,545,219,824	94.96	520,305,176
027041400DK 149018	BA(027) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	359,050,000	359,050,000	346,550,000	0	346,550,000	96.52	12,500,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH	359,050,000	359,050,000	346,550,000	0	346,550,000	96.52	12,500,000
027041500KD 526092	BA(027) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	11,246,048,000	9,330,715,000	9,310,504,313	337	9,310,503,976	99.78	20,211,024
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN	11,246,048,000	9,330,715,000	9,310,504,313	337	9,310,503,976	99.78	20,211,024
027041600DK 169008	027041600DK DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	227,540,000	227,540,000	222,953,000	0	222,953,000	97.98	4,587,000
	JUMLAH BELANJA 027041600DK	227,540,000	227,540,000	222,953,000	0	222,953,000	97.98	4,587,000
027041700KD 426741	BA(027) ES1(04) SULAWESI UTARA BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	9,673,932,000	8,833,172,000	8,452,362,790	0	8,452,362,790	95.69	380,809,210
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI UTARA	9,673,932,000	8,833,172,000	8,452,362,790	0	8,452,362,790	95.69	380,809,210
027041900KD 352633	BA(027) ES1(04) SULAWESI SELATAN LOKA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA "PANGURANGI" DI TAKALAR	3,397,550,000	3,397,550,000	3,142,521,764	349,245	3,142,172,519	92.48	255,377,481
352634	LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "PANGURANGI" DI TAKALAR	2,213,185,000	2,213,185,000	1,769,707,955	0	1,769,707,955	79.96	443,477,045
426644	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	13,169,727,000	12,050,115,000	10,863,598,391	892,201	10,862,706,190	90.15	1,187,408,810
426690	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	37,775,429,000	35,013,194,000	34,293,202,844	7,976,256	34,285,226,588	97.92	727,967,412

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
627343	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	10,148,316,000	9,524,168,000	8,964,853,001	13,279,600	8,951,573,401	93.99	572,594,599
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI SELATAN	66,704,207,000	62,198,212,000	59,033,883,955	22,497,302	59,011,386,653	94.91	3,186,825,347
027042000KD	BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGGARA							
690250	LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHAI" DI KENDARI	7,094,513,000	6,546,277,000	6,410,997,368	320	6,410,997,048	97.93	135,279,952
690264	LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "MINAULA" DI KENDARI	29,475,494,000	28,058,163,000	27,212,959,507	30,197,270	27,182,762,237	96.88	875,400,763
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	36,570,007,000	34,604,440,000	33,623,956,875	30,197,590	33,593,759,285	97.17	1,010,680,715
027042200KD	BA(027) ES1(04) BALI							
426650	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMIYA" DI TABANAN	10,818,893,000	8,445,256,000	8,018,251,075	1,080,836	8,017,170,239	94.93	428,085,761
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) BALI	10,818,893,000	8,445,256,000	8,018,251,075	1,080,836	8,017,170,239	94.94	428,085,761
027042300KD	BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT							
526085	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "PARAMITA" DI MATARAM	9,594,699,000	9,226,103,000	8,571,084,875	5,398,388	8,565,686,487	92.84	660,416,513
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT	9,594,699,000	9,226,103,000	8,571,084,875	5,398,388	8,565,686,487	92.9	660,416,513
027042400KD	BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR							
426808	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	11,154,419,000	10,503,178,000	9,454,079,501	11,781,242	9,442,298,259	89.9	1,060,879,741
560550	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "EFFATA" DI KUPANG	8,308,984,000	7,644,914,000	7,186,403,711	12,198,517	7,174,205,194	93.84	470,708,806
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	19,463,403,000	18,148,092,000	16,640,483,212	23,979,759	16,616,503,453	91.69	1,531,588,547
027042600KD	BA(027) ES1(04) BENGKULU							
269020	DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	184,750,000	184,750,000	169,894,600	0	169,894,600	91.96	14,855,400
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) BENGKULU	184,750,000	184,750,000	169,894,600	0	169,894,600	91.96	14,855,400
027042900	BA(027) ES1(04) BANTEN							
299014	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	214,050,000	214,050,000	194,870,000	0	194,870,000	91.04	19,180,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) BANTEN	214,050,000	214,050,000	194,870,000	0	194,870,000	91.04	19,180,000
027043400	BA(027) ES1(04) SULAWESI BARAT							
340012	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	219,730,000	219,730,000	208,757,000	0	208,757,000	95.01	10,973,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI BARAT	219,730,000	219,730,000	208,757,000	0	208,757,000	95.01	10,973,000
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019029	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	111,276,000	111,276,000	111,276,000	0	111,276,000	100	0
029005	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	207,520,000	207,520,000	204,200,000	0	204,200,000	98.4	3,320,000
039004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	209,398,000	209,398,000	205,778,000	0	205,778,000	98.27	3,620,000
049015	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	237,400,000	237,400,000	234,300,000	0	234,300,000	98.69	3,100,000
059015	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	352,346,000	352,346,000	341,346,000	2,500,000	338,846,000	96.17	13,500,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
069007	DINAS SOSIAL ACEH	203,640,000	203,640,000	203,586,600	0	203,586,600	99.97	53,400
099019	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	174,628,000	174,628,000	171,491,600	0	171,491,600	98.2	3,136,400
109010	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	626,620,000	626,620,000	594,049,600	0	594,049,600	94.8	32,570,400
119010	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	638,998,000	638,998,000	628,498,000	0	628,498,000	98.36	10,500,000
129017	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	208,718,000	208,718,000	208,718,000	0	208,718,000	100	0
139012	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	600,690,000	600,690,000	591,714,250	0	591,714,250	98.51	8,975,750
159009	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	600,090,000	600,090,000	559,895,100	0	559,895,100	93.3	40,194,900
179010	DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	545,400,000	545,400,000	544,139,188	4,332,204	539,806,984	98.97	5,593,016
189014	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	255,549,000	255,549,000	247,907,700	0	247,907,700	97.01	7,641,300
199008	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	249,000,000	249,000,000	245,690,000	4,672,000	241,018,000	96.79	7,982,000
209014	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	165,920,000	165,920,000	162,520,000	0	162,520,000	97.95	3,400,000
219019	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	191,980,000	191,980,000	185,830,000	0	185,830,000	96.8	6,150,000
229012	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	197,760,000	197,760,000	194,392,874	0	194,392,874	98.3	3,367,126
239021	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	289,200,000	289,200,000	235,580,000	0	235,580,000	81.46	53,620,000
249018	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	197,950,000	197,950,000	186,910,000	0	186,910,000	94.42	11,040,000
259024	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	128,000,000	128,000,000	128,000,000	0	128,000,000	100	0
285138	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	9,512,581,000	9,374,852,000	8,764,099,621	43,454,587	8,720,645,034	93.02	654,206,966
289017	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	598,850,000	598,850,000	598,850,000	0	598,850,000	100	0
309017	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	207,450,000	207,450,000	198,650,000	0	198,650,000	95.76	8,800,000
329002	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	214,480,000	214,480,000	213,217,500	0	213,217,500	99.41	1,262,500
339001	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	126,600,000	126,600,000	116,750,000	0	116,750,000	92.22	9,850,000
417731	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	214,335,000	214,335,000	89,850,000	0	89,850,000	41.92	124,485,000
440222	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK	42,117,537,000	40,112,235,000	39,239,423,258	19,205,800	39,220,217,458	97.78	892,017,542
440238	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA	25,849,037,000	18,113,424,000	17,753,757,063	900,000	17,752,857,063	98.01	360,566,937
440244	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	55,276,327,000	34,993,595,000	31,595,875,711	61,747,825	31,534,127,886	90.11	3,459,467,114
440250	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	14,715,906,000	13,714,226,000	13,603,920,150	18,409,900	13,585,510,250	99.06	128,715,750
440269	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	119,275,727,000	111,408,359,000	108,187,505,417	337,211,499	107,850,293,918	96.81	3,558,065,082
560511	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	9,324,133,000	8,725,256,000	8,003,837,151	2,384,699	8,001,452,452	91.7	723,803,548
560525	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	11,021,554,000	9,808,644,000	9,377,001,588	12,230,993	9,364,770,595	95.47	443,873,405
630842	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	77,937,335,000	101,558,183,000	90,881,558,703	31,826,595	90,849,732,108	89.46	10,708,450,892

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	372,783,935,000	355,562,572,000	334,810,119,074	538,876,102	334,271,242,972	94.16	21,291,329,028
	JUMLAH BELANJA 04	973,764,729,000	895,793,030,000	852,164,237,252	1,520,763,111	850,643,474,141	95.13	45149555859
05 0003100DK 319013	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	2,064,497,000	2,064,497,000	2,057,869,865	0	2,057,869,865	99.68	6,627,135
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	2,064,497,000	2,064,497,000	2,057,869,865	0	2,057,869,865	99.68	6,627,135
027050100KP 426820 440275 440281 440310	BA(027) ES1(05) DKI JAKARTA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	55,718,515,000 228,923,522,000 98,225,879,000 30,866,465,609,000	54,807,551,000 479,609,829,000 7,274,772,177,000 38,276,598,328,000	51,646,029,449 477,403,830,735 7,268,623,437,688 38,272,344,523,728	144,845,389 14,388,920 1,045,784,056 31,692,574,311	51,501,184,060 477,389,441,815 7,267,577,653,632 38,240,651,949,417	93.97 99.54 99.9 99.91	3,306,366,940 2,220,387,185 7,194,523,368 35,946,378,583
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) DKI JAKARTA	31,249,333,525,000	46,085,787,885,000	46,070,017,821,600	32,897,592,676	46,037,120,228,924	99.97	48,667,656,076
027050700 079005	BA(027) ES1(05) SUMATERA UTARA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	5,129,700,000	5,129,700,000	4,979,195,790	0	4,979,195,790	97.07	150,504,210
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) SUMATERA UTARA	5,129,700,000	5,129,700,000	4,979,195,790	0	4,979,195,790	97.07	150,504,210
027050800 089031	BA(027) ES1(05) SUMATERA BARAT DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	3,319,851,000	3,319,851,000	3,271,627,280	0	3,271,627,280	98.55	48,223,720
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) SUMATERA BARAT	3,319,851,000	3,319,851,000	3,271,627,280	0	3,271,627,280	98.55	48,223,720
027051400DK 149019	BA(027) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2,215,944,000	2,215,944,000	2,210,678,000	0	2,210,678,000	99.76	5,266,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH	2,215,944,000	2,215,944,000	2,210,678,000	0	2,210,678,000	99.76	5,266,000
027051600DK 169009	027051600DK DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2,769,146,000	2,769,146,000	2,764,842,701	0	2,764,842,701	99.84	4,303,299
	JUMLAH BELANJA 027051600DK	2,769,146,000	2,769,146,000	2,764,842,701	0	2,764,842,701	99.84	4,303,299
027051900 199009	BA(027) ES1(05) SULAWESI SELATAN DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	4,182,127,000	4,182,127,000	4,063,937,500	6,637,000	4,057,300,500	97.02	124,826,500
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) SULAWESI SELATAN	4,182,127,000	4,182,127,000	4,063,937,500	6,637,000	4,057,300,500	97.17	124,826,500
027052600 269021	BA(027) ES1(05) BENGKULU DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	2,407,871,000	2,407,871,000	2,288,894,900	0	2,288,894,900	95.06	118,976,100
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) BENGKULU	2,407,871,000	2,407,871,000	2,288,894,900	0	2,288,894,900	95.06	118,976,100
027052900 299015	BA(027) ES1(05) BANTEN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	3,213,938,000	3,213,938,000	3,085,538,000	0	3,085,538,000	96	128,400,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) BANTEN	3,213,938,000	3,213,938,000	3,085,538,000	0	3,085,538,000	96	128,400,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 12
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
027053400	BA(027) ES1(05) SULAWESI BARAT							
340014	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	2,122,889,000	2,122,889,000	1,954,518,500	0	1,954,518,500	92.07	168,370,500
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) SULAWESI BARAT	2,122,889,000	2,122,889,000	1,954,518,500	0	1,954,518,500	92.07	168,370,500
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019030	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	2,487,585,000	2,487,585,000	2,348,424,000	0	2,348,424,000	94.41	139,161,000
029006	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	11,775,959,000	11,775,959,000	11,633,428,500	0	11,633,428,500	98.79	142,530,500
039005	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	11,873,877,000	11,873,877,000	10,644,999,899	0	10,644,999,899	89.65	1,228,877,101
049016	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	3,130,338,000	3,130,338,000	2,738,440,536	0	2,738,440,536	87.48	391,897,464
059016	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	12,205,462,000	12,205,462,000	11,142,649,209	58,542,126	11,084,107,083	90.81	1,121,354,917
069008	DINAS SOSIAL ACEH	3,969,122,000	3,969,122,000	3,804,129,909	0	3,804,129,909	95.84	164,992,091
099020	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	3,352,746,000	3,352,746,000	3,180,358,250	0	3,180,358,250	94.86	172,387,750
109011	DINAS, SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	2,637,999,000	2,637,999,000	2,463,620,600	0	2,463,620,600	93.39	174,378,400
119011	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	4,114,575,000	4,114,575,000	3,895,553,000	0	3,895,553,000	94.68	219,022,000
129018	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	5,025,556,000	5,025,556,000	4,921,283,400	0	4,921,283,400	97.93	104,272,600
139013	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3,073,686,000	3,073,686,000	3,060,093,288	6,493,000	3,053,600,288	99.35	20,085,712
159010	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2,766,823,000	2,766,823,000	2,710,483,300	0	2,710,483,300	97.96	56,339,700
179011	DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	2,618,980,000	2,618,980,000	2,595,050,881	0	2,595,050,881	99.09	23,929,119
189015	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	2,925,384,000	2,925,384,000	2,902,620,800	0	2,902,620,800	99.22	22,763,200
209015	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2,703,071,000	2,703,071,000	2,677,739,100	12,012,000	2,665,727,100	98.62	37,343,900
219020	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	2,871,734,000	2,871,734,000	2,759,612,500	0	2,759,612,500	96.1	112,121,500
229013	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	2,024,262,000	2,024,262,000	1,864,033,500	0	1,864,033,500	92.08	160,228,500
239023	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4,398,062,000	4,398,062,000	4,203,282,749	0	4,203,282,749	95.57	194,779,251
249019	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	5,340,732,000	5,340,732,000	5,009,227,100	62,963,000	4,946,264,100	92.61	394,467,900
259025	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	3,593,293,000	3,593,293,000	3,581,901,000	0	3,581,901,000	99.68	11,392,000
289018	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	2,444,539,000	2,444,539,000	2,438,426,000	0	2,438,426,000	99.75	6,113,000
309018	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,746,527,000	1,746,527,000	1,647,773,216	22,288,817	1,625,484,399	93.07	121,042,601
329003	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2,042,902,000	2,042,902,000	2,035,378,500	0	2,035,378,500	99.63	7,523,500
339002	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	2,486,507,000	2,486,507,000	2,296,731,000	0	2,296,731,000	92.37	189,776,000
417732	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,705,206,000	1,705,206,000	1,378,531,500	20,870,000	1,357,661,500	79.62	347,544,500
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	103,314,927,000	103,314,927,000	97,933,771,737	183,168,943	97,750,602,794	94.79	5,564,324,206
	JUMLAH BELANJA 05	31,380,074,415,000	46,216,528,775,000	46,194,628,695,873	33,087,398,619	46,161,541,297,254	99.95	54987477746
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 13
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
418982	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	1,256,000,000	1,256,000,000	1,252,392,300	0	1,252,392,300	99.71	3,607,700
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	1,256,000,000	1,256,000,000	1,252,392,300	0	1,252,392,300	99.71	3,607,700
027060100KP	BA(027) ES1(06) DKI JAKARTA							
418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR	77,540,540,000	65,160,610,800	60,618,554,859	209,762,679	60,408,792,180	92.71	4,751,818,620
418942	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I	10,165,749,329,000	30,225,760,263,750	29,770,732,338,971	584,234,257,615	29,186,498,081,356	96.56	1,039,262,182,394
418943	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II	9,667,543,779,000	27,902,446,456,750	27,310,388,742,243	924,132,503,931	26,386,256,238,312	94.57	1,516,190,218,438
418944	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH III	8,971,649,552,000	22,266,431,842,700	22,075,657,334,771	988,577,818,681	21,087,079,516,090	94.7	1,179,352,326,610
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) DKI JAKARTA	28,882,483,200,000	80,459,799,174,000	79,217,396,970,844	2,497,154,342,906	76,720,242,627,938	98.46	3,739,556,546,062
027060700DK	BA(027)ES1(06)DK							
418957	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	5,307,520,000	5,307,520,000	4,915,004,000	0	4,915,004,000	92.6	392,516,000
	JUMLAH BELANJA BA(027)ES1(06)DK	5,307,520,000	5,307,520,000	4,915,004,000	0	4,915,004,000	92.6	392,516,000
027061400DK	BA(027) ES1(06) KALIMANTAN TENGAH							
418965	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2,132,280,000	2,132,280,000	2,047,198,500	0	2,047,198,500	96.01	85,081,500
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) KALIMANTAN TENGAH	2,132,280,000	2,132,280,000	2,047,198,500	0	2,047,198,500	96.01	85,081,500
027061600DK	027061600DK							
418967	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1,751,480,000	1,751,480,000	1,722,294,020	0	1,722,294,020	98.33	29,185,980
	JUMLAH BELANJA 027061600DK	1,751,480,000	1,751,480,000	1,722,294,020	0	1,722,294,020	98.33	29,185,980
027061900	BA(027) ES1(06) SULAWESI SELATAN							
418970	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	3,630,000,000	3,630,000,000	3,612,977,100	15,070,000	3,597,907,100	99.12	32,092,900
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) SULAWESI SELATAN	3,630,000,000	3,630,000,000	3,612,977,100	15,070,000	3,597,907,100	99.53	32,092,900
027062400DK	BA(027) ES1(06) NUSA TENGGARA TIMUR DK							
418975	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3,988,900,000	3,988,900,000	3,968,519,700	163,358,357	3,805,161,343	95.39	183,738,657
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) NUSA TENGGARA TIMUR DK	3,988,900,000	3,988,900,000	3,968,519,700	163,358,357	3,805,161,343	99.49	183,738,657
027062600	BA(027) ES1(06) BENGKULU							
418978	DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	1,945,330,000	1,945,330,000	1,869,308,500	0	1,869,308,500	96.09	76,021,500
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) BENGKULU	1,945,330,000	1,945,330,000	1,869,308,500	0	1,869,308,500	96.09	76,021,500
027062900DK	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN							
418980	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	2,033,180,000	2,033,180,000	2,007,341,700	0	2,007,341,700	98.73	25,838,300
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	2,033,180,000	2,033,180,000	2,007,341,700	0	2,007,341,700	98.73	25,838,300
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
417787	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,112,340,000	1,112,340,000	910,599,500	10,935,800	899,663,700	80.88	212,676,300
418945	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	933,010,000	933,010,000	882,434,822	0	882,434,822	94.58	50,575,178
418947	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	6,546,520,000	6,546,520,000	6,364,124,300	0	6,364,124,300	97.21	182,395,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 14
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
418948	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	6,218,420,000	6,218,420,000	5,964,520,500	3,500,000	5,961,020,500	95.86	257,399,500
418949	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	1,342,580,000	1,342,580,000	1,332,372,200	0	1,332,372,200	99.24	10,207,800
418950	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	6,605,000,000	6,605,000,000	6,461,491,032	4,218,000	6,457,273,032	97.76	147,726,968
418951	DINAS SOSIAL ACEH	3,699,300,000	3,699,300,000	3,350,680,100	0	3,350,680,100	90.58	348,619,900
418958	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	2,643,300,000	2,643,300,000	2,601,077,100	0	2,601,077,100	98.4	42,222,900
418959	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	2,369,800,000	2,369,800,000	1,800,237,400	0	1,800,237,400	75.97	569,562,600
418960	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	2,066,980,000	2,066,980,000	1,955,733,800	0	1,955,733,800	94.62	111,246,200
418962	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	3,025,950,000	3,025,950,000	2,946,200,000	0	2,946,200,000	97.36	79,750,000
418963	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	2,932,300,000	2,932,300,000	2,919,213,971	0	2,919,213,971	99.55	13,086,029
418964	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2,432,280,000	2,432,280,000	2,432,280,000	0	2,432,280,000	100	0
418966	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2,256,080,000	2,256,080,000	1,896,444,418	0	1,896,444,418	84.06	359,635,582
418968	DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	2,217,000,000	2,217,000,000	2,212,620,900	10,266,600	2,202,354,300	99.34	14,645,700
418969	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	2,213,350,000	2,213,350,000	1,975,038,400	0	1,975,038,400	89.23	238,311,600
418971	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2,620,000,000	2,620,000,000	2,575,333,000	2,625,000	2,572,708,000	98.19	47,292,000
418972	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	1,888,000,000	1,888,000,000	1,809,780,950	30,800,000	1,778,980,950	94.23	109,019,050
418973	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	1,272,880,000	1,272,880,000	1,007,777,840	0	1,007,777,840	79.17	265,102,160
418974	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,863,080,000	1,863,080,000	1,854,143,800	0	1,854,143,800	99.52	8,936,200
418976	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	6,272,000,000	6,272,000,000	6,234,035,000	0	6,234,035,000	99.39	37,965,000
418979	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	1,719,136,000	1,719,136,000	1,719,082,000	31,500,000	1,687,582,000	98.16	31,554,000
418981	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,162,580,000	1,162,580,000	1,123,486,000	157,000	1,123,329,000	96.62	39,251,000
418984	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,389,180,000	1,389,180,000	1,379,082,265	0	1,379,082,265	99.27	10,097,735
418985	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	2,785,936,000	2,785,936,000	2,785,936,000	0	2,785,936,000	100	0
418986	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	1,135,136,000	1,135,136,000	1,132,749,500	0	1,132,749,500	99.79	2,386,500
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	70,722,138,000	70,722,138,000	67,626,474,798	94,002,400	67,532,472,398	95.62	3,189,665,602
	JUMLAH BELANJA 06	28,975,250,028,000	80,552,566,002,000	79,306,418,481,462	2,497,426,773,663	76,808,991,707,799	98.45	3743574294201
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
418866	DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO	200,000,000	200,000,000	199,727,400	0	199,727,400	99.86	272,600
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	200,000,000	200,000,000	199,727,400	0	199,727,400	99.86	272,600
027110100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
369059	SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	64,244,386,000	43,372,073,000	42,552,557,458	115,196,594	42,437,360,864	97.84	934,712,136
418991	PUSAT PENYULUHAN SOSIAL	17,595,068,000	12,792,524,000	12,697,891,019	5,496,472	12,692,394,547	99.22	100,129,453

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 15
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
440326	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	31,020,728,000	22,088,890,000	20,751,889,362	3,397,810	20,748,491,552	93.93	1,340,398,448
440332	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN	24,718,551,000	17,956,495,000	17,079,991,413	25,966,107	17,054,025,306	94.97	902,469,694
682040	PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL	57,667,101,000	39,791,601,000	38,319,852,455	67,118,461	38,252,733,994	96.13	1,538,867,006
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	195,245,834,000	136,001,583,000	131,402,181,707	217,175,444	131,185,006,263	96.62	4,816,576,737
027110200KD	BA(027) ES1(11) JAWA BARAT							
369070	POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL (POLTEKESOS) BANDUNG	61,800,705,000	71,652,007,000	70,274,989,383	20,407,643	70,254,581,740	98.05	1,397,425,260
369084	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	57,479,113,000	34,842,625,000	33,872,343,536	54,800,006	33,817,543,530	97.06	1,025,081,470
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) JAWA BARAT	119,279,818,000	106,494,632,000	104,147,332,919	75,207,649	104,072,125,270	97.8	2,422,506,730
027110400KD	BA(027) ES1(11) DI YOGYAKARTA							
369180	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	67,682,872,000	25,903,610,000	24,798,527,931	24,593,600	24,773,934,331	95.64	1,129,675,669
369202	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	27,674,601,000	21,574,601,000	17,797,585,103	50,799,204	17,746,785,899	82.26	3,827,815,101
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) DI YOGYAKARTA	95,357,473,000	47,478,211,000	42,596,113,034	75,392,804	42,520,720,230	89.72	4,957,490,770
027110700	BA(027) ES1(11) SUMATERA UTARA							
418821	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	200,000,000	200,000,000	198,500,000	0	198,500,000	99.25	1,500,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) SUMATERA UTARA	200,000,000	200,000,000	198,500,000	0	198,500,000	99.25	1,500,000
027110800DK	BA(027) ES1(11) SUMATERA BARAT							
418822	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	200,000,000	200,000,000	193,246,600	0	193,246,600	96.62	6,753,400
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) SUMATERA BARAT	200,000,000	200,000,000	193,246,600	0	193,246,600	96.62	6,753,400
027110800KD	Kode UAPPAW Tidak Ada							
369283	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) PADANG	46,955,862,000	26,148,446,000	25,186,488,099	19,286,744	25,167,201,355	96.25	981,244,645
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	46,955,862,000	26,148,446,000	25,186,488,099	19,286,744	25,167,201,355	96.32	981,244,645
027111400DK	BA(027) ES1(11) KALIMANTAN TENGAH							
418837	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	200,000,000	200,000,000	195,181,801	0	195,181,801	97.59	4,818,199
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) KALIMANTAN TENGAH	200,000,000	200,000,000	195,181,801	0	195,181,801	97.59	4,818,199
027111500KD	BA(027) ES1(11) KALIMANTAN SELATAN							
369752	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	26,684,064,000	17,158,670,000	16,125,483,896	1,276,170	16,124,207,726	93.97	1,034,462,274
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) KALIMANTAN SELATAN	26,684,064,000	17,158,670,000	16,125,483,896	1,276,170	16,124,207,726	93.98	1,034,462,274
027111600DK	027111600DK							
418839	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	200,000,000	200,000,000	185,125,800	0	185,125,800	92.56	14,874,200
	JUMLAH BELANJA 027111600DK	200,000,000	200,000,000	185,125,800	0	185,125,800	92.56	14,874,200
027111900KD	BA(027) ES1(11) SULAWESI SELATAN							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 16
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
369965	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR	23,653,439,000	17,659,124,000	17,644,683,894	13,512,954	17,631,170,940	99.84	27,953,060
418850	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) SULAWESI SELATAN	23,853,439,000	17,859,124,000	17,844,683,894	13,512,954	17,831,170,940	99.92	27,953,060
027112500KD	BA(027) ES1(11) PAPUA							
578995	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) JAYAPURA	18,043,658,000	15,074,534,000	14,367,243,306	74,750,537	14,292,492,769	94.81	782,041,231
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) PAPUA	18,043,658,000	15,074,534,000	14,367,243,306	74,750,537	14,292,492,769	95.31	782,041,231
027112600	BA(027) ES1(11) BENGKULU							
418857	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI BENGKULU	200,000,000	200,000,000	199,793,400	0	199,793,400	99.9	206,600
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) BENGKULU	200,000,000	200,000,000	199,793,400	0	199,793,400	99.9	206,600
027112900DK	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN							
418863	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	200,000,000	200,000,000	130,830,000	0	130,830,000	65.42	69,170,000
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	200,000,000	200,000,000	130,830,000	0	130,830,000	65.42	69,170,000
027113400	BA(027) ES1(11) SULAWESI BARAT							
418869	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	200,000,000	200,000,000	195,214,900	0	195,214,900	97.61	4,785,100
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) SULAWESI BARAT	200,000,000	200,000,000	195,214,900	0	195,214,900	97.61	4,785,100
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
418810	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	200,000,000	200,000,000	197,001,200	0	197,001,200	98.5	2,998,800
418816	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	200,000,000	200,000,000	199,930,000	0	199,930,000	99.97	70,000
418817	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	200,000,000	200,000,000	194,040,000	5,754,500	188,285,500	94.14	11,714,500
418818	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA	200,000,000	200,000,000	198,564,800	0	198,564,800	99.28	1,435,200
418819	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	200,000,000	200,000,000	186,470,400	0	186,470,400	93.24	13,529,600
418820	DINAS SOSIAL ACEH	200,000,000	200,000,000	178,710,800	0	178,710,800	89.36	21,289,200
418823	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	200,000,000	200,000,000	198,024,840	0	198,024,840	99.01	1,975,160
418824	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	200,000,000	200,000,000	199,958,300	0	199,958,300	99.98	41,700
418825	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	200,000,000	200,000,000	199,939,600	803,220	199,136,380	99.57	863,620
418826	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	200,000,000	200,000,000	197,500,000	0	197,500,000	98.75	2,500,000
418836	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	200,000,000	200,000,000	182,189,200	0	182,189,200	91.09	17,810,800
418838	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	200,000,000	200,000,000	196,373,708	0	196,373,708	98.19	3,626,292
418840	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI UTARA	200,000,000	200,000,000	199,931,800	116,932	199,814,868	99.91	185,132
418841	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	200,000,000	200,000,000	200,000,000	812,000	199,188,000	99.59	812,000
418851	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	200,000,000	200,000,000	198,800,000	500,000	198,300,000	99.15	1,700,000
418852	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	100	0
418853	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	200,000,000	200,000,000	186,442,100	0	186,442,100	93.22	13,557,900

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/21 9:22 AM
Halaman : 17
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	ANAK PROVINSI BALI							
418854	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	200,000,000	200,000,000	198,774,350	0	198,774,350	99.39	1,225,650
418855	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	200,000,000	200,000,000	192,749,100	6,470,000	186,279,100	93.14	13,720,900
418856	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	200,000,000	200,000,000	144,320,000	0	144,320,000	72.16	55,680,000
418862	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	100	0
418865	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	200,000,000	200,000,000	199,597,200	0	199,597,200	99.8	402,800
418867	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	200,000,000	200,000,000	196,793,600	0	196,793,600	98.4	3,206,400
418868	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	200,000,000	200,000,000	150,000,000	0	150,000,000	75	50,000,000
418870	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	200,000,000	200,000,000	182,610,500	20,540,000	162,070,500	81.04	37,929,500
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	5,000,000,000	5,000,000,000	4,778,721,498	34,996,652	4,743,724,846	95.57	256,275,154
	JUMLAH BELANJA 11	532,020,148,000	372,815,200,000	357,945,868,254	511,598,954	357,434,269,300	96.01	15380930700
	JUMLAH BELANJA	62,767,643,594,000	134,171,889,274,000	132,821,840,654,971	2,533,397,416,151	130,288,443,238,820	98.99	3,883,446,035,180

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial							
2224	Hubungan Masyarakat	16,696,806,000	25,496,236,000	25,518,529,406	31,983,358	25,486,546,048	99.96	9,689,952
2225	Tata Kelola Keuangan	83,875,875,000	77,033,220,000	67,794,489,427	16,073,109	67,778,416,318	87.99	9,254,803,682
2226	Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian	14,297,468,000	8,497,468,000	8,448,833,890	64,062,650	8,384,771,240	98.67	112,696,760
2227	Perencanaan dan Penganggaran	24,028,924,000	12,078,924,000	11,307,078,494	10,786,477	11,296,292,017	3272.75	782,631,983
2228	Peningkatan Sarana dan Prasarana	169,332,342,000	126,585,933,000	125,118,793,924	32,262,105	125,086,531,819	98.82	1,499,401,181
2230	Penyusunan, Kajian Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	9,494,222,000	5,394,222,000	5,264,667,481	14,591,123	5,250,076,358	97.33	144,145,642
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	317,725,637,000	255,086,003,000	243,452,392,622	169,758,822	243,282,633,800	95.439	11,803,369,200
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial							
2231	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	4,345,000,000	2,010,231,000	2,005,393,700	6,430,000	1,998,963,700	99.44	11,267,300
2232	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial	3,455,500,000	1,528,464,000	1,526,457,200	0	1,526,457,200	99.87	2,006,800
2233	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,088,805,000	1,828,753,000	1,824,730,500	5,439,500	1,819,291,000	99.48	9,462,000
2234	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang	3,671,801,000	1,580,026,000	1,573,000,200	0	1,573,000,200	99.56	7,025,800
2235	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial	30,989,664,000	25,603,296,000	24,917,727,593	10,991,823	24,906,735,770	97.28	696,560,230
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03	46,550,770,000	32,550,770,000	31,847,309,193	22,861,323	31,824,447,870	97.839	726,322,130
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2254	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)	240,499,008,000	136,787,009,000	131,994,770,662	188,220,011	131,806,550,651	577.57	4,980,458,349
2257	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat	31,020,728,000	22,088,890,000	20,751,889,362	3,397,810	20,748,491,552	93.93	1,340,398,448
2261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Badiklit Kesos	64,244,386,000	43,372,073,000	42,552,557,458	115,196,594	42,437,360,864	97.84	934,712,136

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	335,764,122,000	202,247,972,000	195,299,217,482	306,814,415	194,992,403,067	96.564	7,255,568,933
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2247	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial	77,937,335,000	101,558,183,000	90,881,558,703	31,826,595	90,849,732,108	89.46	10,708,450,892
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	77,937,335,000	101,558,183,000	90,881,558,703	31,826,595	90,849,732,108	89.487	10,708,450,892
07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
2253	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	55,718,515,000	54,807,551,000	51,646,029,449	144,845,389	51,501,184,060	93.97	3,306,366,940
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	55,718,515,000	54,807,551,000	51,646,029,449	144,845,389	51,501,184,060	94.232	3,306,366,940
08	Program Pemberdayaan Sosial							
2241	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial dan	50,852,807,000	51,660,912,000	49,310,663,628	43,850,245	49,266,813,383	95.37	2,394,098,617
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	50,852,807,000	51,660,912,000	49,310,663,628	43,850,245	49,266,813,383	95.451	2,394,098,617
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2260	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	58,011,997,000	67,068,817,000	65,789,498,748	20,407,643	65,769,091,105	98.06	1,299,725,895
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	58,011,997,000	67,068,817,000	65,789,498,748	20,407,643	65,769,091,105	98.093	1,299,725,895
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial							
5870	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	150,500,018,000	150,551,268,000	149,017,893,588	144,532,151	148,873,361,437	98.89	1,677,906,563
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	150,500,018,000	150,551,268,000	149,017,893,588	144,532,151	148,873,361,437	98.981	1,677,906,563
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2255	Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	27,674,601,000	21,574,601,000	17,797,585,103	50,799,204	17,746,785,899	82.26	3,827,815,101
2258	Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	24,718,551,000	17,956,495,000	17,079,991,413	25,966,107	17,054,025,306	94.97	902,469,694
2259	Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	57,667,101,000	39,791,601,000	38,319,852,455	67,118,461	38,252,733,994	96.13	1,538,867,006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5871	Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial	24,395,068,000	19,592,524,000	19,174,232,418	40,493,124	19,133,739,294	3319.91	458,784,706
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	134,455,321,000	98,915,221,000	92,371,661,389	184,376,896	92,187,284,493	93.385	6,727,936,507
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2242	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	183,096,229,000	171,175,643,000	165,191,529,623	427,204,306	164,764,325,317	3806.89	6,411,317,683
2243	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	383,998,567,000	319,874,814,000	304,281,890,303	869,571,817	303,412,318,486	1895.4	16,462,495,514
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	64,281,345,000	60,040,112,000	56,893,487,991	66,551,622	56,826,936,369	649.13	3,213,175,631
2245	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	123,897,873,000	114,082,111,000	108,704,022,511	83,533,892	108,620,488,619	847.67	5,461,622,381
2246	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	139,744,507,000	126,224,993,000	123,938,045,252	42,074,879	123,895,970,373	392	2,329,022,627
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	895,018,521,000	791,397,673,000	759,008,975,680	1,488,936,516	757,520,039,164	95.907	33,877,633,836
07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
2248	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	272,931,724,000	523,618,031,000	519,532,815,705	96,726,737	519,436,088,968	3342.86	4,181,942,032
2249	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	105,149,657,000	7,281,695,955,000	7,275,234,965,072	1,092,864,556	7,274,142,100,516	3317.24	7,553,854,484
2251	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	30,946,274,519,000	38,356,407,238,000	38,348,214,885,647	31,752,961,937	38,316,461,923,710	3366.44	39,945,314,290
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	31,324,355,900,000	46,161,721,224,000	46,142,982,666,424	32,942,553,230	46,110,040,113,194	99.959	51,681,110,806
08	Program Pemberdayaan Sosial							
2236	Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	48,861,908,000	33,400,716,000	32,983,311,170	107,043,400	32,876,267,770	3333.04	524,448,230
2239	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	162,736,400,000	5,357,533,739,000	5,353,710,767,527	96,392,814	5,353,614,374,713	3443.28	3,919,364,287
2240	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)	108,136,400,000	68,769,270,000	66,158,192,816	93,738,498	66,064,454,318	5558.34	2,704,815,682
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	20,671,359,000	11,041,279,000	10,742,246,626	32,697,551	10,709,549,075	3162.72	331,729,925
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	340,406,067,000	5,470,745,004,000	5,463,594,518,139	329,872,263	5,463,264,645,876	99.869	7,480,358,124

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
09	Program Penanganan Fakir Miskin							
5873	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	10,198,838,089,000	30,258,849,023,750	29,801,956,486,407	584,234,414,615	29,217,722,071,792	1134.83	1,041,126,951,958
5874	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	9,694,880,289,000	27,929,782,966,750	27,336,414,669,243	924,310,298,088	26,412,104,371,155	1216.34	1,517,678,595,595
5875	Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	9,003,991,110,000	22,298,773,400,700	22,107,428,770,953	988,672,298,281	21,118,756,472,672	1169.62	1,180,016,928,028
5876	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Kemiskinan	77,540,540,000	65,160,610,800	60,618,554,859	209,762,679	60,408,792,180	92.71	4,751,818,620
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	28,975,250,028,000	80,552,566,002,000	79,306,418,481,462	2,497,426,773,663	76,808,991,707,799	98.453	3,743,574,294,201
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	62,762,547,038,000	133,990,876,600,000	132,641,620,866,507	2,533,257,409,151	130,108,363,457,356	98.993	3,882,513,142,644
04	PNBP							
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2260	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	3,788,708,000	4,583,190,000	4,485,490,635	0	4,485,490,635	97.87	97,699,365
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	3,788,708,000	4,583,190,000	4,485,490,635	0	4,485,490,635	97.868	97,699,365
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2243	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	468,144,000	468,144,000	194,200,000	0	194,200,000	67.3	273,944,000
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	3,566,000	3,566,000	3,566,000	0	3,566,000	100	0
2245	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	337,163,000	337,163,000	226,660,000	0	226,660,000	149.32	110,503,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	808,873,000	808,873,000	424,426,000	0	424,426,000	52.471	384,447,000
08	Program Pemberdayaan Sosial							
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	498,975,000	498,975,000	367,260,000	0	367,260,000	73.6	131,715,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	498,975,000	498,975,000	367,260,000	0	367,260,000	73.603	131,715,000
	JUMLAH BELANJA PNBP	5,096,556,000	5,891,038,000	5,277,176,635	0	5,277,176,635	89.58	613,861,365

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:10

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
08	Program Pemberdayaan Sosial							
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	0	173,093,335,000	173,093,334,960	140,007,000	172,953,327,960	99.92	140,007,040
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	0	173,093,335,000	173,093,334,960	140,007,000	172,953,327,960	100	140,007,040
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	173,093,335,000	173,093,334,960	140,007,000	172,953,327,960	100	140,007,040
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2243	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	0	69,405,000	69,405,000	0	69,405,000	100	0
2245	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	0	1,958,896,000	1,779,871,869	0	1,779,871,869	90.86	179,024,131
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	0	2,028,301,000	1,849,276,869	0	1,849,276,869	91.174	179,024,131
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	2,028,301,000	1,849,276,869	0	1,849,276,869	91.174	179,024,131
	JUMLAH	62,767,643,594,000	134,171,889,274,000	132,821,840,654,971	2,533,397,416,151	130,288,443,238,820	98.99	3,883,446,035,180

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2020**

KEMENTERIAN

: 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:11

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	191,394,999,000	198,566,177,000	189,156,731,611	16,988,000	189,139,743,611	95.26	9,426,433,389
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,174,000	4,305,000	2,708,324	25,831	2,682,493	62.91	1,622,507
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,376,081,000	14,033,032,000	13,163,233,134	8,863,290	13,154,369,844	93.8	878,662,156
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,800,165,000	3,935,699,000	3,551,516,604	1,442,982	3,550,073,622	90.24	385,625,378
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,675,938,000	9,867,133,000	9,317,770,000	10,520,100	9,307,249,900	94.43	559,883,100
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,299,882,000	10,261,971,000	9,673,655,000	1,740,100	9,671,914,900	94.27	590,056,100
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,327,361,000	2,168,782,000	1,073,934,890	0	1,073,934,890	49.52	1,094,847,110
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	9,881,953,000	9,960,183,000	8,690,930,160	2,172,600	8,688,757,560	87.26	1,271,425,440
511129	Belanja Uang Makan PNS	34,263,602,000	32,817,689,000	27,035,521,451	5,167,300	27,030,354,151	82.38	5,787,334,849
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	212,700,000	212,700,000	189,400,000	0	189,400,000	89.05	23,300,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	71,098,000	56,509,000	0	0	0	0	56,509,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,068,576,000	6,927,669,000	5,230,255,000	25,976,438	5,204,278,562	75.5	1,723,390,438
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3,731,390,000	3,938,079,000	3,935,746,895	0	3,935,746,895	99.94	2,332,105
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	5,003,000	5,003,000	0	0	0	0	5,003,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,928,504,000	2,008,634,000	1,606,735,000	0	1,606,735,000	79.99	401,899,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	223,075,832,000	208,396,897,000	173,039,934,658	28,866,201	173,011,068,457	83.03	35,385,828,543
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	510,117,258,000	503,160,462,000	445,668,072,727	101,762,842	445,566,309,885	88.57	57,390,626,431
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	68,279,448,000	74,627,873,000	73,890,656,174	1,050,000	73,889,606,174	99.01	738,266,826
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	9,069,283,000	5,119,276,000	4,944,025,058	5,729,798	4,938,295,260	96.58	180,980,740
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,058,670,000	1,652,986,000	1,602,269,980	0	1,602,269,980	96.93	50,716,020
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,142,362,000	1,131,141,000	805,130,880	0	805,130,880	71.18	326,010,120
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,597,886,000	25,471,023,000	24,768,343,900	2,063,500	24,766,280,400	97.24	704,742,600
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	24,386,615,000	16,852,240,000	15,878,541,862	0	15,878,541,862	94.22	973,698,138
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	197,173,000	25,140,466,000	24,361,876,917	0	24,361,876,917	96.9	778,589,083
521211	Belanja Bahan	142,854,104,000	69,795,431,769	66,674,256,731	31,852,800	66,642,403,931	95.53	3,153,027,838
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,713,929,058,000	1,613,092,134,231	1,609,867,260,255	187,859,000	1,609,679,401,255	99.8	3,412,732,976
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	496,940,357,000	439,442,982,000	424,282,789,575	167,954,175	424,114,835,400	96.55	15,328,146,600
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	6,723,056,000	5,968,752,000	5,960,752,000	0	5,960,752,000	99.87	8,000,000
521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	2,823,800,000	1,031,150,000	1,031,150,000	0	1,031,150,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	3,590,500,000	2,130,156,000	2,073,304,250	600,000	2,072,704,250	97.33	57,451,750
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	206,200,000	117,600,000	115,560,000	0	115,560,000	98.27	2,040,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,467,112,000	2,111,924,914,720	2,078,867,181,148	1,853,398,135	2,077,013,783,013	98.43	34,911,131,707
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,384,971,000	27,826,339,000	27,182,345,267	5,749,242	27,176,596,025	97.69	649,742,975

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2020**

KEMENTERIAN : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:11

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	100	0
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	106,741,000	31,296,000	31,294,350	0	31,294,350	99.99	1,650
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	142,500,000	140,391,000	140,283,000	0	140,283,000	99.92	108,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	2,200,203,000	2,432,534,000	2,407,627,581	0	2,407,627,581	98.98	24,906,419
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	138,150,000	7,717,249,000	7,429,130,080	0	7,429,130,080	96.27	288,118,920
522111	Belanja Langganan Listrik	18,512,988,000	19,131,413,000	18,679,577,726	0	18,679,577,726	97.64	451,835,274
522112	Belanja Langganan Telepon	2,355,814,000	1,667,368,000	1,397,046,831	0	1,397,046,831	83.79	270,321,169
522113	Belanja Langganan Air	1,441,413,000	1,356,389,000	1,308,830,264	0	1,308,830,264	96.49	47,558,736
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	269,060,000	245,380,000	224,571,370	0	224,571,370	91.52	20,808,630
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	70,017,000	1,479,751,000	1,461,710,787	0	1,461,710,787	98.78	18,040,213
522131	Belanja Jasa Konsultan	32,007,238,000	31,742,081,000	31,422,531,346	31,665,000	31,390,866,346	98.99	351,214,654
522141	Belanja Sewa	94,363,513,000	79,289,530,000	77,646,640,883	3,000,000	77,643,640,883	97.93	1,645,889,117
522151	Belanja Jasa Profesi	57,137,996,000	33,609,894,000	30,267,405,000	60,963,500	30,206,441,500	90.06	3,403,452,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	34,454,349,000	30,079,569,000	29,734,760,308	0	29,734,760,308	98.85	344,808,692
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	549,130,000	25,448,109,000	24,376,775,417	22,290,000	24,354,485,417	95.79	1,093,623,583
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29,336,137,000	30,884,596,000	30,836,290,253	0	30,836,290,253	99.84	48,305,747
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	569,977,000	590,501,000	587,327,791	0	587,327,791	99.46	3,173,209
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	0	246,303,000	246,302,525	0	246,302,525	100	475
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	141,710,000	138,268,500	0	138,268,500	97.57	3,441,500
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,431,665,000	1,551,909,000	1,533,052,733	0	1,533,052,733	98.78	18,856,267
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,398,336,000	34,015,666,000	33,230,307,736	0	33,230,307,736	97.69	785,358,264
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,597,000	17,597,000	17,526,595	0	17,526,595	99.6	70,405
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,466,569,000	3,920,862,000	3,896,417,632	0	3,896,417,632	99.38	24,444,368
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	277,209,000	364,252,000	357,296,374	0	357,296,374	98.09	6,955,626
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	72,000,000	54,000,000	53,654,650	0	53,654,650	99.36	345,350
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,744,338,000	1,641,161,000	1,620,612,100	0	1,620,612,100	98.75	20,548,900
524111	Belanja Perjalanan Biasa	391,915,668,000	208,466,074,800	198,333,123,165	2,634,907,552	195,698,215,613	95.14	12,767,859,187
524112	Belanja Perjalanan Tetap	122,250,000	55,989,000	55,968,601	0	55,968,601	99.96	20,399
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,821,719,000	19,006,281,000	17,378,142,444	157,830,000	17,220,312,444	91.43	1,785,968,556
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	171,674,898,000	81,440,301,000	77,289,943,261	2,083,911,226	75,206,032,035	94.9	6,234,268,965
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	169,550,000	19,522,781,000	18,586,025,283	51,779,000	18,534,246,283	95.2	988,534,717
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	274,638,113,000	136,145,707,000	129,352,399,553	2,878,193,397	126,474,206,156	95.01	9,671,500,844
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2,988,304,000	312,720,000	312,369,600	5,713,120	306,656,480	99.89	6,063,520
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2,317,923,000	332,386,000	315,187,863	0	315,187,863	94.83	17,198,137
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	52,748,000,000	0	0	0	0	0	0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	118,272,000	118,272,000	118,200,000	0	118,200,000	99.94	72,000
526123	Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	810,000,000	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2020**

KEMENTERIAN : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 03/05/21 10:11
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,502,489,000	73,379,595,000	73,174,785,520	0	73,174,785,520	99.72	204,809,480
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	9,252,250,000	9,238,750,000	0	9,238,750,000	99.85	13,500,000
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	34,601,247,000	34,264,774,348	0	34,264,774,348	99.03	336,472,652
	JUMLAH BELANJA BARANG	3,789,540,721,000	5,311,759,679,520	5,219,772,455,467	10,186,509,445	5,209,585,946,022	98.27	81,800,714,608
53	BELANJA MODAL							
531111	Belanja Modal Tanah	8,189,121,000	29,802,418,000	29,722,837,910	7,094,000	29,715,743,910	99.73	86,674,090
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105,318,844,000	142,035,314,000	141,165,906,788	0	141,165,906,788	99.39	869,407,212
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	100	0
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	988,950,000	987,600,000	0	987,600,000	99.86	1,350,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	193,267,000	193,267,000	0	193,267,000	100	0
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67,747,197,000	9,598,442,000	9,597,223,600	4,480,501	9,592,743,099	99.99	5,698,901
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	99,274,000	99,274,000	99,211,060	0	99,211,060	99.94	62,940
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	183,000,000	183,000,000	180,476,000	0	180,476,000	98.62	2,524,000
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,014,000,000	1,011,448,264	0	1,011,448,264	99.75	2,551,736
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	84,543,845,000	48,368,113,000	48,322,070,122	7,950,000	48,314,120,122	99.9	53,992,878
534121	Belanja Modal Irigasi	0	197,600,000	197,500,000	0	197,500,000	99.95	100,000
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	185,000,000	184,650,000	184,650,000	0	184,650,000	100	0
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	340,650,000	340,650,000	0	340,650,000	100	0
536111	Belanja Modal Lainnya	7,055,402,000	11,899,855,000	11,734,023,386	0	11,734,023,386	98.61	165,831,614
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	498,000,000	2,334,986,000	2,330,280,228	0	2,330,280,228	99.8	4,705,772
	JUMLAH BELANJA MODAL	273,819,683,000	247,265,519,000	246,092,144,358	19,524,501	246,072,619,857	99.53	1,153,850,141
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	171,271,750,000	220,791,750,000	218,746,350,000	861,845,654	217,884,504,346	99.07	2,907,245,654
571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	4,332,000,000	3,328,225,000	3,081,186,790	0	3,081,186,790	92.58	247,038,210
571114	Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000	100	0
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	54,620,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	100	0
573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	51,524,000,000	46,720,000,000	45,133,055,186	0	45,133,055,186	96.6	1,586,944,814

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 03/05/21 10:11
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	Bentuk Barang							
573115	Belanja Bantuan Sosial untuk Pembedayaan Sosial dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4,505,850,000,000	4,505,850,000,000	0	4,505,850,000,000	100	0
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	29,178,579,326,000	28,499,749,500,000	28,499,749,479,000	15,771,082,890	28,483,978,396,110	100	15,771,103,890
574114	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	8,281,736,500,000	8,281,736,500,000	15,196,026,752	8,266,540,473,248	100	15,196,026,752
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	28,623,750,000,000	42,655,134,689,480	41,576,601,100,000	2,135,594,627,934	39,441,006,472,066	97.47	3,214,128,217,414
575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	36,639,126,000,000	36,528,892,725,077	354,481,445,077	36,174,411,280,000	99.7	464,714,720,000
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	72,300,000,000	156,386,700,000	156,369,750,000	0	156,369,750,000	99.99	16,950,000
576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang	32,692,300,000	181,905,975,000	181,456,979,902	0	181,456,979,902	99.75	448,995,098
576115	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,732,836,600,000	6,727,346,068,000	1,044,584,056	6,726,301,483,944	99.92	6,535,116,056
	JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL	58,189,069,376,000	127,928,690,939,480	126,730,088,193,955	2,522,949,612,363	124,207,138,581,592	99.06	(1,324,346,866,838)
	JUMLAH RUPIAH MURNI	62,762,547,038,000	133,990,876,600,000	132,641,620,866,507	2,533,257,409,151	130,108,363,457,356	98.99	(1,184,001,675,658)
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	327,600,000	152,750,000	147,862,000	0	147,862,000	96.8	4,888,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000
521211	Belanja Bahan	1,226,420,000	454,130,000	428,299,705	0	428,299,705	94.31	25,830,295
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	474,120,000	625,500,000	508,800,000	0	508,800,000	81.34	116,700,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	330,260,000	301,460,000	251,270,700	0	251,270,700	83.35	50,189,300
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	20,000,000	800,000	794,400	0	794,400	99.3	5,600
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	639,250,000	638,724,150	0	638,724,150	99.92	525,850
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	409,762,000	266,637,000	98,300,000	0	98,300,000	36.87	168,337,000
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0	82,320,000	54,265,000	0	54,265,000	65.92	28,055,000
522141	Belanja Sewa	368,738,000	398,459,000	393,895,000	0	393,895,000	98.85	4,564,000
522151	Belanja Jasa Profesi	241,100,000	217,050,000	213,760,000	0	213,760,000	98.48	3,290,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	498,975,000	465,375,000	367,260,000	0	367,260,000	78.92	98,115,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,334,000	27,334,000	21,346,000	0	21,346,000	78.09	5,988,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	796,320,000	620,005,000	619,539,200	0	619,539,200	99.92	465,800
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	287,735,000	91,100,000	85,390,000	0	85,390,000	93.73	5,710,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41,950,000	147,420,000	144,810,000	0	144,810,000	98.23	2,610,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2020**

KEMENTERIAN : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 03/05/21 10:11

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	14,550,000	14,550,000	0	14,550,000	100	0
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	6,242,000	6,242,000	0	0	0	0	6,242,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	5,096,556,000	4,583,982,000	3,988,866,155	0	3,988,866,155	87.02	595,115,845
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	794,644,000	788,701,000	0	788,701,000	99.25	5,943,000
536111	Belanja Modal Lainnya	0	512,412,000	499,609,480	0	499,609,480	97.5	12,802,520
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	1,307,056,000	1,288,310,480	0	1,288,310,480	98.57	18,745,520
	JUMLAH PNPB	5,096,556,000	5,891,038,000	5,277,176,635	0	5,277,176,635	89.58	613,861,365
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	10,502,512,000	10,502,512,000	0	10,502,512,000	100	0
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	83,468,240,000	83,468,240,000	140,007,000	83,328,233,000	100	140,007,000
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	75,342,583,000	75,342,582,960	0	75,342,582,960	100	40
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	0	3,780,000,000	3,780,000,000	0	3,780,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	173,093,335,000	173,093,334,960	140,007,000	172,953,327,960	100	(140,006,960)
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	173,093,335,000	173,093,334,960	140,007,000	172,953,327,960	100	(140,006,960)
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	0	56,425,000	55,274,500	0	55,274,500	97.96	1,150,500
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	111,262,000	90,562,000	0	90,562,000	81.4	20,700,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	363,941,000	257,388,111	0	257,388,111	70.72	106,552,889
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,546,000	6,546,000	0	6,546,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	32,500,000	25,900,000	0	25,900,000	79.69	6,600,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	213,750,000	213,750,000	0	213,750,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	214,434,000	214,434,000	0	214,434,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	402,237,000	402,237,000	0	402,237,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	424,778,000	420,581,258	0	420,581,258	99.01	4,196,742
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	197,342,000	157,518,000	0	157,518,000	79.82	39,824,000
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	5,086,000	5,086,000	0	5,086,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	2,028,301,000	1,849,276,869	0	1,849,276,869	91.17	179,024,131
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	2,028,301,000	1,849,276,869	0	1,849,276,869	91.17	179,024,131
	TOTAL	62,767,643,594,000	134,171,889,274,000	132,821,840,654,971	2,533,397,416,151	130,288,443,238,820	98.99	(1,183,348,797,122)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 03/05/21 10:10
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	197,173,000	25,174,066,000	24,361,876,917	0	24,361,876,917	96.77	812,189,083
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	197,173,000	25,174,066,000	24,361,876,917	0	24,361,876,917	96.77	812,189,083
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,467,112,000	2,112,570,710,720	2,079,512,451,298	1,853,398,135	2,077,659,053,163	98.44	34,911,657,557
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,467,112,000	2,112,570,710,720	2,079,512,451,298	1,853,398,135	2,077,659,053,163	98.44	34,911,657,557
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	138,150,000	7,717,249,000	7,429,130,080	0	7,429,130,080	96.27	288,118,920
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	138,150,000	7,717,249,000	7,429,130,080	0	7,429,130,080	96.27	288,118,920
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	549,130,000	25,661,859,000	24,590,525,417	22,290,000	24,568,235,417	95.83	1,093,623,583
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	549,130,000	25,661,859,000	24,590,525,417	22,290,000	24,568,235,417	95.83	1,093,623,583
5231	Belanja Pemeliharaan							
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	141,710,000	138,268,500	0	138,268,500	97.57	3,441,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	141,710,000	138,268,500	0	138,268,500	97.57	3,441,500
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	169,550,000	19,537,331,000	18,600,575,283	51,779,000	18,548,796,283	95.21	988,534,717
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	169,550,000	19,537,331,000	18,600,575,283	51,779,000	18,548,796,283	95.21	988,534,717
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	9,252,250,000	9,238,750,000	0	9,238,750,000	99.85	13,500,000
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	34,601,247,000	34,264,774,348	0	34,264,774,348	99.03	336,472,652
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	43,853,497,000	43,503,524,348	0	43,503,524,348	99.2	349,972,652
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,521,115,000	2,234,656,422,720	2,198,136,351,843	1,927,467,135	2,196,208,884,708	98.37	38,447,538,012
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	988,950,000	987,600,000	0	987,600,000	99.86	1,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	988,950,000	987,600,000	0	987,600,000	99.86	1,350,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 03/05/21 10:10
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,014,000,000	1,011,448,264	0	1,011,448,264	99.75	2,551,736
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	1,014,000,000	1,011,448,264	0	1,011,448,264	99.75	2,551,736
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	2,002,950,000	1,999,048,264	0	1,999,048,264	99.81	3,901,736
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial							
571114	Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5711	0	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000	100	0
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial							
573115	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4,505,850,000,000	4,505,850,000,000	0	4,505,850,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5731	0	4,505,850,000,000	4,505,850,000,000	0	4,505,850,000,000	100	0
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574114	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	8,281,736,500,000	8,281,736,500,000	15,196,026,752	8,266,540,473,248	100	15,196,026,752
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	0	8,281,736,500,000	8,281,736,500,000	15,196,026,752	8,266,540,473,248	100	15,196,026,752
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan							
575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	36,639,126,000,000	36,528,892,725,077	354,481,445,077	36,174,411,280,000	99.7	464,714,720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5751	0	36,639,126,000,000	36,528,892,725,077	354,481,445,077	36,174,411,280,000	99.7	464,714,720,000
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana							
576115	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,732,836,600,000	6,727,346,068,000	1,044,584,056	6,726,301,483,944	99.92	6,535,116,056
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5761	0	6,732,836,600,000	6,727,346,068,000	1,044,584,056	6,726,301,483,944	99.92	6,535,116,056
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	0	56,159,674,100,000	56,043,950,293,077	370,722,055,885	55,673,228,237,192	99.79	486,445,862,808
	JUMLAH BELANJA	2,521,115,000	58,396,333,472,720	58,244,085,693,184	372,649,523,020	57,871,436,170,164	99.74	524,897,302,556

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	3,883,446,035,180	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,879,796,154,084	0
2.0	425119	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	39,200,000	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,165,736,000	0
2.0	425259	Estimasi Pendapatan Perizinan Lainnya Yang Dialokasikan	750,000,000	0
2.0	425411	Estimasi Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan Yang	751,650,000	0
2.0	425412	Estimasi Pendapatan Biaya Pendidikan Yang Dialokasikan	4,618,600,000	0
2.0	425419	Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya Yang Dialokasikan	197,950,000	0
2.0	425692	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	907,428,000	0
2.0	425699	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan	112,000,000	0
2.0	425917	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun	572,625,483,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	198,566,177,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,305,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	14,033,032,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	3,935,699,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	9,867,133,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	10,261,971,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	2,168,782,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	9,960,183,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	32,817,689,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	212,700,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	56,509,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	6,927,669,000
2.0	511153	Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	3,938,079,000
2.0	511192	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	5,003,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	2,008,634,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	208,396,897,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	74,627,873,000
2.0	521112	Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	5,119,276,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	1,652,986,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,131,141,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	25,471,023,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	17,004,990,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	25,174,066,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	70,305,986,769
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,613,828,896,231
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	440,108,383,000
2.0	521231	Allotment Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	5,968,752,000
2.0	521232	Allotment Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS	0	1,031,150,000
2.0	521233	Allotment Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional	0	2,130,956,000
2.0	521234	Allotment Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	117,600,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	2,112,570,710,720

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	28,092,976,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai	0	2,100,000
2.0	521821	Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	31,296,000
2.0	521831	Allotment Belanja Barang Persediaan untuk tujuan	0	140,391,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	2,432,534,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	7,717,249,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	19,131,413,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	1,667,368,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	1,356,389,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	245,380,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	1,562,071,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	31,742,081,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	79,687,989,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	33,859,444,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	30,544,944,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	25,661,859,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	30,911,930,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	0	590,501,000
2.0	523113	Allotment Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	0	246,303,000
2.0	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	0	141,710,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,551,909,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	34,055,666,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	17,597,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,920,862,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	364,252,000
2.0	523191	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	54,000,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	1,641,161,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	209,300,513,800
2.0	524112	Allotment Belanja Perjalanan Tetap	0	55,989,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	19,499,618,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	82,012,499,000
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	19,537,331,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	136,343,049,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	317,806,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	332,386,000
2.0	526112	Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	0	0
2.0	526113	Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan	0	118,272,000
2.0	526123	Allotment Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan	0	0
2.0	526311	Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan	0	73,385,837,000
2.0	526321	Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk	0	9,252,250,000
2.0	526322	Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk	0	34,601,247,000
2.0	531111	Allotment Belanja Modal Tanah	0	29,802,418,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	142,829,958,000
2.0	532115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	25,000,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	988,950,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	193,267,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	9,598,442,000
2.0	533113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	99,274,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	183,000,000
2.0	533119	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0	1,014,000,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	48,368,113,000
2.0	534121	Allotment Belanja Modal Irigasi	0	197,600,000
2.0	534151	Allotment Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	184,650,000
2.0	534161	Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	340,650,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	12,412,267,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	2,334,986,000
2.0	571111	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	231,294,262,000
2.0	571112	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	3,328,225,000
2.0	571114	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	125,000,000
2.0	572114	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0
2.0	573111	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	88,468,240,000
2.0	573112	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	46,720,000,000
2.0	573115	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan	0	4,505,850,000,000
2.0	574111	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	28,575,092,083,000
2.0	574114	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	0	8,281,736,500,000
2.0	575111	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan	0	42,658,914,689,480
2.0	575114	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan	0	36,639,126,000,000
2.0	576111	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan	0	156,386,700,000
2.0	576112	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan	0	181,905,975,000
2.0	576115	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan	0	6,732,836,600,000
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	44,328,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,500,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	271,574,222
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,003,395,544
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,488,087,960
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	281,500,000	0
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	4,000,000
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	711,619,938
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	751,650,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	4,634,750,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	240,650,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	290,669,500
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	757,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	47,468,146,499

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	83,641,315
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	295,676,817
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	339,251,700
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	6,043,080,018
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,262,827,098
3.0	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun	0	2,398,287,815,042
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	200,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	8,080,431
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	189,156,731,611	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	16,988,000
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,708,324	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	25,831
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,163,233,134	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	8,863,290
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,551,516,604	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	1,442,982
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,317,770,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	10,520,100
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,673,655,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,740,100
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,073,934,890	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	8,690,930,160	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	2,172,600
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	27,035,521,451	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	5,167,300
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	189,400,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,230,255,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	25,976,438
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3,935,746,895	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,606,735,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	173,039,934,658	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	28,866,201
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	73,890,656,174	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	1,050,000
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	4,944,025,058	0
3.1	521112	Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	5,729,798
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,602,269,980	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	805,130,880	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	24,768,343,900	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,063,500
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16,026,403,862	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	24,361,876,917	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Belanja Bahan	67,157,830,936	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	31,852,800
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,610,466,622,255	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	187,859,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	424,791,448,386	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	167,954,175
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	5,960,752,000	0
3.0	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk	1,031,150,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	2,074,098,650	0
3.1	521233	Pengembalian Belanja Barang Pemberian Bantuan	0	600,000
3.0	521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk	115,560,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	2,079,512,451,298	0
3.1	521241	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional -	0	1,853,398,135
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,280,645,267	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	5,749,242
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	2,100,000	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	31,294,350	0
3.0	521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-	140,283,000	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	2,407,627,581	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	7,429,130,080	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	18,679,577,726	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,397,046,831	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,308,830,264	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	224,571,370	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1,515,975,787	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	31,422,531,346	0
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	31,665,000
3.0	522141	Belanja Sewa	78,040,535,883	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	3,000,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	30,507,065,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	60,963,500
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	30,102,020,308	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	24,590,525,417	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-	0	22,290,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,857,636,253	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	587,327,791	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	246,302,525	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	138,268,500	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,533,052,733	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33,230,307,736	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	17,526,595	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,896,417,632	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	357,296,374	0
3.0	523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	53,654,650	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,620,612,100	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	199,167,096,365	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	2,634,907,552
3.0	524112	Belanja Perjalanan Tetap	55,968,601	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,865,769,444	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	157,830,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	77,855,334,519	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	2,083,911,226
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	18,600,575,283	0
3.1	524115	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan	0	51,779,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	129,509,917,553	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	2,878,193,397
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	317,455,600	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	5,713,120
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	315,187,863	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	118,200,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	73,174,785,520	0
3.0	526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan	9,238,750,000	0
3.0	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan	34,264,774,348	0
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	29,722,837,910	0
3.1	531111	Pengembalian Belanja Modal Tanah	0	7,094,000
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141,954,607,788	0
3.0	532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	25,000,000	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	987,600,000	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	193,267,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,597,223,600	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	4,480,501
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	99,211,060	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	180,476,000	0
3.0	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan	1,011,448,264	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	48,322,070,122	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	7,950,000
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	197,500,000	0
3.0	534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	184,650,000	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	340,650,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	12,233,632,866	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	2,330,280,228	0
3.0	571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam	229,248,862,000	0
3.1	571111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi	0	861,845,654
3.0	571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam	3,081,186,790	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:07 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	571114	Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam	125,000,000	0
3.0	573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	88,468,240,000	0
3.1	573111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	140,007,000
3.0	573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	45,133,055,186	0
3.0	573115	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam	4,505,850,000,000	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	28,575,092,061,960	0
3.1	574111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan	0	15,771,082,890
3.0	574114	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam	8,281,736,500,000	0
3.1	574114	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan	0	15,196,026,752
3.0	575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	41,580,381,100,000	0
3.1	575111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk	0	2,135,594,627,934
3.1	575112	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk	0	0
3.0	575114	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	36,528,892,725,077	0
3.1	575114	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk	0	354,481,445,077
3.0	576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	156,369,750,000	0
3.0	576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	181,456,979,902	0
3.0	576115	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	6,727,346,068,000	0
3.1	576115	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk	0	1,044,584,056
JUMLAH			139,169,532,391,235	139,169,532,391,235

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2020 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 04/05/2021
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	58,728,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	8,938,000	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,618,418,390,121	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	393,531,970,511	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	119,331,893	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	360,214,847,005	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	596,660
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,801,074,240
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,990,376,411	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	27,944,000	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	98,591,193,481	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	31,558,594,906	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,700,516,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,386,026,850	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	22,228,558,086	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	5,130,176,957	0
0.0	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	286,839,684,347	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	13,759,717	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	418,017,284	0
0.0	131111	Tanah	18,532,038,706,705	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,904,924,241,165	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,798,628,848,267	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	46,551,709,875	0
0.0	134112	Irigasi	38,341,743,268	0
0.0	134113	Jaringan	17,770,229,691	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	7,153,651,140	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	14,836,358,922	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	281,836,313	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,552,647,621,419
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	182,053,118,595
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	23,402,850,397
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	6,491,545,017
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	7,373,488,912
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	3,466,709,781
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2020 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 04/05/2021
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162151	Software	98,151,352,706	0
0.0	162161	Lisensi	190,850,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	196,625,000	0
0.0	163119	Dana Lainnya	549,179,306,589	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	26,060,951,592	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	237,023,052	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	23,337,779,234
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	85,268,906,958
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	9,542,500
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	159,469,052
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	304,536,894
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	4,061,272,532
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	327,054,228
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	9,498,000
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	527,339,126
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	1,967,279,648
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	67,666,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	10,341,818
0.0	391111	Ekuitas	0	23,969,492,796,843
JUMLAH			25,862,780,487,854	25,862,780,487,854

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,100,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,728,681,926,195	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	329,450,245,873	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	71,528,400	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	368,789,028,861	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	2,033,634,771	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,843,945,145
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	10,168,174
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,636,964,667	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	46,973,268	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	78,323,805,481	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	19,568,386,316	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	1,700,516,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,386,026,850	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	24,914,978,358	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	997,716,138	0
0.0	117131	Bahan Baku	5,025,000	0
0.0	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	344,735,755,090	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	30,419,400	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	838,827,872	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	18,565,546,383,592	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,037,635,381,225	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,136,028,516,570	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	38,577,401,375	0
0.0	134112	Irigasi	48,180,245,628	0
0.0	134113	Jaringan	18,070,416,055	0
0.0	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	0	0
0.0	134212	Irigasi Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	7,700,598,492	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,117,486,622	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,194,436,815	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,683,001,669,125
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	283,649,854,987
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	20,624,769,791

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,735,735,770
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	8,129,331,637
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	3,565,799,913
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	446,658,693	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan	0	2,233,293
0.0	162151	Software	105,124,509,186	0
0.0	162161	Lisensi	397,250,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	3,897,010,050	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	163119	Dana Lainnya	66,888,973,054	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	31,908,779,753	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	235,826,552	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	28,484,150,200
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	92,904,110,647
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	38,947,500
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	158,272,552
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	177,053,511
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	7,490,251,307
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	740,549,479
0.0	212115	Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	0	832,025,601
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	865,592,000
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	171,028,400
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	441,580,113
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,100,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	21,131,781
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	130,113,500,626,991
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,463,964,201,084	0
0.0	313211	Transfer Keluar	183,533,292,531	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	175,509,708,953
0.0	391111	Ekuitas	0	23,969,492,796,843
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	277,669,193,080
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,791,097,923	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	5,000,000
0.0	391119	Koreksi Lainnya	6,451,673,082	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	120,357,912,113
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	179,025,389	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	1,767,095,521	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	44,328,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,500,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	271,574,222
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,003,395,544

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,013,787,495
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	281,500,000	0
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	4,000,000
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	711,619,938
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	751,650,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	4,634,750,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	240,650,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	290,669,500
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	757,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	55,501,711,747
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	2,563,934,779
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	176,344,924
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	21,334,196
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	3,834,271,480
3.0	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun	0	193,161,566,325
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	200,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	8,080,431
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	137,817,873,892
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	189,142,438,711	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	16,988,000
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,707,441	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	25,831
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13,163,199,864	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	8,863,290
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	3,551,521,568	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	1,442,982
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,323,910,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	10,520,100
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,674,150,939	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	1,740,100
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,077,242,584	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	8,691,219,840	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	2,172,600
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	27,041,198,443	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	5,167,300
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	189,400,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,229,130,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	25,976,438
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3,935,746,895	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,606,135,550	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	172,733,172,858	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	28,866,201

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	73,889,991,217	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	1,050,000
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	4,944,025,058	0
3.1	521112	Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	5,729,798
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1,602,269,980	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	805,130,880	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24,768,343,900	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,063,500
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	15,972,394,232	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	24,397,212,017	0
3.0	521211	Beban Bahan	66,816,842,936	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	31,852,800
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,609,947,772,255	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	187,859,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	410,390,045,136	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	167,954,175
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	5,960,752,000	0
3.0	521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk	1,031,150,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	2,074,098,650	0
3.1	521233	Pengembalian Beban Barang Pemberian Bantuan	0	600,000
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	2,087,171,828,423	0
3.1	521241	Pengembalian Beban Barang Non Operasional -	0	1,853,398,135
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	18,683,844,538	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,397,593,531	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,313,291,014	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	224,571,370	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	1,515,975,787	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	31,421,868,846	0
3.1	522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	0	31,665,000
3.0	522141	Beban Sewa	77,906,563,237	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	3,000,000
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	30,507,065,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	60,963,500
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	30,102,020,308	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	24,585,350,417	0
3.1	522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	22,290,000
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,712,486,253	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	246,302,525	0
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	138,268,500	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,533,052,733	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33,139,337,736	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,896,417,632	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrua1_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	357,296,374	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,620,612,100	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	198,751,199,649	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	2,634,907,552
3.0	524112	Beban Perjalanan Tetap	55,968,601	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,865,769,444	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	157,830,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	77,669,062,019	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	2,083,911,226
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	18,600,575,283	0
3.1	524115	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan	0	51,779,000
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	128,953,713,663	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	2,878,193,397
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	317,455,600	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	5,713,120
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	315,187,863	0
3.0	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan	9,238,750,000	0
3.0	571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam	228,725,862,000	0
3.1	571111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi	0	861,845,654
3.0	571112	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam	4,609,005,558	0
3.0	571114	Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam	0	0
3.0	573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	88,461,240,000	0
3.1	573111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	140,007,000
3.0	573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	4,553,832,936,883	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	143,837,338,850	0
3.1	574111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan	0	15,771,082,890
3.0	574114	Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam	36,335,804,415,113	0
3.1	574114	Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan	0	15,196,026,752
3.0	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	2,523,147,643,847	0
3.1	575111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan	0	2,135,594,627,934
3.0	575114	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	74,121,631,862,748	0
3.1	575114	Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan	0	354,481,445,077
3.0	576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	154,622,850,000	0
3.0	576112	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	6,842,771,860,010	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148,505,294,837	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80,376,366,044	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5,773,249,625	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	3,607,226,106	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	796,306,361	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	126,844,126	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	8,033,197,189	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	29,405,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2021 10:08 PM
lap_neraca_percobaan_akrua1_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	119,894,892	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	45,670,898,520	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	574,671,573	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	21,943,516,906	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	2,800,000	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	12,111,018,090	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	421,522,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	109,600,686,336	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	145,723,710	0
3.0	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	123,623,317	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	2,035,797,707	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	136,816,301,181	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	0	596,660
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	42,870,905	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	10,168,174	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	2,233,293	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	272,622,910	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	175,695,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	617,162,536	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	107,332,912	0
JUMLAH			159,738,820,693,391	159,738,820,693,391

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KL
PERIODE TA. 2020 AUDITED

Kode BA dan Nama BA : (027) Kementerian Sosial

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP	v		Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE face	v		Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual	v		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	v		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?	v		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		v	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		v	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		v	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		v	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		v	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	v		Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)		v	Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		v	Tidak
Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		v	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		v	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap	v		Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	v		Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	v		Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		v	Ya
#####				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	Rp		8.023.583.578
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	Rp		8.023.583.578
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		v	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		v	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		v	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		v	Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		v	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		v	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		v	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		v	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		v	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		v	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		v	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?	v		Tidak
TELAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		v	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		v	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		v	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			137.817.873.892
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			136.816.301.181
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			1.001.572.711
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		v	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		v	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6..	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	v		Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	v		Ya

LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		v	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		v	Tidak
3.	Adakah beban bunga		v	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		v	Tidak
5.	Adakah beban hibah		v	Tidak
6.	Adakah beban transfer		v	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		v	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)		v	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	v		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) = Beban Penyisihan Piutang LO	v		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"	v		Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>				
2.	Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>				
Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	v		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.				
#####				
NERACA				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
2.	Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?	v		Tidak
#####				
3.	Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		v	Tidak
4.	Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?		v	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahra dan Aplikasi Silabi ?	v		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	v		Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	v		Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	v		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	v		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	v		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?	v		Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?	v		Ya
7. Adakah beban bansos?	v		Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	v		Ya
Pengecekan Jurnal Akruai	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	v		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	v		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	v		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	v		Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	v		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	v		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		v	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?		v	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	v		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	v		Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")	v		
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1	Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		v
2	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		-	
3	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		-	
4	Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak	v	
5	Berapa NUP BMN dengan Nilai Buku Minus? (diisi jumlah NUP)		29 (dua puluh sembilan) NUP	
6	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Buku Minus? (diisi nilai rupiahnya)			(12.287.625)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		v	Tidak
2.	Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		v	Tidak
Pengecekan TDK				
1.	Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
2.	Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		v	Tidak
3.	Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		v	Tidak
4.	Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
5.	Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
6.	Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	v		
2.	Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	v		
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	v		Ya
2.	Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	v		Ya
3.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan	v		Tidak
4.	Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	v		Ya
5.	Adakah PNPB digunakan langsung?		v	Tidak
6.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?		N/A	Ya
7.	Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?		v	Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	v		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)			
	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	v		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	v		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	v		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	v		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	v		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	v		Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	v		Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional		v	Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	v		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020		v	Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	v		Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA			
	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19	v		
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp	71.404.245.680	
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19	v		
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19	v		
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19	v		
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	v		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional			
	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19	v		
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19	v		
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	v		

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.	V	
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	V	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19	V	
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19	V	
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19	V	
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19	V	
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19	V	

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

1 *Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp8.023.583.578 disebabkan adanya persediaan dalam rangka Bantuan Sosial pada satker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait pengiriman barang berupa paket Family Kit sebanyak 20.000 yang dikirimkan ke Gudang Regional Palembang sebanyak 10.000 paket dan Gudang Regional Makassar sebanyak 10.000 paket. Barang tersebut dikirim pada akhir Desember 2020 dan baru diterima di Palembang dan Makassar pada bulan Januari 2021*

2 *Perbedaan antara realisasi belanja pegawai dan beban pegawai disebabkan adanya pengakuan piutang lainnya atas pengembalian belanja pegawai TA 2020 dimana atas pengembalian tersebut belum dilakukan penyetoran ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2020. Selain itu juga disebabkan adanya belanja pegawai yang masih harus dibayar sehingga mempengaruhi nilai beban pegawai pada laporan keuangan.*

3 *Selisih antara beban penyusutan/amortisasi dengan nilai akumulasi penyusutan/amortisasi 2020 setelah dikurangi saldo awal penyusutan/amortisasi 2020 dipengaruhi oleh adanya transaksi koreksi penyusutan akibat koreksi revaluasi, transaksi koreksi transfer masuk dan transfer keluar, transaksi koreksi pencatatan nilai/kuantitas, transaksi koreksi hasil revaluasi, transaksi normalisasi BMN, transaksi hibah keluar, transaksi reklasifikasi, dan transaksi atas penghapusan BMN*

4 *Analisa atas mutasi persediaan Kementerian Sosial Tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat mutasi persediaan yang berasal dari transaksi transfer, hibah, koreksi nilai persediaan, reklasifikasi, serta penyesuaian nilai persediaan.*

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKI,

(Ali Idris Sardi)

NIP. 19780917 201012 1 001

Jakarta, 29 April 2021

Penelaah,

(Nurma Monica)

NIP. 19930910 201902 2 005



0493
2636

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-~~928~~ /M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020

7 Desember 2020

Sifat : Segera

Hal : Penunjukan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
sebagai Menteri Sosial *Ad Interim*

Yth. Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
di Jakarta

Berkenaan dengan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Sosial atas nama Sdr. Juliari Peter Batubara, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai Menteri Sosial *Ad Interim*.

Atas perhatian Menteri Koordinator, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Sekretaris Negara,

atikno

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/P TAHUN 2020
TENTANG
PENGISIAN DAN PENGGANTIAN BEBERAPA MENTERI NEGARA KABINET
INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGISIAN DAN
PENGGANTIAN BEBERAPA MENTERI NEGARA KABINET
INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024.

KESATU : dst.

KEDUA : Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju
Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024, masing-
masing:
1. s.d. Nomor 2, dst.;
3. Sdr. Tri Rismaharini - Menteri Sosial;
4. s.d. Nomor 6, dst.,

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan
Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Dalam Sisa Masa
Jabatan Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat
yang berkepentingan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-
masing yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Untuk Petikan yang sah:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur


Setya Utama



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 diadakan Upacara Serah Terima Jabatan antara :

1. Prof. Dr. MUHADJIR EFFENDY, M.A.P, selaku Menteri Sosial *Ad Interim* yang selanjutnya disebut sebagai:

=== PIHAK PERTAMA ===

2. Dr. Ir. TRI RISMAHARINI, M.T, yang selanjutnya disebut sebagai:

=== PIHAK KEDUA ===

Dalam Upacara Serah Terima Jabatan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA Jabatan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan segala wewenang, hak, tugas, dan kewajiban yang bertalian dengan jabatan itu.

Hal-hal yang bersangkutan paut dengan kelengkapan Serah Terima Jabatan ini akan diselesaikan dikemudian hari.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat, sebagai bukti kebenarannya ditanda tangani oleh kedua pihak di Jakarta

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. TRI RISMAHARINI, M.T

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. MUHADJIR EFFENDY, M.A.P



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN SOSIAL RI
TAHUNAN TAHUN 2020 (AUDITED)

*Dasar
Hukum*

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Surat Ditjen KN Nomor S-1327/KN/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Implementasi Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara Biro Umum adalah sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

3. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ~ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ~ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ~ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
4. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
5. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
6. Penyajian Aset Tetap pada neraca didasarkan pada nilai Kapitalisasi BMN yang merupakan batas nilai minimum per satuan BMN, sebelum terbitnya PMK Nomor 181/PMK.6/2016 nilai kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
7. Sedangkan penyajian Aset Tetap pada neraca didasarkan pada nilai Kapitalisasi BMN yang merupakan batas nilai minimum per satuan BMN, setelah terbitnya PMK Nomor 181/PMK.6/2016 nilai kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
8. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
9. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual.

10. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

11. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- a. Tanah
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakuakn penghapusan.

a. Nilai Penyusutan

Nilai yang dapat disusutkan atas BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012.
- b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

b. Metode Penyusutan Yang Digunakan

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus. Dengan formula :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

c. Masa Manfaat Yang Digunakan

Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

- a. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per kodefikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010, dengan mengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna.
- b. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per akun neraca, dijelaskan seperti halaman dibawah ini.

e. Berdasarkan PMK No 90/PMK.06/2014, sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian :

- 1) Perhitungan penyusutan dilakukan sejak Tahunan Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap
- 2) Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

12. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual telah mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan Aset Tak Berwujud, yaitu:

a. Metode Amortisasi

Metode amortisasi memberikan gambaran pola konsumsi atas manfaat ekonomis Amortisasi atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Masa Manfaat

Aset Tak Berwujud yang merupakan objek amortisasi adalah Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Penjelasan lebih lanjut atas masa manfaat ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai berikut :

Masa manfaat atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud merupakan masa manfaat terbatas yang digunakan dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

- c. Nilai perolehan bruto atas Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan jenis Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- d. Penyajian atas nilai perolehan bruto Aset Tak Berwujud, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

13. Penilaian Kembali BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- a. "Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah"
- b. "Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional"

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap :

- a. tanah,
- b. gedung dan bangunan, dan
- c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - 1) jalan dan jembatan, dan
 - 2) bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan sesuai setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian Sosial.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan Tahun Anggaran 2020 (*Audited*) ini adalah sebesar Rp 22.911.282.225.430,- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 22.398.678.145.608,- dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 512,604,079,822,-. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
11. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
12. Arsip Data Komputer (ADK).

Penjelasan Pos Neraca **D. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**

D.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Saldo Awal Tahun Anggaran 2020 (*Audited*)

Nilai BMN per *31 Desember 2019 (Audited)* menurut Kementerian Sosial adalah sebesar *Rp 22.953.620.680.718,-* yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar *Rp 22.941.248.975.735,-* dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar *Rp 12.371.704.983,-*.

Posisi Neraca Tahunan Tahun Anggaran 2020 (*Audited*)

Posisi Neraca secara umum untuk aset Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2020 (Audited)* mengalami perubahan dari posisi sebelumnya.

Komposisi Neraca per *31 Desember 2020 (Audited)* adalah sebagai berikut :

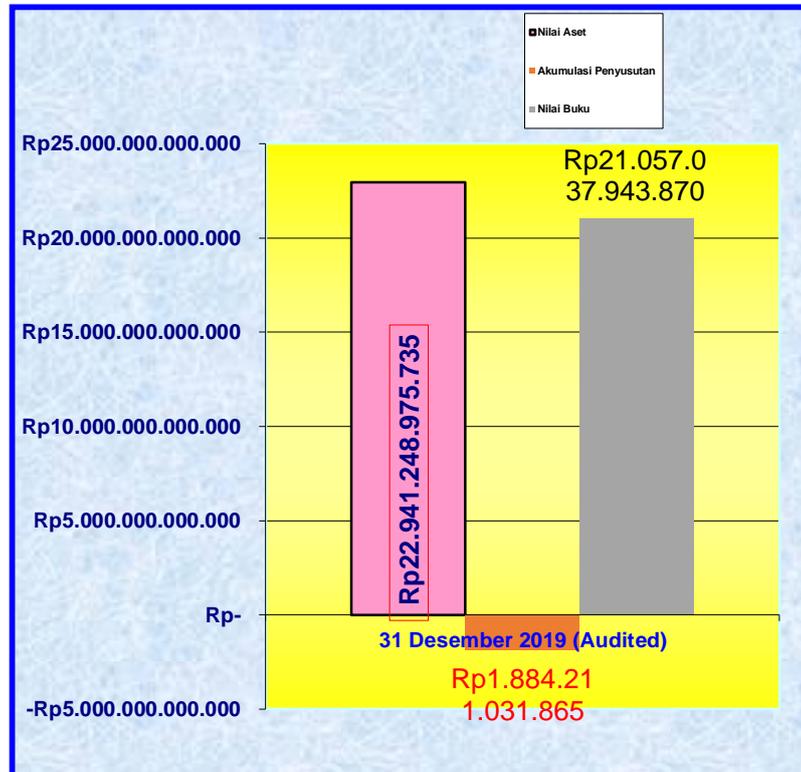
Uraian	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	Kenaikan / (penurunan)
Nilai Aset	Rp 22.941.248.975.735	Rp 23.490.799.636.355	
Akumulasi Penyusutan	Rp1.884.211.031.865	Rp2.132.292.642.122	
Nilai Buku	Rp 21.057.037.943.870	Rp 21.358.506.994.233	

Nilai Perolehan Aset per *31 Desember 2020 (Audited)* sebesar *Rp. 23.490.799.636.355,-* terdiri dari Aset Lancar sebesar *Rp. 480.185.394.440,-*

dan Aset Tetap sebesar Rp. 23.010.614.241.915,-.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 2.132.292.642.122,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 21.358.506.994.233,-

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti dibawah ini



E.2. PENJELASAN PER POS NERACA

E.2.1. ASET LANCAR PERSEDIAAN

E.2.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan Kementerian Sosial RI Periode *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 455.884.848.039,-* dan periode *31 Desember 2020 (Audited)* sebesar *Rp. 480.185.394.440,-* sehingga mengalami kenaikan sebesar *Rp. 24.300.546.401,-* yang terdiri dari :

Persediaan per Eselon I dirinci dalam tabel di bawah ini :

Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2019 (Audited)	Mutasi	31 Desember 2020 (Audited)
1	Sekretariat Jenderal	Rp 2.102.251.813	Rp (905.252.521)	Rp 1.196.999.292
2	Inspektorat Jenderal	Rp 8.174.500	Rp 113.363.000	Rp 121.537.500
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial dan PK	Rp 27.302.439.302	Rp (2.330.805.527)	Rp 24.971.633.775
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	Rp 125.559.826.719	Rp (22.243.434.265)	Rp 103.316.392.454
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 284.418.061.781	Rp 59.186.968.528	Rp 343.605.030.309
6	Ditjen. Fakir Miskin	Rp 192.892.455	Rp (5.492.850)	Rp 187.399.605
11	Badan Pendidikan dan Penelitian Kesos	Rp 16.301.201.469	Rp (9.514.799.964)	Rp 6.786.401.505
	Total	Rp 455.884.848.039	Rp 24.300.546.401	Rp 480.185.394.440

Barang Persediaan dilingkungan Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2020 (Audited)* senilai *Rp. 480.185.394.440,-* yang terdiri dari barang persediaan yaitu :

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	MUTASI	31 Desember 2020 (Audited)
1	Bansos	Rp 286.839.684.347	Rp 57.896.070.743	Rp 344.735.755.090
2	Barang Konsumsi	Rp 7.990.376.411	Rp (353.411.744)	Rp 7.636.964.667
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 27.944.000	Rp 19.029.268	Rp 46.973.268
4	Suku Cadang		Rp -	
5	Pita Cukai Materai dan Leges		Rp -	
6	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 98.591.193.481	Rp (20.267.388.000)	Rp 78.323.805.481
7	Hewan dan Tanaman untuk Dijual			
8	Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp 31.558.594.906	Rp (11.990.208.590)	Rp 19.568.386.316
9	Jalan irigasi dan Jaringan Untuk diserahkan	Rp 1.700.516.000	Rp -	Rp 1.700.516.000
10	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		Rp -	
11	Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp 1.386.026.850	Rp -	Rp 1.386.026.850
12	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp 22.228.558.086	Rp 2.686.420.272	Rp 24.914.978.358
13	Bahan Baku	Rp -	Rp 5.025.000	Rp 5.025.000
14	Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	Rp 13.759.717	Rp 16.659.683	Rp 30.419.400
15	Persediaan Lainnya	Rp 418.017.284	Rp 420.810.588	Rp 838.827.872
16	Persediaan Dalam Proses	Rp 5.130.176.957	Rp (4.132.460.819)	Rp 997.716.138
	Jumlah	Rp 455.884.848.039	Rp 24.300.546.401	Rp 480.185.394.440

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Nilai Persediaan Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal Tahunan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 792.643.392,-** sehingga mengalami penurunan sebesar **- Rp. 905.252.521,-** yang terdiri dari :

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	MUTASI	31 Desember 2020 (Audited)
1	Barang konsumsi	Rp 1,846,783,860	Rp (1,194,250,184)	Rp 652,533,676
2	Persediaan Lainnya	Rp 255,467,953	Rp 288,997,663	Rp 544,465,616
	Jumlah	Rp 2,102,251,813	Rp (905,252,521)	Rp 1,196,999,292

Nilai Persediaan unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal Tahunan Tahun 2020 **Audited**

Berikut data Persediaan per Satuan Kerja :

No	Uraian		Jumlah	
	Satker	Barang Konsumsi		Persediaan Lainnya
1	Sekretariat Jenderal	587,162,376	544,465,616	1,131,627,992
2	Pusdatin	65,371,300	-	65,371,300
3	Dinsos Prov.	-	-	-
	Jumlah	652,533,676	544,465,616	1,196,999,292

Terdapat Transaksi Transfer Masuk dari Satker PPSDBS Ditjen Dayasos ke Satker Sekretariat Jenderal berupa Barang Persediaan adapun rincian barangnya, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Gel handsanitizer 5 liter	50	1,250,000	62,500,000
2	Rapid test healgen	7,000	150,000	1,050,000,000
3	Perlengkapan APD :	770	1,215,000	935,550,000
4	Carnevit	200	236,500	47,300,000
5	Neurobion	200	14,000	2,800,000
6	Sput 10 CC	200	3,000	600,000
7	Sput 5 CC	200	2,500	500,000
8	Wing needle	300	2,800	840,000
9	Alkohol swab	400	350	140,000
10	Microfore	20	12,500	250,000
11	OK Plast	300	200	60,000
12	Aquadest 25 ml	150	15,000	2,250,000
13	Zegavit	3,500	220,000	770,000,000
14	Merzavit-C	14,000	24,750	346,500,000
15	Vitamin Prove D3 1000 IU 30 S	7,000	82,500	577,500,000
16	Pengadaan vaksin penumonia	50	935,000	46,750,000
17	Sarung karet Sensi	70	200,000	14,000,000
18	Masker Kemensos Hadir	220	190,000	41,800,000
19	Masker virus medis "shot out"	260	547,250	142,285,000
20	Masker medis Sensi	550	200,000	110,000,000
21	Goddie bag Kemensos Hadir	3,500	11,000	38,500,000
22	Masker medis S-Plus	3,280	165,000	541,200,000
23	Masker kain bordir Kemensos Hadir	2,000	20,000	40,000,000
24	Masker kain scuba Kemensos Hadir	600	10,000	6,000,000

25	Rapid test merek Lungene	3,000	135,000	405,000,000
26	Pengadaan Madu Kemasan	7,000	200,000	1,400,000,000
27	Rapid test merek Lungene	2,000	135,000	270,000,000
28	Rapid test merek Lungene	1,000	135,000	135,000,000
29	Rapid test merek Lungene	2,000	135,000	270,000,000
30	Rapid test merek Lungene	1,000	135,000	135,000,000
31	Pengadaan handsanitizer gel 500 ml	100	70,000	7,000,000
32	Pengadaan handsanitizer gel 5 liter	500	346,000	173,000,000
33	Hand Sanitizer Antis	14,000	30,000	420,000,000
34	Rapid test merek Lungene	1,500	135,000	202,500,000
35	Masker Kemensos Hadir	3,500	165,000	577,500,000
36	Masker Evo (plus med) warna putih	10	250,000	2,500,000
37	Masker Evo (plus med) warna merah	10	250,000	2,500,000
38	Faceshield	100	150,000	15,000,000
39	Masker Bagus	10	200,000	2,000,000
40	Masker Kemensos Hadir	3,000	150,000	450,000,000
41	Antigen untuk pengetesan Covid-19	2,000	177,500	355,000,000
42	Masker Evo Putih	10	250,000	2,500,000
43	Masker Evo Hitam	10	250,000	2,500,000
44	Sarung Tangan Medical "Sensi"	10	200,000	2,000,000
45	Goddie bag warna merah	3,000	4,500	13,500,000
46	Pengadaan Madu Kemasan	6,000	200,000	1,200,000,000
Jumlah				10,819,825,000

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

Nilai Persediaan per **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp.8.174.500,-** dan per **31 Desember 2020 (Audited)** sebesar **Rp.121.537.500,-** sehingga mengalami kenaikan sebesar **Rp.113.363.000,-**.

Berdasarkan data tersebut, rincian daftar barang persediaan per **31 Desember 2020 (Audited)** adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Kertas HVS F4 80 gr	4 rim	240.000
2	Kertas HVS A4 80 gr	4 rim	220.000
3	Hand Sanitizer 5 L	42 jerigen	16.117.500
4	Hand Sanitizer 250 ml	140 botol	8.400.000
5	Sarung Tangan	30 box	7.500.000
6	Disinfectant 280 ml	70 botol	5.250.000
7	Faceshield	10 pcs	175.000
8	Masker Sensi Headloop	430 box	83.635.000
	Jumlah	730	121.537.500

Rincian beban persediaan berupa Barang Konsumsi pada Neraca Tahunan Tahun 2020 (**Audited**) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Des 2019	MUTASI	31 Des 2020
1	Barang konsumsi	Rp 8,174,500	Rp 113,363,000	Rp 121,537,500
2	Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Barang Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
5	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 8,174,500	Rp 113,363,000	Rp 121,537,500

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nilai Persediaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Periode 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp.27.302.439.302,- dan periode 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp.24.971.633.775,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.2.330.805.527,- yang terdiri dari :

Persediaan per Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial dirinci dalam tabel di bawah ini :

Satker	Konsumsi	Peralatan dan Mesin utk dijual/diserahkan kpd masy/pemda	Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	JUMLAH
Sekretariat	Rp 454.088.800		Rp 199.196.500		Rp 653.285.300
Dit PSDBS	Rp 20.308.400		Rp 23.181.206.937		Rp 23.201.515.337
Dit K2KRS	Rp -	118.200.000	Rp -	Rp -	Rp 118.200.000
Dinsos Jabar	Rp 917.000				Rp 917.000
Dinsos NTT			Rp 174.146.536		Rp 174.146.536
Dinsos Kab Nunukan			Rp 619.075.600		Rp 619.075.600
Dinsos Papua	Rp -		Rp 204.494.002	Rp -	Rp 204.494.002
Jumlah	Rp 475.314.200	Rp 118.200.000	Rp 24.378.119.575	Rp -	Rp 24.971.633.775

Barang Persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial per 31 Desember 2020 Audited senilai **Rp.24.971.633.775,-** yang terdiri dari:

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	MUTASI	31 Desember 2020 (Audited)
1	Barang konsumsi	Rp 475.314.200	Rp -	Rp 475.314.200
2	Peralatan dan Mesin utk dijual atau diserahkan kpd masy	Rp -	Rp 118.200.000	Rp 118.200.000
3	Persediaan Lainnya utk diserahkan kpd masy dlm proses	Rp 5.130.176.957	Rp (4.132.460.819)	Rp 997.716.138
4	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada Masyarakat	Rp 21.696.948.145	Rp 1.683.455.292	Rp 23.380.403.437
5	Persediaan Lainnya			0
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 27.302.439.302	Rp (2.330.805.527)	Rp 24.971.633.775

1. Barang Konsumsi

Barang Konsumsi per 31 Desember 2019 Audited sebesar **Rp.475.314.200,-** mengalami kenaikan sebesar **Rp.38.400.000,-** dan penurunan sebesar **Rp.38.400.000,-** sehingga saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar **Rp.475.314.200,-**.

- Barang Konsumsi Satker Pusat Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial **Rp.454.088.800,-** (Rincian Terlampir)
- Barang Konsumsi Satker Pusat Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial **Rp.20.308.400,-** (Rincian Terlampir)
- Barang Konsumsi Satker Tugas Pembantuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat **Rp.917.000,-** (Rincian Terlampir)
- Barang Konsumsi Satker Dekonsentrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar **Rp.10.800.000,-** berupa ATK yang sudah habis pakai ditahun anggaran berjalan sehingga saldo per 31 Desember

2020 Audited sebesar **Rp.0,-** (Rincian Terlampir)

- Barang Konsumsi Satker Dekonsentrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar **Rp.27.600.000,-** berupa ATK yang sudah habis pakai ditahun anggaran berjalan sehingga saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar **Rp.0,-** (Rincian Terlampir)

2. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat mengalami kenaikan sebesar **Rp.118.200.000,-** pada satker Direktorat Kepahlawanan Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial berupa Papan Nama MPN Muhammad Hatta.

3. Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat Dalam Proses

Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat Dalam Proses per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.997.716.138,-** mengalami penurunan pada Laporan Tahunan Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Sosial Kabupaten Nunukan sebesar **Rp.619.075.600,-** nilai tersebut terbentuk dari dana terserap dengan rincian :

Nilai	Kontrak	sebesar
Rp.1.238.118.900,-		
Penyerapan dana :		
	Uang Muka	Rp.371.435.670,-
	Termin I	<u>Rp.247.639.930,-</u>
	Total	Rp.619.075.600,-

Sisa dana yang blm dicairkan : Rp. 568.909.907,-

Realisasi Fisik : 54,05 %

Realisasi Anggaran : 50,00 %

Berkaitan hal tersebut di atas, maka Bersama ini disampaikan kronologis pemutusan kontrak & sanksi administrasi **Dinas Sosial Kab Nunukan** sebagai berikut :

1. Telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik) dan foto dokumentasi di lapangan :

- a). Surat teguran I Nomor : 01/PKAT/027/X/2019 tanggal 21

oktober 2019 dengan realisasi fisik sebesar 51,08% (lima puluh satu koma nol delapan persen);

b). Surat teguran II Nomor : 02/PKAT/027/X/2019 tanggal 14 Nopember 2019 dengan realisasi fisik sebesar 54,58% (lima puluh empat koma lima puluh delapan persen) terjadi deviasi sebesar : 41,93% (empat puluh satu koma Sembilan puluh tiga persen);

c). Surat teguran III Nomor : 03/PKAT/027/X/2019 tanggal 02 Desember 2019 dengan realisasi fisik sebesar 54,58% (lima puluh empat koma lima puluh delapan persen) terjadi deviasi sebesar : 41, 93% (empat puluh satu koma Sembilan puluh tiga persen);

2. Dilakukan Rapat Bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penguji tagihan/ penandatanganan SPM, Aplikator Saiba, Bendahara, Tim Teknis dan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, terkait dokumentasi pekerjaan dilapangan sebagai lampiran Pemutusan Kontrak & Sanksi Administrasi.

3. Pembuktian dilapangan bersama Wakil Bupati Nunukan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Kabag Pembangunan, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim PPHP, Tim Teknisi dan lain-lain pada tanggal 9 Desember 2019;

4. Lokasi Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pekerjaan Pembangunan Rumah Bantuan Stimulan Permukiman Sosial, Desa Paluan Kec. Lumbis Ogong, pada jalur anak sungai dengan debit air kecil menunggu banjir untuk mobilisasi material ke lokasi pekerjaan dengan jarak ± 2 KM.

5. Melihat laporan pekerjaan kemajuan pertanggal 21 Oktober 2019 sebesar 51,08 % (lima puluh satu koma nol delapan persen) dengan deviasi sebesar : 9,79% (Sembilan koma tujuh puluh Sembilan persen) sampai dengan tanggal 06 Desember 2019 sebesar 54, 05% (lima puluh empat koma nol lima persen) dengan deviasi sebesar 45, 95% (empat puluh lima koma Sembilan puluh lima persen), pihak penyedia tidak ada kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan.

b. Persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses Satker Tugas Pembantuan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar *Rp.174.146.536,-* merupakan pekerjaan pemberian bantuan stimulan pemukiman sosial bagi warga Komunitas Adat Terpencil di lokasi Letkole Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang tidak dapat

direalisasikan karena wanprestasi CV. Binna Karya selaku Penyedia Barang/ Jasa sehingga PPK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Surat Nomor Dinsos 460/411/BPS.1/NTT/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang telah diawali dengan pemberian Surat Peringatan I sampai dengan III. Akibat dari PHK tersebut dilakukan klaim terhadap pemberian jaminan (Bank NTT) untuk mengembalikan sisa uang muka tersebut dengan rincian nilai kontrak Rp1.366.820.000,00 uang muka 30% sebesar Rp410.046.000. Realisasi Uang Muka 12,74% sebesar Rp.174.146.536 sisa uang muka yang dikembalikan sebesar Rp.235.899.464,00 NTPN DC56D2U58QEA73D2 tanggal 16 Oktober 2018 jaminan pelaksanaan (5%) sebesar Rp68.341.000 dan sisa kontrak yang tidak terealisasi sebesar Rp1.192.673.646,-.

c. Persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses Satker Tugas Pembantuan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua sebesar *Rp.204.494.002,-* merupakan pekerjaan pembangunan rumah Komunitas Adat Terpencil di Kampung Papane Distrik Gamelia Kabupaten Lany Jaya tahun 2017 senilai Rp404.700.094 tidak dapat direalisasikan karena adanya masalah kesalahpahaman dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan, telah dilakukan musyawarah tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal terhadap persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp404.700.094 telah di setor ke kas negara senilai Rp.200.206.092,- dengan NTPN Nomor: EE6001OL96005IO tanggal 5 April 2018 sehingga per 31 Desember 2018 menjadi sebesar *Rp.204.494.002,-* sampai per 31 Desember 2020.

d. Mutasi persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses sebesar Rp.4.132.460.819,- terdiri dari :

Direktorat Kepahlawanan Keberintisan dan Kesetiakaan Sosial

Mutasi Persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses Satker Pusat Direktorat Kepahlwaan Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial sebesar *Rp.1.676.128.906,-* sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai	BAST	Ket
1.	Pembangunan MPN sebagai Destinasi Wisata di Provinsi Kepulauan Riau	Rp 474.000.000	1784/3.4/PB.05.03/11/2019	Selesai
2.	Pemeliharaan MPN di Provinsi Gorontalo Tahap I	Rp 452.162.906	1535/3.4/PB.05.03/11/2019	Selesai
3.	Rehabilitasi TMPN di Provinsi Sulawesi Tengah	Rp 287.966.000	1837/3.4/PB.05.03/11/2019	Selesai
4.	Pemeliharaan MPN di Provinsi Gorontalo Tahap II	Rp 462.000.000	1812/3.4/PB.05.03/12/2019	Selesai
	Jumlah	Rp 1.676.128.906		

Dinas Sosial Kabupaten Asmat

Mutasi Persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses Satker Tugas Pembantuan Kabupaten Asmat sebesar Rp.2.456.331.913,- telah diserahkan kepada masyarakat berupa Rumah KAT sebanyak 40 unit dengan Berita Acara Serah Terima No.800/002/BAST/BANSOS/SOS/APBN/1/2020 Tanggal 20 Januari 2020.

4. Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat

Barang lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp.23.380.403.437,- mengalami kenaikan sebesar Rp.1.683.457.292,- dari tahun 2019. Adapun Rincian Barang Lainnya untuk dijual/diserahkan Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada Masyarakat Satker Pusat Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.23.181.206.937,- berupa Hadiah Tak Tertebak (Rincian Terlampir)
 - b. Barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada Masyarakat Satker Pusat Sekretariat Ditjen. Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.199.196.500,- berupa buku-buku juknis, himpunan perundang undangan, profil dll lingkup Ditjen. Pemberdayaan Sosial (Rincian Terlampir)
- Terdapat Transaksi Transfer Keluar dari Satker PSDBS ke Satker Sekretariat Jenderal berupa Barang Persediaan adapun rincian barangnya, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Gel handsanitizer 5 liter	50	1.250.000	62.500.000
2	Rapid test healgen	7.000	150.000	1.050.000.000
3	Perlengkapan APD :	770	1.215.000	935.550.000
4	Carnevit	200	236.500	47.300.000
5	Neurobion	200	14.000	2.800.000
6	Sput 10 CC	200	3.000	600.000
7	Sput 5 CC	200	2.500	500.000
8	Wing needle	300	2.800	840.000
9	Alkohol swab	400	350	140.000
10	Microfore	20	12.500	250.000
11	OK Plast	300	200	60.000
12	Aquadest 25 ml	150	15.000	2.250.000
13	Zegavit	3.500	220.000	770.000.000
14	Merzavit-C	14.000	24.750	346.500.000
15	Vitamin Prove D3 1000 IU 30 S	7.000	82.500	577.500.000
16	Pengadaan vaksin penumonia	50	935.000	46.750.000
17	Sarung karet Sensi	70	200.000	14.000.000
18	Masker Kemensos Hadir	220	190.000	41.800.000
19	Masker virus medis "shot out"	260	547.250	142.285.000
20	Masker medis Sensi	550	200.000	110.000.000
21	Goddie bag Kemensos Hadir	3.500	11.000	38.500.000
22	Masker medis S-Plus	3.280	165.000	541.200.000
23	Masker kain bordir Kemensos Hadir	2.000	20.000	40.000.000
24	Masker kain scuba Kemensos Hadir	600	10.000	6.000.000
25	Rapid test merek Lungene	3.000	135.000	405.000.000
26	Pengadaan Madu Kemasan	7.000	200.000	1.400.000.000
27	Rapid test merek Lungene	2.000	135.000	270.000.000
28	Rapid test merek Lungene	1.000	135.000	135.000.000
29	Rapid test merek Lungene	2.000	135.000	270.000.000

30	Rapid test merek Lungene	1.000	135.000	135.000.000
31	Pengadaan handsanitizer gel 500 ml	100	70.000	7.000.000
32	Pengadaan handsanitizer gel 5 liter	500	346.000	173.000.000
33	Hand Sanitizer Antis	14.000	30.000	420.000.000
34	Rapid test merek Lungene	1.500	135.000	202.500.000
35	Masker Kemensos Hadir	3.500	165.000	577.500.000
36	Masker Evo (plus med) warna putih	10	250.000	2.500.000
37	Masker Evo (plus med) warna merah	10	250.000	2.500.000
38	Faceshield	100	150.000	15.000.000
39	Masker Bagus	10	200.000	2.000.000
40	Masker Kemensos Hadir	3.000	150.000	450.000.000
41	Antigen untuk pengetesan Covid-19	2.000	177.500	355.000.000
42	Masker Evo Putih	10	250.000	2.500.000
43	Masker Evo Hitam	10	250.000	2.500.000
44	Sarung Tangan Medical "Sensi"	10	200.000	2.000.000
45	Goddie bag warna merah	3.000	4.500	13.500.000
46	Pengadaan Madu Kemasan	6.000	200.000	1.200.000.000
Jumlah				10.819.825.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Nilai Persediaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Periode 31 Desember 2019 Audited sebesar Rp. 125.559.826.719,- dan periode 31 Desember 2020 Audited dengan nilai sebesar Rp. 103.316.392.454,- terjadi penurunan sebesar Rp. 22.243.434.265,-, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2019 Audited	MUTASI	31 Desember 2020 Audited
1	Barang konsumsi	Rp 3.485.723.085	Rp 1.670.352.786	Rp 5.156.075.871
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 20.496.500	Rp 21.772.268	Rp 42.268.768
3	Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp -	Rp -	Rp -
5	Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	Rp 98.591.193.481	Rp (20.267.388.000)	Rp 78.323.805.481
6	Hewan dan Tanaman untuk dijual	Rp -	Rp -	Rp -
7	Peralatan dan Mesin Untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	Rp 16.986.734.126	Rp (3.352.557.000)	Rp 13.634.177.126
8	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp 1.700.516.000		Rp 1.700.516.000
9	Aset Tetap lainnya untuk diserahkan	Rp -	Rp -	Rp -
10	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp 1.386.026.850	Rp -	Rp 1.386.026.850
11	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan masyarakat	Rp 707.650	Rp 649.464.952	Rp 650.172.602
12	Bahan Baku	Rp -	Rp 5.025.000	Rp 5.025.000
13	Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	Rp 3.213.305.450	Rp (1.089.342.950)	Rp 2.123.962.500
14	Persediaan Untuk Tujuan Strategi / Berjaga-jaga	Rp 13.743.717		
15	Persediaan Lainnya	Rp 161.379.860	Rp 132.982.396	Rp 294.362.256
	Jumlah	Rp 125.559.826.719	Rp (22.229.690.548)	Rp 103.316.392.454

Nilai persediaan *31 Desember 2020 (Audited)* pada *Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.103.316.392.454,-*, baik Satuan Kerja vertikal maupun Dekonsentrasi.

Berdasarkan data tabel persediaan diatas, maka dapat dijelaskan rincian per sub kelompok barang persediaan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (terlampir).

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Periode *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 284.418.061.781,-* dan periode *31 Desember 2020 (Audited)* sebesar *Rp. 343.605.030.309,-* sehingga mengalami kenaikan sebesar *Rp. 59.186.968.528,-*, yang terdiri dari :

Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	MUTASI	,31 Desember 2020 (Audited)
Barang konsumsi	Rp 721,712,818	Rp (390,077,168)	Rp 331,635,650
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 456,500	Rp (456,500)	Rp -
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/ diserahkan ke masyarakat	Rp 69,497,566	Rp 592,104,503	Rp 661,602,069
Persediaan dlmRangka Bansos	Rp 283,626,378,897	Rp 58,985,413,693	Rp 342,611,792,590
Persediaanuntuk tujuan strategi/	Rp 16,000	Rp (16,000)	Rp -
Jumlah	Rp 284,418,061,781	Rp 59,186,968,528	Rp 343,605,030,309

Nilai Persediaan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Periode 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 343.605.030.309,- per Satuan Kerja :

NO	NAMA SATKER	URAIAN					JUMLAH
		Barang Konsumsi	Persediaan untuktujuan strategi/berjaga-jaga	Bahan Untuk Pemeliharaan	Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan dlm Rangka Bantuan Sosial	
1	Sekretariat	168,574,700		-	-		168,574,700
2	Direktorat PSKBA	-			512,512,569	322,009,879,839	322,522,392,408
3	Direktorat PSKBS	-			149,089,500	20,601,912,751	20,751,002,251
4	Direktorat Jamsos	102,758,520	-	-	-		102,758,520
5	Jawa Timur	47,291,250					47,291,250
6	Bali	2,388,000					2,388,000
7	Kalimantan Timur	6,292,800					6,292,800
8	Bengkulu	3,790,500					3,790,500
11	Nusa Tenggara Barat	539,880					539,880
	JUMLAH	331,635,650	-	-	661,602,069	342,611,792,590	343,605,030,309

Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan dikarenakan adanya barang persediaan yang Habis Pakai berupa Barang konsumsi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, Persediaan untuk tujuan strategi/berjaga-jaga , Bahan untuk pemeliharaan, Barang Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial yang masih menjadi Bufferstock.

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Persediaan per Eselon I dirinci dalam tabel di bawah ini :

Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2019 (audited)	Mutasi	31 Desember 2020
1	Setditjen Penanganan Fakir Miskin	Rp 73,539,605	Rp -	Rp 73,539,605
2	Dit. PFM Wilayah I	Rp 5,492,850	Rp (5,492,850)	Rp -
3	Dit. PFM Wilayah II	Rp 75,970,000	Rp -	Rp 75,970,000
4	Dit. PFM Wilayah III	Rp 37,890,000	Rp -	Rp 37,890,000
	Total	Rp 192,892,455	Rp (5,492,850)	Rp 187,399,605

Terdapat Pemakaian di Direktorat Jenderal Penangan Fakir Miskin Wilayah I Senilai Rp.5.492.850 yang terdiri dari :

- Buku Saku Verifikasi dan Validasi RS-RTLH & Sarling Th 2018 Sebanyak 80 Buah senilai Rp.1.029.600,00
- Kipas Karton Th. 2019 Sebanyak 541 Buah Senilai Rp.4.463.250,00

Barang Persediaan dilingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin per 31 Desember 2020 senilai **Rp187.399.605,00** yang terdiri dari barang konsumsi yaitu :

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2019 (audited)	MUTASI	31 Desember 2020
1	Persediaan Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -
2	Barang Konsumsi	Rp 192,892,455	Rp (5,492,850)	Rp 187,399,605
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pita Cukai Materai dan Leges	Rp -	Rp -	Rp -
6	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
7	Hewan dan Tanaman untuk Dijual	Rp -	Rp -	Rp -
8	Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
9	Jalan irigasi dan Jaringan Untuk diserahkan	Rp -	Rp -	Rp -
10	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
11	Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
12	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
13	Bahan Baku	Rp -	Rp -	Rp -
14	Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	Rp -	Rp -	Rp -
15	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
16	Persediaan Dalam Proses	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 192,892,455	Rp (5,492,850)	Rp 187,399,605

Pembelian Persediaan

Pembelian Barang Persediaan dilingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin per 31 Desember 2020 senilai Rp2.864.728.680,00 dengan rincian sebagai berikut yaitu :

No	SATKER	NILAI
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	829.079.600
1	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	42.521.600
2	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	193.375.000
3	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	160.160.000
4	DINAS SOSIAL ACEH	212.890.000
5	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	44.415.000
6	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	48.600.000
7	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	20.880.000
8	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	191.770.000
9	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	138.150.000
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	45.126.000
11	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	89.514.480
12	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	694.707.000
13	DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	111.540.000
14	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	42.000.000
TOTAL		2.864.728.680

Pemakaian Persediaan

Terdapat transaksi persediaan barang konsumsi dalam rangka pencegahan Covid-19 untuk pembelian Handsanitizer, Masker yang habis pakai dengan rincian sebagai berikut :

No	SATKER	NILAI
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	829.031,018
2	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I	5,492,850
3	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	42,521,600
4	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	193,375,000
5	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	160,160,000
6	DINAS SOSIAL ACEH	212,890,000
7	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	44,415,000
8	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	48,600,000
9	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	20,880,000
10	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	191,770,000
11	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	138,150,000
12	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	45,126,000
13	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	89,514,480
14	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	694,707,000
15	DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	111,540,000
16	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	42,000,000
TOTAL		2,870,172,948

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak/using adalah sebesar Rp.0,00.

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Saldo Persediaan pada laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 16.301.201.469 (Enam Belas Milyar Tiga ratus Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Tahun 2020 sebesar Rp. 6.875.940.690 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 8.056.023.001,-(Delapan Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Satu Rupiah),

Rincian Persediaan

No.	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2019	Mutasi	Saldo Akhir 31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Barang Konsumsi	Rp 1.182.076.993	Rp (469.608.828)	Rp 712.468.165
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp 6.991.000	Rp (2.286.500)	Rp 4.704.500
3	Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
4	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 14.571.860.780	Rp (8.755.851.590)	Rp 5.816.009.190
5	Barang Persediaan Lainnya Lainnya untuk dijual / diserahkan ke Masyarakat	Rp 404.438.475	Rp (181.638.225)	Rp 222.800.250
6	Bahan Baku	Rp -	Rp -	Rp -
7	Persediaan Dalam Rangka strategis/berjaga-jaga	Rp -	Rp -	Rp -
8	Persediaan Untuk tujuan strategis berjaga-jaga	Rp -	Rp -	Rp 30.419.400
9	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 16.165.367.248	Rp (9.409.385.143)	Rp 6.786.401.505

Rincian Persediaan Pada Masing-Masing satker

No	SATKER	NILAI
1	Sekretariat Badiklitpensos	556.000
2	Puspensos	264.418.000
3	Puslitbang Kesos	191.223.965
4	Pusbangprof Peksos dan Pensos	46.500
5	Pusdiklat Kesos	5.998.145.190
6	Poltekesos Bandung	-
7	BBPPKS Bandung	66.247.200
8	BBPPKS Yogyakarta	2.288.000
9	B2P3KS Yogyakarta	241.901.650
10	BBPPKS Padang	975.000
11	BBPPKS Banjarmasin	-
12	BBPPKS Makassar	-
13	BBPPKS Jayapura	20.600.000
Jumlah		6.786.401.505

E.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per *31 Desember 2020 (Audited)* dibandingkan dengan periode sebelumnya, adalah sebagai berikut :

Posisi Aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)			31 Desember 2020 (Audited)			Kenaikan / (penurunan) %
		Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
1	Tanah	18.532.038.706.705	0	18.532.038.706.705	18.565.546.383.592		18.565.546.383.592	0,18
2	Peralatan dan Mesin	1.904.924.241.165	1.552.647.621.419	352.276.619.746	2.037.635.381.225	1.683.001.669.125	354.633.712.100	0,66
3	Gedung dan Bangunan	1.798.628.848.267	182.053.118.595	1.616.575.729.672	2.136.028.516.570	283.649.854.987	1.852.378.661.583	12,73
4	Jalan dan Jembatan	46.551.709.875	23.402.850.397	23.148.859.478	38.577.401.375	20.624.769.791	17.952.631.584	(28,94)
5	Irigasi	38.341.743.268	6.491.545.017	31.850.198.251	48.180.245.628	11.735.735.770	36.444.509.858	12,61
6	Jaringan	17.770.229.691	7.373.488.912	10.396.740.779	18.070.416.055	8.129.331.637	9.941.084.418	(4,58)
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	7.153.651.140		7.153.651.140	7.700.598.492		7.700.598.492	7,10
8	Aset Tetap Lainnya	14.836.358.922	3.466.709.781	11.369.649.141	15.117.486.622	3.565.799.913	11.551.686.709	1,58
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	281.836.313		281.836.313	2.194.436.815		2.194.436.815	87,16
10	Software	98.151.352.706	85.268.906.958	12.882.445.748	105.124.509.186	92.904.110.647	12.220.398.539	(5,42)
11	Lisensi	190.850.000	9.542.500	181.307.500	397.250.000	38.947.500	358.302.500	49,40
12	Aset Tak Berwujud Lainnya	196.625.000		196.625.000	3.897.010.050		3.897.010.050	94,95
13	Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintah	26.060.951.592	23.337.779.234	2.723.172.358	31.908.779.753	28.484.150.200	3.424.629.553	20,48
14	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintah	237.023.052	159.469.052	77.554.000	235.826.552	158.272.552	77.554.000	-
	JUMLAH	22.485.364.127.696	1.884.211.031.865	20.601.153.095.831	23.010.614.241.915	2.132.292.642.122	20.878.321.599.793	1,33

E.2.2.1 Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Nilai Perolehan tanah pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 18,532,038,706,705,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 18,565,546,383,592,-

Mutasi/perubahan Tanah Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 18.532.038.706.705
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	Rp 540.139.650
Hibah (Masuk)	Rp 2.031.337.611
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 22.221.723.910
Pengembangan Nilai Aset	Rp 223.470.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp 6.224.159.548
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp 2.814.080.000
Koreksi Transfer Keluar atas 224	
Mutasi Kurang :	
Transfer Keluar	Rp (540.139.650)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp (7.094.182)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 18.565.546.383.592

TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Tanah dengan transaksi **Transfer Masuk (102) 31 Desember 2020**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Masuk (102)** sebesar Rp. 540.139.650,- dikarenakan adanya serah terima aset kepada Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pangurugi Takalar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : 1194/4.1/PL.02/06/2020 untuk menunjang pelayanan rehabilitasi sosial penanggulangan NAPZA dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tanah Untuk Jalan Khusus Komplek	1	540,139,650
JUMLAH	1	540,139,650

HIBAH (MASUK)

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Hibah masuk Senilai Rp. 2.031.337.611,- pada satker :

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
(BBPPKS) Banjarmasin		0	2.031.337.611
Hibah masuk		3.501	2.031.337.611

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp 22.221.723.910,-

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung			22.221.723.910
Tanah Bangunan pendidikan dan latihan		26.711	22.221.723.910

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terjadi Mutasi Tambah berupa Aset Tanah dengan transaksi Pengembangan Nilai Aset terjadi di Direktorat K2KRS di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional Kalibata dipergunakan untuk Taman dan Makam sebesar *Rp.223.470.000,-* berupa :

Satker			
0270301994402130000KP			
K2KRS			223.470.000
		Kuantitas	Nilai
Tanah			
Pekerjaan Perencanaan Perluasan Area Blok Makam Tahap III	0	Rp	98.560.000
Pengawasan Pekerjaan Perluasan Area Blok makam Tahap III	0	Rp	74.910.000
Biaya Pengelolaan Pekerjaan Perluasan Area Blok Makam	0	Rp	50.000.000

PENGEMBANGAN MELALUI KDP

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terjadi Mutasi Tambah berupa Aset Tanah dengan transaksi Pengembangan Nilai Melalui KDP yang terjadi di Direktorat K2KRS di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional Kalibata dipergunakan untuk Taman dan Makam sebesar *Rp.6.224.159.548,-* berupa :

0270301994402130000KP			
K2KRS			7.277.644.000
		Kuantitas	Nilai
Tanah			
	Uang Muka Pekerjaan Perluasan Area Blok Makam Tahap III	0	Rp 1.326.000.000
	Termin I Pekerjaan Perluasan Area Blok Makam Tahap III	0	Rp 2.652.000.000
	Termin II Pekerjaan Perluasan Area Blok Makam Tahap III	0	Rp 3.299.644.000

Terdapat Mutasi pengurangan atas pengembangan melalui KDP senilai Rp1.053.484.452 berupa temuan atas kesalahan penganggaran belanja modal kesalahan penganggaran belanja modal kegiatan perluasan makam tahap III pada satker Direktorat K2KRS sebesar Rp1.053.484.452. Pada tahun 2020 Direktorat K2KRS menganggarkan Belanja Modal yaitu berupa dalam pekerjaan perluasan makam tahap III sebesar Rp7.501.114.000 yang terdiri dari biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan sebesar Rp223.470.000 dan biaya pelaksanaannya sebesar Rp7.277.64.00.000. Diantaranya ada di belanja modal yang substansinya adalah Gedung dan bangunan sebesar Rp1.053.484.452.

Nilai Kapitalisasi Kegiatan Perluasan Area TMPN Utama Kalibata

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kapitaliasi
1.	Perluasan Area Makam TMPN Utama Kalibata Tahap III (2020)	Rp7.501.114.000

Belanja Modal Tanah yang Substansinya Gedung dan Bangunan

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kapitalisasi
A. Pekerjaan Pondasi		
1.	Pondasi Pagar Ornamen	Rp175.920.439
2.	Pondasi Pagar Gerbang	Rp5.175.000
3.	Tugu Monumen	Rp46.127.407
	Pondasi Pos Jaga Uk. (0,6+0,35) x 0,8 m	Rp12.227.140
B. Pekerjaan Pasangan		
4.	Pasangan Pos Jaga Baru	Rp107.326.168
5.	Pasangan Gerbang	Rp74.418.268
6.	Pasangan Pagar Ornamen	Rp416.899.325
C. Pekerjaan Renovasi Kantor TMPN		
7.	Area Mushola	Rp100.281.148
8.	Toilet Baru Mushola	Rp61.478.095
9.	Area Klinik dan Toilet	Rp53.631.462
	Total	Rp1.053.484.452

KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Tanah dengan transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) sebesar Rp.260.364.000,- dikarenakan adanya penilaian kemali atas revaluasi BMN pada Satker BRSKPNAPZA “Satria” Baturaden berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor: 038/REV/WKN.09/KNL.08/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tanah	1	260,364,000
JUMLAH	1	260,364,000

- Adanya transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) sebesar Rp. 7.699.000,- dikarenakan adanya penilaian kembali atas revaluasi BMN pada Satker BRSAMPK “Toddopuli” Makasar berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor: 038/REV/WKN.09/KNL.08/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tanah	1	7,699,000
JUMLAH	1	7,699,000

- Adanya transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) sebesar Rp. 87.151.000,- dikarenakan adanya penilaian kemali atas revaluasi BMN pada Satker BRSLU “Gau Mabaji” Makasar berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor : BARIP-006 /WKN.15/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tanah	1	87,151,000
JUMLAH	1	87,151,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp. 2.458.866.000,-

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
(BBPPKS) Yogyakarta		0	2.458.866.000
	Koreksi Kesalahan input IP	0	2.458.866.000

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Terdapat koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.(7.094.000),- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung			-7.094.000
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-73	-7.094.000

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin

Terdapat koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp. (182)- dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
(BBPPKS) Banjarmasin		0	-182
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	-182

TRANSFER KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Tanah dengan transaksi Transfer Keluar (302) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Transfer Keluar (302) sebesar (Rp. 540.139.650,-) dikarenakan adanya serah terima aset kepada Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pangurangi Takalar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : 1194/4.1/PL.02/06/2020 untuk menunjang pelayanan rehabilitasi sosial penanggulangan NAPZA dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tanah Untuk Jalan Khusus Komplek	-1	-540,139,650
JUMLAH	-1	-540,139,650

E.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 1,904,924,241,165,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 2,037,635,381,225,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 1,683,001,669,125,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 354,633,712,100,-.

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 1.904.924.241.165
Mutasi Tambah :	
Koreksi Saldo Awal	Rp 2.557.136.831
Pembelian	Rp 141.356.942.699
Transfer Masuk	Rp 28.838.038.522
Hibah Masuk	Rp 12.130.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 6.576.771.732
Reklasifikasi Masuk	Rp 6.324.648.715
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 378.365.000
Pengembangan Nilai Aset	Rp 401.544.452
Transaksi Normalisasi BMN	Rp 1.222.751
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp (1.269.500)
Penghapusan	Rp (1.991.027.962)
Transfer Keluar	Rp (28.838.038.522)
Reklasifikasi Keluar	Rp (6.168.583.215)
Hibah Keluar (semester II dokumen semester I)	Rp (5.500.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (16.731.241.443)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 2.037.635.381.225
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp (1.683.001.669.125)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 354.633.712.100

KOREKSI SALDO AWAL**(11) BADIKLIT KESOS PENSOS**

Terdapat Koreksi Saldo Awal atas peralatan dan mesin pada BBPPKS

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

Banjarmasin senilai Rp. 2.557.136.831- yaitu pada satker :

- BBPPKS Banjarmasin

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
BBPPKS Banjarmasin				
1	Dipan Ukur		8	79.358.800
2	Video Presenter		1	525.000.000
3	Layar Proyektor		2	7.000.000
4	Matras		12	90.000.000
5	Massage Chair		3	201.000.000
6	Alat Kantor & Rumah Tangga		249	1.654.778.031
TOTAL				2.557.136.831

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat pembelian pada Satker Setjen dan Satker Pusdatin Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pembelian	Satker Setjen	1231	Rp 16,633,857,501	
		Satker Pusdatin	208	Rp 50,118,069,053	
TOTAL			1439	Rp 66,751,926,554	

a. Transaksi Pembelian pada Satker Setjen yaitu :

KODE	URAIAN	Qty	NILAI
1	2	4	5
3.01.03.05.005	Sumersible Pump	7	342.141.100
3.01.03.05.010	Pompa Air	3	397.911.100
3.02.02.01.010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	1	4.550.000
3.03.02.04.001	Dongkrak Mekanik	2	23.331.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	118	1.900.648.870
3.05.01.04.003	Rak Besi	27	191.180.000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	5	64.988.000
3.05.01.04.013	Buffet	1	20.680.000
3.05.01.04.020	Lemari Display	1	60.500.000
3.05.01.04.025	Lemari Katalog	1	153.450.000
3.05.01.05.005	Rambu-Rambu	12	25.280.200
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	5	186.274.000
3.05.01.05.024	Alat Pemetong Kertas	1	4.650.000
3.05.01.05.038	Laser Pointer	1	1.705.000

3.05.01.05.047	Lampu-lampu Kristal	3	126.335.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	4	57.690.000
3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	11	199.650.000
3.05.01.05.999	Perkakas Kantor Lainnya	27	63.965.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	187	1.273.037.415
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	261	909.077.125
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	7	88.880.000
3.05.02.01.005	Sice	74	1.596.394.500
3.05.02.01.008	Meja Rapat	2	103.180.000
3.05.02.01.011	Tempat Tidur Kayu	5	55.220.000
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	9	206.439.000
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	6	108.755.625
3.05.02.01.021	Pot Bunga	1	1.650.000
3.05.02.01.022	Partisi	5	109.560.000
3.05.02.01.024	Rak Sepatu (Almunium)	1	11.880.000
3.05.02.01.026	Nakas	4	7.700.000
3.05.02.01.029	Backdrop TV/Wardrobe	10	204.941.000
3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya	11	147.688.536
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	2	31.295.000
3.05.02.04.002	A.C. Sentral	57	2.645.873.116
3.05.02.04.004	A.C. Split	40	462.033.134
3.05.02.04.006	Kipas Angin	9	31.000.000
3.05.02.04.007	Exhause Fan	52	97.104.600
3.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	4.620.000
3.05.02.05.004	Teko Listrik	1	2.350.000
3.05.02.05.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	2.530.000
3.05.02.05.006	Oven Listrik	2	6.800.000
3.05.02.05.008	Kitchen Set	6	164.502.910
3.05.02.05.015	Rak Piring Alumunium	1	2.750.000
3.05.02.06.002	Televisi	33	638.234.500
3.05.02.06.006	Equalizer	1	4.730.000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	2	31.460.000
3.05.02.06.008	Sound System	1	33.000.000
3.05.02.06.009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	1	12.320.000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	5	13.970.000
3.05.02.06.036	Dispenser	2	15.980.000
3.05.02.06.056	Karpet	3	83.060.000
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	12	695.670.700
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	12	206.119.720
3.05.02.06.072	Lampu	1	16.170.000

3.05.02.06.078	Bingkai Foto	2	7.700.000
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	4	14.000.000
3.05.02.06.083	Lampu Tegak/Standing Lamp	6	16.940.000
3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9	121.950.000
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya	26	49.615.000
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	1	3.025.000
3.06.01.01.999	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	12.760.000
3.06.01.02.047	Chiller	1	196.460.000
3.06.01.02.086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	8	106.906.250
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	12.650.000
3.06.01.02.132	Video Conference	1	60.060.000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	1.925.000
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	13	101.480.000
3.06.03.03.001	Unit Pemancar VHF/FM Portable	1	18.200.000
3.07.02.99.999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3	520.000.000
3.08.01.14.024	Rotator	1	9.650.000
3.08.01.46.025	Rod Blower	2	109.057.000
3.08.02.03.117	Panel Uto Power	3	104.184.600
3.08.03.06.039	Infrared Thermometer	20	53.000.000
3.09.04.07.022	Layar Proyektor	1	4.200.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	14	338.287.500
3.10.01.02.002	Lap Top	14	377.715.000
3.10.01.02.003	Note Book	1	33.500.000
3.10.01.02.009	Tablet PC	14	380.400.000
3.10.02.02.010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	13.500.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	62.506.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	17.250.000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1	3.520.000
3.15.02.03.004	Helmet	6	32.510.000
TOTAL			16.633.857.501

Transaksi pada Satker Pusdatin terdiri dari :

KODE	URAIAN	Qty	NILAI
1	2	4	5

3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	1	1.850.000
3.05.01.05.035	Disk Prime	1	1.100.000
3.05.01.05.053	Acces Control System	3	12.590.000
3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	1	6.525.000
3.05.02.01.022	Partisi	1	15.800.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	1	6.350.000
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	1	1.130.000
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	1	7.650.000
3.05.02.06.084	Lampu Dinding	1	24.500.000
3.06.01.01.076	Digital Audio Taperecorder	1	2.860.000
3.06.01.02.165	Camera Conference	4	8.451.000
3.10.01.02.002	Lap Top	23	1.100.872.322
3.10.01.02.003	Note Book	2	38.236.000
3.10.02.01.004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	3	5.143.912.263
3.10.02.01.012	Hard Disk	1	2.442.000
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	10.863.300
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.617.800
3.10.02.04.001	Server	7	19.871.390.000
3.10.02.04.002	Router	2	2.610.466.474
3.10.02.04.015	Firewall	4	13.554.375.582
3.10.02.04.021	Kabel UTP	20	44.797.080
3.10.02.04.024	Switch	18	4.445.383.800
3.10.02.04.026	Acces Point	71	1.309.906.432
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	38	676.500.000
3.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	1	1.215.500.000
TOTAL			50.118.069.053

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat transaksi Pembelian atas Peralatan dan Mesin pada Ditjen Pemberdayaan Sosial senilai *Rp.4.644.882.000,-* terdiri dari:

Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial

Terdapat Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial sebesar *Rp.170.130.000,-* dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantita	Nilai
027.03.01996.30859000KP			
	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	29	170.130.000
	Kursi Besi/Metal	12	42.630.000
	Meja Rapat	1	8.950.000
	A.C Split	2	24.695.000
	Camera Digital	1	51.800.000
	Printer	4	16.805.000
	Scanner	1	25.250.000

Direktorat Kepahlawanan,Keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Terdapat Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin pada Dit K2KRS sebesar *Rp.393.250.000,-*

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
	Direktorat Kepahlawanan,Keperintisan,Kesetiakwanan dan Restorasi Sosial	12	393.250.000
	Pompa Air	5	68.020.000
	Kendaraan Barang Roda 3	2	66.000.000
	Maubelair	1	78.700.000
	Alat Pendingin Ruangan	1	35.000.000
	Televisi	2	20.680.000
	Alat Kedokteran Poliklinik	1	124.850.000

Terdapat Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin (Penanganan Covid-19 TA 2020) pada Dit PSDBS sebesar *Rp.4.081.502.000,-*. Dengan rincian

sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Infrared thermometer	10	28.000.000
2	Virus removal chamber box	1	315.000.000
3	Sterilization chamber box	2	110.000.000
4	Sterilization chamber box	2	290.000.000
5	Thermometer Infrared merek Contec TP500	5	9.500.000
6	Sterilisasi desinfektan	1	3.200.000
7	Sekat Meja Lobi	1	20.250.000
8	Sekat Meja Lobi Poliklinik	1	20.250.000
9	Sekat Meja Apotik	1	20.250.000
10	Wastafel	6	18.900.000
11	Backdrop media center Covid-9	1	32.500.000
12	Public ozonizer chamber system	2	396.000.000
13	Mini ozonizer cahmber system	3	405.000.000
14	Thermographic package pro	4	1.048.000.000
15	Dermalog thermometer	1	172.000.000
16	Touchless sensor handsanitizer dispenser	50	272.500.000
17	Automatic handsdryer	2	12.000.000
18	Mesin cuci tangan automatic	2	34.500.000
19	Rangka vertikal announcement	12	310.800.000
20	Rangka horizontal announcement	1	12.000.000
21	Main gate ACP	1	189.000.000
22	Main gate ACP	1	245.000.000
23	Box UV Sterilisasi	2	6.250.000
24	Alat penghirup uap	1	23.740.000

25	Gunting perban aesculap	2	2.775.000
26	Sterilisator kering	1	1.650.000
27	Otoscope	1	1.200.000
28	Cryer root elevator type 42387-4238	2	2.200.000
29	Mathieu needle holder	1	1.500.000
30	Timbangan, bantal, selimut Poliklinik	1	12.500.000
31	Ranjang Poliklinik	4	65.037.000
	TOTAL	125	4.081.502.000

04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Pembelian (101) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja LRSODHIV "Kahuripan" Sukabumi senilai Rp. 72.500.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	72,500,000
JUMLAH	3	72,500,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSDM "Margo Laras" Pati senilai Rp. 39.943.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	39,943,000
JUMLAH	1	39,943,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSODHIV "Bahagia" Medan senilai Rp. 88.296.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	88,296,000
JUMLAH	1	88,296,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSODHIV "Wasana Bahagia" Ternate senilai Rp. 100.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	100.000.000
JUMLAH	1	100.000.000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Bambu Apus" senilai Rp. 489.637.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	89,660,000
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	5,500,000
Alat Laboratorium	1	2,134,000
Alat Keselamatan Kerja	3	7,920,000
Alat Persenjataan	1	15,884,000
Komputer	2	41,690,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	73	326,849,000
JUMLAH	83	489,637,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BLBI "Abiyoso" Cimahi senilai Rp. 761.227.394,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Pertanian	2	8,860,000
Alat Eksplorasi	1	5,500,000
Alat Peraga	1	30,000,000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	11	567,652,494
Alat Kantor & Rumah Tangga	18	78,461,000
Komputer	15	70,753,900
JUMLAH	48	761,227,394

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDM "Phalamarta" Sukabumi senilai Rp. 38.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	38,600,000
JUMLAH	1	38,600,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Wyata Guna" Bandung senilai Rp. 1.668.564.659,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kedokteran & Kesehatan	85	145,690,412
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	6	22,690,000
Alat Laboratorium	2	3,850,000
Peralatan Olahraga	9	86,200,000
Alat Peraga	1	88,473,000
Alat Persenjataan	1	2,600,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	210	921,366,747
Komputer	42	396,032,000
Alat Bengkel & Alat Ukur	1	1,662,500
JUMLAH	357	1,668,564,659

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso Surakarta senilai Rp. 3.252.997.250,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kedokteran & Kesehatan	5	1,501,691,950
Alat Angkutan	1	529,000,000
Alat Studio Kumunikasi & Pemancar	15	170,680,000
Komputer	6	43,532,500
Alat Laboratorium	6	457,757,000
Alat Bengkel & Alat Ukur	12	87,505,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	37	424,000,800
Peralatan Olah Raga	3	30,250,000
Peralatan Proses / Produksi	1	8,580,000
JUMLAH	86	3,252,997,250

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BBRSBG “Kartini” Temanggung senilai Rp. 1.171.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Bengkel & Alat Ukur	9	68,695,000
Alat Peraga	1	49,720,000
Alat Kedokteran & Kesehatan	5	23,675,000
Alat Laboratorium	5	69,672,450
Alat Kantor & Rumah Tangga	113	508,779,670
Peralatan Olah Raga	1	23,100,000
Komputer	18	107,071,250
Alat Persenjataan	3	34,132,230
Alat Studio & Komunikasi Pemancar	1	23,654,400
Alat Angkutan	1	263,000,000
JUMLAH	157	1,171,500,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar senilai Rp. 867.938.900,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Pengeboran	1	6.325.000
Komputer	25	180.590.100
Alat Laboratorium	17	63.014.600
Alat Keselamatan Kerja	1	4.110.700
Peralatn Proses / Produksi	3	21.575.400
Alat Peraga	1	29.865.000
Alat Eksplorasi	4	13.816.600
Alat Persenjataan	2	30.947.300
Alat Kedokteran dan Kesehatan	42	71.942.000
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	6	38.062.900
Alat Kantor dan Rumah Tangga	56	344.004.400
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15	63.684.900
JUMLAH	173	867.938.900

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Mahatmiya" di Tabanan senilai Rp. 253.058.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor dan Rumah Tangga	21	160,986,926
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	2	11,500,000
Alat Kedokteran dan Kesehatan	6	21,148,574
Alat Pertanian	3	10,378,500
Komputer	1	4,675,000
Alat Laboratorium	2	42,059,000
Peralatan Olah Raga	2	2,310,000
JUMLAH	37	253,058,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSEGP "Pangudi Luhur" Bekasi senilai Rp. 352.449.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	1	5,000,000
Alat Laboratorium	2	5,100,000
Alat Peraga	1	49,000,000
Alat Bengkel & Alat Ukur	2	15,700,000
Komputer	8	56,072,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	40	221,577,000
Total	54	352,449,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Rumbai" Pekanbaru senilai Rp. 50.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	2	50,000,000
Total	2	50,000,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSLU “Gau Mabaji” Makasar senilai Rp. 424.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Peralatan Olahraga	1	2,665,800
Alat Persenjataan	4	7,652,188
Alat Peraga	1	76,600,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	42	194,834,200
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	10	84,271,984
Komputer	3	58,575,828
Total	61	424,600,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Handayani” Jakarta senilai Rp. 510.888.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Laptop	4	41,468,000
Alat Laboratorium	1	2,600,000
Alat Kedokteran & Kesehatan	41	45,100,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	50	323,840,000
Alat Peraga	1	89,520,000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	2	8,360,000
JUMLAH	99	510,888,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSLU “Budi Dharma” Bekasi senilai Rp. 513.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	51	334,773,000
Komputer	8	100,700,000
Alat Kedokteran & Kesehatan	13	28,327,000
Alat Peraga	1	49,800,000
JUMLAH	73	513,600,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDSN “Tumotou” Manado senilai Rp. 654.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	126	541.400.000
Komputer	6	31.200.000
Alat Peraga	1	10.500.000
Alat Kedokteran & Kesehatan	6	18.200.000
Peralatan Olahraga	3	24.300.000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	3	29.000.000
JUMLAH	145	654.600.000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSKPN "Insyaf" Medan senilai Rp. 9.435.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Peralatan Olahraga	3	9.435.000
JUMLAH	3	9.435.000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Antasena" Magelang senilai Rp. 41.462.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	2	41,462,000
JUMLAH	2	41,462,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Alyatama" Jambi senilai Rp. 584.250.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	84.850.000
Alat Kantor & Rumah Tangga	16	194.850.000
Peralatan Olahraga	4	9.050.000
Alat Persenjataan	7	97.390.000
Alat Laboratorium	1	1.950.000
Komputer	9	126.510.000
Alat Studio & Komunikasi & Pemancar	14	69.650.000
JUMLAH	52	584.250.000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Naibonat senilai Rp. 592.498.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Laboratorium	2	11,000,000
Alat Kedokteran & Kesehatan	8	56,100,000
Peralatan Olahraga	9	94,050,000
Komputer	11	95,920,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	99	335,428,000
JUMLAH	129	592,498,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi senilai Rp. 609.721.100,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	59	414,895,000
Alat Laboratorium	4	31,500,000
Komputer	13	105,616,100
Alat Peraga	1	57,710,000
JUMLAH	77	609,721,100

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja Direktorat RSPD senilai Rp. 103.433.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
LCD Projector	1	6,770,000
Note Book	5	80,000,000
Tablet PC	1	12,199,900
Printer	1	4,464,000
JUMLAH	8	103,433,900

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Galih Pakuan" Bogor senilai Rp. 168.300.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	168,300,000
JUMLAH	1	168,300,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram senilai Rp. 81.350.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	80,000,000
Alat Kedokteran & Kesehatan	1	1,350,000
JUMLAH	2	81,350,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDM “Budi Luhur” Banjar Baru senilai Rp. 352.595.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	47	265,377,100
Komputer	3	37,497,900
Alat Peraga	1	49,720,000
JUMLAH	51	352,595,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDI “Ciung Wanara” Bogor senilai Rp. 140.030.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Peralatan Proses Produksi	5	21,450,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	17	73,150,000
Alat Peraga	1	39,930,000
Alat Laboratorium	1	5,500,000
JUMLAH	24	140,030,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDI “Nipotowe” Palu senilai Rp. 47.400.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Laboratorium	2	6,400,000
Alat Peraga	1	41,000,000
JUMLAH	3	47,400,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDM “Dharma Guna” Bengkulu senilai Rp. 387.062.174,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	5	40,932,174
Alat Kantor & Rumah Tangga	65	257,000,000
Alat Peraga	1	89,130,000
JUMLAH	71	387,062,174

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDSRW “Efata” Kupang senilai Rp. 54.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	54,000,000
JUMLAH	1	54,000,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BBRVBD "Cibinong" senilai Rp. 1.650.397.850,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	387	1.166.045.350
Peralatan Produksi	2	3.300.000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	4	27.390.000
Alat Laboratorium	4	19.717.500
Komputer	38	371.723.000
Alat Bengkel & Alat Ukur	113	50.452.000
Alat Kedokteran & Kesehatan	4	11.770.000
JUMLAH	552	1.650.397.850

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Toddopuli" Makasar senilai Rp. 274.870.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	1	16,000,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	92	258,870,000
JUMLAH	93	274,870,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehsos senilai Rp. 21.065.827.174,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	11	3,419,000,000
Alat Kedokteran & Kesehatan	50	96,200,000
Alat Pengeboran	2	37,000,000
Alat Pertanian	7	20,950,000
Komputer	426	5,236,109,274
Alat Laboratorium	6	18,987,000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	10	1,140,158,400
Alat Bengkel & Alat Ukur	7	10,759,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	3,157	11,086,663,500
JUMLAH	3,676	21,065,827,174

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja LRSAMPK "Darusaadah" Aceh senilai Rp. 50.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	50,000,000
JUMLAH	1	50,000,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja LRSPDSRW "Meohai" Kendari senilai Rp. 49.940.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	49,940,000
JUMLAH	1	49,940,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja LRSLU "Minaula" Kendari senilai Rp. 165.621.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	5	29,150,000
Alat Laboratorium	3	7,458,000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	1	10,747,000
Alat Peraga	1	77,500,000
Komputer	4	40,766,000
JUMLAH	14	165,621,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BRSPDF "Budi Perkasa" Palembang senilai Rp. 79.200.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	79,200,000
JUMLAH	1	79,200,000

- Terdapat transaksi Pembelian (101) atas pengakuan utang pada pihak ketiga atas pengadaan sarana dan prasarana gedung graha atensi yang telah dilakukan verifikasi atas utang oleh Tim Internal Kontrol pada Satuan Kerja BRSEWTS "Mulya Jaya" Jakarta senilai Rp. 379.443.075,-, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Studi Komunikasi & Pemancare	7	16.160.375
Alat Kantor & Rumah Tangga	66	363.282.700
JUMLAH	73	379.443.075

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Terdapat transaksi Pembelian atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp.14.877.839.880,- terdapat pada :

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial		3,677,557,880
	Sedan	1	832,300,000
	Lemari Kayu	8	68,970,000
	Brandkas	1	10,900,000
	Box Camera	1	6,000,000
	Papan Nama/Papan Visual	1	25,000,000
	Alat Penghancur Kertas	3	9,480,000
	LCD Projector/Infocus	1	6,350,000
	Pintu Elektrik (yg memakai Akses)	2	15,400,000
	Meja Kerja Kayu	9	110,463,280
	Kursi Besi/Metal	3	15,246,340
	Sice	3	75,828,000
	Meja Rapat	1	16,500,000
	Meja Resepsionis	1	6,682,500
	Meja Makan Kayu	1	6,600,000
	Partisi	1	19,250,000
	Meubelair Lainnya	1	5,488,780
	A.C Sentral	2	106,520,000
	Kitchen Set	1	31,350,000
	Televisi	1	64,440,000
	Sound System	1	21,778,000
	Microphone	6	17,031,000
	Dispenser	1	4,270,000
	Gordyin/Krey	1	12,226,500
	Lampu Tegak/Standing Lamp	1	8,126,000
	Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	2	7,677,500
	Audio Mixing Active	2	16,395,600
	Audio Monitor Active	2	31,574,400
	Microphone/Wireless MIC	1	3,709,000
	Analog/Digital Receiver	2	20,823,000
	Vidio Mixer	2	89,186,000
	Lensa Kamera	3	50,380,000
	Camera Adaptor	1	1,952,000
	Camera Digital	4	98,710,000
	Vidio Coference	2	444,054,480
	Handy Talky (HT)	2	5,124,000
	P.C Unit	4	82,338,000
	Lap Top	49	1,023,624,000
	Tablet PC	6	118,338,000
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	24,800,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	75,559,000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	71,340,000
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	7,232,500
	External Portabel Hardisk	1	8,540,000

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	26	7,571,400,000
	Truck + Attachment	8	4,574,400,000
	Ran Jeep Kommab	3	1,950,000,000
	Perahu Motor Tempel	15	1,047,000,000

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310.000			
	Direktorat Jaminan Sosial	174	3,628,882,000
	Lemari Penyimpanan	1	27,720,000
	Mesin Penghitung Uang	2	79,360,000
	Meja Kerja Kayu	1	8,800,000
	Kursi Kayu	16	28,765,000
	Meja makan Kayu	2	12,650,000
	Meubelair Lainnya	3	10,725,000
	AC. Split	6	56,204,000
	Exhause Fan	1	1,210,000
	Gordyin/Kray	2	88,770,000
	Camera Confrence	3	76,878,000
	Kamera Udara	1	8,360,000
	Kamera Digital	2	54,890,000
	Thermometer Digital Portable	4	5,000,000
	PC. Unit	9	173,980,000
	Lap Top	8	210,751,000
	Tablet PC	16	203,395,000
	Storage Modul Disk (Pralaan Mainframe)	1	1,375,000,000
	Hard Disk	10	248,000,000
	Peralatan Mainframe Lainnya	76	874,000,000
	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	3	8,184,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	48,240,000
	Switch	1	28,000,000

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi Pembelian atas Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp745.526.499,00** dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN PEMBELIAN		QTY	Intrakomp
Alat Penghancur Kertas	Buah	5	113.316.500
LCD Projector/Infocus	Buah	1	11.486.074
Partisi	Buah	1	53.638.000
Backdrop TV/Wardrobe	set	1	21.829.000
Meubelair Lainnya		4	49.434.000
A.C. Split	Buah	2	17.770.500
Portable Air Conditioner (Alat	Buah	1	12.751.750
Kipas Angin	Buah	2	5.170.000
Lampu	Buah	1	15.730.000
Bracket Standing Peralatan	Buah	1	1.595.000
Kamera Digital	Buah	2	37.817.175
Lemari Camera	Buah	1	3.850.000
Lap Top	Buah	13	387.306.000
Serial Printer	Buah	5	13.832.500
Speaker Komputer	Buah	2	0
			745.526.499

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat transaksi Pembelian atas peralatan dan mesin pada BP3S Senilai Rp. 16.139.533.190,- pada satker:

- Sekretariat BP3S senilai Rp 3.027.570.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKE R/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Mesin Ketik Listrik	Buah	2	4.600.000
2	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3.300.000
3	Lemari Kayu	Buah	10	48.100.000
4	Rak Besi	Buah	2	4.700.000
5	Locker	Buah	4	27.600.000
6	Alat Penghancur Kertas	Buah	10	84.600.000
7	Alat Kantor Lainnya		16	196.000.000
8	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	6	43.500.000
9	Meja Kerja Kayu	Buah	89	419.060.000
10	Kursi Besi/Metal	Buah	129	286.650.000
11	Sice	Buah	7	53.800.000
12	Meja Rapat	Buah	3	22.300.000
13	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	4.100.000
14	Loudspeaker	Buah	2	60.000.000
15	Microphone	Buah	3	10.804.300
16	Camera Video	Buah	1	28.680.000
17	Kabel	Buah	7	12.440.000
18	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		8	17.550.000
19	Alat Rumah Tangga Lainnya		40	351.600.000
20	Audio Mixing Console	Buah	4	32.950.000
21	Audio Amplifier	Buah	1	17.550.000
22	Microphone/Wireless MIC	Buah	7	75.440.000
23	Microphone/Boom Stand	Buah	4	4.140.000
24	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	2.500.000
25	Voice Recorder	Buah	4	5.259.800
26	Peralatan Studio Audio Lainnya		4	40.200.000
27	Tripod Camera	Buah	5	26.698.200
28	Lensa Kamera	Buah	5	81.994.900
29	Head Set	Buah	4	21.840.000
30	Lighting Head Body	Buah	3	10.500.000
31	Camera Digital	Buah	4	165.940.850
32	Clipp On	Buah	9	53.829.800
33	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya		10	97.174.700
34	Audio Monitor	Buah	1	3.700.000
35	P.C Unit	Buah	7	161.117.650
36	Lap Top	Buah	6	170.510.200
37	Note Book	Buah	11	269.462.200
38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	17	73.900.000
39	External/ Portable Hardisk	Buah	14	28.077.400
40	Wireless Access Point	Buah	3	5.400.000
TOTAL				3.027.570.000

- Pusdiklat Kesos senilai Rp 970.640.810,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
PUSDIKLAT KESOS				
1	Lemari Besi/Metal	13,	Buah	42.949.500
2	Lemari Kayu	1,	Buah	16.678.200
3	LCD Projector/Infocus	3,	Buah	20.625.000
4	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3,	Buah	12.804.000
5	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2,	Buah	4.898.900
6	Kitchen Set	2,	Buah	15.048.000
7	Treng Air/Tandon Air	4,	Buah	96.750.610
8	Televisi	1,	Buah	5.720.000
9	Amplifier	3,	Buah	43.230.000
10	Loudspeaker	3,	Buah	18.150.000
11	Microphone	2,	Buah	7.370.000
12	Handy Cam	1,	Buah	16.400.000
13	Microphone/Wireless MIC	3,	Buah	7.920.000
14	Slide Projector	2,	Buah	48.950.000
15	Vertical Motorized Film Rewinder	1,	Buah	5.588.000
16	Kamera Digital	2,	Buah	27.800.000
17	Internet	1,	Buah	71.638.600
18	P.C Unit	8,	Buah	169.590.000
19	Lap Top	16,	Buah	253.300.000
20	Rak Server	2,	Buah	33.750.000
21	Jet Pump	4,	Buah	51.480.000
TOTAL		77		970.640.810

- Puslitbang Kesos Senilai Rp. 596.308.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
PUSLITBANG KESOS				
1	LCD Projector/Infocus	Buah	2	34.738.000
2	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	20	43.540.000
3	Megaphone	Buah	1	1.990.000
4	Infrared Thermometer	Buah	1	1.750.000
5	Lap Top	Buah	31	457.250.000
6	Copy Board	buah	2	40.000.000
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	17.040.000
TOTAL			69	596.308.000

- Pusat Pengembangan Jabatan Profesi Peksos Dan Pensos senilai Rp. 539.835.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKE	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
PUSBANGPROF			
1	Lemari Besi/Metal	2,	74.928.000,
2	Lemari Kayu	5,	58.272.000,
3	Locker	4,	15.792.000,
4	Copy Board/Elektric White Board	1,	42.900.000,
5	Alat Penghancur Kertas	3,	23.760.000,
6	Meja Kerja Kayu	17,	123.284.000,
7	Kursi Besi/Metal	34,	59.024.000,
8	Kitchen Set	1,	14.000.000,
9	Telephone Mobile	1,	7.975.000,
10	Note Book	5,	93.500.000,
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4,	26.400.000,
JUMLAH		77	539.835.000

- BBPPKS Yogyakarta senilai Rp. 299.980.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Yogyakarta			
1	Cermin Besar	6	8.349.000,
2	Lemari Kayu	9,	39.602.000,
3	Papan Visual/Papan Nama	3,	12.000.000,
4	LCD Projector/Infocus	2,	16.000.000,
5	Meja Kerja Kayu	6,	22.908.600,
6	Kasur/Spring Bed	12,	114.140.400,
7	A.C. Split	3,	21.000.000,
8	Televisi	6,	16.680.000,
9	Digital LED Running Text	5,	29.700.000,
10	Lap Top	2,	19.600.000,
	Jumlah	54,	299.980.000,

- Politeknik Kesejahteraan Sosial Senilai Rp. 1.435.009.930,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
Poltekesos Bandung				
1	Pompa Air	Unit	1,	27.423.000,
2	Kursi Roda	Unit	2,	3.366.000,
3	Lemari Besi/Metal	-	9,	30.041.000,
4	Lemari Kayu	Unit	3,	9.240.000,
5	Locker	Unit	5,	10.890.000,
6	CCTV - Camera Control Television System	Unit	2,	39.974.000,
7	LCD Projector/Infocus	Unit	9,	55.140.000,
8	Meja Kerja Kayu	Unit	17,	68.068.000,
9	Kursi Besi/Metal	Unit	170,	194.480.000,
10	Kursi Kayu	Unit	1,	9.075.000,
11	Kasur/Spring Bed	Unit	3,	15.939.000,
12	Meja Makan Kayu	-	1,	5.324.000,
13	Meubelair Lainnya	Unit	2,	3.080.000,
14	Mesin Cuci	Buah	1,	2.365.000,
15	Alat Pembersih Lainnya	-	16,	76.296.000,
16	Lemari Es	-	1,	4.169.000,
17	A.C. Split	Buah	6,	43.220.000,
18	Kipas Angin	Buah	2,	12.067.000,
19	Alat Dapur Lainnya	Buah	1,	2.838.000,
20	Microphone	-	1,	4.807.000,
21	Dispenser	Buah	1,	1.837.000,
22	Lambang Instansi	Buah	2,	6.996.000,
23	Lampu	Buah	1,	3.102.000,
24	Microphone/Wireless MIC	Buah	1,	3.872.000,
25	Peralatan Studio Audio Lainnya	Buah	1,	6.050.000,
26	Camera Electronic	Buah	11,	21.659.000,
27	Tripod Camera	Buah	1,	2.112.000,
28	Lighting Stand Tripod	Buah	1,	6.985.000,
29	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	-	1,	5.060.000,
30	Camera Digital	Buah	1,	19.470.000,
31	Telephone Mobile	Buah	1,	3.168.000,
32	Kursi Zeis	Buah	13,	49.335.000,
33	TV Monitor	Buah	1,	2.596.000,
34	Kamera Digital	Buah	2,	15.972.000,
35	Lap Top	Buah	4,	59.323.000,
36	Note Book	Buah	3,	85.877.000,
37	Tablet PC	Buah	1,	19.393.000,
38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7,	22.330.000,
39	Peralatan Komputer Lainnya	Buah	9,	173.601.450,
40	Voice Recorder	Buah	1,	2.695.000,
41	Air Conditioning (AC)	Buah	9,	68.805.000,
42	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	Buah	29,	185.104.480,
43	Alat Bilyard	Buah	1,	51.865.000,
	JUMLAH		355,	1.435.009.930,

- BBPPKS BANDUNG senilai Rp. 2.578.627.500,- dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS BANDUNG			
1	Elevator /Lift	1	520.800.000
2	Sumersible Pump	1	5.456.000
3	Pompa Air	3	14.850.000
4	Sepeda	3	42.375.000
5	Scaffolding Set & Tool	5	5.100.000
6	Mesin Penghitung Uang	1	12.475.000
7	Lemari Besi/Metal	8	27.720.000
8	Lemari Kayu	2	21.890.000
9	Filing Cabinet Besi	10	34.595.000
10	Brandkas	1	9.790.000
11	CCTV - Camera Control Television System	1	153.996.700
12	Alat Penghancur Kertas	5	16.950.000
13	Penangkal Petir	1	6.545.000
14	LCD Projector/Infocus	23	207.480.000
15	Flip Chart	20	29.040.000
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	9.950.000
17	Meja Kerja Kayu	36	76.230.000
18	Kursi Besi/Metal	41	62.040.000
19	Sice	16	53.845.000
20	Tempat Tidur Kayu	20	47.960.000
21	Backdrop TV/Wardrobe	4	38.280.000
22	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	22.110.000
23	Mesin Pemotong Rumput	1	6.435.000
24	Mesin Cuci	5	36.575.000
25	Alat Pembersih Lainnya	5	12.750.000
26	Lemari Es	2	7.800.000
27	A.C. Split	1	27.500.000
28	Kompas Listrik (Alat Dapur)	1	11.550.000
29	Treng Air/Tandon Air	3	14.718.000
30	Televisi	3	14.421.000
31	Loudspeaker	10	14.000.000
32	Sound System	1	133.529.000
33	Megaphone	1	2.959.000
34	Stabilisator	2	5.950.000
35	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	25.740.000
36	Dispenser	7	21.560.000
37	Coffee Maker	1	17.006.000
38	Handy Cam	2	9.080.000
39	Digital Audio Taperecorder	2	4.478.000
40	Tripod Camera	1	3.325.000
41	Camera Digital	4	57.479.000
42	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1	4.040.000
43	Handphone Encription	2	11.484.000
44	Peralatan Antena UHF Lainnya	3	13.530.000
45	Sepeda Statis	1	3.900.000
46	Microwave Oven	1	4.422.000
47	Personal Computer	10	102.400.000
48	Lap Top	36	373.897.000
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	116.551.800
50	External/ Portable Hardisk	3	5.470.000
51	Air Conditioning (AC)	9	79.475.000
52	Peralatan Fitnes	1	8.950.000
53	Treadmill	1	8.175.000
	Jumlah		2.578.627.500

- BBPPKS Padang senilai Rp. 2.960.441.250,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS PADANG		261	2.960.441.250
1	Thermometer Max	2	9.000.000
2	Lemari Besi/Metal	4	24.000.000
3	Lemari Kayu	3	123.467.500
4	Rak Besi	5	39.500.000
5	Filing Cabinet Besi	4	17.640.000
6	Brandkas	1	26.300.000
7	Flip Chart	10	15.000.000
8	Alat Kantor Lainnya	4	397.342.000
9	Meja Kerja Kayu	12	66.342.500
10	Kursi Besi/Metal	32	121.520.000
11	Kursi Kayu	20	38.467.500
12	Sice	25	269.200.000
13	Meja Rapat	8	57.705.750
14	Meja Komputer	1	24.500.000
15	Meja Resepsionis	2	46.590.000
16	Meja Makan Kayu	4	69.375.000
17	Backdrop TV/Wardrobe	1	13.200.000
18	Meubelair Lainnya	1	40.500.000
19	Lemari Es	6	40.550.000
20	A.C. Split	31	223.500.000
21	Kitchen Set	1	39.200.500
22	Televisi	2	83.090.000
23	Sound System	1	10.000.000
24	Karaoke	1	23.500.000
25	Dispenser	10	25.000.000
26	Mimbar/Podium	2	10.000.000
27	Karpet	1	13.500.000
28	Gordyin/Kray	2	100.200.000
29	Microphone/Wireless MIC	12	43.000.000
30	Video Conference	2	315.594.000
31	Camera Conference	1	4.800.000
32	Kamera Udara	1	34.000.000
33	Lap Top	19	333.126.500
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	73.183.000
35	Tenda	4	15.600.000
36	Jet Pump	3	13.500.000
37	Alat Tennis Meja	1	13.072.000
38	Alat Bilyard	1	48.125.000
39	Peralatan Fitnes	1	19.900.000
40	Massage Chair	1	48.500.000
41	Sepeda Olah Raga	3	29.850.000

- BBPPKS Banjarmasin senilai Rp. 1.629.580.000,- dengan rincian sebagai berikut

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS BANJARMASIN		33	1.629.580.000
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	1.524.000.000
2	Loudspeaker	3	3.932.000
3	Unit Power Supply	1	1.437.000
4	Video Conference	2	41.936.000
5	Handy Talky (HT)	1	2.465.000
6	Lemari Suhu	1	4.435.000
7	Lap Top	1	19.050.000
8	Tablet PC	1	8.625.000
9	Acces Point	20	23.700.000

- BBPPKS Makassar senilai Rp. 204.641.000,- dengan rincian sebagai berikut :

ATKER/N	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
BBPPKS Makasar		16,	204.641.000,
1	Pompa Air	1	8.800.000
2	Lemari Besi/Metal	2	8.140.000
3	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	7.920.000
4	Mesin Cuci	1	16.500.000
5	A.C. Split	5	54.150.000
6	Lap Top	3	83.490.000
7	Tablet PC	1	15.130.000
8	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	10.511.000

- BBPPKS Jayapura senilai Rp. 1.896.899.700 dengan rincian sebagai berikut :

ATKER/N	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
BBPPKS JAYAPURA		294,	1.896.899.700,
1	Portable Water Pump	8,	25.064.500,
2	Camera Video Intelejen	2,	51.000.000,
2	CCTV - Camera Control Television System	1,	24.500.000,
3	Papan Pengumuman	2,	30.000.000,
3	Meja Kerja Kayu	33,	187.900.000,
4	Kursi Besi/Metal	86,	193.600.000,
4	Sice	4,	46.500.000,
5	Meja Rapat	6,	71.900.000,
5	Kasur/Spring Bed	55,	330.000.000,
6	Meja Makan Kayu	8,	32.000.000,
6	A.C. Split	4,	53.591.200,
7	Televisi	47,	262.940.000,
7	Sound System	1,	44.000.000,
8	Mic Conference	1,	35.000.000,
8	Microphone/Wireless MIC	2,	13.000.000,
9	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	3,	22.440.000,
9	Digital Thermometer	2,	6.864.000,
10	Wash Bak	5,	12.500.000,
10	Pocket Camera AF-230	2,	21.000.000,
11	P.C Unit	12,	251.100.000,
11	Lap Top	10,	182.000.000,

TRANSFER MASUK

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Transfer masuk pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Transfer Masuk	Satker Setjen	9	4,931,770,000	
TOTAL			9	Rp 4,931,770,000	

NAMA BARANG	NO AWAL	NO AKHIR	KUANTITAS	RPHASET	MERK/TYPE
Sepeda Motor	61	61	1	41,000,000	Vespa Primavera Merah
Sepeda Motor	62	63	1	13,499,000	Honda Beat Pop
Sepeda Motor	64	64	1	12,756,500	Yamaha Mio
Sepeda Motor	65	65	1	11,611,000	Revo Spoke F1
Sepeda Motor	66	67	1	31,850,000	Vespa Piaggio S125 4V Tahun 2017

NAMA BARANG	NO AWAL	NO AKHIR	KUANTITAS	RPHASET	MERK/TYPE
Station Wagon	7	7	1	287,202,500	TOYOTA KJANG

NAMA BARANG	NO AWAL	NO AKHIR	KUANTITAS	RPHASET	MERK/TYPE
Station Wagon	7	7	1	407,000,000	NISSAN ALL NEW X-TRAIL 2.0 CVT2015

Adanya Transfer Masuk pada Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp.4.931.770.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Adanya Tranfer Masuk barang berupa Peralatan dan Mesin (Station Wagon) dari Biro Keuangan ke Biro Orpeg senilai Rp.407.000.000,- dengan BAST Nomor 1698/1.2/PL.03/10/2019;
2. Adanya Tranfer Masuk barang berupa Peralatan dan Mesin (Station Wagon) dari Biro Orpeg ke Biro Keuangan senilai Rp.287.202.500,- dengan BAST Nomor 832/1.3/PL.03/08/2020;
3. Adanya Tranfer Masuk barang berupa Peralatan dan Mesin (Sepeda Motor Roda Dua) dari Satker PSDBS senilai Rp.156.062.500,-. dengan rincian sebagai berikut :

- 2 Unit Vespa Piaggio S125 AV senilai per Unit Rp. 31.850.000,-, total nilai Rp. 63.700.000,- BAST Nomor : 01/3.5/BAST/2020
- 1 Unit Honda Revo Spoke F1 senilai Rp.11.611.000 , 1 Unit Yamaha Mio Rp.12.756.500,- BAST Nomor : 12/5.5/BAST/06/2020
- 2 Unit Honda Beat Pop senilai per Unit Rp.13.499.000, total nilai Rp. 26.998.000, 1 Unit Vespa Prima Vera senilai Rp.41.000.000,-BAST Nomor : 13/5.5/BAST/05/2020

4. Adanya Transfer Masuk barang berupa Peralatan dan Mesin (PENANGANAN COVID-19 T.A 2020) dari Satker PSDBS ke Satker Sekretariat Jenderal senilai Rp.4.081.502.000,-;

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Infrared thermometer	10	28.000.000
2	Virus removal chamber box	1	315.000.000
3	Sterilization chamber box	2	110.000.000
4	Sterilization chamber box	2	290.000.000
5	Thermometer Infrared merek Contec TP500	5	9.500.000
6	Sterilisasi desinfektan	1	3.200.000
7	Sekat Meja Lobi	1	20.250.000
8	Sekat Meja Lobi Poliklinik	1	20.250.000
9	Sekat Meja Apotik	1	20.250.000
10	Wastafel	6	18.900.000
11	Backdrop media center Covid-9	1	32.500.000
12	Public ozonizer chamber system	2	396.000.000
13	Mini ozonizer cahmber system	3	405.000.000
14	Thermographic package pro	4	1.048.000.000
15	Dermalog thermometer	1	172.000.000
16	Touchless sensor handsanitizer dispenser	50	272.500.000
17	Automatic handsdryer	2	12.000.000
18	Mesin cuci tangan automatic	2	34.500.000
19	Rangka vertikal announcement	12	310.800.000
20	Rangka horizontal announcement	1	12.000.000
21	Main gate ACP	1	189.000.000
22	Main gate ACP	1	245.000.000
23	Box UV Sterilisasi	2	6.250.000
24	Alat penghirup uap	1	23.740.000
25	Gunting perban aesculap	2	2.775.000

26	Sterilisator kering	1	1.650.000
27	Otoscope	1	1.200.000
28	Cryer root elevator type 42387-4238	2	2.200.000
29	Mathieu needle holder	1	1.500.000
30	Timbangan, bantal, selimut Poliklinik	1	12.500.000
31	Ranjang Poliklinik	4	65.037.000
	TOTAL	125	4.081.502.000

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

a. Transfer Masuk

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Nilai (Rp.)
1.	Lemari Kayu	48	453.295.820
2.	Papan Visual/Papan Nama	1	11.250.000
3.	Peta	1	12.550.000
4.	LCD Projector/Infocus	2	29.690.000
5.	Meja Kerja Kayu	88	542.966.040
6.	Kursi Besi/Metal	45	175.970.000
7.	Sice	3	43.452.000
8.	Tempat Tidur Kayu	1	9.250.000
9.	Meubelair Lainnya	2	25.000.000
10.	Televisi	3	115.150.000
11.	Aquarium	1	24.750.000
12.	Kaca Hias	2	7.700.000
	Jumlah	197	1.451.023.860

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Transfer Masuk (102) 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor:1104/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial ODHIV Kahuripan Sukabumi dan serah terima BMN dari Direktorat RTS & KPO kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial ODHIV Kahuripan Sukabumi berupa Peralatan dan Mesin Rp. 56.141.890,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Meja Kerja Kayu	25	24,928,000
Kursi Besi Metal	14	12,368,890
Meja Rapat	1	560,000
Kursi Fiber Glas Plastik	7	3,500,000
P.C Unit	1	14,785,000
JUMLAH	48	56,141,890

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2151/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSKPNAPZA Bambu Apus berupa Peralatan dan Mesin Rp. 370.000.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	1	370,000,000
JUMLAH	1	370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2647/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSKPNAPZA Bambu Apus berupa Peralatan dan Mesin Rp. 881.987.640,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	257	881,987,640
JUMLAH	257	881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor:1194/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pangurangi Takalar berupa Peralatan dan Mesin Rp. 2.015.994.562,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	4 - 4	3,630,000
Sice	39 - 40	28,359,690
Tempat Tidur Besi	184 - 236	202,607,000
Tabung O2	4 - 5	4,232,000
Televisi	54 - 56	13,362,540
Dispenser	46 - 52	16,456,132
A.C. Split	69 - 110	190,482,320
Loudspeaker	6 - 7	2,941,240
Vertikal Blind	3 - 3	27,084,800
Lemari Es	23 - 26	15,010,698
Sound System	7 - 7	16,649,700
Karpet	95 - 97	4,754,100
Lemari Penyimpan	48 - 99	131,801,500
Mesin Cuci	2 - 5	14,579,240
Meja Makan Besi	5 - 6	53,475,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	3 - 4	6,430,524
Kompor Gas (Alat Dapur)	3 - 4	4,600,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	5 - 6	2,380,500
Freezer - 30 Derajat Celcius	3 - 4	7,918,578
Rice (Alat Pengolah Beras)	1 - 1	1,003,184
Blender	1 - 2	2,115,472
Rak Piring Alumunium	3 - 4	5,133,600
CCTV - Camera Control Television System	9 - 9	102,346,200
Tangga	1 - 1	1,600,000
Mesin Pemotong Rumput	3 - 3	1,975,000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	83 - 84	666,642,000
Sepeda Motor	100 - 101	35,460,000
Lap Top	142 - 144	25,343,943
P.C Unit	319 - 322	38,069,924
Printer (Peralatan Personal Komputer)	288 - 291	6,748,546
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	38 - 38	5,454,450
LCD Projector/Infocus	41 - 42	12,438,286
Focusing Screen/Layar LCD Projector	10 - 11	4,079,928
Camera Digital	36 - 36	7,005,225
Lemari Besi/Metal	31 - 34	18,825,040
Filing Cabinet Besi	172 - 177	12,340,512
Alat Penghancur Kertas	27 - 27	1,817,644
Meja Kerja Kayu	690 - 720	126,728,482
Kursi Besi/Metal	773 - 823	86,829,002
Total		2,015,994,562

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1195/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial ODHIV

Pangurangi Takalar berupa Peralatan dan Mesin Rp. 3.199.855.560,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Penghancur Kertas	28 - 29	11,000,000
Sice	51 - 54	88,000,000
Tempat Tidur Besi	239 - 290	262,900,000
Tabung O2	6 - 6	2,200,000
Televisi	58 - 63	33,000,000
Buffet	2 - 4	6,600,000
LCD Projector/Infocus	46 - 47	13,200,000
Focusing Screen/Layar LCD Projector	16 - 17	3,300,000
Dispenser	56 - 60	19,250,000
A.C. Split	122 - 143	154,000,000
Loudspeaker	8 - 9	8,800,000
Sound System	8 - 10	160,600,000
Vertikal Blind	5 - 69	107,250,000
Lemari Es	28 - 33	39,600,000
Mesin Pemotong Rumput	5 - 8	34,320,000
Sepeda	1 - 4	13,200,000
Karpet	98 - 100	4,950,000
Lemari Besi/Metal	51 - 100	165,000,000
Alat Penghancur Jarum	1 - 2	14,300,000
Tensimeter	3 - 3	1,430,000
Mesin Cuci	6 - 9	19,800,000
Meja Makan Besi	7 - 11	35,750,000
Kitchen Set	4 - 4	9,900,000
Kompas Gas (Alat Dapur)	5 - 6	5,500,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	7 - 8	2,860,000
Freezer - 30 Derajat Celcius	5 - 5	4,950,000
Blender	3 - 4	2,640,000
Dispenser	61 - 64	15,400,000
Rak Piring Aluminium	5 - 6	11,000,000
Alat Kantor Lainnya	9 - 9	61,600,000
Peralatan Fitnes	1 - 1	11,000,000
Alat Badminton	1 - 1	44,000,000
Alat Tennis Meja	1 - 1	11,000,000
Treadmill	1 - 2	17,600,000
Sepeda Statis	1 - 2	11,000,000
Peralatan Fitnes	2 - 3	3,300,000
Sit Up Board	1 - 2	3,300,000
Sepeda Motor	114 - 115	39,600,000
Lap Top	147 - 150	44,000,000
P.C Unit	333 - 336	39,600,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	321 - 324	6,600,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	325 - 325	2,750,000

NAMA	QTY	NILAI
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	39 - 39	5,499,980
Camera Digital	39 - 39	4,950,000
Handy Cam	25 - 25	8,910,000
Tripod	1 - 1	1,540,000
Lemari Besi/Metal	35 - 42	26,400,000
Filing Cabinet Besi	178 - 185	17,600,000
Lemari Besi/Metal	43 - 50	22,000,000
Kursi Besi/Metal	1042 - 1042	5,500,000
Meja Kerja Kayu	764 - 782	75,480,020
Kursi Besi/Metal	1043 - 1184	204,490,000
Meja Rapat	42 - 45	64,680,000
Total		3,199,855,560

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2648/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BLBI Abiyoso Cimahi berupa Peralatan dan Mesin Rp. 1.154.100.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	2	35,800,000
Alat Pengeboran	2	37,000,000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	4	1,081,300,000
JUMLAH	8	1,154,100,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2150/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSPDM Phalamarta Sukabumi berupa Peralatan dan Mesin Rp.370.000.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	1	370,000,000
JUMLAH	1	370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2643/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSPDSN Wyata Guna Bandung berupa Peralatan dan Mesin Rp.881.987.640,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	257	881,987,640
JUMLAH	257	881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2640/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso berupa Peralatan dan Mesin Rp.1.131.661.740,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	335	1,131,661,740
JUMLAH	335	1,131,661,740

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2639/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BBRSBG "Kartini" Temanggung berupa Peralatan dan Mesin Rp.1.131.661.740,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	335	1,131,661,740
JUMLAH	335	1,131,661,740

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2153/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BBRSBG "Kartini" Temanggung berupa Peralatan dan Mesin Rp.370.000.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	1	370,000,000
JUMLAH	1	370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2648/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSPDF "Budi Perkasa" Palembang berupa Peralatan dan Mesin Rp.252.685.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	2	252,685,000
JUMLAH	2	252,685,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2657/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSPDF Wirajaya Makasar berupa Peralatan dan Mesin Rp. 33.342.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	2	33,342,000
JUMLAH	2	33,342,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2642/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSEGP "Pangudi Luhur" Bekasi berupa Peralatan dan Mesin Rp.881.987.640,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	257	881,987,640
JUMLAH	257	881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2648/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSAMPK Handayani berupa Peralatan dan Mesin Rp.881.987.640,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1192/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSAMPK Handayani Jakarta berupa Peralatan dan Mesin Rp. 20.146.500,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	269	902,134,140
JUMLAH	269	902,134,140

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1192/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk

(102) kepada Satuan Kerja Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila "Mulya Jaya" berupa Peralatan dan Mesin Rp .370.462.800,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional , Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2660/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSWTS Mulya Jaya berupa Peralatan dan Mesin Rp. 47.750.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	153	415,092,800
Alat Bengkel & Alat Ukur	2	3,120,000
JUMLAH	155	418,212,800

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2149/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSLU "Budhi Dharma" Bekasi berupa Peralatan dan Mesin Rp.370.000.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	1	370,000,000
JUMLAH	1	370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2642/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSLU "Budhi Dharma" Bekasi berupa Peralatan dan Mesin Rp.881.987.640,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	257	881,987,640
JUMLAH	257	881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1191/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang berupa Peralatan dan Mesin Rp. 307.823.800,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Termometer Standar	3	4,680,000
Tempat Tidur Besi	50	78,600,000
Kasur Spring Bed	50	84,650,000
Alat Pembersih Lainnya	2	2,247,800
A.C Split	22	135,212,000
Alat Komunikasi Telepon Lainnya	2	2,434,000
JUMLAH	129	307,823,800

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2667/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Galih Pakuan" Bogor berupa Peralatan dan Mesin Rp. 881.987.640,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	257	881,987,640
JUMLAH	257	881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2152/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSPDM "Budi Luhur" Banjar Baru berupa Peralatan dan Mesin Rp.370.000.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	1	370,000,000
JUMLAH	1	370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2641/4.1/PL.02/12/2020 dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2656/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BBRVBD Cibinong berupa Peralatan dan Mesin Rp.2.369.642.830,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	365	1.695.796.740
Komputer	40	673.846.090
JUMLAH	405	2.369.642.830

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG berupa Peralatan dan Mesin Rp.290.280.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	1	290.280.000
JUMLAH	1	290.280.000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI berupa Peralatan dan Mesin Rp.881.987.640,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	365	881.987.640
JUMLAH	365	881.987.640

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Terdapat transaksi Transfer Masuk atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.328.171.480,- terdapat pada :

Sekretariat

Transfer masuk dari JAMSOSKEL berdasarkan BASTB nomor: 127/Ljs.JSK/PL.04.01/7/2020 tanggal 2 Juli 2020

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	49,405,000
	Kamera Digital	1	14,505,000
	Lap Top	1	34,900,000

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Transfer masuk dari Sekretariat Senilai Rp. 24.034.000,- berdasarkan BASTB nomor: 74 / 3.1/PL.05/05/2020 tanggal 13 Mei 2020, senilai Rp. 111.650.000 berdasarkan BASTB No. 1507/3.1/PL.05.05/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan senilai Rp 30.500.000,- berdasarkan BASTB No. 1688/3.1/PL.05/09/2020 tanggal 16 September 2020, berdasarkan BASTB Nomor: 2230/3.1/PL.05.05/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 senilai Rp. 396.266.480,-

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	18	562,450,480
	Lap Top	7	132,934,000
	Printer	1	2,750,000
	AC Senteral	1	30,500,000
	Vidio Conference	1	259,105,980
	Tablet PC	6	118,338,000
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	7,232,500
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	11,590,000

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Transfer masuk dari Sekretariat senilai Rp. 110.249.000,- berdasarkan BASTB nomor 975 / 3.1 /PL.05/ 6/ 2020 tanggal 04 Juni 2020 dan senilai Rp. 20.775.000,- berdasarkan BASTB Nomor: 1508/ 3.1/ PL.05.05/08/2020

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440281			
	Direktorat PSKBS	7	131,024,000
	Lap Top	5	105,029,000
	P.C Unit	1	14,130,000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	11,865,000

Direktorat JAMSOSKEL

Transfer masuk dari Sekretariat berdasarkan No: 1549 /3.1/PL.05.05/ 08/ 2020, Berdasarkan Nomor: 2066/3.1/PL.05.05/11/2020 tanggal 08 Desember 2020

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310.000			
	Direktorat Jaminan Sosial	35	585,292,000
	Box Camera	1	6,000,000
	PC Unit	2	47,458,000
	Lap Top	17	434,044,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	62,532,000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	35,258,000

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi Transfer Masuk atas Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp765.748.180,00** yang terdiri dari Intrakomptabel **Rp715.611.280,00** dan Ekstrakomptabel **Rp50.136.900,00** sehingga nilai transfer masuk menjadi **Rp715.611.280,00** terdiri dari :

- a. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I
Terdapat transfer masuk peralatan dan mesin dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sesuai Berita Acara

Serah Terima (BAST) senilai **Rp198.889.000,00** dikurangi ekstrakomptabel **Rp7.896.900,00** sehingga transfer masuk menjadi **Rp190.992.100,00** dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Masuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I					
NO	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BAST	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Meja Kerja Kayu	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	9,724,000	9,724,000
2	Sice	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	17,325,000	17,325,000
3	Lemari Kayu	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	11,407,000	11,407,000
4	Kitchen Set	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	18,429,600	18,429,600
5	Rak Kayu	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	17,017,000	17,017,000
6	Lemari Kayu	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	14,190,000	14,190,000
7	Backdrop TV/Wardrobe	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	16,940,000	16,940,000
8	Backdrop TV/Wardrobe	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	12,364,000	12,364,000
9	Kursi Besi/Metal	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	7,106,000	7,106,000
10	Kursi Besi/Metal	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	6	3,135,000	18,810,000
11	Kursi Besi/Metal	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	2	2,722,500	5,445,000
12	Televisi	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	20,256,500	20,256,500
13	A.C. Split	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	17,160,000	17,160,000
14	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	4,818,000	4,818,000
T O T A L					190,992,100

b. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II

Terdapat transfer masuk peralatan dan mesin dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) senilai **Rp407.759.180,00** dikurangi ekstrakomptabel **Rp42.240.000,00** sehingga transfer masuk menjadi **Rp365.519.180,00** dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Masuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II					
NO	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BAST	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Laptop	3564/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	2	19,200,000	38,400,000
2	P.C Unit	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	3	19,000,000	57,000,000
3	Televisi	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	54,999,000	54,999,000
4	Meja Kerja Kayu	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	48	2,915,000	139,920,000
5	Lemari Kayu	3563/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	17,600,000	17,600,000
6	Lap Top	3564/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	3	19,200,060	57,600,180
T O T A L					365,519,180

c. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III

Terdapat transfer masuk peralatan dan mesin dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) senilai **Rp159.100.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Masuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III					
NO	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BAST	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Lemari Kayu	3565/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	1	2,851,200	2,851,200
2	Lemari Kayu	3565/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	9	4,385,830	19,592,230
3	Meja Kerja Kayu	3565/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	56	2,439,000	129,513,000
4	Partisi	3565/6.1/PL.04/06/2020 tanggal 12-06-2020	5	1,428,714	7,143,570
T O T A L					159,100,000

HIBAH (MASUK)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Hibah Masuk (103) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Hibah Masuk (103) dari AXA Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Hibah Nomor : 002/CR-AXA/II/2020 pada Satuan Kerja BRSPDI "Ciung Wanara" Bogor senilai Rp. 12.130.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kedokteran Kesehatan	13	2.130.000
Komputer	5	10.000.000
Jumlah	18	12.130.000

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Rumbai" Pekanbaru senilai Rp. 99.990.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Peraga	1	99,990,000
Jumlah	1	99,990,000

**(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP**

027.05.00.440275		
Direktorat PSKBA	1	4,555,580,000
Mobil Work Shop	1	4,555,580,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat penyelesaian pembangunan dengan KDP atas peralatan dan mesin pada BP3S senilai Rp. 1.921.201.692,- yaitu pada satker :

- Sekretariat BP3S

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Perkakas Kantor Lainnya		1	1.575.186.000
TOTAL				1.575.186.000

Merupakan reklasifikasi KDP menjadi Aset Tetap berupa pengadaan untuk Interior Kelas A (bawah) Pusdiklat Kesos sesuai dengan SPK Nomor: 2567/6.1/PL.02.02/11/2019 Tanggal 13 November 2019.

- BBPPKS Padang senilai Rp. 346.015.692,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER/NO	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
BBPPKS PADANG			
		-	346.015.692
1	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	346.015.692

REKLASIFIKASI MASUK

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terjadi Transaksi Reklase Masuk dari Persediaan Berupa Hadiah Tak Tertebak/ Hadiah Tidak Diambil Pemenang dalam Bentuk Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Roda Dua sebesar Rp.156.065.500,-.

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199418940000KP			
	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial	7	156.065.500
	Sepeda Motor	7	156.065.500

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	8	4,555,580,000
	Mobil Dapur Lapangan	8	4,555,580,000

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat Reklasifikasi Masuk pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan nilai Rp.37.817.175,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Reklas	Kode Barang	Nama Barang	Nilai
1.	22 Juli 2020	3060102061	Lensa Kamera	Rp.18.209.675
2.	22 Juli 2020	3060102128	Camera Digital	Rp.19.607.500
Total				Rp.37.817.175

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk atas peralatan dan mesin pada BP3S Senilai Rp. 1.575.186.000,- yaitu pada Satker:

- Sekretariat Badiklitpensos

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Sekretariat Badiklitpensos		1	1.575.186.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1.575.186.000

REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (117) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (117) pada Satuan Kerja BRSPDI “Nipotowe” Palu senilai Rp. 3.180.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Kitchen Set	4	1,915,000
Mesin Giling Bumbu	2	650,000
Alat Kantor Rumah Tangga	3	615,000
Jumlah	9	3,180,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

(BBPPKS) Lembang senilai Rp. 375.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Bandung		11	375.800.000
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	375.800.000

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pengembangan Nilai Aset pada Satker Setjen berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pengembangan Nilai Aset	Satker Setjen	0	Rp 182.952.000	Elevator/ Lift
TOTAL			0	Rp 182.952.000	

Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Aset Peralatan dan Mesin Elevator/ Lift pada Gedung Kantor Utama (gedung A) Kementerian Sosial senilai Rp.182.952.000,-

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSPDN “Wyata Guna” Bandung senilai Rp. 41.666.152,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	1	10,315,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	1	31,351,152
Jumlah	2	41,666,152

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

PENGEMBANGAN NILAI ASET

027.05.00.440275		
Direktorat PSKBA	-	85,956,300
Mobil Dapur Lapangan	-	85,956,300

(11) BADIKLITPENSOS

Poltekesos Rp. 90.970.000 berupa Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
Poltekesos Bandung				
1	Elevator /Lift		0	90.970.000
TOTAL				90.970.000

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Pencatatan Nilai Kuantitas (204) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Naibonat” Kupang senilai (Rp. 1.269.500,-) dikarenakan adanya setoran pengembalian belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pompa Air	0	-1,269,500
JUMLAH	0	-1,269,500

TRANSAKSI NORMALISASI BMN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Transaksi Normalisasi BMN (209) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Transaksi Normalisasi BMN (209 pada Satuan Kerja BRSPDSRW "Melati" Jakarta senilai Rp. 1.991.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	1	1,991,000
Jumlah	1	1,991,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Transaksi Normalisasi BMN

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Banjarmasin		1	-768.249
	Rak Kayu	1	-768.249

PENGHAPUSAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Penghapusan pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Penghapusan	Satker Setjen	4	- 445.700.000	
TOTAL			4	-Rp 445.700.000	

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Station Wagon	3	Rp 398.600.000	toyota Avanza Biro Keuangan
2	Mobil Ambulance	1	Rp 47.100.000	
TOTAL		4	445.700.000	

Adanya Penghapusan barang berupa peralatan mesin untuk pelaksanaan tugas berupa barang inventaris kantor senilai Rp. 445.700.000,-. BAST Nomor : 77/HUK/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penghapusan BMN berupa 4 Unit kendaraan roda empat dilingkungan Satker Sekretariat Jenderal

(02) INSPEKTORAT JENDERALRincian Mutasi Kurang **Peralatan dan Mesin** berupa Penghapusan :

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Nilai (Rp.)
1.	Mesin Ketik Listrik Portabel	1	2.200.000
2.	Mesin Hitung Listrik	1	2.703.800
3.	Mesin Hitung Elektronik	1	750.000
4.	Lemari Besi/Metal	7	11.695.000
5.	Lemari Kayu	26	345.562.000
6.	Filing Cabinet Besi	22	10.489.000
7.	Brandkas	1	1.195.000
8.	Whiteboard	3	14.454.000
9.	Alat Penghancur Kertas	1	1.100.000
10.	LCD Projector/Infocus	1	8.030.000
11.	Layar LCD Projector	2	16.948.700
12.	Meja Kerja Kayu	186	148.127.000
13.	Kursi Besi/Metal	189	95.349.000
14.	Kursi Kayu	76	1.520.000
15.	Sice	24	21.134.800
16.	Meja Rapat	3	21.466.000
17.	Meja Komputer	6	2.443.750
18.	Tempat Tidur Kayu	1	1.420.000
19.	Meja Resepsionis	1	921.000
20.	Meja Makan Besi	1	770.000
21.	Lemari Es	7	10.120.000
22.	A.C. Split	9	27.660.000
23.	Radio	1	2.574.000
24.	Televisi	12	32.780.000
25.	Tape Recorder	53	87.068.000
26.	Unit Power Supply	10	25.215.000
27.	Handycam	2	9.450.000
28.	Mini Compo	1	2.250.000
29.	Gordyin/Kray	2	8.100.000
30.	Audio Mixing Stationer	1	3.377.000
31.	Power Amplifier	1	1.446.000
32.	Kamera Elektronik	7	33.278.000
33.	Layar Film/Projector	2	4.270.000
34.	Video Tone Cleaner	1	7.700.000
29.	Kamera Digital	9	23.650.000
30.	Mesin Jilid	1	11.750.000
31.	Pesawat Telepon	10	1.336.000
32.	Wireless Control System For Ship Model	2	9.570.000

33.	Local Area Network (LAN)	3	8.986.700
34.	P.C. Unit	8	52.800.000
35.	Laptop	9	58.129.500
36.	Notebook	18	224.514.090
37.	Floopy Disk Unit	4	1.980.000
38.	Disk Pack	7	4.030.000
39.	Printer	19	53.370.832
40	External	15	16.050.000
42.	Server	1	22.990.000
	Jumlah	767	1.452.524.172

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

PENGHAPUSAN

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(31)	(88,908,200)
	Overhead Projector	(16)	(25,000,000)
	Camera Electronic	(1)	(3,450,000)
	Tripod Camera	(1)	(1,200,000)
	Slide Projector	(1)	(10,822,000)
	Camera Film	(1)	(2,100,000)
	Camera Digital	(1)	(2,805,000)
	P.C Unit	(2)	(18,000,000)
	Note Book	(1)	(16,815,000)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(4)	(6,938,200)
	External	(3)	(1,778,000)

Dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan nomor: 79 / HUK /2020 tanggal 23 Juni 2020.

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat transaksi Penghapusan senilai Rp. 3.895.590,-

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Yogyakarta		2	3.895.590
	Mesin Stensil Manual Folio	1	1.380.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2515590

TRANSFER KELUAR

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Transfer Keluar pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Transfer Keluar	Satker Setjen	199	- 2.145.226.360	
TOTAL			199	-Rp 2.145.226.360	

KODE	URAIAN	Qty	NILAI
1	2	4	5
3.02.01.01.003	Station Wagon	-2	-694.202.500
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	-48	-453.295.820
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	-1	-11.250.000
3.05.01.05.014	Peta	-1	-12.550.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	-2	-29.690.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	-88	-542.966.040
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	-45	-175.970.000
3.05.02.01.005	Sice	-3	-43.452.000
3.05.02.01.011	Tempat Tidur Kayu	-1	-9.250.000
3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya	-2	-25.000.000
3.05.02.06.002	Televisi	-3	-115.150.000
3.05.02.06.029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	-1	-24.750.000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	-2	-7.700.000
TOTAL		-199	-2.145.226.360

Adanya Tranfer Keluar barang berupa peralatan mesin untuk pelaksanaan tugas berupa barang inventaris kantor senilai 145.226.360,-. dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Adanya Tranfer Keluar barang berupa Peralatan dan Mesin (Station Wagon) dari Biro Keuangan ke Biro Orpeg senilai Rp.407.000.000,- dengan BAST Nomor 1698/1.2/PL.03/10/2019.
- 2) Adanya Tranfer Keluar barang berupa Peralatan dan Mesin (Station Wagon) dari Biro Orpeg ke Biro Keuangan senilai Rp.287.202.500,- dengan BAST Nomor 832/1.3/PL.03/08/2020.
- 3) Adanya Tranfer Keluar barang berupa Peralatan dan Mesin ke Satker

Inspektorat Jenderal senilai Rp.1.451.023.860,- dengan BAST Nomor 1548/1.5/PL.02/10/2020.

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat transaksi Transer Keluar atas peralatan dan mesin pada Satker Pusat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.4.237.567.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	NUP	Nilai	BAST	Penerima
1.	Sepeda Motor Vespa Piaggio S1254V tahun 2017	24 - 25	Rp 63.700.000	01/3.5/BAST/01/2020 Tgl 28 Januari 2020	Setjen
2.	Sepeda Motor Honda Revo Spoke	26	Rp 11.611.000	12/5.5/BAST/06/2020 Tgl 4 Juni 2020	Setjen
3.	Sepeda Motor Yamaha Mio	27	Rp 12.756.500	12/5.5/BAST/06/2020 Tgl 4 Juni 2020	Setjen
4.	Sepeda Motor Honda Beat Pop	28 - 29	Rp 26.998.000	13/5.5/05/2020 Tgl 12 Mei 2020	Setjen
5	Sepeda Motor Vespa Primavera Merah	30	Rp 41.000.000	13/5.5/05/2020 Tgl 12 Mei 2020	Setjen
Jumlah			Rp 156.065.500		

Dan transfer keluar barang berupa Peralatan dan Mesin (Penanganan Covid-19 TA 2020) yang terdapat pada satker Pusat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial ke Satker Sekretariat Jenderal senilai Rp4.081.502.000, dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Infrared thermometer	10	28.000.000
2	Virus removal chamber box	1	315.000.000
3	Sterilization chamber box	2	110.000.000
4	Sterilization chamber box	2	290.000.000
5	Thermometer Infrared merek Contec TP500	5	9.500.000
6	Sterilisasi desinfektan	1	3.200.000
7	Sekat Meja Lobi	1	20.250.000
8	Sekat Meja Lobi Poliklinik	1	20.250.000
9	Sekat Meja Apotik	1	20.250.000
10	Wastafel	6	18.900.000
11	Backdrop media center Covid-9	1	32.500.000
12	Public ozonizer chamber system	2	396.000.000
13	Mini ozonizer chamber system	3	405.000.000
14	Thermographic package pro	4	1.048.000.000
15	Dermalog thermometer	1	172.000.000
16	Touchless sensor handsanitizer dispenser	50	272.500.000
17	Automatic handsdryer	2	12.000.000
18	Mesin cuci tangan automatic	2	34.500.000
19	Rangka vertikal announcement	12	310.800.000
20	Rangka horizontal announcement	1	12.000.000
21	Main gate ACP	1	189.000.000
22	Main gate ACP	1	245.000.000
23	Box UV Sterilisasi	2	6.250.000
24	Alat penghirup uap	1	23.740.000
25	Gunting perban aesculap	2	2.775.000
26	Sterilisator kering	1	1.650.000
27	Otoscope	1	1.200.000
28	Cryer root elevator type 42387-4238	2	2.200.000
29	Mathieu needle holder	1	1.500.000
30	Timbangan, bantal, selimut Poliklinik	1	12.500.000
31	Ranjang Poliklinik	4	65.037.000
	TOTAL	125	4.081.502.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi pengurangan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Transfer Keluar (302) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Transfer Keluar (302) berupa Peralatan dan Mesin sebesar (Rp. 14.785.000,-) pada Satuan Kerja Direktorat RTS dan KPO kepada LRSODHIV "Kahuripan" Sukabumi untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:628/4.4/PL.03.02/06/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
P.C Unit	1	-14,785,000
JUMLAH	1	-14,785,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor:1104/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial ODHIV Kahuripan Sukabumi dan serah terima BMN dari Direktorat RTS & KPO kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial ODHIV Kahuripan Sukabumi berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 41.356.890,) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Meja Kerja Kayu	-25	-24,928,000
Kursi Besi Metal	-14	-12,368,890
Meja Rapat	-1	-560,000
Kursi Fiber Glas Plastik	-7	-3,500,000
JUMLAH	-47	-41,356,890

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2151/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSKPNAPZA Bambu Apus berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 370.000.000,) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-1	-370,000,000
JUMLAH	-1	-370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2647/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSKPNAPZA Bambu Apus berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 881.987.640,) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-257	-881,987,640
JUMLAH	-257	-881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor :

2648/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BLBI Abiyoso Cimahi berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 1.154.100.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-2	-35,800,000
Alat Pengeboran	-2	-37,000,000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	-4	-1,081,300,000
JUMLAH	-8	-1,154,100,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2150/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDM Phalamarta Sukabumi berupa Peralatan dan Mesin (Rp.370.000.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-1	-370,000,000
JUMLAH	-1	-370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2643/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDSN Wyata Guna Bandung berupa Peralatan dan Mesin (Rp.881.987.640,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	-257	-881,987,640
JUMLAH	-257	-881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2640/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso berupa Peralatan dan Mesin (Rp.1.131.661.740,) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	-335	-1,131,661,740
JUMLAH	-335	-1,131,661,740

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2639/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BBRSBG "Kartini" Temanggung berupa Peralatan dan Mesin (Rp.1.131.661.740,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	-335	-1,131,661,740
JUMLAH	-335	-1,131,661,740

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2153/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BBRSBG "Kartini" Temanggung berupa Peralatan dan Mesin (Rp.370.000.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-1	-370,000,000
JUMLAH	-1	-370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2648/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDF "Budi Perkasa" Palembang berupa Peralatan dan Mesin (Rp.252.685.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-2	-252,685,000
JUMLAH	-2	-252,685,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2657/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDF Wirajaya Makasar berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 39.342.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-2	-39,342,000
JUMLAH	-2	-39,342,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2642/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSEGP “Pangudi Luhur” Bekasi berupa Peralatan dan Mesin (Rp.881.987.640,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	-257	-881,987,640
JUMLAH	-257	-881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2648/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSAMPK Handayani berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 881.987.640,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1192/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSAMPK Handayani Jakarta berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 20.146.500,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	-269	-902,134,140
JUMLAH	-269	-902,134,140

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1192/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila “Mulya Jaya” berupa Peralatan dan Mesin (Rp .370.462.800,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional , Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2660/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSWTS Mulya Jaya berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 47.750.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	-153	-415,092,800
Alat Bengkel & Alat Ukur	-2	-3,120,000
JUMLAH	-155	-418,212,800

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor :

2149/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSLU "Budhi Dharma" Bekasi berupa Peralatan dan Mesin (Rp.370.000.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-1	-370,000,000
JUMLAH	-1	-370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2642/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSLU "Budhi Dharma" Bekasi berupa Peralatan dan Mesin (Rp.881.987.640,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-257	-881,987,640
JUMLAH	-257	-881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2346/4.1/PL.02/11/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang berupa Peralatan dan Mesin (Rp.290.280.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-1	-290,280,000
JUMLAH	-1	-290,280,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2645/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi berupa Peralatan dan Mesin (Rp.881.987.640,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-257	-881,987,640
JUMLAH	-257	-881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1191/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar

(302) kepada Satuan Kerja Direktorat RTS & KPO berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 307.823.800,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-124	-300,709,800
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	-2	-2,434,000
Alat Bengkel & Alat Ukur	-3	-4,680,000
JUMLAH	-129	-307,823,800

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2667/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSKPNAPZA “Galih Pakuan” Bogor berupa Peralatan dan Mesin (Rp.881.987.640,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-257	-881,987,640
JUMLAH	-257	-881,987,640

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2152/4.1/PL.02/10/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDM “Budi Luhur” Banjar Baru berupa Peralatan dan Mesin (Rp.370.000.000,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-11	-370,000,000
JUMLAH	-11	-370,000,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2641/4.1/PL.02/12/2020 dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2656/4.1/PL.02/12/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BBRVBD Cibinong berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 2.369.642.830,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor Rumah Tangga	-365	-1,695,796,740
Komputer	-40	-673,846,090
JUMLAH	-405	-2,369,642,830

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1194/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pangurangi Takalar berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 2.015.994.562,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	4 - 4	-3,630,000
Sice	39 - 40	-28,359,690
Tempat Tidur Besi	184 - 236	-202,607,000
Tabung O2	4 - 5	-4,232,000
Televisi	54 - 56	-13,362,540
Dispenser	46 - 52	-16,456,132
A.C. Split	69 - 110	-190,482,320
Loudspeaker	6 - 7	-2,941,240
Vertikal Blind	3 - 3	-27,084,800
Lemari Es	23 - 26	-15,010,698
Sound System	7 - 7	-16,649,700
Karpet	95 - 97	-4,754,100
Lemari Penyimpan	48 - 99	-131,801,500
Mesin Cuci	2 - 5	-14,579,240
Meja Makan Besi	5 - 6	-53,475,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	3 - 4	-6,430,524
Kompor Gas (Alat Dapur)	3 - 4	-4,600,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	5 - 6	-2,380,500
Freezer - 30 Derajat Celcius	3 - 4	-7,918,578
Rice (Alat Pengolah Beras)	1 - 1	-1,003,184
Blender	1 - 2	2,115,472
Rak Piring Alumunium	3 - 4	-5,133,600
CCTV - Camera Control Television System	9 - 9	-102,346,200
Tangga	1 - 1	-1,600,000
Mesin Pemotong Rumput	3 - 3	-1,975,000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah ah)	83 - 84	-666,642,000
Sepeda Motor	100 - 101	-35,460,000
Lap Top	142 - 144	-25,343,943
P.C Unit	319 - 322	-38,069,924
Printer (Peralatan Personal Komputer)	288 - 291	-6,748,546
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	38 - 38	-5,454,450
LCD Projector/Infocus	41 - 42	-12,438,286
Focusing Screen/Layar LCD Projector	10 - 11	-4,079,928
Camera Digital	36 - 36	-7,005,225
Lemari Besi/Metal	31 - 34	-18,825,040
Filing Cabinet Besi	172 - 177	-12,340,512
Alat Penghancur Kertas	27 - 27	-1,817,644
Meja Kerja Kayu	690 - 720	-126,728,482
Kursi Besi/Metal	773 - 823	-86,829,002
Total		-2,015,994,562

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1195/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial ODHIV

Pangurangi Takalar berupa Peralatan dan Mesin (Rp. 3.199.855.560,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Penghancur Kertas	28 - 29	-11,000,000
Sice	51 - 54	-88,000,000
Tempat Tidur Besi	239 - 290	-262,900,000
Tabung O2	6 - 6	2,200,000
Televisi	58 - 63	-33,000,000
Buffet	2 - 4	-6,600,000
LCD Projector/Infocus	46 - 47	-13,200,000
Focusing Screen/Layar LCD Projector	16 - 17	-3,300,000
Dispenser	56 - 60	-19,250,000
A.C. Split	122 - 143	-154,000,000
Loudspeaker	8 - 9	-8,800,000
Sound System	8 - 10	-160,600,000
Vertikal Blind	5 - 69	-107,250,000
Lemari Es	28 - 33	-39,600,000
Mesin Pemotong Rumput	5 - 8	-34,320,000
Sepeda	1 - 4	-13,200,000
Karpet	98 - 100	-4,950,000
Lemari Besi/Metal	51 - 100	-165,000,000
Alat Penghancur Jarum	1 - 2	-14,300,000
Tensimeter	3 - 3	-1,430,000
Mesin Cuci	6 - 9	-19,800,000
Meja Makan Besi	7 - 11	-35,750,000
Kitchen Set	4 - 4	-9,900,000
Kompas Gas (Alat Dapur)	5 - 6	-5,500,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	7 - 8	-2,860,000
Freezer - 30 Derajat Celcius	5 - 5	-4,950,000
Blender	3 - 4	-2,640,000
Dispenser	61 - 64	-15,400,000
Rak Piring Aluminium	5 - 6	-11,000,000
Alat Kantor Lainnya	9 - 9	-61,600,000
Peralatan Fitnes	1 - 1	-11,000,000
Alat Badminton	1 - 1	-44,000,000
Alat Tennis Meja	1 - 1	-11,000,000
Treadmill	1 - 2	-17,600,000
Sepeda Statis	1 - 2	-11,000,000
Peralatan Fitnes	2 - 3	-3,300,000
Sit Up Board	1 - 2	-3,300,000
Sepeda Motor	114 - 115	-39,600,000
Lap Top	147 - 150	-44,000,000
P.C Unit	333 - 336	-39,600,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	321 - 324	-6,600,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	325 - 325	-2,750,000

NAMA	QTY	NILAI
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	39 - 39	-5,499,980
Camera Digital	39 - 39	-4,950,000
Handy Cam	25 - 25	-8,910,000
Tripod	1 - 1	-1,540,000
Lemari Besi/Metal	35 - 42	-26,400,000
Filing Cabinet Besi	178 - 185	-17,600,000
Lemari Besi/Metal	43 - 50	-22,000,000
Kursi Besi/Metal	1042 - 1042	-5,500,000
Meja Kerja Kayu	764 - 782	-75,480,020
Kursi Besi/Metal	1043 - 1184	-204,490,000
Meja Rapat	42 - 45	-64,680,000
Total		-3,199,855,560

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Transfer Keluar atas Peralatan dan Mesin senilai Rp. 1.328.171.480,- terdapat pada:

1. Sekretariat

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(60)	(1,278,766,480)
	Box Camera	(1)	(6,000,000)
	A.C Sentral	(1)	(30,500,000)
	Vidio Conference	(1)	(259,105,980)
	PC Unit	(3)	(61,588,000)
	Lap Top	(29)	(672,007,000)
	Tablet PC	(6)	(118,338,000)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(14)	(65,282,000)
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	(4)	(58,713,000)
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	(1)	(7,232,500)

- **Ditransfer Direktorat PSKBA** senilai Rp. 24.034.000,- berdasarkan BASTB nomor: 74 / 3.1/PL.05/05/2020 tanggal 13 Mei 2020, senilai Rp. 111.650.000 berdasarkan BASTB No. 1507/3.1/PL.05.05/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan senilai Rp 30.500.000,- berdasarkan BASTB No. 1688/3.1/PL.05/09/2020 tanggal 16 September 2020, berdasarkan BASTB Nomor: 2230/3.1/PL.05.05/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 senilai Rp. 396.266.480,-

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	(18)	(562,450,480)
	Lap Top	(7)	(132,934,000)
	Printer	-1	(2,750,000)
	AC Senteral	-1	(30,500,000)
	Vidio Conference	-1	(259,105,980)
	Tablet PC	-6	(118,338,000)
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	-1	(7,232,500)
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-1	(11,590,000)

- **Direktorat PSKBS** senilai Rp. 110.249.000,- Transfer dari Sekretariat berdasarkan BASTB nomor 975 / 3.1/PL.05/6/2020 tanggal 04 Juni 2020 dan senilai Rp. 20.775.000,- berdasarkan BASTB Nomor: 1508/3.1/PL.05.05/08/2020

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440281			
	Direktorat PSKBS	3	131,024,000
	Lap Top	1	105,029,000
	P.C Unit	1	14,130,000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	11,865,000

- **Direktorat JAMSOSKEL** senilai Rp. 135.902.000,- berdasarkan BASTB No. 1549/3.1/PL.05.05/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, senilai Rp. 449.390.000,- berdasarkan BASTB Nomor: 2066/3.1/PL.05.05/11/2020 tanggal 10 November 2020.

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	(35)	(585,292,000)
	Lap Top	(17)	(434,044,000)
	P.C Unit	(2)	(47,458,000)
	Printer	(13)	(62,532,000)
	Box Camera	(1)	(6,000,000)
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-2	(35,258,000)

2. **Direktorat JAMSOSKEL**

ditransfer ke Sekretariat Berdasarkan BASTB Nomor:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310.000			
	Direktorat Jaminan Sosial	(2)	(49,405,000)
	Kamera Digital	(1)	(14,505,000)
	Lap Top	(1)	(34,900,000)

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi transfer keluar atas Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp715.611.280,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Uraian Akun	Transfer Keluar
1	027.06.418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN KE DIT PFM WIL I	Peralatan dan Mesin	190,992,100
2	027.06.418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN KE DIT PFM WIL II	Peralatan dan Mesin	365,519,180
3	027.06.418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN KE DIT PFM WIL III	Peralatan dan Mesin	159,100,000
TOTAL				715.611.280

REKLASIFIKASI KELUAR

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
Direktorat PSKBA		(1)	4,555,580,000
	Mobil Wakshop	(1)	4,555,580,000

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat Reklasifikasi Keluar pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan No. SK: 4189/6.1/KS.02/07/2020 nilai **Rp.37.817.175,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Reklas	Kode Barang	Nama Barang	Nilai
1.	22 Juli 2020	3090402031	Kamera Digital	Rp.37.817.175
Total				Rp.37.817.175

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat transaksi Reklasifikasi keluar atas peralatan dan mesin pada Sekretariat Badiklitpensos Senilai **Rp 1.575.186.000**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
SEKRETARIAT BADIKLITPENSOS		1	1.575.186.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1.575.186.000

HIBAH KELUAR

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat transaksi Hibah Keluar atas Peralatan dan Mesin dari Kementerian Sosial kepada Satker Dinas Sosial Kalimantan Tengah DK senilai **Rp. 5.500.000,-** tanggal 04 Mei 2020 Nomor: 58/HUK/2020, dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.14.149017			
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah DK		1	5.500.000
	Laptop	1	5.500.000

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi pengurangan nilai neraca Peralatan dan Mesin dengan transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSPDM “Margo Laras” Pati senilai Rp. (63.500.000,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus	-1	-63,500,000
JUMLAH	-1	-63,500,000

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Wasana Bahagia” Ternate senilai Rp. (239.408.915,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Bengkel & Alat Ukur	-2	-9,500,000
Komputer	-6	-72,772,800
Alat Kantor & Rumah Tangga	-25	-72,525,000
Alat Kedokteran & Kesehatan	-5	-9,614,975
Alat Peraga	-6	-56,925,000
Alat Laboratorium	-2	-11,000,000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	-20	-7,071,140
JUMLAH	-66	-239,408,915

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSPDM “Phalamarta” Sukabumi senilai Rp. (87.113.000,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-73	-62,863,000
Komputer	-1	-24,250,000
JUMLAH	-74	-87,113,000

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSPDSN “Wyata Guna” Bandung senilai Rp. (2.426.888.940,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat

dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	-42	-2,236,404,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	-494	-162,794,940
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	-12	-27,690,000
JUMLAH	-548	-2,426,888,940

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar senilai Rp. (425.404.000,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-320	-425,404,000
JUMLAH	-320	-425,404,000

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSEGP “Pangudi Luhur” Bekasi senilai Rp. (109.000.000,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Station Wagon	-1	-99,000,000
Sepeda Motor	-1	-10,000,000
Total	-2	-109,000,000

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSLU “Gau Mabaji” Makasar senilai Rp. (96.748.000,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkuta	-3	-96,748,000
Total	-3	-96,748,000

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Handayani” Jakarta senilai Rp. (1.880.571.465,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Portable Water Pump	-20	-6,530,500
Sepeda	-5	-2,050,000
Mesin Kompresor	-6	-8,547,000
Mesin Las Listrik	-2	-11,556,500
Mesin Gerinda Tangan	-1	-290,000
Mesin Bor Tangan	-2	-853,000
Riveting Machine	-3	-1,124,500
Mesin Gergaji Besi	-1	-13,750,000
Steam Cleaner	-1	-4,200,000
Peralatan Las Karbit	-2	-705,000
Peralatan Las Lainnya	-1	-1,980,000
Dongkrak Hidrolik	-1	-7,549,000
Tool Kit Box	-2	-3,776,000
Bor	-1	-498,300
Tanggem	-7	-3,075,950
Landasan Kenteng	-2	-460,000
Gunting Plat Tangan	-3	-2,121,000
Tang Kombinasi	-2	-312,000
Kunci Pas	-3	-1,480,000
Drei Biasa (Obeng)	-1	-4,404,000
Rol Meter	-1	-6,400,000
Mesin Bor Listrik Tangan	-2	-1,622,000
Mesin Gerinda tangan Listrik	-3	-4,332,400
Signal Generator Audio VHF, UHF	-2	-298,000
Test Intelegensia WPPS	-1	-1,861,000
Oscilloscope Main Frame	-2	-496,000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	-7	-3,185,000
Mesin Ketik Manual Langew agon (18-27 Inchi)	-7	-14,283,000
Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-2	-1,180,000
Lemari Besi/Metal	-4	-3,165,000
Lemari Kayu	-50	-47,926,000
Filing Cabinet Besi	-45	-33,276,000
Buffet	-2	-4,128,000
Tabung Pemadam Api	-3	-3,162,000
CCTV - Camera Control Television System	-2	-1,130,000
White Board	-21	-18,213,000
Overhead Projector	-3	-11,062,000
LCD Projector/Infocus	-1	-15,400,000
Perkakas Kantor Lainnya	-5	-10,279,000
Meja Kerja Kayu	-112	-49,648,000
Kursi Besi/Metal	-487	-121,146,800

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda Statis	-1	-335,000
Spray Gun	-2	-4,994,000
Spot Welding Machine	-1	-39,050,000
Fume/gas Leak Detector (Radiation Detector)	-1	-420,000
Vacuum Sampler	-1	-1,532,000
Mesin Mounting	-1	-2,437,500
P.C Unit	-47	-686,464,325
Lap Top	-5	-78,779,500
Note Book	-2	-24,145,000
Monitor	-1	-5,480,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-14	-55,708,090
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-1	-24,250,000
CD Writer	-1	-825,000
Peralatan Personal Komputer Lainnya	-1	-1,343,100
Router	-1	-2,200,000
Modem	-1	-1,450,000
Aid Hearing	-2	-17,793,000
Total	-1290	-1,880,571,465

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSLU "Budi Dharma" Bekasi senilai Rp. (982.614.044,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus	-1	-163,800,000
Alat Bengkel & Alat Ukur	-8	-28,160,000
Komputer	-13	-74,795,796
Alat Kantor & Rumah Tangga	-480	-712,888,248
Alat Kedokteran & Kesehatan	-2	-2,970,000
JUMLAH	-504	-982,614,044

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Insyaf" Medan senilai Rp. (290.181.574,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	-18	-220,075,504
Alat Kantor & Rumah Tangga	-13	-70,106,070
JUMLAH	-31	-290,181,574

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Antasena" Magelang senilai Rp. (678.092.400-), dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Transportable Water Pump	-1	-139,700
Stationary Water Pump	-1	-133,000
Gerobak Dorong	-3	-1,425,000
Mesin Bubut	-1	-10,095,500
Mesin Kompresor	-3	-18,091,350
Mesin Gerinda Tangan	-2	-30,600
Mesin Bor Tangan	-2	-408,200
Battery Charge	-1	-9,420,000
Solder Listrik	-1	-362,400
Mesin Spooling	-1	-20,899,900
Mesin Gergaji	-5	-14,515,300
Perkakas Bongkar/Pasang Ban	-1	-13,377,800
Peralatan Las Listrik	-3	-6,869,700
Peralatan Las Karbit	-1	-1,050,000
Dongkrak Mekanik	-2	-10,910,400
Dongkrak Hidrolik	-3	-37,576,300
Tool Kit Set	-2	-1,700,000
Tanggem	-3	-1,655,300
Kunci Pas	-5	-1,925,000
Drei Ketok (Obeng)	-5	-3,875,000
Patar	-2	-3,860,000
VTVM Volt	-2	-901,800
Independence Meter	-2	-1,296,400
Multitester & Accessorie	-5	-3,600,000
Mesin Ketik Manual Langew agon (18-27 Inci)	-1	-60,300
CCTV - Camera Control Television System	-1	-31,236,500
Perkakas Kantor Lainnya	-8	-6,100,000
Meja Kerja Kayu	-23	-3,793,600
Kursi Kayu	-50	-10,048,700
Sice	-9	-22,050,000
Meja Komputer	-19	-9,368,400
Tempat Tidur Kayu	-25	-9,819,500
Kasur/Spring Bed	-110	-60,225,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-2	-6,694,300
Mesin Pemotong Rumput	-1	-4,250,000
Mesin Cuci	-1	-17,564,600
A.C. Split	-2	-6,454,600
Kipas Angin	-8	-2,124,500
Kompore Listrik (Alat Dapur)	-1	-850,000
Oven Listrik	-1	-350,000
Treng Air/Tandon Air	-2	-700,000
Televisi	-12	-12,267,000

NAMA	QTY	NILAI
Amplifier	-1	-101,300
Loudspeaker	-8	-6,400,000
Megaphone	-1	-462,800
Microphone	-1	-1,000,000
Microphone Table Stand	-7	-28,175,000
Stabilisator	-3	-1,350,000
Camera Video	-1	-4,550,000
Dispenser	-2	-3,200,000
Gucci	-1	-1,834,400
Handy Cam	-1	-7,525,000
Karpet	-2	-1,900,000
Gordyin/Kray	-2	-3,874,700
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-2	-7,500,000
Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	-1	-310,000
Power Supply Microphone	-1	-531,800
Meja Editing Film	-1	-500,000
Mesin Cetak	-1	-1,600,000
Telephone (PABX)	-1	-11,300,000
Facsimile	-1	-371,400
Stethoscope (Alat Kedokteran Umum)	-2	-385,800
Blender	-1	-224,600
P.C Unit	-28	-165,759,500
Lap Top	-5	-46,667,600
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-5	-10,949,750
Router	-1	-2,200,000
Peralatan Jaringan Lainnya	-1	-1,343,100
Total	-414	-678,092,400

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram senilai Rp. (113.578.409,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-1	-33,090,909
Alat Angkutan	-7	-72,329,500
Komputer	-5	-8,518,000
JUMLAH	-13	-113,938,409

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BBRPDI "Nipotowe" Palu senilai Rp. (218.065.590,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Stationary Compressor	-1	-1,022,500
Mesin Gergaji	-2	-1,430,000
Lemari Kayu	-84	-61,236,000
Filing Cabinet Besi	-9	-2,250,000
Perkakas Kantor Lainnya	-3	-3,150,000
Meja Kerja Kayu	-4	-2,439,000
Kursi Besi/Metal	-117	-42,846,000
Meja Komputer	-3	-932,000
Kasur/Spring Bed	-70	-28,000,000
Rak Sepatu (Almunium)	-25	-8,000,000
Kipas Angin	-22	-18,307,000
Kompom Minyak	-3	-1,325,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	-1	-365,000
Kitchen Set	-4	-1,915,000
Mesin Giling Bumbu	-2	-650,000
Microphone	-1	-354,000
Mini Compo	-1	-1,294,500
Kursi Dorong	-1	-1,640,000
Urinal	-2	-526,000
Kompom Minyak Tanah (Alat Laboratorium Makanan)	-2	-1,000,000
Lap Top	-2	-23,980,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-7	-15,403,590
Total	-366	-218,065,950

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSPDM "Dharma Guna" Bengkulu senilai Rp. (509.592.500,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Gergaji	-2	-1,947,000
Mesin Penghalus	-2	-2,661,500
Peralatan Las Listrik	-1	-511,500
Lemari Kayu	-56	-72,939,000
Filing Cabinet Besi	-11	-14,517,000
Buffet	-4	-4,021,000
White Board	-10	-5,000,000
LCD Projector/Infocus	-1	-16,894,000
Meja Kerja Kayu	-26	-21,341,000
Kursi Besi/Metal	-53	-9,716,000
Sice	-7	-14,696,500
Bangku Panjang Kayu	-14	-5,524,000
Meja Rapat	-34	-31,727,000
Meja Komputer	-7	-5,679,000
Tempat Tidur Besi	-111	-99,780,000
Jam Elektronik	-2	-64,000
Kompor Gas (Alat Dapur)	-3	-2,149,000
Oven Listrik	-1	-540,000
Mesin Giling Bumbu	-2	-840,000
Treng Air/Tandon Air	-2	-986,000
Alat Pemanggang Roti/Sate	-2	-660,000
Rak Piring Aluminium	-4	-3,320,000
Televisi	-8	-18,863,000
Wireless	-1	-5,454,000
Camera Video	-1	-797,500
Tustel	-1	-3,220,000
Mesin Jahit	-13	-23,025,000
Dispenser	-2	-2,000,000
Handy Cam	-1	-4,000,000
Camera Digital	-2	-3,925,000
Handy Talky (HT)	-4	-7,000,000
Tensimeter	-2	-1,922,000
Gunting Lurus	-1	-288,000
Lemari Obat (Kaca)	-1	-1,044,000
Kursi Dorong	-1	-2,150,000
Standar Infus	-2	-1,762,000
Local Area Network (LAN)	-1	-700,000
P.C Unit	-3	-36,450,000
Lap Top	-3	-38,479,500
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-5	-10,624,000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-1	-24,250,000
External	-3	-4,125,000
NAMA	QTY	NILAI
Router	-1	-2,200,000
Netw are Interface External	-1	-900,000
Bola Kaki	-3	-900,000
Total	-416	-509,592,500

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BBRVBD Cibinong senilai Rp. (1.204.859.896-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-7	-1,204,859,896
Total	-7	-1,204,859,896

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi senilai Rp. (120.000.000,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Micro Bus	-2	-120,000,000
Total	-2	-120,000,000

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan (401) pada Satuan Kerja BRSPI "Ciung Wanara" Bogor senilai Rp. (149.951.000,-) dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda Motor	-2	-19,500,000
Mobil Ambulance	-1	-130,451,000
Total	-3	-149,951,000

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Penghentian aset dari penggunaan senilai Rp. 4.739.413.000,- terdapat pada:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(6)	(1,450,389,000)
	Sedan	(1)	(681,170,000)
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	(5)	(769,219,000)

Direktorat PSKBA

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	(13)	(3,289,024,000)
	Jeep	(12)	(3,259,144,000)
	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	(1)	(29,880,000)

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat transaksi Reklasifikasi keluar atas peralatan dan mesin pada BP3S Senilai Rp 2.396.258.710 yaitu pada Satker:

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Makasar		1	328.980.700
	Lemari Kayu	1	328.980.700
	Peta	1	2.450.000
	Overhead Projector	9	110.591.750
	Meja Kerja Kayu	5	1.991.000
	Meja Komputer	26	27.300.000
	Meja Makan Kayu	4	1.808.000
	A.C. Window	14	50.930.000
	Sound System	1	2.124.075
	Megaphone	1	160.000
	Camera Video	1	27.859.875
	Handy Cam	2	30.775.000
	Lap Top	3	63.800.000
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		1	69.820.000
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	69.820.000
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial		1	1.205.567.210
	Mesin Pompa air PMK	1	1.920.000
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3	3.960.000
	Lemari Besi/Metal	1	1.950.000
	Lemari Display	3	4.662.000
	Mesin Absensi	2	3.840.000
	LCD Projector/Infocus	4	15.144.000
	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	4	9.262.000
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	4.180.000
	Lemari Es	2	7.225.000
	A.C. Split	17	92.895.000
	Amplifier	1	18.928.800
	Loudspeaker	6	31.966.000
	Sound System	3	22.090.000
	Wireless	2	16.830.000
	Megaphone	1	816.000
	Microphone	2	792.000
	Mic Conference	15	44.605.000
	Camera Video	1	14.025.000
	Dispenser	1	2.225.250
	DVD Player	3	11.220.000
	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	1	1.375.000
	Audio Visual	1	12.351.100
	Camera Digital	8	44.338.200
	Telephone Mobile	1	7.338.100
	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	40	219.000.000
	Personal Computer	1	10.152.000
	Electric	2	38.830.000
	Software DAAS MOD	1	29.480.000
	Mini Komputer	1	9.500.000
	Internet	2	128.107.360
	P.C Unit	17	173.463.400
	Lap Top	24	183.285.800
	Hard Disk	1	1.920.000
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	5.000.000
	External/ Portable Hardis	4	4.307.600
	Router	3	14.992.600
	Switch	2	13.590.000
	Jet Pump	1	2.081.200
	Alat Tennis Meja	1	4.780.000

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Jayapura		242	703.603.919
	Rak Besi	1,	52.000,
	Rak Kayu	24,	15.840.000,
	Brandkas	1,	4.534.000,
	Papan Visual/Papan Nama	5,	3.750.000,
	White Board	8,	15.360.000,
	Overhead Projector	1,	33.600.000,
	LCD Projector/Infocus	7,	45.335.000,
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3,	24.800.000,
	Meja Kerja Kayu	13,	4.608.000,
	Kursi Besi/Metal	1,	205.000,
	Kursi Kayu	2,	436.000,
	Meja Rapat	1,	579.000,
	Kasur/Spring Bed	100,	30.000.000,
	Meja Makan Kayu	9,	6.478.000,
	Televisi	8,	29.340.000,
	Amplifier	2,	16.440.000,
	Loudspeaker	8,	90.000.000,
	Wireless	5,	25.836.000,
	Mic Conference	1,	63.662.000,
	Camera Video	3,	16.000.000,
	Gordyin/Kray	15,	7.500.000,
	Disc Record Player	1,	3.700.000,
	Microphone/Wireless MIC	3,	3.960.000,
	Microphone Cable	2,	3.250.000,
	Film Projector	1,	18.080.000,
	Layar Film/Projector	1,	11.000.000,
	TV Monitor	1,	6.000.000,
	Kamera Digital	2,	26.880.000,
	Local Area Network (LAN)	3,	6.000.000,
	Lap Top	2,	20.760.000,
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2,	32.115.000,
	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2,	6.000.000,
	Router	2,	30.985.000,
	Netware Interface External	2,	10.143.100,
	Camera Video	0,543	21.156.731,429
	Gordyin/Kray	0,261	22.114.880,357
	Disc Record Player	(0,021)	23.073.029,286
	Microphone/Wireless MIC	(0,304)	24.031.178,214

E.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 (*Audited*) sebesar Rp. 1.798.628.848.267,- dan 31 Desember 2020 (*Audited*) sebesar Rp. 2.136.028.516.570,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (*Audited*) sebesar Rp. 283,649,854,987,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 1.852.378.661.583,-

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan Tahunan Tahun 2020 (*Audited*) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 1.798.628.848.267
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 1.094.143.961
Transfer Masuk	Rp 58.942.408.426
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 4.249.578.431
Reklasifikasi Masuk	Rp 9.461.294.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 46.077.000
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp 8.002.889.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	Rp 1.811.619.689
Pengembangan Nilai Aset	Rp 23.518.553.781
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp 2.525.339.506
Pengembangan Melalui KDP	Rp 28.880.755.783
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp 5.491.652.996
Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp 365.984.500
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp 278.202.357.419
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi	
Keluar Hasil Inventarisasi	Rp 107.818.720
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp 354.586.000
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp 7.767.225.000
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	Rp 158.869.000
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp 3.364.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp (4.421.712.768)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	Rp (146.464.316)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp (5.649.412.534)
Koreksi BMN ditemukan Kembali	Rp (1.192.940.855)
Transfer Keluar	Rp (58.942.408.426)
Hibah (Keluar)	Rp (143.437.000)
Reklasifikasi keluar	Rp (9.461.294.000)
Koreksi Pencatatan	Rp (3.352.783.050)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp (195.532.000)
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp (6.863.329.960)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (3.215.534.000)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 2.136.028.516.570
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp (283.649.854.987)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 1.852.378.661.583

PEMBELIAN**(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Terdapat Transaksi Pembelian Gedung dan Bangunan pada Ditjen Pemberdayaan Sosial sebesar **Rp.838.847.171,-** terdiri dari :

Direktorat Kepahlawanan Keberintisan Kesetiakawanan dan restorasi Sosial

Terdapat Transaksi Pembelian Gedung dan Bangunan pada Direktorat

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebesar Rp.199.900.000,- berupa pembuatan taman area barat di TMPN Utama Kalibata dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
Direktorat Kepahlawanan,Keperintisan,Kesetiakwanan dan Restorasi Sosial		1	199.900.000
	Taman Area Barat	1	199.900.000

Terdapat Transaksi Pembelian Gedung dan Bangunan pada Direktorat Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebesar Rp.638.947.171,- berupa pembuatan Tugu peringatan lainnya di TMPN Utama Kalibata dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
Direktorat Kepahlawanan,Keperintisan,Kesetiakwanan dan Restorasi Sosial		2	638.947.171
	Dinding Ornamen Relief	1	592.819.764
	Tugu Kemensos Area	1	46.127.407

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- 1) Transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BBPPK Jayapura Pengadaan Aset Tetap jumlah barang 2 unit Berupa Bangunan Terbuka Lainnya dan Pengadaan 1 (satu) unit Tugu Pembangunan senilai Rp. 183.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu Pembangunan	1	124.500.000
JUMLAH	1	124.500.000

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Terbuka Lainnya	2	59.000.000
JUMLAH	2	59.000.000

- 2) Transaksi Pembelian (101) pada Satuan Kerja BBPPK Padang Pengadaan Aset Tetap jumlah barang 1 unit Berupa Bangunan Terbuka Lainnya senilai Rp. 71.796.790,- dengan rincian sebagai berikut

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	71.796.790
JUMLAH	1	71.796.790

TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Transfer Masuk (102) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1194/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pangurangi Takalar berupa Gedung dan Bangunan Rp. 31.872.285.741,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor. dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2,661,544,608
Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	337,023,555
Bangunan Kesehatan Lainnya	1	676,319,441
Bangunan Oceanarium	1	723,527,361
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1,297,226,714
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	5	3,461,737,459
Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	3,399,662,244
Gedung Pos Jaga Permanen	2	458,342,145
Gedung Garasi/Pool Permanen	1	150,221,035
Selasar	2	5,815,587,019
Bangunan Lainnya	7	2,573,638,683
Taman Permanen	1	153,483,126
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	699,411,358
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	5	2,379,540,903
Mess	1	382,354,273
Asrama Permanen	4	4,404,315,890
Pagar Permanen	1	2,298,349,927
TOTAL		31,872,285,741

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1195/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial ODHIV Pangurangi Takalar berupa Gedung dan Bangunan Rp.27.070.122.685,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2,938,333,478
Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	414,004,430
Bangunan Kesehatan Lainnya	1	666,846,411
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	778,964,737
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1,356,721,558
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4	3,679,585,439
Gedung Pos Jaga Permanen	1	343,132,697
Gedung Garasi/Pool Permanen	1	347,511,268
Selasar	2	5,215,376,250
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	641,257,905
Bangunan Lainnya	7	4,145,384,700
Taman Permanen	1	779,891,845
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	5	1,935,379,758
Mess	1	708,851,306
Asrama Permanen	3	2,496,105,408
Pagar Permanen	1	622,775,495
TOTAL		27,070,122,685

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105) sebesar Rp. 518.729.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi bangunan pada Satuan Kerja BRSLU "Budi Dharma" Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	518,729,000
Jumlah	1	518,729,000

- Terdapat transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105) sebesar Rp. 299.340.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi bangunan pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	299,340,000
Jumlah	1	299,340,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- 1) Transaksi Koreksi Penyelesaian Pembangunan KDP pada Satuan Kerja Poltekesos Bandung senilai Rp. 681.859.371,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gedung dan Bangunan	0	681.859.371
JUMLAH	0	681.859.371

- 2) Transaksi Koreksi Penyelesaian Pembangunan KDP pada Satuan Kerja BBPPKS Banjarmasin Pembangunan Pagar,Pos Satpam senilai Rp. 2.749.650.060,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	2.749.650.060
JUMLAH	0	2.749.650.060

REKLASIFIKASI MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk (107) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk (107) sebesar Rp. 857.380.000,- dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BRSAMPK Paramita Mataram dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	857,380,000
Jumlah	1	857,380,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk (107) sebesar Rp. 2.330.864.000,- dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BBRSBG "Kartini" Temanggung dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	2,330,864,000
Jumlah	1	2,330,864,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk (107) sebesar Rp. 3.623.145.000,- dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BRSAMPK "Hndayani" Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	3,623,145,000
Jumlah	1	3,623,145,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk (107) sebesar Rp. 1.638.265.000,- dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BRSEWTS “Mulya Jaya” Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	1,638,265,000
Jumlah	1	1,638,265,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk (107) sebesar Rp. 1.011.640.000,- dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BRSLU “Budhi Dharma” Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	1,011,640,000
Jumlah	1	1,011,640,000

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LANGSUNG

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA “Bambu Apus” Jakarta dikarenakan adanya rehabilitasi bangunan gedung senilai Rp. 46.077.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	46,077,000
JUMLAH	1	46,077,000

KOREKSI BARANG BERLEBIH HASIL INVENTARISASI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Wasana Bahagia” Ternate dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 5.102.709.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	20	5,102,709,000
JUMLAH	20	5,102,709,000

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130) pada Satuan Kerja BRSPDF "Wirajaya" Makasar dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 2.637.205.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	4	2,637,205,000
JUMLAH	4	2,637,205,000

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130) pada Satuan Kerja BRSLU "Gau Mabaji" Makasar dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BARIP-052/WKN.15/KNL.03/2020 senilai Rp. 241.188.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	241,188,000
JUMLAH	1	241,188,000

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130) pada Satuan Kerja BRAMPK "Paramita" Mataram dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 21.787.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	21,787,000
JUMLAH	1	21,787,000

REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Reklasifikasi Dari ASet Lainnya Ke Aset Tetap (177) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari ASet Lainnya Ke Aset Tetap (177) pada Satuan Kerja LRSODHIV "Kahuripan" Sukabumi senilai Rp. 41.871.689,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	41,871,689
JUMLAH	1	41,871,689

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari ASet Lainnya Ke Aset Tetap (177) pada Satuan Kerja BRSPDN "Wyata Guna" Bandung senilai Rp. 61.997.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	61,997,000
JUMLAH	1	61,997,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari ASet Lainnya Ke Aset Tetap (177) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai Rp. 99.984.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	95,591,000
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	4,393,000
JUMLAH	2	99,984,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari ASet Lainnya Ke Aset Tetap (177) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram senilai Rp. 1.607.767.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	6	1,607,767,000
JUMLAH	6	1,607,767,000

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pengembangan Nilai Aset pada Satker Setjen berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pengembangan Nilai Aset	Satker Setjen	0	Rp 18,672,327,000	
	TOTAL		0	18,672,327,000	

Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Gedung dan Bangunan Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Laporan Tahunan Tahun

2020 senilai Rp.18.672.327.000,- terdiri dari :

1. Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Pusat gedung A NUP.1) senilai Rp. 4.072.015.000,-.
2. Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Cawang Kencana NUP 10) senilai Rp.12.887.503.540,-.
3. Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Klinik/Puskesmas senilai Rp.371.717.000,-.
4. Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Gedung Pertemuan Permanen senilai Rp.193.386.000,-.
5. Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan Permanen (Gedung Pendidikan TTC Sentul) senilai Rp.450.811.000,-.
6. Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen senilai Rp.302.952.460,-.
7. Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Pagar Permanen (Kantor Pusat Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat) senilai Rp.393.942.000,-.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN			
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	16.959.518.540
4.01.01.06.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	0	371.717.000
4.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	0	193.386.000
4.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan Permanen	Unit	0	450.811.000
4.01.02.04.001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	0	302.952.460
4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	0	393.942.000
TOTAL				18.672.327.000

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat Transaksi Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp414.537.281 berupa:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
	Direktorat Kepahlawanan,Keperintisan,Kesetiakwaan dan Restorasi Sosial	4	414.537.281
	Pagar Permanen	1	79.593.268
	Gedung Pos Jaga Permanen	1	119.553.308
	Klinik dan Toilet	1	53.631.462
	Tempat Ibadah Permanen	1	161.759.243

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSPDM “Phalamarta” Sukabumi senilai Rp. 396.800.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	198,200,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	198,600,000
JUMLAH	0	396,800,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso Surakarta senilai Rp. 128.689.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	128,689,000
JUMLAH	0	128,689,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSEGP “Pangudi Luhur” Bekasi senilai Rp. 1.360.482.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	0	82,000,000
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	0	411,000,000
Asrama Permanen	0	867,482,000
JUMLAH	0	1,360,482,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja

BRSLU “Budi Dharma” Bekasi dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan senilai Rp. 127.671.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pagar Permanen	0	127,671,000
JUMLAH	0	127,671,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSPSDN “Tumotou” Manado senilai Rp. 168.817.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	44,317,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	124,500,000
JUMLAH	0	168,817,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Antasena” Magelang senilai Rp. 59.823.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	59,823,000
JUMLAH	0	59,823,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Alyatama” Jambi senilai Rp. 54.900.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	54,900,000
JUMLAH	0	54,900,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Naibonat” Kupang senilai Rp. 499.350.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	99,900,000
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0	199,800,000
Tugu	0	199,650,000
JUMLAH	0	499,350,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi senilai Rp. 751.185.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	751,185,000
JUMLAH	0	751,185,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSPDI "Ciung Wanara" Bogor senilai Rp. 248.541.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	248,541,000
JUMLAH	0	248,541,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Toddopuli" Makasar senilai Rp. 37.000.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	37,000,000
JUMLAH	0	37,000,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- 1) Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BBPPKS Bandung dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 70.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	70.000.000
JUMLAH	0	70.000.000

- 2) Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BBPPKS Padang dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 68.834.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	68.834.000
JUMLAH	0	68.834.000

- 3) Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BBPPKS Banjarmasin dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 114.647.500,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	114.647.500
JUMLAH	0	114.647.500

- 4) Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset (202) pada Satuan Kerja BBPPKS Jayapura dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 199.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	199.800.000
JUMLAH	0	199.800.000

- 5) **Politekesos Bandung dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 145.150.000,- dengan rincian sebagai berikut:**

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	145.150.000
JUMLAH	0	145.150.000

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Pencatatan	Satker Setjen		Rp (11,000,000)	
	TOTAL		0	-Rp 11,000,000	

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	Rp (11,000,000)	
TOTAL		0		

Adanya Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas pada Gedung dan Bangunan Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Laporan Tahunan Tahun 2020 senilai **Rp.11.000.000,-** (Pengembalian/ Penyetoran TLHP BPK TH 2019 pada Gedung dan Bagunan Kantor Pusat NUP.1)

Dari Jumlah Gedung dan Bangunan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	189	459.706.204.744
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204) dikarenakan terdapat temuan pemeriksaan atas pengembalian belanja modal pada Satuan Kerja BRSLU "Gau Mabaji" Makasar senilai (Rp. 222.197.470,-) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-222,197,470
JUMLAH	0	-222,197,470

- Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204) dikarenakan terdapat temuan pemeriksaan pada Satuan Kerja LRSODHIV "Pangurangi" Takalar dikarenakan adanya pengembalian belanja modal pada Satker Sekretariat Ditjen Rehsos yang asetnya sudah dilakukan serah terima senilai (Rp. 1.229.631.834,-) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-1,229,631,834
JUMLAH	0	-1,229,631,834

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat Transaksi Koreksi Pencatatan Kuantitas pada Satuan Kerja BBPPKS Bandung dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 45.611.424,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	45.611.424
JUMLAH	0	45.611.424

Karena ada temuan itjen di tahun 2019 yang menambah nilai Gedung Asrama Flamboyan NUP 7

Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204) pada Satuan Kerja BBPPKS Banjarmasin senilai Rp. (2.903.986.831),- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-2.903.986.831
JUMLAH	0	-2.903.986.831

Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204) pada Satuan Kerja BBPPKS Makasar senilai Rp. (100.508.057),- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-100.508.057
JUMLAH	0	-100.508.057

PENERIMAAN ASET TETAP RENOVASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Penerimaan ATR	Satker Setjen		1,424,773,506	
TOTAL			0	Rp 1,424,773,506	

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Rp 1,225,073,506	
2	Rumah Negara Gol. I tipe D permanen		Rp 199,700,000	
TOTAL		0	1,424,773,506	

Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Gedung dan Bangunan senilai Rp.1.424.773.506,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 7, lokasi RPTC Bambu Apus dari SETDITJEN Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp.36.090.000,- Nomor BAST : 2244/4.1/PL.02/11/2020, Tanggal 02 Nopember 2020.
- b. Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung D Kantor Pusat) dari Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp.197.395.000,- Nomor BAST : 2017/3.4/PL.02/11/2020, Tanggal 17 Nopember 2020.
- c. Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) dari SETDITJEN Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp.239.500.000,- Nomor BAST : 2229/3.1/PL.05.05/12/2020, Tanggal 08 Desember 2020.
- d. Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung D Kantor Pusat) dari Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp.198.220.000,- Nomor BAST : 2025/3.4/PL.02/12/2020, Tanggal 30 Desember 2020.
- e. Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) dari SETDITJEN Penangan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI senilai Rp. 174,940,000,- Nomor BAST : 6309/6.1/PL.05.02/12/2020, Tanggal 30 Desember 2020.
- f. Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Rumah Negara Golongan I Type D Permanen NO.68 Jl.PPA Bambu Apus dari SETDITJEN Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp. 199,700,000,- Nomor BAST : 2661/4.1/PL.02/12/2020, Tanggal 31 Desember 2020
- g. Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) dari SETDITJEN Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp. 378.928.506,- Nomor BAST : 2661/4.1/PL.02.12.2020, Tanggal 31 Desember 2020

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Pemberdayaan Sosial sebesar *Rp.717.696.000,-* terdiri dari :

Direktorat Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan restorasi Sosial

Terdapat Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi *rehab Wisma*

Bina Harapan dari Satker Biro Umum pada Satker Direktorat Kepahlawanan Keberintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebesar Rp.717.696.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
Direktorat Kepahlawanan,Keperintisan,Kesetiakwanan dan Restorasi Sosial		-	717.696.000
	Aset Tetap Renovasi	-	717.696.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206) pada Satuan Kerja LRSODHIV “Kahuripan” Sukabumi Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2662/4.1/PL.02/12/2020 terdapat Transfer Keluar (302) berupa serah terima pekerjaan rehabilitasi pagar keliling & gudang dan rehabilitasi gedung guest house yang bangunan gedung tersebut dimiliki oleh Satker LRSODHIV “Kahuripan” Sukabumi RI senilai Rp. 280.000.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	227,274,500
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	52,725,500
JUMLAH	0	280,000,000

- Terdapat transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206) pada Satuan Kerja BRSEWTS “Mulya Jaya” Jakarta Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2660/4.1/PL.02/12/2020 terdapat Transfer Keluar (302) berupa serah terima pekerjaan rehabilitasi pagar keliling & gudang dan rehabilitasi gedung guest house yang bangunan gedung tersebut dimiliki oleh Satker BRSEWTS “Mulya Jaya” Jakarta senilai Rp. 102.870.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	102,870,000
JUMLAH	0	102,870,000

PENGEMBANGAN MELALUI KDP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Bambu Apus" Jakarta senilai Rp. 3.660.434.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	3,660,434,000
JUMLAH	0	3,660,434,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSPDM "Phalamarta" Sukabumi senilai Rp. 381.600.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	381,600,000
JUMLAH	0	381,600,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Mahatmiya" Bali senilai Rp. 527.687.517,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	527,687,517
JUMLAH	0	527,687,517

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSLU "Gau Mabaji" Makasar senilai Rp. 1.205.842.504,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,205,842,504
JUMLAH	0	1,205,842,504

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Handayani" Jakarta senilai Rp. 2.737.786.498,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu/Tanda Batas	0	213,582,000
Bangunan Gedung	0	2,524,204,498
JUMLAH	0	2,737,786,498

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSLU "Budi Dharma" Bekasi senilai Rp. 213.497.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	213,497,000
JUMLAH	0	213,497,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSPDN "Tumotou" Manado senilai Rp. 1.224.629.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,224,629,000
JUMLAH	0	1,224,629,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSAMPK "NAibonat" Kupang senilai Rp. 1.405.456.500,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,405,456,500
JUMLAH	0	1,405,456,500

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi senilai Rp. 1.667.268.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,149,050,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	518,218,000
JUMLAH	0	1,667,268,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSPDM "Budi Luhur" Banjar Baru senilai Rp. 794.450.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	794,450,000
JUMLAH	0	794,450,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSPDM “Dharma Guna” Bengkulu senilai Rp. 813.616.230,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	813,616,230
JUMLAH	0	813,616,230

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Toddopuli” Makasar senilai Rp. 763.000.000,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	763,000,000
JUMLAH	0	763,000,000

- Terdapat transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) atas pengakuan utang pada pihak ketiga atas rehabilitasi gedung graha atensi yang telah dilakukan verifikasi atas utang oleh Tim Internal Kontrol pada Satuan Kerja BRSEWTS “Mulya Jaya” Jakarta senilai Rp. 1.159.057.668,- dikarenakan adanya rehabilitasi / pengembangan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1.159.057.668
JUMLAH	0	1.159.057.668

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- 1) Transaksi Pengembangan Melalui KDP pada Satuan Kerja BBPPKS Bandung dikarenakan renovasi Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen senilai Rp. 7.052.718.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	7.052.718.000
JUMLAH	0	7.052.718.000

- 2) Transaksi Pengembangan Melalui KDP pada Satuan Kerja BBPPKS Bandung senilai Rp.5.273.712.866,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	5.273.712.866
JUMLAH	0	5.273.712.866

KOREKSI SEMU HASIL PENILAIAN KEMBALI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) pada Dinas Sosial Provinsi D.I YOGYAKARTA senilai Rp. 3.800.800,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	2.392.800
Monumen	0	1.408.000
JUMLAH	0	3.800.800

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) pada Dinas Sosial Provinsi MALUKU senilai Rp. 46.213.560,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	46.213.560
JUMLAH	0	46.213.560

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Wasana Bahagia” Ternate senilai Rp. 2.925.038.343,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	2,925,038,343
JUMLAH	0	2,925,038,343

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar senilai Rp. 2.368.797.982,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	2,368,797,982
JUMLAH	0	2,368,797,982

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Rumbai” Pekanbaru senilai Rp. 111.381.840,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas

BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	111,381,840
JUMLAH	0	111,381,840

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai Rp. 28.599.191,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	23,726,644
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	4,872,547
JUMLAH	0	28,599,191

(11) BADIKLITPENSOS

Poltekesos Bandung berupa Gedung dan Bangunan Rp. 7.821.280

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	7.821.280
JUMLAH	0	7.821.280

KOREKSI PENILAIAN KEMBALI BMN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (224) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (224) pada Satuan Kerja BRSLU "Gau Mabaji" Makasar senilai Rp. 351.675.429,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BARIP-052/WKN.15/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	351,675,429
JUMLAH	0	351,675,429

- Terdapat transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (224) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tumotou" Manado senilai Rp. 14.309.071,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	14,309,071
JUMLAH	0	14,309,071

KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Biro Umum Sekretariat Jenderal senilai Rp. 7.126.982.591,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1.544.432.000
Tugu Titik Kontrol	0	5.582.550.591
JUMLAH	0	7.126.982.591

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT senilai (Rp. 19.358.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-3.790.000
Monumen	0	-15.568.000
JUMLAH	0	-19.358.000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH senilai Rp. 830.864.972,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	830.864.972
JUMLAH	0	830.864.972

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT senilai (Rp. 148.671.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	20.654.000
Tugu Titik Kontrol	0	-169.325.000
JUMLAH	0	-148.671.000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWASI TENGGARA senilai Rp. 8.621.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Monumen	0	8.621.000
JUMLAH	0	8.621.000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL senilai Rp. 237.815.567.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	239.655.275.000
Monumen	0	-1.082.003.000
Tugu Titik Kontrol	0	-757.705.000
JUMLAH	0	237.815.567.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM “Margo Laras” Pati senilai (Rp. 1.395.097.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-1,040,368,000
Tugu Titik Kontrol	0	-354,729,000
JUMLAH	0	-1,395,097,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA “Satria” Baturaden senilai Rp. 171.535.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-038/REV/WKN.09/KNL.08/2020 dengan

rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	258,711,000
Tugu Titik Kontrol	0	-87,176,000
JUMLAH	0	171,535,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSODHIV "Bahagia" Medan senilai Rp. 9.948.246.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	9,957,678,000
Tugu Titik Kontrol	0	-9,432,000
JUMLAH	0	9,948,246,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSODHIV "Wasana Bahagia" Ternate senilai (Rp. 707.044.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-650,028,000
Tugu Titik Kontrol	0	-57,016,000
JUMLAH	0	-707,044,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM "Phalamarta" Sukabumi senilai Rp. 2.264.992.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,107,505,000
Tugu Titik Kontrol	0	1,157,487,000
JUMLAH	0	2,264,992,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Wyata Guna" Bandung senilai Rp. 1.793.811.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,793,811,000
JUMLAH	0	1,793,811,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso Surakarta senilai Rp. 2.169.661.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR IP-036/REV/WKN.09/KNL.02/2020 dengan

rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	2,666,240,000
Tugu Titik Kontrol	0	-496,579,000
JUMLAH	0	2,169,661,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBRSBG “Kartini” Temanggung senilai (Rp. 20.161.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR -0570/REV/WKN.09/KNL.01/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-20,161,000
JUMLAH	0	-20,161,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDF “Budi Perkasa” Palembang senilai (Rp. 2.275.599.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BARIP -070/REV/WKN.09/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-2,275,599,000
JUMLAH	0	-2,275,599,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar senilai Rp. 569.261.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	399,658,000
Tugu Titik Kontrol	0	169,603,000
JUMLAH	0	569,261,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDN “Mahatmiya” Bali senilai Rp. 142.505.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu Titik Kontrol	0	142,505,000
JUMLAH	0	142,505,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSLU “Gau Mabaji” Makasar senilai (Rp. 1.420.377.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN

berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BARIP -052/REV/WKN.09/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-1,237,715,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-182,662,000
JUMLAH	0	-1,420,377,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Insyaf" Medan senilai Rp. 6.579.095.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	6,889,798,000
Tugu Titik Kontrol	0	-310,703,000
JUMLAH	0	6,579,095,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Antasena" Magelang senilai (Rp. 1.091.109.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-1,091,109,000
JUMLAH	0	-1,091,109,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai (Rp. 193.509.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	40,750,000
Tugu Titik Kpntrol / Pasti	0	-234,259,000
JUMLAH	0	-193,509,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja Direktorat RTS&KPO senilai Rp. 1.064.809.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BARIP -486/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,064,809,000
JUMLAH	0	1,064,809,000

- BRSAMPK "Paramita" Mataram senilai Rp. 259.968.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,273,107,000
Tugu Titik Kpntrol / Pasti	0	-1,013,139,000
JUMLAH	0	259,968,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDI "Ciung Wanara" Bogor senilai (Rp. 2.900.482.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-014/REV/WKN.08/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-2,808,496,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-91,986,000
JUMLAH	0	-2,900,482,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDI "Nipotowe" Palu senilai Rp. 2.465.275.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-117/REV/WKN.16/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	2,465,275,000
JUMLAH	0	2,465,275,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM "Dharma Guna" Bengkulu senilai Rp. 2.511.596.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-128/REV/WKN.05/KNL.01/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	3,266,076,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-754,480,000
JUMLAH	0	2,511,596,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDPDRW "Efata" Kupang senilai Rp. 7.719.858.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -023/REV/WKN.14/KNL.05/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	7,819,734,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-99,876,000
JUMLAH	0	7,719,858,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Toddopuli" Makasar senilai (Rp. 5.044.560.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -397/REV/WKN.15/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-5,012,475,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-32,085,000
JUMLAH	0	-5,044,560,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehsos senilai (Rp. 13.960.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -057/REV/WKN.07/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-13.960.000
JUMLAH	0	-13.960.000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja LRSAMPK "Darusaadah" Aceh senilai Rp. 6.096.091.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -0880/REV/WKN.01/KNL.01/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	6,096,091,000
JUMLAH	0	6,096,091,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja LRSPDSRW "Meohai" Kendari senilai (Rp. 2.596.288.144,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-2.577.024.144
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-19.264.000
JUMLAH	0	-2.596.288.144

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan

Kerja LRSLU "Minaula" Kendari senilai Rp. 1.030.685.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	105,546,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	925,139,000
JUMLAH	0	1,030,685,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BLBI "Abiyoso" Cimahi senilai Rp. 1.601.449.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP - 540/REV/WKN.08/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1.601.449.000
JUMLAH	0	1.601.449.000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBPPKS Yogyakarta senilai Rp. (104.095.000),- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	-347.065.000
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	242.970.000
	0	-104.095.000

Transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBPPKS Yogyakarta senilai Rp. (1.088.852.000),- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	-1.257.718.000
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	168.866.000
	0	-1.088.852.000

Transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBPPKS Padang senilai Rp. 2.571.851.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	2.602.249.000
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	-30.398.000
	0	2.571.851.000

Transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBPPKS Makasar senilai Rp. (344.473.000),- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	-344.473.000
	0	-344.473.000

Transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBPPKS Jayapura senilai Rp. (153.860.000).- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	-40.917.000
Monumen	0	-62.646.000
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	-50.297.000
	0	-153.860.000

Poltekesos berupa Gedung dan Bangunan Rp. 2.977.129.000

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	2.977.129.000
JUMLAH	0	2.977.129.000

KOREKSI HASIL REVALUASI ATAS BMN REKLASIFIKASI KELUAR

Poltekesos Bandung berupa Gedung dan Bangunan Rp. 107.818.720

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	107.818.720
JUMLAH	0	107.818.720

KOREKSI SEMU HASIL KOREKSI HASIL REVALUASI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi (226) pada DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL senilai (Rp. 137.215.739,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-137.215.739
JUMLAH	0	-137.215.739

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi

Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi (226) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi (226) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tumotou" Manado senilai (Rp.6.652.071,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP - 407/REV/WKN.16/KNL.01/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-6,652,071
JUMLAH	0	-6,652,071

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi (226) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai (Rp. 2.596.506,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-2,596,506
JUMLAH	0	-2,596,506

KOREKSI HASIL REVALUASI ATAS BMN YANG TIDAK DITEMUKAN

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Terdapat transaksi Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) pada DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA senilai Rp. 5.230.200,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	737.200
Monumen	0	4.493.000
JUMLAH	0	5.230.200

- Terdapat transaksi Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) pada DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU senilai (Rp. 145.889.560,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-145.889.560
JUMLAH	0	-145.889.560

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi

Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) pada Satuan Kerja BRSODHIV "Wasana Bahagia" Ternate senilai (Rp.3.367.777.158,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-3,367,777,158
JUMLAH	0	-3,367,777,158

- Terdapat transaksi Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) pada Satuan Kerja BRSPDF "Wirajaya" Makasar senilai (Rp1.908.219.094,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-1,908,219,094
JUMLAH	0	-1,908,219,094

- Terdapat transaksi Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Rumbai" Pekanbaru senilai (Rp.177.486.840,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-177,486,840
JUMLAH	0	-177,486,840

- Terdapat transaksi Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai (Rp.55.270.082,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	39,338,096
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-94,608,178
JUMLAH	0	-55,270,082

KOREKSI BMN DITEMUKAN KEMBALI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Terdapat transaksi Koreksi BMN Ditemukan Kembali (237) pada DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL senilai (Rp. 1.203.963.361,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-1.203.963.361
JUMLAH	0	-1.203.963.361

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi BMN Ditemukan Kembali (237) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi BMN Ditemukan Kembali (237) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Naibonat” Kupang senilai Rp. 11.022.506,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	11,022,506
JUMLAH	0	11,022,506

KOREKSI BARANG BERLEBIH AKIBAT KOREKSI PENILAIAN KEMBALI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) pada Satuan Kerja BRSPDF “Budi Perkasa” Palembang senilai (Rp. 25.932.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP - 070/REV/WKN.04/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-25,932,000
JUMLAH	0	-25,932,000

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Antasena” Magelang senilai (Rp. 137.835.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-137,835,000
JUMLAH	0	-137,835,000

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram senilai (Rp. 49.155.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-49,155,000
JUMLAH	0	-49,155,000

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) pada Satuan Kerja BRSPDI "Nipotowe" Palu senilai Rp.44.987.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP - 117/REV/WKN.16/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	44,987,000
JUMLAH	0	44,987,000

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) pada Satuan Kerja BLBI "Abiyoso" Cimahi senilai Rp.522.521.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -540/REV/WKN.08/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu Titik Kontrol	0	522.521.000
JUMLAH	0	522.521.000

KOREKSI EKUITAS AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Revaluasi	Satker Setjen		10,244,211,000	UnAudited
2	Koreksi Revaluasi	Satker Setjen		6,586,969,000	Audited 2020

❖ Adanya Audited di Satker Sekretariat Jenderal Sebesar Rp. 3.657.242.000

akibat "KELEBIHAN CATAT atas Nilai Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (247);

- ❖ Koreksi ini terdapat pada Bangunan Gedung Kantor Permanen Nup. 1 (Gedung A Utama Salemba Raya);
- ❖ Perubahan Koreksi Pada Nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen Semula Rp. 4.446.930.000,- (UnAudited 2020) dikoreksi menjadi Rp.789.688.000,- (Audited 2020).

NO	GEDUNG DAN BANGUNAN	10.244.211.000
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	789.688.000
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	19.842.000
3	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	741.000
4	Bangunan Kesehatan Lainnya	53.124.000
5	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	35.742.000
6	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	251.272.000
7	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya	-995.000
8	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	-292.640.000
9	Gedung Pos Jaga Permanen	9.566.000
10	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	-6.476.000
11	Bangunan Terbuka Lainnya	868.596.000
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	362.445.000
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	-38.366.000
14	Bangunan Lainnya	60.024.000
15	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-172.018.000
16	Bangunan Parkir Lainnya	99.911.000
17	Taman Permanen	562.527.000
18	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	-216.218.000
19	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	8.457.000
20	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	12.015.000
21	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	102.766.000
22	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	30.965.000
23	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	160.042.000
24	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	147.678.000
25	Asrama Permanen	2.193.849.000
26	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1.070.490.000
27	Pagar Permanen	486.983.000
28	Pagar Lainnya	-13.041.000

Penjelasan Kode Transaksi pada Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi Un Audited 2020

SATKER SEKJEN

247 – KOREKSI EKUITAS AKIBAT KOREKSI REVALUASI

GEDUNG BANGUNAN = 10.244.211.000
 JALAN DAN JEMBATAN = -5.102.851.000
 IRIGASI = 729.265.000
TOTAL = 5.870.625.000

SATKER BIRO UMUM

225 – KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

GEDUNG BANGUNAN = 7.126.982.591
 JALAN DAN JEMBATAN = -5.102.851.000
 IRIGASI = 729.265.000

334 – KOREKSI PENGHAPUSAN AKIBAT KOREKSI REVALUASI

GEDUNG BANGUNAN = -7.126.982.591
 JALAN DAN JEMBATAN = 5.102.851.000
 IRIGASI = -729.265.000

ADA PERBEDAAN KARENA SUDAH ADA PENGEMBANGAN ASET SETELAH REVALUASI TAHUN 2017

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (247) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (247) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA “Bambu Apus” Jakarta senilai Rp.1.180.256.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP - 045/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	1,180,256,000
JUMLAH	0	1,180,256,000

TRANSFER KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Transfer Keluar (302) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1194/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Pangurangi” Takalar berupa Gedung dan Bangunan (Rp. 31.872.285.741,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-1	-2,661,544,608
Bangunan Gedung Tertutup Permanen	-1	-337,023,555
Bangunan Kesehatan Lainnya	-1	676,319,441
Bangunan Oceanarium	-1	-723,527,361
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-1	-1,297,226,714
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-5	-3,461,737,459
Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	-1	-3,399,662,244
Gedung Pos Jaga Permanen	-2	-458,342,145
Gedung Garasi/Pool Permanen	-1	-150,221,035
Selasar	-2	-5,815,587,019
Bangunan Lainnya	-7	-2,573,638,683
Taman Permanen	-1	-153,483,126
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-1	-699,411,358
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	-5	-2,379,540,903
Mess	-1	-382,354,273
Asrama Permanen	-4	-4,404,315,890
Pagar Permanen	-1	-2,298,349,927
TOTAL		-31,872,285,741

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1195/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (102) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial ODHIV "Pangurangi" Takalar berupa Gedung dan Bangunan (Rp. 27.070.122.685,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-1	-2,938,333,478
Bangunan Gedung Tertutup Permanen	-1	-414,004,430
Bangunan Kesehatan Lainnya	-1	-666,846,411
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	-1	-778,964,737
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-1	-1,356,721,558
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-4	-3,679,585,439
Gedung Pos Jaga Permanen	-1	-343,132,697
Gedung Garasi/Pool Permanen	-1	-347,511,268
Selasar	-2	-5,215,376,250
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	-1	-641,257,905
Bangunan Lainnya	-7	-4,145,384,700
Taman Permanen	-1	-779,891,845
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	-5	-1,935,379,758
Mess	-1	-708,851,306
Asrama Permanen	-3	-2,496,105,408
Pagar Permanen	-1	-622,775,495
TOTAL		-27,070,122,685

HIBAH (KELUAR)

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat Transaksi Hibah Keluar Pada Diten Pemberdayaan Sosial sebesar *Rp.143.437.000,-* terdiri dari :

Satker Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah TP berupa Gedung dan Bangunan Sebesar *Rp.143.437.000,-* Tanggal Hibah **05 05 2020** Nomor:/HUK/2020

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.03.039161			
	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah TP		
	Gedung dan Bangunan	0	(143.437.000)
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	(143.437.000)

REKLASIFIKASI KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Reklasifikasi Keluar (304) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar (304) sebesar (Rp. 857.380.000,-) dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-1	-857,380,000
Jumlah	1	-857,380,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar (304) sebesar (Rp. 2.330.864.000,-) dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BBRISBG "Kartini" Temanggung dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	-2,330,864,000
Jumlah	1	-2,330,864,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar (304) sebesar (Rp. 3.623.145.000,-) dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BRSAMPK "Handayani" Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-2	-3,623,145,000
Jumlah	2	-3,623,145,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar (304) sebesar (Rp. 1.011.640.000,-) dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BRSLU "Budi Dharma" Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-1	-1,011,640,000
Jumlah	-1	-1,011,640,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar (304) sebesar (Rp. 1.638.265.000,-) dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja BRSEWTS "Mulya Jaya" Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-4	-1,638,265,000
Jumlah	-4	-1,638,265,000

KOREKSI PENCATATAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Pencatatan (305) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan (305) sebesar (Rp. 86.247.000,-) dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja LRSAMPK "Darusaadah" Aceh dikarenakan tindak lanjut hasil review itjen atas Barang Tidak Ditemukan Hasil Revaluasi penilaian kembali BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-1	-86,247,000
Jumlah	-1	-86,247,000

- Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan (305) sebesar (Rp. 2.386.338.050,-) dikarenakan adanya ahli fungsi aset pada Satuan Kerja LRLU "Minaula" Kendari dikarenakan tindak lanjut hasil review itjen atas Barang Tidak Ditemukan Hasil Revaluasi penilaian kembali BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-1	-2,386,338,050
Jumlah	-1	-2,386,338,050

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Transaksi Koreksi Pencatatan (305) pada Satuan Kerja Poltekesos Bandung senilai Rp. (880.198.000).- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	3	-880.198.000
	3	-880.198.000

REKLASIFIKASI KELUAR HASIL INVENTARISASI

Poltekesos Bandung berupa Gedung dan Bangunan (Rp. 195.532.000)

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	-195.532.000
JUMLAH	0	-195.532.000

KOREKSI BEBAN KERUGIAN PENGHAPUSAN AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Beban Kerugian Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi (333) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Beban Kerugian Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi (333) pada Satuan Kerja BRSPDF "Wirajaya" Makasar senilai Rp.158.869.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	158,869,000
JUMLAH	0	158,869,000

KOREKSI EKUITAS AKIBAT KOREKSI REVALUASI (334)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Biro Umum Sekretariat Jenderal senilai (Rp. 7.126.982.591,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-5.582.550.591
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-1.544.432.000
JUMLAH	0	-7.126.982.591

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Dinas Sosial Provinsi D.I Yogyakarta senilai (Rp. 9.031.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-3.130.000
Monumen	0	-5.901.000
JUMLAH	0	-9.031.000

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku senilai Rp. 99.676.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	99.676.000
JUMLAH	0	99.676.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Satuan Kerja BRSPDM “Phalamarta” Sukabumi senilai Rp. 91.303.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	129,185,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-37,882,000
JUMLAH	0	91,303,000

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA “Insyaf” Medan senilai Rp. 8.386.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	8,386,000
JUMLAH	0	8,386,000

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Naibonat” Kupang senilai Rp. 45.689.631,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas

BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-44,046,000
Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	89,735,631
JUMLAH	0	45,689,631

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat transaksi Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Satuan Kerja BBPPKS Yogyakarta dikarenakan revaluasi penilaian kembali atas BMN senilai Rp. 27.629.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	27.629.000
JUMLAH	0	27.629.000

KOREKSI REKLASIFIKASI KELUAR AKIBAT KOREKSI PENILAIAN KEMBALI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali (335) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi oreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali (335) pada Satuan Kerja BRSAMPK "PAramita" Mataram senilai Rp. 3.364.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	3,364,000
JUMLAH	0	3,364,000

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Gedung dan Bangunan dengan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) sebesar (Rp.3.215.534.000,-) dikarenakan aset tersebut dalam kondisi rusak berat pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-12	-3,215,534,000
Jumlah	-12	-3,215,534,000

E.2.2.4 Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan adalah Jalan dan Jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Perolehan Jalan dan Jembatan pada Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 46,551,709,875,-* dan *31 Desember 2020 (Audited)* sebesar *Rp. 38,577,401,375,-* Akumulasi Penyusutan per *31 Desember 2020 (Audited)* sebesar *Rp. 20,624,769,791,-* sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar *Rp. 17,952,631,584,-*.

Mutasi/perubahan Jalan dan Jembatan Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 46.551.709.875
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	Rp 3.179.622.150
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	Rp 72.464.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp 93.906.000
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp 5.094.828.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp (6.424.753.000)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	Rp (24.310.097)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp (44.612.000)
Koreksi BMN ditemukan Kembali	Rp (354.056.403)
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp (5.102.851.000)
Transfer Keluar	Rp (3.179.622.150)
Koreksi Pencatatan	Rp (1.284.924.000)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 38.577.401.375
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp (20.624.769.791)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 17.952.631.584

TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Jalan dan Jembatan dengan transaksi Transfer Masuk (102) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1194/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA "Pangurangi" Takalar berupa Gedung dan Bangunan Rp. 3.179.622.150,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	1	3,179,622,150
Total	1	3,179,622,150

KOREKSI BARANG BERLEBIH HASIL INVENTARISASI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Jalan dan Jembatan dengan transaksi Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130) pada Satuan Kerja BRSODHIV "Wasana Bahagia" Ternate senilai Rp.72.464.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	150	72,464,000
JUMLAH	150	72,464,000

KOREKSI SEMU HASIL PENILAIAN KEMBALI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Jalan dan Jembatan dengan transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) pada Satuan Kerja BRSODHIV "Wasana Bahagia" Ternate senilai Rp. 93.906.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas

BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	93,906,000
JUMLAH	0	93,906,000

KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Kesalahan Input IP pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Revaluasi	Satker Setjen		- 5.102.851.000	
TOTAL			0	-Rp 5.102.851.000	

NO	JALAN DAN JEMBATAN	-5.102.851.000
1	Jalan Khusus Kompleks	-4.968.666.000
2	Jalan Khusus Lainnya	-134.185.000

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
027030199440213000KP			
	Direktorat Kepahlawanan,Keperinintisan,Kepahlawanan dan Restorasi Sosial		
	Koreksi Kesalahan Input IUP	Jalan dan Jembatan	(3.080.670.000)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Jalan dan Jembatan dengan transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM "Margo Laras" Pati senilai (Rp. 13.438.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-13,438,000
JUMLAH	0	-13,438,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Satria" Baturaden senilai (Rp. 28.014.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -038/REV/WKN.09/KNL.08/2020

dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-28,014,000
JUMLAH	0	-28,014,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Bahagia” Medan senilai (Rp. 18.765.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-18,765,000
JUMLAH	0	-18,765,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Wasana Bahagia” Ternate senilai Rp. 35.334.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	35,334,000
JUMLAH	0	35,334,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM “Phalamarta” Sukabumi senilai Rp. 7.525.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	7,525,000
JUMLAH	0	7,525,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDSN “Wyata Guna” Bandung senilai (Rp. 4.138.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-4,138,000
JUMLAH	0	-4,138,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso Surakarta senilai (Rp. 131.942.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -69/REV/WKN.09/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-131,942,000
JUMLAH	0	-131,942,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBRSBG "Kartini" Temanggung senilai (Rp. 36.920.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-36,920,000
JUMLAH	0	-36,920,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDF "Wirajaya" Makasar senilai Rp. 221.451.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	221,451,000
JUMLAH	0	221,451,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDN "Mahatmiya" Bali senilai Rp. 3.029.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	3,029,000
JUMLAH	0	3,029,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSLU "Gau Mabaji" Makasar senilai (Rp. 45.223.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -052/REV/WKN.15/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-45,223,000
JUMLAH	0	-45,223,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSEWTS "Mulya Jaya" Jakarta senilai Rp. 90.216.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -509/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	90,216,000
JUMLAH	0	90,216,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Insyaf" Medan senilai Rp. 430.292.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	430,292,000
JUMLAH	0	430,292,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Antasena" Magelang senilai Rp. 13.921.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	13,921,000
JUMLAH	0	13,921,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram senilai Rp. 141.577.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	141,577,000
JUMLAH	0	141,577,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDI "Ciung Wanara" Bogor senilai (Rp. 37.816.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -014/REV/WKN.08/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-37,816,000
JUMLAH	0	-37,816,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDI "Nipotowe" Palu senilai Rp. 423.255.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -117/REV/WKN.16/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	423,255,000
JUMLAH	0	423,255,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM “Dharma Guna” Bengkulu senilai Rp. 77.100.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	77,100,000
JUMLAH	0	77,100,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDSRW “Efata” Kupang senilai Rp. 104.836.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -023/REV/WKN.14/KNL.05/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	104,836,000
JUMLAH	0	104,836,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Toddopuli” Makasar senilai Rp. 90.042.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -397/REV/WKN.15/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	90,042,000
JUMLAH	0	90,042,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja LRSAMPK “Darusaadah” Aceh senilai Rp. 10.291.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -0880/REV/WKN.01/KNL.01/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	10,291,000
JUMLAH	0	10,291,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja LRSPDSRW “Meohai” Kendari senilai (Rp. 363.540.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian

Kembali BMN Nomor : BAR-IP -0880/REV/WKN.01/KNL.01/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-363,540,000
JUMLAH	0	-363,540,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BLBI “Abiyoso” Cimahi senilai Rp. 17.257.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -539/REV/WKN.08/KNL.01/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	17.257.000
JUMLAH	0	17.257.000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- BBPPKS Yogyakarta senilai Rp. 633.803.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Jalan Khusus Komplek	3.440	633.803.000
	3.440	633.803.000

- (BBPPKS) Padang Senilai Rp. 150.304.000

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Jembatan Lainnya	1	150.304.000
	1	150.304.000

- (BBPPKS) Jayapura Senilai Rp. 12.387.000

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Jalan Khusus Kompleks	1	12.387.000
	1	12.387.000

Terjadi mutasi kurang dikarenakan adanya koreksi kesalahan input IP pada satker:

- BBPPKS Yogyakarta senilai Rp. (24.686.000),- dengan rincian sebagai berikut

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Jalan Khusus Kompleks	0	-24.686.000
	0	-24.686.000

KOREKSI SEMU HASIL KOREKSI HASIL REVALUASI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
027030199440213000KP			
	Direktorat Kepahlawanan,Keperinintisan,Kepahlawanan dan Restorasi Sosial		
	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi	Jalan dan Jembatan	(24.310.097)

KOREKSI HASIL REVALUASI ATAS BMN YANG TIDAK DITEMUKAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Jalan dan Jembatan dengan transaksi Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Wasana Bahagia” Ternate senilai (Rp.44.612.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-44,612,000
JUMLAH	0	-44,612,000

KOREKSI BMN DITEMUKAN KEMBALI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
027030199440213000KP			
	Direktorat Kepahlawanan,Keperinintisan,Kepahlawanan dan Restorasi Sosial		
	Koreksi BMN ditemukan Kembali	Jalan dan Jembatan	(354.056.403)

KOREKSI EKUITAS AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Revaluasi	Satker Setjen		- 5.102.851.000	
	TOTAL		0	-Rp 5.102.851.000	

NO	JALAN DAN JEMBATAN	-5.102.851.000
1	Jalan Khusus Kompleks	-4.968.666.000

2	Jalan Khusus Lainnya	-134.185.000
<u>TRANSFER KELUAR</u>		

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan terdapat mutasi kurang pada **Jalan dan Jembatan** 31 Desember 2020 dengan transaksi Transfer Keluar (302) dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 1194/4.1/PL.02/06/2020 terdapat serah terima aset Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pangurangi Takalar berupa Gedung dan Bangunan (Rp. 3.179.622.150,-) untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	-1	-3,179,622,150
Total	-1	-3,179,622,150

KOREKSI PENCATATAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Jalan dan Jembatan dengan transaksi Koreksi Pencatatan (305) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan (305) pada Satuan Kerja BRSPDF "Budi Perkasa" Palembang senilai (Rp. 1.284.924.000,-) dikarenakan adanya tindak lanjut hasil riview Tim Itjen atas barang tidak ditemukan hasil revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-1,284,924,000
JUMLAH	0	-1,284,924,000

KOREKSI EKUITAS AKIBAT KOREKSI REVALUASI (334)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Revaluasi	Satker Setjen		5.102.851.000	
TOTAL			0	Rp 5.102.851.000	

NO	JALAN DAN JEMBATAN	5.102.851.000
1	Jalan Khusus Kompleks	4.968.666.000
2	Jalan Khusus Lainnya	134.185.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Jalan dan Jembatan dengan transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Satuan Kerja BRSPDM "Phalamarta" Sukabumi senilai (Rp. 8.023.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan & Jembatan	0	-8,023,000
JUMLAH	0	-8,023,000

E.2.2.5 Irigasi

Irigasi adalah Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Perolehan Irigasi pada Kementerian Sosial RI per per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 38.341,743,268,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 48.180,245,628,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 11,735,735,770,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 36,444,509,858,-.

Mutasi/perubahan Irigasi Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 38.341.743.268
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 197.500.000
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp 195.532.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 412.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp 380.150.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp 46.068.862
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp 9.963.344.000
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp 729.265.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp (70.467.600)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	Rp (85.811.060)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp (44.556.944)
Koreksi BMN ditemukan Kembali	Rp (74.594.340)
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp (227.622.000)
Koreksi Pencatatan	Rp (318.913.000)
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp (851.804.558)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 48.180.245.628
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audit	Rp (11.735.735.770)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 36.444.509.858

PEMBELIAN

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
027.03.440213			
Direktorat K2KRS			
	Pembelian	Bangunan Air	197.500.000

REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP

Poltekesos Bandung senilai Rp 195.532.000

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Bangunan Penguat tebing/pantai	6	195.532.000
	6	195.532.000

REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Irigasi dengan transaksi Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke ASet Tetap (177) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Reklasifikasi Dari ASet Lainnya Ke ASet Tetap (177) sebesar Rp. 412.000,- pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	2	412,000
Total	2	412,000

PENGEMBANGAN MELALUI KDP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Irigasi dengan transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Pengembangan Melalui KDP (208) sebesar Rp.380.150.000,- pada Satuan Kerja BRSLU “Gau Mabaji” Makasar dikarenakan adanya rehabilitasi atau pengembangan irigasi, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	380,150,000
Total	0	380,150,000

KOREKSI SEMU HASIL PENILAIAN KEMBALI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
Dinas Sosial Provinsi Jogjakarta			
	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Bangunan Air	1.490.700
Dinas Sosial Sulawesi Tengah			
	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Bangunan Air	8.498.782

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Irigasi dengan transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Naibonat” Kupang senilai Rp. 36.079.380,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	36,079,380
JUMLAH	0	36,079,380

KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	IRIGASI	729.265.000
1	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	66.779.000
2	Bangunan Pengeluaran/Pintu	61.778.000
3	Saluran Penyimpan Air	-427.096.000
4	Saluran Pengumpul Air	-23.208.000
5	Saluran Drainage	867.065.000
6	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	130.554.000
7	Sumur Artetis	-10.702.000
8	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	30.567.000
9	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	4.088.000
10	Bangunan Penampung Air Baku	-37.872.000
11	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	-4.607.000
12	Saluran Pengumpul Air Hujan	-54.391.000
13	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	172.311.000
14	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	-132.871.000
15	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	86.870.000

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
027.03.440213			
	Direktorat K2KRS		
	Koreksi Kesalahan IP	Bangunan Air	1.064.547.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Irigasi dengan transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM "Margo Laras" Pati senilai (Rp. 965.296.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-965,296,000
JUMLAH	0	-965,296,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Satria" Baturaden senilai (Rp. 15.748.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -038/REV/WKN.09/KNL.08/2020

dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-15,748,000
JUMLAH	0	-15,748,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Bahagia” Medan senilai Rp. 12.404.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	12,404,000
JUMLAH	0	12,404,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Wasana Bahagia” Ternate senilai Rp. 34.185.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	34,185,000
JUMLAH	0	34,185,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM “Phalamarta” Sukabumi senilai Rp. 111.646.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	111,646,000
JUMLAH	0	111,646,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDSN “Wyata Guna” Bandung senilai (Rp. 61.231.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-61,231,000
JUMLAH	0	-61,231,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso Sukarta senilai Rp. 144.575.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -069/REV/WKN.09/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	144,575,000
JUMLAH	0	144,575,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDF “Budi Perkasa” Palembang senilai (Rp. 105.427.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-105,427,000
JUMLAH	0	-105,427,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar senilai Rp. 924.976.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	924,976,000
JUMLAH	0	924,976,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDSN “Mahatmiya” Bali senilai Rp. 326.679.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	326,679,000
JUMLAH	0	326,679,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSLU “Gau Mabaji” Makasar senilai (Rp. 134.193.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -052/REV/WKN.15/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-134,193,000
JUMLAH	0	-134,193,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSEWTS “Mulya Jaya” Jakarta senilai (Rp. 32.969.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -509/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-32,969,000
JUMLAH	0	-32,969,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Insyaf" Medan senilai (Rp. 1.924.401.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-1,924,401,000
JUMLAH	0	-1,924,401,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Antasena" Magelang senilai Rp. 97.853.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	97,853,000
JUMLAH	0	97,853,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai Rp. 465.005.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	465,005,000
JUMLAH	0	465,005,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja Direktorat RTS & KPO senilai Rp. 3.533.721.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -486/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	3,533,721,000
JUMLAH	0	3,533,721,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram senilai Rp. 732.443.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	732,443,000
JUMLAH	0	732,443,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDI “Nipotowe” Palu senilai Rp. 111.634.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -117/REV/WKN.16/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	111,634,000
JUMLAH	0	111,634,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDM “Dharma Guna” Bengkulu senilai Rp. 598.711.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	598,711,000
JUMLAH	0	598,711,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSPDSRW “Efata” Kupang senilai Rp. 589.621.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -023/REV/WKN.14/KNL.05/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	589,621,000
JUMLAH	0	589,621,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Toddopuli” Makasar senilai Rp. 56.015.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -397/REV/WKN.15/KNL.02/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	56,015,000
JUMLAH	0	56,015,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehsos senilai (Rp. 82.906.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -057/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-82.906.000
JUMLAH	0	-82.906.000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja LRSAMPK "Darusaadah" Aceh senilai (Rp. 26.484.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Nomor : BAR-IP -0880/REV/WKN.01/KNL.01/2020 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-26,484,000
JUMLAH	0	-26,484,000

- Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (225) pada Satuan Kerja LRSPDSRW "Meohai" Kendari senilai Rp. 12.211.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	12,211,000
JUMLAH	0	12,211,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Berdasarkan data tersebut terjadi mutasi kurang dikarenakan adanya koreksi kesalahan input IP pada bidang bangunan air pada satker:

- BBPPKS Jayapura senilai Rp 3.502.488.000

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Bak Penyimpanan / Tower Air Baku	6	3.502.488.000
	6	3.502.488.000

- BBPPKS Padang senilai Rp 288.484.000

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Bak Penampungan/Kolam/Menara Penampungan	4	288.484.000
	4	288.484.000

- BBPPKS Yogyakarta senilai Rp (2.040.000)

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	2	-2.040.000
	2	-2.040.000

- BBPPKS Yogyakarta senilai Rp (457.000)

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Saluran Penyimpanan Air	1	-457.000
	1	-457.000

Poltekesos Bandung senilai Rp (21.967.000)

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
	0	-21.967.000
Sumur Artesis		-36.472.000
Bangunan menara bak penampung		14.505.000

KOREKSI PENILAIAN KEMBALI BMN

(11) BADIKLITPENSOS

Poltekesos Bandung senilai Rp (70.467.600)

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	1	-70.467.600
	1	-70.467.600

KOREKSI SEMU HASIL KOREKSI HASIL REVALUASI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
027.03.440213			
Direktorat K2KRS			
	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi	Bangunan Air	(19.020.410)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Irigasi dengan transaksi Koreksi Semu Hasil Koreksi hasil Revaluasi (226) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Koreksi hasil Revaluasi (226) pada Satuan Kerja BRSPDF "Wirajaya" Makasar senilai (Rp. 412.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-412,000
JUMLAH	0	-412,000

- Terdapat transaksi Koreksi Semu Hasil Koreksi hasil Revaluasi (226) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai (Rp. 27.272.250,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-27.272.250
JUMLAH	0	-27.272.250

(11) BADIKLITPENSOS

Poltekesos Bandung senilai Rp (39.106.400)

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Gedung dan Bangunan	0	-39.106.400
JUMLAH	0	-39.106.400

KOREKSI HASIL REVALUASI ATAS BMN YG TIDAK DITEMUKAN

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
Dinas Sosial Provinsi Jogjakarta			
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang Tidak Ditemukan	Bangunan Air	1.989.300
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah			
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang Tidak Ditemukan	Bangunan Air	28.096.776

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Irigasi dengan transaksi Koreksi hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai (Rp.74.643.020,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-74,643,020
JUMLAH	0	-74,643,020

KOREKSI BMN DITEMUKAN KEMBALI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
027.03.440213			
Direktorat K2KRS			
	Koreksi BMN ditemukan Kembali	Bangunan Air	19.651.410

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca *Irigasi* dengan transaksi *Koreksi BMN Ditemukan Kembali* (237) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi BMN Ditemukan Kembali (237) pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar senilai Rp. 6.320.000,- dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	6,320,000
JUMLAH	0	6,320,000

- Terdapat transaksi Koreksi BMN Ditemukan Kembali (237) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Naibonat” Kupang senilai (Rp. 100.565.750,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-100,565,750
JUMLAH	0	-100,565,750

KOREKSI BARANG BERLEBIH AKIBAT KOREKSI PENILAIAN KEMBALI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Irigasi dengan transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Paramita” Mataram senilai (Rp. 227.622.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-227.622.000
JUMLAH	0	-227.622.000

KOREKSI EKUITAS AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	IRIGASI	729.265.000
1	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	66.779.000
2	Bangunan Pengeluaran/Pintu	61.778.000
3	Saluran Penyimpan Air	-427.096.000
4	Saluran Pengumpul Air	-23.208.000
5	Saluran Drainage	867.065.000
6	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	130.554.000

7	Sumur Artetis	-10.702.000
8	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	30.567.000
9	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	4.088.000
10	Bangunan Penampung Air Baku	-37.872.000
11	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	-4.607.000
12	Saluran Pengumpul Air Hujan	-54.391.000
13	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	172.311.000
14	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	-132.871.000
15	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	86.870.000

KOREKSI PENCATATAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Irigasi dengan transaksi Koreksi Pencatatan (305) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan (305) pada Satuan Kerja BRSPDI "Kartini" Temanggung senilai (Rp. 9.950.000,-) dikarenakan adanya tindak lanjut hasil review atas barang tidak ditemukan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-9,950,000
JUMLAH	0	-9,950,000

- Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan (305) pada Satuan Kerja BRSPDF "Budi Perkasa" Palembang senilai (Rp. 308.963.000,-) dikarenakan adanya tindak lanjut hasil review atas barang tidak ditemukan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-308,963,000
JUMLAH	0	-308,963,000

KOREKSI EKUITAS AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	IRIGASI	-729.265.000
1	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	66.779.000
2	Bangunan Pengeluaran/Pintu	61.778.000
3	Saluran Penyimpan Air	-427.096.000
4	Saluran Pengumpul Air	-23.208.000
5	Saluran Drainage	867.065.000

6	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	130.554.000
7	Sumur Artetis	-10.702.000
8	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	30.567.000
9	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	4.088.000
10	Bangunan Penampung Air Baku	-37.872.000
11	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	-4.607.000
12	Saluran Pengumpul Air Hujan	-54.391.000
13	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	172.311.000
14	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	-132.871.000
15	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	86.870.000

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Bidang	Nilai
Dinas Sosial Provinsi Jogjakarta			
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang Tidak Ditemukan	Bangunan Air	(3.480.000)
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah			
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang Tidak Ditemukan	Bangunan Air	(36.595.558)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Irigasi dengan transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) pada Satuan Kerja BRSPM "Phalamarta" Sukabumi senilai (Rp. 82.464.000,-) dikarenakan adanya revaluasi penilaian kembali atas BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	0	-82,464,000
JUMLAH	0	-82,464,000

E.2.2.6 Jaringan

Jaringan adalah Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Perolehan Jaringan pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 17,770,229,691,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 18,070,416,055,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 8,129,331,637,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 9,941,084,418,-.

Mutasi/perubahan Jaringan Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 17.770.229.691
Mutasi Tambah :	
Pengembangan Nilai Aset	Rp 340.650.000
Mutasi Kurang :	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp (40.463.636)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 18.070.416.055
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp (8.129.331.637)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 9.941.084.418

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Aset Jaringan pada Satker Sekretariat Jenderal senilai Rp.340.650.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengembangan Nilai Aset pada Aset Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KV A senilai Rp.197.989.000,-
- b. Pengembangan Nilai Aset pada Aset Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang senilai Rp.142.661.000,-

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAANNYA

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- BBPPKS Jayapura senilai Rp.(40.463.636),- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	5	-40.463.636
	5	-40.463.636

E.2.2.7 Aset Tetap Dalam Renovasi

Aset Tetap dalam Renovasi adalah Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L;**
- 2. Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;**
- 3. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan**

Nilai Perolehan aset tetap dalam renovasi pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 7,153,651,140,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 7,700,598,492,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 0,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 7,700,598,492,-.

Mutasi/perubahan Aset Tetap dalam Renovasi Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 7.153.651.140
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 3.235.339.506
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp (163.052.648)
Transfer Keluar	Rp (2.525.339.506)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 7.700.598.492
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited)	
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 7.700.598.492

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat pembelian pada Satker Setjen berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pembelian	Satker Setjen	4	Rp 717.696.000	
	TOTAL		4	717.696.000	

Adanya Pembelian Aset Tetap Dalam Renovasi Gedung dan Bangunan pada Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Laporan Tahunan Tahun 2020 senilai Rp.717.696.000,-.

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca Aset Tetap Dalam Renovasi dengan transaksi Pembelian (101) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Pembelian (101) pada Satker Sekretariat Ditjen Rehsos sebesar Rp. 997.588.506,- dikarenakan adanya rehabilitasi / restorasi atas bangunan gedung kantor yang dimiliki oleh Satuan Kerja lain berupa Aset Tetap Dalam Renovasi untuk membantu pelaksanaan

tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tetap Dalam Renovasi	11	997,588,506
Total	11	997,588,506

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	239,500,000
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2	239,500,000

Direktorat JAMSOSKEL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	2	395,615,000
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2	395,615,000

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Adanya Renovasi Ruang Kerja Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan nilai aset tetap dalam renovasi Rp174.940.000, telah dilakukan transfer keluar ke Biro Umum dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 6308 /6.1/PL.0512/2020

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

berupa Pembelian sebesar Rp. 710.000.000,- pada Aset Tetap dalam Renovasi.

Berdasarkan data tersebut terjadi mutasi yang disebabkan oleh :

- Sekretariat Badiklitpensos senilai Rp.710.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Sekretariat Badiklitpensos	4	710.000.000
Terdapat pembelian / pengadaan asset tetap renovasi pada gedung cawang kaca	4	710.000.000

Terdapat pembelian / pengadaan asset tetap renovasi pada gedung cawang kaca milik biro umum berupa renovasi di ruangan sekretariat.

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (204)

Pada Satker Sekretariat Badiklitpensos sebesar Rp (163.052.648)

Mutasi kurang berupa koreksi nilai aset dengan nilai sebesar Rp. (163.052.648),-

- Sekretariat Badiklitpensos

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)
Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	- 163.052.648

TRANSFER KELUAR

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Transfer Keluar pada Satker Setjen berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Transfer Keluar	Satker Setjen	4	Rp 717,696,000	
TOTAL			4	717,696,000	

Adanya Transfer Keluar Aset Tetap Dalam Renovasi Gedung dan Bangunan dari Satker Sekretariat Jenderal pada Satker Direktorat K2KRS pada Laporan Tahunan Tahun 2020 senilai **Rp.717.696.000,-**. Dengan BAST BMN Nomor : 2458/1.5/PL.04/11/2020 tanggal 02 Nopember 2020.

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca *Aset Tetap Dalam Renovasi* dengan transaksi Transfer Keluar (302) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2244/4.1/PL.02/11/2020 terdapat Transfer Keluar (302) berupa serah terima pekerjaan Wastafel di RPTC Bambu Apus yang bangunan gedung tersebut dimiliki oleh Satker Biro Umum Kementerian Sosial RI senilai Rp. 36.090.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2660/4.1/PL.02/12/2020 terdapat Transfer Keluar (302) berupa serah terima pekerjaan penambahan daya listrik yang bangunan gedung tersebut dimiliki oleh Satker BRSEWTS "Mulya Jaya" Jakarta senilai Rp. 102.870.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2661/4.1/PL.02/12/2020 terdapat Transfer Keluar (302) berupa serah terima pekerjaan rehabilitasi ruangan Dit LU, Dit KPNAPZA, ruangan menyusui dan rehabilitasi wisma bambu apus yang bangunan gedung

tersebut dimiliki oleh Satker Biro Umum Kementerian Sosial RI senilai Rp. 578.628.506,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 2662/4.1/PL.02/12/2020 terdapat Transfer Keluar (302) berupa serah terima pekerjaan rehabilitasi pagar keliling & gudang dan rehabilitasi gedung guest house yang bangunan gedung tersebut dimiliki oleh Satker LRSODHIV "Kahuripan" Sukabumi RI senilai Rp. 280.000.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tetap Dalam Renovasi	-11	-997,588,506
Total	-11	-997,588,506

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Ditransfer ke Sekretariat Jenderal berdasarkan BASTB Nomor: 2229/3.1/PL05.05/12/2020 tanggal 8 Desember 2020

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(2)	(239.500.000)
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	(2)	(239.500.000)

Direktorat JAMSOSKEL

Ditransfer ke Sekretariat Jenderal berdasarkan BASTB Nomor: 2017/3.4/PL.02/11/2020 tanggal 17 November 2020 senilai Rp. 197.395.000,- dan BASTB Nomor: 2025/3.4/PL.02/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 senilai (Rp. 198.320.000,-)

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	2	(395.615.000)
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2	(395.615.000)

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Adanya Renovasi Ruang Kerja Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan nilai aset tetap dalam renovasi Rp174.940.000,00 telah dilakukan transfer keluar ke Biro Umum dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 6308 /6.1/PL.0512/2020

E.2.2.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 14.836,358,922,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 15.117,486,622,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 3.565,799,913,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 11.551,686,709,-.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 14.836.358.922
Mutasi Tambah :	
Koreksi Saldo Awal	Rp 345.000.000
Pembelian	Rp 191.876.400
Mutasi Kurang :	
Transfer Keluar	
Penghapusan	Rp (60.995.750)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (194.752.950)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 15.117.486.622
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Aud)	Rp (3.565.799.913)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 11.551.686.709

KOREKSI SALDO AWAL

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

BBPPKS Banjarmasin sebanyak 40 buah Senilai Rp. 345.000.000,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
BBPPKS Banjarmasin			
1	Alat Musik Modern/Band	40	345.000.000
TOTAL		40	345.000.000

PEMBELIAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Aset Tetap Lainnya dengan transaksi Pembelian (101) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Pembelian (101) berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.34.800.000,- pada Satuan Kerja BRSPDSN "Wyata Guna" Bandung untuk kebutuhan operasional perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	3	34,800,000
Total	3	34,800,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.997.400,- pada Satuan Kerja BRSPDF "Wirajaya" Makasar untuk kebutuhan operasional perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bahan Perpustakaan	13	9,997,400
Total	13	9,997,400

- Adanya transaksi Pembelian (101) berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.44.625.000,- pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi untuk kebutuhan operasional perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	5	44,625,000
Total	5	44,625,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

1. Poltekesos Bandung sebanyak 13 buah Senilai Rp.25.474.000,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Politeknik Kesejahteraan Sosial			
1	Buku lainnya	13	25.474.000
TOTAL			25.474.000

2. BBPPKS Padang sebanyak 1 buah Senilai Rp.48.000.000,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
BBPPKS Padang			
1	Ukiran dan Lukisan Lainnya	1	48.000.000
TOTAL			48.000.000

3. Pusediklatkesos sebanyak 50 buah Senilai Rp.28.980.000,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
Pusediklat Kesos			
1	Lukisan Cat Minyak	50	28.980.000
TOTAL			28.980.000

PENGHAPUSAN

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

URAIAN JENIS	JUMLAH	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
Penghapusan	342	60.995.750	0
Jumlah	342	60.995.750	0

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Aset Tetap Lainnya dengan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) berupa Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp. 3.548.000,-) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Handayani" Jakarta dikarenakan aset tersebut sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Monografi	-105	-3,513,000
Atlas	-1	-35,000
Total	-105	-3,548,000

- Adanya transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) berupa Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp. 48.497.500,-) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Antasena" Magelang dikarenakan aset tersebut sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Musik Modern/Band	-11	-47,997,500
Maket/Miniatur/Replika	-1	-500,000
Jumlah	-12	-48,497,500

- Adanya transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) berupa Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp. 34.325.950,-) pada Satuan Kerja BRSPDM "Dharma Guna" Bengkulu dikarenakan aset tersebut sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Monografi	-746	-32,365,950
Alat Musik Modern Band	-1	-1,800,000
Foto Dokumen	-4	-160,000
Jumlah	-751	-34,325,950

- Adanya transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) berupa Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp. 45.000.000,-) pada Satuan Kerja

BRSLU “Budi Dharma” Bekasi dikarenakan aset tersebut sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bahan Perpustakaan	-20	-45,000,000
Jumlah	-20	-45,000,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

BBPPKS Jayapura sebanyak 34 buah Senilai Rp.(63.381.500),-

SATKER/NO	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
BBPPKS Jayapura			
1	Slide	2	(30.000.000)
2	Alat Musik Modern/Band	7	(21.081.500)
3	Alat Peraga Kesenian Lainnya	25	(12.300.000)
TOTAL		34	(63.381.500)

E.2.2.9 Software

Nilai Perolehan Software Kementerian Sosial RI per dan 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 98,151,352,706,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 105,124,509,186,- Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 92,904,110,647,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 12,220,398,539,-.

Mutasi/perubahan Software Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 98.151.352.706
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 1.882.264.980
Hibah (Masuk)	Rp 615.118.000
Reklasifikasi Masuk	
Pengembangan Nilai Aset	Rp 967.667.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp 3.906.100.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp (5.000.000)
Penghapusan	Rp (156.475.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaannya	Rp (236.518.500)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 105.124.509.186
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp (92.904.110.647)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 12.220.398.539

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pembelian di **Satker Setjen dan Satker Pusdatin** berupa:

- 1) Adanya Pembelian Software pada **Satker Sekretariat Jenderal** Kementerian Sosial pada Laporan Tahunan Tahun 2020 senilai **Rp.119.500.000,-**.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		ASET TAK BERWUJUD	
KODE	URAIAN	KUANTIT AS	NILAI
1	2	4	5
162151	SOFTWARE		
8.01.01.01.001	Software Komputer	2	119.500.000
TOTAL			119.500.000

- 2) Adanya Pembelian Software di **Satker Pusdatin** pada Laporan Tahunan 2020 senilai **Rp. 605.091.680,-**

No	Uraian Kontrak	Nilai
1	Pembelian Software Application Adobe Suite dan Corel Draw	100,728,680
2	Pembelian Aplikasi Bitrix24	191,950,000
3	Pembayaran Sub Domain Kemsos.go.id Globalsign Wildcard Organization SSL	7,590,000
4	Pembuatan Website Balai Loka dan UPT TA 2020	96,000,000
5	Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPP Nomor 00642	198,825,000
6	Pembayaran Pembelian Software Final Cut Pro Pada Mac Apple Store	4,999,000
7	Pembayaran Pembelian Software Final Cut Pro Pada Mac Apple Store	4,999,000
Jumlah		605,091,680

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Software dengan transaksi Pembelian (101) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Software sebesar Rp.48.636.300,- pada Satuan Kerja BLBI "Abiyoso" Cimahi dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	4	48,636,300
Total	4	48,636,300

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	426,640,000
	Software Komputer	3	426,640,000

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi pembelian atas Software pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp99.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

SETDITJEN PFM		
URAIAN PEMBELIAN ASET TAK BERWUJUD	KUAN	TOTAL
Aplikasi Sistem Informasi Verifikasi dan Validasi	1	99,000,000
TOTAL	1	99,000,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Terdapat transaksi Pembelian atas software pada BP3S senilai Rp. 654.577.450,- pada satker:

• Sekretariat Badiklit Pensos

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Sekretariat Badiklitpensos		1	192.750.000
	Software Komputer	1	192.750.000

• Poltekesos Bandung

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Poltekesos Bandung		1	248.100.000
	Software Komputer	1	248.100.000

• BBPPKS Bandung

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS BANDUNG		1	102.547.000
	Software Komputer	1	102.547.000

• BBPPKS Jayapura

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS JAYAPURA		1	40.000.000
	Software Komputer	1	40.000.000

HIBAH (MASUK)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Software dengan transaksi Hibah Masuk

(103) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Hibah Masuk (103) dari Siloam berupa Software sebesar Rp.615.118.000,- pada Satuan Kerja BLBI "Abiyoso" Cimahi dikarenakan aset tersebut tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	615,118,000
Total	1	615,118,000

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pengembangan Nilai Aset di **Satker Pusdatin** berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Software	0	Rp 681.230.000	Satker Setjen
	TOTAL	0	Rp 681.230.000	

No	Uraian Kontrak	Nilai Realisasi
1	Pembayaran Aplikasi Digiwork dengan Pengembangan Bitrix	484.000.000
2	Pengembangan Aplikasi Assesment and Development	98.780.000
3	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	98.450.000
	Jumlah	681.230.000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- Poltekesos Bandung Rp. 286.437.000

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Poltekesos Bandung		0	286.437.000
	Software Komputer	0	286.437.000

Pengembangan aplikasi PMB dan software computer 164.802.000 dan 97.515.000 dan software komputer 24.120.000

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Nilai/Kuantitas di **Satker Pusdatin** berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Software		Rp (5.000.000)	
	TOTAL	0	-Rp 5.000.000	

Mutasi kurang akibat Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu berupa Pembuatan Aplikasi Media Informasi (Kode Asset 8010101001, NUP 235) senilai Rp5.000.000,00 sesuai dengan kode billing 820201214272256 tanggal bayar 15 Desember 2020.

PENGEMBANGAN MELALUI KDP

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Direktorat JAMSOSKEL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	-	3,906,100,000
	Software Komputer		3,906,100,000

PENGHAPUSAN

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

URAIAN JENIS	JUMLAH	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
Penghapusan	26	156.475.000	0
Jumlah	26	156.475.000	0

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Software dengan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) dikarenakan dalam kondisi rusak berat berupa Software sebesar (Rp. 4.743.500,-) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Antasena" Magelang dikarenakan aset tersebut tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Software Komputer	-1	-4,743,500
Total	-1	-4,743,500

- Adanya transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) dikarenakan dalam kondisi rusak berat berupa Software sebesar (Rp.8.375.000,-) pada Satuan Kerja BRSPDSRW "Melati" Jakarta dikarenakan aset tersebut tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Software Komputer	-1	-8.375.000
Total	-1	-8.375.000

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(2)	(223,400,000)
	Software Komputer	(2)	(223,400,000)

Penghentian aset dari penggunaan 2 unit Software yang perkembangannya sudah tidak up date lagi

E.2.3.0 Lisensi

Nilai Perolehan Lisensi Kementerian Sosial RI per dan 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 190,850,000,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 397,250,000,- Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 38,947,500,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 358,302,500,-.

Mutasi/perubahan Software Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp	190.850.000
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp	206.400.000
Pengembangan Nilai Aset		
Mutasi Kurang :		
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp	397.250.000
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Aud)	Rp	(38.947.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp	358.302.500

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pembelian di **Satker Pusdatin** berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai
1	Pengintegrasian Sertifikat Elektronik dg SIKS NG Modul TTE TA 2020	1	Rp 157.890.000
	TOTAL	1	Rp 157.890.000

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Direktorat JAMSOSKEL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	-	48,510,000
	Lisensi		48,510,000

E.2.3.1 Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud pada Kementerian Sosial RI per dan 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp 196,625,000,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 3.897,010,050,-.

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud Lainnya Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp	196.625.000
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp	3.432.285.050
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	75.600.000
Pengembangan Nilai Aset	Rp	192.500.000
Mutasi Kurang :		
Reklasifikasi Keluar		
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp	3.897.010.050

PEMBELIAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Aset Tak Berwujud Lainnya dengan transaksi Pembelian (101) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 24.900.000,- pada Satuan Kerja LRSODHIV "Kahuripan" Sukabumi dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	24,900,000
Total	1	24,900,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 79.981.000,- pada Satuan Kerja BRSPDM "Margo Laras" Pati dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	79,981,000
Total	1	79,981,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 98.335.000,- pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Satria" Baturaden dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	98,335,000
Total	1	98,335,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 37.050.000,- pada Satuan Kerja BRSODHIV "Bahagia" Medan dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	37,050,000
Total	1	37,050,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- pada Satuan Kerja BRSODHIV "Wasana Bahagia" Ternate dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	50,000,000
Total	1	50,000,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 89.560.000,- pada Satuan Kerja BRSPNAPZA "Bambu Apus" Jakarta dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	89,560,000
Total	1	89,560,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 80.000.000,- pada Satuan Kerja BLBI "Abiyoso" Cimahi dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	80,000,000
Total	1	80,000,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 98.600.000,- pada Satuan Kerja BRSPDM "Phalamarta" Sukabumi dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	98,600,000
Total	1	98,600,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 850.781.800,- pada Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso Surakarta dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	850,781,800
Total	1	850,781,800

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 99.550.000,- pada Satuan Kerja BBRSBG “Kartini” Temanggung dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	99,550,000
Total	1	99,550,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 99.880.000,- pada Satuan Kerja BRSPDF “Budi Perkasa” Palembang dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	99,880,000
Total	1	99,880,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 99.485.000,- pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	99,485,000
Total	1	99,485,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 92.500.000,- pada Satuan Kerja BRSPDSN “Mahatmiya” Bali dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	92,500,000
Total	1	92,500,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 99.500.000,- pada Satuan Kerja BRSEGP “Pangudi Luhur” Bekasi dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	99,500,000
Total	1	99,500,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 83.400.000,- pada Satuan Kerja BRSLU “Gau Mabaji” Makasar dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	83,400,000
Total	1	83,400,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 79.600.000,- pada Satuan Kerja BRSAMPK "Handayani" Jakarta dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	79,600,000
Total	1	79,600,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 98.719.000,- pada Satuan Kerja BRSLU "Budi Dharma" Bekasi dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	98,719,000
Total	1	98,719,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 49.500.000,- pada Satuan Kerja BRSPDN "Tumotou" Manado dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	49,500,000
Total	1	49,500,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 97.116.250,- pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Insyaf" Medan dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	97,116,250
Total	1	97,116,250

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 89.828.000,- pada Satuan Kerja BRSAMPK "Antasena" Magelang dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	89,828,000
Total	1	89,828,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 39.900.000,- pada Satuan Kerja BRSAMPK "Alyatama" Jambi dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	39,900,000
Total	1	39,900,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 198.660.000,- pada Satuan Kerja BRSPNAPZA "Galih Pakuan" Bogor dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	198,660,000
Total	1	198,660,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	50,000,000
Total	1	50,000,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 98.305.000,- pada Satuan Kerja BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	98,305,000
Total	1	98,305,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 89.980.000,- pada Satuan Kerja BRSPDI "Ciung Wanara" Bogor dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	89,980,000
Total	1	89,980,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 74.900.000,- pada Satuan Kerja BRSPDI "Nipotowe" Palu dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	74,900,000
Total	1	74,900,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 99.500.000,- pada Satuan Kerja BRSPDM "Dharma Guna" Bengkulu dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	99,500,000
Total	1	99,500,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 57.400.000,- pada Satuan Kerja BRSPDSRW "Melati" Jakarta dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	57,400,000
Total	1	57,400,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 35.689.000,- pada Satuan Kerja BRSPDSRW "Efatai" Kupang dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	35,689,000
Total	1	35,689,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 79.890.000,- pada Satuan Kerja BBRVBD "Cibinong" dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	79,890,000
Total	1	79,890,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- pada Satuan Kerja LRSAMPK "Darusaadah" Aceh dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	100,000,000
Total	1	100,000,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 35.000.000,- pada Satuan Kerja LRSPDSRW "Meohai" Kendari dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	35,000,000
Total	1	35,000,000

- Adanya transaksi Pembelian (101) dari Siloam berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 25.000.000,- pada Satuan Kerja LRSLU "Minaula" Kendari dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	25,000,000
Total	1	25,000,000

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

No	Uraian	Nilai
2	ASET TAK BEWUJUD LAINNYA	49.775.000
		49.775.000

Adanya pembelian pengembangan aplikasi e-Warong di Sekretariat Ditjen. Penanganan Fakir Miskin senilai Rp. 49.775.000

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LANGSUNG

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca Aset Tak Berwujud Lainnya dengan transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) dikarenakan adanya rehabilitasi atau pengembangan Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 75.600.000,- pada Satuan Kerja BRSAMPK "Todopuli" Makasar dikarenakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	1	75,600,000
Total	1	75,600,000

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terjadi Mutasi Tambah berupa Pengembangan Nilai Aset Takberwujud Aplikasi Persuratan Elektronik sebesar Rp. 192.500.000,- pada Satker Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2020

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199630859000KP			
Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial			
	Pengembangan Nilai Aset	0	192.500.000
	Aset Takberwujud Lainnya	0	192.500.000

E.2.3.1 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kementerian Sosial RI per dan *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 0,-* dan *31 Desember 2020 (Audited)* sebesar *Rp. 0,-*.

Mutasi/perubahan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahunan Tahun 2020 (*Audited*) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp	-
Mutasi Tambah :		
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	1.171.830.000
Pengembangan KDP	Rp	2.734.270.000
Mutasi Kurang :		
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Rp	(3.906.100.000)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp	-

PEROLEHAN/PENAMBAHAN KDP

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	1	1,171,830,000
	Aset Tak Berwujud Dlm Penyelesaian	1	1,171,830,000

PENGEMBANGAN KDP

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	-	2,734,270,000
	Aset Tak Berwujud Dlm Penyelesaian		2,734,270,000

REKLASIFIKASI KDP MENJADI BARANG JADI

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga		(1)	(3,906,100,000)
	Aset Tak Berwujud Dlm Penyelesaian	(1)	(3,906,100,000)

E.2.3.2 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tak Berwujud

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual telah mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan Aset Tak Berwujud, yaitu:

1. Masa Manfaat

Masa manfaat atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud merupakan masa manfaat terbatas yang digunakan dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. Metode Amortisasi

Amortisasi atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

3. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode

- a. *Nilai perolehan bruto atas Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan jenis Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;*
- b. *Penyajian atas nilai perolehan bruto Aset Tak Berwujud, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud, dituangkan sebagai berikut: (cetak neracanya)*

E.2.3.3 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Nilai Perolehan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 26,060,951,592,-* dan *31 Desember 2020 (Audited)* sebesar *Rp. 31,908,779,753,-* Akumulasi Penyusutan per *31 Desember 2020 (Audited)* sebesar *Rp. 28,484,150,200,-* sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah *Rp. 3,424,629,553,-*.

Mutasi/perubahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Tahunan Tahun 2020 (*Audited*) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 26.060.951.592
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 20.181.992.029
Mutasi Kurang :	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	Rp (3.982.000)
Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	Rp (813.800.000)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp (7.696.740.179)
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	Rp (61.021.000)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Rp (3.568.224.000)
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	Rp (2.190.396.689)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 31.908.779.753
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp (28.484.150.200)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 3.424.629.553

REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA**(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL**

Mutasi tambah nilai neraca Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah dengan transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp.109.000.000,- pada Satuan Kerja BRSEGP "Pangudi Luhur" Bekasi dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Station Wagon	1	99,000,000
Sepeda Motor	1	10,000,000
Total		109,000,000

- Adanya transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp.63.500.000,- pada Satuan Kerja BRSPDM "Margo Laras" Pati dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahahan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkuta	1	63,500,000
Total		63,500,000

- Adanya transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp.239.408.915,- pada Satuan Kerja BRSODHIV "Wasana Bahagia" Ternatedikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahahan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Laboratorium	2	11.000.000
Alat Bengkel & Alat Ukur	2	9.500.000
Komputer	6	72.772.800
Alat Kedokteran & Kesehatan	5	9.614.975
Alat Peraga	6	56.925.000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	20	7.071.140
Alat Kantor & Rumah Tangga	25	72.525.000
Total	66	239.408.915

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Handayani" Jakarta senilai Rp. 1.884.119.465,- dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahahan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Besar	20	6.530.500
Alat Angkutan	5	2.050.000
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	52	81.691.650
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1101	800.537.650
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	21	32.849.150
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9	10.041.000
ALAT LABORATORIUM	5	45.996.000
ALAT PERSENJATAAN	1	2.437.500
KOMPUTER	74	880.645.015
ALAT PERAGA	2	17.793.000
BAHAN PERPUSTAKAAN	106	3.548.000
JUMLAH	1.396	1.884.119.465

- transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSLU “Budi Dharma” Bekasi dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 1.027.614.044,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Bengkel & Alat Ukur	8	28160000
Komputer	13	74.795.796
Alat Kedokteran & Kesehatan	2	2.970.000
Alat Angkutan	1	163.800.000
Alat Kantor & Rumah Tangga	480	712.888.248
Bahan Perpustakaan	20	45.000.000
JUMLAH	524	1.027.614.044

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSAMPK “Antasena” Magelang dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 726.589.900,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Besar	2	272.700
Alat Angkutan	3	1.425.000
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	52	162.420.950
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	308	271.830.200
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6	14.613.200
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	385.800
ALAT LABORATORIUM	1	224.600
KOMPUTER	40	226.919.950
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	12	48.497.500
JUMLAH	426	726.589.900

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BBRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 120.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus	2	120,000,000
JUMLAH	2	120,000,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BBRSPDI "Ciung Wanara" Bogor dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 149.951.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda Motor	2	19,500,000
Mobil Ambulance	1	130,451,000
JUMLAH	2	149,951,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BBRSPDI "Nipotowe" Palu dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp.218.065.590,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Stationary Compressor	1	1,022,500
Mesin Gergaji	2	1,430,000
Lemari Kayu	84	61,236,000
Filing Cabinet Besi	9	2,250,000
Perkakas Kantor Lainnya	3	3,150,000
Meja Kerja Kayu	4	2,439,000
Kursi Besi/Metal	117	42,846,000
Meja Komputer	3	932,000
Kasur/Spring Bed	70	28,000,000
Rak Sepatu (Almunium)	25	8,000,000
Kipas Angin	22	18,307,000
Kompot Minyak	3	1,325,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	1	365,000
Kitchen Set	4	1,915,000
Mesin Giling Bumbu	2	650,000
Microphone	1	354,000
Mini Compo	1	1,294,500
Kursi Dorong	1	1,640,000
Urinal	2	526,000
Kompot Minyak Tanah (Alat Laboratorium Makanan)	2	1,000,000
Lap Top	2	23,980,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	15,403,590
Total	366	218,065,590

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSPDM “Dharma Guna” Bengkulu dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 543.918.450,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Gergaji	-2	1,947,000
Mesin Penghalus	2	2,661,500
Peralatan Las Listrik	1	511,500
Lemari Kayu	56	72,939,000
Filing Cabinet Besi	11	14,517,000
Buffet	4	4,021,000
White Board	10	5,000,000
LCD Projector/Infocus	1	16,894,000
Meja Kerja Kayu	26	21,341,000
Kursi Besi/Metal	53	9,716,000
Sice	7	14,696,500
Bangku Panjang Kayu	14	5,524,000
Meja Rapat	34	31,727,000
Meja Komputer	7	5,679,000
Tempat Tidur Besi	111	99,780,000
Jam Elektronik	2	64,000
Kompore Gas (Alat Dapur)	3	2,149,000
Oven Listrik	1	540,000
Mesin Giling Bumbu	2	840,000
Treng Air/Tandon Air	2	986,000
Alat Pemanggang Roti/Sate	2	660,000
Rak Piring Alumunium	4	3,320,000
Televisi	8	18,863,000
Wireless	1	5,454,000
Camera Video	1	797,500
Tustel	1	3,220,000
Mesin Jahit	13	23,025,000
Dispenser	2	2,000,000
Handy Cam	1	4,000,000
Camera Digital	2	3,925,000
Handy Talky (HT)	4	7,000,000
Tensimeter	2	1,922,000
Gunting Lurus	1	288,000
Lemari Obat (Kaca)	1	1,044,000
Kursi Dorong	1	2,150,000
Standar Infus	2	1,762,000
Local Area Netw ork (LAN)	1	700,000
P.C Unit	3	36,450,000
Lap Top	3	38,479,500
Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	10,624,000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	24,250,000
External	3	4,125,000

NAMA	QTY	NILAI
Router	1	2,200,000
Netw are Interface External	1	900,000
Bola Kaki	3	900,000
Total	5	543,918,450

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BBRVBD "Cibinong" dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp.1.204.859.896,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	7	1,204,859,896
JUMLAH	7	1,204,859,896

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSPDM "Phalamarta" Sukabuni dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 87.113.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	73	62,863,000
Komputer	1	24,250,000
JUMLAH	74	87,113,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Wyata Guna" Bandung dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 2.426.888.940,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	42	2.236.404.000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	12	27.690.000
Alat Kanor & Rumah Tangga	494	162.794.940
JUMLAH	548	2.426.888.940

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSPDF "Wirajaya" Makasar dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 425.404.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kanor & Rumah Tangga	320	425,404,000
JUMLAH	320	425,404,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSLU "Gau Mabaji" Makasar dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 96.748.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	3	96,748,000
JUMLAH	3	96,748,000

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Insyaf" Medan dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 290.181.574,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	18	220,075,504
Alat Kantor & Rumah Tangga	13	70,106,070
JUMLAH	31	290,181,574

- Terdapat transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan senilai Rp. 3.329.112.409,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	7	72,329,500
Alat Kantor & Rumah Tangga	5	8,158,000
Bangunan Gedung	12	3,215,534,000
Alat Angkuta	1	33,090,909
JUMLAH	25	3,329,112,409

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Terdapat Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp.4.739.413.000,- terdapat pada:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	6	1,450,389,000
	Sedan	1	681,170,000
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	769,219,000

Direktorat PSKBA

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	13	3,289,024,000
	Jeep	12	3,259,144,000
	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	29,880,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

• BBPPKS Makasar

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Makasar		72	328.980.700
	Lemari Kayu	5,	9.191.000,
	Peta	1,	2.450.000,
	Overhead Projector	9,	110.591.750,
	Meja Kerja Kayu	5,	1.991.000,
	Meja Komputer	26,	27.300.000,
	Meja Makan Kayu	4,	1.808.000,
	A.C. Window	14,	50.930.000,
	Sound System	1,	2.124.075,
	Megaphone	1,	160.000,
	Camera Video	1,	27.859.875,
	Handy Cam	2,	30.775.000,
	Lap Top	3,	63.800.000,

• Pusdiklat Kesos

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Pusdiklat Kesos		1	69.820.000
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	69.820.000

• BBPPKS Jayapura

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Jayapura		291	888.874.736
1	Rak Besi	1,	52.000,
2	Rak Kayu	24,	15.840.000,
3	Brandkas	1,	4.534.000,
4	Papan Visual/Papan Nama	5,	3.750.000,
5	White Board	8,	15.360.000,
6	Overhead Projector	1,	33.600.000,
7	LCD Projector/Infocus	7,	45.335.000,
8	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3,	24.800.000,
9	Meja Kerja Kayu	13,	4.608.000,
10	Kursi Besi/Metal	1,	205.000,
11	Kursi Kayu	2,	436.000,
12	Meja Rapat	1,	579.000,
13	Kasur/Spring Bed	100,	30.000.000,
14	Meja Makan Kayu	9,	6.478.000,
15	Televisi	8,	29.340.000,
16	Amplifier	2,	16.440.000,
17	Loudspeaker	8,	90.000.000,
18	Wireless	5,	25.836.000,
19	Mic Conference	1,	63.662.000,
20	Camera Video	3,	16.000.000,
21	Gordyin/Kray	15,	7.500.000,
22	Disc Record Player	1,	3.700.000,
23	Microphone/Wireless MIC	3,	3.960.000,
24	Microphone Cable	2,	3.250.000,
25	Film Projector	1,	18.080.000,
26	Layar Film/Projector	1,	11.000.000,
27	TV Monitor	1,	6.000.000,
28	Kamera Digital	2,	26.880.000,
29	Local Area Network (LAN)	3,	6.000.000,
30	Lap Top	2,	20.760.000,
31	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2,	32.115.000,
32	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2,	6.000.000,
33	Router	2,	30.985.000,
34	Netware Interface External	2,	10.143.100,
35	Acces Point	5,	13.299.000,
36	Peralatan Jaringan Lainnya	1,	98.900.000,
37	Air Conditioning (AC)	2,	38.400.000,
38	Peralatan Olah Raga Lainnya	2,	21.202.500,
39	Instalasi Komputer	2,	25.000.000,
40	Instalasi Lain-lain	3,	15.463.636,
41	Slide	2,	30.000.000,
42	Alat Musik Modern/Band	7,	21.081.500,
43	Alat Peraga Kesenian Lainnya	25,	12.300.000,

• **Puslitbang**

NAMA	QTY	NILAI
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	1.920.000
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	72	306.616.050
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	51	284.402.400
ALAT LABORATORIUM	4	78.462.000
KOMPUTER	55	534.166.760
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	2.081.200
PERALATAN OLAH RAGA	1	4.780.000
JUMLAH	185	1.212.428.410

TRANSAKSI NORMALISASI BMN (BMN YANG DIHENTIKAN)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah dengan transaksi TRansaksi Normalisasi BMN Yang Dihentikan (299) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi TRansaksi Normalisasi BMN Yang Dihentikan (299) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp. 3.982.000,-) pada Satuan Kerja BRSPDSRW "Melati" Jakarta dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	1	-3,982,000
Total		-3,982,000

HIBAH KELUAR BMN YANG DIHENTIKAN (SEMESTER II DOKUMEN SEMESTER I)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat transaksi di **Satker Setjen** berupa:

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Hibah Keluar BMN yg dihentikan	Setjen	3	Rp (813,800,000)	
	TOTAL		3	- 813,800,000	

Adanya Hibah Keluar Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan pada Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Laporan Tahunan Tahun 2020 senilai **Rp.813.800.000,-**.

Pada Yayasan Shohibul Muslim Jl.KH Abdul Kabier Block Masjid Tanjung Teja Kec.Tanjung Teja Kab.Serang Timur. BAST Nomor : 49/HUK/2020

tanggal 14 April 2020 tentang Penghapusan BMN berupa 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 6 dilingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	4	5
132111	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI		
3.02.01.02.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	-1	-80.600.000
3.02.01.03.002	Pick Up	-2	-733.200.000
TOTAL			-
			813.800.000

PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Nilai (Rp.)
1.	Mesin Hitung Elektronik	1	750.000
2.	Mesin Fotocopy Elektronik	1	25.839.600
3.	Lemari Besi/Metal	1	265.000
4.	Lemari Kayu	11	8.716.000
5.	Rak Besi	2	937.500
6.	Rak Kayu	8	10.914.500
7.	Filling Cabinet Besi	10	3.183.000
8.	Brandkas	1	1.195.000
9.	Buffet	1	1.336.000
10.	Alat Penghancur Kertas	1	567.000
11.	Mesin Absensi	5	11.814.000
12.	Headmachin Besar	1	1.005.000
13.	Perforator Besar	5	2.861.000
14.	Overhead Projector	2	39.497.000
15.	White Board Electronic	1	4.268.000
16.	Access Control System	3	4.950.000
17.	Meja Kerja Besi/Metal	3	897.000
18.	Meja Kerja Kayu	6	4.801.000
19.	Kursi Besi/Metal	13	5.757.000
20.	Kursi Kayu	11	220.000
21.	Meja Rapat	1	3.003.000
22.	Televisi	1	3.850.000
23.	Loudspeaker	1	1.850.000
24.	Mic Conference	1	44.250.000
25.	Tustel	1	2.699.000

26.	Dispenser	2	4.125.000
27.	PC Unit	16	157.022.140
28.	Laptop	9	133.430.524

29.	Scanner	6	16.510.000
30.	Printer	11	25.890.400
31.	Access Point	1	473.000
	Jumlah	137	522.876.664

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah dengan transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.332.853.400,-) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Satria" Baturaden dikarenakan terdapat barang rusak berat dan sudah dilakukan lelang BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bahan Perpustakaan	-4	-587,900
Alat Laboratorium	-4	-48,942,000
Barang Bercorak Kesenaiian/Kebudayaan/Olahraga	-15	-27,110,000
Alat Angkutan	-1	-181,000
Alat Kantor & Rumah Tangga	-86	-86,783,000
Alat Studio Komunikasi & Pemancar	-7	-15,591,000
Komputer	-21	-153,658,500
Total	-138	-332,853,400

- Terdapat transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) senilai Rp.(3.034.335.605,-) berupa barang inventaris berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 51 / HUK / 2020 dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Bambu Apus", dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Electric Generating Set Lainnya	-1	-58,120,000
Portable Water Pump	-1	-1,879,000
Sumersible Pump	-10	-20,124,000
Mesin Diesel	-1	-27,489,000
Sepeda	-19	-11,940,000
Mesin Bor	-10	-12,427,500
Mesin Rol	-1	-205,000
Mesin Kompresor	-3	-6,378,000
Mesin Las Listrik	-1	-7,500,000
Mesin Pemotong Fiberglas/Polyster	-1	-7,084,545
Mesin Gerinda Tangan	-1	-14,000
Battery Charge	-2	-2,910,000
Solder Listrik	-2	-3,600,000
Steam Pressure Gauge	-2	-1,600,000
Steam Cleaner	-1	-2,500,000
Mesin Spooring	-2	-3,960,000
Mesin Gergaji	-2	-5,992,800
Peralatan Las Listrik	-3	-5,700,000
Peralatan Las Karbit	-1	-241,000
Perkakas Pengecatan Kendaraan	-1	-67,000
Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Tak Bermesin)	-1	-1,000,000
Dongkrak Mekanik	-2	-1,169,000
Tool Kit Set	-3	-20,949,000
Engine Stand	-6	-15,203,570
Bor	-3	-2,829,000
Tanggem	-2	-2,000,000
Gunting Plat	-2	-3,006,000
Kunci Pas	-3	-48,000
Peralatan Tukang Besi Lainnya	-1	-1,600,000
Scanner (Universal Tester)	-1	-24,250,000

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Ketik Listrik Langew agon (18-27 Inchi)	-1	-220,000
Lemari Besi/Metal	-9	-3,130,000
Lemari Kayu	-58	-43,306,800
Rak Besi	-30	-17,648,000
Rak Kayu	-2	-161,000
Filing Cabinet Besi	-26	-22,045,000
Locker	-27	-21,600,000
Papan Visual/Papan Nama	-4	-4,904,000
White Board	-16	-17,089,000
Alat Penghancur Kertas	-3	-2,425,000
Overhead Projector	-1	-20,292,500
Mesin Laminating	-1	-423,000
Lampu-lampu Kristal	-2	-1,500,000
LCD Projector/Infocus	-1	-20,550,000
Perkakas Kantor Lainnya	-124	-106,635,100
Meja Kerja Besi/Metal	-3	-10,800,000
Meja Kerja Kayu	-49	-20,588,000
Kursi Besi/Metal	-529	-184,799,000
Sice	-7	-25,017,000
Bangku Panjang Kayu	-28	-12,540,000
Meja Rapat	-2	-4,585,000
Meja Komputer	-43	-42,809,000
Tempat Tidur Besi	-40	-61,600,000
Tempat Tidur Kayu	-50	-36,100,000
Kasur/Spring Bed	-83	-48,900,000
Meja Makan Kayu	-24	-47,705,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	-2	-2,000,000
Rak Sepatu (Almunium)	-19	-19,000,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-3	-6,548,000
Mesin Pel/Poles	-1	-16,000
Mesin Cuci	-2	-16,000,000
Lemari Es	-2	-4,394,000
A.C. Split	-23	-120,940,500
Kipas Angin	-28	-12,987,000
Reach In Frezzer	-1	-220,000
Kompom Gas (Alat Dapur)	-10	-5,758,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	-3	-1,956,000

NAMA	QTY	NILAI
Tabung Gas	-6	-2,218,000
Mesin Giling Bumbu	-2	-961,000
Treng Air/Tandon Air	-1	-650,000
Alat Dapur Lainnya	-2	-840,000
Radio	-1	-1,650,000
Televisi	-29	-73,915,000
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	-7	-5,151,500
Sound System	-2	-10,010,000
Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	-2	-3,650,000
Wireless	-2	-11,194,000
Megaphone	-2	-1,408,000
Stabilisator	-2	-1,000,000
Tustel	-7	-33,565,550
Mesin Jahit	-25	-151,000,000
Lambang Garuda Pancasila	-1	-24,000
Gambar Presiden/Wakil Presiden	-1	-420,000
Seterika	-1	-1,850,000
Tangga Aluminium	-3	-1,800,000
Kaca Hias	-10	-5,610,000
Dispenser	-7	-10,450,000
Mimbar/Podium	-3	-867,000
Handy Cam	-4	-18,629,900
Mesin Obras	-3	-10,100,000
Mesin Pelubang Kancing	-4	-11,475,000
Meja Potong	-8	-16,066,000
Manequin (Boneka)	-4	-800,000
Mini Compo	-2	-1,600,000
Karpet	-2	-5,815,000
Vertikal Blind	-1	-30,000,000
Gordyin/Kray	-87	-42,187,300
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-6	-9,275,000
Audio Amplifier	-1	-3,522,400
Microphone/Wireless MIC	-2	-18,200,000
Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	-1	-191,000
Slide Projector	-2	-53,894,000
Camera Digital	-1	-6,350,000
Pesawat Telephone	-2	-7,092,000

NAMA	QTY	NILAI
Handy Talky (HT)	-2	-5,598,000
Facsimile	-2	-10,764,000
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	-2	-1,857,000
Tensimeter	-1	-157,000
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	-1	-163,000
Alat Fraksinasi Serat	-1	-1,500,000
Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	-14	-15,465,000
Uninterrupted Power Supply (UPS)	-25	-34,000,000
Software Conf Off-Line Computer	-26	-29,000,000
Peralatan Umum Lainnya	-10	-32,500,000
Tang Ampere	-2	-2,000,000
Local Area Network (LAN)	-23	-35,100,000
P.C Unit	-47	-562,848,500
Lap Top	-6	-103,415,000
Note Book	-2	-23,900,000
Personal Komputer Lainnya	-1	-825,000
Steamer	-6	-6,000,000
Plotter (Peralatan Mini Komputer)	-1	-45,000,000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-2	-6,590,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-15	-56,047,590
External	-2	-1,747,450
Server	-2	-45,500,000
Router	-1	-2,200,000
Modem	-3	-3,850,000
Network Interface External	-1	-1,343,100
Peralatan Bantu Lainnya	-3	-20,425,000
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	-44	-33,420,000
Jet Pump	-21	-54,644,500
Alat Tennis Meja	-14	-11,058,400
Alat Badminton	-8	-4,177,000
Peralatan Fitness	-1	-359,000
Catur	-1	-510,400
CD/VCD/DVD/LD	-1	-319,000
Atlas	-1	-25,000
Alat Musik Tradisional/Daerah	-4	-12,015,000
Alat Musik Modern/Band	-53	-79,520,000
Maket/Miniatur/Replika	-1	-1,000,000
Total		-3,034,335,605

- Terdapat transaksi Penghapusan BMN Yang Dihentikan (391) senilai Rp.(44.308.000,-) dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran pada Satuan Kerja BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda Motor	-5	-44.308.000
Total	-5	-44.308.000

- Terdapat transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) senilai Rp.(270.644.500,-) pada Satuan Kerja BRSPDM “Budi Luhur” Banjar Baru dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Komputer	-5	-61,640,000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	-150	-209,004,500
Jumlah	-155	-270,644,500

- Terdapat transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) senilai Rp.(281.536.000,-) pada Satuan Kerja BRSPDF “Wirajaya” Makasar dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	-1	-281,536,000
Jumlah	-1	-281,536,000

- Adanya transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.256.426.122,-) pada Satuan Kerja BRSODHIV “Wasana Bahagia” Ternate dikarenakan terdapat barang rusak berat dan sudah dilakukan lelang BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-46	-78,382,789
Alat Bengkel & Alat Ukur	-15	-27,900,000
Alat Laboratorium	-2	-3,130,000
Alat Angkutan	-1	-68,463,333
Komputer	-4	-32,950,000
Alat Pertanian	-54	-45,600,000
Total	-122	-256,426,122

- Adanya transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) berupa

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.299.641.500,-) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Toddopuli" Makasar dikarenakan terdapat barang rusak berat dan sudah dilakukan lelang BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Kantor & Rumah Tangga	-631	-287,303,500
Alat Studio Komunikasi Pemancar	-9	-12,338,000
Total	-640	-299,641,500

- Adanya transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.738.530.000,-) pada Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehsos dikarenakan terdapat barang rusak berat dan sudah dilakukan lelang BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-6	-738,530,000
Total	-6	-738,530,000

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Terdapat Penghapusan (BMN yang dihentikan) senilai Rp.1.025.323.488,- terdapat pada:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan 79/HUK/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(96)	(910,725,488)
	Sedan	(1)	(681,170,000)
	Sepeda motor	(4)	(12,450,000)
	Lemari Kayu	(8)	(31,344,288)
	Meja Kerja Kayu	(8)	(6,560,000)
	Kursi Besi/Metal	(51)	(32,478,000)
	Meja Rapat	(1)	(3,208,000)
	A.C Split	(1)	(3,734,000)
	Wireless	(1)	(7,062,500)
	Bracket Standing Peralatan	(1)	(600,000)
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	(1)	(600,000)
	P.C Unit	(6)	(55,740,000)
	Lap Top	(1)	(8,708,700)
	Tablet PC	(2)	(18,190,000)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(6)	(23,880,000)
	External/Portable Hardisk	(3)	(23,550,000)
	Modem	(1)	(1,450,000)

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Dihapuskan berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan A.n Menteri Sosial Nomor: 3012/1/PL.05.02/11/2019 tanggal 13 November 2019. Merupakan aset rusak berat karena force Majeure (banjir bandang) di PPKH Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial	(10)	(114,598,000)
	Meja Kerja Kayu	(2)	(2,838,000)
	A.C Split	(1)	(8,250,000)
	Uninterruptible Power Supplay (UPS)	(2)	(3,080,000)
	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	(1)	(1,210,000)
	P.C Unit	(2)	(21,560,000)
	Printer (Peralatan Personal Komputrer)	(1)	(18,260,000)

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- BBPPKS Yogyakarta

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Yogyakarta		266	690.324.400
1	Memori Programmer	3,	1.050.000,
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2,	416.000,
3	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	3,	1.293.000,
4	Lemari Kayu	6,	11.511.000,
5	Overhead Projector	11,	53.218.000,
6	Sice	2,	12.000.000,
7	Meja Komputer	57,	56.850.000,
8	Meja Telepon	31,	1.860.000,
9	Meja Resepsionis	1,	1.800.000,
10	Kasur/Spring Bed	3,	15.600.000,
11	Lemari Es	3,	1.878.000,
12	A.C. Split	2,	3.302.000,
13	Kipas Angin	15,	2.623.000,
14	Televisi	6,	24.990.000,
15	Mic Conference	1,	37.711.000,
16	Seterika	2,	900.000,
17	Mesin Pemetong Keramik	1,	1.000.000,
18	Kabel Roll	1,	1.675.000,
19	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5,	6.000.000,
20	Power Amplifier	1,	1.615.000,
21	Sepeda Statis	5,	2.053.000,
22	Exhaust Fan (Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas)	15,	7.500.000,
23	Software DAAS MOD	25,	28.235.000,
24	Hardware Conf Off-Line Computer	4,	2.865.000,
25	P.C Unit	28,	312.058.750,
26	Lap Top	6,	57.177.650,
27	Floppy Disk Unit (Peralatan Mainframe)	5,	2.400.000,
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22,	40.743.000,

- Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial			199.940.500
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	199.940.500

KOREKSI PENCATATAN (BMN YANG DIHENTIKAN)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah dengan transaksi Koreksi Pencatatan BMN yang Dihentikan (395) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Koreksi Pencatatan BMN yang Dihentikan (395) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.61.021.000,-) pada Satuan Kerja LRSLU “Minaula” Kendari dikarenakan adanya tindak lanjut atas hasil review Tim Itjen barang tidak ditemukan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	1	-61,021,000
JUMLAH	1	-61,021,000

USULAN BARANG RUSAK BERAT KE PENGELOLA (BMN YANG DIHENTIKAN)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah dengan transaksi Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang Dihentikan (396) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang Dihentikan (396) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp. 163.800.000,-) pada Satuan Kerja BRSLU “Budi Dharma” Bekasi berdasarkan Surat usulan permohonan penghapusan Nomor : S-828/WKN.08/KNL.02/2020 dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan sedang dilakukan proses penghapusan BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus	1	-163,800,000
JUMLAH	1	-163,800,000

- Adanya transaksi Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang Dihentikan (396) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam

Operasi Pemerintah sebesar (Rp. 6.400.000,-) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA “Galih Pakuan” Bogor berdasarkan Surat usulan permohonan penghapusan Nomor : 212/PSPPGP/PL.04/03 dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan sedang dilakukan proses penghapusan BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda Motor	(2)	(6,400,000)
JUMLAH	(2)	(6,400,000)

- Adanya transaksi Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang Dihentikan (396) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp. 109.000.000,-) pada Satuan Kerja BRSEGP “Pangudi Luhur” Bekasi dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan sedang dilakukan proses penghapusan BMN dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Alat Angkutan	-2	-109,000,000
JUMLAH	-2	-109,000,000

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	(13)	(3,289,024,000)
	Jeep	(12)	(3,259,144,000)
	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	(1)	(29,880,000)

PENGGUNAAN KEMBALI BMN YANG SUDAH DIHENTIKAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah dengan transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.2.565.000,-) pada Satuan Kerja BRSPDI “Nipotowe” Palu dikarenakan BMN tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 234/4.3.9/PL.05.02/3/2020, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Kitchen Set	-4	-1,915,000
Mesin Giling Bumbu	-2	-650,000
Jumlah	-6	2,565,000

- Adanya transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.41.871.689-) pada Satuan Kerja LRSODHIV "Kahuripan" Sukabumi dikarenakan BMN tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran., dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-1	-41,871,689
Jumlah	-1	41,871,689

- Adanya transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.61.997.000-) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Wyata Guna" Bandung dikarenakan BMN tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran., dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-1	-61,997,000
Jumlah	-1	61,997,000

- Adanya transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.412.000-) pada Satuan Kerja BRSPDF "Wirajaya" Makasar dikarenakan BMN tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran., dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Air	-2	-412,000
Jumlah	-2	412,000

- Adanya transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.99.984.000-) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang dikarenakan BMN tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran., dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	-1	-4,393,000
Tugu Titik Konrol Pasti	-1	-95,591,000
Jumlah	2	99,984,000

- Adanya transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah

sebesar (Rp.1.607.767.000-) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Paramita" Mataram dikarenakan BMN tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran., dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	6	-1,607,767,000
Jumlah	6	- 1,607,767,000

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- BBPPKS Bandung

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Bandung		1	-375.800.000
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	-375.800.000

E.2.3.3 Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 237,023,052,- dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 235,826,552,- Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 158,272,552,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah Rp. 77,554,000,-.

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 237.023.052
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 236.518.500
Mutasi Kurang :	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp (237.715.000)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 235.826.552
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp (158.272.552)
Nilai Buku per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp 77.554.000

REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah 31 Desember 2020 dengan transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188), dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) sebesar Rp. 8.375.000,- pada Satuan Kerja BRSPDSRW “Melati” Jakarta dikarenakan aset tersebut tidak bisa digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Software Komputer	1	8,375,000
Jumlah	1	8,375,000

- Adanya transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) sebesar Rp.4.743.500,- pada Satuan Kerja BRSAMPK “Antasena” Magelang dikarenakan aset tersebut tidak bisa digunakan dalam operasional pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Software Komputer	1	4,743,500
Jumlah	1	4,743,500

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(2)	223.400.000
	Software Komputer	(2)	223.400.000

PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah 31 Desember 2020 dengan transaksi Penghapusan BMN Yang Dihentikan (391), dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Penghapusan BMN Yang Dihentikan (391) berupa sebesar (Rp.5.940.000,-) pada Satuan Kerja BRKPNAPZA “Galih Pakuan” Bogor dikarenakan terdapat barang rusak berat dan sudah dilakukan lelang BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	-1	-5,940,000
Total	-1	-5,940,000

- Adanya transaksi Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar (Rp.8.375.000,-) pada Satuan Kerja BRSPDSRW "Melati" Jakarta dikarenakan terdapat barang rusak berat dan sudah dilakukan lelang BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	-1	-8,375,000
Total	-1	-8,375,000

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(2)	(223,400,000)
	Software Komputer	(2)	(223,400,000)

E.2.3.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Nilai Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kementerian Sosial RI per dan 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 281,836,313,-. dan 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 2.194,436,815,-.

Mutasi/perubahan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahunan Tahun 2020 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp	281.836.313
Mutasi Tambah :		
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	8.166.773.099
Pengembangan KDP	Rp	63.382.028.259
Mutasi Kurang :		
Koreksi Nilai KDP	Rp	(1.061.434.452)
Penghapusan/ Penghentian KDP	Rp	(41.627.000)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Rp	(68.533.139.404)
Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Rp	2.194.436.815

PEROLEHAN/PENAMBAHAN KDP

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Adanya transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) senilai Rp. 1.326.000.000,- pada DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Tanah dalam Pengerjaan	Rp 1.326.000.000
	Jumlah	Rp 1.326.000.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) senilai Rp. 306.030.000,- Satuan Kerja BRSKPNAPZA “Bambu Apus” dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 306,030,000
	Jumlah	Rp 306,030,000

- Adanya transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) senilai Rp. 69.396.800,- Satuan Kerja BLBI “Abiyoso” Cimahi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 69,396,800
	Jumlah	Rp 69,396,800

- Adanya transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) senilai Rp. 22.600.000,- Satuan Kerja BRSPDM “Phalamarta” Sukabumi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 22,600,000
	Jumlah	Rp 22,600,000

- Adanya transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) senilai Rp. 49.350.000,- Satuan Kerja BRSPDSN "Wyata Guna" dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 49,350,000
	Jumlah	Rp 49,350,000

- Adanya transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) senilai Rp. 236.130.000,- Satuan Kerja BBRBSG "Kartini" Temanggung dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 236,130,000
	Jumlah	Rp 236,130,000

- Adanya transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) senilai Rp. 162.254.750,- Satuan Kerja BRSPDSN "Mahatmiya" Bali dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 162,254,750
	162	Rp 162,254,750

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSEGP "Pangudi Luhur" Bekasi senilai Rp. 4.210.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 4,210,000
	Jumlah	Rp 4,210,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Rumbai" Pekanbaru senilai Rp. 29.997.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 29,997,000
	Jumlah	Rp 29,997,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSRLU Gau Mabaji Makasar senilai Rp. 597.869.361,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 597,869,361
	Jumlah	Rp 597,869,361

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Handayani" Jakarta senilai Rp. 208.960.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 208,960,000
	Jumlah	Rp 208,960,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSEWTS "Mulya Jaya" Jakarta senilai Rp. 896.661.264,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 896.661.264
	Jumlah	Rp 896.661.264

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSLU "Budi Dharma" Bekasi senilai Rp. 254.990.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 254,990,000
	Jumlah	Rp 254,990,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tumotou" Manado senilai Rp. 72.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 72,250,000
	Jumlah	Rp 72,250,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai Rp. 118.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 118,000,000
	Jumlah	Rp 118,000,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi senilai Rp. 136.320.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 136,320,000
	Jumlah	Rp 136,320,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSPDM "Budi Luhur" Banjar Baru senilai Rp. 446.825.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 446,825,000
	Jumlah	Rp 446,825,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSPDM "Dharma Guna" Bengkulu senilai Rp. 84.745.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 84,745,000
	Jumlah	Rp 84,745,000

- Terdapat transaksi Perolehan Penambahan KDP (502) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Toddopuli" Makasar senilai Rp. 77.220.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 77,220,000
	Jumlah	Rp 77,220,000

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	1	2,733,348,024
	Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan	1	2,733,348,024

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- Sekretariat Badiklit Perolehan penambahan KDP
Nilai Perolehan Rp. 65.613.100

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh Sosial			65.613.100
	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	65.613.100

- Poltekesos Bandung Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan
Nilai Perolehan Rp. 61.571.850

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Poltekesos Bandung			61.571.850
	Gedung Dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	61.571.850

- BBPPKS Bandung Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Nilai Perolehan Rp. 800.000

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Bandung			800.000
	Bangunan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	800.000

- BBPPKS Padang Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Nilai Perolehan Rp. 955.950

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Padang			955.950
	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	955.950

- BBPPKS Banjarmasin Dalam Pengerjaan Nilai Perolehan Rp. 2.450.000

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Banjarmasin			2.450.000
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	2.450.000

- BBPPKS Makasar Dalam Pengerjaan Nilai Perolehan Rp. 202.225.000

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Makasar			202.225.000
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	202.225.000

PENGEMBANGAN KDP

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Adanya transaksi Pengembangan KDP (503) senilai Rp. 5.951.644.000,- pada DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Tanah dalam Pengerjaan	Rp 5.951.644.000
	Jumlah	Rp 5.951.644.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan transaksi Pengembangan KDP (503) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA “Bambu Apus” Jakarta senilai Rp. 3.451.594.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 3,451,594,000
	Jumlah	Rp 3,451,594,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSPDM “Phalamarta” Sukabumi senilai Rp. 359.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 359,000,000
	Jumlah	Rp 359,000,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSPDSN “Wyata Guna” Bandung senilai Rp. 1.062.536.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 1,062,536,500
	Jumlah	Rp 1,062,536,500

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BBRSPDSN “Mahatmiya” Bali senilai Rp. 429.099.467,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 429,099,467
	Jumlah	Rp 429,099,467

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSEGP "Pangudi Luhur" Bekasi senilai Rp. 82.265.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 82,265,000
	Jumlah	Rp 82,265,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Rumbai" Pekanbaru senilai Rp. 69.993.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 69,993,000
	Jumlah	Rp 69,993,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSLU "Gau Mabaji" Makasar senilai Rp. 1.057.123.143,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 1,057,123,143
	Jumlah	Rp 1,057,123,143

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Handayani" Jakarta senilai Rp. 2.569.999.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 2,569,999,000
	Jumlah	Rp 2,569,999,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSLU "Budi Dharma" Bekasi senilai Rp. 477.236.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 477,236,000
	Jumlah	Rp 477,236,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tumotou" Manado senilai Rp. 1.152.379.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 1,152,379,000
	Jumlah	Rp 1,152,379,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang senilai Rp. 1.287.456.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 1,287,456,500
	Jumlah	Rp 1,287,456,500

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi senilai Rp. 1.861.288.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 1,861,288,000
	Jumlah	Rp 1,861,288,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSPDM "Budi Luhur" Banjar Baru senilai Rp. 397.225.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 397,225,000
	Jumlah	Rp 397,225,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSAMPK "Toddopuli" Makasar senilai Rp. 685.780.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 685,780,000
	Jumlah	Rp 685,780,000

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSPDM "Dharma Guna" Bengkulu senilai Rp. 731.971.230,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 731,971,230
	Jumlah	Rp 731,971,230

- Terdapat transaksi Pengembangan KDP (503) pada Satuan Kerja BRSEWTS "Mulya Jaya" Jakarta senilai Rp. 992.803.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 992.803.500
	Jumlah	Rp 992.803.500

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	-	1,822,232,016
	Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan	-	1,822,232,016

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- Sekretariat Badiklit Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Perolehan Rp. 1.509.572.900

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh Sosial			1.509.572.900
	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	1.509.572.900

- BBPPKS Bandung Pengembangan Gedung Perpustakaan Permanen Dengan Nilai Rp. 7.056.768.000

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Bandung			
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	7.056.768.000

- Poltekesos Bandung Pengembangan KDP berasal dari pengembangan Gedung dan Bangunan Kampus II Politeknik Kesos Bandung yang telah menjadi Aset Definitif per 30 September 2020 dengan Nilai Rp. 829.875.371 Saldo awal merupakan KDP dari Asrama Putra yang belum dikerjakan dan merupakan nilai dari Perencanaan Renovasi Asrama Putra Tahun 2016 Rp. 34.012.100

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Poltekesos Bandung			
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	22.990.027.431

- BBPPKS Padang Pembelian 1 Unit Alat Berat Berat Stationary Generating Set dengan Nilai Rp. 345.059.742

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Padang			
	Pembelian 1 Unit Alat Berat Stationary Generating Set	1	345.059.742

- BBPPKS Banjarmasin Pembangunan Pagar, Pos Satpam dan ATM di area Gedung Kantor Banjarbaru dengan Nilai Rp. 2.747.200.060

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Banjarmasin			
	Pembangunan Pagar, Pos Satpam dan ATM di area Gedung Kantor Banjarbaru	1	2.747.200.060

- BBPPKS Makassar Pembangunan dan rehabilitasi sarana kantor pada ruang makan, selasar asrama lantai 2, toilet/ruang transit VIP, atap selasar Asrama Putera, sumur artesis, aula, cafetaria, peninggian jalan dan Papan Nama Kantor dengan Nilai Rp. 5.071.487.866

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Makassar			
	Pembangunan dan rehabilitasi sarana kantor Kantor Banjarbaru	1	5.071.487.866

KOREKSI NILAI KDP

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat Mutasi pengurangan atas Koreksi Nilai KDP senilai Rp1.053.484.452 berupa temuan BPK atas kesalahan penganggaran belanja modal kesalahan penganggaran belanja modal kegiatan perluasan makam tahap III pada satker Direktorat K2KRS sebesar Rp.1.053.484.452. Pada tahun 2020 Direktorat K2KRS menganggarkan Belanja Modal yaitu berupa dalam pekerjaan perluasan makam tahap III sebesar Rp7.501.114.000 yang terdiri dari biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan sebesar Rp223.470.000 dan biaya pelaksanaannya sebesar Rp7.277.640.000. Diantaranya ada di belanja modal yang substansinya adalah Gedung dan bangunan sebesar Rp1.053.484.452.

Belanja Modal Tanah yang Substansinya Gedung dan Bangunan

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kapitalisasi
	A. Pekerjaan Pondasi	
1.	Pondasi Pagar Ornamen	Rp175.920.439
2.	Pondasi Pagar Gerbang	Rp5.175.000
3.	Tugu Monumen	Rp46.127.407
	Pondasi Pos Jaga Uk. (0,6+0,35) x	Rp12.227.140

	0,8 m	
	B. Pekerjaan Pasangan	
4.	Pasangan Pos Jaga Baru	Rp107.326.168
5.	Pasangan Gerbang	Rp74.418.268
6.	Pasangan Pagar Ornamen	Rp416.899.325
	C. Pekerjaan Renovasi Kantor TMPN	
7.	Area Mushola	Rp100.281.148
8.	Toilet Baru Mushola	Rp61.478.095
9.	Area Klinik dan Toilet	Rp53.631.462
	Total	Rp1.053.484.452

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Kurang nilai neraca Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan transaksi Koreksi Nilai KDP (504) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Koreksi Nilai KDP (504) senilai (Rp. 3.100.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSPDM “Dharma Guna” Bengkulu dikarenakan terdapat pengembalian belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (3.100.000)
	Jumlah	Rp (3.100.000)

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Bandung			4.850.000
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	4.850.000

Pengembalian Perjadin FUIlboard Expose

PENGHAPUSAN/ PENGHENTIAN KDP

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Padang			41.627.000
	Tanah Dalam Pengerjaan	1	41.627.000

SK MENSOS Tentang Penghapusan KDP Perencanaan Pembelian Tanah

REKLASIFIKASI KDP MENJADI BARANG JADI

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat Mutasi pengurangan atas Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi senilai Rp6.224.155.548 berupa temuan atas kesalahan penganggaran belanja modal kesalahan penganggaran belanja modal kegiatan perluasan makam tahap III pada satker Direktorat K2KRS sebesar Rp.1.053.484.452. Pada tahun 2020 Direktorat K2KRS menganggarkan Belanja Modal yaitu berupa dalam pekerjaan perluasan makam tahap III sebesar Rp7.501.114.000 yang terdiri dari biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan sebesar Rp223.470.000 dan biaya pelaksanaannya sebesar Rp7.277.640.000. Diantaranya ada di belanja modal yang substansinya adalah Gedung dan bangunan sebesar Rp1.053.484.452.

No	Uraian	Nilai
1	Tanah dalam Pengerjaan	Rp (6.224.155.548)
	Jumlah	Rp (6.224.155.548)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Kurang nilai neraca Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.2.737.786.498,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSAMPK "Handayani" Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (2,737,786,498)
	Jumlah	Rp (2,737,786,498)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.3.660.434.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA "Bambu Apus" Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (3,660,434,000)
	Jumlah	Rp (3,660,434,000)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.381.600.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSPDM "Phalamarta" Sukabumi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (381,600,000)
	Jumlah	Rp (381,600,000)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.527.687.517,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSPDSN "Mahatmiya" Bali dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (527,687,517)
	Jumlah	Rp (527,687,517)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.99.990.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSAMPK "Rumbai" Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (99,990,000)
	Jumlah	Rp (99,990,000)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.1.585.992.504,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSLU "Gau Mabaji" Makasar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (1,585,992,504)
	Jumlah	Rp (1,585,992,504)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.732.336.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSLU "Budi Dharma" Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (732,336,000)
	Jumlah	Rp (732,336,000)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.1.224.629.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tumotou" Manado dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (1,224,629,000)
	Jumlah	Rp (1,224,629,000)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.1.405.456.500,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSAMPK "Naibonat" Kupang dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (1,405,456,500)
	Jumlah	Rp (1,405,456,500)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.1.966.608.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSPDSN "Tan Miyat" Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (1,966,608,000)
	Jumlah	Rp (1,966,608,000)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.794.450.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSPDM "Budi Luhur" Banjar Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (794,450,000)
	Jumlah	Rp (794,450,000)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.813.616.230,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSPDM "Dharma Guna" Bengkulu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (813,616,230)
	Jumlah	Rp (813,616,230)

- Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) senilai (Rp.763.000.000,-) dikarenakan adanya pada Satuan Kerja BRSAMPK "Toddopuli dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (763,000,000)
	Jumlah	Rp (763,000,000)

- Terdapat transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) pada Satuan Kerja BRSEWTS "Mulya Jaya" Jakarta senilai (Rp. 1.790.754.764,-) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (1.790.754.764)
	Jumlah	Rp (1.790.754.764)

(05) DIITJEN. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
Direktorat PSKBA		(1)	(4,555,580,040)
	Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan	(1)	(4,555,580,040)

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

- Sekretariat Badiklitpensos Penyelesaian Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rp. 1.575.186.000

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Sekretariat Badiklitpensos			1.575.186.000
	Penyelesaian Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	1.575.186.000

- Poltekesos Bandung Kelanjutan Pembelian Tanah Tahun 2019 (Tahap 1) untuk kampus II di Soreang seluas 26.711 m2 Rp. 23.051.599.281

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
Poltekesos Bandung			
	Pembelian Tanah Tahap II	1	23.051.599.281

- BBPPKS Bandung Pengembangan Gedung Perpustakaan Permanen Rp. 7.052.718.000

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Bandung			-7.052.718.000
	Pengembangan Gedung Perpustakaan Permanen	1	-7.052.718.000

- BBPPKS Padang Stationary Generating Set Rp. 346.015.692

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Padang			346.015.692
	Tanah Dalam Pengerjaan	1	346.015.692

- BBPPKS Banjarmasin Pembangunan Pagar, Pos Satpam dan ATM di area Gedung Kantor Banjarbaru dengan Nilai Rp. 2.747.200.060

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Banjarmasin			
	Pembangunan Pagar, Pos Satpam dan ATM di area Gedung Kantor Banjarbaru	1	2.747.200.060

- BBPPKS Makasar Pembangunan dan rehabilitasi sarana kantor pada ruang makan, selasar asrama lantai 2, toilet/ruang transit VIP, atap selasar Asrama Putera, sumur artesis, aula, cafetaria, peninggian jalan dan Papan Nama Kantor dengan Nilai Rp. 5.273.712.866

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
BBPPKS Makasar			
	Pembangunan dan rehabilitasi sarana kantor Kantor Banjarbaru	1	(5.273.712.866)

BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 5 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS
Perolehan Barang Bersejarah	0
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0
Penghapusan Barang Bersejarah	0

E.2.3.4. BMN Rusak Berat

Pada saat suatu BMN diketahui kondisinya rusak, Satuan Kerja melakukan perubahan kondisi BMN dengan menerbitkan surat keterangan atas kondisi BMN tersebut. Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMN tersebut dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Setelah Pengguna Barang melakukan pengusulan kepada Pengelola Barang, selanjutnya Satuan Kerja melakukan reklasifikasi BMN tersebut ke dalam Daftar Barang Rusak Berat. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMN tersebut di dalam Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang E1, Posisi BMN di Neraca, dan Buku Barang. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu reklasifikasi BMN ke dalam Daftar Barang Rusak Berat pada aplikasi SIMAK-BMN).

Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN yang masuk dalam Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN yang masuk dalam Daftar Barang Rusak Berat per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 8.070.460.964,- (rincian terlampir)

E.2.3.5. BMN Hilang

Pada saat suatu BMN dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMN tersebut dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Setelah Pengguna Barang melakukan pengusulan kepada Pengelola Barang, selanjutnya Satuan Kerja melakukan reklasifikasi BMN tersebut ke dalam Daftar Barang Hilang. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMN tersebut di dalam Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang E1, Posisi BMN di Neraca, dan Buku Barang. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu reklasifikasi BMN ke dalam Daftar Barang Hilang pada aplikasi SIMAK-BMN). Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN yang masuk dalam Daftar Barang Hilang. Dalam hal BMN berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang ditemukan kembali, dilakukan pencatatan sebagaimana perolehan BMN, yaitu:

- a. Dicatat sebagai transaksi perolehannya apabila diperoleh pada tahun anggaran berjalan.***
- b. Dicatat sebagai transaksi saldo awal apabila diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan.***

Nilai BMN yang masuk dalam Daftar Barang Hilang per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 82.084.000,- (rincian terlampir)

E.2.3.6. Usulan BMN Hibah (DK/TP)

Pada saat suatu BMN (DK/TP) oleh Pengguna Barang dilakukan usulan hibah kepada Pengelola Barang dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Setelah Pengguna Barang melakukan pengusulan kepada Pengelola Barang, selanjutnya Satuan Kerja melakukan reklasifikasi BMN tersebut ke dalam Daftar Barang Usulan BMN Hibah (DK/TP). Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMN tersebut di dalam Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang E1, Posisi BMN di Neraca, dan Buku Barang. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu Usulan BMN Hibah (DK/TP) pada aplikasi SIMAK-BMN). Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN yang masuk dalam Daftar Barang Usulan BMN Hibah (DK/TP).

Nilai BMN yang masuk dalam Daftar Barang Hibah (DK/TP) per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 11.215.191.350,- (rincian terlampir)

F. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 (Audited) per akun neraca adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
1	Persediaan	480.185.394.440	480.185.394.440	-
2	Tanah	18.565.546.383.592	18.565.546.383.592	-
3	Peralatan dan Mesin	2.037.635.381.225	2.037.635.381.225	-
4	Gedung dan Bangunan	2.136.028.516.570	2.136.028.516.570	-
5	Jalan dan Jembatan	38.577.401.375	38.577.401.375	-
6	Irigasi	48.180.245.628	48.180.245.628	-
7	Jaringan	18.070.416.055	18.070.416.055	-
8	Aset Tetap dalam Renovasi	7.700.598.492	7.700.598.492	-
9	Aset Tetap Lainnya	15.117.486.622	15.117.486.622	-
10	KDP	2.194.436.815	2.194.436.815	-
11	Software	105.124.509.186	105.124.509.186	-
12	Lisensi	397.250.000	397.250.000	-
13	Aset Tak Berwujud	3.897.010.050	3.897.010.050	-
14	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	31.908.779.753	31.908.779.753	-
15	Aset tak berwujud yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	235.826.552	235.826.552	-
TOTAL		23.490.799.636.355	23.490.799.636.355	-

2. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- Unit akuntansi barang tidak dapat melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SIMAK BMN;
- Tidak dapatnya melakukan inventarisasi atas BMN yang dikuasainya dalam rangka mendukung keandalan laporan BMN.
- Aplikasi e-Rekon & LK masih banyak terdapat error aplikasi sehingga belum memadai untuk digunakan dalam penyusunan laporan BMN Triwulan Tahun 2018.

3. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pembinaan lebih lanjut terhadap petugas SIMAK-BMN.
- b. Perlu adanya komitmen pimpinan tingkat satker maupun tingkat pusat untuk meningkatkan SDM terhadap petugas SIMAK-BMN.
- c. Perlu adanya komitmen dari bagian Sak dalam menyampaikan dokumen kepada bagian SIMAK-BMN sebagai bahan pendukung untuk penyusunan laporan BMN
- d. Perlu adanya pendampingan dan monitoring terhadap satker dekonsentrasi dalam menyusun dan menyampaikan laporan BMN kepada Kementerian Sosial RI terkait penggunaan anggaran dekonsentrasi yang digunakan untuk belanja modal.

G. CATATAN PENTING LAINNYA

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (revaluasi) Barang Milik Negara. Menindaklanjuti hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, revaluasi dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 atas aset tetap berupa: tanah; gedung dan bangunan; serta jalan dan jembatan serta bangunan air.

Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2017 *unaudited*, dinyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017, bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset. Atas temuan pemeriksaan tersebut, **penyajian aset tetap hasil revaluasi harus bersifat menyeluruh dalam satu kelompok aset tetap**. Dengan demikian, karena pada Tahun 2017 belum semua Objek Revaluasi selesai dinilai kembali, **maka hasil revaluasi tahun 2017 tidak disajikan pada face Laporan Keuangan Tahun 2017, melainkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**.

Koreksi nilai hasil revaluasi dilakukan pada laporan keuangan tingkat K/L (LKKL). Laporan keuangan tingkat satker sampai dengan tingkat eselon I, serta laporan BMN dari tingkat satker sampai dengan tingkat K/L tidak dilakukan koreksi. Koreksi dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA, dan dilakukan oleh Satker Konsolidasi.

SEKRETARIAT JENDERAL

- a. Terdapat permasalahan pada Aset tanah dan Bangunan yang telah memiliki bukti kepemilikan tetapi masih dikuasai oleh pihak lain. Dengan Rincian Sebagai berikut :

NO	Kode Barang	Nama Barang	Alamat	Tanggal Perolehan	Kuantitas (m ²)	Status kepemilikan	NILAI	Keterangan/Digunakan	
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. TB.Simatupang. Pasar Rebo (Komnas Anak)	20-12-2010	960	SHP	Rp 3,596,160,000	Kantor Komnas Anak	
2	2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl.Kanguru. Kampung Gedong.Pasar Rebo (Belakang Kantor Komnas Anak)	20-12-2010	1,327	SHP	Rp 2,072,774,000	Masyarakat. pesiunan depsos	
6	2010301003	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	Jl. Depsos X Bintaro. Jakarta Selatan	30-06-1972	263	SHP	Rp 3,314,852,000		
7	2010301003	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	Jl. Depsos XIV Bintaro. Jakarta Selatan	30-06-1972	251	SHP	Rp 1,462,064,000		
8	2010301003	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	Jl. Depsos XIII Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1971	116	SHP	Rp 3,163,604,000		
9	2010301002	Tanah Lapangan Basket	Jl. Depsos III Bintaro (Depan masjid Komplek)	30-06-1972	1,930	SHP	Rp 24,325,720,000		
10	2010301001	Tanah Lapangan Tenis	Jl. Depsos XII Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1971	909	SHP	Rp 11,457,036,000		
11	2010106001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Jl. Depsos XIII Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1976	1,216	SHP	Rp 15,326,464,000		
12	2010104999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Jl. Depsos II Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1976	442	SHP	Rp 5,570,968,000		
13	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Jl. Depsos II Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1976	79	SHP	Rp 995,716,000		
14	2010104007	Tanah Bangunan Poliklinik	Jl. Depsos X No.1 dan 2 Bintaro. Jakarta Selatan (Aula sentra keg.warga komplek)	02-01-1976	413	SHP	Rp 5,205,452,000		Digunakan Masyarakat komplek depsos. tp ada oknum yg memungut sewa bangunannya (seharusnya jadi PNBP)
15	2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jl. Depsos II Bintaro. Jakarta Selatan (TK Tat Twan Asi)	30-06-1972	726	SHP	Rp 9,276,544,000		Digunakan untuk masyarakat umum sebagai sekolah TK (seharusnya jadi PNBP)
16	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Depsos XIV Bintaro No. 17	30-06-1972	124	SHP	Rp 1,562,896,000		Dikuasai eks.pesiunan depsos/Umang
17	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Depsos XIII Bintaro No.6	30-06-1972	131	SHP	Rp 1,651,124,000		Dikuasai eks.pesiunan depsos/Loso
18	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Depsos X No.17 A RTT Gol. II Bintaro an. Elmaren T	03-12-1972	120	SHP	Rp 1,512,480,000		Dikuasai eks.pesiunan depsos/Elmaren
19	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	jl. Depsos XI no. 39	02-01-1976	321	SHP	Rp 4,045,884,000	Dikuasai eks.pesiunan depsos/Yoso	

b. Terdapat nilai buku minus di aplikasi e-rekon terhadap asset di Satker Setjen dan Satker Pusdatin, sebagai berikut:

Validasi Nilai Buku

Show entries

No	SAP	Kode	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Rupiah Aset	Rupiah Susut	Rupiah Buku
1	Intrakomptabel	027.01.418939.000	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	3040104004	Lemari Penyimpan	16	0	4,393,812	-4,393,812
2	Intrakomptabel	027.01.440121.010	SEKRETARIAT JENDERAL	3100203017	External/ Portable Hardisk	6	0	1,312,500	-1,312,500
3	Intrakomptabel	027.01.440121.010	SEKRETARIAT JENDERAL	3100203017	External/ Portable Hardisk	7	0	1,312,500	-1,312,500

Sedangkan di Aplikasi SIMAK BMN nilai Aset tersebut **Tidak Minus**

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
S/D 16 JULI 2020

Tanggal : 16-07-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LDBMNSI

NAMA UAPKPB : 027.01.00.440121.010 BIRO HUMAS

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	TGL BUKU	JNS TRN	URAIAN TRANSAKSI	TGL OLEH	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	6	Buah	31/12/2018	101	Pembelian	31-12-2018	DBR		3,500,000
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	6	Buah	31/12/2018	S02	Penyusutan/ Amortisasi Reguler Sama steraan	--			-47,500
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	6	Buah	30/06/2019	S02					-47,500
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	6	Buah	31/12/2019	S02					-47,500
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	6	Buah	30/06/2020	S02					-47,500
										1,750,000
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	7	Buah	31/12/2018	101	Pembelian	31-12-2018	DBR		3,500,000
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	7	Buah	31/12/2018	S02	Penyusutan/ Amortisasi Reguler Sama steraan	--			-47,500
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	7	Buah	30/06/2019	S02					-47,500
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	7	Buah	31/12/2019	S02					-47,500
3.10.02.03.017	Eksterna/ Portable Hardisk	7	Buah	30/06/2020	S02					-47,500
										1,750,000
										3,500,000

NAMA UAPKPB : 027.01.00.418939.000 PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode Lap. : LDBMNSI

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	TGL BUKU	JNS TRN	URAIAN TRANSAKSI	TGL OLEH	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	16	Buah	23/12/2019	101	Pembelian	23-12-2019	DBR		35,150,500
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	16	Buah	31/12/2019	S02	Penyusutan/ Amortisasi Reguler Sama steraan	--			-4,393,812
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	16	Buah	30/06/2020	S02					-4,393,812
										26,362,875
										26,362,875

Hal tersebut sudah kami konsultasikan ke pihak DJKN Kementerian Keuangan dan sampai saat belum ada jawaban.

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19

BELANJA BARANG MILIK NEGARA (COVID19) TAHUN 2020

No.	Kd. Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total	Keterangan
1	3050204006	Kipas Angin	5	5.000.000	25.000.000	Kipas Angin Disinfektan
2	3050204006	Kipas Angin	4	1.500.000	6.000.000	Kipas Angin Disinfektan
3	3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	10.600.000	63.600.000	Wastafel
4	3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	24.500.000	49.000.000	Blue Air Purifier
5	3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2	160.000.000	320.000.000	Box Seterilisasi Tubuh
6	3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	200.000.000	200.000.000	Box Seterilisasi Tubuh
7	3080306039	Infrared Thermometer	20	2.650.000	53.000.000	Thermometer Gun SPC
TOTAL			40		716.600.000	

d. Terdapat permasalahan pada Aset tanah dan Bangunan belum memiliki bukti kepemilikan dan dikuasai oleh pihak lain Dengan Rincian Sebagai berikut :

TEMUAN	RENCANA TINDAK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Aset tetap senilai Rp. 22,501 Miliar masih bermasalah dan senilai Rp. 706,034 Miliar dimanfaatkan pihak lain serta senilai Rp. 15,841 Miliar belum memiliki bukti kepemilikan; yaitu:	
Tanah dan bangunan senilai Rp. 22,501 Miliar dalam sengketa dengan pihak ketiga dan dalam proses peradilan.	1. Tanah seluas 700 m berikut bangunannya di Jl. Bangunan Barat No.2 Kampung Ambon, Jakarta Timur senilai Rp. 14,861 milyar menjadi aset Kementerian Sosial setelah dilakukan serah terima dari pihak Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 19 April 1982 kepada Departemen Sosial berdasarkan Surat Perintah Kepada Kejaksaan Tinggi Maluku No. Prin01/01/1982 dan Surat Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI tanggal 11 Februari 1982 No. B348/II3/11/1982 tentang barangbarang ex. milik Drs. H.R. Hollo, S.Th. Tanah tersebut bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan masa 20 tahun, berakhir 26 Mei 1995.atas nama Muhammad Bilfaqih. Hingga saat ini tanah tersebut masih dikuasai pihak ketiga dengan dasar perjanjian jual beli No. 220 tanggal 26 September 1986 dihadapan notaris. Fakta yang ada dilapangan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut tidak diketahui siapa yang menyimpan dan

	<p>sudah dilaporkan sebagai barang hilang kepada pihak kepolisian. Selain itu dokumen asli persetujuan Menteri Keuangan RI dan serah terima antara Kejaksaan Negeri Ambon dengan Kementerian Sosial sudah tidak diketahui dimana aslinya, yang ada saat ini hanya foto copynya saja. Dari hasil penelusuran bahwa aset tersebut sebelum diterima oleh Kementerian Sosial pada masa lalu telah diserobot oleh Keluarga Hollo yang dijual kepada Keluarga Asep Ahmad, sehingga sampai saat ini Kementerian Sosial mengalami kesulitan atas bukti Kepemilikan terhadap putusan pengadilan. Halhal tersebut diketahui berdasarkan kronologis (cerita), sedangkan dokumen yang terkait dengan penyerahan aset tersebut tidak pernah ada.</p>
	<p>2. Tanah seluas 1.911 m2 berikut bangunan di Jl. Kolam No.12, Ciumbeuluit, Bandung senilai Rp. 7,64 miliar. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2680/Pdt/K/1998 tanggal 17 Februari 2000 pemilik yang sah atas tanah ini adalah Kementerian Sosial. Namun hingga sekarang bangunan dan tanah ini belum bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial. Namun demikian permasalahan ini belum selesai begitu saja sehingga aset tersebut masih dicatat oleh Biro Umum dan akan diajukan kembali dengan mengajukan buktibukti baru oleh Pusat Kajian Hukum ke pengadilan Negeri Bandung.</p>
<p>Tanah dan bangunan senilai Rp.706,034 Miliar, dimanfaatkan/dikuasai oleh pihak lain tanpa perjanjian yang jelas.</p>	<p>Tanah seluas 74.000 m2 dan senilai Rp. 706,034 Miliar di Jl. Karanganyar, Sawah Besar Jakarta Pusat masih dikuasai oleh masyarakat, sehingga pihak Kementerian Sosial tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Kementerian Sosial akan berupaya untuk memperoleh aset tersebut.</p>
<p>Tanah dan bangunan yang belum memiliki bukti kepemilikan senilai Rp 15,841 Miliar, yaitu :</p>	<p>Tanah seluas 700 m2 senilai Rp. 14,861 Miliar di Jl. Pondasi ,Kampung Ambon, Pulogadung, Jakarta Timur masih dikuasai oleh pihak ketiga dan tanah seluas 420 m2 senilai Rp. 980.280.000 di Jl. Subali III, Tugu, Semarang Jawa Tengah masih dikuasai oleh pihak ketiga (para pensiunan dan pegawai ex.kanwil</p>

	deposos Jateng) sehingga pihak Kementerian Sosial tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Kementerian Sosial akan berupaya untuk memperoleh kembali aset tersebut.
--	---

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
Satuan Kerja pada Satker PKAT

Masih tersajinya atau masih tercatatnya Persediaan dalam Proses pada Satker Tugas Pembantuan (TP) seharusnya sudah tidak boleh lagi ada pencatatan dikarenakan sudah tidak ada lagi dana bantuan untuk pembangunan Rumah KAT.

No	Satker	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat Dalam-Proses Audited	JUMLAH
1	Dinsos NTT	Rp 174.146.536	Rp 174.146.536
2	Dinsos Kab Nunukan	Rp 619.075.600	Rp 619.075.600
3	Dinsos Asmat	0	
4	Dinsos Papua	Rp 204.494.002	Rp 204.494.002
	Jumlah	Rp 997.716.138	Rp 997.716.138

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

- a. Pada *Satuan Kerja Direktorat KP NAPZA* masih terdapat barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai **Rp. 87.262.558.140,-** dari pembangunan IPWL, PIE beserta sarana dan prasarana yang sampai dengan saat ini masih tercatat pada laporan persediaan, dengan rincian sebagai berikut :

SATUAN KERJA	NAMA	NILAI
Direktor KPNAPZA	Tanah Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	76,627,390,481
	Peralatan dan Mesin Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	10,635,167,659
JUMLAH		87,262,558,140

Rekomendasi :

-Melakukan percepatan proses permohonan atas hibah berupa tanah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (Direktorat KPNAPZA) sesuai dengan arah kebijakan operasional IPWL dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- b. Pada **Satuan Kerja Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak** masih terdapat barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai **Rp. 7.782.952.817,-** berupa **Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Bantuan Dengan Hukum (LPKS ABH) / barang persediaan unruk diserahkan ke masyarakat**, dengan rincian sebagai berikut :

Satuan Kerja	NAMA	NILAI
Direktorat KSA	Tanah Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	1,696,415,000
	Peralatan dan Mesin Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	2,999,009,467
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Di Serahkan Kepada Masyarakat	1,700,516,000
	Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	985,000
	Aset Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1,386,026,850
JUMLAH		7,782,952,317

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada **Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak** akan dilakukan proses pembuatan Naskah Perjanjian Hibah kepada setiap Provinsi penerima untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Hibah BMN dari Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI.

c. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Masih terdapat Konturksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp. 206.197.213,-** pada **Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dikarenakan pada tahun 2016 terdapat pekerjaan perencanaan konturksi pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial yang di dalamnya terdiri 3 (tiga) kawasan pada saat ini sedang proses usulan penghapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan :

1. Gedung dan bangunan untuk Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
2. Gedung dan bangunan untuk Rehabilitasi Sosial ODHIV.
3. Gedung dan bangunan untuk Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC).

Pembangunan fisik dari paket pekerjaan perencanaan tersebut telah dilaksanakan untuk pembangunan gedung dan bangunan Rehabilitasi sosial Penyalahgunaan NAPZA tahun 2017 dan 2018 dan pembangunan gedung dan bangunan Rehabilitasi Sosial ODHIV tahun 2019, tetapi untuk pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan terdapat Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp. 206.197.213,-**. Tahun yang akan datang tidak dilaksanakan pembangunan fisik untuk RPTC dengan pertimbangan :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tidak terdapat alokasi anggaran.
2. Alokasi belanja modal yang ada diprioritaskan untuk optimalisasi UPT Ditjen Rehabilitasi Sosial dalam rangka peningkatan status Panti menjadi Balai.
3. Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini telah ada 5 (lima) unit UPT, sehingga perlu meningkatkan layanan UPT di provinsi lain.

- d. Pada **Satuan Kerja Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila "Mulya Jaya" Jakarta** terdapat pekerjaan fisik berupa rehabilitasi bangunan gedung Graha Atensi dalam rangka penanganan covid 19 dan sarana prasaran pendukung berupa peralatan dan mesin beserta barang persediaan sebagai pendukung operasional penanganan covid 19 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan Kerja	NAMA	NILAI
BRSEWTS Mulya Jaya	Barang Persediaan	27,995,000
	Peralatan dan Mesin	635,360,000
	Gedung dan Bangunan	992,803,500
JUMLAH		1,656,158,500

- e. Berdasarkan hasil verifikasi laporan keuangan dan laporan barang milik Negara terdapat Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang terdapat *belanja barang dengan mata anggaran keluaran (521111)* belanja keperluan perkantoran pembentuk aset tetap yang terkapitalisasi pada klasifikasi aset ekstrakomptabel yang nilai perolehannya di bawah nilai kapitalisasi aset *senilai Rp.1.000.000,- sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*, dengan rincian Satuan kerja sebagai berikut :

NO	AKUN NERACA	JENIS BARANG	NILAI PEROLEHAN
1	BRSKPNAPZA Insyaf Medan	Peralatan dan Mesin	Rp. 5,800,000
2	BRSAMPK Alyatama Jambi	Peralatan dan Mesin Belum diregister	Rp. 5,696,000
	JUMLAH		Rp. 11,496,000

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial :

- Terdapat 2 provinsi yang belum mampu melaporkan atau melakukan kegiatan opsik, adapun 2 provinsi tersebut yaitu : Papua Barat yang tidak melaporkan opsik semester II, serta Kalimantan Utara yang tidak melaporkan opsik SMT I dan II. Selanjutnya bagi daerah yang tidak melakukan opsik berhubung batas waktu yang sudah ditentukan dan memiliki kendala pada teknis pelaporan seperti kurangnya pemahaman terhadap petugas baru di daerah, serta aplikasi yang telah terupdate perlu dilakukan pemanduan dalam prosesnya sehingga kurangnya waktu yang cukup dalam menyelesaikannya.
- Pada barang paket sandang di anak satker yaitu Provinsi Bangka Belitung terdapat kuantitas sejumlah 22 dengan nilai Rp. 27,273,400, sedangkan pada satker pusat PSKBS kuantitasnya tetap terbaca namun tidak dengan nilainya, sehingga pada satker pusat atau penggabungan nilai pada barang paket sandang tidak terbaca atau terbaca "0" Hal ini terjadi akibat dari anak satker yang belum menginput barang keluar tersebut melalui menu penyerahan bansos kepada masyarakat, dan langsung melakukan opsik.
Solusi yang dilakukan menginput barang keluar paket sandang tersebut sesuai dengan dokumen pendukung (BAST) yang ada. Adapun rincian BAST Provinsi Bangka Belitung pada paket sandang dimana saldo awal januari 2020 sejumlah 547 dan mengalami pengurangan 525 sehingga total saldo akhir berjumlah 22.
- Terdapat kuantitas pada barang tempat sayur melamin sejumlah 171 yang terdiri dari anak satker yaitu Provinsi Kepulauan Riau 91, Maluku 10, dan

Jawa Barat 70 dengan total seluruhnya Rp. 2.073.375,- namun pada satker pusat PSKBS hanya terbaca kuantitasnya saja sejumlah 171 namun tidak pada nilainya. Setelah ditelusuri hal ini terjadi akibat dari anak satker pada Provinsi Maluku Utara yang belum menginput barang keluar sejumlah 80 tersebut melalui menu penyerahan bansos kepada masyarakat, dan langsung melakukan opsik.

Dampaknya pada provinsi lain yang telah melakukan penginputan dengan benar pun tidak dapat terbaca nilai dari kuantitasnya pada satker pusat.

Solusi yang dilakukan dengan menginput keluar barang tempat sayur melamin tersebut sesuai dengan dokumen pendukung (BAST) yang ada.

- Jumlah seluruh paket perlengkapan bermain tahun 2019 per 31 Desember 2020 yang ada di Provinsi dan Pusat yaitu 65 paket.

Permasalahan ada pada harga paket yang masih menggunakan harga lama dimana harga perpaketnya yaitu Rp. 1.967.707,- sehingga nilai yang ada pada persediaan Dit. PSKBS senilai Rp. 127.900.955,-.

Seharusnya harga paket bermain tahun 2019 yaitu Rp.1.802.567,- hal ini terjadi akibat adanya temuan kemahalan harga oleh Itjen pada akhir tahun 2019 sehingga dilakukan koreksi .

Koreksi yang dilakukan dalam aplikasi:

Apabila mengikuti harga setelah perubahan koreksi menjadi:

$$65 \times 1.967.707 = 127.900.955,-$$

$$65 \times 1.802.567 = 117.166.855,-$$

$$\text{Selisih} = 10.734.100,-$$

Solusi yang dilakukan dengan menginput pada harga perpaketnya di aplikasi dengan menggunakan harga barang yang terbaru.

- Untuk bantuan sembako Presiden sudah dilakukan pencatatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) penerima bansos sembako mulai dari tahap 1 sampai dengan 12 serta bansos sembako komunitas 1 dan 2 se-JABOTABEK . Bukti berita acara serah terima barang bantuan paket sembako sudah dilengkapi seluruhnya dan diberikan fisiknya secara langsung kepada tim pemeriksa.

2. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

- Terdapat selisih Transfer keluar sebesar Rp. 8.023.583.578,- Hal ini muncul akibat pengiriman barang berupa paket Family Kit sebanyak 20.000 paket dengan rincian ke Gudang Regional Palembang sebanyak 10.000 paket dan Gudang Regional Makassar sebanyak 10.000 paket. Barang tersebut dikirim pada akhir Desember 2020 dan baru diterima di Palembang dan Bekasi pada bulan Januari 2020.
- Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di Dit PSKBA terjadi dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Terdapat pembelian Mobil Dumlap sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp. 569.447.505,- dengan total harga Rp. 4.555.580.040,-
 - b. Proses pembayaran dilakukan dengan dua termin, masing-masing

Rp. 2.733.348.024,- dan Rp. 1.822.232.016,-

- c. Pengimputan pada aplikasi adalah, dipilih mobil workshop sebanyak 1 unit dengan total 4.555.580.040,- lalu aset dimaksud direklas keluar dan diimput lagi reklas masuk berupa mobil DUMLAP sebanyak 8 unit dengan harga per unit Rp. 569.447.505,- sehingga reklas masuk tetap sama. Teknik ini dilakukan sesuai arahan dari Pembina kami,. Kenapa dipilih mobil workshop? Karena bila digunakan langsung mobil DUMLAP maka akan ada satu NUP yang pada akhirnya tidak terpakai, ini adalah salah satu proses sistem.
- Selama kurun waktu tahun 2020, Direktorat PSKBA melakukan pembelanjaan sebesar Rp. 232.123.321.952,- dengan rincian akun sebagai berikut :
 - b. Belanja bahan (521811) sebesar Rp.682.840.000,-
 - c. Belanja untuk penyerahan kepada masyarakat (526311) Rp. 46.579.401.000
 - d. Belanja Bantuan Sosial (576112) sebesar Rp.172.734.100.912,-
 - e. Belanja Modal (523112) sebesar Rp 12.126.980.040,-
- Terdapat koreksi atas Saldo pada Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.456.162.132,- dimana terdapat barang yang semula sudah dianggap keluar padahal masih merupakan saldo yang tersimpan pada masing-masing Suku Dinas yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian barang yang dikoreksi adalah sebagai berikut :
 - d. Velbed 198 paket Rp. 140.185.782
 - e. Selimut Merah 514 lembar Rp. 73.424.900
 - f. Kids Ware 55 paket Rp. 25.742.750
 - b. Matras 352 lembar Rp. 39.811.200
 - c. Kasur merah 415 lembar Rp. 176.997.500

3. Direktorat JAMSOSKEL

- Pada Tahun 2020 terdapat Pembelian Software untuk pengembangan Aplikasi SIM e-PKH meliputi :
 - a. Pengembangan apk core berbasis web
 - b. Pengembangan aplikasi mobile
 - d. Pengembangan views
 - e. Pengembangan DWH dan DI
 - f. Dst.
- Pembayaran dilakukan dengan 3 kali termin total Rp. 3.906.100.000,-:
 - a. Termin 1 30% Rp. 1.171.830 tanggal 12 Nov 2020
 - b. Termin 2 40% Rp. 1.093.708.000 tanggal 11 Desember 2020
 - c. Termin 3 30% Rp. 1.640.562.000,- tanggal 29 Desember 2020
- Pengimputan ke dalam apk sebagai berikut :
 - a. Inputan awal pada Transaksi KDP – Perolehan (untuk termin 1)
 - b. Pengembangan: Transaksi KDP – Pengembangan (termin 2 da 3)
 - c. Transaksi BMN – Perubahan BMN – Pengembangan aset berupa Software dengan KDP

4. Sekretariat

- Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat pengadaan Belanja Modal dengan akun 532111 senilai Rp. 185.603.000,- didalamnya terdapat belanja Renovasi Gedung dan Bangunan senilai Rp. 42.900.000,-
- Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Roda4 sebanyak 4 unit yang sudah

dilakukan pemindahtanganan (dilelang) belum dilakukan penghapusan menunggu terbitnya Surat Keputusan Penghapusan

5. Pengadaan Baju PKH yang memakai akun belanja 521119 dan 521219 yang belum tersalurkan sehingga harus dimasukkan ke dalam persediaan terdapat pada provinsi:

No	Provinsi	Belum tersalur	total	Keterangan
1	Jawa Timur	375	47,291,259	Sudah di input
2	Bali	12	2,388,000	Sudah di input
3	Kalimantan Timur	18	6,292,800	Sudah di input
4	Nusa Tenggara Barat	4	539,880	Sudah di input
5	Bengkulu	19	3,790,500	Sudah di input
6	Aceh	14	2,310,000	Belum diinput
7	Sulsel	37	5,550,000	Belum diinput
8	Gorontalo	7	1,400,000	Belum diinput

Untuk Provinsi Aceh, Sulsel dan Gorontalo sampai tanggal penyusunan laporan Keuangan Audited masih dalam proses pengumpulan BAST dan Pengimputan oleh Petugas SIMAK.

Jakarta, 23 Februari 2021
SEKRETARIS JENDERAL,

HARTONO LARAS
NIP.19630306 198503 1 005



#KEMENSOS

Hadir



2020



www.kemsos.go.id



Kemensos RI



kemensosri